BUKU 1

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH

RKPA

TAHUN 2027



SALINAN

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

9. Peraturan.../2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
19. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

20. Qanun.../3

20. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3);
21. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8);
22. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2027.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2027 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.
(2) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2027 memuat:
    a. rancangan kerangka ekonomi Aceh;
    b. prioritas program Aceh;
    c. rencana kerja; dan
    d. pendanaan dan prakiraan maju termasuk di dalamnya arah kebijakan umum dan program pembangunan Aceh Tahun 2027.
(2) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
    a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2027;
    b. pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027.
    c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2027.

Pasal.../3

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Juni 2026
10 Muharram 1448

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Juni 2026
10 Muharram 1448

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. M. YASIR PUTRA UTAMA, SH, M.H

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-8
1.4. Maksud dan Tujuan I-12
1.5. Sistematika Dokumen RKPA I-12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH II-1

2.1. Gambaran Umum Aceh II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.1.2. Karakteristik Demografi II-20
2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah II-23
2.1.1.4. Indeks Risiko Bencana II-24
2.1.1.5. Indeks Ketahanan Daerah II-32
2.1.1.6. Sosiologi II-33
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-33
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-33
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II-58
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya II-66
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-73
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh II-73
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib II-86
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan II-203
2.1.3.4. Penunjang Urusan II-260
2.1.3.5. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) II-273
2.1.3.6. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-275
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPA II-292
2.2.1. Realisasi Pendanaan Tahun 2025 ..... II-292
2.2.1.1. Realisasi Pendapatan Tahun 2025 ..... II-292
2.2.1.2. Realisasi Belanja Tahun 2025 ..... II-297
2.2.1.3. Realisasi Pembiayaan Tahun 2025 ..... II-299
2.2.1.4. Tren APBA II-300
2.2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan II-301
2.2.2.1. Metode Evaluasi II-301
2.2.2.2. Hasil Evaluasi RKPA Tahun 2025 ..... II-302
2.2.2.3. Hasil Capaian Kinerja RPA Tahun 2023-2026 ..... II-314
2.3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-339
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah II-342

2.5. Isu Strategis II-356
2.6. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran II-365
2.7. Inovasi II-368

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN ACEH III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi III-1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Global III-1
3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional III-2
3.1.3. Kondisi Perekonomian Aceh III-3
3.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi III-4
3.1.3.2. Inflasi III-7
3.1.3.3. Gini Ratio III-9
3.1.3.4. Kemiskinan III-12
3.1.3.5. Pengangguran III-15
3.1.3.6. Kinerja Investasi III-17
3.1.3.7. Kinerja Perdagangan III-21
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Aceh III-28
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Aceh III-28
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Aceh III-32
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Aceh III-34

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional IV-1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh IV-3
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027 ..... IV-19
4.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional 2027 ..... IV-19
4.2.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027 ..... IV-29

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-1

5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh V-2
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kota V-3
5.2.1. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 ..... V-3
5.2.2 Target Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten/Kota di Aceh V-22
5.3 Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota V-27

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ACEH VI-1

6.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bersumber dari APBN Tahun 2027 ..... VI-1
6.2 Hasil kesepakatan Musrenbangnas Tahun 2026 ..... VI-3
6.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Bersumber dari APBD Tahun 2027 ..... VI-7
6.4 Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun 2027 ..... VI-9
6.5 Dukungan Daerah Terhadap RKP 2027 ..... VI-26

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

8.1. Pedoman Transisi VIII-2
8.2. Kaidah Pelaksanaan VIII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pendekatan Perencanaan Pembangunan I-3

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Aceh II-2
Gambar 2. 2 Peta Topografi Aceh II-3
Gambar 2. 3 Peta Geologi Aceh II-4
Gambar 2. 4 Peta Kemiringan Lereng Aceh II-6
Gambar 2. 5 Peta Jenis Tanah Aceh II-7
Gambar 2. 6 Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh II-9
Gambar 2. 7 Peta Batas DAS di Wilayah Aceh II-11
Gambar 2. 8 Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Aceh II-15
Gambar 2. 9 Peta Curah Hujan Aceh II-20
Gambar 2. 10 Struktur Penduduk Aceh Tahun 2025 (Jiwa) II-22
Gambar 2. 11 Data Bencana Aceh Tahun 2017-2025 ..... II-26
Gambar 2. 12 Peta Rawan Bencana Gempa Aceh II-28
Gambar 2. 13 Peta Risiko Bencana Banjir Aceh II-29
Gambar 2. 14 Peta Indeks Rawan Bencana Aceh II-31
Gambar 2. 15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, dan Nasional, Tahun 2019- 2024 (Persen) II-34
Gambar 2. 16 Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Migas dan non Migas Tahun 2019-2024 ..... II-35
Gambar 2. 17 Laju Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2024 (y-on-y) (Persen) II-40
Gambar 2. 18 Laju Inflasi Aceh dan Nasional (y-on-y) (Persen) II-41
Gambar 2. 19 PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB II-45
Gambar 2. 20 Gini Rasio Aceh di Perkotaan dan Perdesaan Periode Maret 2019-Maret 2024 ..... II-47
Gambar 2. 21 Gini Rasio Aceh dan Nasional, 2019-2024 ..... II-47
Gambar 2.22 Perkembangan Nilai Indeks Williamson Tahun 2021-2025 ..... II-50
Gambar 2. 23 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-51
Gambar 2. 24 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Perkotaan dan Perdesaan Aceh Tahun 2021-2025 ..... II-53
Gambar 2. 25 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Perkotaan dan Perdesaan Aceh Tahun 2021-2025 ..... II-54
Gambar 2. 26 Garis Kemiskinan Aceh Tahun Tahun 2024-2025 ..... II-55
Gambar 2. 27 Perkembangan TPT Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-56
Gambar 2. 28 Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2025 ..... II-62
Gambar 2. 29 Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2025 ..... II-63
Gambar 2. 30 Umur Harapan Hidup Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-64

Gambar 2. 31 Usia Harapan Hidup di Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2025II-64
Gambar 2. 32 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2025 ..... II-66
Gambar 2. 33 Perkembangan indeks pembangunan kebudayaan Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 (Data Termutakhir)..... II-72
Gambar 2. 34 Jumlah Pendapatan Zakat dan Infak Tahun 2021-2025 ..... II-78
Gambar 2. 35 Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2021-2025 ..... II-79
Gambar 2. 36 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Menengah Provinsi Aceh Tahun 2021-2025 ..... II-87
Gambar 2. 37 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia 16-18 Tahun 2021-2025 ..... II-88
Gambar 2. 38 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Aceh 2021-2025..... II-103
Gambar 2. 39 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Aceh Tahun 2021-2025 .. II-105
Gambar 2. 40 Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh..... II-115
Gambar 2. 41 Pembagian Wilayah Sungai Aceh II-118
Gambar 2. 42 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak II-120
Gambar 2. 43 Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2021-2025 ..... II-124
Gambar 2. 44 Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha, Agustus 2026 ..... II-130
Gambar 2. 45 Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh, Tahun 2019-2024..... II-131
Gambar 2. 46 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2021-2025 ..... II-132
Gambar 2. 47 Indeks Pembangunan Gender Aceh Tahun 2020 -- 2024 ..... II-133
Gambar 2. 48 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh Tahun 2019 -- 2024 ..... II-133
Gambar 2. 49 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Aceh Dan Indonesia (IKG) II-134
Gambar 2. 50 Perbandingan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Aceh dan Indonesia II-135
Gambar 2. 51 Perbandingan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Aceh dan Indonesia II-136
Gambar 2. 52 Perbandingan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Aceh dan Indonesia II-137
Gambar 2. 53 Perbandingan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2020-2023 ..... II-138
Gambar 2. 54 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2021-2025 ..... II-140
Gambar 2. 55 Jumlah Laporan Sengketa dan Konflik yang Terjadi Berdasarkan Tipologi II-145
Gambar 2. 56 Tahapan Penyusunan RPPLH Aceh II-153
Gambar 2. 57 Status Desa di Aceh Tahun 2021-2025..... II-157
Gambar 2. 58 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2025 . II-161
Gambar 2. 59 Rasio Ijin Trayek di Aceh Tahun 2020-2025..... II-162
Gambar 2. 60 Prasarana Transportasi Aceh II-163

Gambar 2. 61 Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Aceh Tahun 2020-2025 .....II-165
Gambar 2. 62 Jumlah proyek PMA berdasarkan lokasi kab/kota Tahun 2025 .....II-181
Gambar 2. 63 Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2021-2025 (Triliun).....II-182
Gambar 2. 64 Perbandingan capaian setiap domain Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2024 .....II-187
Gambar 2. 65 Indeks Pembangunan Olahraga Aceh dan Nasional tahun 2024.....II-191
Gambar 2. 66 Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2020-2025.....II-195
Gambar 2. 67 Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2020-2025.....II-196
Gambar 2. 68 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Aceh Tahun 2021-2025 .....II-197
Gambar 2. 69 Jumlah Pengunjung pada Layanan Arsip/JIKN Tahun 2020-2025.....II-201
Gambar 2. 70 Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB Aceh (Persen). Tahun 2021 -- 2025 .....II-204
Gambar 2. 71 Capaian Pembangunan Kepariwisataan Tingkat Provinsi.....II-206
Gambar 2. 72 Gambar Capaian IPKN Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2023 Per Sub indeks II-207
Gambar 2. 73 PDRB ADHB Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2021-2025 .....II-209
Gambar 2. 74 PDRB Menurut Sub Sektor di Aceh Tahun 2021 -- 2025 .....II-210
Gambar 2. 75 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian.....II-211
Gambar 2. 76 Luas Lahan baku Sawah Menurut Kabupaten/Kota II-211
Gambar 2. 77 Perkembangan Produksi Padi di Provinsi Aceh (Ton) Tahun 2021−2025 .....II-212
Gambar 2. 78 Perkembangan Produksi Padi di Provinsi Aceh (Ton-GKG), 2021−2025 .....II-213
Gambar 2. 79 Perkembangan Produksi Jagung di Provinsi Aceh (Ton-GKG), 2021−2025 .....II-214
Gambar 2. 80 Proporsi Komoditi pada sub Sektor Perkebunan.....II-216
Gambar 2. 81 Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Jenis Komoditas di Aceh.....II-217
Gambar 2. 82 Jumlah Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Aceh.....II-218
Gambar 2. 83 Jumlah Petani Pekebun Menurut Jenis Komoditas II-219
Gambar 2. 84 Luas deforestasi di Aceh pada Periode 1990--2017.....II-226
Gambar 2. 85 Akumulasi Deforestasi dan Jumlah Kejadian Karhutla tahun 2003-2023 .....II-229
Gambar 2. 86 Capaian Perhutanan Sosial Aceh S.D 2024.....II-239
Gambar 2. 87 Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Aceh II-241
Gambar 2. 88 Kontribusi Subsektor Listrik Dan Gas Terhadap PDRB Aceh Tahun 2021-2025 .....II-244
Gambar 2. 89 Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Provinsi Aceh Tahun 2021-2025 .....II-246

Gambar 2. 90 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan Tahun 2021-2025 .....II-247
Gambar 2. 91 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2021-2025 .....II-248
Gambar 2. 92 Persentase Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Provinsi Aceh Tahun 2021-2025 .....II-250
Gambar 2. 93 Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Aceh (persen) Tahun 2021-2026.....II-251
Gambar 2. 94 Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan Terhadap Total PDRB Aceh Tahun 2020-2024 .....II-254
Gambar 2. 95 Peta Fishing Ground Ikan Tuna Provinsi Aceh.....II-256
Gambar 2. 96 Peta Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Berbasis Mukim.....II-257
Gambar 2. 97 Konsumsi Ika Provinsi Aceh Per kapita Tahun 2019-2025 .....II-258
Gambar 2. 98 Konsumsi Ikan Provinsi Aceh Per Kapita Tahun 2019-2023.....II-258
Gambar 2. 99 Diklat Teknis Fungsional --- Aparatur Pemerintah Aceh Jumlah PNS, Peserta Diklat, dan Persentase Keikutsertaan (2021--2025).....II-263
Gambar 2. 100 Diklat Struktural Kepemimpinan --- Pejabat Pemerintah Aceh Peserta PKN Tk. II, PKA, dan PKP per tahun (2021--2025).....II-264
Gambar 2. 101 Capaian SPIP-T dan K-APIP Aceh tahun 2021 - 2025 .....II-268
Gambar 2. 102 Skor Capaian MCSP KPK Tahun 2025 .....II-269
Gambar 2. 103 Tren Capaian MCSP Tahun 2021-2025 .....II-269
Gambar 2. 104 Grafik Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2020 – 2025 .....II-272
Gambar 2. 105 Kerangka IDSD 2024.....II-274
Gambar 2. 106 Skor IDSD 2024 Provinsi Aceh.....II-275
Gambar 2. 107 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Makanan Dan Non Makanan) Tahun 2019-2024 .....II-276
Gambar 2. 108 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), 2021−2025.....II-278
Gambar 2. 109 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Berdasarkan Sub Sektor, ...II-279
Gambar 2. 110 Indeks Keterbukaan Ekonomi Aceh Tahun 2021-2025.....II-281
Gambar 2. 111 Perkembangan DPK, Pembiayaan dan FDR Tahun 2024-2025 .....II-283
Gambar 2. 112 Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan II-284
Gambar 2. 113 Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak 2021-2025.....II-288
Gambar 2. 114 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan II-290
Gambar 2. 115 Rasio Elektrifikasi Aceh Tahun 2021-2025 .....II-291
Gambar 2. 116 Pendapatan Asli Aceh Tahun 2021-2025 (dalam triliyun rupiah) II-296
Gambar 2. 117 Struktur Pendapatan Aceh Tahun 2025 .....II-296
Gambar 2. 118 Struktur Belanja Aceh Tahun 2025.....II-299
Gambar 2. 119 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2020-2024 (Dalam Triliun Rupiah).....II-300
Gambar 2. 120 Struktur Realisasi Belanja Program/Kegiatan RKPA Tahun 2025.....II-307

Gambar 2. 121 Target dan Realisasi Indikator Pembangunan Aceh terhadap Target Tahun 2023-2026 ..... II-309
Gambar 2. 122 Capaian SPM Provinsi Aceh Tahun 2021-2025 ..... II-340
Gambar 2. 123 Capaian SPM Provinsi Aceh Per Bidang Tahun 2021-2025 ..... II-340
Gambar 2. 124 Capaian SPM Seluruh Bidang Se-Aceh e-SPM Tahun 2025 ..... II-341
Gambar 2. 125 Alur Pengajuan Pokok Pokok Pikiran DPRA II-365
Gambar 2. 126 Nilai Indeks Inovasi Aceh Tahun 2021-2025 ..... II-369
Gambar 2. 127 Distribusi Tahapan Inovasi Daerah Provinsi Aceh Tahun 2025 ..... II-370
Gambar 2. 128 Distribusi Tahapan Inovasi Daerah Provinsi Aceh Tahun 2025 ..... II-370
Gambar 2. 129 Persentase Jenis Inovasi Daerah Provinsi Aceh Tahun 2025 ..... II-371
Gambar 2. 130 Performa Inovasi Aceh Tahun 2025 ..... II-371

Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan I - 2026 (y-on-y) (persen) ... III-3
Gambar 3. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan I - 2026 (y-on-y) (persen) III-5
Gambar 3. 3 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Triwulan I - 2026 (y-on-y) (persen) ... III-5
Gambar 3. 4 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan I - 2026 (y-to-y) (persen) III-6
Gambar 3. 5 Perbandingan Kinerja Ekonomi Provinsi se-Sumatera Triwulan I - 2026 (y-on-y) (persen) III-7
Gambar 3. 6 Perkembangan Gini Ratio Aceh September 2020 -- Maret 2025 (Indeks). III-10
Gambar 3. 7 Perkembangan Kemiskinan Aceh Periode September 2020 -- September 2025 ..... III-12
Gambar 3. 8 Persentase Penduduk Miskin Menurut Perkotaan dan Perdesaan Periode September 2020 -- September 2025 ..... III-13
Gambar 3. 9 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Periode September 2020 -- September 2025 ..... III-14
Gambar 3. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh Periode Februari 2022 - Februari 2026 ..... III-16
Gambar 3. 11 Struktur Ketenagakerjaan Aceh, Februari 2026 ..... III-17
Gambar 3. 12 Tingkat Pastisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin, Februari 2024 -- III-18
Gambar 3. 13 Status Pekerjaan, Februari 2026 ..... III-19
Gambar 3. 14 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025 22Gambar 4. 1 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat III-3

Gambar 4. 1 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat IV-2
Gambar 4. 2 10 (Sepuluh) Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027 ..... IV-33

Gambar 6. 1 Proses Penilaian Kebutuhan Pascabencana dan Penyusunan Rencana Aksi VI-11
Gambar 6. 2 Kebutuhan Dana Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kewenangan Provinsi Aceh Tahun 2006-2028 ..... VI-18

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kemiringan Lereng Aceh II-5
Tabel 2. 2 Jumlah DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan II-9
Tabel 2. 3 Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai II-10
Tabel 2. 4 Potensi Danau Aceh II-13
Tabel 2. 5 Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh II-14
Tabel 2. 6 Data iklim rata-rata Provinsi Aceh Tahun 2013-2022. ..... II-19
Tabel 2. 7 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Aceh Tahun 2021-2025 ..... II-21
Tabel 2. 8 Distribusi Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025 ..... II-21
Tabel 2. 9 Indeks Risiko Bencana Provinsi Aceh Tahun 2021-2025 ..... II-24
Tabel 2. 10 Potensi Bencana di Aceh II-26
Tabel 2. 11 Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2025 ..... II-27
Tabel 2. 12 Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Aceh Tahun 2020-2025 ..... II-32
Tabel 2. 13 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 (Triliun Rupiah) II-36
Tabel 2. 14 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 (Triliun Rupiah) II-37
Tabel 2. 15 Laju Pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2024 (Persen) II-38
Tabel 2. 16 IHK dan Tingkat Inflasi 2025 Menurut Kelompok Pengeluaran II-43
Tabel 2. 17 Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi Tahun 2025 ..... II-44
Tabel 2. 18 PDRB Kabupaten/Kota Per Kapita ADHB Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah) II-46
Tabel 2. 19 Gini Rasio Kabupaten/Kota, Aceh dan Nasional Tahun 2019 -- 2024 (Maret) II-48
Tabel 2. 20 Persentase Penduduk Miskin Provinsi se-Aceh Tahun 2021 -- 2025 ..... II-51
Tabel 2. 21 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021-2025 ..... II-58
Tabel 2. 22 Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-rata Sumatera Tahun 2021--2025 ..... II-60
Tabel 2. 23 Angka Harapan Lama Sekolah Aceh Tahun 2021--2025 ..... II-60
Tabel 2. 24 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-65
Tabel 2. 25 Perkembangan Kelompok Sanggar Seni di Provinsi Aceh, 2020-2024 ..... II-68
Tabel 2. 26 Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2025 ..... II-70
Tabel 2. 27 Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Tahun 2021-2025 sesuai Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 ..... II-74
Tabel 2. 28 Jumlah Da'i di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2021-2025 ..... II-74
Tabel 2. 29 Data Mesjid Se-Aceh yang Melaksanakan Shalat Jum'at Tahun 2025 ..... II-75
Tabel 2. 30 Kegiatan dan Peserta Pembinaan Adat Istiadat Tahun 2021-2025 ..... II-80
Tabel 2. 31 Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2021-2025 ..... II-81

Tabel 2. 32 Data Peran Ulama dalam Pembangunan/Fatwa Ulama Tahun 2021-2025 ... II-83
Tabel 2. 33 Aspek Utama Reintegrasi Tahun 2021-2025 ... II-84
Tabel 2. 34 Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021-2025 ... II-85
Tabel 2. 35 Aspek Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Aceh Tahun 2021 - 2025 II-86
Tabel 2. 36 Kelompok Kemampuan Literasi dan Numerasi ... II-89
Tabel 2. 37 Kualitas Lulusan SMK ... II-90
Tabel 2. 38 Persentase Kondisi Ruang Kelas Tingkat Sekolah Menengah Tahun 2025 .. II-91
Tabel 2. 39 Data Persentase Sertifikasi Guru Jenjang Pendidikan Tahun 2025 ... II-92
Tabel 2. 40 Angka Kematian Neonatus Tahun 2021-2025 ... II-94
Tabel 2. 41 Bed Occupancy Rate (BOR) Tahun 2021--2025 ... II-97
Tabel 2. 42 Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap ... II-99
Tabel 2. 43 Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2019-2024 ... II-100
Tabel 2. 44 Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2020-2024 ... II-101
Tabel 2. 45 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2021--2025 ... II-104
Tabel 2. 46 Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033 ... II-106
Tabel 2. 47 Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2019-2024 ... II-107
Tabel 2. 48 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2025 ... II-108
Tabel 2. 49 Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya ... II-109
Tabel 2. 50 Jenis Irigasi dan Luasannya ... II-110
Tabel 2. 51 Luasan Daerah Irigasi Wilayah Aceh Berdasarkan Kewenangan Menurut Kabupaten/Kota ... II-110
Tabel 2. 52 Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan ... II-111
Tabel 2. 53 Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan ... II-111
Tabel 2. 54 Hasil Capaian Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2025 . II-112
Tabel 2. 55 Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2020-2025 ... II-113
Tabel 2. 56 Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan ... II-115
Tabel 2. 57 Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2020 dan 2024 ... II-120
Tabel 2. 58 Daftar Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun 2025 ... II-123
Tabel 2. 59 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Provinsi Aceh Tahun 2021-2025 ... II-125
Tabel 2. 60 Rincian Nilai IKESOS Menurut Dimensi dan Variabel Provinsi Aceh Tahun 2025 ... II-126
Tabel 2. 61 Kondisi TPAK Aceh Februari dan Agustus 2025 ... II-128
Tabel 2. 62 TPAK Perempuan dan Laki-laki di Aceh Tahun 2023-2025 ... II-129
Tabel 2. 63 Jumlah Kecamatan Daerah Rawan Pangan ... II-139
Tabel 2. 64 Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin Tahun 2024 Terhadap Objek Tanah Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni oleh Dinas Perkim & Baitul Mal Aceh Tahun 2023 ... II-141
Tabel 2. 65 Rekapitulasi Data Tanah Pemerintah Aceh yang Sudah dan Belum Bersertipikat Per-Skpa ... II-143

Tabel 2. 66 Jumlah Laporan Konflik Tanah Yang Diterima Mulai Tahun 2021 .....II-145
Tabel 2. 67 Data Penyerahan Hak Akses Sistem Informasi Manajemen Pertanahan II-148
Tabel 2. 68 Data Pelepasan Kawasan Hutan Tanah Obek Reforma Agraria Melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sd Tahun 2023 .....II-149
Tabel 2. 69 Data Tanah Objek Reforma Agraria Melalui Penataan Aset dan Penataan Akses sd Tahun 2022 .....II-149
Tabel 2. 70 Data Pelepasan Kawasan Hutan Tanah Obek Reforma Agraria Melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sd Tahun 2024 .....II-150
Tabel 2. 71 Data Tanah Objek Reforma Agraria Melalui Penataan Aset sd Tahun 2024 .....II-151
Tabel 2. 72 Data Tanah Objek Reforma Agraria Melalui Penataan Akses Sampai Dengan Tahun 2025 .....II-152
Tabel 2. 73 Kepemilikan KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Nikah Penduduk Aceh ...II-156
Tabel 2. 74 Status Desa Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2025 .....II-158
Tabel 2. 75 Alokasi Dana Desa di Aceh Tahun 2020-2025.....II-159
Tabel 2. 76 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Aceh Tahun 2019 -- 2023 .....II-160
Tabel 2. 77 Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2020-2025 .....II-164
Tabel 2. 78 Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2025 .....II-165
Tabel 2. 79 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Aceh Tahun 2020-2025 .....II-166
Tabel 2. 80 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2025 .....II-167
Tabel 2. 81 Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2020-2025 .....II-168
Tabel 2. 82 Capaian Indikator Indeks SPBE Aceh 2019-2025 .....II-169
Tabel 2. 83 Perkembangan Koperasi di Aceh Tahun 2025 .....II-173
Tabel 2. 84 Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kabupaten/kota di Aceh Tahun 2025.....II-174
Tabel 2. 85 Data Agregat Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Aceh II-176
Tabel 2. 86 Perkembangan Jumlah UMKM di Aceh II-177
Tabel 2. 87 Tabel Perkembangan Rasio Kewirausahaan Aceh (2019-2025).....II-178
Tabel 2. 88 Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan Tahun 2021-2025 .....II-185
Tabel 2. 89 Indeks Pembangunan Pemuda Aceh dan Nasional tahun 2024 .....II-186
Tabel 2. 90 Cabang Olahraga Atlit dan Infrastruktur Olahraga Aceh Tahun 2021-2025 .....II-189
Tabel 2. 91 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Aceh Tahun 2021-2025.....II-194
Tabel 2. 92 Koleksi Buku Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) Aceh Tahun 2022-2025 .....II-198

Tabel 2. 93 Jumlah Fungsional Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh II-198
Tabel 2. 94 Jumlah Fungsional Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh II-199
Tabel 2. 95 Jumlah Koleksi Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan OPD Pengelola Arsip Secara Baku Tahun 2021-2025 ..... II-200
Tabel 2. 96 Jumlah Koleksi Arsip pada JIKN Tahun 2021-2025 ..... II-200
Tabel 2. 97 Gedung dan Bangunan Terbengkalai (tidak fungsional) II-202
Tabel 2. 98 Bangunan dan Gedung Terbengkalai kewenangan Kabupaten/Kota II-203
Tabel 2. 99 Jumlah Kunjungan Wisata ke Aceh Tahun 2020 - 2024 ..... II-208
Tabel 2. 100 Jumlah Usaha Pertanian Menurut Subsektor dan Jenis Usaha di Aceh (unit) II-210
Tabel 2. 101 Produksi Tanaman Hortikultura Bawang dan Cabai Tahun 2025 ..... II-215
Tabel 2. 102 Populasi Ternak di Aceh Tahun 2025 ..... II-220
Tabel 2. 103 Produksi Daging di Aceh (Ton)Tahun 2020-2024 ..... II-221
Tabel 2. 104 Produksi Daging Tahun 2020 - 2025 ..... II-222
Tabel 2. 105 Kawasan Hutan Aceh Berdasarkan Luas dan Fungsinya II-224
Tabel 2. 106 Deforestasi 2019-2024 ..... II-227
Tabel 2. 107 Deforestasi Provinsi Aceh Periode Tahun 2022-2023 Menurut Kabupaten/Kota II-227
Tabel 2. 108 Kebakaran Hutan Dan Lahan Aceh Tahun 2020 s.d. 2024 ..... II-229
Tabel 2. 109 Persentase Deforestasi di Aceh Tahun 2019-2024 ..... II-230
Tabel 2. 110 Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2016-2024 ..... II-231
Tabel 2. 111 Data Konflik antara Manusia dan Satwa Liar di Aceh sd Tahun 2024 ..... II-231
Tabel 2. 112 Konflik Satwa Liar di Aceh sd Tahun 2019-2024 ..... II-232
Tabel 2. 113 PDRB Aceh dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Aceh II-234
Tabel 2. 114 Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan 2020-2024 ..... II-235
Tabel 2. 115 Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh, 2024 ..... II-236
Tabel 2. 116 Penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menurut Kabupaten/Kota di Aceh II-237
Tabel 2. 117 Capaian Izin Perhutanan Sosial Aceh Tahun 2019 - 2023 ..... II-238
Tabel 2. 118 Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting II-242
Tabel 2. 119 Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA) II-242
Tabel 2. 120 Jumlah Pelanggan dan Persentase Pemakaian Tenaga Listrik Tahun 2025 ..... II-243
Tabel 2. 121 Kejadian Kecelakaan di Lokasi PETI II-245
Tabel 2. 122 Neraca Perdagangan Provinsi Aceh Tahun 2021-2025 ..... II-249

Tabel 2. 123 Sebaran Sentra IKM Aceh Tahun 2023 Menurut Kabupaten/Kota (Data Termutakhir) II-253
Tabel 2. 124 Jumlah Produksi Perikanan di Provinsi Aceh Tahun 2019-2024 ..... II-255
Tabel 2. 125 Jumlah kapal (unit) pada PPS Kutaraja Lampulo II-255
Tabel 2. 126 Jumlah Opini WTP Kabupaten Kota 2023 ..... II-261
Tabel 2. 127 Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) Tahun 2021-2025 ..... II-262
Tabel 2. 128 Beasiswa Pemerintah Aceh Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan II-265
Tabel 2. 129 Rekapitulasi Penerimaan Beasiswa Pemerintah Aceh Jenjang D1, D3, D4, S1, S2, S3 dan Spesialis dalam Negeri dan luar Negeri Tahun 2021-2025 ..... II-266
Tabel 2. 130 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintergrasi (SPIP-T) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (K-APIP) II-267
Tabel 2. 131 Area Intervensi MCSP KPK Tahun 2025 ..... II-269
Tabel 2. 132 Fasilitasi Rancangan Qanun dan Jumlah Qanun yang ditetapkan DPRA II-270
Tabel 2. 133 Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita Sebulan menurut Kelompok Barang Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional (Rupiah), Tahun, 2019-2023 ..... II-277
Tabel 2. 134 Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2024 ..... II-285
Tabel 2.135 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum di Provinsi Aceh, 2025 ..... II-287
Tabel 2. 136 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Aceh, 2023 (Lanjutan) II-287
Tabel 2. 137 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak II-289
Tabel 2. 138 Rasio Kelistrikan Aceh Tahun 2021-2025 ..... II-291
Tabel 2. 139 Realisasi Pendanaan RKPA Tahun 2025 ..... II-292
Tabel 2. 140 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah pada RKPA Tahun 2025 ..... II-293
Tabel 2. 141 Target dan Realisasi Belanja RKPA Tahun 2025 ..... II-297
Tabel 2. 142 Realisasi Pembiayaan RKPA Tahun 2025 ..... II-300
Tabel 2. 143 Kriteria Kinerja II-302
Tabel 2. 144 Tingkat Capaian Realisasi RKPA Tahun 2025 ..... II-304
Tabel 2. 145 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten/Kota II-311
Tabel 2. 146 Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota II-314
Tabel 2. 147 Tingkat Capaian Realisasi Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 ..... II-317
Tabel 2. 148 Tingkat Capaian Terhadap Target Indikator RKPA 2023-2026. ..... II-326
Tabel 2. 149 Capaian Indikator Makro Tahun 2025 Terhadap Target RPA 2023-2026. II-327
Tabel 2. 150 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Terhadap Target RPA 2023-2026 ..... II-327
Tabel 2. 151 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025 Terhadap Target RPA 2023-2026 ..... II-329

Tabel 2. 152 Keselarasan Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD Tahun 2027 dengan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Aceh II-366

Tabel 3. 1 Perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Tingkat Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Maret 2026 ..... III-7
Tabel 3. 2 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Maret 2026 (y-on-y) (persen) III-8
Tabel 3. 3 Andil Beberapa Komoditas Terhadap Inflasi/Deflasi MARET 2026 (y-on-y) (persen) III-9
Tabel 3. 4 Gini Ratio Menurut Provinsi Periode September 2024 -- September 2025 ..... III-10
Tabel 3. 5 Indeks Daya Saing Investasi (IDSI) Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2025 ..... III-19
Tabel 3. 6 Tabel Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Aceh Tahun 2025 ..... III-21
Tabel 3. 7 Ringkasan Perkembangan Ekspor Aceh 2025 -2026 ..... III-22
Tabel 3. 8 Ekspor Barang Asal Aceh Menurut Kelompok Komoditas 2025-2026 ..... III-22
Tabel 3. 9 Ekspor Komoditas Aceh Menurut Negara Tujuan 2025-2026 ..... III-24
Tabel 3. 10 Nilai Ekspor Komoditas Aceh Menurut Lapangan Usaha 2025-2026 ..... III-25
Tabel 3. 11 Ringkasan Perkembangan Impor Aceh 2025-2026 ..... III-25
Tabel 3. 12 Impor Aceh Menurut Komoditas Unggulan 2025-2026 ..... III-26
Tabel 3. 13 Target Ekonomi Makro Aceh Tahun 2027 ..... III-27
Tabel 3. 14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Aceh Tahun 2024-2028 ..... III-30
Tabel 3. 15 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Aceh Tahun 2024-2028 ..... III-33
Tabel 3. 16 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Aceh Tahun 2024-2028 ..... III-33

Tabel 4. 1 Keselarasan Antara Visi Pembangunan Nasional dan Aceh Tahun 2025-2029 ..... IV-4
Tabel 4. 2 Keselarasan Antara Misi Pembangunan Aceh dan Nasional Tahun 2025-2029 ..... IV-4
Tabel 4. 3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2027 ..... IV-9
Tabel 4. 4 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027 ..... IV-20
Tabel 4. 5 Target Indikator Outcome Prioritas Nasional Tahun 2027 ..... IV-23
Tabel 4. 6 Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2027 ..... IV-30
Tabel 4. 7 Keselarasan Antara Misi RPJMA Tahun 2025-2029 dan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027 ..... IV-33
Tabel 4. 8 Keselarasan Antara Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Aceh 2027 ..... IV-34
Tabel 4. 9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027 dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025 -- 2029 ..... IV-35
Tabel 4. 10 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh dengan Permasalahan Pembangunan Aceh Tahun 2027 ..... IV-36
Tabel 4. 11 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh dengan Isu Strategis Pembangunan Aceh Tahun 2027 ..... IV-37
Tabel 4. 12 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027 dengan Pokok Pokok Pikiran DPRA IV-38

Tabel 4. 13 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027 dengan Janji Kepala Daerah IV-39
Tabel 4. 14 Sasaran Pembangunan PA-1 "Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah)" IV-41
Tabel 4. 15 Program Prioritas Mendukung PA-1 .....IV-42
Tabel 4. 16 Sasaran Pembangunan PA-2 .....IV-43
Tabel 4. 17 Program Prioritas Mendukung PA-2 .....IV-44
Tabel 4. 18 Sasaran Pembangunan PA-3 .....IV-48
Tabel 4. 19 Program Prioritas Mendukung PA-3 .....IV-48
Tabel 4. 20 Sasaran Pembangunan PA-4 .....IV-57
Tabel 4. 21 Program Prioritas Mendukung PA-4 .....IV-58
Tabel 4. 22 Sasaran Pembangunan PA-5 .....IV-60
Tabel 4. 23 Program Prioritas Mendukung PA-5 .....IV-60
Tabel 4. 24 Sasaran Pembangunan PA-6 .....IV-62
Tabel 4. 25 Program Prioritas Mendukung PA-6 .....IV-63
Tabel 4. 26 Sasaran Pembangunan PA-7 .....IV-65
Tabel 4. 27 Program Prioritas Mendukung PA-7 .....IV-67
Tabel 4. 28 Sasaran Pembangunan PA-8 .....IV-75
Tabel 4. 29 Program Prioritas Mendukung PA-8 .....IV-75
Tabel 4. 30 Sasaran Pembangunan PA-9 .....IV-77
Tabel 4. 31 Program Prioritas Mendukung PA-9 .....IV-78
Tabel 4. 32 Sasaran Pembangunan PA-10 .....IV-83
Tabel 4. 33 Program Prioritas Mendukung PA-10 .....IV-84

Tabel 5. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh Menurut Dimensi Penyusunnya, Tahun 2020--2025 .....V-7
Tabel 5. 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024-2025 .....V-9
Tabel 5. 3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kota se-Aceh Tahun 2025 .....V-12
Tabel 5. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025 .....V-16
Tabel 5. 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, Maret 2025 .....V-20
Tabel 5. 6 Capaian Indikator Makro Tahun 2025 dan Target 2027 Kabupaten/Kota Se-Aceh V-23

Tabel 6. 1 Highlight Intervensi RKP 2027 di Provinsi Aceh VI-2
Tabel 6. 2 Rekapitulasi Hasil Pembahasan Desk PKPN Musrenbangnas Tahun 2026 .....VI-3
Tabel 6. 3 Hasil Kesepakatan Pembahasan Output Desk PKPN Terpilih Musrenbangnas Tahun 2026 .....VI-4
Tabel 6. 4 Pagu Tahun 2027 Berdasarkan SKPA Tahun 2027 .....VI-7
Tabel 6. 5 Kebutuhan Indikatif Alokasi Pendanaan PRRP Provinsi Aceh Tahun 2026-2028 .....VI-12

Tabel 6. 6 Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran dari 23 K/L di Aceh.....VI-14
Tabel 6. 7 Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran dari 23 K/L di Aceh.....VI-16
Tabel 6. 8 Kebutuhan Dana Kewenangan Pemerintah Aceh Per SKPA Tahun 2026-2028 .....VI-20
Tabel 6. 9 Kebutuhan Dana Kewenangan Pemerintah Aceh Per Sektor Tahun 2026-2028 .....VI-23
Tabel 6. 10 Dukungan Daerah Terhadap Astacita dan Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2027 .....VI-26
Tabel 6. 11 Dukungan Daerah Terhadap Highlight Intervensi RKP 2027..... VI-146
Tabel 6. 12 Dukungan Daerah Terhadap Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).... VI-155

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Aceh Tahun 2027 .....VII-2
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Aceh Tahun 2027.....VII-4
Tabel 7. 3 Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 .....VII-20
Tabel 7. 4 Target Indikator Outcome Prioritas Astacita dan ProSN Tahun 2027.....VII-33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah menjelaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daewrah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja dan Program Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD memiliki peranan yang sangat krusial dalam perencanaan pembangunan daerah mengingat RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjembatani penjabaran visi RPJMD dengan penganggaran (APBD), dan memastikan konsistensi program serta menjadi pedoman operasional arah kebijakan pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah yang bertujuan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan dan alokasi anggaran. Dalam konteks pembangunan yang semakin dinamis dan kompleks, RKPD dituntut untuk mampu merumuskan perencanaan yang adaptif, efektif dan berbasis kinerja. Berbagai tantangan pembangunan seperti penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi, serta pengelolaaan risiko bencana dan perubahan iklim memerlukan dukungan perencanaan dan penganggaran yang terarah, terukur dan akuntabel. RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

d. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPA tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 serta dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun 2026-2028. Bencana hidrometeorologi yang terjadi di akhir tahun 2025 sangat berdampak signifikan terhadap sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan data BPS Aceh pertumbuhan ekonomi Aceh pada Triwulan IV (Q4) 2025 tercatat sebesar 2,97 persen (c-to-c), mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,66 persen (c-to-c). Selanjutnya, Inflasi Aceh pada Desember 2025 tercatat sebesar 6,71 persen (y-on-y) yang menempatkan Aceh sebagai salah satu inflasi tertinggi di Indonesia. Sehingga untuk meminimalisir dampak bencana yang terjadi dimasa akan datang, prinsip R3P yakni *Build Back Better, Safer and Sustainable* akan menjadi acuan utama dalam penyusunan setiap kebijakan dan program prioritas pembangunan.

Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RKPA Tahun 2027 dalam rangka menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan pembangunan, adalah melalui pendekatan: (1) *top-down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah; (2) *bottom-up*, yaitu pendekatan perencanaaan yang mengakodomasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten/kota; (3) *teknokratik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi; (4) *politik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; (5) *partisipatif*, yaitu pendekatan perencanaan yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas atau lembaga swadaya masyarakat. Proses perencanaan pembangunan ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Selanjutnya, penyusunan RKPA tahun 2027 juga disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis money follow program dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Tematik bermakna bahwa perencanaan RKPA tahun 2027 mengacu kepada tema yang telah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan yang terdapat dalam RPJMA Tahun 2025-2029 dan RKP tahun 2027 serta prinsip R3P Tahun 2026-2028. Sementara itu, holistik merupakan penentukan program/kegiatan/sub kegiatan/proyek secara komprehensif mulai dari hulu ke hilir dalam rangka mendukung tema yang telah dirumuskan. Integratif dilakukan melalui

pengintegrasian berbagai program/kegiatan/sub kegiatan/proyek dan sumber pendanaan dan spatial merupakan penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan/proyek dalam satu kesatuan wilayah serta keterkaitan antar wilayah.



Gambar 1. 1
Pendekatan Perencanaan Pembangunan

Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahun 2027 sebagaimana yang terdapat dalam RPJMA Tahun 2025-2029, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, serta tema RKP tahun 2027 dan kebijakan dalam dokumen R3P Tahun 2026-2028, maka tema RKPA tahun 2027 adalah "Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan Yang Tangguh dan Berkelanjutan", dengan fokus utama meliputi (1) Pertumbuhan Ekonomi Yang Tangguh dan Berkelanjutan (2) Penurunan Kemiskinan (3) Penciptaan Lapangan Kerja (4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi, (5) Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah. Selain itu, RKPA Tahun 2027 juga difokuskan pada pemulihan wilayah pascabencana yang diarahkan pada pembangunan kembali wilayah yang terdampak bencana secara yang lebih aman dan tangguh serta berkelanjutan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, permukiman, sosial, ekonomi dan fasilitas publik serta perlindungan lingkungan hidup dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengacu pada dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh Tahun 2026-2028.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan RKPA tahun 2027 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Persiapan penyusunan RKPA tahun 2027, yang meliputi penyusunan rancangan Keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi

mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPA tahun 2027 yang meliputi:
    - Penyusunan Rancangan Awal RKPA tahun 2027 dimulai sejak bulan Desember 2025 s.d 08 April 2026;
    - Forum Konsultasi Publik Terhadap Rancangan Awal RKPA tahun 2027 dilaksanakan tanggal 08 April 2026;
    - Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Aceh tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 07-10 April 2026.
3. Penyusunan Rancangan RKPA tahun 2027 mencakup:
    - Penyempurnaan Rancangan RKPA tahun 2027 dimulai tanggal 08 April s.d 22 April 2026;
    - Pra Musrenbang RKPA tahun 2027 dilaksanakan dari tanggal 13 – 22 April 2026;
    - Pembukaan Musrenbang RKPA tahun 2027 dilaksanakan tanggal 23 April 2026;
    - Musrenbang DOKA tahun 2027 dilaksanakan pada tanggal 27-30 April 2026;
4. Penyusunan Rancangan Akhir RKPA tahun 2027 mencakup pelaksanaan fasilitasi oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI yang dilaksanakan pada 17 Juni 2026;
5. Penetapan RKPA tahun 2027 tanggal 25 Juni 2026.

Dengan demikian, penyusunan RKPA Tahun 2027 menjadi langkah strategis dan konkrit dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang lebih tangguh dan berkelanjutan untuk mendukung percepatan pemulihan Aceh pascabencana sehingga mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat, pelayanan publik dan infrastruktur ke kondisi yang lebih baik, aman dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *Build Back Better, Safer and Sustainable*.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RKPA tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan baik yang berskala nasional maupun lokal antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927):
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
35. Keputusan Menteri Dalam Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013–2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
37. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
38. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
39. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
40. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh tahun 2025 Nomor 8);
41. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
42. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka RKPA tahun 2027 mempunyai hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

a. Hubungan dengan RPJMA Tahun 2025-2029

RKPD Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Secara substansi keselarasan antara RKPD Tahun 2027 dengan RPJMA Tahun 2025-2029 meliputi: visi, misi, arah kebijakan, prioritas pembangunan, indikator kinerja (nomenklatur dan target).

Sesuai dengan amanat Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025 – 2029 menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Aceh pada Tahap II (2027), disamping melanjutkan arah pembangunan pada tahap I difokuskan pada :

1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sains dan teknologi dilakukan dengan strategi, yaitu :
   a. Beasiswa unggulan Aceh yang inklusif;
   b. Pembangunan sekolah-sekolah unggul; dan
   c. Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan guru
2) Tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah dilakukan dengan strategi, yaitu :
   a. Penciptaan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, profesional, dan berintegritas;
   b. Peningkatan kapasitas badan pengelolaan keuangan Aceh;
   c. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah untuk mendukung kemandirian fiskal; dan peningkatan
   d. profesionalisme ASN

b. Hubungan dengan RKP tahun 2027

RKPA Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada RKP Tahun 2027. Keselarasan tersebut meliputi sebagai berikut (1) Sasaran Prioritas Nasional (PN) (2) Program-program daerah yang mendukung terlaksananya kegiatan Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2027, (3) Indikator makro yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2027 untuk daerah menjadi indikator makro daerah terkait termasuk nomenklatur, satuan dan besaran targetnya, (4) tema pembangunan RKPA tahun 2027 harus selaras dengan tema RKP tahun 2027.

Sesuai dengan Rancangan Awal RKP pada Buku II dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana difokuskan pada intervensi pemulihan pascabencana yang menyasar 53 kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat serta daerah terdampak bencana masif lainnya. Intervensi pemulihan berfokus pada upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pada tahap rehabilitasi, dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas (1) pemulihan layanan dasar dan fasilitas umum, (2) pemulihan dini bidang sosial dan ekonomi, dan (3)

pemulihan fungsi pemerintahan. Sementara itu, pada tahap rekonstruksi, dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas (1) pembangunan hunian tetap dengan standar tahan bencana, (2) pemulihan infrastruktur publik, dan (3) penataan ruang berbasis zona rawan bencana. Berbagai upaya dan intervensi tersebut dilakukan untuk mewujudkan prinsip build back better, safer, and sustainable di daerah terdampak bencana.

2) Khusus Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat perlu membangun ketahanan wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata ruang yang adaptif terhadap risiko bencana melalui percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana dengan mengimplementasikan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera (Renduk PRRP)

3) Dilakukan pengembangan kawasan swasembada pangan, air, dan energi meliputi kawasan strategis di Pesisir Barat Aceh.

4) Implementasi penggunaan Dana Otsus Aceh berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang memprioritaskan akselerasi pembangunan pada sektor infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dalam konteks penyesuaian kebijakan fiscal Otsus Aceh dengan besaran satu persen dari plafon DAU Nasional, pengelolaan Dana Otsus tahun 2027 perlu di transformasikan secara terarah untuk menjaga momentum pembangunan sekaligus berkontribusi optimal terhadap Trisula Pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029, yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Arah kebijakan Dana Otsus Aceh tahun 2027 dalam Upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan tata kelola Dana Otsus Aceh meliputi:

   - Penyusunan dokumen Rencana Induk Otonomi Khusus Aceh dikonsultasikan dan dikoordinasikan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan didukung oleh penyusunan Peta Jalan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh guna memastikan keselarasan dan sinkronisasi pemanfaatan dana dengan target, sasaran pembangunan nasional dan daerah, serta programprogram prioritas yang berdampak luas, seperti penurunan stunting, perluasan konektivitas layanan dasar, serta penciptaan iklim investasi yang kompetitif;
   - Penguatan tata kelola yang diwujudkan melalui peningkatan peranAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjamin akuntabilitas dari hulu ke hilir, penguatan sinergi lintas otoritas serta kemitraan sektor swasta, dan pengembangan ekosistem UMKM berbasis keuangan syariah;

- Pembentukan kawasan ekonomi bernilai tinggi (high value economy) yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) guna menjamin keberlanjutan kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
- Pelaksanaan program pemulihan pascabencana yang menyeluruh, dengan memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi sosialekonomi masyarakat serta Pembangunan kembali (redevelopment) infrastruktur berlandaskan prinsip "build back better, safer, anN sustainable" untuk mewujudkan ketangguhan wilayah dan pembangunan berkelanjutan.

c. Hubungan dengan Renja SKPA tahun 2027

RKPA tahun 2027 menjadi pedoman bagi SKPA dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SKPA Tahun 2027. Keselarasan dan konsistensi antara kedua dokumen ini meliputi permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif tahun 2027.

d. Hubungan dengan KUA PPAS dan R-APBA tahun 2027

RKPA tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KU-APBA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) tahun 2026. Keterkaitan antar dokumen ini mencakup penyelarasan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam rancangan KUA PPAS dan R-APBA tahun 2027 dengan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang terdapat dalam RKPA tahun 2027.

e. Hubungan dengan Asta Cita

Rancangan Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2029 yang disusun selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Hubungan antara RKPA Tahun 2027 dan Asta Cita tercermin dalam upaya memastikan setiap sasaran, program, dan kegiatan pembangunan di Aceh berkontribusi langsung terhadap pencapaian delapan agenda prioritas nasional.

f. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh Tahun 2026-2028

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hirometeorologi Aceh Tahun 2026-2028 merupakan proses perencanaan pembangunan daerah yang secara konprehensif disusun untuk memulihkan wilayah yang terdampak bencana

hidrometeorologi Aceh tahun 2025. R3P disusun berdasarkan pada hasil Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) yang dipadukan dengan kebijakan dan kemampuan pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan sumber dana lainnya yang sah.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), maka dalam penyusunan RKPA Tahun 2027 harus mengakomodir R3P baik berupa kebijakan dan program/kegiatan prioritas berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pascabencana (jitupasna).

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPA tahun 2027 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Aceh tahun 2027, dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tahun 2027;
2. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi seluruh SKPA tahun 2027;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPA tahun 2027;
4. Menjadi pedoman penyelarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Aceh dan kabupaten/kota pada RKPD Kabupaten/Kota tahun 2027;
5. Sebagai dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KU-APBA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) tahun 2027; dan
6. Menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh tahun 2027.

1.5. Sistematika Dokumen RKPA

Sistematika RKPA tahun 2027 disusun terdiri dari 8 (delapan) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPA.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH

Memuat kondisi umum Aceh dari berbagai aspek yakni aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selanjutnya juga menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPA sampai triwulan II tahun 2026 dan realisasi RPJMA Tahun 2025-2029 dan permasalahan daerah dan isu strategis yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN ACEH

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan kondisi eksisting dan proyeksi kerangka ekonomi daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB Sektor, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), inflasi dan kemiskinan, kinerja investasi dan kinerja perdagangan. Disamping itu, juga menjelaskan arah kebijakan ekonomi daerah yang menjawab tantangan pembangunan ekonomi daerah.

Memuat arah kebijakan keuangan daerah yang menjelaskan realisasi dan proyeksi/target pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2024-2028.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

Memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, indiktor kinerja pembangunan yang diambil dan dikaitkan dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, indiktor kinerja dalam RKP tahun 2027, RPJMA Tahun 2025-2029 dan dokumen R3P Aceh Tahun 2026-2028.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat arahan kebijakan pembangunan dan target makro yang diberikan untuk setiap kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Aceh.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ACEH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Aceh yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMA Tahun 2025-2029 dan dokumen R3P Aceh Tahun 2026-2028.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai tahun 2027.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH

2.1. Gambaran Umum Aceh

Gambaran umum kondisi Aceh diuraikan dalam beberapa aspek yang meliputi: aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi membahas karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi, dan sosiologi.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Selat Malaka dan Samudera Hindia. karena berada di pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Aceh menghubungkan belahan dunia timur dan barat yang secara astronomis terletak pada 01° 58′ 37,2″- 06° 04′ 33,6″ Lintang Utara dan 94° 57′ 57,6″-98° 17′ 13,2″ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Selat Malaka
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Samudera Hindia

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait batas administrasi antar kabupaten dalam provinsi Aceh dan dengan provinsi yang berbatasan, luas wilayah daratan adalah sebesar 5.683.370,397 ha yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Aceh berdasarkan Qanun RZWP3K Aceh Tahun 2020-2040 adalah sebesar 4.400.156,053 ha (12 mil laut dari garis pantai pada saat pasang terendah ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan). Secara administratif, Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten, 5 Kota, 290 Kecamatan, 6.515 Gampong sesuai dengan data BPS Aceh yang dipublikasikan dalam Aceh Dalam Angka tahun 2023. Secara lebih jelas batas wilayah administrasi Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.1

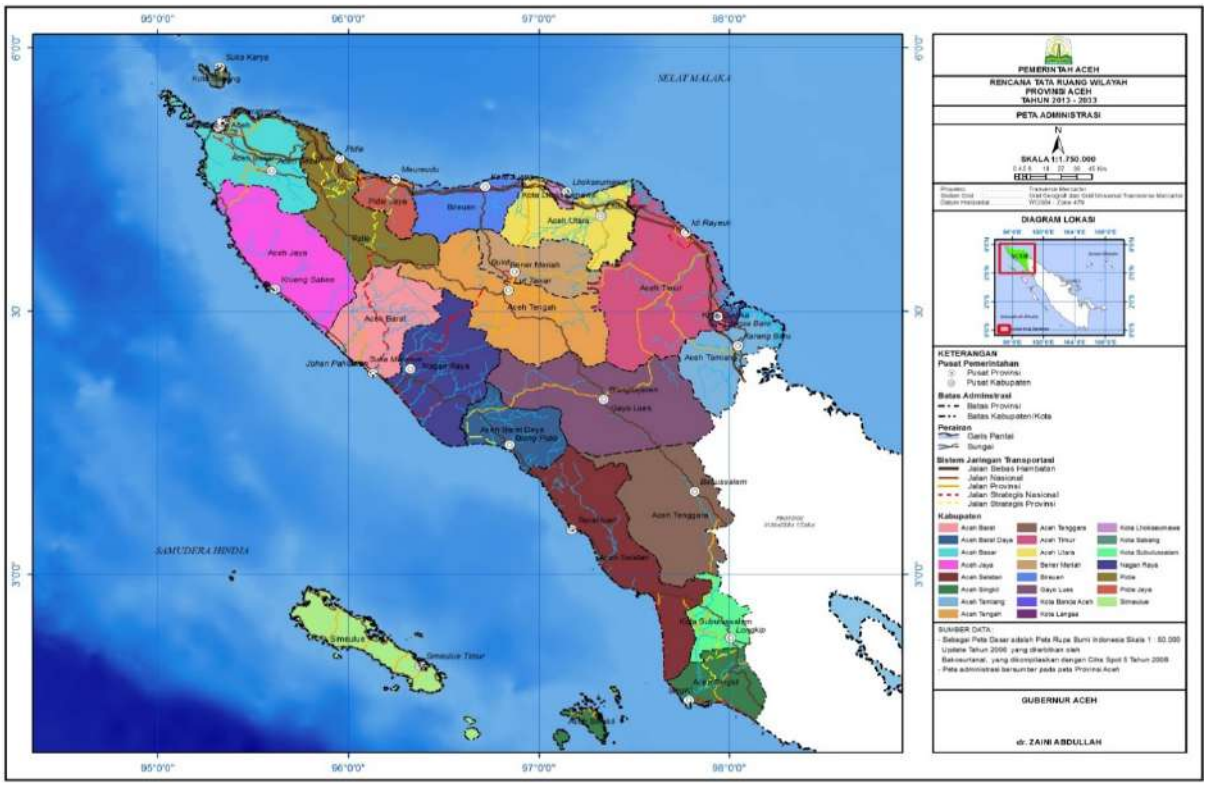

Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033

Gambar 2. 1
Peta Wilayah Administrasi Aceh

2.1.1.1.2. Topografi

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian Utara dan Timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0 – 8 persen) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara – timur dan pantai barat – selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8 – 15 persen) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah Barat – Selatan dan pantai Utara – Timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16 - 25 persen) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26 – 40 persen) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (> 40 persen) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai.

Wilayah Aceh memiliki 4 (empat) level ketinggian, yaitu: 1) Dengan ketinggian 0 - 125 mdpl, berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, hampir seluruh wilayah Simeulue, Sabang, dan Pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada

bagian Barat, Selatan dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar; 2) Daerah dengan ketinggian 125 – 1.000 mdpl, terdapat di seluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Pulo Aceh; 3) Daerah berketinggian 1.000 – 2.000 mdpl, terletak di wilayah tengah yang meliputi wilayah kabupaten: Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; 4) Daerah paling tinggi dihitung > 2.000 mdpl, berada di daerah sekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie, Gunung Burni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah, serta Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.

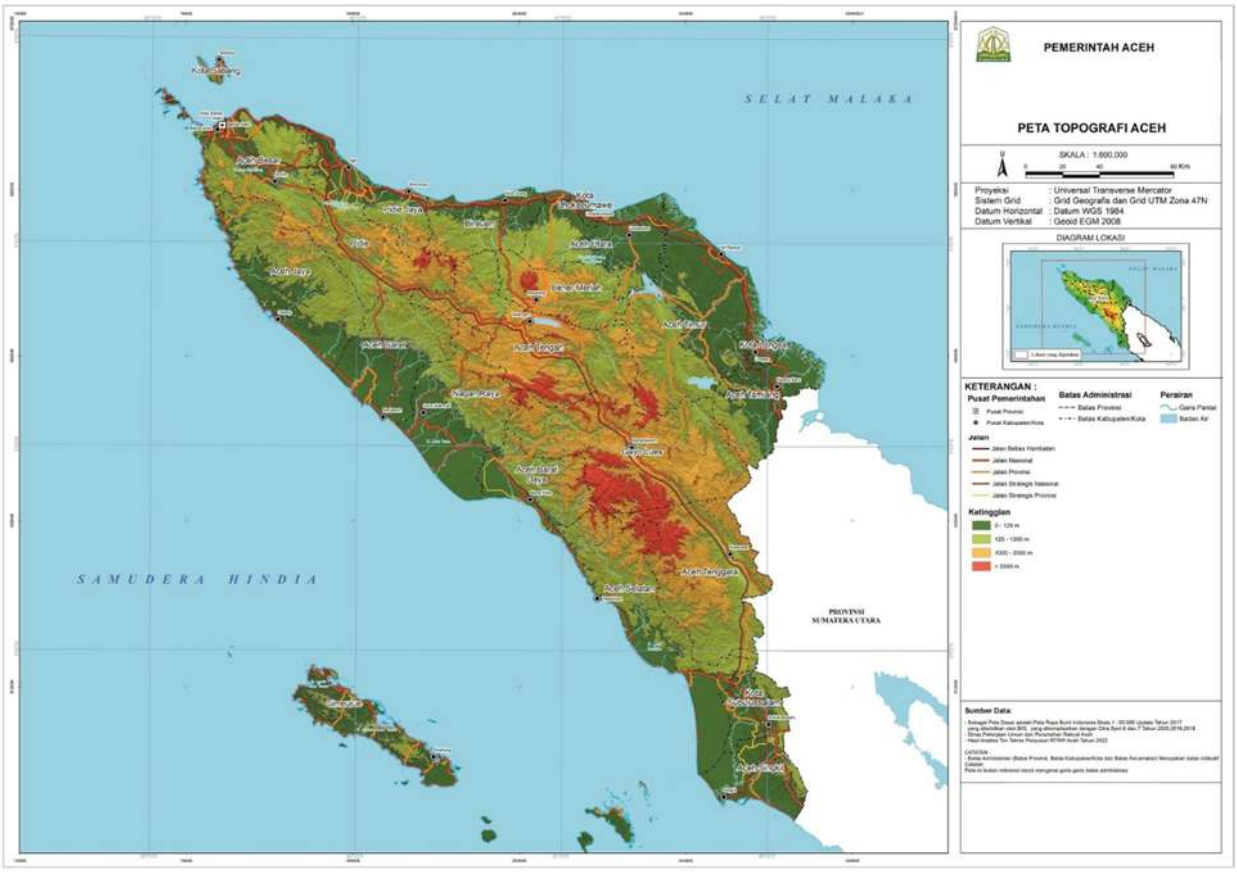

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017; Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018

Gambar 2. 2
Peta Topografi Aceh

2.1.1.1.3.Geologi

Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber Daya Geologi Aceh sangat kaya dan bervariasi.

Jenis batuan yang terdapat di Aceh dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen, batuan gunung api serta endapan aluvium. Berdasarkan jenis litologi batuan dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Batuan beku atau malihan (*igneous or metamorphic rocks*), terletak pada kompleks pegunungan mulai dari puncak atau punggungan; dengan potensi air tanah sangat rendah;
b. Sedimen padu-tak terbedakan (*consolidated sediment – undifferentiated*), terletak di bagian bawah/hilir batuan beku di atas, namun masih pada kompleks pegunungan hingga ke kaki pegunungan, dan di Pulau Simeulue dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
c. Batu gamping atau dolomit (*limestones or dolomites*), terletak setempat-setempat, yaitu di pegunungan di bagian barat laut Aceh Besar (sekitar Peukan Bada dan Lhok Nga), di Aceh Jaya, di Gayo Lues dan Aceh Timur; dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
d. Hasil gunung api – lava, lahar, tufa, dan breksi (*volcanic products – lava, lahar, tuff, breccia)*, terutama terdapat di sekitar gunung berapi, terutama yang teridentifikasi terdapat di sekitar Gunung Geureudong, Gunung Seulawah, dan Gunung Peut Sagoe; dengan potensi air tanah rendah;
e. Sedimen lepas atau setengah padu – kerikil, pasir, lanau, lempung (*loose or semi-consolidated sediment*) (*gravel, sand, silt, clay*), terdapat di bagian paling bawah/hilir yaitu di pesisir, baik di pesisir timur maupun pesisir barat dan di cekungan Krueng Aceh; dengan potensi air tanah sedang sampai tinggi.

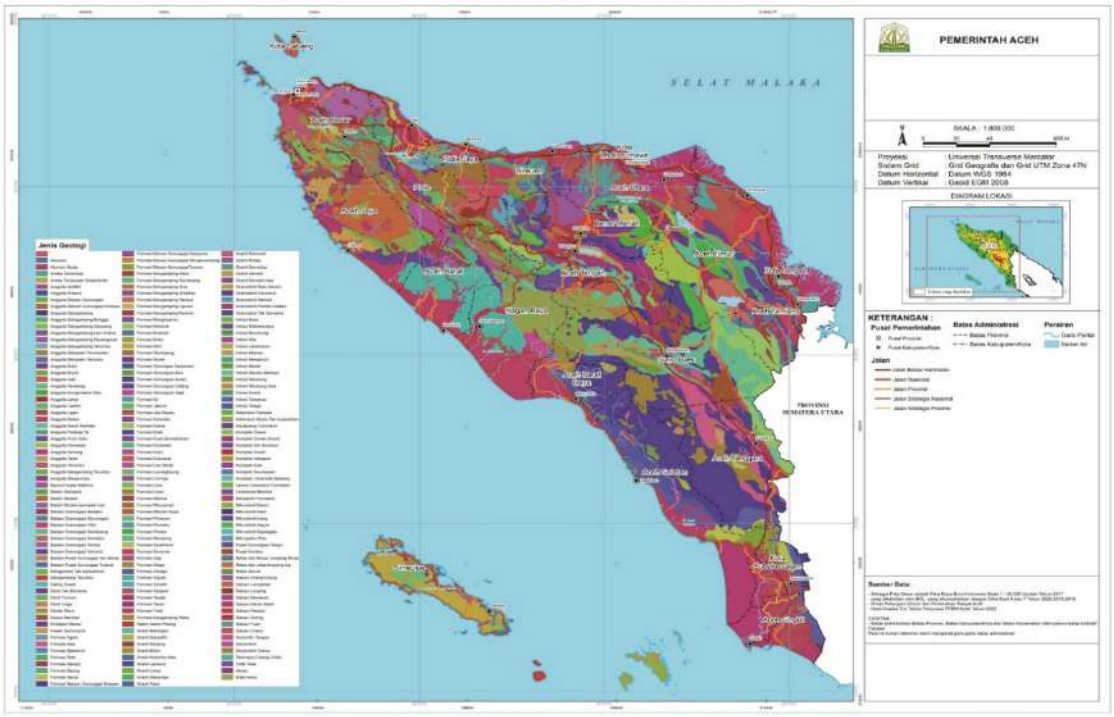

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017;Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018

Gambar 2. 3
Peta Geologi Aceh

2.1.1.1.4. Kemiringan

Aceh memiliki berbagai macam variasi kemiringan lereng. Kemiringan lereng di Aceh dibagi menjadi 0% - 8%, 8%-15%,15%-25%, 25%-40%, dan >40%. Kabupaten dan kota di Aceh memiliki bermacam-macam kemiringan lereng. Berikut tabel kemiringan lereng di Aceh.

Tabel 2. 1
Kemiringan Lereng Aceh

No	Kabupaten/Kota	Kemiringan Lereng (%)	Luas (ha)
1	Aceh Barat	0 – 8	146.666,90
		8 – 15	31.030,82
		15 – 25	39.793,23
		25 – 40	39.902,49
		>40	24.355,19
2	Aceh Barat Daya	0 – 8	47.140,47
		8 – 15	4.551,77
		15 – 25	10.850,11
		25 – 40	33.396,67
		>40	92.291,98
3	Aceh Besar	0 – 8	96.720,25
		8 – 15	40.851,82
		15 – 25	4.7257,95
		25 – 40	58.345,40
		>40	45.184,95
4	Aceh Jaya	0 – 8	103.997,80
		8 – 15	42.847,65
		15 – 25	80.850,95
		25 – 40	96.327,80
		>40	65.365,46
5	Aceh Selatan	0 – 8	146.755,56
		8 – 15	10.136,57
		15 – 25	23..892,14
		25 – 40	69.451,64
		>40	166.884,39
6	Aceh Singkil	0 – 8	149.176,70
		8 – 15	19.805,91
		15 – 25	10.545,95
		25 – 40	3.563,41
		>40	287,28
7	Aceh Tamiang	0 – 8	139.711,55
		8 – 15	14.928,23
		15 – 25	13.823,41
		25 – 40	17.773,44
		>40	23.862,27
8	Aceh Tengah	0 – 8	25.204,65
		8 – 15	36.212,55
		15 – 25	88.961,74
		25 – 40	160.170,39

No	Kabupaten/Kota	Kemiringan Lereng (%)	Luas (ha)
		>40	141.892,09
9	Aceh Tenggara	0 – 8	26.039,84
		8 – 15	16.902,18
		15 – 25	44.759,28

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017;Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017; Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018

Gambar 2. 4
Peta Kemiringan Lereng Aceh

2.1.1.1.5. Jenis Tanah

Aceh memiliki jenis tanah yang bervariasi, seperti andisol, entisol – inceptisol, histosol, ultisol. Tanah andisol merupakan salah satu dari banyak jenis tanah yang tanahnya cukup subur tetapi memiliki tingkat serapan Ph tinggi. Tanah andisol alami yang belum mengalami proses pengolahan oleh manusia memiliki kandungan akan bahan organik (humus) yang tinggi, hal tersebut membuat tanah andisol memiliki warna hitam hingga coklat tua, tidak begitu plastis, tidak begitu lekat, dan mempunyai kemampuan tinggi dalam menyimpan air. Tanah entisol termasuk kategori tanah yang masih muda, dikarenakan baru dalam tahap permulaan perkembangan tanah. Tanah entisol memiliki kadar lempung serta bahan organik yang rendah, sehingga daya tahan airnya rendah, dengan struktur berbutir, dan sarang, hal inilah yang menyebabkan entisol mudah melewatkan air serta menyebabkan air mudah hilang. Tanah inceptisol merupakan tanah muda yang proses pembentukannya tergolong cepat dari hasil pelapukan bahan induk. Tanah inceptisol memiliki permasalahan dalam proses budidaya. Kendala ini perlu menjadi perhatian serius oleh petani agar tanah garapan dapat subur dan mencukupi nutrisi

di tanaman. Kendala tersebut berupa tanah inceptisol memiliki pH yang tergolong masam (kurang dari 5) sehingga perlu penambahan kapur pertanian untuk kegiatan budidaya, tanah inceptisol rata-rata memiliki kandungan bahan organik yang rendah, sehingga membutuhkan banyak masukan bahan organik, dan perlu penanganan teknologi tepat guna untuk mengolah lahan inceptisol karena kesuburan tanah yang rendah.

Tanah histosol atau yang sering diketahui sebagai tanah gambut adalah jenis lapisan tanah yang di dalamnya lebih banyak terkandung bahan organik dengan keadaan kedalaman lebih dari 40 cm dari permukaan tanah, berbeda dengan tanah mineral lainnya. Histosol terbentuk dalam kondisi seperti di lahan basah. Sehingga jenis tanah ini sangat cocok untuk ditanami sayur- sayuran, buah-buahan, dan produksi pertanian. Tanah ultisol adalah tanah yang telah mengalami pelapukan tingkat lanjut dan terdapat timbunan liat di horison bawah. Adanya endapan liat ini menyebabkan tanah ultisol tidak mendapatkan daya resap air yang cukup dan hal ini sebagai tanah dengan kemasaman kurang dari 5 sehingga dianggap tanah yang kurang subur. Ultisol juga memerlukan upaya pengelolaan untuk dijadikan sebagai tanah pertanian yang disebabkan kandungan aluminium yang tinggi akibat kemasaman tanah.

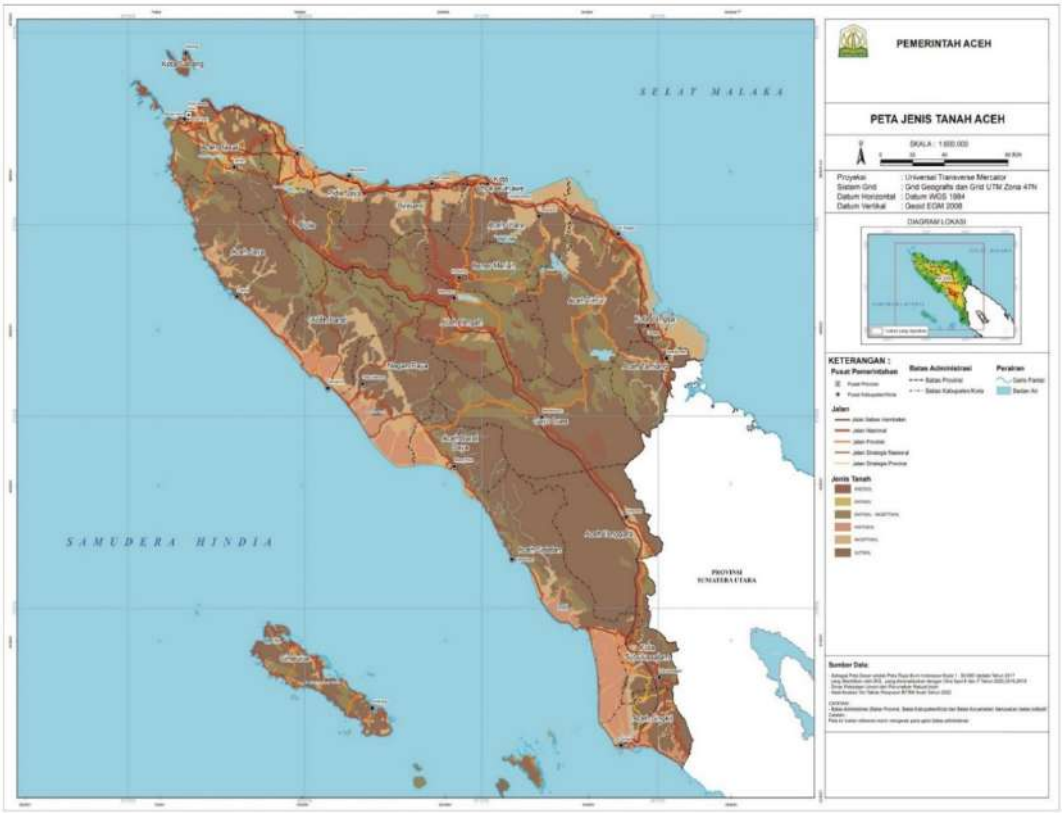

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017; Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018

Gambar 2. 5
Peta Jenis Tanah Aceh

2.1.1.1.6. Hidrologi

A. Air Permukaan

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi mata air, sungai, danau, waduk, rawa dan sumber permukaan air lainnya. Keberadaan air permukaan menjadi faktor kunci dalam mendukung ketahanan air, produktivitas pertanian (irigasi), kebutuhan air baku, serta pengendalian daya rusak air (banjir, abrasi, dan sedimentasi).

A.1. Sungai dan Daerah Aliran Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 152 DAS, yang tersebar pada beberapa Wilayah Sungai (WS) dengan kewenangan pengelolaan yang berbeda, mencakup WS strategis nasional, lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, serta dalam kabupaten/kota. Daerah Strategis Nasional sebanyak 56 DAS yaitu WS. Aceh–Meureudu memiliki 30 DAS, WS. Woyla–Bateue memiliki 13 DAS dan WS. Jambo Aye memiliki 13 DAS. Pada Daerah Lintas Provinsi yaitu WS. Alas–Singkil memiliki 8 DAS, sedangkan pada Daerah Lintas Kab/Kota terdapat 62 DAS yaitu WS. Teunom–Lambeso memiliki 14 DAS, WS. Pase–Peusangan memiliki 10 DAS, WS. Tamiang–Langsa memiliki 17 DAS dan WS. Baru–Kluet memiliki 21 DAS dan dalam pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu WS Simeulue memiliki 26 DAS. Pembagian kewenangan dan sebaran DAS tersebut menjadi dasar dalam perencanaan program konservasi DAS, pengendalian banjir, normalisasi sungai, serta pengamanan infrastruktur sumber daya air. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.6

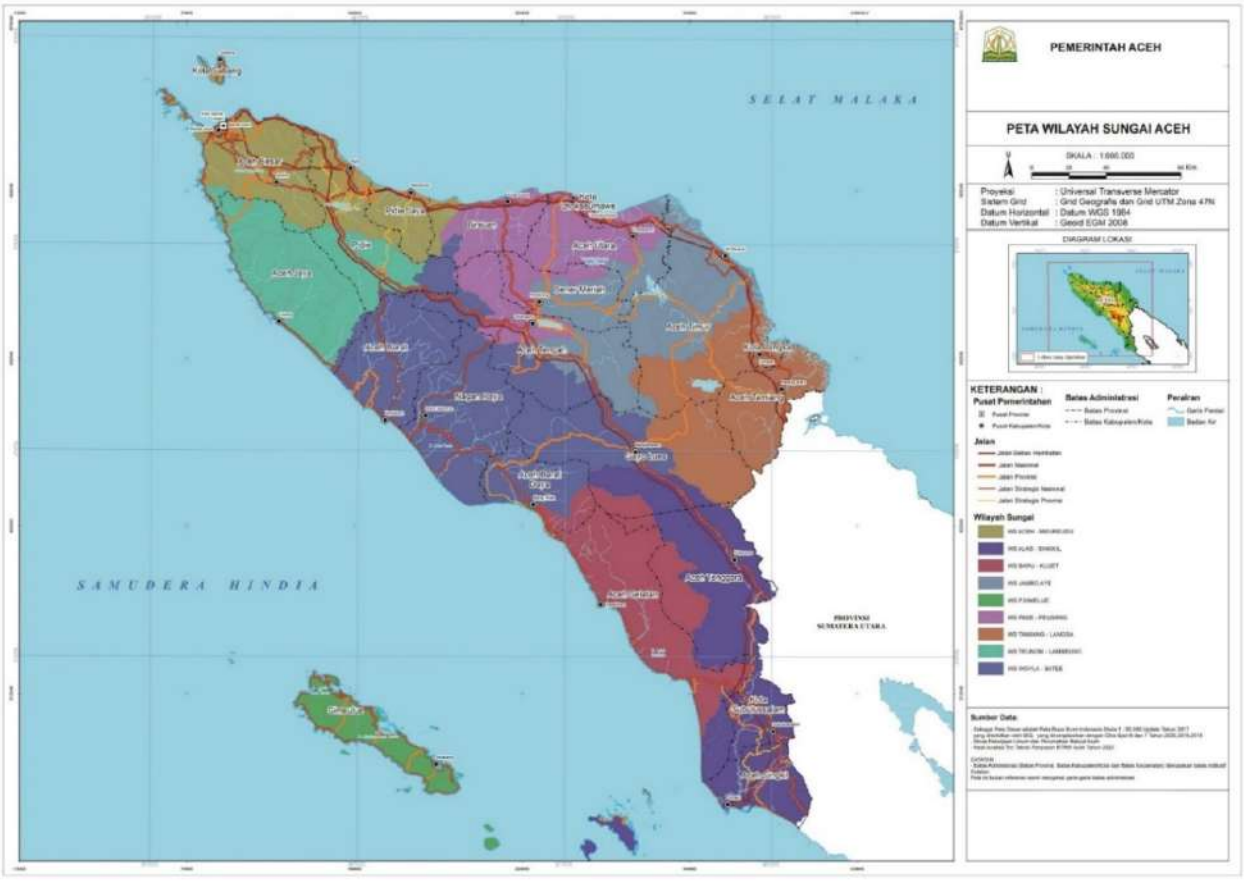

Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015

Gambar 2. 6
Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh

Tabel 2. 2
Jumlah DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan

No.	Kewenangan	Letak Geografis	Kode WS	Wilayah Sungai	Luas WS (Km2)	Jumlah DAS
I	Pemerintah Pusat	Strategis Nasional	WS 01.01.A3	Aceh – Meureudue	5.558,36	30
			WS 01.05.A3	Jambo Aye	6.781,05	13
			WS 01.04.A3	Woyla – Bateue	12.406,89	13
		Lintas Provinsi	WS 01.09.A2	Alas – Singkil	13.400,31	8
II	Pemerintah Aceh	Lintas Kabupaten/Kota	WS 01.03.B	Pase – Peusangan	5.601,34	10
			WS 01.06.B	Tamiang – Langsa	6.287,07	17
			WS 01.02.B	Teunom – Lambesoi	5.257,73	14
			WS 01.07.B	Baru – Kluet	5.311,44	21
III	Pemerintah Kabupaten	Dalam Kabupaten/Kota	WS 01.08.C	Pulau Simeulue	1.828,65	26

Sumber : Permen PUPR No. 04 Tahun 2015

Permasalahan pengelolaan sungai antara lain adalah: 1) terjadi degradasi beberapa daerah aliran sungai; 2) tingginya sedimentasi di muara sungai. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain: 1) rehabilitasi dan reboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis; dan 2) pengerukan sedimen pada muara sungai.

Arah dan pola aliran sungai yang melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama yaitu: sungai - sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia atau ke arah Barat - Selatan dan sungai - sungai yang bermuara ke Selat Malaka atau ke arah Timur - Utara. Potensi air di wilayah Provinsi Aceh dimana adanya ketersediaan air dan kebutuhan air pada Wilayah Sungai, dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai

No.	Nama Wilayah Sungai	Jumlah DAS	Panjang (Km)	Ketersediaan Air		Kebutuhan Air	
				m3/dt	milyar. m3/thn	m3/dt	milyar. m3/thn
KEWENANGAN PUSAT							
1.	WS Aceh – Meureudue	30	447,79	197,55	6,23	117,13	3,69
2.	WS Jambo Aye	13	660,16	200,41	6,32	91,01	2,87
3.	WS Woyla – Batee	13	547,40	638,64	20,14	109,40	3,45
4.	WS Alas – Singkil	8	639,80	890,73	28,09	109,72	3,46
KEWENANGAN PROVINSI							
5.	WS Pase- Peusangan	10	536	205,48	6,48	89,42	2,82
6.	WS Teunom– Lambesoi	14	502,20	604,71	19,07	89,1	2,81
7.	WS Tamiang-Langsa	17	261,30	354,20	11,17	129,38	4,08
8.	WS Baru-Kluet	21	128,95	248,29	7,83	102,11	3,22
KEWENANGAN KAB/KOTA							
9.	WS Simeulue	26	102,22	98,93	3,12	10,78	0,34
TOTAL		152	3.825,82	3.438,93	108,45	847,92	26,74

Sumber: Laporan Penyusunan Pola Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, 2017

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai menggambarkan bahwa potensi sumber daya air dengan debit yang ada dapat memenuhi berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan lain sebagainya. Pada Wilayah Krueng Aceh hingga Krueng Tiro, termasuk wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun dan dengan debit andalan 4 liter/detik/km^2, Wilayah Krueng Meureudu dan sepanjang wilayah pantai timur Aceh termasuk wilayah sedang dengan curah hujan 1.500 – 3.000 mm/tahun dengan debit andalan 7 – 8 liter/detik/km^2, dan wilayah pantai barat Aceh, yang termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000 – 4.000 mm/tahun dan dengan debit andalan 17 – 18 liter/detik/km^2. Peta Batas DAS yang menguraikan penyebaran DAS di Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.7. Potensi sumber daya air pada berbagai Wilayah Sungai menunjukkan bahwa debit yang tersedia pada prinsipnya dapat memenuhi kebutuhan air untuk irigasi, air baku, dan kebutuhan lainnya. Namun, pengelolaan yang belum optimal menyebabkan kejadian banjir dan kekeringan masih berulang, sehingga diperlukan penguatan konservasi, peningkatan efisiensi pemanfaatan air, serta budaya hemat air.

Pada saat bencana hidrometeorologi melanda wilayah Aceh pada akhir November 2025 yang lalu, wilayah Aceh dilanda hujan lebat hingga sangat lebat selama beberapa hari dengan curah hujan (>50 mm/hari) dengan akumulasi curah hujan melebihi 200 – 300 mm dalam satu episode kejadian. meningkatkan kejenuhan tanah di wilayah lereng serta limpasan permukaan pada kawasan perkotaan dan

dataran rendah. Wilayah dataran rendah dan pesisir timur sebagai hilir DAS utama seperti DAS Tamiang, DAS Jambo Aye, DAS Penggaraman, DAS Peusangan dan DAS Meureudu teridentifikasi memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir, sementara risiko longsor dominan pada wilayah perbukitan/pegunungan yang dipengaruhi kemiringan lereng, perubahan tata guna lahan, berkurangnya vegetasi, dan sistem drainase yang tidak memadai.



Sumber : SK.304/MenLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

Gambar 2. 7
Peta Batas DAS di Wilayah Aceh

A.2. Embung, Waduk dan Tampungan Air Lainnya

Embung merupakan bangunan konservasi air untuk menahan/menampung air bagi berbagai keperluan, dan di Aceh embung kewenangan provinsi diklasifikasikan berdasarkan fungsi konservasi pada Wilayah Sungai maupun untuk Daerah Irigasi. Keberadaan embung dan tampungan air perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi konservasi dan ketahanan air, termasuk dukungan terhadap layanan irigasi dan pengendalian kekeringan. Embung Kewenangan Pemerintah Aceh yang diklasifikasi berdasarkan pemanfaatan untuk konservasi pada Wilayah Sungai antara

lain Embung Teupin Keubu, Embung Paya Punjet dan Embung Lhok Gajah di Kab. Aceh Utara. Sedangkan embung kewenangan Pemerintah Aceh yang diklasifikasikan berdasarkan pemanfaatan untuk Daerah Irigasi yaitu Embung Paya Seupat, Embung Paya Reuleut, Embung Paya Pie, Embung Jurong Beurangkat, Embung Glee Bruk dan Embung Hutan Pantang di Kab. Pidie Jaya; Embung Paya Laot dan Embung Paya Sikameh di Kab. Bireuen; Embung Meurandeh di Kota Langsa.

Waduk adalah sebuah bendungan besar yang dibangun untuk menampung air dalam jumlah besar. Waduk sebagai tampungan berskala besar memiliki peran strategis untuk irigasi, air baku, energi, dan pengendalian banjir. Dalam kerangka penguatan ketahanan air dan energi, Aceh memiliki potensi pengembangan tampungan air pada beberapa lokasi waduk yang disebutkan dalam dokumen. Potensi ini perlu diintegrasikan dengan studi kelayakan, kesiapan lahan, analisis lingkungan, serta prioritas pembangunan. Potensi waduk diantaranya adalah, Waduk Lhok Pineung di Kabupaten Pidie Jaya dengan potensi tampungan mencapai 49 juta m^3, Waduk Tamiang Hulu di Kabupaten Aceh Tamiang dengan potensi tampungan mencapai 114,63 juta m^3, Waduk Krueng Sabee di Kabupaten Aceh Jaya dengan potensi tampungan mencapai 54,85 juta m^3 dan Waduk Krueng Kluet di Kabupaten Aceh Selatan dengan potensi tampungan mencapai 87,75 juta m^3.

A.3. Rawa

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak, Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung didalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang 12awasan12 datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena belum didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh yang telah ditetapkan. Dengan kata lain beberapa 12awasan rawa yang telah ditetapkan sebagai 12awasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (pertanian). Selanjutnya pengembangan rawa di luar 12awasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

Adapun Daerah Irigasi Rawa yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi antara lain D.I.R. Keutengga yang merupakan daerah irigasi rawa lintas kabupaten/kota yang tersebar di Kota Langsa, Kab. Aceh Timur dan

Kab. Aceh Tamiang; D.I.R. Babah Nipah di Kab. Aceh Jaya dan D.I.R. Seuneubok Padang Kab. Aceh Jaya.

A.4. Tambak

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak, Tambak adalah kolam air payau yang digunakan untuk budidaya perikanan darat berupa udang, ikan, kepiting, kerang-kerangan dan rumput laut. Jaringan irigasi tambak adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi tambak.

Adapun Daerah Irigasi Tambak yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi antara lain D.I.T. Pasi Sibadeh dan D.I.T. Trumon di Kab. Aceh Selatan; D.I.T. Julok dan D.I.T. Simpang Ulim di Kab. Aceh Timur; D.I.T. Seuneudon di Kab. Aceh Utara; D.I.T. Jeumpa Peusangan di Kab. Bireuen.

Tabel 2. 4
Potensi Danau Aceh

No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m3)
1.	Danau Aneuk Laot	Sabang	45,49	3.000.000
2.	Danau Laut Tawar	Aceh Tengah	5.654,00	175.000.000
3.	Danau Laut Penang Suasa	Aceh Jaya	47,73	7.064.040
4.	Danau Laut Bangko	Aceh Selatan	70,76	2.400.000
5.	Danau Peastep	Aceh Singkil	10,86	2.000.000
6.	Danau Paris	Aceh Singkil	57,75	877.650
7.	Danau Bungara	Aceh Singkil	77,78	1.446.375
8.	Danau Pinang	Aceh Singkil	34,49	516.750
9.	Danau Lincier	Aceh Singkil	64,53	9.034.200
10.	Danau Opupu	Simeulue	138,10	19.334.000
	Total		6.201,49	220.673.015

Sumber: Dinas Pengairan Aceh 2017 (data termutakhir)

A.5. Danau

Aceh memiliki beberapa danau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Data potensi dari danau – danau tersebut disajikan dalam Tabel 2.5 di atas. Potensi daya tampung air danau yang ada cukup tinggi sehingga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di sekitarnya, antara lain untuk penyediaan air bersih, media budidaya perikanan, tempat rekreasi, habitat bagi tumbuhan dan satwa. Selain itu, danau juga dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan pendidikan serta prasarana transportasi. Namun potensi danau tersebut belum dikelola secara optimal.

A.6. Pantai (Abrasi dan Pantai Kritis)

Kerusakan pantai (abrasi) masih terjadi dan berdampak pada panjang pantai kritis yang teridentifikasi. Penanganan menunjukkan adanya pengurangan panjang pantai kritis dibanding periode sebelumnya, namun beberapa kabupaten masih memiliki kondisi pantai kritis yang relatif besar dan membutuhkan intervensi berkelanjutan berbasis prioritas lokasi.

A.7. Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kelangsungan fungsi air tanah penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan pendayagunaan sumber daya air yang bersumber dari air tanah agar tidak terjadi kerusakan air tanah seperti amblesan tanah, kekeringan air tanah, dan intrusi air asin. Kegiatan pengelolaan air tanah yang dilakukan yaitu pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi pemetaan zona konservasi air tanah, penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah termasuk pembangunan sumur pantau dan pemutakhiran sumur pantau serta sumur masyarakat. Selain itu, kegiatan penatausahaan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi dan kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi Aceh. Sesuai dengan Peta Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh, dapat diidentifikasikan 14 (empat belas) CAT seperti disajikan pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5
Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh

No	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (HA)
1	Meulaboh	Aceh Barat	166,559.89
		Aceh Barat Daya	47,993.09
		Aceh Jaya	27,601.39
		Aceh Selatan	1,558.40
		Nagan Raya	205,378.09
2	Subulussalam	Aceh Selatan	110,517.86
		Aceh Tenggara	2,561.56
		Kota Subulussalam	85,521.37
		Aceh Singkil	136,164.79
3	Kota Fajar	Aceh Selatan	26,949.94
4	Kuta Cane	Aceh Tenggara	24,805.14
5	Siongal-ongal	Aceh Tenggara	2,029.26
		Gayo Lues	16,097.90
6	Langsa	Aceh Tamiang	66,986.10
		Aceh Timur	43,647.23
		Kota Langsa	20,118.51
7	Lhokseumawe	Aceh Timur	114,357.26
		Aceh Utara	171,618.32
		Bireuen	1,384.88
		Kota Lhokseumawe	15,343.51

No	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (HA)
8	Peudada	Aceh Utara	39,749.81
		Bener Meriah	28,975.66
		Bireuen	50,794.24
9	Lampahan	Aceh Tengah	16,348.21
		Bener Meriah	33,123.36
10	Telege	Aceh Tengah	26,288.19
		Nagan Raya	2,537.26
11	Kemiki	Bireuen	3,315.90
		Pidie	21,068.42
		Pidie Jaya	3,465.41
12	Jeunib	Bireuen	18,145.03
		Pidie Jaya	12,527.09
13	Sigli	Pidie	48,731.81
		Pidie Jaya	6,559.72
14	Banda Aceh	Pidie	13,990.81
		Kota Banda Aceh	5,616.66
		Aceh Besar	125,249.69
JUMLAH			1,743,681.75

Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033

Pengelolaan air tanah juga perlu didukung oleh kegiatan penyelidikan geologi yaitu inventarisasi serta evaluasi kondisi geologi dan hidrogeologi dengan data yang bersumber dari peta geologi, peta hidrogeologi, analisa laboratorium, dan peninjauan lapangan.

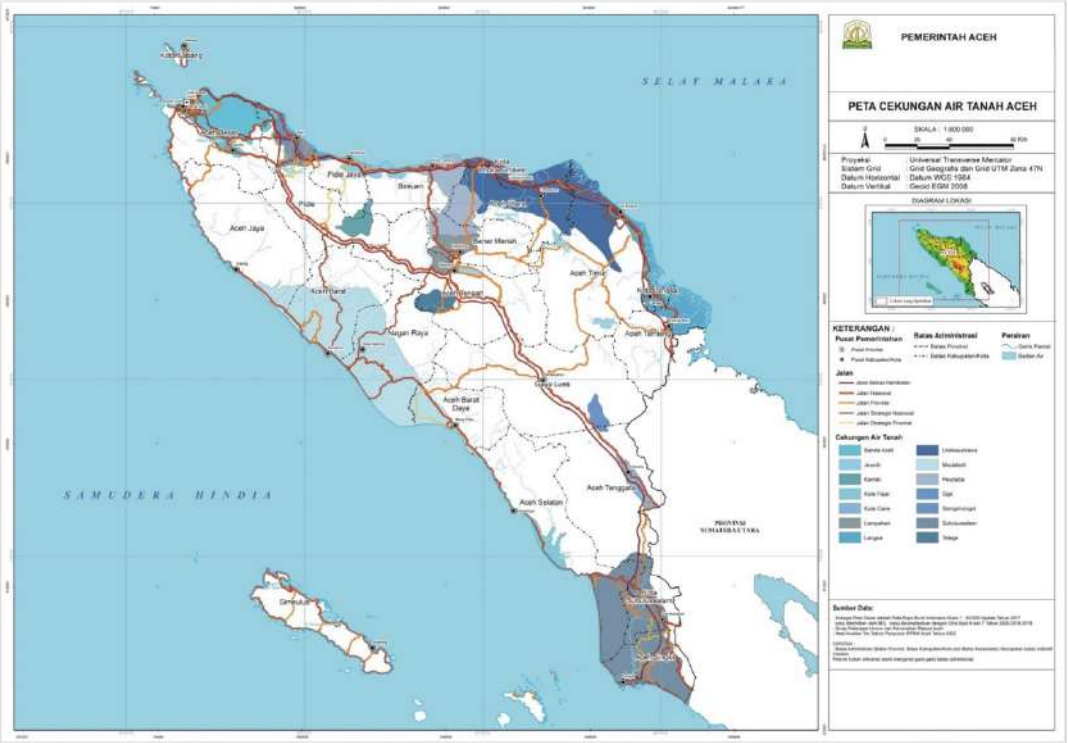

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017;Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018

Gambar 2. 8
Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Aceh

2.1.1.1.7. Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Aceh iklim ini dipengaruhi oleh arah angin yang senantiasa bertukar setiap tahunnya, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan data dari 5 stasiun meteorologi dan klimatologi yaitu Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh; Stasiun Meteorologi Maimun Saleh; Sabang, Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien, Nagan Raya; Stasiun Meteorologi Malikussaleh, Aceh Utara; dan Stasiun Klimatologi Aceh, Aceh Besar selama 20 tahun dari mulai tahun 2003-2022, diperoleh gambaran iklim di Aceh dalam jangka panjang.

Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 2898 mm dan 1352 mm. Wilayah Aceh bagian barat memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4960 mm dan 2878 mm. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4565 mm dan 970 mm. Berdasarkan data hujan tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi jumlah hujan tahunan yang meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

Suhu udara merupakan keadaan panas atau dinginnya suatu tempat pada waktu tertentu. Pengaruh langsung yang dirasakan di bumi sebagai akibat radiasi matahari adalah adanya perbedaan suhu udara di berbagai tempat. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki suhu udara berkisar antara 20,7-32,8°c. Wilayah Aceh bagian barat memiliki suhu udara berkisar antara 20,5-31,9°c. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki suhu udara berkisar antara 22,3-31,9°c. Suhu udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berbeda secara signifikan. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan suhu udara tahunan.

Kelembaban udara adalah banyak sedikitnya uap air yang ada di dalam udara. Kelembaban udara yang cukup besar pada suatu wilayah, memberikan informasi bahwa udara di wilayah tersebut banyak mengandung uap air atau udara dalam keadaan basah. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki kelembaban udara berkisar antara 73,0-86,5 persen. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 50,7-90,6 persen. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 78,5-89,5 persen. Kelembaban udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi penurunan tingkat kelembaban suhu udara tahunan yang tidak ekstrim.

Lamanya penyinaran matahari pada suatu periode tertentu merupakan indikator pengukur keadaan berawan suatu wilayah. Faktor-faktor yang

menyebabkan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi, yaitu: sudut datangnya sinar matahari, lamanya penyinaran matahari, serta keadaan permukaan bumi. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang mengalami penyinaran matahari berkisar antara 42,6-59,8 persen. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 36,8-65,8 persen. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 56,3-68,45 persen. Lamanya penyinaran matahari di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data penyinaran matahari tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan lamanya penyinaran matahari tahunan yang tidak ekstrim. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu udara.

Kecepatan angin merupakan kuantitas atmosterik fundamental yang disebabkan oleh pergerakan angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah yang diakibatkan karena perubahan suhu. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,6-6,8 knot. Wilayah Aceh bagian barat berkecepatan angin rata-rata antara 1,7-7,5 knot. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,4-7,5 knot. Kecepatan angin di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data kecepatan angin tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan tingkat kecepatan angin tahunan yang tidak ekstrim.

Hasil pengukuran iklim rata-rata di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2013-2022 yang ditentukan oleh parameter pengukuran suhu udara (℃), suhu udara maksimun (℃), suhu udara minimum (℃), kelembaban udara (%), lama penyinaran matahari (%), kecepatan angin rata-rata (knot) dan curah hujan (mm). Dari data tersebut bahwa suhu udara rata-rata sebesar 26,60 ℃, suhu udara maksimum 32,79 ℃ dan suhu udara minimun berkisar 22,31 ℃. Kelembaban udara di Provinsi Aceh sebesar 82,65 persen dengan kelembaban udara terendah sebesar 51 Kondisi iklim di Provinsi Aceh iklim ini dipengaruhi oleh arah angin yang senantiasa bertukar setiap tahunnya, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan data dari 5 stasiun meteorologi dan klimatologi yaitu Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh; Stasiun Meteorologi Maimun Saleh; Sabang, Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien, Nagan Raya; Stasiun Meteorologi Malikussaleh, Aceh Utara; dan Stasiun Klimatologi Aceh, Aceh Besar selama 20 tahun dari mulai tahun 2003-2022, diperoleh gambaran iklim di Aceh dalam jangka panjang.

Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 2898 mm dan 1352 mm. Wilayah Aceh bagian barat memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4960 mm dan 2878 mm. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki curah hujan

tahunan maksimum dan minimum sebesar 4565 mm dan 970 mm. Berdasarkan data hujan tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi jumlah hujan tahunan yang meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

Suhu udara merupakan keadaan panas atau dinginnya suatu tempat pada waktu tertentu. Pengaruh langsung yang dirasakan di bumi sebagai akibat radiasi matahari adalah adanya perbedaan suhu udara di berbagai tempat. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki suhu udara berkisar antara 20,7-32,8°c. Wilayah Aceh bagian barat memiliki suhu udara berkisar antara 20,5-31,9°c. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki suhu udara berkisar antara 22,3-31,9°c. Suhu udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berbeda secara signifikan. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan suhu udara tahunan.

Kelembaban udara adalah banyak sedikitnya uap air yang ada di dalam udara. Kelembaban udara yang cukup besar pada suatu wilayah, memberikan informasi bahwa udara di wilayah tersebut banyak mengandung uap air atau udara dalam keadaan basah. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki kelembaban udara berkisar antara 73,0-86,5 persen. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 50,7-90,6 persen. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 78,5-89,5 persen. Kelembaban udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi penurunan tingkat kelembaban suhu udara tahunan yang tidak ekstrim.

Lamanya penyinaran matahari pada suatu periode tertentu merupakan indikator pengukur keadaan berawan suatu wilayah. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi, yaitu: sudut datangnya sinar matahari, lamanya penyinaran matahari, serta keadaan permukaan bumi. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang mengalami penyinaran matahari berkisar antara 42,6-59,8 persen. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 36,8-65,8 persen. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 56,3-68,45 persen. Lamanya penyinaran matahari di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data penyinaran matahari tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan lamanya penyinaran matahari tahunan yang tidak ekstrim. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu udara.

Kecepatan angin merupakan kuantitas atmosterik fundamental yang disebabkan oleh pergerakan angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah yang diakibatkan karena perubahan suhu. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh

Besar, dan Sabang berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,6-6,8 knot. Wilayah Aceh bagian barat berkecepatan angin rata-rata antara 1,7-7,5 knot. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,4-7,5 knot. Kecepatan angin di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data kecepatan angin tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan tingkat kecepatan angin tahunan yang tidak ekstrim.

Hasil pengukuran iklim rata-rata di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2013-2022 yang ditentukan oleh parameter pengukuran suhu udara (℃), suhu udara maksimun (℃), suhu udara minimum (℃), kelembaban udara (%), lama penyinaran matahari (%), kecepatan angin rata-rata (knot) dan curah hujan (mm). Dari data tersebut bahwa suhu udara rata-rata sebesar 26,60 ℃, suhu udara maksimum 32,79 ℃ dan suhu udara minimun berkisar 22,31 ℃. Kelembaban udara di Provinsi Aceh sebesar 82,65 persen dengan kelembaban udara terendah sebesar 51,35 persen dan kelembaban udara tertinggi sebesar 84,34 persen. Lama penyinaran matahari rata-rata sebesar 55,13 persen, dengan hasil pengukuran lama penyinaran matahari yang terendah berada pada stasiun Banda Aceh dan stasiun Aceh Besar, sedangkan yang tertinggi berada pada stasiun Sabang dan stasiun Aceh Utara. Untuk kecepatan angin rata-rata, stasiun Sabang masih menempati rata-rata tertinggi sebesar 8,87 knot. Hasil pengukuran curah hujan di lima stasiun, bahwa pada stasiun Nagan Raya diperoleh curah hujan tertinggi dari semua stasiun dengan jumlah curah hujan rata-rata sebesar 3.853,30 mm. Hasil pengukuran iklim rata-rata di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2013-2022 disajikan pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2. 6
Data iklim rata-rata Provinsi Aceh Tahun 2013-2022.

No	Parameter	Iklim Rata-Rata Tahun 2013-2022					Rata-Rata
		Stasiun Sabang	Stasiun Banda Aceh	Stasiun Nagan Raya	Stasiun Aceh Utara	Stasiun Aceh Besar	
1	Suhu Udara	27,05	27,02	25,63	26,59	26,74	26,6
2	Suhu Udara Maksimum (℃)	30,85	32,41	31,2	31,27	32,79	31,7
3	Suhu Udara Minimum (℃)	22,31	23,29	22,45	23,14	22,59	22,76
4	Kelembaban Udara (%)	84,14	77,64	84,34	83,24	83,9	82,65
5	Lama Penyinaran Matahari (%)	57,9	51,35	54,77	60,14	51,5	55,13
6	Kec. Angin Rata-Rata (Knot)	8,87	4,99	4,11	4,09	2,42	4,89
7	Curah Hujan (mm)	2062,15	1989,3	3853,3	1439,42	1772,6	2223,35

Sumber : Data Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Aceh Tahun 2023 (data termutakhir)

Suhu udara selama periode tahun 2003 hingga 2022 berfluktuatif pada periode sembilan belas tahun terakhir. Suhu udara pada tahun 2003 sebesar 26.7 C menjadi 27.1 C pada tahun 2022, suhu tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 27,5 dan terendah pada tahun 2003 sebesar 26,7 C. Hal ini menunjukan

peningkatan sebesar 0.4 C atau suhu rata-rata mencapai 27.01 C. Pemerintah Aceh harus lebih serius dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan serta pengendalian Gas Rumah Kaca dan memahami serta mengambil langkah konkrit untuk perubahan iklim ini.

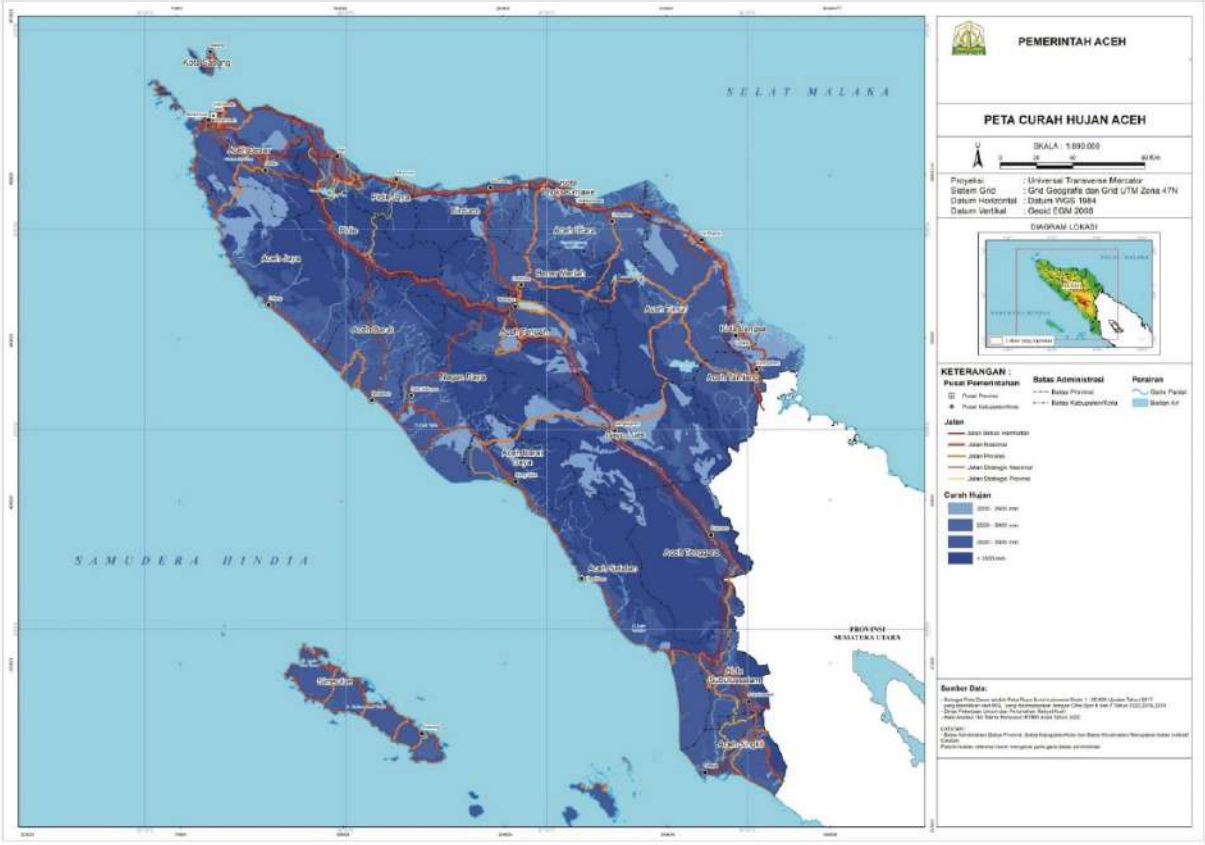

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017; Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018

Gambar 2. 9
Peta Curah Hujan Aceh

2.1.1.2. Karakteristik Demografi

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Aceh terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2025 jumlah penduduk Aceh sebanyak 5.668.416 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,80 dan kepadatan penduduk sebesar 99,73 per km. Peningkatan ini sangat signifikan dibandingkan tahun 2021 dimana jumlah penduduknya sebanyak 5.311.320 dengan laju pertumbuhan hanya 0,68 dan kepadatan penduduk 93,58 per km. Dalam kurun waktu lima tahun, laju pertumbuhan penduduk terbesar terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 1,9. Peningkatan jumlah penduduk disebabkan oleh meningkatnya angka kelahiran dan migrasi penduduk. Berikut gambaran jumlah dan pertumbuhan penduduk di Aceh.

Tabel 2. 7
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Aceh Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan	Kepadatan Penduduk per Km
2021	5.311.320	0,68	93,58
2022	5.432.312	0,60	92,27
2023	5.515,839	1,54	95,71
2024	5.623,479	1,91	97,03
2025	5.668.416	0,80	99,73

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2026 (Diolah)

Peningkatan jumlah penduduk Aceh masih terus terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Aceh, pada tahun 2026 jumlah penduduk Aceh berjumlah 5.715.781 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk-100,57 jiwa/km.

B. Distribusi Jumlah Penduduk

Distribusi penduduk Aceh periode tahun 2021-2025 tersebar di 18 (delapan belas) kabupaten dan 5 (lima) kota seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2. 8
Distribusi Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahun 2021-2025

Kabupaten/ Kota	Tahun									
	2021		2022		2023		2024		2025	
	Jumlah Penduduk	Angka Pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk	Angka Pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk	Angka Pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk	Angka Pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk	Angka Pertumbuhan penduduk
Aceh Selatan	236.487	-0,35	234.339	-0,99	236.933	1,11	239,629	1,13	240,613	0,41
Aceh Tenggara	227.456	0,12	228.175	0,20	231.331	1,38	235,589	1,81	237,213	0,69
Aceh Timur	429.094	0,63	441.719	1,34	449.796	1,83	461,391	2,51	466,225	1,05
Aceh Tengah	219.098	0,58	222.558	0,29	227.168	2,07	232,606	2,34	234,71	0,90
Aceh Barat	198.411	0,8	200.123	0,22	204.475	2,17	209,22	2,27	210,979	0,84
Aceh Besar	416.532	3,13	429.143	1,35	435.298	1,43	442,987	1,74	448,608	1,27
Pidie	435.797	-1,9	439.298	0,23	444.898	1,27	451,076	1,37	455,402	0,96
Aceh Utara	600.163	1,62	619.506	1,57	627.543	1,3	641,007	2,1	647,619	1,03
Simeulue	94.368	0,24	95.047	0,20	96.031	1,04	96,812	0,81	97,131	0,33
Aceh Singkil	129.333	1,26	131.423	0,26	135.435	3,05	140,461	3,58	141,435	0,69
Bireuen	444.383	0,32	451.952	0,25	458.978	1,55	468,696	2,07	473,042	0,93
Aceh Barat Daya	153.213	0,17	153.829	0,20	154.800	0,63	156,128	0,85	156,737	0,39
Gayo Lues	101.754	0,21	102.314	0,20	104.856	2,48	107,506	2,46	108,429	0,86
Aceh Jaya	94.761	2,11	97.124	1,34	99.717	2,67	101,407	1,67	101,815	0,40
Nagan Raya	172.484	0,13	173.316	0,20	176.461	1,81	181,103	2,56	181,953	0,47
Aceh Tamiang	300.831	0,45	303.471	0,32	308.102	1,53	312,061	1,27	313,245	0,38
Bener Meriah	166.448	2,94	171.400	1,20	175.781	2,56	181,376	3,08	183,043	0,92
Pidie Jaya	159.941	-1,39	160.828	0,21	163.591	1,72	166,517	1,76	167,354	0,50
Banda Aceh	253.198	1,72	255.409	0,33	259.538	1,62	265,31	2,18	267,736	0,91
Sabang	42.696	0,56	43.176	0,40	43.527	0,81	42,793	-1,72	42,989	0,46
Lhokseumawe	191.034	0,29	192.860	0,34	196.067	1,66	198,705	1,33	199,571	0,44
Langsa	185.836	-1,29	186.211	0,13	182.469	-2,01	183,914	0,79	184,016	0,06

Kabupaten/ Kota	Tahun									
	2021		2022		2023		2024		2025	
	Jumlah Penduduk	Angka Pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk	Angka Pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk	Angka Pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk	Angka Pertumbuhan penduduk	Jumlah Penduduk	Angka Pertumbuhan penduduk
Subulussalam	94.571	3,39	99.091	1,79	103.044	3,99	107,185	3,86	108,551	1,27
Aceh	**5.311.320**	**0,68**	**5.432.312**	**0,60**	**5.515.839**	**1,54**	**5.623.479**	**1,91**	**5.668.416**	**0,80**

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2026 (Diolah)

Selama periode 2021-2025 peningkatan angka pertumbuhan penduduk yang paling tinggi terjadi di Kota Subulussalam, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Besar. Adapun angka pertumbuhan penduduk paling rendah selama periode 2021-2025 adalah Kota Langsa, Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Selatan.

C. Struktur Penduduk

Struktur penduduk Aceh memiliki pola struktur yang relatif serupa dengan struktur penduduk nasional yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) Piramida penduduk muda, yang menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Struktur penduduk ini menunjukkan jumlah angka kelahiran lebih besar dari jumlah kematian; 2) Piramida stationer, yang menggambarkan keadaan penduduk yang tetap (statis) karena tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran relatif tidak tinggi; dan 3) Piramida penduduk tua, yang menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang relatif kecil.

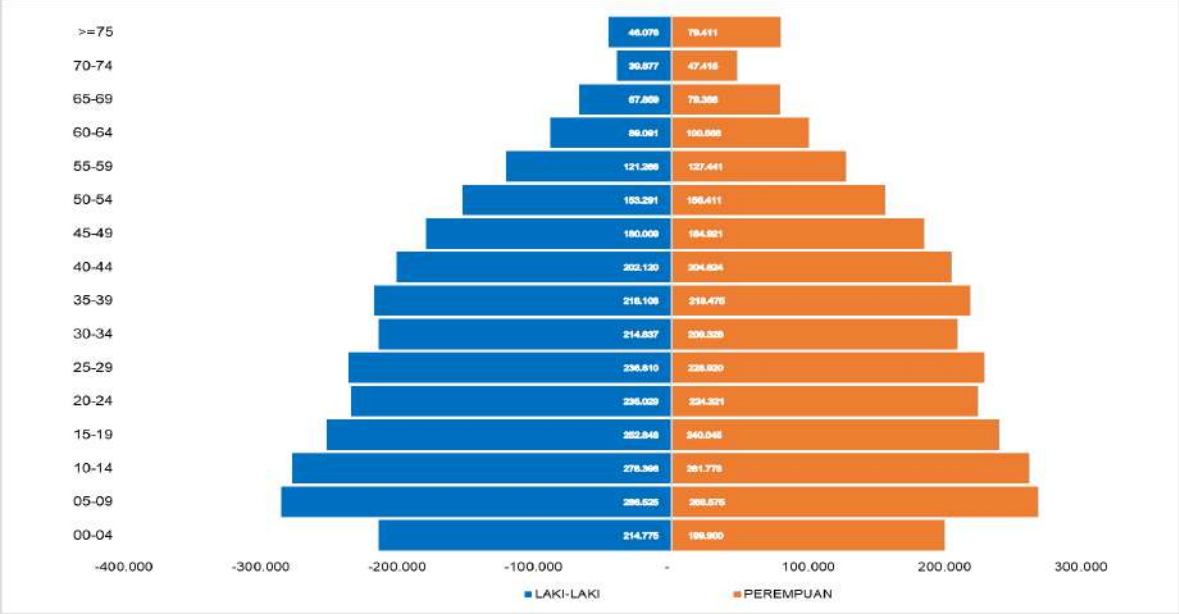

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2026 (Diolah)

Gambar 2. 10
Struktur Penduduk Aceh Tahun 2025 (Jiwa)

Pada grafik piramida menunjukkan bahwa jumlah terbesar menurut kelompok umur adalah umur (05-09) tahun, yaitu 553.342 jiwa. Jumlah penduduk yang berada pada kelompok umur (≤ 34) tahun adalah 3.384.620 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang berada pada kelompok umur (> 34) tahun adalah 2.238.859 jiwa. Suatu hal yang menarik yang ditampilkan oleh piramida penduduk tahun 2025.

Pada Gambar 2.10 adalah menyusutnya penduduk yang berusia 00-04 tahun yang cukup besar sehingga bentuk piramida di dasarnya menjadi lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa piramida penduduk Aceh secara teoritis sudah mulai bergerak kearah bentuk yang konstruktif. Fenomena bentuk piramida penduduk seperti ini secara demografi berlaku di daerah yang semakin maju perekonomiannya dengan ciri fertilitas yang semakin turun. Fenomena ini terindikasi tidak mengikuti teori demografi seperti tersebut dimana Tingkat perekonomian Aceh masih rendah namun piramida penduduknya sudah berbentuk konstruktif.

2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan Rancangan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2023-2043 menetapkan kawasan strategis Aceh dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun yang berada di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk mewujudkan peningkatan investasi di Aceh melalui pengembangan dan penataan kawasan ekonomi yang berorientasi pada sektor industri, energi, chemical, logistik, pariwisata, dan perdagangan. Pengembangan Kawasan Industri Ladong yang berada di KPI Indrapatra Kabupaten Aceh Besar untuk mewujudkan pengembangan agroindustri, chemical, manufaktur, pusat logistik, dan industri halal. Pengembangan Kawasan Industri Lampulo yang berada di KPI Kuta Raja Kota Banda Aceh untuk penanganan dan pengolahan perikanan. Pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi BASAJAN yang berada di Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kabupaten Aceh Besar; Kawasan Pertumbuhan Ekonomi BARSELA yang berada di wilayah barat-selatan Aceh; Kawasan Pertumbuhan Ekonomi TATIMLAGA yang berada di wilayah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, dan Gayo Lues; Kawasan Pertumbuhan Ekonomi DTGA yang berada di wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; untuk memajukan penataan ekonomi kawasan dengan bentuk kerja sama regional dalam hal penataan dan pengembangan kawasan, daya dukung dan daya tampung ruang, dan pengembangan infrastruktur penghubung.

Selain itu, pengembangan kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau Aceh Trade and Distribution Centre (ATDC), meliputi: 1) Zona Pusat/Banda Aceh dan sekitarnya; 2) Zona Utara/Lhokseumawe dan sekitarnya; 3) Zona

Timur/Langsa dan sekitarnya; 4) Zona Tenggara/Aceh Tenggara dan sekitarnya; 5) Zona Selatan /Aceh Selatan dan sekitarnya; 6) Zona Barat/Aceh Barat dan sekitarnya;

2.1.1.4. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat atau kategori risiko bencana di Indonesia, yaitu: kategori rendah (<36), sedang (36-144) dan tinggi (>144). Data tahun 2025, menunjukkan IRB Provinsi Aceh memiliki tingkat risiko bencana sedang mencapai 142,96. Sebaran IRB di Provinsi Aceh disajikan dalam Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2. 9
Indeks Risiko Bencana Provinsi Aceh Tahun 2021-2025

No.	Kabupaten/Kota	Indek Risiko Bencana (IRB)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Simeulue	162,00	162,00	171,20	162,00	156,27
2	Aceh Singkil	178,00	178,00	118,31	178,00	178,00
3	Aceh Selatan	171,20	171,20	164,56	171,20	171,20
4	Aceh Tenggara	120,03	121,43	118,95	112,89	115,85
5	Aceh Timur	166,74	173,00	185,57	155,31	159,83
6	Aceh Tengah	124,80	121,46	202,01	116,18	117,94
7	Aceh Barat	179,15	179,15	159,02	173,76	158,10
8	Aceh Besar	209,78	207,78	165,86	195,61	199,78
9	Pidie	163,20	163,15	162,00	151,00	155,66
10	Bireuen	168,00	165,83	178,00	155,99	150,27
11	Aceh Utara	175,20	170,46	163,23	166,20	165,37
12	Aceh Barat Daya	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20
13	Gayo Lues	97,59	97,59	94,63	98,40	98,40
14	Aceh Tamiang	139,20	133,66	166,09	125,06	118,87
15	Nagan Raya	200,08	200,08	197,60	192,31	182,62
16	Aceh Jaya	165,00	166,43	129,56	175,54	170,62
17	Bener Meriah	119,36	115,98	112,63	108,97	103,67
18	Pidie Jaya	137,60	137,60	137,60	137,60	137,60
19	Banda Aceh	117,02	109,29	102,93	105,80	111,19
20	Sabang	108,65	113,73	113,73	113,73	113,73
21	Langsa	138,73	130,44	134,83	136,99	117,08
22	Lhokseumawe	130,11	132,70	124,22	115,04	136,34
23	Subulussalam	95,20	95,20	92,88	87,87	83,55
IRB Provinsi Aceh		**153,58**	**149,99**	**149,10**	**146,90**	**142,96**
IRB Nasional		**138,81**	**135,56**	**132,25**	**128,52**	**147,95**

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2026

Potensi ancaman bahaya dan risiko dari suatu bencana berkaitan dengan kondisi wilayah. Kondisi wilayah Aceh yang meliputi geografi, kependudukan, perekonomian dan sebagainya menentukan tingkat kerentanan wilayah jika terjadi suatu bencana. Potensi risiko bencana akan meningkat dan memberikan dampak yang besar apabila kapasitas wilayahnya rendah. Aceh memiliki riwayat terjadinya bencana di masa lalu, yang tentu harus diantisipasi kemungkinan berulangnya kejadian bencana tersebut dalam skala yang lebih besar.

Kerawanan bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Potensi bencana alam di Aceh adalah bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, likuefaksi dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi serta cuaca ekstrem).

Bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Potensi bencana non alam di Aceh antara lain yaitu epidemi dan wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia). Pandemi Covid- 19 yang terjadi di Indonesia tahun 2020 lalu merupakan salah satu jenis bencana non-alam. Jenis bencana yang terakhir adalah bencana sosial yang merupakan bencana akibat serangkaian peristiwa oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Berdasarkan catatan historis kebencanaan, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Aceh dalam beberapa tahun terakhir (2019-2025) mengalami kecendrungan penurunan kejadian bencana setiap tahunnya. Data kebencanaan dapat dilihat pada gambar 2.11. berikut. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2019 hingga tahun 2025 dilaporkan sebanyak 3.796 kejadian bencana atau rata-rata 542 kejadian bencana per tahun. Sehingga potensi bencana di Aceh menjadi 9 jenis.

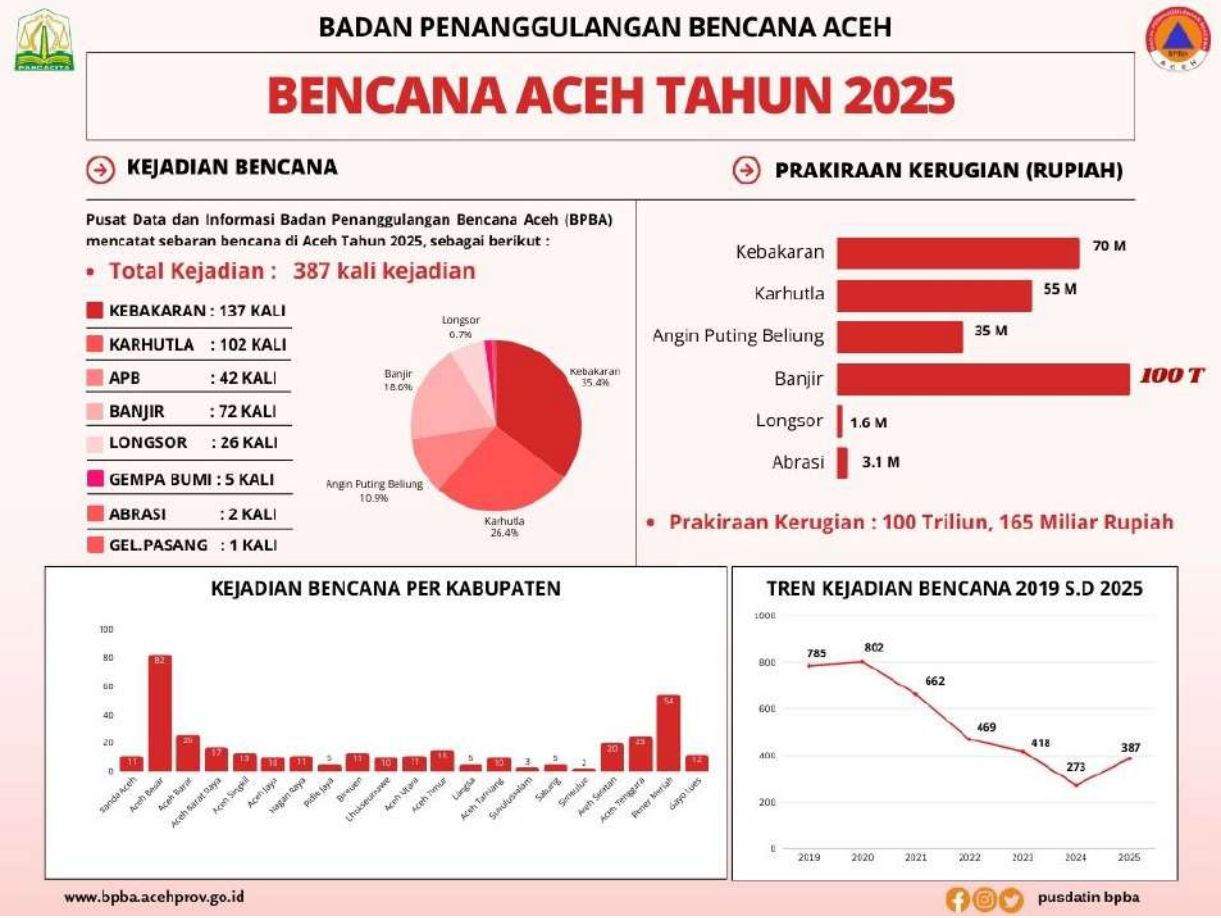

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2025

Gambar 2. 11
Data Bencana Aceh Tahun 2017-2025

Tabel 2. 10
Potensi Bencana di Aceh

No.	Jenis Bencana	No.	Jenis Bencana
1	Gempa Bumi	8	Kebakaran Hutan dan Lahan
2	Gunung Api	9	Angin Puting Beliung
3	Tsunami	10	Gelombang Pasang atau Badai
4	Longsor	11	Abrasi
5	Banjir	12	Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19)
6	Banjir Bandang	13	Likuifaksi
7	Kekeringan	14	Ledakan Sumur Minyak Masyarakat
8	Kebakaran		

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, dan hasil Kajian Risiko Bencana Aceh 2020-2025

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 6 ayat (1) sampai ayat (7) bahwa pemerintah daerah diwajibkan Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dokumen RPB merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengurangi risiko akibat dampak bencana dengan perencanaan

pembangunan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan. Penyusunan dokumen RPB melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait penanggulangan kebencanaan di daerah, mulai dari pengumpulan data, cek lapangan, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok subtansi, diskusi publik, paparan draft RPB hingga finalisasi penyusunan dokumen RPB.

Penyusunan dokumen RPB Aceh menyikapi tingginya potensi bencana yang terjadi di Provinsi Aceh. secara historis, di Aceh telah mengalami beberapa jenis bencana alam seperti abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2025 dan terjadi penurunan pada tahun 2021 hingga 2025. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2017 hingga tahun 2025 dilaporkan sebanyak 4.342 kejadian bencana atau rata-rata 482 kejadian bencana per tahun. Jumlah dan jenis kejadian bencana dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2025 dapat dilihat padaTabel 2.11 Tabel di bawah ini :

Tabel 2. 11
Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2025

Jenis Bencana		Tahun									Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Gempa Bumi	1	6	14	21	1	2	2	1	5	53
2	Letusan Gunung Api	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tanah Longsor	18	27	46	57	42	35	27	14	26	292
5	Banjir	61	80	102	108	112	120	105	68	72	828
6	Banjir Bandang	5	7	8	5	6	4	3	4	0	42
7	Kekeringan	-	-	-	2	-	-	1	2	0	5
8	Kebakaran	71	97	285	289	269	153	149	86	137	1536
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	9	66	220	205	133	79	85	63	102	962
10	Angin Puting Beliung	17	71	102	100	89	71	44	34	42	570
11	Gelombang Pasang	2	0	2	3	5	1	0	0	1	14
12	Abrasi	1	7	6	12	5	4	2	1	2	40
13	Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Likuifaksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		185	361	785	802	662	469	418	273	387	4288

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2025

Dari 14 jenis bencana tersebut diatas, masih terdapat 1 bencana tambahan berupa bencana ledakan sumur minyak masyarakat yang kerap terjadi di kabupaten Aceh Timur. Melihat jumlah dan jenis bencana tersebut diatas, sehingga dibutuhkan RPB Aceh yang komprehensif, terpadu dan optimal. Optimalisasi perencanaan

penanggulangan bencana tersebut dilakukan melalui pelibatan setiap pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana serta pengintegrasian RPB Aceh ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). RPB Aceh memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Aceh.

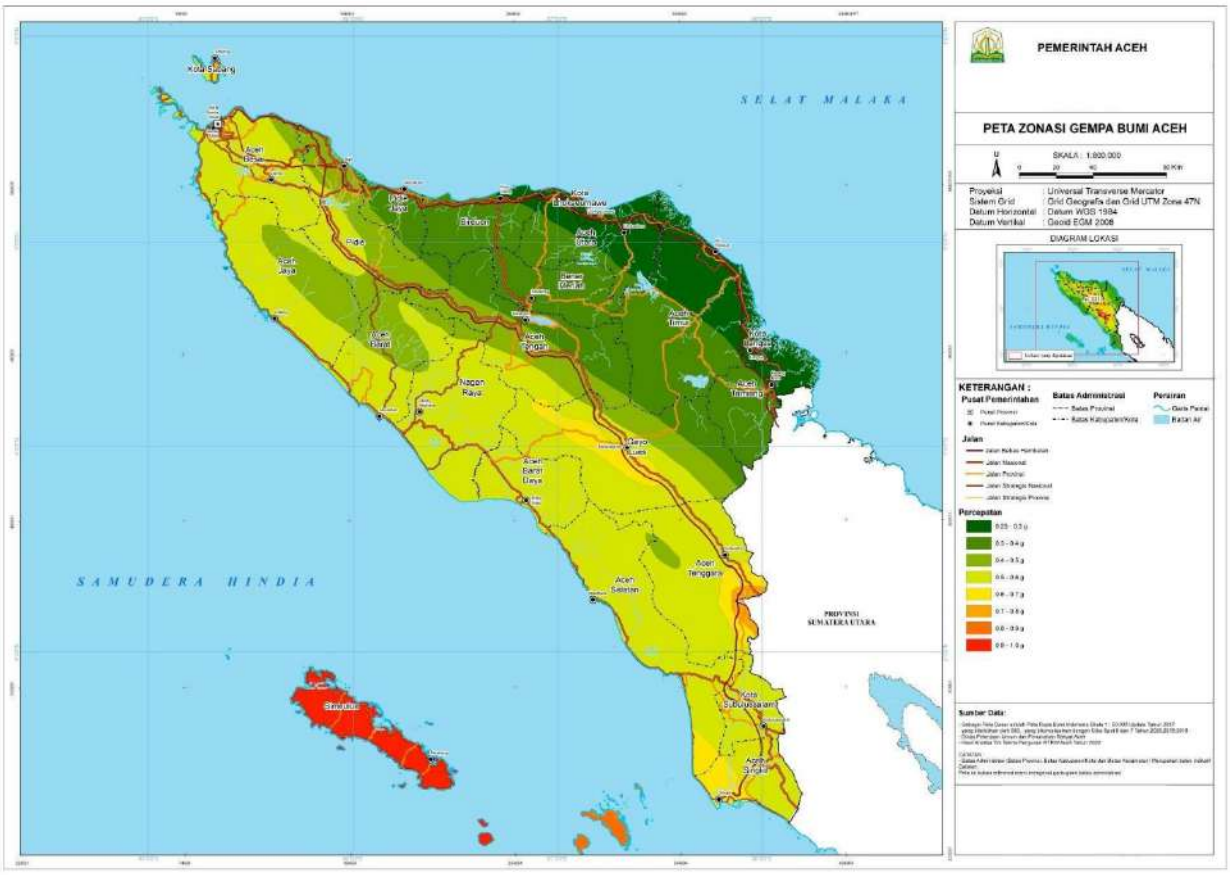

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2023

Gambar 2. 12
Peta Rawan Bencana Gempa Aceh

Berdasarkan peta di atas hanya Kabupaten Bener Meriah, Nagan Raya dan Gayo Lues yang memiliki indeks rawan bencana gempa bumi moderat. Selebihnya termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian bencana banjir bandang diketahui melanda beberapa kabupaten seperti Kabupaten Pidie (Krueng Tangse), Kabupaten Aceh Tenggara (Sungai Lawe Sigala-gala), dan Kabupaten Gayo Lues. Banjir bandang telah menimbulkan kerugian harta benda dan merenggut korban jiwa akibat dari rusaknya lingkungan. Demikian juga dengan banjir genangan yang secara rutin dan berkala terjadi di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Aceh Singkil. Bencana tanah longsor

terjadi pada beberapa kabupaten seperti Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Pidie, lintasan perbatasan Aceh Besar dan Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Bener Meriah serta Kabupaten Aceh Tengah. Peta sebaran risiko bencana banjir di Aceh dapat dilihat pada peta berikut.

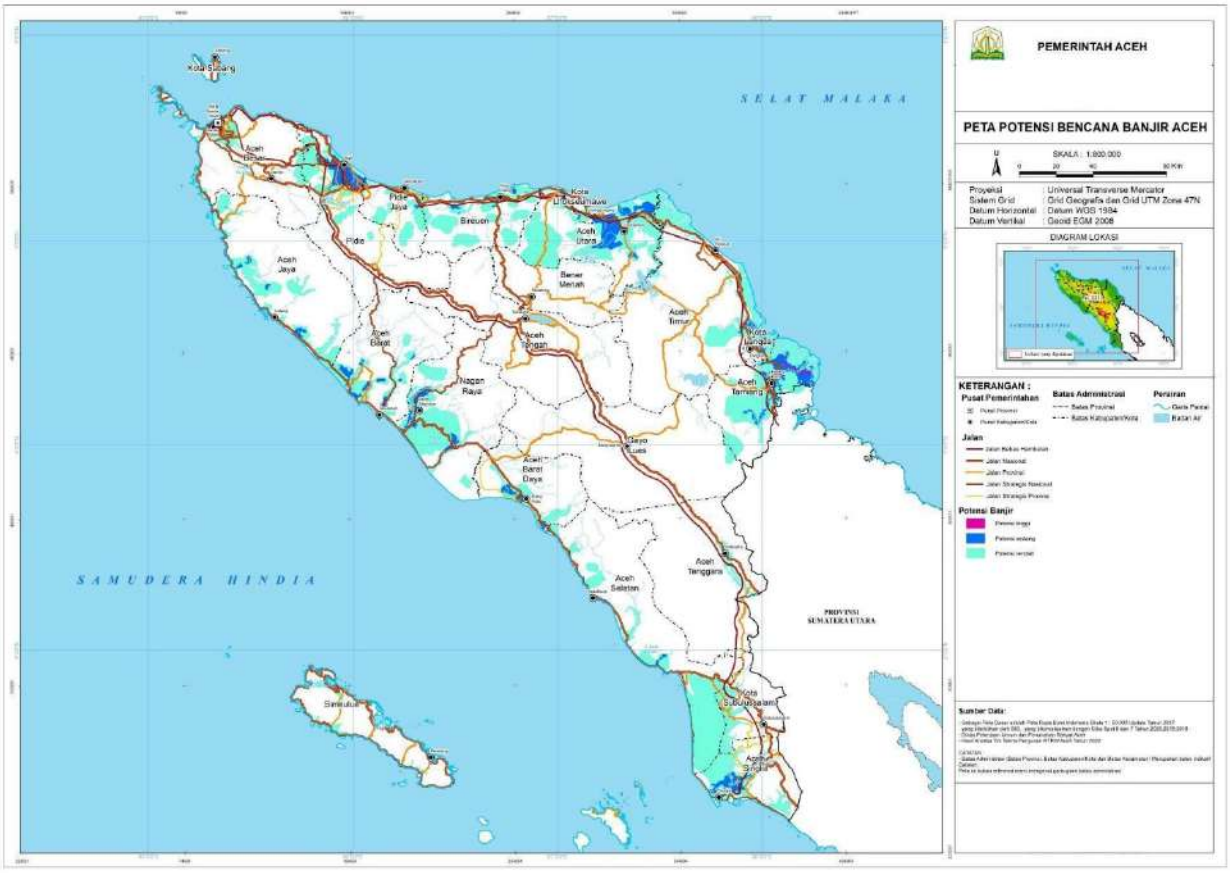

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2023

Gambar 2. 13
Peta Risiko Bencana Banjir Aceh

Bahaya bencana banjir di Aceh berdampak terhadap 5.205 desa di setiap kabupaten kota dengan dominasi risiko paparan sedang. Wilayah dengan risiko paparan bencana banjir tertinggi ditunjukkan kepada Aceh Besar dengan sebaran 706 desa yang terpapar risiko bencana banjir dominasi sedang. Adapun wilayah Kota Sabang berada pada tingkat risiko terkecil dengan 5 desa yang berisiko terpapar bencana banjir dominasi rendah.

Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA pada tahun 2025 Periode Januari hingga Desember menunjukkan bahwa bencana banjir sudah terjadi sebanyak 72 kali yang berdampak pada 247.771 rumah masyarakat rusak, hilang atau terendam, 223 jembatan dan 7 tanggul rusak serta 49.868 hektar sawah

terendam dengan total pengungsi sebantak 925.246 orang. Berdasarkan data kebencanaan Aceh dapat dibagi dalam beberapa kawasan rawan bencana yaitu:

1. Kawasan gelombang pasang, tersebar pada kawasan pantai meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simeulue, dan Sabang;
2. Kawasan rawan banjir, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir, yang tersebar pada beberapa kawasan yaitu pada Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya;
3. Kawasan rawan kekeringan, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan, meliputi sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Nagan Raya;
4. Kawasan rawan angin badai, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin badai, meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisir utara-timur, pesisir barat-selatan, Pulau Simeulue dan Pulau Weh serta pulau-pulau kecil terluar lainnya;
5. Kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki risiko tinggi jika terjadi gempa bumi dengan skala VII – XII MMI (Modified Mercally Intensity) meliputi seluruh wilayah Aceh;
6. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, Nagan Raya;
7. Kawasan rawan tsunami, ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki risiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi kabupaten/kota pesisir yang menghadap perairan Samudera Hindia di sebelah Barat, perairan Laut Andaman di sebelah Utara, dan sebagian di Selat Malaka di sebelah Utara dan Timur;
8. Kawasan rawan abrasi, yaitu kawasan di sepanjang pesisir wilayah Aceh meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil dan pulau-pulau terluar lainnya;
9. Kawasan rawan erosi mencakup seluruh wilayah di sepanjang aliran sungai besar dan/atau sungai berarus deras;
10. Kawasan rawan bahaya gas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayah-wilayah gunung api seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Sabang;

11. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.
12. Kawasan rawan bencana Likuefaksi meliputi wilayah Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Subulussalam.

Data tahun 2023, menunjukkan Provinsi Aceh masih memiliki tingkat risiko bencana tinggi mencapai 146.9/tinggi Sedangkan pada tahun 2024, nilai IRB Provinsi Aceh mengalami koreksi menjadi lebih rendah dengan nilai IRB sebesar 144.29/tinggi. Namun demikian IRB Aceh masih berada pada tingkatan 'tinggi', sehingga masih dibutuhkan usaha untuk mencapai angka IRB dengan tingkatan 'sedang'. Sebagian besar kabupaten/kota di Aceh terkategori memiliki risiko tinggi (peta bergambar merah), sisanya sebanyak 11 wilayah kabupaten/kota tergolong berisiko sedang. Untuk itu perlu dilakukan upaya mitigasi, adaptasi, ketahanan tinggi, terstruktur, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar IRB di Provinsi diturunkan menjadi kategori rendah. Peta sebaran Indeks Rawan Bencana Aceh disajikan pada Gambar 2.14.

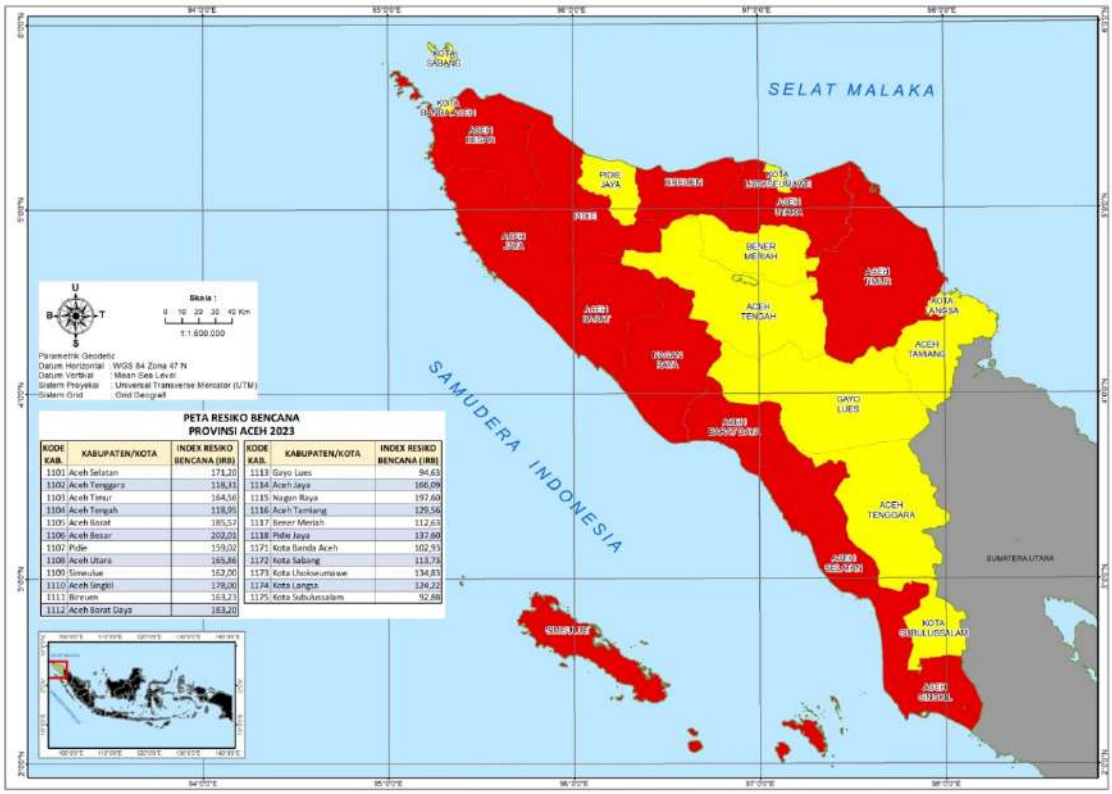

KODE KAB.	KABUPATEN/KOTA	INDEX RESIKO BENCANA (IRB)	KODE KAB.	KABUPATEN/KOTA	INDEX RESIKO BENCANA (IRB)
1101	Aceh Selatan	171,20	1113	Gayo Lues	94,63
1102	Aceh Tenggara	118,31	1114	Aceh Jaya	166,09
1103	Aceh Timur	164,56	1115	Nagan Raya	197,60
1104	Aceh Tengah	118,95	1116	Aceh Tamiang	129,56
1105	Aceh Barat	185,57	1117	Bener Meriah	112,63
1106	Aceh Besar	202,01	1118	Pidie Jaya	137,60
1107	Pidie	159,02	1171	Kota Banda Aceh	102,93
1108	Aceh Utara	165,86	1172	Kota Sabang	113,73
1109	Simeulue	162,00	1173	Kota Lhokseumawe	134,83
1110	Aceh Singkil	178,00	1174	Kota Langsa	126,22
1111	Bireuen	163,23	1175	Kota Subulussalam	92,88
1112	Aceh Barat Daya	183,20			

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2024

Gambar 2. 14
Peta Indeks Rawan Bencana Aceh

2.1.1.5. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Semakin tinggi nilai IKD, semakin baik kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan merespons tantangan-tantangan yang mungkin timbul. IKD tertinggi diraih oleh Kabupaten Aceh Barat dengan indeks sebesar 0,54, menyusul Kabupaten/Kota Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Banda Aceh dengan angka IKD masing-masing sebesar 0,48, 0,44, 0,44, dan 0,44 Selanjutnya daerah yang memiliki nilai IKD terendah sebesar 0,21 adalah Kabupaten Aceh Selatan. Nilai IKD setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 2.12. di bawah ini.

Tabel 2. 12
Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Aceh Tahun 2020-2025

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Simeulue		0,29	0,29	0,29	0,30	0.34
2.	Aceh Singkil		0,23	0,23	0,29	0,29	0.27
3.	Aceh Selatan		0,22	0,22	0,30	0,29	0.21
4.	Aceh Tenggara	0,36	0,41	0,34	0,38	0,42	0.41
5.	Aceh Timur	0,42	0,42	0,42	0,42	0,46	0.36
6.	Aceh Tengah		0,20	0,35	0,36	0,37	0.37
7.	Aceh Barat	0,42	0,42	0,42	0,42	0,45	0.54
8.	Aceh Besar	0,30	0,33	0,34	0,36	0,38	0.37
9.	Pidie	0,27	0,29	0,32	0,35	0,40	0.39
10.	Bireuen		0,21	0,34	0,34	0,39	0.40
11.	Aceh Utara		0,29	0,35	0,36	0,34	0.35
12.	Aceh Barat Daya	0,23	0,25		0,30	0,31	0.32
13.	Gayo Lues	0,39	0,39		0,39	0,25	0.25
14.	Aceh Tamiang	0,40	0,41	0,41	0,42	0,44	0.48
15.	Nagan Raya	0,30	0,34		0,34	0,36	0.41
16.	Aceh Jaya	0,47	0,48	0,38	0,39	0,29	0.40
17.	Bener Meriah		0,36	0,37	0,38	0,40	0.44
18.	Pidie Jaya		0,28	0,27	0,29	0,29	0.32
19.	Banda Aceh	0,64	0,58	0,59	0,61	0,48	0.44
20.	Sabang	0,42	0,45	0,30	0,30	0,29	0.31
21.	Langsa	0,32	0,36	0,42	0,42	0,40	0.43
22.	Lhokseumawe			0,41	0,40	0,49	0.41
23.	Subulussalam	0,26	0,26	0,31	0,35	0,40	0.42
	Aceh				**0,37**		**0.38**

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2026

2.1.1.6. Sosiologi

Secara sosiologi penduduk Aceh sangat kental dengan nilai Agama Islam yang sangat mempengaruhi tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pemerintahannya dan tatalaksananya sangat diperngaruhi dengan Syariat Islam dimana Aceh memiliki kelembagaan Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), Dinas Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan tata nilai Syariat Islamnya. Sedangkan secara adat budaya Aceh memiliki lembaga Majelis Adat Aceh, Lembaga Wali Nanggroe dengan tata nilai adatnya.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh. Untuk mendukung aktivitas lembaga Wali Nanggroe membutuhkan infrastruktur penunjang berupa gedung sekretariat perkantoran dan tempat tinggal Wali Nanggroe.

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Aceh didasarkan pada norma-norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal itu, maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan dengan ciri-ciri perilaku/karakternya dalam kehidupan masyarakat Aceh yang bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesahajaan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejuangannya.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan angka Pertumbuhan Ekonomi tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) merupakan cerminan dari kinerja perekonomian Aceh. Selama kurun waktu 2019-2023, pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami fluktuasi dan konstraksi. Pada tahun 2019, Pertumbuhan Ekonomi Aceh mencapai 4,14 persen, namun pada tahun

2020 mengalami kontraksi sebesar 0,37 persen. Kondisi ini relevan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, yang mana pada tahun 2019 telah mencapai 5,02 persen, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga 0,27 persen. Kontraksi ekonomi Aceh dan nasional merupakan dampak dari resesi ekonomi global yang diakibatkan pandemi Covid-19 yang mengharuskan negara-negara memberlakukan pembatasan pergerakan orang dan barang (*lockdown*).

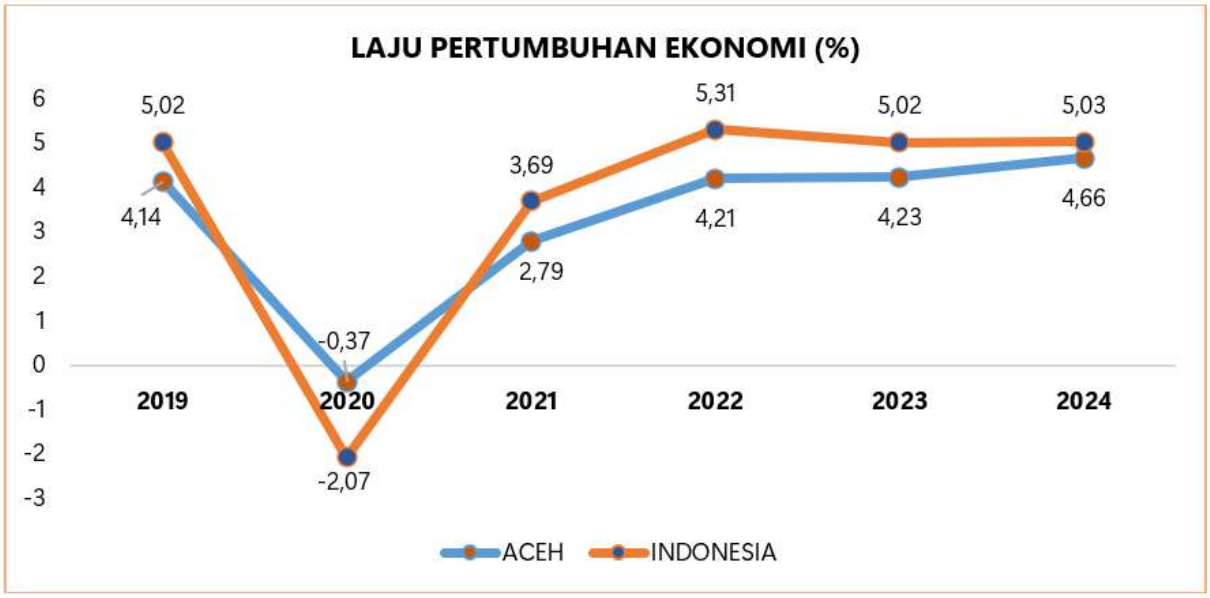

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh dan Nasional, 2025

Gambar 2. 15
Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, dan Nasional, Tahun 2019- 2024
(Persen)

Paska Covid 19, Perekonomian Aceh mulai berangsur membaik sebagai dampak positif dari upaya pemulihan ekonomi nasional dan global. Laju pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2021 sebesar 2,79 persen, kemudian meningkat mencapai 4.23 persen pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 menjadi 4,66 persen. Begitu juga dengan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 3,69 persen pada tahun 2021, melonjak hingga 5,31 persen pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 5.05 persen pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 5,03 persen.

Secara umum ekonomi Aceh mengalami pergerakan yang relatif sama dengan nasional dan terjadi kontrasksi pertumbuhan pada tahun 2020 akibat Covid 19. Pada tahun 2023-2024 laju pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami perlambatan pertumbuhan, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Aceh masih berada dibawah rata-rata nasional.

Bila ditinjau berdasarkan komposisi penyumbang, pertumbuhan ekonomi dengan migas dan non migas selama periode 2019-2024 juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Kinerja perekonomian Aceh Non Migas tumbuh signifikan bila dibandingkan dengan migas. (Gambar 2.10). Perekonomian dengan Migas tumbuh signifikan pada tahun 2024 sebesar 4.66 persen bila dibandingkan tahun 2023 sebesar 4.23 persen, sedangkan laju pertumbuhan tanpa Migas tumbuh sebesar 4.91 persen dan pengalami perlambatan pada tahun 2024 yang tumbuh sebesar 4.69 persen.. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Aceh secara umum mengalami perubahan dari dominasi sektor migas menuju sektor non migas. Dengan demikian, tingkat ketergantungan ekonomi Aceh terhadap sektor migas mulai berkurang dan sektor non migas tercatat tumbuh relatif lebih stabil.

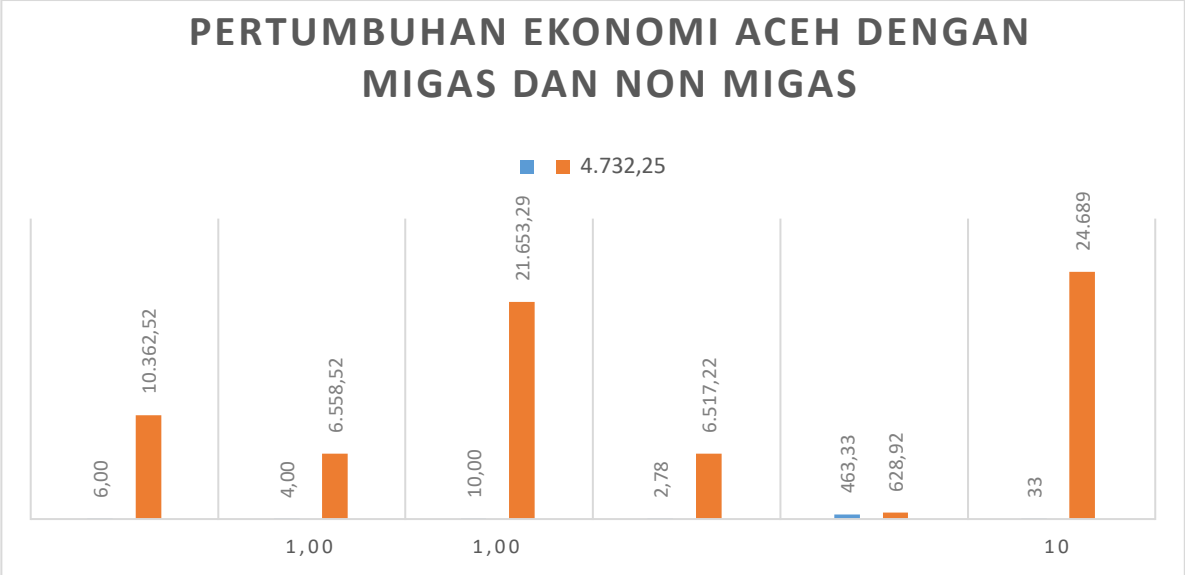

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh dan Nasional, 2024

Gambar 2. 16
Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Migas dan non Migas Tahun 2019-2024

Struktur perekonomian Aceh dari tahun 2019 hingga tahun 2024 masih dan didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan konstribusi rata-rata yang mencapai lebih dari 30 persen. Kemudian pada peringkat kedua diduduki oleh sektor Perdagangan dan Reparasi (Mobil dan Sepeda Motor), diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada posisi ke empat.

Pada Tabel 2.13, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024, nilai nominal PDRB migas dan non migas terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB migas padaa tahun 2019 sebesar Rp. 164.17 triliun dan pada tahun 2023 menjadi Rp.227.11

triliun dan pada tahun 2024 sebesar Rp.. Sedangkan PDRB non migas sebesar Rp.158.51 triliun meningkat menjadi Rp. 216.72 triliun pada tahun 2023 dan tahun 2024 meningkat menjadi Rp.243,20 triliun. Lapangan usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terus mengalami peningkatan dan penyumbang terbesar perekonomian Aceh, Pada tahun 2019 sebesar Rp.48.44 triliun menjadi Rp.75.32 triliun pada tahun 2024. Lapangan Usaha Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor peringkat kedua dengan nilai nomonal sebesar Rp.25.47 triliun dan meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp. 34.43 triliun dan meningkat menjadi Rp.36.46 triliun pada tahun 2024. Administrasi Pemerintaahan, Pertahanan dan Jasa Jaminan Sosial Wajib menduduki peringkat ke tiga, pada tahun 2019 sebesar Rp.16.83 triliun menjadi Rp.22.08 triliun pada tahun 2024 dan peringkat ke empat yaitu Lapangan Usaha Konstruksi sebesar Rp.15.79 triliun menjadi Rp.21.39 triliun.

Tabel 2. 13
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 (Triliun Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	48,44	51,55	55,61	62,3	69,76	75,32
B.	Pertambangan & Penggalian	7,9	7,41	12,31	19,12	16,95	17,15
B1.	Pertambangan Minyak & Gas Bumi	4,17	3,59	6,3	10,89	8,56	8,94
B2.	Pertambangan dan Penggalian Nonmigas	3,73	3,82	6,01	8,24	8,37	8,02
C.	Industri Pengolahan	7,78	7,59	9,31	10,87	10,98	11,46
C1.	Industri Batubara & Pengilangan Migas	1,48	1,48	1,54	1,71	1,71	1,63
C2.	Industri Nonmigas	6,3	6,11	5,87	9,17	9,27	9,83
D.	Pengadaan Listrik, Gas	0,23	0,23	0,23	0,24	0,26	0,28
E.	Pengadaan Air	0,08	0,08	0,09	0,09	0,1	0,16
F.	Konstruksi	15,79	17,76	18,31	19,05	20,32	21,39
G.	Perdagangan Besar & Eceran, & Reparasi Mobil & Sepeda Motor	25,47	24,6	26,46	29,36	34,43	36,46
H.	Transportasi & Pergudangan	10,59	7,65	9,49	11,5	14,3	16,91
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,78	2,65	2,53	3,57	4,01	4,17
J.	Informasi & Komunikasi	4,67	5,19	5,57	6,2	6,59	6,69
K.	Jasa Keuangan	3,51	3,51	3,53	3,62	3,28	4,06
L.	Real Estate	7,16	7,17	7,53	8,13	8,56	8,58
M.N	Jasa Perusahaan	1,07	1,06	1,1	1,34	1,38	1,44
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JSW	16,83	17,08	19,05	18,75	19,87	22,08
P.	Jasa pendidikan	4,9	5,24	5,51	5,78	5,95	6,42
Q.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4,62	5,14	5,8	6,8	6,99	7,3
R, S, T, U	Jasa Lainnya	2,36	2,47	2,57	2,95	3,28	3,38
	PDRB	**164,17**	**166,37**	**184,98**	**209,698**	**227,018**	**243,202**
	PDRB NON MIGAS	**158,51**	**161,3**	**177,14**	**197,11**	**216,72**	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh, 2025

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 sebagaimana pada tabel 2.15 relatif stabil kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan pada PDRB migas dan non migas dampak dari pandemic Covid 19 atau terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019 nilai PDRB migas sebesar Rp.132.07 triliun dan menurun pada tahun 2020, menjadi 131.58 triliun atau sebesar Rp.49.00 milyar kemudian pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi Rp.146.93 triliun dan Rp.153.78 triliun. Sedangkan nilai PDRB non migas juga mengalami pergerakan yang sama yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp.125.91 dan pada tahu 2020 sebesar Rp.124.97 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp.94.00 milyar dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi Rp. 141.00 triliun dan relative mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi Rp. 147.62 triliun.

Tabel 2. 14
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 (Triliun Rupiah)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)							
Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	36,63	37,9	37,77	39,01	41,63	42,121
B.	Pertambangan & Penggalian	9,69	10,49	10,41	10,86	10,33	11,48
B1.	Pertambangan Minyak & Gas Bumi	4,99	5,42	4,61	5,35	4,7	4,94
B2.	Pertambangan dan Penggalian Nonmigas	4,7	5,07	5,8	5,5	5,63	3,16
C.	Industri Pengolahan	6,34	6,06	6,21	6,47	6,37	6,56
C1.	Industri Batubara & Pengilangan Migas	1,18	1,19	1,18	1,21	1,23	1,22
C2.	Industri Nonmigas	5,16	4,87	5,03	5,26	5,15	5,33
D.	Pengadaan Listrik, Gas	0,21	0,22	0,22	0,22	0,24	0,25
E.	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
F.	Konstruksi	12,57	13,9	13,84	13,52	14,02	14,63
G.	Perdagangan Besar & Eceran, & Reparasi Mobil & Sepeda Motor	20,32	19,24	20,05	21,33	23,26	23,85
H.	Transportasi & Pergudangan	9,85	7,06	8,43	9,04	9,72	11,35
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,79	1,65	1,55	2,05	2,22	2,28
J.	Informasi & Komunikasi	4,63	5,19	5,58	6,21	6,51	6,63
K.	Jasa Keuangan	2,34	2,36	2,24	2,1	1,87	2,29
L.	Real Estate	5,51	5,45	5,67	5,89	6,11	6,32
M.N	Jasa Perusahaan	0,87	0,84	0,84	0,94	0,93	0,97
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JSW	11,85	11,46	12,19	12,18	12,41	13,33
P.	Jasa pendidikan	3,53	3,65	3,7	3,84	3,908	4,079

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)							
Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Q.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	3,99	4,17	4,58	5,02	5	5,11
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1,89	1,91	1,96	2,22	2,35	2,45
	PDRB	**132,07**	**131,58**	**135,27**	**140,97**	**146,93**	**153,78**
	PDRB NON MIGAS	**125,91**	**124,97**	**129,48**	**134,41**	**141**	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh, 2025

Laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota selama tahun 2019-2024 sebagaimana tergambar pada Tabel 2.16 secara umum mengalami fluktuasi dan kontraksi. Pada tahun 2019 perekonomian relative stabil dan terdapat beberapa kabupaten yang tumbuh relative kecil atau pertumbuhan dibawah 4 persen dan yang terkecil adalah Kabupaten Gayo Lues dengan pertumbuhan sebesar 2.62 persen. Pertumbuhan tertinggi yang berada di atas rata-rata Aceh dan Nasional adalah Kota Sabang sebesar 5.82 persen dan Kabupaten Nagan Raya sebesar 6.77 persen. Kemudian pada tahun 2020, semua kabupaten/kota mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, kecuali 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu: Siumeulue (tumbuh 0.12%), Aceh Timur (tumbuh 1.54%), Aceh Barat (tumbuh 1.88%), Aceh Utara (0.98%), Nagan Raya (tumbuh 3.36%), Bener Meriah (tumbuh 0.09%) dan Subulussalam (tumbuh 1.97%). Baru pada tahun 2021-2023 seluruh PDRB kabupaten/kota tumbuh positif, kecuali Aceh Utara yang masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0.54 persen pada tahun 2021.

Tabel 2. 15
Laju Pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2024 (Persen)

Wilayah	Tahun					
Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	4,6	0,12	3,14	4,2	4,63	4,43
Aceh Singkil	3,99	-1,01	3,9	3,61	3,52	3,46
Aceh Selatan	4,43	-0,05	2,46	3,11	3,53	3,21
Aceh Tenggara	4,23	-0,17	1,57	2,69	3,04	3,59
Aceh Timur	4,42	1,54	1,94	3,73	2,09	4,63
Aceh Tengah	3,51	-1,18	3,3	4,93	5,6	4,98
Aceh Barat	4,99	1,88	5,84	3,28	4,08	7,5
Aceh Besar		0,39	2,44	3,87	4,37	4,95
Pidie	4,43	-0,12	2,63	3,98	3,95	4,15
Bireuen	5	-1,02	4,09	4,35	4,38	4,52
Aceh Utara	3,48	0,98	-0,54	4,69	0,51	3,56
Aceh Barat Daya	4,75	-0,65	2,88	3,87	3,92	4,24

Wilayah	Tahun					
Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gayo Lues	1,26	0,88	2,32	3,51	3,98	3,26
Aceh Tamiang	4,55	0,42	0,88	3,27	2,25	4,25
Nagan Raya	6,77	3,36	4,26	3,06	6,83	4,38
Aceh Jaya	3,75	-0,62	2,59	3,68	4,15	3,83
Bener Meriah	4,32	0,09	3,42	3,42	5,22	3,27
Pidie Jaya		-0,79	2,03	3,57	4,24	4,55
Banda Aceh	4,13	-3,39	5,5	5,23	5,06	6,08
Sabang	5,82	-1,29	2,67	2,57	2,96	4,16
Langsa	4,39	-1,12	3,92	4,78	4,22	4,43
Lhokseumawe	3,98	-1,8	3,84	4,01	4,21	4,46
Subulussalam	4,42	1,97	3,87	4,12	4,06	4,12
Aceh	**4,12**	**-0,37**	**2,81**	**4,21**	**4,23**	**4,66**
Nasional	**5,02**	**-2,07**	**3,69**	**5,31**	**5,05**	**5,03**

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh dan Nasional, 2025

Sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh mengalami pertumbuhan PDRB di tahun 2024. Tiga Kabupaten yang mengalami pertumbuhan PDRB terbesar adalah Aceh Barat (meningkat 3,42 persen), Aceh Utara (meningkat 3,05 persen), dan Acet Timur (meningkat 2,54 persen). Sementara itu, delapan Kabupaten/Kota yang mengalami perlambatan pertumbuhan PDRB adalah Simeulue (menurun 0,2 persen), Aceh Singkil (menurun 0,06 persen), Aceh Selatan (menurun 0,32 persen), Aceh Tengah (menurun 0,62 persen), Gayo Lues (menurun 0,72 persen), Nagan Raya (menurun 2,45 persen), Aceh Jaya (menurun 0,32 persen), dan Bener Meriah (menurun 2,95 persen).

Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB kabupaten/kota sepanjang tahun 2019-2024, dapat disimpulkan bahwa kabupaten/kota yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonominya diindikasikan adanya sektor atau lapangan usaha yang tidak produktif (tidak efisien dalam pengelolaan, tidak inovatif dan sumber bahan baku yang terbatas/berkurang). Kabupaten/kota ini perlu mencari lapangan usaha alternatif sebagai unggulan untuk pengembangan. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan signifikan dapat terus melakukan inovasi melalui diversifikasi produk, ekspansi usaha, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan.

2.1.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah dalam memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang

dan jasa yang digunakan masyarakat. Tingkat inflasi merupakan salah satu indikator makro yang penting, karena peristiwa inflasi ini sangat mempengaruhi daya beli, produksi, investasi, dan stabilitas ekonomi secara umum. Terjadinya inflasi karena ketidakseimbangan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) dalam perekonomian. Inflasi dapat dibedakan berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu: cost push inflation, demand pull inflation dan expected inflation. Faktor-faktor ini mengakibatkan perubahan nilai tukar yang fluktuatif dan secara tidak langsung menyebabkan kecendrungan kenaikan perubahan struktur harga.

Tingkat inflasi menunjukkan pertumbuhan harga secara kontinu dalam periode waktu tertentu. Adapun, pertumbuhan harga yang dimaksud yaitu kenaikan harga dari beberapa barang yang juga akan berdampak pada kenaikan harga barang lainnya. Berdasarkan tingkat keparahannya, kenaikan angka inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu, Inflasi ringan, yaitu tingkat inflasi kurang dari 10 persen per tahun, Inflasi sedang, di antara 10 persen – 30 persen per tahun, Inflasi berat, berkisar antara 30 persen – 100 persen per tahun dan Hiperinflasi, yaitu mencapai lebih dari 100 persen per tahun.

Perkembangan inflasi Aceh pada tahun 2021-2025 (y-on-y) mengalami fluktuasi namun relatif terkendali, dengan pergerakan yang relatif sejalan dengan inflasi nasional, kecuali pada tahun 2022 dan 2025, hal ini sebagaima tergambarkan pada Gambar 2.17.

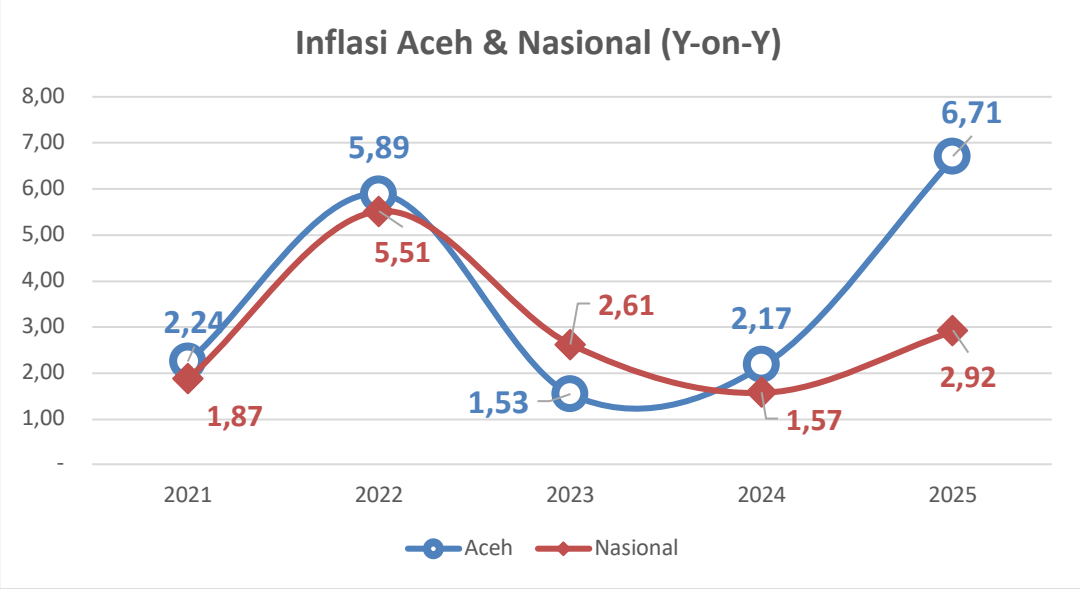

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh dan Nasional, 2025

Gambar 2. 17
Laju Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2024 (y-on-y) (Persen)

Dari gambar 2.17 diatas dapat dilihat bahwa nilai inflasi Aceh relatif sejalan dengan dengan inflasi nasional dan berada pada range nilai terkendali. Secara

umum tingkat inflasi di Aceh terkendali pada range ± 2 persen, kecuali pada tahun 2022 dan 2025 terjadi lonjakan lebih tinggi dari range tersebut.

Pada tahun 2021 Inflasi Aceh dan Nasional cukup stabil, masing- masing pada tingkat 2,24 persen dan 1,87 persen. Namun pada tahun 2022 naik sebesar 5,89 persen dan Nasional sebesar 5,51 persen. Secara umum penyebab inflasi di Aceh dan Nasional pada tahun 2022 adalah naiknya harga komoditas volatile food dan administered prices, kondisi ini meningkat dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kemudian pada tahun 2023 inflasi Aceh kembali dapat dikendalikan berada pada tingkat inflasi 1,53 persen sedikit lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 2,61 persen, dan selanjutnya pada tahun 2024 sebesar 2,17 persen smentara nasional pada tingkat 1,57 persen.

Pada tahun 2025 tingkat inflasi Aceh cukup melonjak dan terpaut cukup lebar dengan nasional. Dimana inflasi nasional berada pada tingkat 2,92 persen, sedangkan inflasi Aceh sebesar 6,71 persen. Hal ini disebabkan karena terjadinya bencana alam hidrometeorogi berupa banjir di sebagian Sumatera termasuk Aceh pada akhir November 2025. Pengaruh bencana banjir ini terhadap inflasi di Aceh tergambarkan pada Gambar 2.18 berikut :

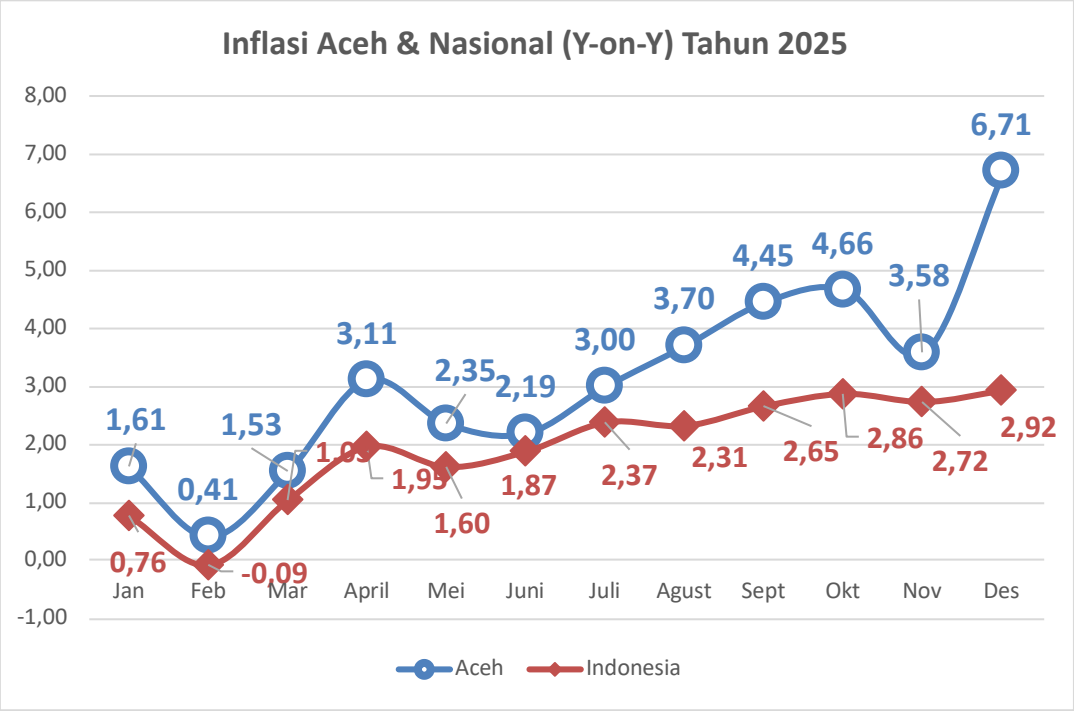

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh dan Nasional, 2025

Gambar 2. 18
Laju Inflasi Aceh dan Nasional (y-on-y) (Persen)

Dari Gambar 2.18 diatas dapat dilihat bahwa inflasi Aceh secara year on year pada periode bulan Januari sampai dengan Juli relatif stabil, dan hanya berada sedikit diatas rata-rata nasional. Sementara pada bulan Agustus sampai dengan November, meskipun tingkat inflasi mulai meningkat dibanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya namun cukup terkendali. Sedangkan pada bulan Desember, setelah terjadinya bencana banjir diakhir November, memperlihatkan lonjakan tingkat inflasi yang signifikan dibanding tahun lalu. Hal ini merupakan dampak dari terganggunya aktivitas ekonomi akibat kerusakan berbagai sektor, termasuk infrastruktur transportasi sehingga mempengaruhi jalur pasokan barang yang mengakibatkan kelangkaan. Sementara, kehilangan yang dialami akibat banjir mendorong permintaan secara masif. Sehingga dapat disimpulkan, inflasi yang terjadi di Aceh pada akhir tahun 2025 diakibatkan karena tidak seimbangnya antara supply dan demand pasca bencana banjir pada akhir tahun tersebut.

Dorongan kenaikan harga barang-barang tidak hanya terjadi di daerah kabupaten/kota yang mengalami banjir, namun dirasakan hampir di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Hal ini tergambar melalui berikut :

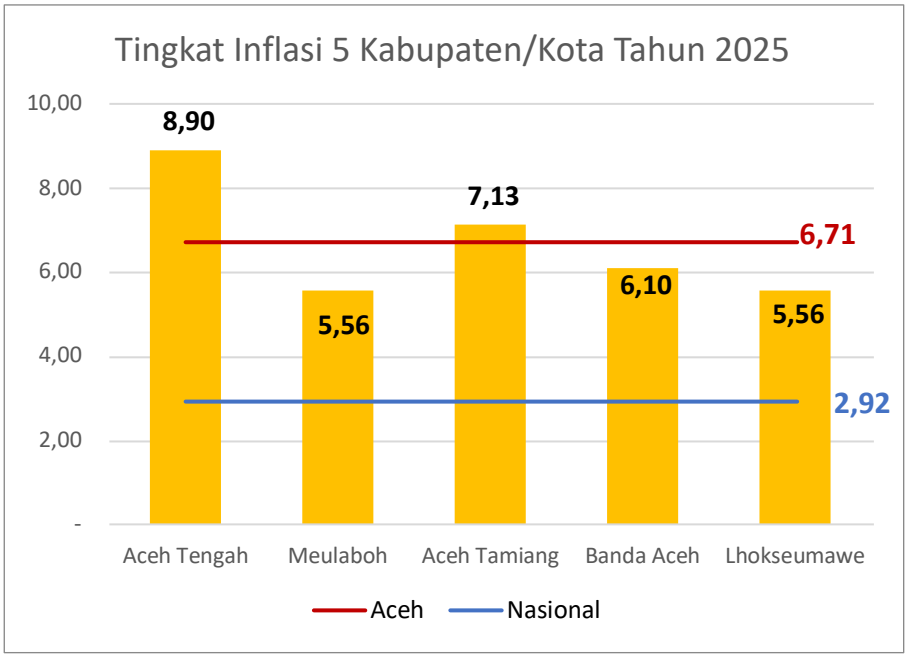

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh dan Nasional, 2026 (diolah)

Gambar 2. 18

Tingkat Inflasi di Lima Kabupaten/Kota Tahujn 2025

Kenaikan tingkat inflasi secara tahunan terjadi di semua Kabupaten/Kota pengukur inflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 8,90 persen, selanjutnya di Aceh Tamiang sebesar 7,13 persen, Kota Banda Aceh sebesar 6,10 persen, dan terendah terjadi di Meulaboh dan Kota Lhokseumawe sebesar 5,56 persen. Gambar diatas menunjukkan pengaruh kerusakan akibat bencana banjir yang mempengaruhi permintaan dan penawaran

tidak hanya pada daerah yang terkena bencana langsung, namun juga berdampak ke seluruh kawasan di Aceh.

Sedangkan menurut pengeluaran, kenaikan harga paling tingggi terjadi pada kelompok Makanan, Minuman Dan Tembakau yaitu sebesar 12,47 persen dibanding tahun sebelumnya yang menyumbang andil inflasi sebesar 4,62 persen. Kenaikan harga yang cukup tinggi juga terjadi pada kelompok kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 16,02 persen dengan andil inflasi sebesar 0,91 persen, secara rinci kelompok pengeluaran lain sebagaimana Tabel berikut

Tabel 2. 16
IHK dan Tingkat Inflasi 2025 Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok	IHK Desember 2024	IHK Desember 2025	Tingkat Inflasi m-to-m Desember 2025 [1] (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Desember 2025 [2] (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Desember 2025 [3] (%)	Andil Inflasi m-to-m Desember 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y Desember 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	**107,21**	**114,40**	**3,60**	**6,71**	**6,71**	**3,60**	**6,71**
Makanan, Minuman Dan Tembakau	110,07	123,80	7,64	12,47	12,47	2,86	4,62
Pakaian Dan Alas Kaki	104,95	106,62	-0,03	1,59	1,59	~0	0,09
Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,92	106,04	1,69	2,04	2,04	0,26	0,33
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,24	103,71	0,77	0,46	0,46	0,03	0,02
Kesehatan	105,48	109,62	0,44	3,92	3,92	0,01	0,07
Transportasi	109,77	112,27	0,07	2,28	2,28	0,01	0,23
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	98,68	98,72	~0	0,04	0,04	~0	0,00
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	107,88	109,27	~0	1,29	1,29	~0	0,02
Pendidikan	102,33	102,17	~0	-0,16	-0,16	~0	-0,01
Penyediaan Makanan Dan Minuman/restoran	106,57	110,87	2,54	4,03	4,03	0,27	0,43
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	110,89	128,66	2,58	16,02	16,02	0,16	0,91

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2025

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Desember 2025, antara lain: beras, emas perhiasan, cabai merah, ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, ikan dencis, telur ayam ras, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), ikan bandeng/ikan bolu. Sementara 10 komoditas yang dominan memberikan andil/ sumbangan deflasi y-on-y pada Desember 2025, antara lain: tomat, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, mainan anak, detergen cair, bawang putih, baju muslim wanita, mangga, sabun detergen bubuk, kunyit.

Sedangkan Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di antara Kabupaten/Kota, termasuk kabupaten/kota selain wilayah yang diukur tingkat inflasinya dapat digambarkan melalui indikator Koefisien Variasi Harga (KVH) Antar wilayah Tingkat Provinsi. Indikator ini menggambarkan kondisi kesenjangan atau

disparitas harga antar kabupaten/kota dalam rentang waktu satu tahun. Semakin rendah KVH antarwilayah di Tingkat Provinsi menunjukan bahwa tingkat harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di antara Kabupaten/Kota pada satu Provinsi semakin konvergen, artinya harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil. Disparitas harga pada barang kebutuhan pokok dan barang penting di Aceh pada tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2. 17
Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi Tahun 2025

No	Komooditas	Rata-rata Harga (Rp)	Simpangan Baku (standar deviasi)	KVH per barang	KVH Antar Wilayah=rata2 KVH seluruh bapoting	Ket
1	Beras	15.102,84	640,18	0,04	4,24	
2	Gula pasir	45.796,80	13.641,02	0,30	29,79	
3	Minyak goreng	38.753,25	4.872,53	0,13	12,57	
4	Daging sapi	18.529,41	320,17	0,02	1,73	
5	Telur ayam	17.842,43	343,28	0,02	1,92	
6	Susu Kental Manis	13.326,03	178,55	0,01	1,34	
7	Tepung Terigu Segitiga Biru	27.627,24	2.163,39	0,08	7,83	
8	Kacang Tanah	151.822,92	677,38	0,00	0,45	
9	Bawang Merah	13.610,67	140,67	0,01	1,03	
10	Cabe Merah Besar	29.587,86	1.732,15	0,06	5,85	
		37.199,95		**0,067**	**6,68**	

Sumber : Disperindag Aceh, 2026 (diolah)
SP2KP, 2026 (diolah)

Data diatas menunjukkan nilai KVH total provinsi Aceh cukup baik yaitu sebesar 6,68 persen, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya pada tingkat 7,33 persen, artinya rata-rata perbedaan harga 10 komoditas kebutuhan pokok di seluruh kabupaten/kota di Aceh disepanjang tahun 2025 cukup stabil dan merata. Data diatas juga menunjukkan beberapa komoditas yang perlu menjadi perhatian karena memiliki kecenderungan angka KVH yang lebih tinggi dari komoditas lainnya, diantaranya : gula pasir, minyak goren, tepung terigu, dan cabe merah besar.

2.1.2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Perkembangan PDRB ADHB per kapita Aceh selama periode 2021-2025 menunjukkan tren meningkat, dari Rp 34,67 juta pada tahun 2021 menjadi Rp4 5,77 juta pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan nilai

ekonomi rata-rata per penduduk di Aceh. Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian nasional, posisi Aceh masih tertinggal cukup jauh. Pada periode yang sama, PDB ADHB per kapita nasional meningkat dari Rp 62,26 juta menjadi Rp 83,75 juta.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita Aceh belum mampu mengejar rata-rata nasional. Sepanjang 2021–2025, antara Nasional dan Aceh melebar dari Rp 27,59 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 37,98 juta pada tahun 2025. Melebarnya kesenjangan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan nilai tambah ekonomi Aceh belum berjalan secepat pertumbuhan ekonomi nasional.

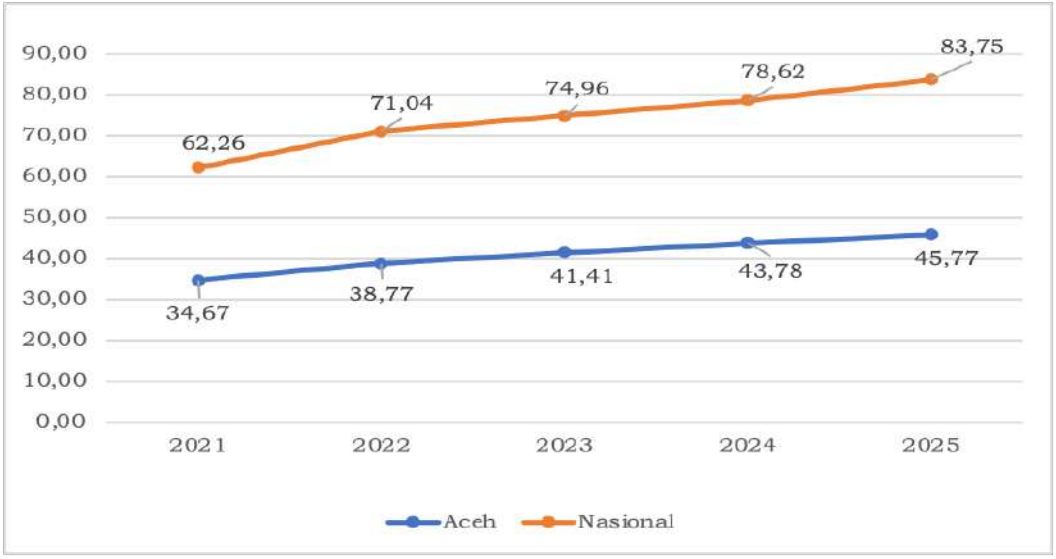

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh dan Nasional, 2025

Gambar 2. 19
PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB

Selanjutnya bila dibandingkan dengan PDRB Perkapita berdasarkan nilai ADHB, terdapat 4 kabupaten dan 2 kota dengan PDRB perkapita berada di atas rata-rata Aceh, namun masih di bawah Nasional. Kedua kota dengan nilai berada di atas nilai Aceh secara garis besar diantaranya Kota Banda Aceh (104,36 juta rupiah) dan Kota Lhokseumawe (62,54 juta rupiah). Sedangkan kabupaten dengan nilai di atas PDRB Perkapita Aceh diantara: 1) Aceh Tengah (50,10 juta rupiah); 2) Aceh Barat (71,02 juta rupiah); 3) Aceh Utara (48,22 juta rupiah) dan 4). Nagan Raya (74,57 juta rupiah). Perkembangan PDRB perkapita ADHB Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah) dapat dilihat pada Tabel 2. 18.

Tabel 2. 18
PDRB Kabupaten/Kota Per Kapita ADHB
Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Simeulue	26,15	28,12	30,22	31,94	34,33
Aceh Singkil	21,14	22,96	24,03	25,36	27,12
Aceh Selatan	25,47	27,21	29,08	30,85	32,87
Aceh Tenggara	24,24	25,64	27,10	28,74	30,39
Aceh Timur	27,40	30,29	31,51	33,67	35,01
Aceh Tengah	36,86	40,17	43,97	47,28	50,10
Aceh Barat	49,81	62,82	66,28	67,94	71,02
Aceh Besar	34,24	37,12	40,41	42,99	45,05
Pidie	25,84	27,98	30,11	32,15	34,06
Bireuen	31,91	34,58	37,57	40,04	42,65
Aceh Utara	38,08	45,61	45,41	47,63	48,22
Aceh Barat Daya	27,13	29,38	31,63	33,72	35,88
Gayo Lues	28,32	29,88	31,81	33,55	34,97
Aceh Tamiang	29,84	34,62	35,15	37,41	38,38
Nagan Raya	53,43	61,80	68,09	70,46	74,57
Aceh Jaya	30,28	32,50	34,55	36,36	38,50
Bener Meriah	30,62	32,92	35,57	37,90	40,35
Pidie Jaya	22,99	24,54	26,46	28,38	29,75
Kota Banda Aceh	78,06	83,31	90,75	98,20	104,36
Kota Sabang	38,43	38,85	40,73	42,81	44,82
Kota Langsa	30,61	32,70	35,19	37,01	38,41
Kota Lhokseumawe	49,34	52,91	56,60	59,12	62,54
Kota Subulussalam	22,83	24,99	26,43	27,88	29,50

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh dan Nasional, 2025

2.1.2.1.4. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (disparitas) pendapatan agregat, yaitu suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Semakin besar nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan (pengeluaran) masyarakat yang semakin lebar. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti kemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Koefesien Gini dari negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0.50-0.70; ketidakmerataan sedang berkisar antara 0.36-0.49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah antara 0.20-0.35.

Gini Rasio membantu Pemerintah Aceh dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat Aceh. Perkembangan Gini Rasio Aceh dan Nasional tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.20.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2024

Gambar 2. 20
Gini Rasio Aceh di Perkotaan dan Perdesaan Periode Maret 2019-Maret 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2025

Gambar 2. 21
Gini Rasio Aceh dan Nasional, 2019-2024

Gambar 2. 21 menunjukkan bahwa dalam kurun periode September 2019-2022 dan Maret 2023-2024, Rasio Gini Aceh relatif lebih baik atau berada di bawah rata-rata nasional. Indek Gini Aceh dan Nasional mengalami pola pergerakan fluktuasi yang sama. Pada September tahun 2019 Indek Gini Aceh sebesar 0.321 dan mengalami penurunan hingga menjadi 0.296 pada Maret tahun 2023. Sedangkan Nasional mengalami peningkatan dari 0,380 pada September tahun 2019 menjadi 0,388 pada Maret 2023. Koefisien gini Aceh terendah terjadi pada September tahun 2022 sebesar 0.291 dan tertinggi pada

September tahun 2021 sebesar 0.323. Pada tahun 2024 gini rasio Aceh dan nasional memiliki kecenderungan yang sama dengan penurunan masing-masing menjadi 0,294 dan 0,381. Secara umum Rasio Gini Aceh ini masih dikategorikan sebagai ketimpangan sedang karena berada di bawah 0,40. Bila dibandingkan dengan nasional, maka ketimpangan Aceh relatif lebih baik atau berada di bawah rata-rata Nasional.

Tabel 2. 19
Gini Rasio Kabupaten/Kota, Aceh dan Nasional Tahun 2019 – 2024 (Maret)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	0,34	0,296	0,31	0,279	0,297	0,259
Aceh Singkil	0,282	0,287	0,336	0,296	0,270	0,26
Aceh Selatan	0,273	0,313	0,295	0,257	0,258	0,274
Aceh Tenggara	0,278	0,315	0,247	0,274	0,277	0,233
Aceh Timur	0,249	0,282	0,271	0,283	0,224	0,221
Aceh Tengah	0,256	0,331	0,29	0,27	0,248	0,258
Aceh Barat	0,33	0,304	0,295	0,265	0,237	0,249
Aceh Besar	0,288	0,352	0,296	0,293	0,299	0,262
Pidie	0,249	0,249	0,22	0,223	0,213	0,209
Bireuen	0,295	0,304	0,296	0,275	0,258	0,258
Aceh Utara	0,308	0,261	0,283	0,275	0,294	0,267
Aceh Barat Daya	0,301	0,273	0,282	0,24	0,250	0,226
Gayo Lues	0,29	0,28	0,263	0,254	0,241	0,241
Aceh Tamiang	0,289	0,264	0,276	0,305	0,277	0,256
Nagan Raya	0,252	0,275	0,257	0,236	0,207	0,159
Aceh Jaya	0,253	0,252	0,312	0,299	0,267	0,254
Bener Meriah	0,267	0,259	0,255	0,257	0,226	0,23
Pidie Jaya	0,236	0,227	0,236	0,231	0,221	0,214
Banda Aceh	0,289	0,303	0,347	0,391	0,330	0,339
Sabang	0,281	0,271	0,293	0,298	0,306	0,295
Langsa	0,363	0,356	0,34	0,368	0,330	0,305
Lhokseumawe	0,306	0,307	0,296	0,348	0,293	0,326
Subulussalam	0,342	0,344	0,303	0,33	0,296	0,276
Aceh	**0,319**	**0,323**	**0,324**	**0,311**	**0,296**	**0,294**
Nasional	**0,382**	**0,381**	**0,384**	**0,384**	**0,388**	**0,379**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional , 2025

Persebaran Indek Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menggambarkan suatau kondisi yang relative berada pada kisaran ketidakmerataan sedang dan rendah (0.20-0.49) dan masih berada di bawah rata-rata Nasional. Indek Gini kabupaten terkecil terdapat di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2019 sebesar 0.236 dan yang tertinggi di Kota Langsa sebesar 0.363. Selanjutnya Indek Gini kategori terkecil pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Nagan Raya yaitu 0.159 dan yang tertinggi terdapat di dua kota yaitu kota Banda Aceh dan kota Lhokseumawe dengan Indek Gini masing-masing sebesar 0.339 dan 0.326. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapan masyarakat di Aceh relative merata, namun perlu intervensi melalui program dan kegiatan pada sektor prioritas yang relatif memberi peluang dan kesempatan kerja. Produktivitas dan kreativitas masyarakat terutama

kaum melinial dapat memberikan keseimbangan pendapatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

2.1.2.1.5. Indeks Williamson (Ketimpangan Regional)

Ketimpangan pembangunan antar wilayah *(regional disparity)* merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis suatu wilayah, serta adanya wilayah yang sudah maju dan wilayah yang masih terbelakang. Ukuran ketimpangan antar wilayah (*regional*) cerminan dari kemajuan pembangunan di suatu wilayah dengan menggunakan Indek Williamson. Indek Williamson merupakan persebaran *(coeffesien of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Walaupun indek ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan ketimpangan namun alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat namun tidak diimbangi dengan pemerataan, maka akan berdampak pada ketimpangan wilayah. Indeks ketimpangan wilayah dapat diukur melalui Indeks Williamson dengan interval indeks 0-1. Kriteria besaran indek Williamson adalah $0 < IW < 1$. Jika IW= 0, berarti pembangunan wilayah sangat merata, IW=1, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna), IW~0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata dan IW~1, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata. Indeks Williamson mencerminkan ketimpangan pada tingkat pembagunan ekonomi suatu daerah. Kondisi ketimpangan regional yang digambarkan dari Indeks Williamson Aceh terdapat pada Gambar 2.22 berikut:

Gambar 2.22
Perkembangan Nilai Indeks Williamson Tahun 2021-2025

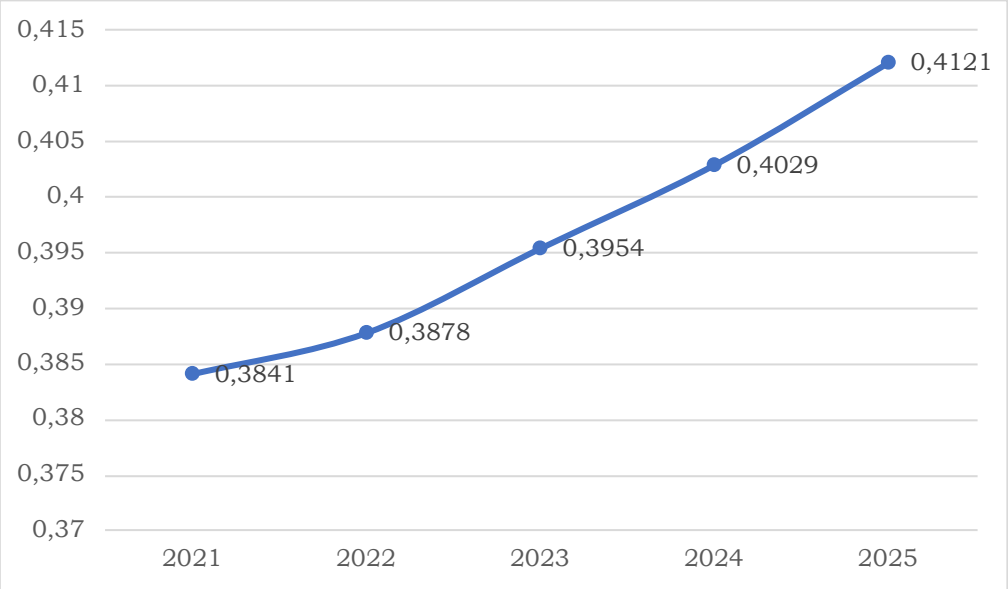

Sumber: BPS, 2026 (data diolah)

Dalam lima tahun, Indeks Williamson Aceh meningkat sebesar 0,0280 poin, atau sekitar 7,29% dibandingkan tahun 2021. Rata-rata kenaikan setiap tahun mencapai sekitar 0,0070 poin. Kenaikan terbesar terjadi pada periode 2024–2025, yaitu sebesar 0,0092 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun terakhir, pelebaran ketimpangan antar wilayah berlangsung lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara lebih rinci, peningkatan dari 2021 ke 2022 masih relatif kecil, yaitu dari 0,3841 menjadi 0,3878. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada awal periode, ketimpangan antar wilayah belum mengalami perubahan tajam. Namun, pada 2023, indeks meningkat menjadi 0,3954, yang menandakan mulai adanya percepatan ketimpangan. Tahun 2024 menjadi titik penting karena indeks menembus angka 0,40, yaitu 0,4029. Selanjutnya, pada 2025, indeks mencapai 0,4121, nilai tertinggi selama periode pengamatan.

Tren ini memberi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi atau pembangunan di Aceh kemungkinan belum tersebar secara proporsional antar kabupaten/kota. Wilayah yang memiliki basis ekonomi lebih kuat, akses infrastruktur lebih baik, pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan cenderung tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, wilayah yang bergantung pada sektor primer, memiliki keterbatasan infrastruktur, akses pasar rendah, atau berada jauh dari pusat pertumbuhan berpotensi tertinggal.

2.1.2.1.6. Kemiskinan

Persentase kemiskinan Aceh masih jauh dibandingkan Nasional, tahun 2025 persentase kemiskinan Aceh sebesar 12,33 persen sedangkan Nasional sebesar 8,47 persen. Meskipun masih tinggi persentase penduduk miskin di Aceh dan Nasional menunjukkan tren yang terus menurun dari tahun 2021-2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan rumah tangga di Aceh berangsur pulih dengan berbagai program upaya penanggulangan kemiskinan baik di tingkat pusat maupun daerah.

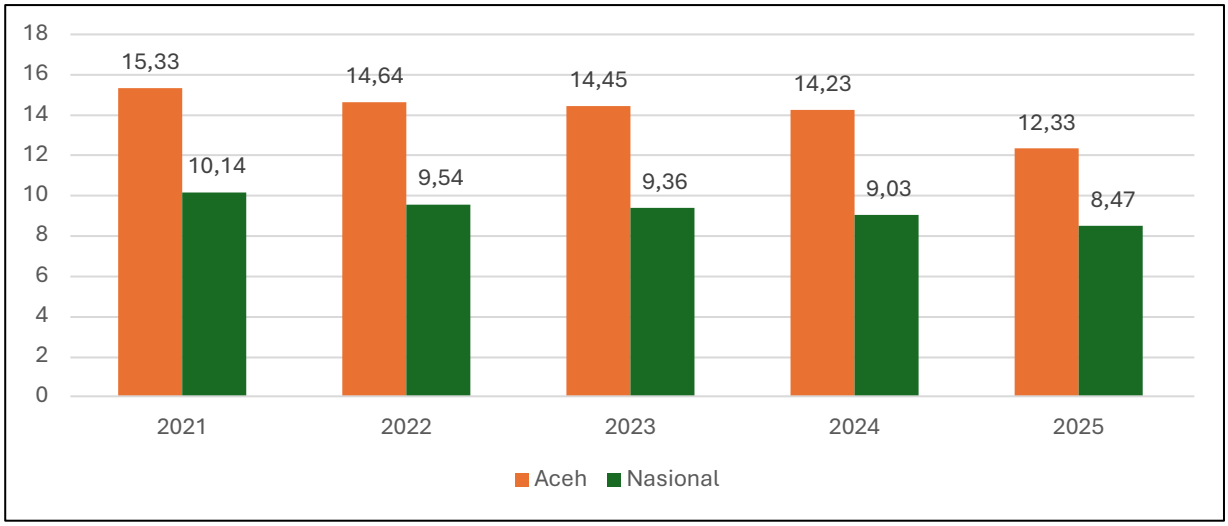

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026

Gambar 2. 23
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Aceh dan Nasional
Tahun 2021-2025

Perkembangan tingkat kemiskinan di 23 kabupaten/kota pada periode 2021-2025 (kondisi Maret) menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin seperti terdapat pada tabel di bawah. Pada tahun 2023, terdapat 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan menyentuh angka 2 (dua) digit (>10 persen), kemudian jumlahnya turun di tahun 2024 dengan menjadi 18 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan >10 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan kesejahteraan rumah tangga di Aceh selama periode 2021 hingga 2025.

Tabel 2. 20
Persentase Penduduk Miskin Provinsi se-Aceh Tahun 2021 – 2025

Kab/Kota, Aceh	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Simeulue	18,98	18,37	17,92	17,69	15,52
Aceh Singkil	20,36	19,18	19,15	19,06	17,07
Aceh Selatan	13,18	12,43	12,1	12,02	9,89

Kab/Kota, Aceh	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Aceh Tenggara	13,41	12,83	12,45	11,99	9,78
Aceh Timur	14,45	13,91	13,39	13,26	11,24
Aceh Tengah	15,26	14,5	14,38	14,27	12,29
Aceh Barat	18,81	17,93	17,86	17,60	15,50
Aceh Besar	14,05	13,38	13,38	13,21	11,05
Pidie	19,59	18,79	18,78	18,59	16,46
Bireuen	13,25	12,51	12,12	12,10	10,30
Aceh Utara	17,43	16,86	16,64	16,11	14,27
Aceh Barat Daya	16,34	15,44	15,43	15,32	13,30
Gayo Lues	19,64	18,87	18,82	18,30	16,77
Aceh Tamiang	13,34	12,61	12,51	12,17	10,84
Nagan Raya	18,23	17,38	17,25	16,94	15,42
Aceh Jaya	13,23	12,51	12,42	12,25	10,37
Bener Meriah	19,16	18,39	18,31	18,18	16,20
Pidie Jaya	19,55	18,45	18,40	18,28	16,12
Banda Aceh	7,61	7,13	7,04	6,95	5,45
Sabang	15,32	14,66	14,59	14,58	12,75
Langsa	10,96	10,62	14,59	10,33	8,59
Lhokseumawe	11,16	10,84	10,73	10,44	9,01
Subulussalam	17,65	16,94	16,41	16,38	13,88
Aceh	**15,33**	**14,64**	**14,45**	**14,23**	**12,33**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026

Kabupaten kota dengan persentase kemiskinan terendah dibawah 10 (sepuluh) persen terdapat di Kota Banda Aceh (5,45 %), selanjutnya diikuti oleh Kota Langsa (8,59 %), Kota Lhokseumawe (9,01 %), Kabupaten Aceh Tenggara (9,78 %), dan Kabupaten Aceh Selatan (9,89 %). Sebaran penduduk miskin yang berada di atas 16 (enam belas) persen terkonsentrasi di Kabupaten Singkil (17.07%), Kabupaten Gayo Lues (16,77%), Kabupaten Pidie (16,46%), Kabupaten Bener Meriah (16,20%), dan Kabupaten Pidie Jaya (16,12%). Pola spasial memperlihatkan adanya disparitas tingkat kemiskinan yang cukup tajam antar kabupaten/kota. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya keterisolasian sebagai dampak dari kondisi topografi dan aksesibilitas; keterbatasan akses layanan dasar; rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan ketidakberdayaan dari kondisi perekonomian serta ketenagakerjaan.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, terdapat dimensi lain yang perlu diperhatikan terkait angka kemiskinan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk

miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

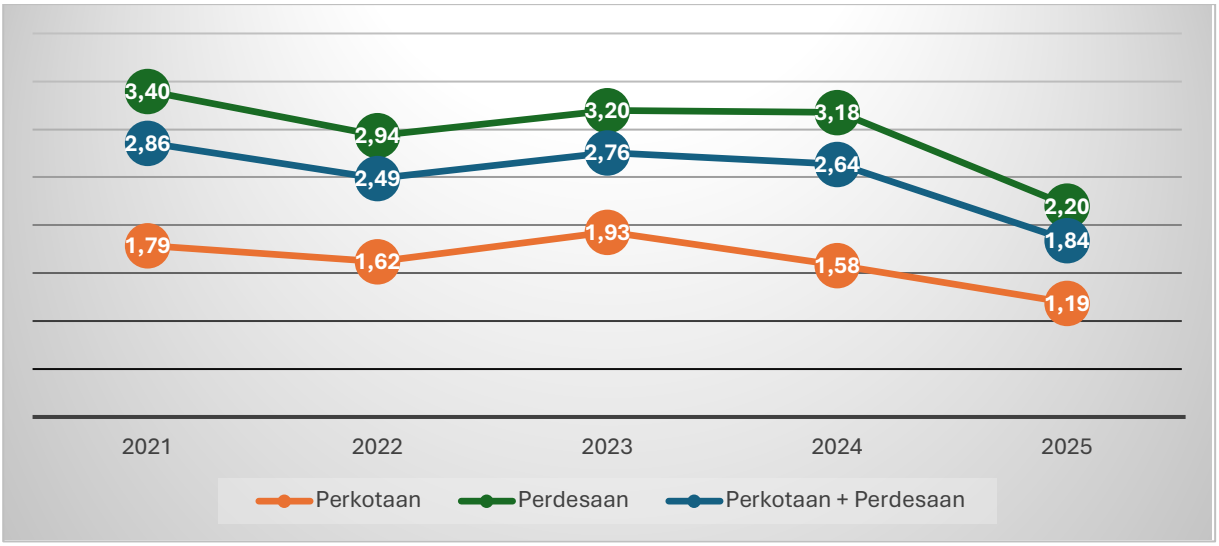

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026

Gambar 2. 24
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Perkotaan dan Perdesaan Aceh Tahun 2021-2025

Gambar 2.24 menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan perkotaan dan perdesaan pada periode 2021 hingga 2025 di Aceh. Tahun 2021 indeks kedalaman kemiskinan tertinggi delama periode 2021-2025 baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kenaikan indeks kedalaman kemiskinan memberikan gambaran bahwa pada periode tersebut rata- rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, artinya kondisi kemiskinan semakin memburuk. Tahun 2025 indeks kedalaman kemiskinan perkotaan dan perdesaan mencapai nilai terendah selama 5 (lima) tahun terakhir. Indeks kedalaman kemiskinan di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan, meskipun secara persentase penduduk miskin lebih rendah dibandingkan perkotaan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kelompok penduduk miskin di wilayah perdesaan mengalami tekanan yang lebih berat akibat menurunnya atau bahkan hilangnya pendapatan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan perdesaan. Tahun 2021 (P2) perkotaan sebesar 0,46 sedangkan perdesaan sebesar 0,89. Tahun 2025 merupakan tahun terendah (P2) selama 5 (lima) tahun terakhir baik di perkotaan (0,26) maupun di perdesaan (0,51). Kondisi ini menunjukkan ketimpangan di antara penduduk miskin semakin kecil penurunan ini

antaralain adanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan program yang tepat sasaran.

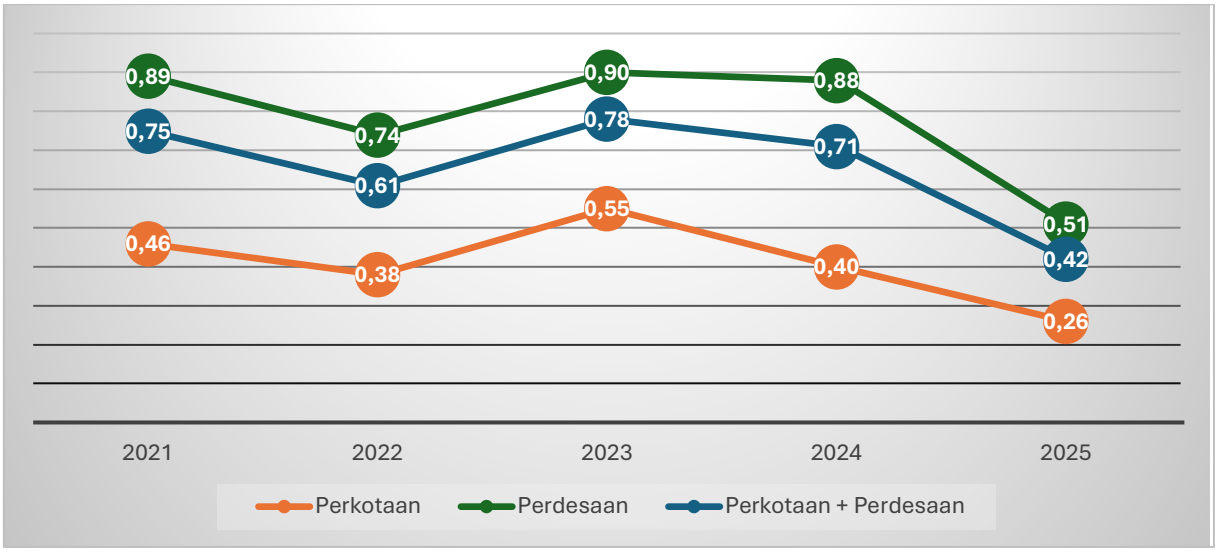

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026

Gambar 2. 25
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Perkotaan dan Perdesaan Aceh Tahun 2021-2025

Faktor lain yang perlu menjadi perhatian dalam upaya penurunan angka kemiskinan ialah garis kemiskinan itu sendiri. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Garis Kemiskinan pada 2025 mengalami perubahan sebesar 2.27 persen jika dibandingkan dengan 2024, yaitu dari Rp 661.227,- per kapita per bulan menjadi Rp.,- 676.247 per kapita per bulan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Perubahan garis kemiskinan ini sangat erat kaitannya dengan inflasi di masing-masing kabupaten kota, sehingga pengendalian inflasi menjadi penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan terutama dalam hal intervensi pengurangan beban penduduk miskin.

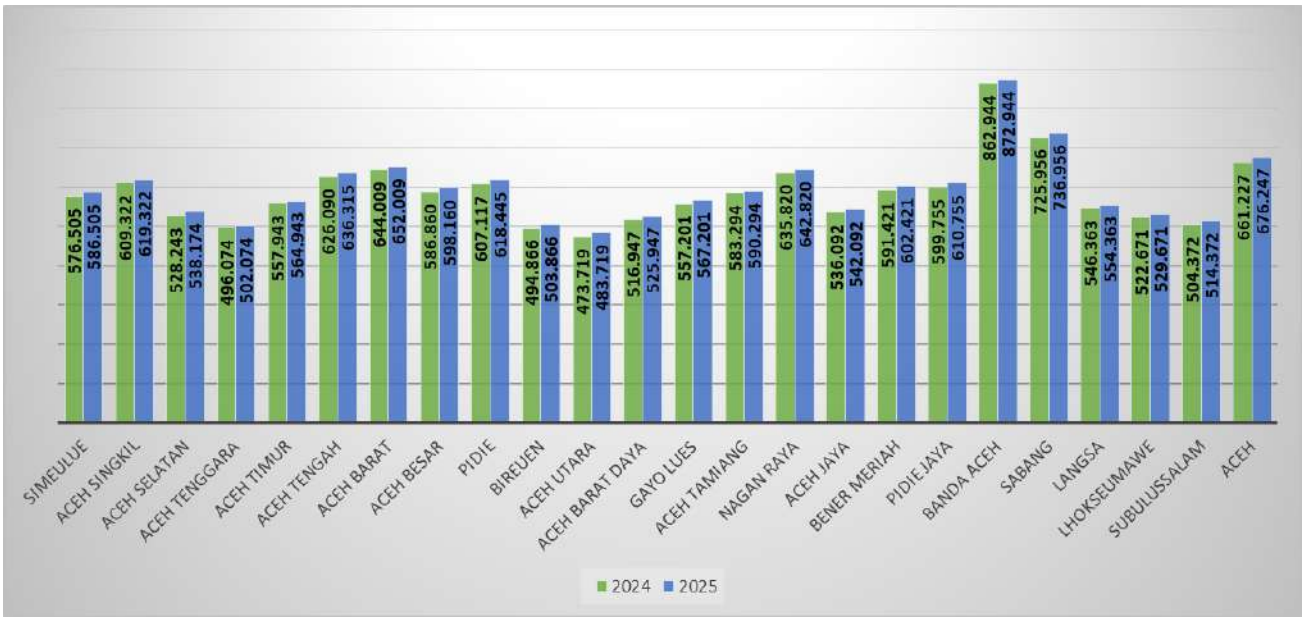

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026

Gambar 2. 26
Garis Kemiskinan Aceh Tahun Tahun 2024-2025

Garis kemiskinan bervariasi antar daerah, hal ini mengindikasikan bahwa standar kemiskinan itu berbeda antar daerah. Kota Banda Aceh merupakan Kabupaten/kota yang mempunyai garis kemiskinan tertinggi yaitu Rp. 872.944,-, sementara Kab. Aceh Utara mempunyai garis kemiskinan yang terendah Rp. 483.719,-.

2.1.2.1.7. Pengangguran

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT Aceh selama periode 2021–2025 menunjukkan tren penurunan secara bertahap, dari 6,30% pada tahun 2021 menjadi 5,64% pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di Aceh, meskipun kecepatannya relatif lambat. Dalam kurun lima tahun, TPT Aceh hanya menurun sebesar 0,66 poin persentase, sehingga dapat dikatakan bahwa perbaikan pasar kerja di Aceh berlangsung secara moderat dan belum menunjukkan akselerasi yang kuat.

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, posisi Aceh menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ketenagakerjaan. Pada tahun 2021, TPT Aceh sebesar 6,30% masih sedikit lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 6,49%. Namun, sejak tahun 2022 hingga 2025, TPT Aceh secara konsisten berada di atas angka nasional. Pada tahun 2022, TPT Aceh sebesar 6,17%, sedangkan nasional sudah menurun menjadi 5,86%. Kesenjangan ini semakin melebar pada tahun 2023 dan 2024, yaitu ketika TPT Aceh

berada pada angka 6,03%dan 5,75%, sementara nasional masing-masing telah turun menjadi 5,32% dan 4,91%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan pasar kerja di Aceh berjalan lebih lambat dibandingkan nasional. Secara nasional, TPT menurun cukup tajam dari 6,49% pada tahun 2021 menjadi 4,85% pada tahun 2025, atau turun sebesar 1,64 poin persentase. Sementara itu, Aceh hanya mengalami penurunan sebesar 0,66 poin persentase pada periode yang sama. Perbedaan kecepatan penurunan ini mengindikasikan bahwa perekonomian nasional lebih mampu menciptakan kesempatan kerja baru, sedangkan struktur ekonomi Aceh masih menghadapi hambatan dalam memperluas lapangan kerja secara signifikan.

Pada tahun 2025, TPT Aceh tercatat sebesar 5,64%, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 4,85%. Selisih sekitar 0,79 poin persentase ini menunjukkan bahwa persoalan pengangguran di Aceh belum hanya bersifat siklus jangka pendek, tetapi mulai menunjukkan indikasi sebagai persoalan struktural. Artinya, penurunan pengangguran tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi perlu disertai dengan strategi khusus untuk memperkuat keterkaitan antara pertumbuhan sektor ekonomi dengan penciptaan lapangan kerja. Perkembangan TPT Aceh tahun 2021-2025 dan nasional dapat dilihat pada Gambar 2.27 berikut:

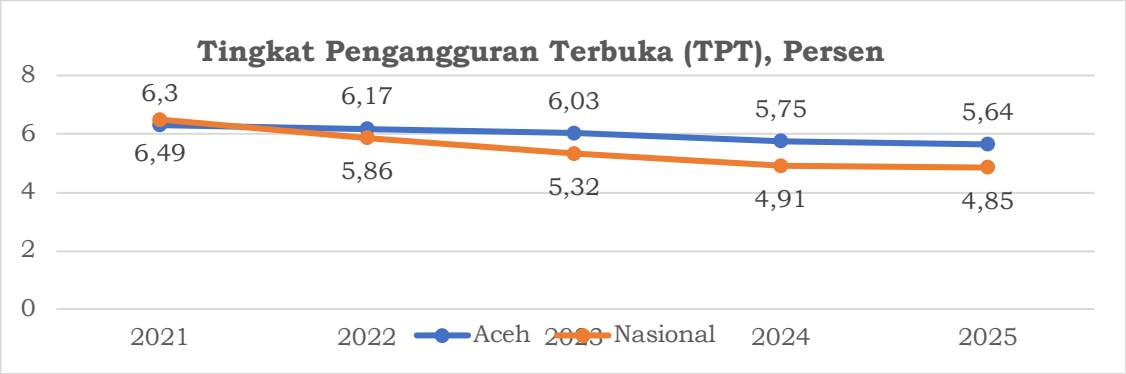

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2026

Gambar 2. 27
Perkembangan TPT Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025

Meskipun secara garis besar TPT Aceh menunjukkan tren menurun, capaian tersebut belum cukup kuat dibandingkan dengan penurunan TPT nasional. Posisi Aceh yang masih berada di atas nasional sejak tahun 2022 menegaskan perlunya strategi percepatan penciptaan lapangan kerja yang lebih terarah, terukur, dan berbasis sektor unggulan daerah. Ke depan, keberhasilan pembangunan ekonomi Aceh tidak hanya perlu diukur dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pertumbuhan tersebut dalam menciptakan pekerjaan yang produktif, layak, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Bila dilihat secara lebih mendalam, kondisi TPT kabupaten/kota di Aceh tahun 2025 menunjukkan variasi yang cukup lebar antar wilayah. Perbedaan ini menggambarkan bahwa persoalan pengangguran di Aceh tidak terjadi secara merata, melainkan memiliki karakteristik spasial yang berbeda antara wilayah perkotaan, wilayah penyangga kegiatan ekonomi, dan wilayah berbasis perdesaan. Rata-rata TPT Aceh tahun 2025 berada pada kisaran 5,64%, namun beberapa kabupaten/kota masih mencatatkan angka jauh di atas rata-rata provinsi, sementara sebagian wilayah lainnya mampu menjaga tingkat pengangguran pada level yang relatif rendah.

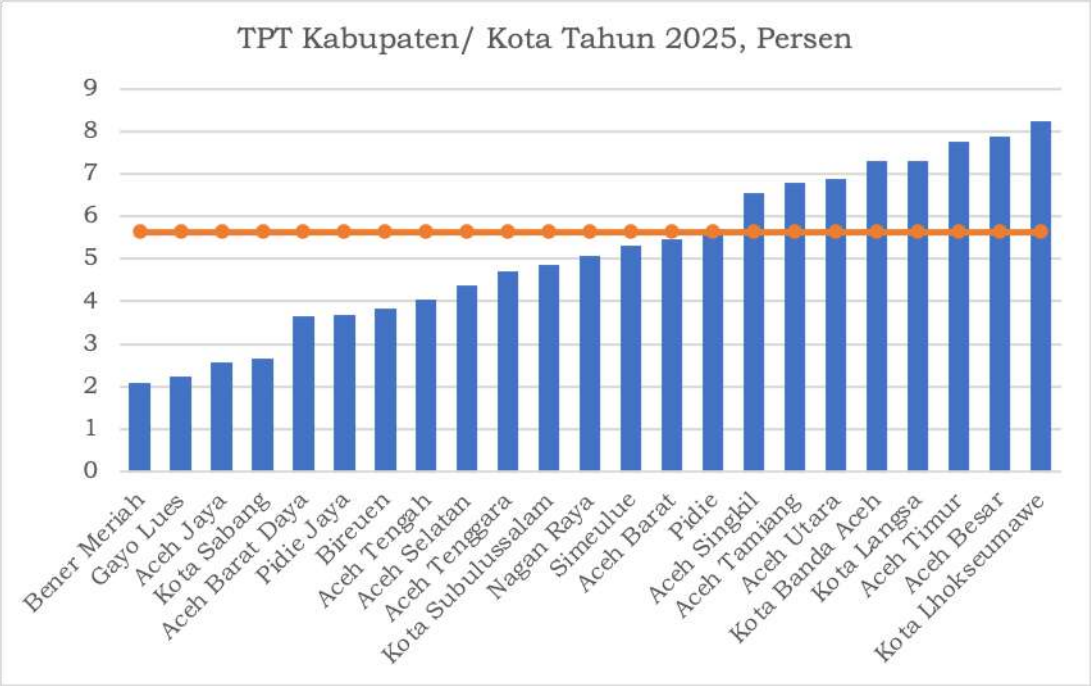

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2026

Gambar 2. 27
TPT Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2025

TPT tertinggi pada tahun 2025 adalah Kota Lhokseumawe, yaitu sekitar 8,2%. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe menghadapi tekanan pasar kerja yang paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Aceh. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus karena Lhokseumawe merupakan salah satu pusat kegiatan perkotaan, jasa, perdagangan, pendidikan, dan industri. Tingginya TPT di wilayah perkotaan dapat mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja dengan ketersediaan lapangan kerja formal yang memadai. Selain Kota Lhokseumawe, wilayah lain dengan TPT tinggi adalah Aceh Besar, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kota Banda Aceh. Kelima wilayah ini berada pada kelompok TPT tertinggi dan berada cukup jauh di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan

wilayah dengan aktivitas penduduk yang besar belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

Sebaliknya, wilayah dengan TPT terendah pada tahun 2025 adalah Bener Meriah, yaitu sekitar 2,1%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Setelah Bener Meriah, wilayah dengan TPT relatif rendah adalah Gayo Lues, Aceh Jaya, dan Kota Sabang. Rendahnya TPT pada wilayah-wilayah tersebut dapat menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja terserap dalam aktivitas ekonomi lokal, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan kecil, jasa lokal, dan sektor informal.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Aceh selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan relatif stabil. Pada tahun 2021, RLS Aceh tercatat sebesar 9,37 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 9,95 tahun pada tahun 2025. Capaian ini tidak hanya menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan secara umum, tetapi juga menempatkan Aceh berada di atas rata-rata nasional yang pada tahun yang sama sebesar 9,07 tahun. Dengan demikian, secara agregat dapat disimpulkan bahwa pembangunan pendidikan di Aceh telah mampu mendorong peningkatan lama sekolah penduduk secara lebih baik dibandingkan capaian nasional. Meskipun demikian, jika ditelaah lebih mendalam, capaian RLS tersebut masih mencerminkan tantangan struktural dalam pembangunan pendidikan. Nilai RLS yang masih berada pada kisaran 9–10 tahun menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk Aceh baru menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sekolah menengah pertama. Artinya, transisi menuju pendidikan menengah atas belum berlangsung secara optimal. Hal ini menjadi indikasi bahwa persoalan utama pembangunan pendidikan di Aceh telah bergeser, dari isu akses pendidikan dasar menuju isu keberlanjutan pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi

Tabel 2. 21
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Simeulue	9,48	9,73	9,81	9,89	10,09
Aceh Singkil	8,68	8,69	8,70	8,72	9,05
Aceh Selatan	8,88	8,89	8,91	8,92	9,25
Aceh Tenggara	9,67	9,92	10,09	10,1	10,39
Aceh Timur	8,21	8,32	8,47	8,48	8,80
Aceh Tengah	9,86	9,87	9,89	10,03	10,35
Aceh Barat	9,55	9,87	9,89	9,99	10,27
Aceh Besar	10,33	10,35	10,36	10,37	10,69

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pidie	9,00	9,02	9,03	9,04	9,37
Bireuen	9,29	9,31	9,32	9,59	9,92
Aceh Utara	8,64	8,73	8,85	9,11	9,38
Aceh Barat Daya	8,67	8,68	8,77	8,78	9,11
Gayo Lues	8,40	8,41	8,42	8,44	8,75
Aceh Tamiang	8,91	9,04	9,24	9,3	9,42
Nagan Raya	8,69	8,95	8,96	9,25	9,57
Aceh Jaya	8,71	8,72	8,74	9,02	9,34
Bener Meriah	10,00	10,01	10,12	10,13	10,41
Pidie Jaya	9,34	9,53	9,58	9,59	9,80
Banda Aceh	12,83	13,03	13,04	13,1	13,37
Sabang	11,18	11,19	11,20	11,22	11,23
Langsa	11,12	11,14	11,27	11,28	11,60
Lhokseumawe	11,11	11,12	11,27	11,31	11,64
Subulussalam	8,03	8,22	8,32	8,43	8,75
Aceh	**9,37**	**9,44**	**9,55**	**9,64**	**9,95**
Nasional	**8,54**	**8,69**	**8,77**	**8,85**	**9,07**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026

Analisis lebih lanjut berdasarkan Tabel 2.21 memperlihatkan adanya ketimpangan capaian RLS antar kabupaten/kota yang cukup signifikan. Wilayah perkotaan seperti Kota Banda Aceh menunjukkan capaian RLS tertinggi sebesar 13,37 tahun pada tahun 2025, yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk telah mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi awal. Kondisi ini sangat kontras dengan beberapa wilayah lain seperti Kota Subulussalam yang hanya mencapai 8,75 tahun, Kabupaten Gayo Lues sebesar 8,75 tahun, serta Kabupaten Aceh Timur sebesar 8,80 tahun. Bahkan, capaian di wilayah-wilayah tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Aceh masih menghadapi tantangan serius dalam aspek pemerataan. Faktor geografis, keterbatasan infrastruktur pendidikan, distribusi tenaga pendidik, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi determinan utama yang mempengaruhi rendahnya capaian di wilayah tertentu. Dengan demikian, dalam perspektif RKPD Aceh Tahun 2027, peningkatan RLS tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan agregatif, tetapi perlu didorong melalui intervensi yang bersifat afirmatif dan berbasis wilayah, khususnya pada daerah-daerah dengan capaian rendah.

Tabel 2. 22
Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-rata Sumatera Tahun 2021–2025

Tahun	Aceh	Sumatera Utara	Rata-Rata Sumatera	Nasional
2021	9,37	9,58	8.93	8,54
2022	9.44	9,71	9.02	8.69
2023	9.55	9,82	9.02	8.77
2024	9.64	10.18	9.54	8.85
2025	9,95	10.08	9.35	9.07

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.25, posisi Aceh masih berada di bawah Provinsi Sumatera Utara yang telah mencapai 10,08 tahun pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Aceh telah melampaui rata-rata nasional, daya saing regional masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan keberlanjutan pendidikan menjadi kunci dalam mendorong peningkatan RLS yang lebih progresif ke depan

2.1.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Aceh selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan kecenderungan sedikit fluktuatif. Pada tahun 2021, HLS tercatat sebesar 14,63 tahun, kemudian mengalami sedikit penurunan hingga berada pada angka 14,40 tahun pada tahun 2025. Meskipun demikian, capaian ini tetap berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 13,30 tahun, yang menunjukkan bahwa secara sistem pendidikan di Aceh telah mampu menyediakan peluang akses pendidikan yang relatif panjang bagi penduduk usia sekolah. Secara konseptual, HLS menggambarkan ekspektasi lama sekolah yang dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke depan. Dengan capaian 14,40 tahun, hal ini berarti bahwa secara teoritis anak di Aceh memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi, bahkan hingga tahun kedua perguruan tinggi. Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian RLS yang hanya sebesar 9,95 tahun, terlihat adanya kesenjangan yang cukup besar antara harapan dan realisasi pendidikan.

Tabel 2. 23
Angka Harapan Lama Sekolah Aceh Tahun 2021–2025

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Simeulue	13,9	14,08	14,28	14,53	14,59
Aceh Singkil	14,32	14,34	14,35	14,36	14,37
Aceh Selatan	14,6	14,69	14,7	14,71	14,72
Aceh Tenggara	14,01	14,26	14,27	14,47	14,52
Aceh Timur	13,04	13,06	13,07	13,08	13,09
Aceh Tengah	14,28	14,61	14,85	15,03	15,04
Aceh Barat	14,61	14,63	14,64	14,93	14,94

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Aceh Besar	14,73	14,75	14,76	14,77	14,92
Pidie	14,47	14,49	14,5	14,52	14,53
Bireuen	14,84	14,86	14,87	14,88	14,98
Aceh Utara	14,71	14,73	14,74	14,75	14,76
Aceh Barat Daya	13,65	13,66	13,67	13,69	13,70
Gayo Lues	13,78	14,08	14,34	14,59	14,73
Aceh Tamiang	13,76	13,96	14,23	14,51	14,52
Nagan Raya	14,14	14,16	14,17	14,18	14,19
Aceh Jaya	13,99	14,01	14,02	14,06	14,07
Bener Meriah	13,47	13,71	13,72	13,73	13,93
Pidie Jaya	14,97	14,98	14,99	15,01	15,02
Banda Aceh	17,8	17,81	17,93	17,94	17,95
Sabang	14,13	14,4	14,68	14,97	14,98
Langsa	15,63	15,64	15,7	15,71	15,72
Lhokseumawe	15,21	15,27	15,54	15,55	15,56
Subulussalam	14,62	14,81	15,06	15,31	15,32
Aceh	**14,63**	**14,37**	**14,38**	**14,39**	**14,40**
Nasional	**13,08**	**13,1**	**13,15**	**13,21**	**13,30**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026

Kesenjangan antara HLS dan RLS ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem pendidikan. Tingginya HLS menunjukkan bahwa akses pendidikan secara formal tersedia, namun belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor penghambat seperti kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses di wilayah tertentu, rendahnya motivasi atau persepsi terhadap pentingnya pendidikan lanjutan, serta masih adanya risiko putus sekolah pada jenjang menengah. Analisis lebih lanjut berdasarkan Tabel 2.26 menunjukkan bahwa terdapat variasi capaian HLS antar wilayah. Kota Banda Aceh memiliki HLS tertinggi mencapai 17,95 tahun, yang mencerminkan tingginya akses dan keberlanjutan pendidikan di wilayah tersebut. Sebaliknya, daerah seperti Kabupaten Aceh Timur memiliki HLS yang relatif lebih rendah, yaitu sekitar 13,09 tahun. Variasi ini menunjukkan bahwa peluang pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah dan ketersediaan layanan pendidikan. Kondisi ini menegaskan bahwa fokus pembangunan pendidikan perlu diarahkan pada upaya untuk memperkecil kesenjangan antara HLS dan RLS. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan retensi peserta didik, penguatan pendidikan kesetaraan, serta pemberian dukungan bagi kelompok rentan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2.1.2.2.3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator kesehatan ibu, sebagai nilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksebilitas maupun kualitas. Aki juga menggambarkan kesehatan ibu, status gizi, kesehatan lingkungan, tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, tingkat pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

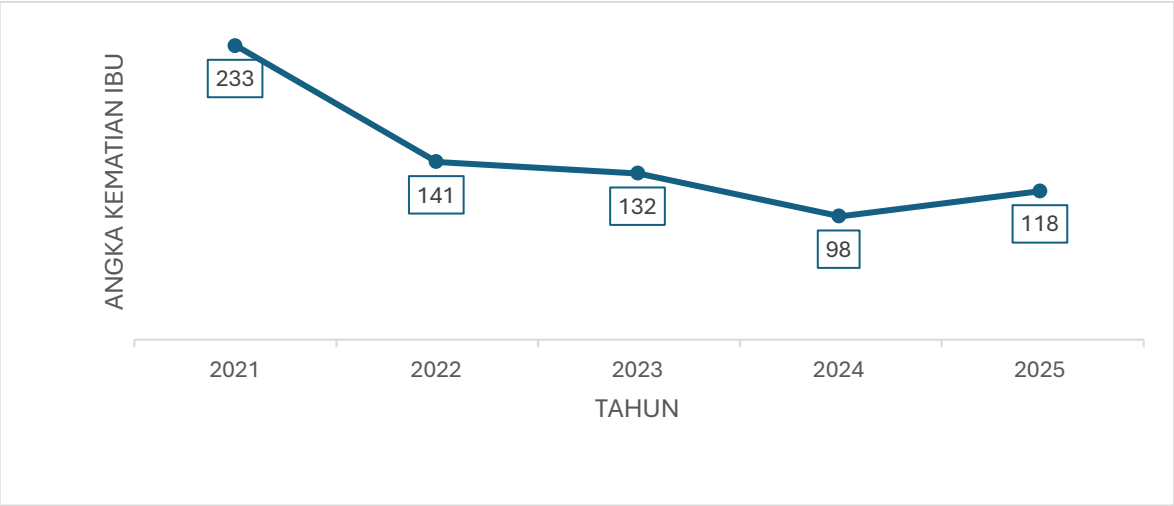

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2026

Gambar 2. 28
Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2021-2025

Angka kematian Ibu di Aceh menunjukkan perbaikan selama periode 2021 sampai dengan 2024 dari 233 per 100.00 kelahiran hidup menjadi 98 per 100.000 kelahiran hidup. dengan menunjukkan mengalami penurunan dari 223/100.000 kelahiran hidup. Tahun 2025 AKI mengalami peningkatan menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup. Penurunan AKI menunjukkan adanya perbaikan status gizi dan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat, disamping itu perbaikan layanan kesehatan juga menunjukkan perbaikan. Fenomena terjadinya penurunan di tahun 2025 tidak berarti kegiatan yang telah dilaksanakan terjadi kegagalan namun ada faktor tertentu yang mengakibatkan peningkatan terjadi di tahun 2025, yaitu peningkatan kasus kehamilan berisiko tinggi, masalah rujukan dan keterlambatan pelayanan.

2.1.2.2.4. Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 -11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Faktor yang dapat menyebabkan

kenaikan AKB diantaranya komplikasi persalinan seperti asfiksia (kurang oksigen), Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) < 2500 gr dan kelahiran prematur.

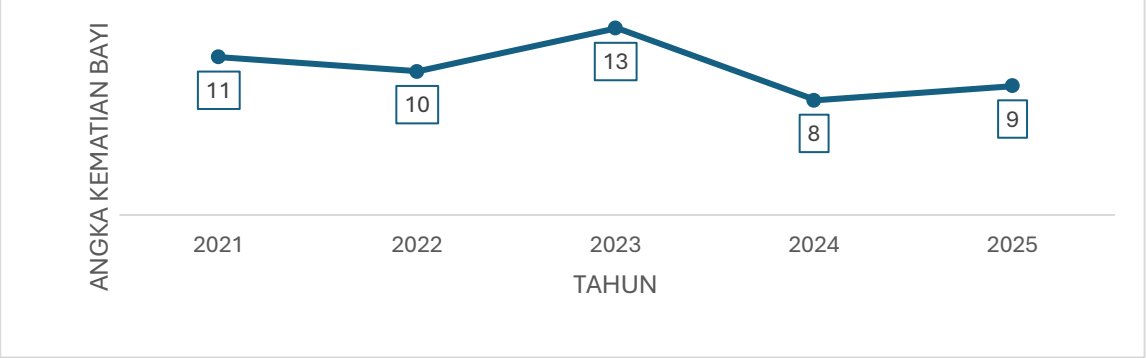

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2026

Gambar 2. 29
Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2025

Tahun 2025 Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami kenaikan menjadi 9 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan tahun 2024 hanya sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup. AKB tahun 2023 menjadi yang tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir.Penyebab utama tingginya Angka Kematian Bayi adalah kondisi saat lahir, bayi lahir dalam keadaan prematur, bayi kekurangan oksigen maupun berat badan lahir rentan, disamping itu faktor kesehatan ibu, akses layanan maupun kualitas layanan juga menjadi penyebab tingginya kematian bayi di Aceh.

2.1.2.2.5. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup saat lahir yang diwakili dimensi angka panjang dan hidup sehat secara konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Aceh. Data menunjukkan bahwa Usia Harapan Hidup penduduk Aceh meningkat dari tahun 2021(69,96) sampai dengan tahun 2025 (Aceh 73,48). Namun demikian, jika dibandingkan dengan nasional, umur harapan hidup Aceh masih berada dibawah angka nasional. Hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

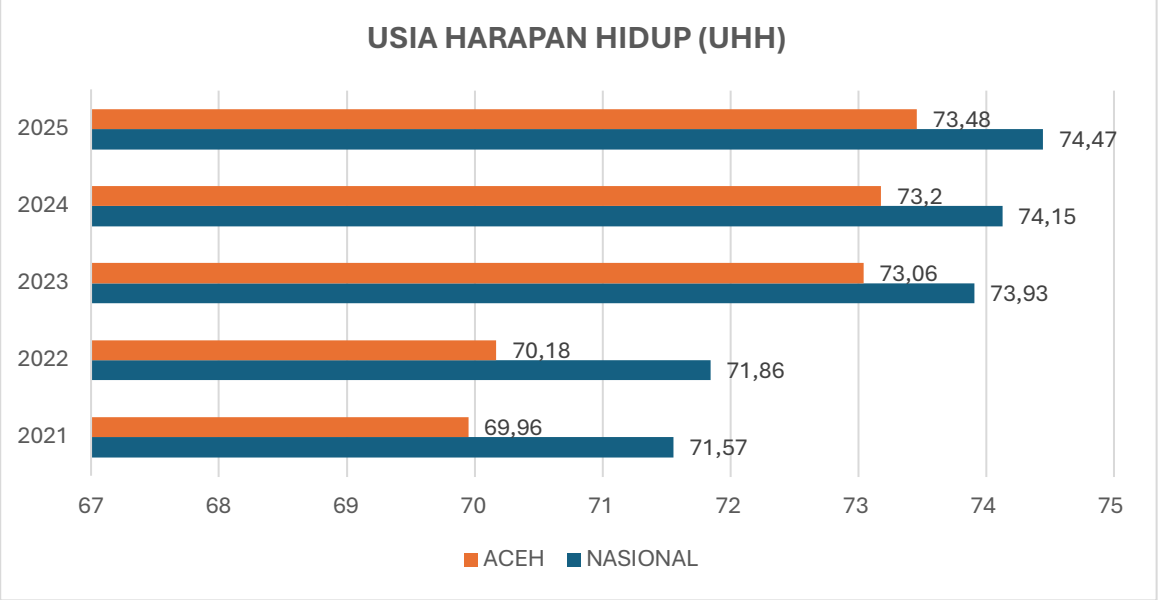

Sumber: BPS 2021-2025 (data diolah)

Gambar 2. 30
Umur Harapan Hidup Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025

Berdasarkan jenis kelamin, selama kurun wakti 2021 sampai dengan 2025 Usia Harapan Hidup perempuan lebih baik dibandingkan dengan laki-laki. Tahun 2025 UHH perempuan sebesar 73,48 sedangkan laki-laki sebesar 69,12. rendahnya UHH laki-laki di Aceh sangat dipengaruhi oleh gaya hidup yang beresiko tinggi seperti merokok, pola makan yang kurang sehat dan *kurang* menjaga kesehatan, disamping itu tuntutan pekerjaan yang membuat laki-laki yang berdampak pada tekanandarh tinggi, jantung bahkan kematian dini. UHH laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada gambar berikut:

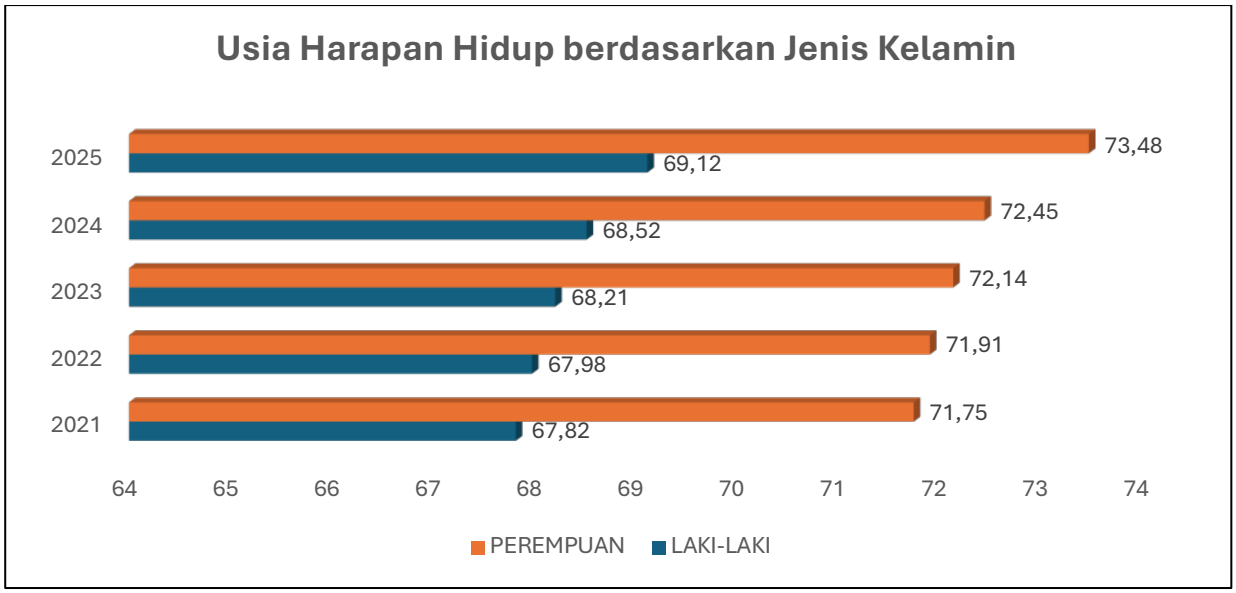

Gambar 2. 31
Usia Harapan Hidup di Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2025

2.1.2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dan IPM Aceh lebih baik dibandingan dengan IPM Nasional. Pada tahun 2025 IPM Aceh sebesar 76,23 sedangkan IPM Nasional sebesar 75,90. Tingginya IPM Aceh sangat dipengaruhi oleh IPM Kota banda Aceh sedangkan kondisi IPM kabupaten/kota masih banyak yang tertinggal dibandingkan dengan Nasional. Hal ini menunjukkan masih terdapat disparitas IPM di kabupaten/kota seperti yang terlihat pada tabel 2.24 di bawah ini.

Tabel 2. 24
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Simeulue	66.41	67.27	69.98	70,95	71,94
2	Aceh singkil	69.22	69.62	71.14	71,76	72,62
3	Aceh Selatan	67.44	67.87	71.14	71,82	72,79
4	Aceh Tenggara	69.44	70.32	72.93	73,59	74,36
5	Aceh Timur	67.83	68.72	70.73	71,29	72,2
6	Aceh Tengah	73.37	73.95	76.45	77,27	78,09
7	Aceh Barat	71.67	72.34	74.62	75,45	76,3
8	Aceh Besar	73.58	74.00	75.98	76,57	77,46
9	Pidie	70.70	71.20	72.95	73,60	74,46
10	Bireuen	72.33	73.16	74.56	75,39	76,29
11	Aceh Utara	69.46	70.22	72.50	73,35	74,29
12	Aceh Barat Daya	66.99	67.41	70.47	71,16	72,1
13	Gayo Lues	67.56	68.25	70.82	71,75	72,61
14	Aceh Tamiang	69.48	70.43	73.02	74,00	74,78
15	Nagan Raya	69.31	70.10	72.15	73,10	73,87
16	Aceh Jaya	69.84	70.36	72.44	73,40	74,2
17	Bener Meriah	73.27	73.90	76.06	76,58	77,48
18	Pidie Jaya	73.60	74.34	76.04	76,39	77,04
19	Banda Aceh	85.71	86.28	88.32	88,85	89,55
20	Sabang	76.11	76.85	78.70	79,50	80,04
21	Langsa	77.44	77.82	80.50	80,96	81,77
22	Lhokseumawe	77.57	78.04	80.26	80,89	81,75
23	Subulussalam	65.27	66.20	69.66	70,64	71,63
ACEH		73,29	73,48	74,11	75,36	76,23
NASIONAL		71.92	71.94	72.29	75,02	75,90

Sumber: BPS 2021-2025 (data diolah)

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, IPM laki-laki secara umum lebih tinggi capaiannya dibandingkan IPM perempuan. Kesenjangan ini tidak hanya terjadi di Aceh tapi juga dialami oleh Nasional. Tahun 2021 IPM perempuan Aceh 69,59,

sedangkan IPM laki-laki Aceh jauh lebih tinggi mencapai 76,25. Tahun 2024, IPM perempuan Aceh mencapai 71,47 sedangkan IPM laki-laki mencapai 77,81.

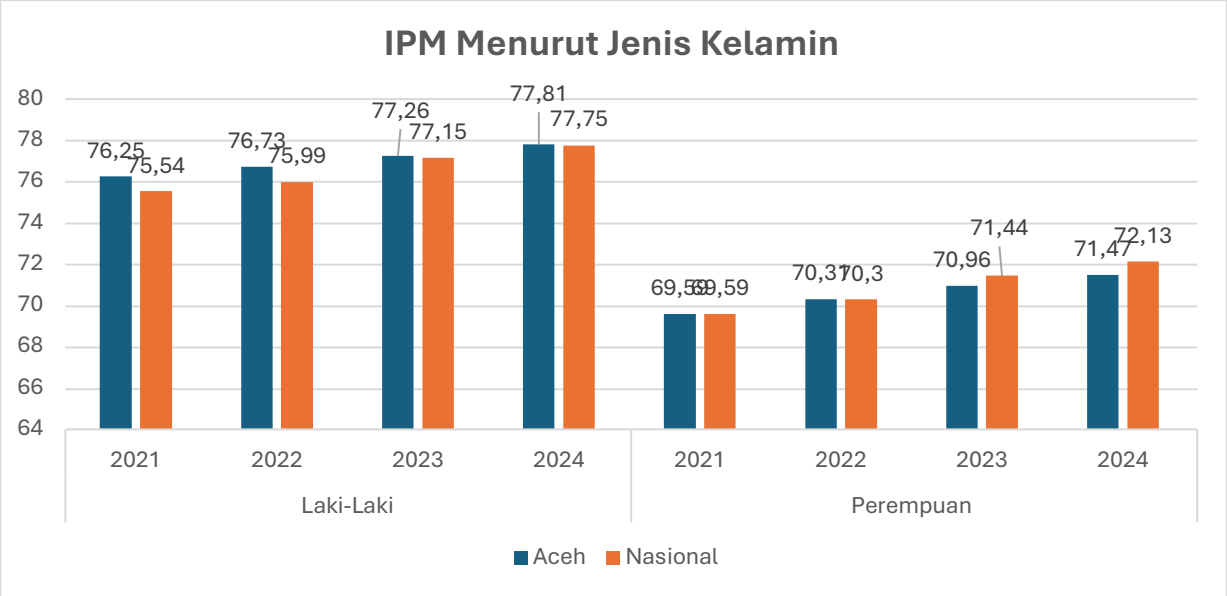

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Gambar 2. 32

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2025

Beberapa penyebab tingginya IPM laki-laki dibandingkan perempuan angtara lain akses pendidikan yang belum setara, partisipasi ekonomi perempuan lebih rendah serta pengaruh budaya dan struktur sosial.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya

Aceh memiliki berbagai warisan budaya yang berharga, baik berupa warisan budaya benda atau Cagar Budaya maupun Warisan Budaya Tak Benda Budaya (WBTB). Nilai-nilai budaya ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai dan karakteristik suku dan bahasa, karakteristik sosial budaya masyarakat Aceh, sangat dipengaruhi oleh keragaman suku/anak suku dan bahasa di Aceh. Yang terdiri dari suku dan bahasa Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Singkil, dan Simeulue.

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan kepulauan nusantara, memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Budha. Namun peran Aceh kemudian baru menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Jejak sejarah dan peradaban inilah

yang kemudian mewariskan tradisi, seni dan budaya yang masih ada hinngga saat ini dan perlu dijaga kelestariannya untuk generasi yang akan datang.

2.1.2.3.1 Seni dan Budaya

Memajukan kebudayaan Aceh merupakan salah satu tujuan utama rencana pembangunan Aceh, kebudayaan Aceh yang perlu dilestarikan dan dikembangkan adalah kebudayaan yang memiliki keunikan, ciri khas dan kebudayaan yang sudah hampir punah atau sudah jarang diketahui masyarakat luas. Selain itu, diversifikasi kebudayaan juga menjadi penting karena memiliki nilai jual kebudayaan dan juga bertujuan untuk menggiatkan pelaku budaya dalam berkreasi. Warisan budaya yang telah ditetapkan di dalam undang-undang disebut dengan cagar budaya. Warisannya ada yang berupa benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya yang diwarisi dan menjadi sejarah masa lalu (cultural heritage). Warisan budaya itu merupakan peninggalan masa pra sejarah, klasik, Islam, kolonial, serta peninggalan bencana gempa dan tsunami. Semua warisan peninggalan masa lalu tersebut terdiri dari budaya benda (tangible) seperti situs Mendale, Bukit Kerang, naskah/benda kuno, makam kuno, Masjid Raya, Baiturrahman, Kerkhof Peutjoet, kapal apung dan cagar budaya lainnya yang keseluruhannya berjumlah 1.138 cagar budaya yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh.

Seluruh warisan peninggalan tersebut memiliki keunikan dan kebesaran budaya serta mengandung nilai sejarah Aceh masa lalu. Nilai yang terkandung dalam warisan budaya itu dapat dijadikan sebagai media edukasi, penelitian dan daya tarik wisata, khususnya wisata budaya (culture tourism). Namun, peninggalan warisan budaya itu belum sepenuhnya dilestarikan dan dimanfaatkan sebagaimana pesan yang terdapat di dalam Undang-Undang RI tentang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010. Registrasi cagar budaya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan registrasi dunia oleh UNESCO merupakan hal yang paling penting dilakukan. Berdasarkan jenis cagar budaya yang tersebut di atas, 9 (sembilan) bangunan cagar budaya telah memiliki pengakuan sebagai situs budaya melalui Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Registrasi Nasional). Untuk pemeliharaannya, terdapat 43 (empat puluh tiga) situs/bangunan cagar budaya telah memiliki juru pelihara sampai dengan tahun 2025, sehingga ke depan perlu ditingkatkan jumlah dan kualitas pelindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan berbagai situs cagar budaya yang ada di Aceh.

Selain itu, Aceh juga memiliki kekayaan budaya tak benda (intangible) yang menarik lainnya, seperti tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual. Keunikan lainnya adalah keberagaman suku/etnis yang terdiri dari 8 (delapan) etnis/suku yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jame, Gayo, Kluet, Tamiang, Singkil, Simeluedan 13 (tiga belas) jenis bahasa daerah yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Tamiang, Julu, Haloban,

Pakpak, Nias, Lekon, Sigulai, Devayan. Keberagaman suku/etnis tersebut melahirkan seni yang beragam juga sehingga muncul seni tari dari masing-masing suku/etnis yang memiliki kekhasan masing-masing. Tarian yang ada di Aceh misalnya rapai, rapai debus, rapai geleng, likok pulo, meuseukat, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana dan qasidah gambus, sastra, pantun, syair, hikayat, seumapa, seni lukis (kaligrafi), dalail khairat, meurukon, dan lain-lain. Jumlah Sebaran tarian tradisional dan kreasi yang terdata di Aceh berjumlah 141 tarian.

Jenis tari-tarian tersebut juga terus dilakukan pelestarian, pengembangan dan promosi oleh pemerintah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau budayawan/seniman sanggar-sanggar kesenian yang tersebar di seluruh Aceh yang jumlahnya telah mencapai kurang lebih 1.174 sanggar kesenian. Sanggar-sanggar kesenian diupayakan mendapatkan pembinaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 2. 25
Perkembangan Kelompok Sanggar Seni di Provinsi Aceh, 2020-2024

No	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Group Kesenian	1.279	1.236	1.266	1.254	1.280

Sumber : Disbudpar Aceh, 2024 (diolah)

Selain itu Aceh juga memiliki Gedung kesenian yang diperuntukkan untuk mewadahi aktifitas seni yang memiliki fasilitas seperti auditorium untuk melakukan pertunjukan dan galeri untuk menyelenggarakan pameran. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh sampai dengan tahun 2025, saat ini ada 35 (tiga puluh lima) gedung kesenian yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota, terbanyak ada di kota Banda Aceh sebanyak 10 gedung, Kota Lhokseumawe ada 5 gedung. Selain itu ada 8 Kabupaten yang belum memiliki gedung pertunjukan seni yaitu; Bener Meriah, Aceh Timur, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, dan Aceh Tenggara.

Ketersediaan gedung kesenian di Aceh masih sangat minim, demikian juga dari sisi pemerataan juga belum merata di seluruh Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Aceh mendorong Kabupaten/Kota untuk memperioritaskan program/kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan revitalisasi gedung kesenian diseluruh Kabupaten/Kota secara bertahap.

Selain tari-tarian, Aceh juga memiliki 94 (sembilan puluh empat) Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang telah mendapatkan penetapan nasional sejak tahun 2013-2025. Pada tahun 2025 ada 17 WBTb yang ditetapkan nasional, diantaranya

ada 4 (empat) bahasa yaitu bahasa Jamee (Aceh Selatan), bahasa Kluet (Aceh Selatan), bahasa Simolol (Simeulue), dan bahasa Sigulai (Simeulue). Lainnya yang bersifat tradisi atau adat istiadat yang berbeda penampilannya antara satu daerah dengan daerah lainnya di Aceh, seperti kenduri tolak bala, kenduri laot, kenduri blang, kenduri glee, adat perkawinan, turun tanah bayi, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, seumeuleng dan peumeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno dan lain-lain.Semua budaya tak benda tersebut dapat dijadikan daya tarik wisata khusus, sehingga perlu terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai khazanah budaya Aceh

Penyelenggaran festival dan pameran seni dan budaya merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk melakukan promosi guna memperkenalkan budaya Aceh yang beragam kepada masyarakat lokal secara umum dan wisatawan secara terkhusus. Penyelenggaran festival ini bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah semata, namun juga memperkenalkan beberapa kebudayaan Aceh yang berbasis islami melalui festival seni. Dalam kurun waktu Tahun 2019 – 2023 terlihat bahwa festival seni yang dilakukan sangat beragam dengan rata-rata jumlah festival sebanyak 50 festival per tahun, sedangkan pada tahun telah dilaksanakan 2023 sebanyak 60 festival.

Pembangunan sektor kebudayaan di Aceh diarahkan agar dapat memberikan peran penting dan strategis dalam memperkuat nilai-nilai budaya Aceh yang bersifat khas dan unik serta memiliki ragam kebudayaan, baik berupa budaya benda (tangible) maupun budaya bukan benda (intangible). Namun keberagaman dan kekayaan budaya tersebut belum sepenuhnya mampu dioptimalkan baik dalam pendataan, pelestarian, pelindungan pemanfaatan. Selain tujuan untuk edukasi dan kelestarian budaya, kekayaan dan keragaman warisan budaya tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik bagi sektor pariwisata sehingga dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Pengembangan jenis wisata budaya akan lebih bermanfaat dan berdampak positif baik terhadap budaya maupun lingkungannya.

2.1.2.3.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pengembangan cagar budaya merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya. Bentuk kegiatannya berupa konservasi, penerbitan buku, dokumentasi digital, workshop, penataan, dan lain sebagainya. Aceh memiliki sejumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdiri dari: naskah kuno, koin emas, peralatan emas, makam, mesjid, tugu, rumah tradisional, monumen, benteng, perpustakaan, bangunan/gedung, tempat bersejarah, arca, gua, dll yang belum dilestarikan. Selama tahun 2013 sampai tahun 2025 telah dilakukan pelestarian terhadap 86 situs cagar budaya, 324 buah naskah kuno, 312 keping koin emas dan 56 buah peralatan

emas. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi, digitalisasi naskah kuno, workshop dan pembiayaan juru pelihara situs sebagai kegiatan rutin tahunan, selain konservasi yang dilakukan di Museum Aceh. Pada akhir tahun 2025 jumlah benda dan situs kawasan cagar budaya mencapai 1.270 buah. Pada tahun 2025 terdapat 4 penetapan Cagar Budaya (CB) Nasional di antaranya Masjid Raya Baiturrahman (Banda Aceh), Taman Sari Gunongan (Banda Aceh), Benteng Masjid Indrapuri (Aceh Besar), dan Bukit Remis (Aceh Tamiang).

Peninggalan budaya masa prasejarah dapat dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan manusia prasejarah di kawasan Gua Kampung Mendale, Takengon. Pada masa periode klasik, Aceh memiliki tiga situs sejarah seperti situs Indrapurwa, Indrapuri, dan Indrapatra. Selanjutnya, pada masa Islam dan kolonial, situs/cagar budaya banyak ditemukan di seluruh Aceh. Gambaran penyebaran situs/cagar budaya di Aceh, secara keseluruhan dapat dilihat di Tabel 2.26.

Tabel 2. 26
Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2025

No.	Kab/Kota	Makam	Masjid	Tugu	Rumah Tradisional	Monumen	Benteng	Perpustakaan	Bangunan/Gedung	Struktur	Tempat Bersejarah	Arca	Gua	Prasejarah	Benda	Jumlah
1.	Aceh Selatan	26	1	5	2	-	2	-	5	-	-	-	-	-	10	51
2.	Aceh Tenggara	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
3.	Aceh Timur	35	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	39
4.	Aceh Tengah	4	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1	12
5.	Aceh Barat	14	5	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	25
6.	Aceh Besar	227	21	3	6	-	31	1	9	-	-	-	14	-	10	322
7.	Pidie	34	10	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	53
8.	Aceh Utara	75	1	2	1	2	-	-	4	2	-	-	-	-	-	87
9.	Simeulue	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10.	Aceh Singkil	17	2	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	5	28
11.	Bireuen	38	5	3	-	1	-	-	8	-	2	-	-	-	6	63
12.	Aceh Barat Daya	27	2	1	-	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	36
13.	Gayo Lues	20	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	26
14.	Aceh Jaya	50	1	-	-	4	3	-	4	-	3	-	1	-	8	74
15.	Nagan Raya	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5
16.	Aceh Tamiang	36	-	1	3	-	-	-	10	-	2	-	-	2	-	54
17.	Bener Meriah	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
18.	Pidie Jaya	78	9	-	-	1	5	-	5	-	-	-	3	-	16	117
19.	Banda Aceh	50	6	6	1	6	-	-	13	-	4	-	-	-	9	95
20.	Sabang	3	2	1	-	-	14	-	82	-	2	-	-	-	-	104
21.	Lhokseumawe	15	1	4	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	25
22.	Langsa	1	-	-	1	1	1	-	13	-	-	-	-	-	-	17
23.	Subulussalam	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15
Jumlah		**768**	**73**	**31**	**26**	**15**	**66**	**1**	**166**	**5**	**15**	**0**	**20**	**4**	**72**	**1.262**

Sumber : Disbudpar Aceh, 2026

Berdasarkan Tabel 2.28, menunjukkan bahwa situs/cagar budaya terbanyak berada di Kabupaten Aceh Besar yaitu sebanyak 328 situs, Kota Sabang sebanyak 104 Situs, dan Pidie Jaya sebanyak 98. Sedangkan situs/cagar budaya paling sedikit terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara yaitu sebanyak 3 situs.

Dari jumlah situs/cagar budaya yang diuraikan di atas, hanya 94 (sembilan puluh empat) buah situs/cagar budaya yang telah memiliki SK Menteri atau penetapan Nasional dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2013 hanya ada Rencong yang merupakan senjata ciri khas Aceh yang sudah sangat dikenal luas baik nusantara maupun mancanegara. Awal mula Rencong adalah senjata yang sering digunakan pada masa peang pada zaman dahulu, dengan perkembangan zaman rencong berubah fungsi menjadi souvenir bagi yang mengunjung ke Aceh dalam berbagai ukuran. Selain rencong, ada Tari Saman yang merupakan seni tradisional yang berasal dari Gayo Lues, tarian ini sudah sangat dikenal luas bahkan sudah mendapat Pengakuan UNESCO, Tari Saman ditetapkan sebagai Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia oleh UNESCO pada 24 November 2011 dalam sidang di Bali. Pengakuan ini memperkuat posisinya sebagai warisan budaya dunia yang sangat berharga khususnya Aceh. Nama tarian ini diambil dari nama sang penciptanya yaitu Syekh Saman, tarian ini tercipta sekitar abad XIV yang menjadi sebagai media yang memuat tentang dakwah, tarian ini menonjolkan nilai-nilai kebersamaan, sopan santun, dan pendidikan, serta diiringi nyanyian syair tanpa alat musik yang memiliki ciri khas tersendiri.

Kondisi situs/cagar budaya di beberapa daerah ada yang sudah mengalami kerusakan dan yang sangat memprihatinkan khususnya di wilayah yang terkena bencana tsunami seperti Banda Aceh dan Aceh Besar. Cagar Budaya yang mengalami kerusakan antara lain situs Kampung Pande di Kota Banda Aceh, sebelumnya juga nisan-nisan di situs ini belum satupun yang tertata dan masih berserakan di rawa-rawa. Hasil penelitian Edwar Mc. Canon tahun 2007 memberikan informasi bahwa terdapat tulang-tulang manusia di lokasi Cot Makam Kampung Pande, namun pada saat ini tulang- tulang tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Kondisi memprihatinkan juga terlihat pada situs Makam Syiah Kuala, situs Lamreh dan situs Ujung Pancu. Selayaknya dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan, maka situs/cagar budaya perlu mendapat perhatian khusus.

Dari jumlah total 1.270 situs/cagar budaya yang ada di Aceh masih banyak yang belum memiliki juru pelihara. Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2025 baru 43 (empat puluh tiga) situs dibiayai oleh Pemerintah. Demikian juga situs/cagar budaya yang termasuk naskah-naskah kuno yang belum teregistrasi perlu dilakukan pengkajian, pencatatan dan penetapan, sehingga pelestarian situs/cagar budaya dapat dilaksanakan sesuai kode etik.

Selain memiliki budaya benda berupa situs/cagar budaya, Aceh juga memiliki Budaya Tak Benda (intangible) yang beragam seperti Tarian, Adat-Istiadat, dan kegiatan Spiritual. Berbagai jenis budaya tak benda tersebut tersebar diseluruh kabupaten/kota dengan ciri khas tersendiri, seperi: rapai, rapai debus, rapai geleng, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana, qasidah gambus, pantun, syair, hikayat, seumapa dan seni lukis (kaligrafi) dalail khairat, meurukon, adat perkawinan, peutreun aneuk, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, kegiatan semeulung dan semeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno. Kekayaan budaya yang dimiliki Aceh menjadi dayatarik dunia, dan keunikannya telah diakui dengan ditetapkannya Tari Saman sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO sejak tahun 2011.

2.1.2.3.3.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu indikator yang lebih komprehensif yang dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan yang terdiri dari 7 dimensi, yaitu :

1. Dimensi Ekonomi budaya
2. Dimensi Pendidikan
3. Dimensi Ketahanan Sosial
4. Dimensi Warisan Budaya
5. dimensi Ekspresi Budaya
6. Dimensi Budaya Literasi
7. Dimensi Gender

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Aceh sebagaimana grafik berikut.

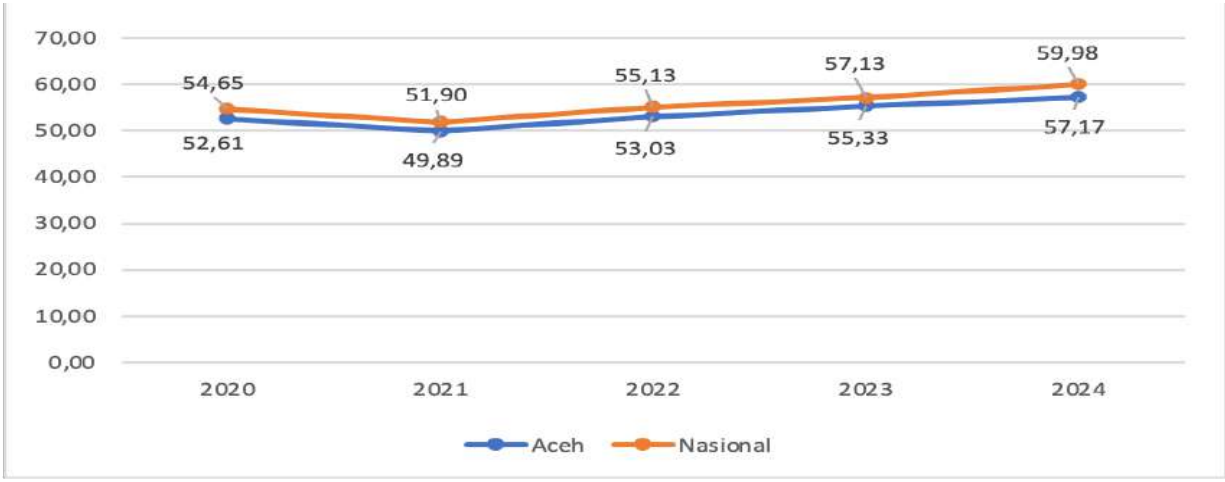

Sumber : Kemendikbud, 2025

Gambar 2. 33
Perkembangan indeks pembangunan kebudayaan Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 (Data Termutakhir)

Dari gambar diatas menunjukkan pembangunan kebudayaan Aceh cukup baik, namun dengan potensi yang ada, pembangunan kebudayaan di Aceh dapat dikatakan belum optimal dan masih berada sedikit dibawah rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Kebudayaan Aceh mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan, hal ini juga terjadi secara nasional akibat dari dampak pembatasan pada pandemi covid-19. Seiring dengan pelonggaran pembatasan dan pemulihan ekonomi nasional dan daerah, indeks pembangunan kebudayaan Aceh di tahun 2023 kembali meningkat mencapai angka 55,33 sedikit dibawah capaian nasional pada angka 57,13. Hal ini terus meningkat pada tahun 2024 sebesar 57,17, dengan nilai capaian nasional pada angka 59,98.

Capaian Pembangunan Kebudayaan Aceh paling tinggi dipengaruhi oleh dimensi pendidikan dengan capaian 76,06, kemudian dimensi budaya literasi, ketahanan sosial budaya, gender, warisan budaya, ekspresi budaya dan terakhir yang paling rendah pada dimensi ekonomi budaya dengan capaian 15,20.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

2.1.3.1.1. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

A. Syariat Islam

Penguatan penerapan syariat Islam secara holistik merupakan salah satu misi dari Gubernur Aceh tahun 2025. Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Syariat Islam di Aceh merupakan salah satu keistimewaan provinsi ini dan diatur oleh berbagai qanun (peraturan daerah) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan Syariat Islam di Aceh mencakup beberapa aspek penting kehidupan masyarakat, antara lain:

1. **Bidang Hukum:** Penerapan hukum pidana dan perdata yang berbasis syariat, seperti hukum jinayat yang mengatur tindak pidana dalam perspektif Islam. Contoh hukuman yang diterapkan termasuk cambuk untuk pelanggaran tertentu.
2. **Bidang Ekonomi:** Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk keberadaan lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Zakat, infaq, dan wakaf juga merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah di Aceh.
3. **Bidang Sosial dan Budaya:** Promosi dan pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan busana muslim, pemisahan tempat duduk pria dan wanita di tempat umum, serta pengaturan waktu operasional tempat hiburan sesuai dengan waktu ibadah.

4. **Pendidikan Islam:** Penekanan pada pendidikan berbasis Islam di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum yang digunakan juga mencakup pendidikan agama yang mendalam.
5. **Layanan Keagamaan:** Fasilitas dan program yang mendukung pelaksanaan ibadah dan pengembangan spiritual, seperti pembangunan masjid, pelaksanaan haji dan umrah, serta kegiatan keagamaan lainnya.
6. **Pengawasan dan Penegakan Syariat:** Pemerintah Aceh memiliki lembaga pengawas dan penegak syariat, seperti Wilayatul Hisbah (polisi syariah) yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam di masyarakat.

Pada Tahun 2025, tingkat pelanggaran Syariat Islam secara umum meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan ada beberapa kasus yang jumlahnya meningkat signifikan, seperti kasus maisir, zina, dan pelecehan seksual. Jumlah kasus pelanggaran syariat Islam periode tahun 2021-2025 disajikan dalam tabel 2.27 berikut:

Tabel 2. 27
Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Tahun 2021-2025 sesuai Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

No.	Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014)	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Khamar	18	13	23	17	11
2	Maisir	194	153	95	247	256
3	Khalwat	10	7	4	8	3
4	Ikhtilath	46	25	22	15	16
5	Zina	51	28	38	21	31
6	Pelecehan Seksual	36	55	48	42	60
7	Pemerkosaan	115	136	177	165	166
8	Liwath	2	2	2	0	4
Jumlah Kasus		**269**	**472**	**419**	**409**	**547**

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh melalui Mahkamah Syari'ah Aceh, 2026

Selain itu dalam rangka meningkatkan pemahaman Syariat Islam di daerah perbatasan dan terpencil, Pemerintah Aceh menempatkan 164 orang da'i perbatasan di 6 (enam) Kabupaten/Kota seluruh Aceh. Jumlah Da'I dari tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.28 dibawah ini.

Tabel 2. 28
Jumlah Da'i di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	2021		2022		2023		2024		2025	
	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl
Aceh Singkil	26	17	26	17	26	17	26	17	7	31
Subulussalam	8	18	8	18	8	18	8	18	8	16
Aceh Selatan	0	18	0	13	0	18	0	13	0	12
Aceh Tamiang	24	15	24	15	24	15	24	15	20	13

Kabupaten/Kota	2021		2022		2023		2024		2025	
	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl
Aceh Tenggara	38	5	38	5	38	5	38	5	31	5
Simeulue	0	31	0	27	0	31	0	27	0	21
Jumlah	96	104	96	93	96	104	96	93	66	98
Total	**200**		**189**		**179**		**170**		**164**	

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, Tahun 2026. ****Ket: Pbts (Perbatasan), Tpcl (Terpencil)***

Bila kita melihat data di atas, jumlah da'i terus menurun dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti peralihan status mereka menjadi PPPK, telah mencapai usia pensiun, atau berhenti oleh sebab-sebab tertentu lainnya.

B. Pelaksanaan Ibadah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah di Aceh, khususnya melalui optimalisasi fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan, Pemerintah Aceh terus berupaya terus mendorong peningkatan jumlah masjid yang menjalankan fungsi idarah (manajemen/pengelolaan), imarah (pemakmuran), dan riayah (pemeliharaan). Upaya tersebut ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja utama, yang mencerminkan keberhasilan pembinaan dan penguatan kelembagaan masjid di seluruh wilayah Aceh.

Adapun masjid yang melaksanakan Slalat Jumat di Provinsi Aceh pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 29
Data Mesjid Se-Aceh yang Melaksanakan Shalat Jum'at Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	MASJID RAYA	MASJID AGUNG	MASJID KECAMATAN	MASJID MUKIM	MASJID GAMPONG
1	Sabang		1	2	6	12
2	Banda Aceh	1	1	9	3	107
3	Aceh Besar		1	23	34	100
4	Aceh Jaya		1	10	0	112
5	Aceh Barat		1	12	270	6
6	Nagan Raya		1	10	27	169
7	Aceh Barat Daya		1	9	44	95
8	Aceh Selatan		1	18	47	220
9	Simeulue		1	11	0	163
10	Kota Subulussalam		1	5	0	97
11	Aceh Singkil		1	10	0	125
12	Aceh Tenggara		1	10	15	224
13	Gayo Lues		1	11	130	0
14	Aceh Tengah		1	14	55	146
15	Bener Meriah		1	10	29	127
16	Aceh Tamiang		1	12	297	4
17	Kota Langsa		1	5	63	0
18	Aceh Timur		1	21	41	366

NO	KABUPATEN/KOTA	MASJID RAYA	MASJID AGUNG	MASJID KECAMATAN	MASJID MUKIM	MASJID GAMPONG
19	Aceh Utara		1	24	373	0
20	Lhokseumawe		1	4	5	42
21	Bireuen		1	17	90	69
22	Pidie Jaya		1	8	34	33
23	Pidie		1	21	88	31
	Jumlah	1	23	276	1.651	2.248
				Jumlah Total		**4.199**

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, 2026

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Aceh melakukan pembinaan berkelanjutan kepada para takmir masjid melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendampingan dalam pengelolaan masjid yang profesional dan berbasis fungsi. Pembinaan ini juga melibatkan peran aktif organisasi kepemudaan masjid, khususnya Badan Kooordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) se-Aceh, sebagai mitra strategis dalam menggerakkan kegiatan imarah masjid dan pemberdayaan generasi muda.

Selain itu, untuk meningkatkan akurasi data sebagai bahan pengambilan kebijakan berbasis bukti, Pemerintah Aceh memanfaatkan data masjid yang dihimpun melalui aplikasi Sistem Informasi Masjid Aceh (SIMASA). Aplikasi ini telah dikembangkan sejak tahun 2018 dan terus disempurnakan untuk menyediakan informasi yang komprehensif terkait kondisi, fungsi, dan klasifikasi masjid di Aceh. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan fungsi masjid di Aceh dapat semakin optimal, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah masyarakat serta memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan umat dan pembangunan syariat Islam secara kaffah di Aceh.

C. Pengelolaan Harta Agama (BMA)

Dinul Islam merupakan suatu rangkaian dari 3 (tiga) pilar yaitu syari'ah, aqidah dan akhlak. Definisi Syari'ah adalah sistem norma (kaidah) llahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Aqidah adalah iman (keyakinan) yang ditautkan dengan Rukun Iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam. Sedangkan kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah. Selanjutnya akhlak adalah sikap yang menimbulkan prilaku baik dan buruk. Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti.

Pengelolaan Harta Agama menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Syariat Islam dalam masyarakat Aceh. Kehadiran Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, perubhan atas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitu Mal

yang menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat Qanun ini diterbitkan untuk menyesuaikan aturan sebelumya, mengatur organisasi, tugas serta pengangkatan pengurus Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal sebagai lembaga resmi dalam tata kelola pengelolaan zakat secara profesional. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwakilan (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat.

Sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang pengelolaan harta agama yang dilakukan dengan manajemen yang baik mampu menciptakan kemandirian dan produktifitas masyarakat. Zakat adalah harta diserahkan oleh muzakki (orang atau badan yang wajib menunaikan zakat) yang dipungut oleh Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kab/Kota atau Baitul Mal Gampong sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tertuang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 192 belum dapat dilaksanakan. Ini terjadi akibat belum singkron UU Pajak Penghasilan dengan UUPA. Untuk ini diperlukan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat terlaksana dan muzakki tidak merasakan pembayaran ganda zakat dan pajak. Secara umum pemanfaatan dan pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) di Aceh belum optimal.

Sementara Infaq adalah harta yang diserahkan atau diungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMA atau BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnnya diatur dalam qanun.

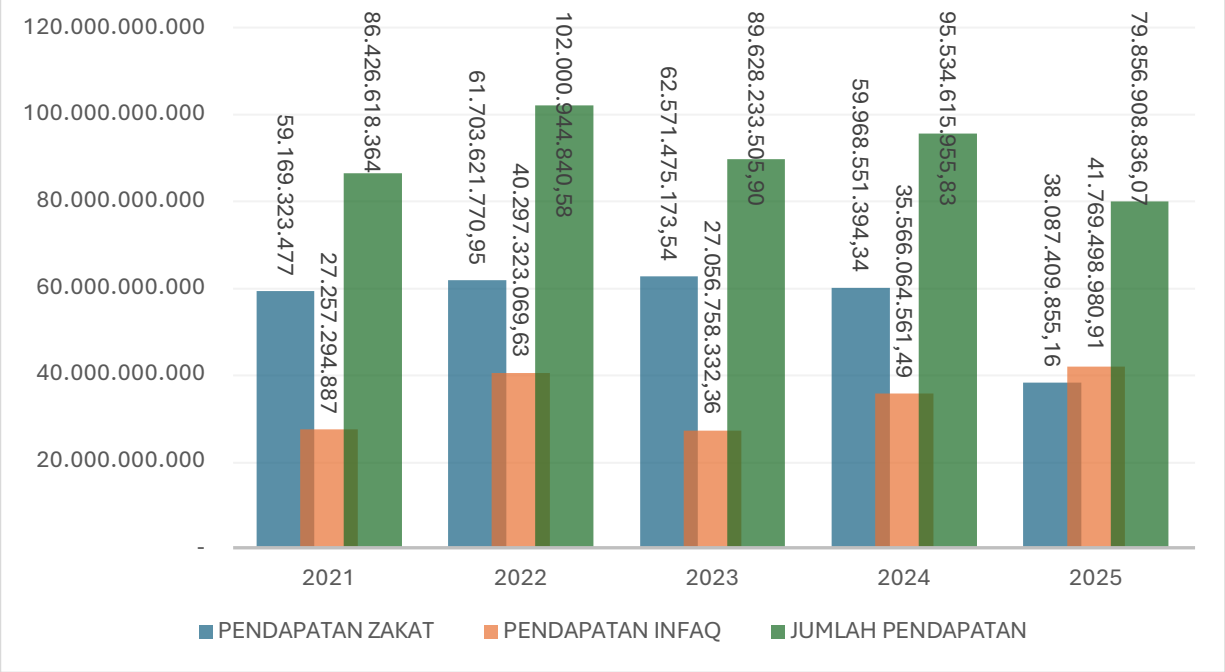

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2025

Gambar 2. 34
Jumlah Pendapatan Zakat dan Infak Tahun 2021-2025

Pendapatan zakat dan infak selama kurun waktu lima tahun terakhir berkisar antara Rp. 80 M hingga Rp. 100 M, hal ini menandakan bahwa penerimaan zakat dan infaq sudah mulai meningkat kembali, walaupun jika dibandingkan hasil potensi zakat di Aceh sebesar Rp. 1,3 T pertahun (hasil Kajian LPPM UIN Ar Raniry dengan Baitul Mal Aceh Tahun 2021).

Gambar grafik di atas menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengumpulan pendapatan zakat di Provinsi Aceh dari tahun 2021 hingga 2025. Ini menunjukkan peningkatan kinerja Pemerintah Aceh dalam pengumpulan zakat. Namun ada sedikit masalah pendapatan pengumpulan zakat pada tahun 2024 menurun dari Rp. 62.571 Milyar menjadi Rp. 59.968 Milyar.

Pada tahun 2023 pendapatan zakat dan infak sedikit mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan kebijakan penganggaran, yang berpengaruh terhadap besaran anggaran belanja pembangunan fisik, dimana setiap anggaran belanja pembangunan fisik yang bersumber dari APBA akan dipotong sebesar 0.5% untuk pendapatan infak.

Sementara Infaq adalah harta yang diserahkan atau diungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMA atau BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnnya diatur dalam qanun.

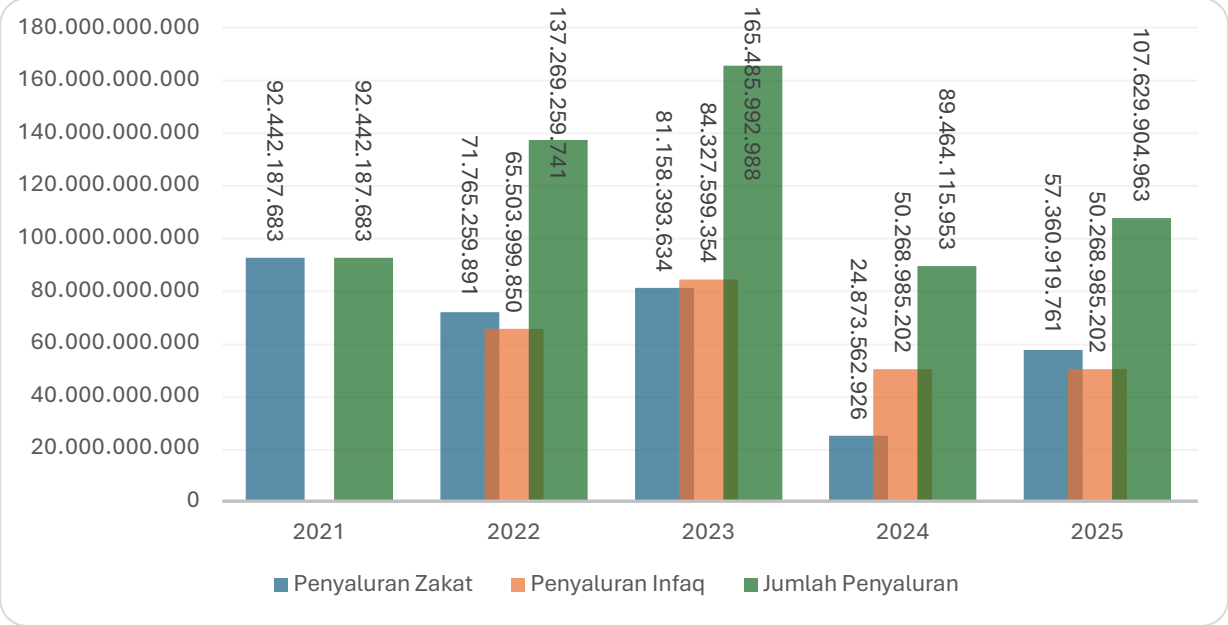

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2025

Gambar 2. 35
Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2021-2025

Sementara dari sisi penyaluran zakat dan infak pada tahun 2021 dan 2025 mengalami peningkatan, karena selain penerimaan pendapatan juga ditambahkan dengan silpa dari tahun sebelumnya. Kondisi penerimaan dan penyaluran masih masih dapat dioptimalkan melalui perbaikan dari sisi penggalian potensi zakat dan penyalurannya dilakukan secara terpisah tanpa menunggu proses pengesahan APBA.

Program dan kegiatan yang bersumber dari infaq sesuai dengan Pasal 126 Qanun Nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal penyaluran dalam bentuk: pemberdayaan ekonomi masyarakat, diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat, penyertaan modal dan kemaslahatan umat.

Pengelolaan Wakaf

Qanun 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh, menyebutkan bahwa Wakaf adalah Perbuatan hukum (ikrar) wakif utk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya utk dimanfaat selamanya atau utk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan mauquf 'alayh dan/atau kemaslahatan umum menurut syariat.

Pemerintah Aceh dalam kepemimpinan Muallim dan Fadlullah pada periode 2025-2029 menempatkan wakaf menjadi salah satu program Gerak Cepat yang salah satunya adalah Penguatan Baitul Mal Gampong.

Menurut Qanun 10 tahun 2018, menyebutkan bahwa tugas Baitul Mal Gampong adalah lembaga di tingkat Gampong di Aceh yang bertugas mengelola zakat, infaq, sedekah, wakaf dan harta keagamaan lainnya untuk kepentingan umat. Adapun fungsi utamanya meliputi pendataan muzakki/mustahik, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan harta, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di tingkat gampong.

Qanun 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh menegaskan bahwa BMA Memperkuat peran Baitul Mal dalam memajukan perwakafan di Aceh sedangkan pada Qanun 3 Tahun 2021 dalam penyelenggaraan wakaf: Mengatur tata cara pengelolaan, perlindungan, dan pengembangan wakaf di Aceh dengan pendekatan syariah yang lebih spesifik.

2.1.3.1.2. Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Pemerintah Aceh senantiasa berupaya untuk mempertahankan adat istiadat dan budaya Aceh yang menjadi jiwa dan karakter masyarakat Aceh. Beberapa upaya dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya dengan sosialisasi dan pelatihan pembinaan adat istiadat. Kegiatan-kegiatan lain yang telah dilaksanakan dari tahun 2021 – 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 30
Kegiatan dan Peserta Pembinaan Adat Istiadat Tahun 2021-2025

No.	Nama Kegiatan	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja dan Meunasib	orang	0	30	50	0	0
2	Sosialisasi Adat Istiadat	orang	60	296	0	0	50
3	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	orang	0	30	0	0	0
4	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	orang	0	46	0	0	50
5	Penyelesaian sengketa secara adat	jumlah	0	509	129	589	650

Sumber : Sekretariat MAA, 2026

Selain melaksanakan pembinaan adat istiadat, dilakukan juga pembinaan dan pengembangan hukum adat yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat secara adat seperti perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan antar warga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, khalwat mesum, pencurian ringan dan lain sebagainya.

2.1.3.1.3. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah

Pendidikan Islami melalui dayah di Aceh merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Aceh yang dikenal sebagai daerah dengan nilai-nilai keislaman yang kuat. Dayah, yang setara dengan pesantren di daerah lain, tidak hanya menjadi

tempat belajar ilmu agama, tetapi juga menjadi pusat pembentukan karakter, akhlak, dan budaya masyarakat. Sejak dahulu, dayah berperan besar dalam melahirkan ulama, pemimpin masyarakat, serta tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pendidikan dan perjuangan sosial di Aceh.

Selain sebagai lembaga pendidikan, dayah juga berfungsi sebagai pusat dakwah dan penguatan sosial masyarakat. Dalam banyak gampong di Aceh, keberadaan dayah menjadi tempat masyarakat memperoleh bimbingan keagamaan, penyelesaian persoalan sosial, hingga penguatan nilai-nilai kebersamaan. Oleh karena itu, dayah memiliki posisi strategis dalam menjaga identitas budaya dan religius masyarakat Aceh.

Dengan peran yang begitu besar, pengembangan pendidikan dayah masih terus memerlukan dukungan melalui peningkatan kualitas tenaga pengajar, fasilitas pendidikan, serta penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Dengan demikian, dayah dapat terus menjadi pilar pendidikan Islami yang melahirkan generasi berilmu, berakhlak, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Aceh maupun Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian dayah di Aceh, Pemerintah Aceh terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dayah melalui pelaksanaan akreditasi dayah yang akan terus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga standar pendidikan dayah dapat disetarakan dengan pendidikan formal. Selain itu, untuk memaksimalkan pelaksanaan pendidikan di dayah, Pemerintah Aceh berupaya melakukan peningkatan kemampuan keilmuan dari guru-guru dayah serta pendataan secara berkala terhadap guru dayah yang tersedia, agar rasio antara santri dan guru dayah pada masing-masing bidang keilmuan yang dibutuhkan dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari dayah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh.

Berikut ini perkembangan dayah di Aceh dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 2.31. di bawah ini:

Tabel 2. 31
Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Tipe Dayah					Jumlah Dayah Tipe & Non Tipe Tipe B	Jumlah Guru Dayah
	Tipe A+	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D (NON Tipe)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2019	23	94	168	338	513	1.136	22.951
2020	23	94	168	338	513	1.136	22.951
2021	23	94	168	338	513	1.136	22.951

Tahun	Jumlah Tipe Dayah					Jumlah Dayah Tipe & Non Tipe Tipe B	Jumlah Guru Dayah
	Tipe A+	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D (NON Tipe)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2022	23	110	230	499	626	1.488	23.551
2023	29	158	362	554	582	1.685	24.710
2024	29	158	362	554	582	1.685	24.710
2025	33	162	396	664	572	1.827	25.550

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 2026 (Diolah)

Pada Tabel 2.33 diatas terlihat bahwa perkembangan jumlah dayah di Aceh selama periode tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan tren yang positif baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kelembagaan. Tahun 2021, jumlah dayah tercatat sebanyak 1.136 unit dan tahun 2022, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan jumlah dayah mencapai 1.488 unit. Peningkatan ini diikuti dengan perubahan komposisi tipe dayah, khususnya pada tipe A, B, dan C yang mengalami kenaikan jumlah. Hal ini mengindikasikan adanya upaya peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan dayah melalui proses pembinaan dan klasifikasi ulang.

Pada tahun 2023-2024, jumlah dayah meningkat menjadi 1.685 dan juga diiringi dengan peningkatan jumlah dayah pada tipe yang lebih tinggi, terutama tipe A dan tipe B. Sementara itu, jumlah dayah tipe D (non tipe) cenderung mengalami penurunan, yang menunjukkan adanya pergeseran status kelembagaan menuju klasifikasi yang lebih baik. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah dayah kembali meningkat menjadi 1.827 unit. Peningkatan ini diikuti oleh bertambahnya jumlah dayah pada hampir seluruh kategori tipe, khususnya tipe B dan tipe C.

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah guru dayah juga menunjukkan tren peningkatan dari 22.951 orang pada tahun 2019 menjadi 25.550 orang pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya penguatan kapasitas tenaga pengajar sebagai bagian integral dari peningkatan mutu pendidikan dayah.

Secara keseluruhan, perkembangan ini menggambarkan adanya pertumbuhan yang signifikan serta peningkatan kualitas kelembagaan dayah di Aceh. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam bentuk peningkatan pembinaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana guna menjaga keberlanjutan dan peningkatan mutu dayah di Aceh.

2.1.3.1.4. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah

Melalui Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, ulama memiliki peran strategis dalam membina kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan Aceh yang berlandaskan nilai-nilai Islam. MPU menjadi wadah resmi bagi ulama untuk menyampaikan pandangan, nasihat, dan pertimbangan keagamaan terhadap berbagai persoalan sosial, pemerintahan, pendidikan, hingga budaya masyarakat.

Salah satu peran ulama adalah memberikan fatwa dan rekomendasi keagamaan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, pandangan ulama menjadi penting agar kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan ajaran Islam serta kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, ulama berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan nilai-nilai moral.

Peran lainnya dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial masyarakat, ulama menjadi penengah dalam persoalan sosial maupun konflik di tengah masyarakat, karena memiliki kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat, pendapat ulama sering dijadikan rujukan dalam mencari solusi yang adil dan bijaksana. Selain itu, ulama berperan dalam mengawasi perkembangan sosial dan budaya masyarakat agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. MPU memberikan masukan terkait isu-isu moral, pergaulan sosial, ekonomi syariah, hingga perkembangan teknologi dan media yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Selain itu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memiliki tugas pokok menetapkan fatwa dan taushiyah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh dan masyarakat, salah satunya adalah mengeluarkan fatwa dan taushiyah serta menetapkan kehalalan suatu produk baik berupa pangan, obat-obatan dan kosmetika melalui penerbitan sertifikat halal. MPU juga melaksanakan Pendidikan Kader Ulama (PKU) untuk melahirkan para ulama yang mempunyai kompetensi dan memiliki wawasan ke-Islaman yang luas dan tersebar di seluruh wilayah Aceh.

Tabel 2. 32
Data Peran Ulama dalam Pembangunan/Fatwa Ulama Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Fatwa dan Taushiah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam	12	12	20	20	20	22
2	Jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya	24	48	48	24	48	24
3	Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan	213	148	220	192	220	161

Sumber : Sekrt. MPU Aceh, 2026

Jumlah fatwa dan tausiah yang ditetapkam meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 12 fatwa/tausiah, kemudian meningkat menjadi menjadi 22 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran MPU Aceh dalam memberikan pedoman keagamaan kepada masyarakat semakin aktif dan responsif terhadap berbagai persoalan sosial dan keagamaan.

Sedangkan pada peningkatan kompetensi kader ulama menunjukkan pola fluktuatif yang dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, kebijakan program pelatihan, maupun prioritas kegiatan MPU pada masing-masing tahun. Jumlah sertifikat halal yang diterbitkan juga mengalami perubahan setiap tahun. Tahun 2021 tercatat 148 sertifikat, meningkat signifikan menjadi 220 pada tahun 2022, namunturun menjadi 161 pada tahun 2025.

Secara umum, data menunjukkan bahwa peran ulama melalui MPU Aceh dalam pembangunan dan pelayanan keagamaan terus berjalan dengan baik, terutama terlihat dari meningkatnya jumlah fatwa dan tausiah. Namun, pada aspek peningkatan kompetensi kader ulama dan penerbitan sertifikat halal masih terjadi fluktuasi sehingga diperlukan evaluasi dan penguatan program agar pencapaiannya lebih konsisten setiap tahun.

2.1.3.1.5. Perdamaian

A. Reintegrasi

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menjaga kesinambungan perdamaian diantaranya dengan melakukan pemberdayaan ekonomi korban konflik dan melakukan rehabilitasi perlindungan sosial korban konflik. Data korban konflik yang mendapat pemberdayaan, rehabilitasi dan perlindungan sosial mengacu pada data yang ada pada Sistem Informasi Badan Reintegrasi Aceh (SIBRA).

Keberlangsungan penguatan perdamaian pascakonflik perlu dilakukan secara optimal melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial sehingga menciptakan perdamaian secara berkelanjutan (*sustainable peace*). Dari 62.069 orang target sasaran program Reintegrasi Aceh, terdapat 7.243 orang atau 11,7% yang telah mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan terbantu dalam rehabilitasi dan perlindungan sosial.

Adapun pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi dan jaminan sosial yang telah dilakukan melalui BRA adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 33
Aspek Utama Reintegrasi Tahun 2021-2025

No.	Kelompok Target	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik (Orang)	418	2200	0	0	2708

No.	Kelompok Target	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
2	Jumlah Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik (Orang)	247	283	455	0	0

Sumber : Badan Reintegrasi Aceh, 2026

B. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak hak politik (*political rights*) dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*).

Tahun 2021 adalah tahun terakhir capaian IDI yang dikeluarkan oleh BPS dengan cara penghitungan yang menggunakan metode lama untuk IDI tahun 2020. Sedangkan mulai tahun 2022 IDI dihitung menggunakan metode baru mencakup tiga aspek yaitu Aspek Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi

Tabel 2. 34
Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021-2025

Aspek Indeks Demokrasi	2021	2022	2023	2024	2025	Kategori
Aspek Kesetaraan	81,41	80,10	74.47	76.10	80,87	BPS
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,82	77,90	73.12	72.21	83,02	BPS
Aspek Kebebasan	85,50	84,66	85.71	79.09	86,96	BPS
Indeks Demokrasi Indonesia	80,92	80,82	77,53	75.80	83,43	BPS

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (data diolah)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aceh pada tahun 2025 (berdasarkan data metode baru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan April 2026 tercatat sebesar 83,43 dalam kategori kinerja demokrasi "tinggi" dan merupakan peringkat ke 7 se-Indonesia.

C. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Secara umum, indeks KUB Aceh menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh tiga indikator utama: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar pemeluk agama. Tiga indikator utama yang digunakan oleh Kementerian Agama RI untuk mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), untuk tahun 2021 hingga tahun 2025 adalah:

1. Toleransi: Mengukur sikap saling menghargai dan penerimaan terhadap perbedaan keyakinan serta kebebasan menjalankan ibadah.

2. Kesetaraan: Menilai sejauh mana setiap pemeluk agama mendapatkan perlakuan yang adil dan akses yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Kerja Sama (atau Kebersamaan): Mengukur keterlibatan aktif antarumat beragama dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat.

Berikut adalah rangkuman skor Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) untuk Provinsi Aceh dalam rentang tahun 2021 hingga 2025 berdasarkan data Kementerian Agama:

Tabel 2. 35
Aspek Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Aceh Tahun 2021 - 2025

Indeks	2021	2022	2023	2024	2025
IKUB	57,51	65,87	76,02 (nasional)	69,79	77,89 (nasional)

Data tahun 2021menunjukkan capaian IKUB Aceh 57,51 poin, tahun 2022 meningkat menjadi 65,87 poin. Meskipun masih berada di bawah angka rata-rata nasional, skor ini menunjukkan tren kenaikan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2023, data spesifik per provinsi tidak dirincikan secara luas di publik, namun indeks KUB Nasional pada tahun tersebut naik menjadi 76,02 poin. Untuk Berdasarkan rilis terbaru Kemenag awal tahun 2025, untuk tahun 2024 capaian IKUB Aceh 69,79 poin. Angka ini menempatkan posisi Aceh termasuk yang terendah secara nasional bersama Jambi dan Banten, meskipun secara nominal skornya terus meningkat.

Tahun 2025: Data spesifik provinsi belum tersedia. Secara nasional, Kemenag melaporkan Indeks KUB 2025 mencapai skor tertinggi dalam 11 tahun terakhir, yaitu 77,89 poin.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Pendidikan

A.1. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengakses pendidikan sesuai jenjangnya relatif tinggi. Selama periode 2021–2025, capaian APM Aceh secara konsisten berada di atas rata-rata nasional, yang mencerminkan bahwa sistem pendidikan menengah di Aceh telah mampu menjangkau sebagian besar penduduk usia sekolah secara tepat waktu.

Berdasarkan data, APM pendidikan menengah Aceh mencapai 71,70 persen pada tahun 2023, namun mengalami penurunan menjadi 70,94 persen pada tahun 2024 dan kembali sedikit menurun pada tahun 2025. Meskipun penurunan ini tidak terlalu signifikan, tren tersebut menunjukkan adanya perlambatan dalam peningkatan partisipasi pendidikan menengah. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa meskipun akses pendidikan telah tersedia, terdapat faktor-faktor tertentu yang mulai mempengaruhi keberlanjutan partisipasi masyarakat.

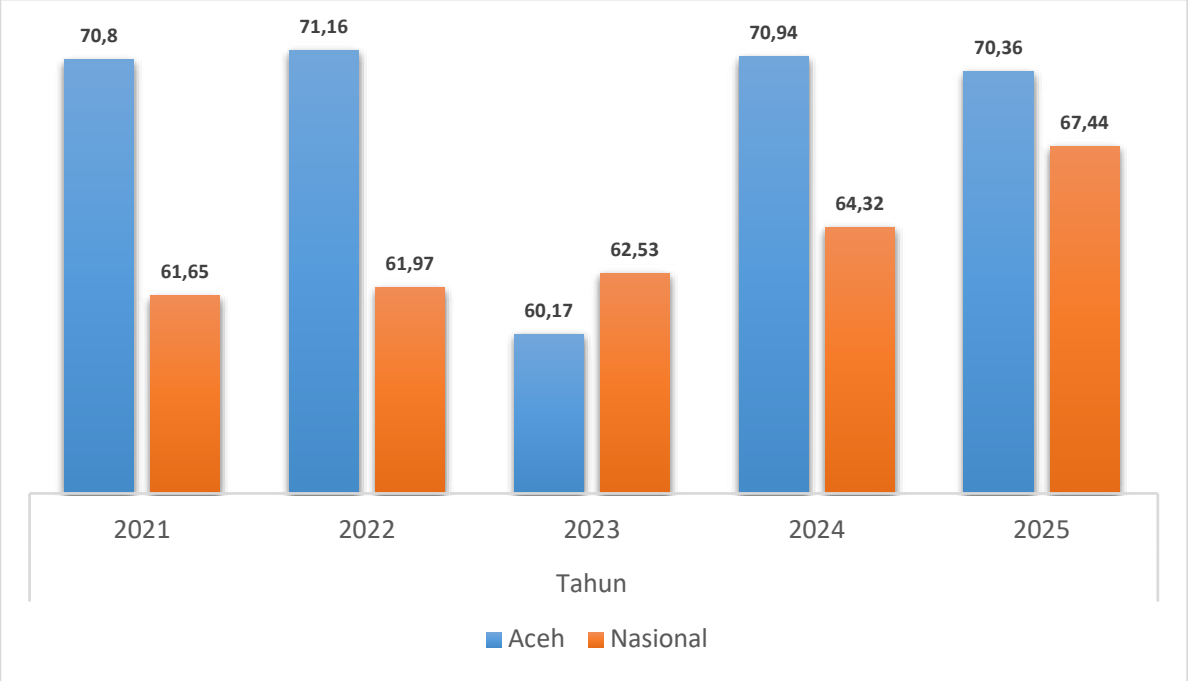

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (data diolah)

Gambar 2. 36
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Menengah Provinsi Aceh Tahun 2021-2025

Jika dibandingkan dengan capaian nasional yang berada pada kisaran 64–67 persen, posisi Aceh masih relatif lebih baik. Namun demikian, capaian APM yang belum mencapai 100 persen menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian penduduk usia sekolah menengah yang belum mengakses pendidikan sesuai dengan jenjang usianya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, akses geografis, serta preferensi untuk langsung memasuki dunia kerja. Dalam perspektif RKPD Aceh Tahun 2027, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan APM tidak hanya difokuskan pada penyediaan akses, tetapi juga pada peningkatan daya tarik dan relevansi pendidikan menengah. Dengan demikian, pendidikan menengah diharapkan tidak hanya dapat diakses, tetapi juga menjadi pilihan yang bernilai bagi masyarakat.

A.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun

Berbeda dengan APM yang mengukur partisipasi tepat waktu, APS mencerminkan daya serap sistem pendidikan secara keseluruhan. Perkembangan APS di Provinsi Aceh selama periode 2021–2025 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2023, APS Aceh mencapai 83,41 persen, namun menurun menjadi 81,55 persen pada tahun 2024 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia 16–18 tahun yang tidak lagi berada dalam sistem pendidikan. Jika diinterpretasikan, capaian APS sekitar 80–83 persen berarti masih terdapat sekitar 17–20 persen penduduk usia sekolah menengah yang tidak bersekolah.

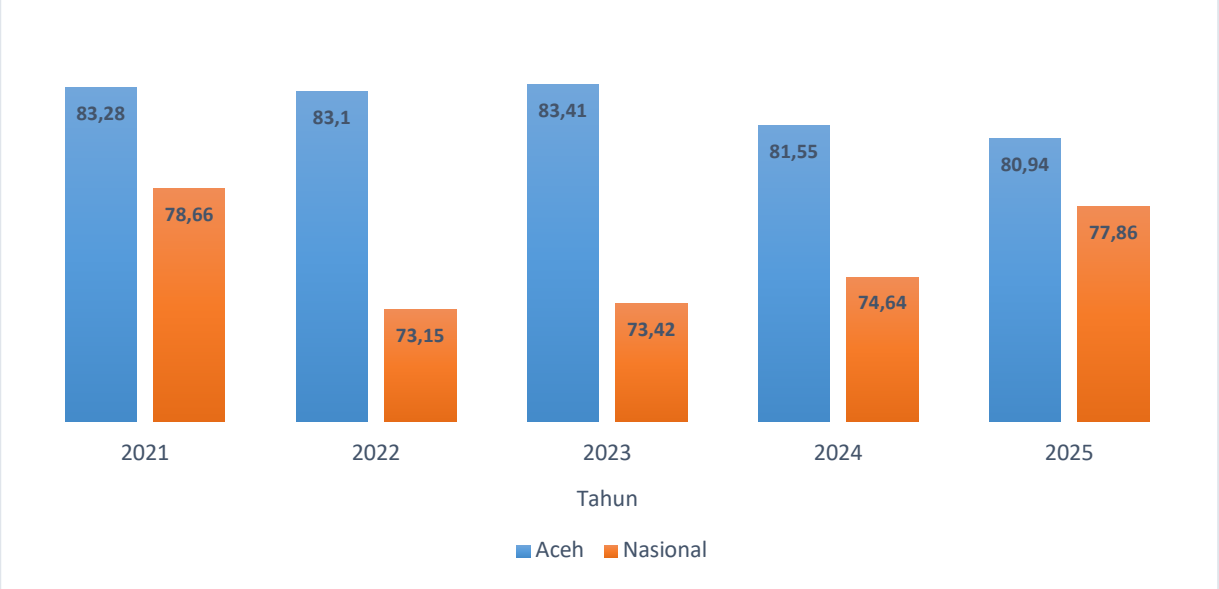

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026 (Data diolah)

Gambar 2. 37
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia 16-18 Tahun 2021-2025

Jika dibandingkan dengan capaian nasional yang berada pada kisaran 74–78 persen, posisi Aceh masih relatif lebih baik. Namun, tren penurunan yang terjadi menunjukkan adanya tekanan terhadap keberlanjutan partisipasi pendidikan, terutama pada kelompok usia transisi dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan APS antara lain kondisi ekonomi rumah tangga, kebutuhan untuk bekerja, keterbatasan akses pendidikan di wilayah tertentu, serta persepsi masyarakat terhadap manfaat pendidikan lanjutan. Selain itu, relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan dunia kerja juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi ini menuntut adanya intervensi kebijakan yang lebih terarah dan komprehensif. Upaya peningkatan APS tidak hanya dilakukan melalui sektor pendidikan, tetapi juga perlu didukung oleh

kebijakan lintas sektor, seperti perlindungan sosial, pengurangan kemiskinan, serta penguatan pendidikan vokasi yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

A.3. Kemampuan Literasi dan Numerasi

Tabel 2. 36
Kelompok Kemampuan Literasi dan Numerasi

No	Indikator	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2025
1	Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	57,28	56,03	65,25	68,83	69,27
2	Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	48,06	48,94	55,97	59,65	58,92
3	Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,28	53,27	62,52	64,37	64,04
4	Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	47,17	47,09	57,46	56,18	55,87
5	Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58,95	58,96	65,09	72,96	67,72
6	Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	41,55	44,51	54,27	62,67	56,45
7	Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,14	59,6	68,62	77,18	77,18
8	Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53,77	53,29	59,92	69,90	71,61
9	Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58,05	57,27	63,21	73,94	73,36
10	Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	54,78	52,41	57,24	62,86	63,8

Sumber : Rapor Pendidikan, 2022-2026

Perkembangan indikator literasi dan numerasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional menunjukkan tren peningkatan pada hampir seluruh jenjang pendidikan selama periode 2021–2025. Pada jenjang SMA, nilai literasi meningkat dari 57,28

pada tahun 2021 menjadi 69,27 pada tahun 2025, sementara numerasi meningkat dari 48,06 menjadi 58,92. Meskipun demikian, jika dibandingkan antar jenjang, capaian pada SMK masih relatif lebih rendah dibandingkan SMA, baik untuk literasi maupun numerasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran pada pendidikan vokasi masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek kompetensi dasar. Selain itu, meskipun terjadi peningkatan, capaian numerasi masih berada di bawah literasi pada hampir seluruh jenjang pendidikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penguatan kemampuan numerasi perlu menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas pembelajaran ke depan.

A.4. Kualitas Lulusan SMK

Kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Aceh menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam periode 2024–2025, baik dari sisi keterserapan di pasar kerja maupun tingkat kepuasan dunia usaha terhadap kompetensi lulusan. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja, meskipun masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan. Dari sisi tingkat penyerapan lulusan SMK, capaian meningkat dari 83,23 pada tahun 2024 menjadi 92,04 pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa lulusan SMK semakin mampu memasuki pasar kerja, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri. Peningkatan ini juga dapat diinterpretasikan sebagai dampak positif dari penguatan program link and match antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), termasuk melalui praktik kerja lapangan, teaching factory, dan kemitraan industri.

Tabel 2. 37
Kualitas Lulusan SMK

No	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Capaian 2025
1	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Nilai	83,23	92,04
2	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	79,62	87,13

Namun demikian, indikator penyerapan tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari indikator kedua, yaitu tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK, yang juga mengalami peningkatan dari 79,62 pada tahun 2024 menjadi 87,13 pada tahun 2025. Meskipun mengalami perbaikan yang cukup signifikan, nilai ini masih berada di bawah tingkat penyerapan lulusan, yang mengindikasikan bahwa aspek soft skills—seperti etos kerja, disiplin, komunikasi, dan adaptasi di lingkungan kerja—masih menjadi

tantangan. Kesenjangan antara tingginya tingkat penyerapan dan relatif lebih rendahnya tingkat kepuasan dunia kerja mengindikasikan bahwa sebagian lulusan memang telah terserap, namun belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi kualitas kerja yang diharapkan oleh industri. Dengan kata lain, akses terhadap pekerjaan sudah membaik, tetapi kualitas performa kerja masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini membuat kebijakan pendidikan vokasi tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan output kuantitatif (jumlah lulusan yang bekerja), tetapi harus bergeser pada peningkatan kualitas outcome, terutama dalam aspek karakter kerja dan kompetensi non-teknis. Oleh karena itu, penguatan kurikulum berbasis industri, integrasi pembelajaran berbasis proyek nyata, serta peningkatan keterlibatan pelaku usaha dalam proses pendidikan menjadi sangat krusial.

A.5. Ruang Kelas Belajar

Kondisi sarana prasarana pendidikan, khususnya ruang kelas, masih menjadi salah satu faktor krusial yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan di Aceh. Berdasarkan data terbaru, hanya sebesar 46 persen ruang kelas yang berada dalam kondisi baik, sementara sisanya berada dalam kondisi rusak, baik kategori ringan maupun sedang hingga berat. Secara rinci, sebesar 21 persen ruang kelas mengalami rusak ringan, dan bahkan sebesar 36 persen berada dalam kondisi rusak sedang hingga berat. Komposisi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh ruang kelas di Aceh belum berada dalam kondisi ideal untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal. Proporsi ruang kelas dengan kerusakan sedang hingga berat yang relatif tinggi menjadi sinyal kuat adanya backlog pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan yang belum tertangani secara memadai. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran, baik dari sisi kenyamanan, keselamatan, maupun efektivitas interaksi antara guru dan peserta didik.

Tabel 2. 38
Persentase Kondisi Ruang Kelas Tingkat Sekolah Menengah Tahun 2025

No	Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas (%)		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang + Berat
1	SMA	27	14	23
2	SMK	13	6	9
3	SLB	5	1	4
	Total	**46**	**21**	**36**

Sumber : Dinas Pendidikan Aceh, 2026

Dalam perspektif kualitas pendidikan, keterbatasan infrastruktur ini tidak hanya berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar, tetapi juga berkontribusi terhadap rendahnya daya tarik sekolah, khususnya di wilayah terpencil.

Pada kondisi tertentu, kerusakan ruang kelas dapat mendorong terjadinya penurunan partisipasi sekolah atau bahkan meningkatkan risiko putus sekolah, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut, ketimpangan kondisi ruang kelas juga berpotensi menciptakan disparitas kualitas pendidikan antarwilayah. Sekolah dengan fasilitas yang relatif baik akan memiliki lingkungan belajar yang lebih kondusif dibandingkan dengan sekolah yang mengalami kerusakan infrastruktur, sehingga berimplikasi pada kesenjangan capaian pembelajaran. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan kebijakan pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan yang lebih terarah dan berbasis prioritas. Intervensi tidak hanya difokuskan pada peningkatan jumlah ruang kelas, tetapi juga pada percepatan rehabilitasi ruang kelas dengan kategori rusak sedang dan berat sebagai prioritas utama.

A.6. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualitas tenaga pendidik merupakan salah satu determinan utama dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Salah satu indikator penting yang mencerminkan profesionalitas guru adalah kepemilikan sertifikasi pendidik. Berdasarkan data, pada tingkat Provinsi Aceh, jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik masih belum sepenuhnya merata jika dibandingkan dengan jumlah guru yang belum tersertifikasi. Pada jenjang SMA, tercatat sebanyak 12.279 guru telah memiliki sertifikasi, sementara masih terdapat 6.845 guru yang belum tersertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar guru SMA telah memenuhi standar profesional, masih terdapat proporsi yang cukup signifikan yang memerlukan peningkatan kualifikasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru pada jenjang SMA masih perlu dilanjutkan secara sistematis.

Tabel 2. 39
Data Persentase Sertifikasi Guru Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	SMA		SMK		SLB	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
1	Simeulue	417	203	143	90	9	2
2	Aceh Singkil	271	134	161	74	16	8
3	Aceh Selatan	751	606	250	207	10	44
4	Aceh Tenggara	557	424	253	254	27	32
5	Aceh Timur	698	345	463	253	20	20
6	Aceh Tengah	462	199	267	103	114	101
7	Aceh Barat	463	245	339	129	30	42
8	Aceh Besar	882	470	367	191	65	34
9	Pidie	939	470	411	221	52	29
10	Bireuen	959	574	446	199	94	59
11	Aceh Utara	1.242	690	614	391	35	62

No	Kabupaten/Kota	SMA		SMK		SLB	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
12	Aceh Barat Daya	403	186	142	72	19	8
13	Gayo Lues	247	167	73	45	17	37
14	Aceh Tamiang	655	415	264	215	35	32
15	Nagan Raya	408	178	76	53	22	25
16	Aceh Jaya	220	98	128	55	9	11
17	Bener Meriah	378	221	153	74	51	68
18	Pidie Jaya	368	213	172	129	40	16
19	Banda Aceh	814	437	365	276	90	124
20	Sabang	231	74	48	16	21	9
21	Langsa	299	157	340	157	49	46
22	Lhokseumawe	373	227	436	256	47	43
23	Subulussalam	242	112	151	79	11	15
	Aceh	**12.279**	**6.845**	**6.062**	**3.539**	**883**	**867**

Sumber : Dinas Pendidikan Aceh, 2026

Pada jenjang SMK, jumlah guru tersertifikasi tercatat sebanyak 6.062 orang, sedangkan 3.539 guru lainnya belum memiliki sertifikasi. Pola yang serupa dengan jenjang SMA juga terlihat pada jenjang ini, di mana mayoritas guru telah tersertifikasi, namun masih terdapat celah yang perlu ditutup. Mengingat karakteristik pendidikan vokasi yang menuntut kompetensi spesifik dan relevansi dengan dunia kerja, keberadaan guru yang tersertifikasi menjadi semakin krusial untuk memastikan kualitas pembelajaran berbasis keterampilan. Sementara itu, pada jenjang SLB, jumlah guru yang telah tersertifikasi sebanyak 883 orang, dan yang belum tersertifikasi sebanyak 867 orang. Komposisi ini menunjukkan kondisi yang relatif lebih berimbang dibandingkan jenjang lainnya, bahkan mengindikasikan bahwa hampir separuh tenaga pendidik pada pendidikan khusus belum memiliki sertifikasi. Hal ini menjadi perhatian penting, mengingat pendidikan khusus membutuhkan kompetensi pedagogis yang lebih spesifik dan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun capaian sertifikasi guru di Aceh telah menunjukkan progres yang cukup baik, masih terdapat kesenjangan yang signifikan, terutama pada jenjang pendidikan khusus. Ketimpangan ini berpotensi memengaruhi kualitas layanan pendidikan, terutama bagi kelompok peserta didik dengan kebutuhan khusus yang memerlukan dukungan pembelajaran yang lebih intensif dan terpersonalisasi. Masalah ini menegaskan agar ada penguatan kebijakan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru secara lebih terarah dan berbasis kebutuhan. Intervensi tidak hanya difokuskan pada peningkatan jumlah guru tersertifikasi, tetapi juga pada percepatan sertifikasi bagi guru pada jenjang dan wilayah yang masih tertinggal, khususnya pada pendidikan khusus (SLB).

B. Kesehatan

B.1. Angka Kematian Neonatus (AKN)

Angka Kematian Neonatus (AKN) adalah jumlah bayi (usia 0-28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Dari tahun 2021-2022 AKN Aceh mengalami peningkatan, namun tahun 2025 turun menjadi 8 per 1.000 kelahiran.

Tabel 2. 40
Angka Kematian Neonatus Tahun 2021-2025

	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Kematian Neonatus (per 1.000 Kelahiran)	9	10	9	8	8

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2026

Tedapat beberapa faktor yang mempengaruhi kematian neonatal di Aceh, baik penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya adalah berat bayi lahir rendah, infeksi atau peradangan, serta pengembangan parasit dalam tubuh.

B.2. Gizi Buruk

Secara umum status gizi balita di Aceh masih sangat memprihatinkan. Jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh WHO maka status gizi balita di Aceh untuk semua kategori yaitu; kurus, gizi kurang dan pendek tergolong dalam masalah yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan yang serius dari berbagai pemangku kepentingan. Persentase balita stunting di Aceh sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

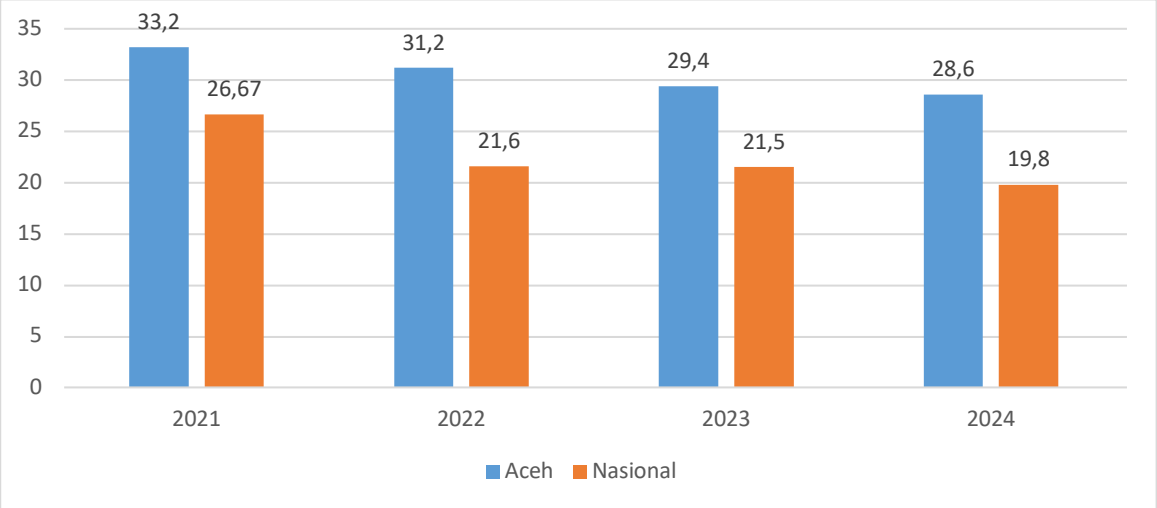

Gambar 2. 3
Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2021-2025

Dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) diketahui bahwa prevalensi stunting di Aceh mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi masih berada diatas angka nasional..

B.3. Tuberkulosis

Penanganan kasus tuberkulosis (TB) masih menjadi tantangan serius pada sektor kesehatan masyarakat. Selama periode 2021 sampai dengan 2024 jumlah kasus TB di Aceh cenderung meningkat, karena semakin aktif penemuan kasus dan pemeriksaan kesehatan. Tahun 2021 tercatat sekitar 443.235 kasus tuberkulosis di dan tahun 2025 meningkat sebesar 867.480 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa tuberkulosis masih menjadi salah satu penyakit menular utama di Aceh. Berikut jumlah kasus tuberkulusis terdapat pada grafik berikut.

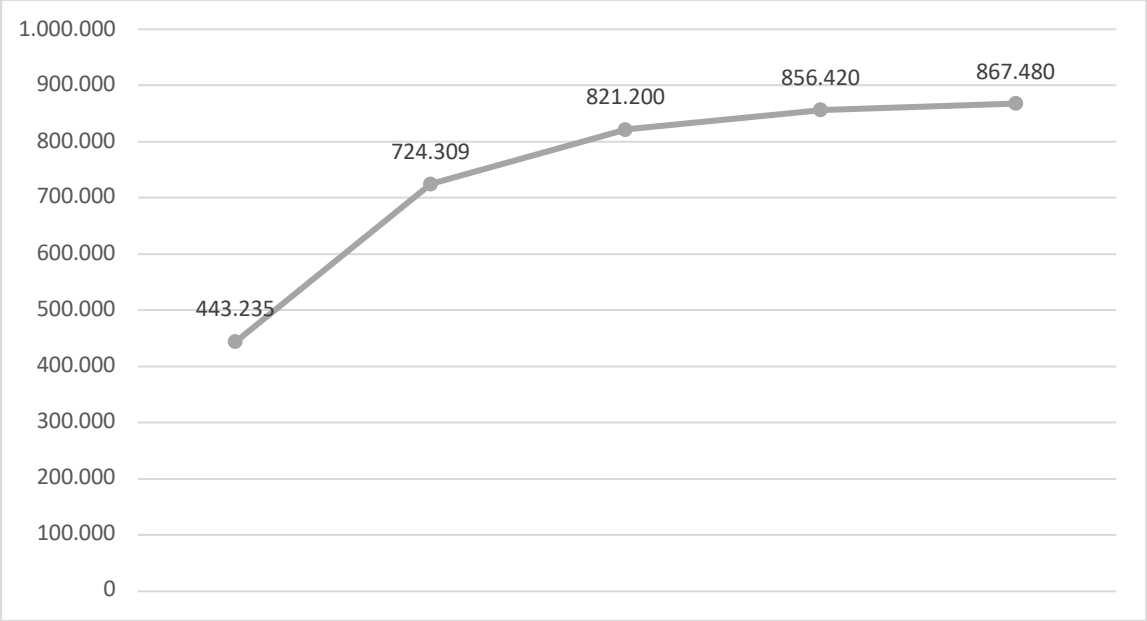

Sumber data : Dinas Kesehatan Aceh 2026

Gambar 2. 40
Jumlah Kasus Tuberkulosis di Aceh Tahun 2021-2025

Penyebaran kasus tuberkulosis masih tinggi di beberapa wilayah dengan kepadatan penduduk dan akses kesehatan yang belum merata. Faktor kemiskinan, gizi buruk, sanitasi kurang baik, serta kepatuhan minum obat yang rendah juga memengaruhi tingginya kasus tuberkulosis. Penuntasan tingginya angka temuan kasus difokuskan pada penguatan layanan primer melelui bimtek program TB di kabupaten/kota dengan tujuan memastikan program TB dapat terlaksana mulai dari penjaringan kasus, penemuan kasus, pengobatan, ketersediaan logistik, *follow up* kasus, pencatatan pelaporan serta jejaring layanan menuju eliminasi TB 2030.

B.4. Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (IBL)

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga menurunkan risiko penularan dan komplikasi penyakit menjadi berat. Cakupan imunisasi yang rendah tidak dapat menghasilkan kekebalan kelompok yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah penyakit secara luas di masyarakat. Selain itu, penyakit infeksi berulang meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak. Imunisasi dasar lengkap penting untuk memberikan perlindungan optimal bagi bayi usia 0-11 bulan, mencakup Hepatitis B, BCG, DPT-HB-Hib, Polio, dan Campak-Rubella.

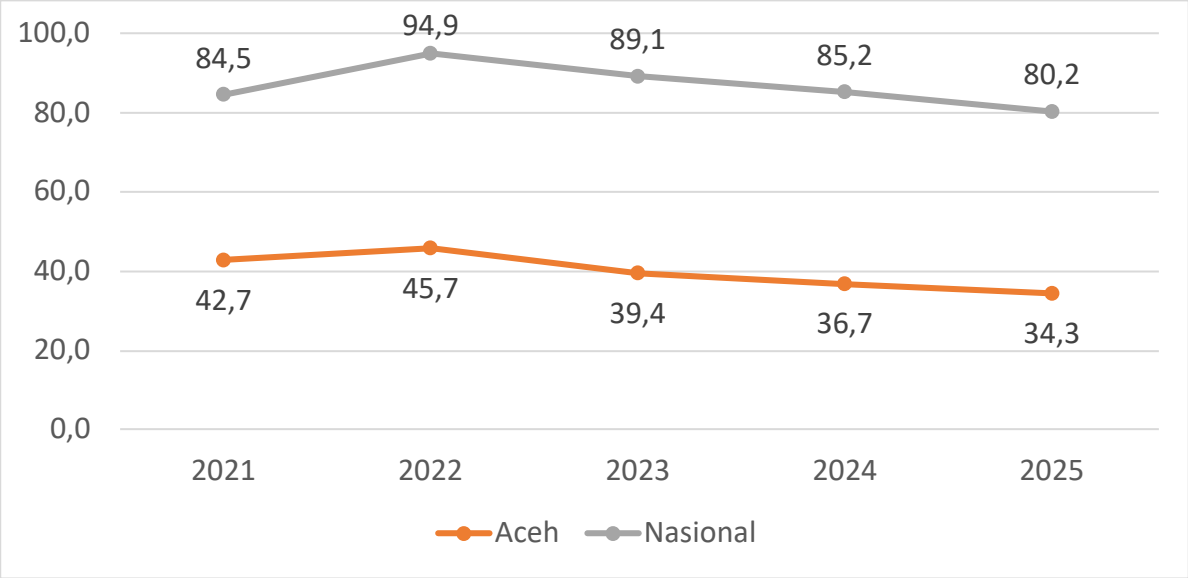

Sumber data : Dinas Kesehatan Aceh 2026

Gambar 2. 41
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Anak Aceh dan Nasional
Tahun 2021-2025

Grafik di atas menunjukkan rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap di Aceh selama periode 2021-2025. Tahun 2022 Aceh mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan ditemukannya kasus polio di Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen yang menjadi perhatian nasional maupun internasional. Rendahnya Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masih adanya penolakan masyarakat terhadap vaksin; rendahnya pengetahuan dan kesadaran orang tua; penyebaran informasi palsu melalui media sosial; dan akses pelayanan kesehatan yang belum merata.

B.5. Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit

Salah satu indikator untuk menilai kinerja rumah sakit adalah *Bed Occupancy Rate (BOR)*. BOR adalah persentase tempat tidur yang terisi dari sekian kapasitas tempat tidur yang disediakan atau tersedia pada layanan rawat inap. Berdasarkan

Data BOR pada Rumah Sakit di Aceh periode tahun 2021- 2025 disajikan dalam Tabel 2.40. sebagai berikut.

Tabel 2. 41
***Bed Occupancy Rate* (BOR) Tahun 2021–2025**

Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA)	52,92	67,46	70,16	67,62	77,95
Rumah Sakit Jiwa (RSJ)	91,01	94,72	83,08	78,72	96,4
Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA)	36,00	53,00	51,20	72,4	66

Sumber : RSUZA, RSJ, RSIA, 2026

Persentase BOR pada Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) tahun 2021 belum mencapai kondisi ideal, sedangkan periode 2022-2025 sudah mencapai kondisi ideal, dengan nilai BOR tahun 2024 sebesar 67,62 persen dan meningkat menjadi 77,95 pada tahun 2025. Pada Rumah Sakit Jiwa kondisi ideal sudah dicapai semenjak 2021 dan tahun 2025 mencapai nilai tertinggi yaitu mencapai 96,4 %. Sementara pada Rumah Sakit Ibu dan Anak pada tahun 2021-2023 belum mencapai kondisi ideal. Tahun 2024 BOR pada Rumah Sakit Ibu dan Anak sudah mencapai kondisi ideal yaitu 72,4%. Kondisi ini tidak dapat dipertahankan di tahun 2025 persentasenya turun menjadi 66%.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C.1. Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi di suatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan perhitungan rasio pada bagian ini. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan yang merupakan jalan nasional (tidak termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota.

Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Kriteria yang digunakan untuk pengelompokan jalan sebagai berikut:

1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;

2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota;
5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Sistem jaringan jalan yang ada di Aceh, berdasarkan status jalan, meliputi:

1. Jaringan Jalan Nasional sepanjang 2.112,07 km (Kepmen PUPR No. 1688/KPTS/M/2022 tanggal 2 Desember 2022) tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.
2. Jaringan Jalan Provinsi sepanjang 2.140,37 km (Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1.8/1368/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Di Aceh.
3. Jaringan Jalan kabupaten/kota sepanjang 19.679,91 km.

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana transportasi lainnya seperti Bandara dan Pelabuhan maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana pendidikan maupun kesehatan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan seluruhnya. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap untuk jalan nasional dan provinsi disajikan pada Tabel 2.42.

Tabel 2. 42
Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap

Tahun	Jalan Provinsi				Jalan Nasional			
	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap			Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap		
		Baik (B) (Km)	Sedang (S) (Km)	Proporsi		Baik (B) (Km)	Sedang (S) (Km)	Proporsi
2021	1.781,72	1.157,10	206,83	0,77	2.102,07	954,84	1.109,10	0,98
2022	1.781,72	1.391,21	112,72	0,84	2.102,07	983,54	1.090,25	0,98
2023	1.781,72	1.439,46	95,15	0,86	2.112,07	887,426	1176,975	0,98
2024	1.897,91	1.228,57	304,90	0,81	2.112,07	756,72	1.269,22	0,96
2025	1.897,91	757,25	486,94	0,66	2.112,07	579,035	1.351,516	0,91

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh 2026 dan Satker P2JN Aceh 2026

Secara garis besar proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap telah menunjukkan kinerja yang meningkat dari 0,77 di tahun 2021 menjadi 0,81 di tahun 2024. Namun pasca kejadian bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 26 November 2025, jalan provinsi berdampak paling parah yang menyebabkan proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap turun hingga 0,66, jauh dibawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 0,91.

Untuk dapat mempertahankan dan mempercepat peningkatan proporsi kondisi mantap jalan provinsi perlu dikelola pemeliharaannya dengan baik agar tetap dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana melalui kegiatan peningkatan, rekonstruksi dan pemeliharaan rutin maupun berkala berdasarkan data hasil survey lapangan (Integrated Road Management System/IRMS).

b. Rasio Jumlah Penduduk dengan Panjang Jalan

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk memberikan informasi tingkat penggunaan jalan atau mencerminkan tingkat kepadatan penggunaan jalan yang ada. Rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada Tabel 2.43.

Tabel 2. 43
Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2019-2024

Tahun	Panjang Jalan (km)				Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio (Jiwa/km)
	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Total Panjang Jalan		
2021	2.102,08	1.781,72	19,766,26	23.650,05	5.333.733	225,53
2022	2.102,08	1.781,72	19,766,26	23.650,05	5.407.855	228,66
2023	2.112,07	1.781,72	19,766,26	23.650,05	5.482.527	231,72
2024	2.112,07	1.897,91	19.679,91	23.689,89	5.554.815	234,48
2025	2.112,07	2.140,37	20.081,89	24.334,33	5.625.000	231,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026

Pada Tabel 2.40, mengambarkan bahwa di Aceh pada tahun 2025, 1 km jalan melayani 231 penduduk. Sementara pada tahun 2021, 1 km jalan melayani 225 penduduk. Kondisi rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Aceh lebih rendah dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk per panjang jalan Sumatera sebesar 300 jiwa/km, Sulawesi sebesar 250 jiwa/km dan Kalimantan sebesar 260 jiwa/km. Sementara itu, rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Jawa sebesar 1.360 jiwa/km. Dengan demikian, panjang jalan di Aceh masih mampu melayani aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa.

c. Persentase jalan provinsi dalam kondisi Mantap

Kriteria jalan kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Sedangkan menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, disebutkan Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Nilai kondisi jalan diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai *international roughness index/IRI*) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai *road condition index/RCI*) dan turut pula dikombinasikan dengan metode evaluasi kondisi jalan yang lain, seperti Surface Distress Index (Nilai SDI).

Capaian persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap tahun 2022 sampai 2023 terus mengalami peningkatan dari tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023 kondisi mantap jalan mengalami peningkatan yaitu 84,41% tahun 2022 dan 86,13% tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 capaian persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 80,80%. Penurunan tersebut disebabkan oleh faktor perubahan ruas jalan

kewenangan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1.8/603/2024 Tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Di Aceh. Terdapat ruas jalan baru yang beralih menjadi kewenangan provinsi dengan tingkat persentase ketidakmantapan pada masing-masing ruas lebih dari 14% dan bahkan terdapat ruas dengan kondisi ketidakmantapannya bernilai 100% seperti Ruas Jalan Terusan T. Panglima Nyak Makam. Di sisi yang lain, terdapat sebanyak 7 ruas yang awalnya memberikan kontribusi positif dengan nilai kemantapan pada masing-masing ruas sebesar 100% kini tidak lagi menjadi bagian dari ruas jalan provinsi, seperti ruas jalan Kuala Bubon – Pinem. Kondisi tersebut memberikan implikasi besar terhadap penurunan kondisi kemantapan di tahun 2024.

Peningkatan kondisi mantap jalan diperlukan sebagai upaya memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat. Kondisi mantap jalan dari tahun 2021-2025 ditunjukkan pada pada Tabel 2.44..

Tabel 2. 44
Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2020-2024

Tahun	Jalan Provinsi	Kondisi				Mantap	
		Baik (B) (km)	% Baik	Sedang (S) (km)	% Sedang	Km	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100	(5)	(6)=(5)/(2)*100	(7)=(3)/(5)	(8)=(7)/(2)*100
2021	1.781,72	1.157,10	64,94	206,83	11,61	1.363,93	76,55
2022	1.781,72	1.391,21	78,08	112,72	6,32	1.503,93	84,41
2023	1.781,72	1.439,46	80,79	95,15	5,34	1.534,61	86,13
2024	1.897,91	1.228,57	64,73	304,90	16.07	1.533,47	80,80
2025	1.897,91	757,25	39,90	486,94	25,66	1.244,19	65,56

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, 2026

Penurunan kondisi mantap jalan kewenangan provinsi di tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena adanya bencana alam hidrometeorologi (longsor dan banjir) yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada ruas jalan; dan kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan (pemeliharaan rutin dan berkala) hingga peningkatan/rekonstruksi jalan sehingga kerusakan jalan yang terjadi kurang dapat ditangani dengan optimal.

Bencana alam hidrometeorologi pada tanggal 26 November 2025 merupakan faktor penyebab utama menurunnya angka kemantapan yang awalnya berdasarkan hasil survei telah menyentuh di poin 80,54% dan harus turun drastis mencapai angka 65,56% atau dengan kata lain terdapat sekitar 284 Km panjang jalan yang awalnya berada pada status mantap menjadi tidak mantap. Bencana tersebut berdampak pada

18 kabupaten/kota, 47 ruas jalan kewenangan provinsi, dan sekitar 73 unit jembatan yang menjadi kewenangan jalan provinsi.

Angka kemantapan yang diperoleh tentu saja belum mengakomodir ruas jalan baru berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1.8/1368/2025 Tanggal 17 November 2025 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Aceh yang sebelumnya memiliki total panjang 1.897,91 Km menjadi 2.140,37 Km. Pengumpulan data inventaris jalan beserta kondisi untuk ruas jalan baru akan dilakukan di tahun 2026. Sebagai asumsi awal 10 ruas jalan baru yang kini menjadi kewenangan provinsi tentunya akan berpengaruh besar terhadap penurunan kondisi kemantapan nantinya, dimana kondisi jalan masih banyak dalam kategori rusak ringan, rusak berat bahkan belum tembus seperti ruas jalan Bts. Gayo Lues - Simpang Seumadam.

Kedepannya, Pemerintah Aceh akan terus meningkatkan pencapaian target untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas secara global di Aceh antara lain meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi biaya ekonomi yang tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

C.2. Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Sanitasi merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang pemenuhannya bukan sekadar akan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, tetapi pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan akses sanitasi merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dalam rangka penyediaan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal (PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal).

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu (Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Kondisi pelayanan akses sanitasi layak terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Akses sanitasi layak dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 4,66 persen. Capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Aceh tahun 2025 sebesar 82,21 persen sedangkan capaian nasional 85,37 persen, data selengkapnya sebagaimana tersaji pada Gambar 2.41. Sektor sanitasi peningkatan capaian terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik.

Persentase Rumah Tangga terhadap akses sanitasi layak menurut Kabupaten/Kota sejak tahun 2021 sampai dengan 2025, Kota Banda Aceh masih mendominasi tingkat Rumah Tangga dengan Akses terhadap sanitasi layak tertinggi sebesar 99,22 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Gayo Lues sebesar 56,83 persen. Secara rinci capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menurut kabupaten/kota di Provinsi Aceh, tahun 2021–2025 disajikan pada Tabel 2.42.

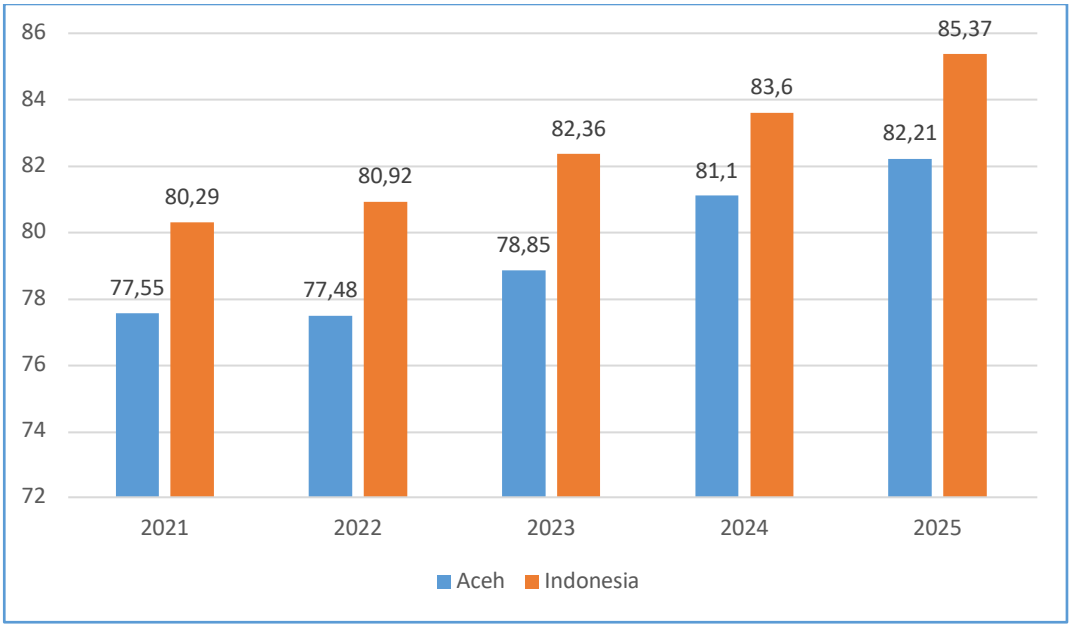

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Gambar 2. 38
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Aceh 2021-2025

Tabel 2. 45
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2021–2025

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Simeulue	71,56	70,21	72,67	76,51	78,94
Aceh Singkil	69,56	78,92	67,93	63,22	67,35
Aceh Selatan	62,55	70,83	74,54	77,96	78,42
Aceh Tenggara	62,71	62,88	65,08	64,01	66,67
Aceh Timur	66,75	69,06	70,01	73,59	75,14
Aceh Tengah	90,58	89,69	92,61	86,34	87,91
Aceh Barat	89,60	88,39	90,16	91,09	92,55
Aceh Besar	87,40	83,49	89,07	90,30	90,81
Pidie	54,10	54,68	60,36	63,88	57,03
Bireuen	81,89	85,39	84,96	88,26	89,96
Aceh Utara	79,97	78,92	77,95	80,63	84,96
Aceh Barat Daya	65,71	65,94	64,69	69,39	71,50
Gayo Lues	47,63	46,33	46,05	49,79	56,83
Aceh Tamiang	87,45	82,74	78,61	85,93	87,41
Nagan raya	74,86	79,97	82,72	87,32	88,12
Aceh Jaya	81,60	78,05	78,83	82,31	83,17
Bener Meriah	86,69	81,56	87,04	88,05	91,16
Pidie Jaya	74,30	73,49	78,07	80,82	82,09
Banda Aceh	99,88	96,88	99,91	99,39	99,22
Sabang	92,25	89,52	93,96	95,90	95,99
Langsa	91,81	91,92	92,92	94,30	95,08
Lhokseumawe	93,10	90,27	90,36	93,71	94,33
Subulussalam	69,71	72,46	63,40	61,57	64,22
Aceh	**77,55**	**77,48**	**78,85**	**81,10**	**82,21**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026

Sanitasi aman adalah sistem dan praktik pembuangan limbah manusia yang mencegah penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat. Sanitasi aman mencakup fasilitas yang memadai seperti jamban yang terhubung ke septic tank yang disedot secara berkala dan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau sistem perpipaan yang terhubung ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Akses Sanitasi Aman adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank. Akses Sanitasi yang masuk kategori aman ini, umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman sejak tahun 2021 sampai dengan 2025 menunjukkan angka yang beragam dan terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Akses sanitasi aman dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,87 persen. Capain rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Aceh tahun 2025 sebesar 17,46 persen

sedangkan capaian nasional 10,30 persen. Data selengkapnya sebagaimana tersaji pada Gambar 2.39.

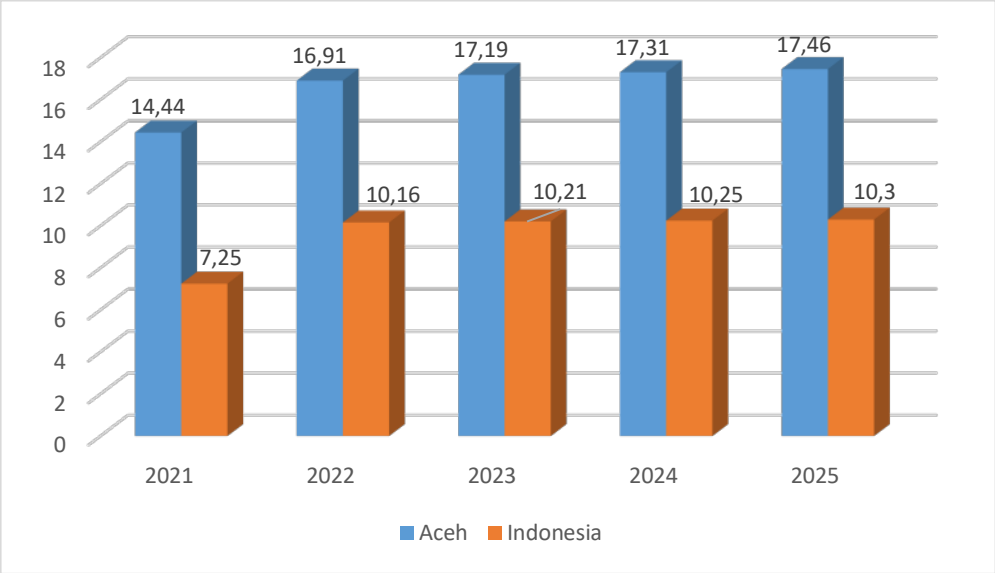

Sumber: Badan Pusat Statistik, (Update 15 Desember 2025)

Gambar 2. 39
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Aceh Tahun 2021-2025

C.3. Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah Aceh dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Pelayanan umum urusan penataan ruang Aceh diselenggarakan berdasarkan pada Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, yang mengambarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat dan kelembagaan.

a. Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA

Pola ruang Aceh secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Luas kawasan lindung sebesar 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya sebesar 2.949.506,83 Ha (50,09%). Pola ruang berdasarkan RTRW Aceh secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2. 46
Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033

Kawasan Lindung	Luas (ha)	Kawasan Budidaya	Luas (ha)
Hutan Lindung	1.790.626	Permukiman Perkotaan	64.164,14
Cagar Alam Serbajadi	300	Permukiman Perdesaan	89.847,78
SM. Rawa Singkil	81.837	Bandar Udara	835,06
SM. Pinus Jantho	15.375	Hutan Produksi Terbatas	141.876,42
TNGL Aceh	624.651	Hutan Produksi	555.948,52
TWA Pulau Weh Darat	1.250	Hutan Produksi Konversi	15.578,28
TWA P. Weh Laut	5.280	Hutan Pendidikan	230,36
TWA Pinus Jantho	2.614	Kawasan Konservasi	4.764,08
TWA P. Banyak Darat	24.693	Pertanian Lahan Basah	252.063,34
TWA P. Banyak Laut	205.725	Pertanian Lahan Kering	436.004,66
TWA Kuta Malaka	1.549	Hortikultura	24.131,38
Tahura PMI	6.218,34	Perkebunan Besar	392.713,78
Tahura Teupah Selatan	919,58	Perkebunan Rakyat	761.099,36
Tahura Gunung Kapor	1.484,95	Hutan Rakyat	11.711,78
Taman Buru Lingga Isaq	86.319,80	Kawasan Peternakan	12.930,99
Kawasan Lindung Mangrove	1.122,50	Budidaya Perikanan	45.223,43
Kawasan Lindung Resapan Air	2.910	Kawasan Pertambangan	27.776,62
Kawasan Lindung Sempadan Danau	1.504,23	Kawasan Transmigrasi	69.354,01
Kawasan Lindung Sempadan Pantai	9.865,06	Kawasan Industri	6.838,58
Kawasan Lindung Sempadan Sungai	72.780,35	Pelabuhan	264,18
Kawasan Lindung Sempadan Waduk	27,86	Kawasan Pariwisata	1.909,77
Kawasan Lindung Cagar Budaya	64,55	Cagar Budaya	510,26
Kawasan Lindung Geologi	1.141,87	Pertahanan Keamanan	567,04
Kawasan Lindung Laut	319,88	Aset Sumber Daya Air	180,64
		TPA	20,44
		Tubuh Air	32.961,93
Jumlah	**2.938.579,68**	**Jumlah**	**2.949.506,83**

Sumber: Qanun Nomor 19/2013 Tentang RTRW Aceh 2013-2033

Pola ruang yang diuraikan di dalam Tabel 2.45 menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan polar uang terhadap RTRWA. Hasil peninjauan kembali terhadap RTRWA yang dituangkan ke dalam rumusan rekomendasi pada tahun 2019 berdasarkan tingkat kualitas RTRWA, tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang dan tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, maka RTRWA mendapatkan nilai sebesar 53,10 dan dinyatakan buruk. Hal ini berbanding dengan passing grade senilai 85 sebagai RTRW yang dinyatakan baik. Penilaian ini tentunya berdampak kepada harus direvisinya RTRWA.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Penataan Ruang pada pasal 245 poin (b) mengamanatkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3-K) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sesuai dengan amanat tersebut, dokumen dan muatan teknis RZWP3K 2020-2040 harus diintegrasikan ke dalam revisi RTRWA 2013-2033 dan menjadi produk tata ruang. Untuk menciptakan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRWA, hal utama yang harus dilakukan adalah merevisi RTRWA 2013-2033 dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Aceh. Senada dengan itu, pada pasal 60-84 PP Nomor 21 Tahun 2021, maka jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRWA dibatasi paling lama 18 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRWA.

b. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Ketersediaan RTH publik di Aceh sampai dengan tahun 2019 telah mencapai sebesar 33.23 persen, hal ini disebabkan karena meningkatnya beberapa Kawasan RTH terutama di Kota Subulussalam sebesar 1806,64 Ha. Meskipun demikian masih ada beberapa kabupaten/kota lainnya yang harus memenuhi kebutuhan RTH Publik.

Tabel 2. 47
Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2019-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan (%)	12,19	83,13	14,61	46,87	46,86
Luasan RTH (Ha)	1.013,70	78.527,13	1.211,76	9.928,85	19.432,11

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, (SIPSN KLHK 2024)

C.4. Pengairan

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air. Konservasi Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan : perlindungan dan pelestarian Sumber Air; pengawetan air; pengelolaan kualitas air; dan pengendalian pencemaran air. Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan

untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari – hari masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan : penatagunaan Sumber Daya Air; penyediaan Sumber Daya Air; Penggunaan Sumber Daya Air; dan Pengembangan Sumber Daya Air. Pengendalian Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian Daya Rusak Air ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.

Pembangunan infrastruktur mempunyai peran dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat, kualitas lingkungan dan pengembangan wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi. Sumber daya air diarahkan untuk menyelenggarakan fungsi dibidang konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sistem informasi SDA. Pelaksanaan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan, penyusunan prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan SDA, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan SDA serta Meningkatkan Peran serta Masyarakat.

Capaian Kinerja hingga tahun 2024, telah dilaksanakan berbagai capaian sasaran strategis dengan tujuan meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana. Capaian Indikator Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai tabel berikut:

Tabel 2. 48
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	57,48	58,66	54,11	55,31	56,44	56,54
2	Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama	36,18	37,77	38,21	39,41	39,91	40,11
3	Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik	78,79	79,55	70,00	71,21	72,98	72,98

Sumber: Dinas Pengairan, 2025

Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum infrastruktur SDA Aceh berada pada peningkatan kualitas, namun masih memerlukan intervensi strategis terutama pada sistem pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul, normalisasi sungai, pengaman pantai, rehabilitasi jaringan yang mengalami kerusakan sedang dan berat, serta penguatan sistem operasi dan pemeliharaan berbasis prioritas risiko.

a. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi meliputi bangunan saluran dan bangunan pelengkapnya sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan kedalam tiga kategori yaitu jaringan primer, skunder dan tersier. Sedangkan ditinjau dari sisi kewenangan jaringan dibedakan menjadi jaringan irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten/kota. Status daerah irigasi dan kewenangannya menjadi dasar perencanaan program pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, serta operasi dan pemeliharaan (O&P).

1) Luas dan Jenis Daerah Irigasi Berdasarkan Kewenangan

Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Luas Daerah Irigasi di Provinsi Aceh adalah 390.518 Ha yang terdiri dari 1.499 Daerah Irigasi (DI), terdiri dari Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota dan Daerah Irigasi Utuh Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.49.

Tabel 2. 49
Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya

No	Kewenangan	Lintas Kabupaten/Kota (Ha)	Utuh Kabupaten/ Kota (Ha)	Total			
1	Pemerintah	26.397,00	82.225	108.622	Ha	13	DI
2	Pemerintah Provinsi	2.144,00	76.324	78.468	Ha	47	DI
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	203.428	203.428	Ha	1.439	DI
Total		**28.541**	**361.977**	**390.518**	**Ha**	**1.499**	**DI**

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Penjabaran total Daerah Irigasi dan luasannya berdasarkan kewenangan, terdiri dari Irigasi Permukaan seluas 363.292 Ha yang mencangkup 1.400 D.I; Irigasi Air Tanah seluas 1.858 Ha yang mencangkup 66 D.I; Irigasi Rawa seluas 5.724 Ha yang mencangkup 3 D.I; dan Irigasi Tambak seluas 19.644 Ha yang mencangkup 30 D.I. Irigasi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 13 D.I dengan luas 108.622 Ha, kewenangan pemerintah provinsi sebanyak 47 D.I dengan luas 78.468 Ha, dan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota sebanyak 1.439 DI dengan luas 203.428 Ha sebagaimana disajikan pada Tabel 2.50.

Tabel 2. 50
Jenis Irigasi dan Luasannya

No	Daerah Irigasi	Kewenangan					
		Pemerintah		Aceh		Kabupaten/Kota	
		D.I	Ha	D.I	Ha	D.I	Ha
1	Permukaan	12	101.622	38	65.409	1.350	196.261
2	Air Tanah	-	-	-	-	66	1.858
3	Rawa	-	-	3	5.724	-	-
4	Tambak	1	7.000	6	7.335	23	5.309
Total		**13**	**108.622**	**47**	**78.468**	**1.439**	**203.428**

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Tabel 2.48. menunjukkan bahwa irigasi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 13 D.I dengan luas 108.622 Ha, kewenangan pemerintah provinsi sebanyak 47 D.I dengan luas 78.468 Ha, dan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota sebanyak 1.439 DI dengan luas 203.428 Ha. Jumlah dan Luasan Daerah Irigasi tersebut seluruhnya berada di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana disajikan pada Tabel 2.51.

Tabel 2. 51
Luasan Daerah Irigasi Wilayah Aceh Berdasarkan Kewenangan Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Pusat		Kewenangan Provinsi		Kewenangan Kabupaten/Kota	
		D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)
1	Simeulue	-	-	-	-	52	5,343
2	Aceh Singkil	1	7,000	1	1,300	11	698
3	Aceh Selatan	-	-	6	10,630	131	13,655
4	Aceh Tenggara	1	15,000	6	8,169	83	15,028
5	Aceh Timur	-	-	6	10,179	73	7,578
6	Aceh Tengah	-	-	-	-	126	16,010
7	Aceh Barat	-	-	1	1,000	97	15,660
8	Aceh Besar	2	12,040	-	-	131	21,070
9	Pi d i e	2	19,118	1	1,100	121	12,232
10	Bireuen	2	9,683	5	8,380	74	13,045
11	Aceh Utara	3	32,539	5	7,834	132	22,040
12	Aceh Barat Daya	1	5,793	2	3,234	30	3,040
13	Gayo Lues	-	-	2	4,675	116	10,011
14	Aceh Tamiang	-	-	1	2,000	41	7,115
15	Nagan Raya	1	7,449	-	-	37	6,931
16	Aceh Jaya	-	-	7	13,859	58	10,669
17	Bener Meriah	-	-	1	1,270	72	14,617
18	Pidie Jaya	-	-	3	4,838	58	6,258
19	Banda Aceh	-	-	-	-	2	655
20	Sabang	-	-	-	-	-	-
21	Langsa	-	-	-	-	2	1,773
22	Lhokseumawe	-	-	-	-	-	-
23	Subulussalam	-	-	-	-	-	-
Total		**13**	**108,622**	**47**	**78,468**	**1,439**	**203.428**

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya menghadirkan jaringan irigasi secara fisik, tetapi bagaimana kemampuan jaringan irigasi tersebut bisa membawa air lebih efisien sampai ke areal persawahan yang menjadi daerah pelayanannya sehingga dapat terjaga kelestariannya dan berkesinambungan. Pada beberapa Daerah Irigasi khususnya daerah irigasi permukaan, kondisi jaringan irigasi sangat memprihatinkan karena kemampuan pelayanan air irigasi telah mengalami penurunan fungsi, yang disebabkan oleh kondisi saluran pembawa, pintu-pintu air dan bangunan ukur tidak berfungsi dan beroperasi dengan baik. Kondisi jaringan irigasi Daerah Irigasi permukaan dan bangunan-bangunan yang ada pada Daerah Irigasi disajikan pada Tabel 2.52 dan Tabel 2.53.

Tabel 2. 52
Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan

2025										
No	Kewenangan	Luas		Kuantitas (Km)	Kondisi Saluran					
		Baku	Fungsional		Baik		Rusak Sedang		Rusak Berat	
		(Ha)	(Ha)		(km)	(%)	(km)	(%)	(km)	(%)
1	Pusat	101.622	67.689	1.189,46	813,11	68,36	349,70	29,40	26,65	2,24
2	Provinsi	65.409	23.254	537,34	420,46	78,25	41,75	7,77	75,13	13,98
3	Kab/Kota	196.261	68.941	2.668,97	1.344,62	50,38	689,92	25,85	634,4	23,77

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2025

Tabel 2. 53
Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan

2023								
No	Kewenangan	Luas		Kuantitas (Unit)	Kondisi Bangunan			
		Baku	Fungsional		Baik		Rusak	
		(Ha)	(Ha)		(Unit)	(%)	(Unit)	(%)
1	Pusat	10.,622	67.689	1.011	N.A	N.A	N.A	N.A
2	Provinsi	65.409	23.254	1.117	928	83,08	189	16,92
3	Kab/Kota	196.261	68.941	10.234	5.023	49,08	5.211	50,92

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2025

Tabel 2.49 dan Tabel 2.50 menjelaskan bahwa setiap daerah irigasi memiliki luas layanan, fungsi dari saluran dan bangunan yang telah dibangun berdasarkan kewenangan masing-masing. Berdasarkan data tahun 2025, Daerah Irigasi kewenangan Kab/Kota, memiliki jumlah jaringan dan bangunan irigasi terbesar dengan panjang jaringan sepanjang 2.668,97 km, jumlah bangunan sebanyak 10.234 unit dan luas layanan fungsional 68.941 Ha, selanjutnya daerah irigasi kewenangan pusat dengan panjang jaringan sepanjang 1.189,46 km, jumlah bangunan 1011 unit dengan luas layanan fungsional 67.689 Ha, sedangkan daerah irigasi kewenangan provinsi berdasarkan data yang ada pada Tahun 2025, memiliki panjang jaringan 537,34 km, jumlah bangunan 1.117 unit dengan luas layanan fungsional 23.254 Ha. Terjadinya penurunan panjang saluran pembawa dan luas layanan jaringan irigasi kewenangan provinsi jika dibandingkan dengan data tahun–tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya upaya updating data inventarisasi jaringan dan luasan irigasi yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Aceh.

Ditinjau dari kondisi jaringan terdapat kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang dan kondisi rusak berat. Pada tahun 2025 kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam keadaan baik mencapai 78.25 %, dalam kondisi rusak sedang 7.77 % dan dalam kondisi rusak berat 13.98 %. Persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dan pelayanan kepada masyarakat juga meningkat dari tahun ke tahun.

2) Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik

Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik memiliki Indikator untuk mengukur kinerja suatu Daerah Irigasi yang selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik. Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 yang meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik mencapai 72,98 persen. Angka capaian ini melampaui angka yang ditargetkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023 – 2026 yang sebesar 72,65 persen dengan persentase capaian mencapai 100,45 persen. Perkembangan Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2024 di sajikan dalam Tabel 2.54.

Tabel 2. 54
Hasil Capaian Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2025

Keterangan	Satuan	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik	%	78,79	79,55	70,00	71,21	72,98	72,98

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2025

Hasil Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik Tahun 2020-2025 menargetkan luas lahan budidaya seluas 65.409 Ha dengan hasil luas lahan fungsional seluas 38.462 Ha. Selanjutnya berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kebijakan satu peta yang merupakan target pemerintah untuk memanfaatkan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan. Maka dari hasil pemetaan Informasi Geospasial Tematik (IGT), dihasilkan luas lahan budidaya seluas 38.462 Ha dengan capaian lahan hasil fungsional tahun 2022 adalah 26.293 Ha. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan realisasi terhadap Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik. Akibat terjadinya penurunan luas layanan akibat ahli fungsi lahan maka perlu adanya pengembangan lahan dan perlu pemeliharaan rutin dan berkala agar saluran tetap terjaga. Perlu intervensi strategis dibidang rehabilitasi jaringan, penguatan operasi pemeliharaan. Hingga tahun 2025, hasil capaian realisasi luas lahan fungsional yaitu seluas 28.069 Ha.

b. Rawa

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak, Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung didalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar datau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena belum didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh yang telah ditetapkan. Dengan kata lain beberapa kawasan rawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (pertanian). Selanjutnya pengembangan rawa di luar kawasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

c. Pantai

Fenomena kerusakan pantai sampai saat ini masih terus terjadi, dimana abrasi paling dominan yang terjadi disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin Barat dan Timur. Panjang garis pantai Aceh sepanjang 2.442 Km dengan total panjang pantai dalam kondisi kritis yang telah teridentifikasi pada tahun 2024 adalah sepanjang 226.53 Km. Berdasarkan Tabel 2.50, total panjang pantai kritis pada tahun 2017 adalah sepanjang 233,94 km, dimana 16,54 persen diantaranya berada di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan kondisi pantai kritis pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 226,53 km. Hal ini menunjukkan penanganan terhadap pantai kritis ini telah dilakukan sepanjang 7,41 km selama rentang waktu 2017 hingga 2024. Pada tahun 2024 total pantai yang masih kritis terbesar masih berada di Kabupaten Aceh Besar yaitu sepanjang 38,52 km atau 17 persen. Kerusakan pantai karena abrasi di Aceh, berdasarkan data pada tahun 2024 diperkirakan sepanjang 226,53 km. Panjang Pantai dalam kondisi kritis tahun 2017-2024 disajikan dalam Table 2.55.

Tabel 2. 55
Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2020-2025

No.	Kabupaten/ Kota	Panjang Pantai dalam Kondisi Kritis (km)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sabang	3,57	3,57	3,57	3.57	3.57	3.57
2	Banda Aceh	5,86	5,86	5,86	5.86	5.86	5.86
3	Aceh Besar	38.52	38.52	38.52	38.52	38.52	38.52
4	Aceh Jaya	33.22	33.22	32.98	32.98	32.98	32.98
5	Aceh Barat	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90
6	Nagan Raya	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

No.	Kabupaten/ Kota	Panjang Pantai dalam Kondisi Kritis (km)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	Aceh Barat Daya	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70
8	Aceh Selatan	17.84	17.56	17.56	16.83	16.83	16.83
9	Aceh Singkil	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
10	Pidie	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02
11	Pidie Jaya	4.94	4.94	4.94	4.94	4.93	4.93
12	Bireuen	3.20	3.20	3.20	2.35	2.35	2.35
13	Lhokseumawe	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06
14	Aceh Utara	15.22	15.22	15.07	14.89	14.89	14.89
15	Aceh Timur	8.42	8.42	8.42	8.42	8.32	8.32
16	Langsa	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
17	Simeulue	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54
Jumlah		229.38	229.10	228.71	226.95	226.11	226.11

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2025

d. Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 152 DAS, yang terletak dalam Daerah Strategis Nasional sebanyak 56 DAS yaitu WS. Aceh– Meureudu memiliki 30 DAS, WS. Woyla–Bateue memiliki 13 DAS dan WS. Jambo Aye memiliki 13 DAS. Pada Daerah Lintas Provinsi yaitu WS. Alas–Singkil memiliki 8 DAS, sedangkan pada Daerah Lintas Kab/Kota terdapat 62 DAS yaitu WS. Teunom–Lambeso memiliki 14 DAS, WS. Pase–Peusangan memiliki 10 DAS, WS. Tamiang–Langsa memiliki 17 DAS dan WS. Baru–Kluet memiliki 21 DAS dan dalam pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu WS Simeulue memiliki 26 DAS.

Beberapa sungai telah mengalami degradasi dan sedimentasi sehingga diperlukan penanganan menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai, berikut pembangunan tanggul terhadap penyelamatan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan pengerukan pada daerah – daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan aktivitas perekonomian lainnya. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015

Gambar 2. 40
Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh

Berdasarkan gambar di atas, luas Wilayah Sungai dan Jumlah DAS masing – masing Wilayah Sungai, dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2. 56
Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan

No.	Kewenangan	Letak Geografis	Kode WS	Wilayah Sungai	Luas WS (Km2)	Jumlah DAS
I	Pemerintah Pusat	Strategis Nasional	WS 01.01.A3	Aceh – Meureudue	5.558,36	30
			WS 01.05.A3	Jambo Aye	6.781,05	13
			WS 01.04.A3	Woyla – Bateue	12.406,89	13
		Lintas Provinsi	WS 01.09.A2	Alas – Singkil	13.400,31	8
II	Pemerintah Aceh	Lintas Kabupaten/Kota	WS 01.03.B	Pase – Peusangan	5.601,34	10
			WS 01.06.B	Tamiang – Langsa	6.287,07	17
			WS 01.02.B	Teunom – Lambesoi	5.257,73	14
			WS 01.07.B	Baru – Kluet	5.311,44	21
III	Pemerintah Kabupaten	Dalam Kabupaten/Kota	WS 01.08.C	Pulau Simeulue	1.828,65	26

Sumber : Permen PUPR No. 04 Tahun 2015

Berdasarkan Masterplan Pengendalian Banjir Tahun 2022, terdapat beberapa daerah Wilayah Sungai yang rawan banjir dan mengalami genangan banjir yaitu:

1. Wilayah Sungai Aceh-Meureudu

Banjir bandang terjadi di Kecamatan Padang Tiji dan Kecamatan Tangse (DAS Aceh Seuleunggoh) karena penebangan liar (perubahan tutupan lahan/alih fungsi

lahan) dari hutan menjadi lahan perkebunan. Beberapa DAS yang melintasi pemukiman mengalami banjir terutama terdapat di Krueng Aceh. Rawan Banjir yang disebabkan oleh meluapnya Krueng Aceh (DAS Aceh) berdampak pada Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Adapun Sungai lainnya yang rawan terjadi banjir diantaranya adalah Krueng Baro dan Krueng Tiro di Kabupaten Pidie serta Krueng Meureudu, Krueng Panteraja dan Krueng Ulim di Kabupaten Pidie Jaya.

2. Wilayah Sungai Jambo Aye

DAS yang rawan banjir pada WS Jambo Aye antara lain DAS Jambo Aye (Krueng Jambo Aye), DAS Arakundo (Krueng Arakundo) dan DAS Peureulak (Krueng Peureulak). DAS Jambo Aye merupakan DAS dengan daerah rawan banjir terluas yaitu sekitar 20.392,99 Ha.

3. Wilayah Sungai Woyla-Bateue

Terjadinya banjir di beberapa wilayah di WS Woyla Bateue akibat dari curah hujan yang tinggi, koefisien aliran yang tinggi, perubahan lahan dari hutan menjadi kebun, penebangan secara liar sehingga daya resap air kecil. Sebagian besar kegagalan panen di WS Woyla-Bateue ini juga disebabkan oleh banjir akibat buruknya sistem drainase sehingga banjir menggenangi daerah irigasi. Adapun sungai-sungai yang terjadi banjir/luapan air antara lain Krueng Meureubo, Woyla, Bateue, Tripa.

4. Wilayah Sungai Alas-Singkil

Jenis banjir yang terjadi pada wilayah sungai ini secara umum adalah banjir genangan, banjir limpasan, banjir bandang dan banjir rob. Bencana banjir sering terjadi di daerah hulu Sungai Alas (Kabupaten Aceh Tenggara), Sungai Lae Soraya (Kota Subulussalam), dan hilir Sungai Singkil (Kabupaten Singkil). Permasalahan umum yang menjadi penyebab terjadinya banjir di wilayah sungai ini adalah : a). terjadinya perubahan tutupan lahan di wilayah hulu sungai, b). erosi tebing sungai akibat terjadinya meandering, c). degradasi dan agradasi sungai akibat terjadinya perubahan morfologi sungai, d). pemanfaatan sempadan sungai untuk wilayah permukiman dan Perkebunan dan e). sistem drainase kota yang belum tertata dengan baik yang menyebabkan lamanya genangan banjir di wilayah hilir.

5. Wilayah Sungai Teunom Lambesoi

Terjadinya banjir pada daerah pertanian dan permukiman akibat dari bencana alam karena curah hujan tinggi dan ketidakmampuan badan sungai dalam menampung debit yang lewat, seperti banjir Sungai Kr. Teunom yang terjadi di hilir Sungai Kr. Teunom. Perubahan tata guna lahan di wilayah hulu sungai menyebabkan limpasan permukaan yang membawa material sedimentasi ke dalam badan – badan sungai, menyebabkan sungai mengalami pengurangan daya tampung. Hal ini menjadi faktor pemicu terjadinya banjir limpasan pada wilayah sungai ini.

6. Wilayah Sungai Pase-Peusangan

Terjadi banjir/luapan air pada sungai-sungai antara lain Krueng Keureuto, Krueng Peuto, Krueng Buloh, Krueng Mane, dan Krueng Pirak di Kabupaten Aceh Utara serta Krueng Peusangan, Krueng Jeunib, Krueng Peudada dan Krueng Pase di Kabupaten Bireuen. Banjir yang terjadi pada Wilayah Sungai ini secara umum

disebabkan oleh a). Kemiringan sungai yang cukup terjal di wailayah hulu yang menyebabkan bertambahnya potensi erosi lahan dan gerusan, b). Alur sungai brainded di bahagian tengah sungai, c). Erosi tebing sungai akibat adanya aktifitas galian C, d). Sedimentasi di muara sungai yang menyebabkan tidak lancarnya aliran sungai dari bahagian hulu.

7. Wilayah Sungai Baru-Kluet

Banjir melanda di hulu Krueng Kluet dan Krueng Baru. Banjir di hulu lebih disebabkan karena kerusakan DAS diantaranya di Kluet tengah yang berada pada hulu Kluet di DAS Kluet. Sedangkan banjir di daerah hilir disebabkan oleh selain kondisi topografinya yang relatif landai yaitu 0-8 persen juga disebabkan oleh tersumbatnya aliran anak-anak sungai akibat adanya pasang surut air laut yang berpengaruh terhadap sungai utamanya, diantaranya di Kec. Labuhan Haji sering mengalami banjir akibat meluapnya Krueng Baru. Krueng Kluet dan Krueng Baru setiap tahunnya meluap dan menggenangi daerah dataran rendah di Kabupaten Aceh Selatan, banjir juga sering terjadi di sekitar bantaran Krueng Kluet di Kota Fajar.

8. Wilayah Sungai Tamiang-Langsa

Banjir tersebar hampir di semua kabupaten/kota seperti pada DAS Tamiang yang terdiri dari beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Kuala Simpang, Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Seruway, Kecamatan Bendahara, Kecamatan Kejuruan Muda dan Kecamatan Karang Baru serta pada DAS Bayeun di Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari Kecamatan Bireun Bayeun dan Kecamatan Peureulak Timur. Adapun DAS yang dominan terdampak genangan banjir adalah DAS Tamiang seluas 32,646.09 Ha sedangkan DAS Langsa hanya seluas 7.617,30 Ha.

Pasca bencana hidrometeorologi Aceh pada akhir tahun 2025, beberapa DAS dalam Wilayah Sungai, khususnya DAS – DAS yang berada di pesisir timur Aceh mengalami kerusakan yang cukup berat. Sungai – sungai yang berada pada DAS utama mengalami sedimentasi yang cukup berat berupa material lumpur dan kayu yang menutupi badan – badan sungai. Pada beberapa sungai, tanggul sungai mengalami jebol yang menyebabkan material lumpur menutupi kawasan permukiman dan lahan pertanian masyarakat, seperti yang terjadi di Kr. Meureudu, Kr. Peusangan, Kr. Jambo Aye dan Kr. Tamiang. Kerusakan yang terjadi pada sungai – sungai ini perlu ditangani secepat mungkin, untuk menghindari terjadinya banjir berulang di masa yang akan datang.



Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015

Gambar 2. 41
Pembagian Wilayah Sungai Aceh

Dalam rangka memperkuat arah kebijakan pembangunan sektor sumber daya air yang lebih komprehensif dan selaras dengan indikator nasional RPJMN, RPJMA 2025–2029 menetapkan Indeks Ketahanan Air Daerah, Indeks ini mengukur tingkat ketahanan sistem sumber daya air Aceh secara menyeluruh, mencakup dimensi konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi. Indeks ini menjadi indikator makro untuk memastikan keberlanjutan pasokan air serta ketahanan terhadap banjir dan kekeringan. Kapasitas Air Baku, Indikator ini mengukur total kapasitas penyediaan air baku yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik, industri, dan layanan publik. Mengingat potensi ketersediaan air di Aceh mencapai 3.438,93 m³/detik dengan kebutuhan sebesar 847,92 m³/detik, optimalisasi kapasitas air baku menjadi fokus utama agar distribusi dan pemanfaatan lebih efisien dan merata. Selanjutnya dari aspek daya saing indikator Persentase Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik yang mengukur kualitas dan keberfungsian seluruh aset SDA, tidak hanya jaringan irigasi tetapi juga sungai, tanggul, embung, dan pengaman pantai. Serta persentase Irigasi modern sebagai penguatan ketahanan pangan dan efisiensi penggunaan air yaitu proporsi daerah irigasi yang telah menerapkan sistem pengelolaan berbasis kebutuhan tanaman, pengukuran debit, digitalisasi pengelolaan, dan kelembagaan operasi pemeliharaan.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman).

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian yang baik termasuk didalamnya kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta keterlibatan dan peran serta masyarakat. Selanjutnya, capaian persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di Aceh sampai dengan tahun 2025 adalah 71,15 persen, diatas capaian nasional yaitu 68,40 persen, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.42

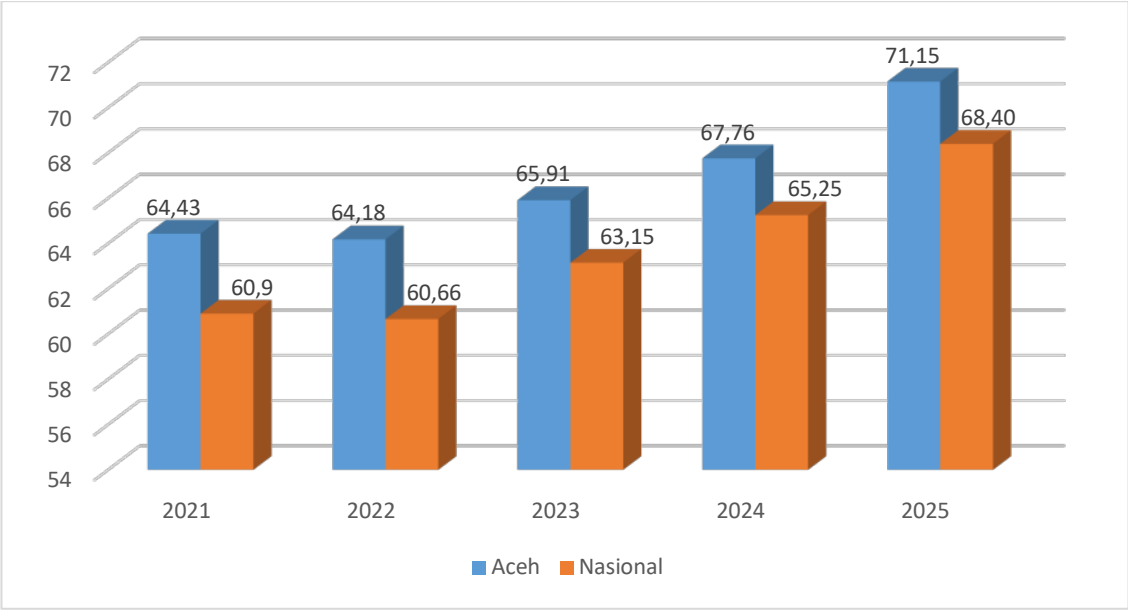

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi, 2025

Gambar 2. 42
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak tahun 2021 - 2025

Sementara itu, luas kawasan kumuh pada tahun 2020 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 6646,01 ha. Total luasan ini mengalami peningkatan menjadi 6141,62 ha pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 luas kawasan kumuh meningkat lagi menjadi 7315,46 ha, pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 7526,51 ha. Sehingga Total Luasan kawasan kumuh Aceh di awal Tahun 2024 adalah sebesar 7627,54 ha. Secara lebih rinci luas kawasan kumuh di Aceh dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 (awal) dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2. 57
Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2020 dan 2024

Kabupaten/ Kota	SK Bupati/ Walikota 2020		SK Bupati/ Walikota 2021		SK Bupati/Walikota 2022		SK Bupati/ Walikota 2023		SK Bupati/ Walikota 2024	
	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)
Aceh	473	6646,01	547	6141,62	613	7315,46	669	7526,51	582	7627,545
Banda Aceh	20	451,40	26	451,4	26	451,4	26	451,4	26	451,4
Aceh Barat	12	152,29	12	152,29	9	194,67	9	194,67	9	185,35
Sabang	4	123,71	4	123,713	4	123,71	16	100,277	16	100,277
Aceh Besar	7	185,37	13	152,28	13	152,28	13	152,28	13	152,28
Langsa	18	359,40	18	359,40	18	359,40	56	359,40	56	359,40
Simeulue	1	29,55	1	29,55	1	29,55	1	29,55	1	29,55
Aceh Tamiang	41	348,12	41	348,12	34	307,55	34	307,55	34	307,55
Aceh Timur	20	538,85	20	538,85	20	538,85	20	538,85	20	538,85
Bireuen	29	1031,72	38	588,90	38	588,90	38	588,90	38	588,90
Aceh Tenggara	52	563,89	51	284,35	51	284,35	51	284,35	51	284,35
Bener Meriah	10	337,25	10	337,25	12	87,05	12	87,05	12	87,05

Kabupaten/ Kota	SK Bupati/ Walikota 2020		SK Bupati/ Walikota 2021		SK Bupati/Walikota 2022		SK Bupati/ Walikota 2023		SK Bupati/ Walikota 2024	
	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)
Aceh Utara	7	62,97	7	62,97	7	62,97	13	297,45	13	297,45
Aceh Singkil	9	108,86	9	108,86	9	108,86	9	108,86	9	108,86
Aceh Barat Daya	33	832,51	33	832,51	33	832,51	33	832,51	33	832,51
Nagan Raya	43	108,33	43	108,33	43	108,33	43	108,33	34	260,93
Gayo Lues	30	69,34	30	69,34	30	69,34	30	69,34	30	69,34
Pidie Jaya	12	206,10	66	457,16	66	457,16	66	457,16	42	1015,43
Lhokseumawe	17	78,10	17	78,1	17	78,1	17	78,1	17	78,1
Subulussalam	12	320,17	12	320,17	12	320,17	12	320,17	12	320,17
Aceh Tengah	14	187,39	14	187,39	14	187,39	14	187,39	6	161,61
Pidie	66	294,30	66	294,3	66	294,3	66	294,3	66	294,3
Aceh Selatan	8	120,10	8	120,1	82	1542,33	82	1542,33	36	967,6
Aceh Jaya	8	136,29	8	136,29	8	136,29	8	136,29	8	136,29

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2024

Pemerintah Aceh terus berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, khususnya dalam penyediaan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, dilakukan upaya penguatan perencanaan dan pengelolaan sarana pelayanan publik agar dapat digunakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Langkah strategis yang ditempuh meliputi rehabilitasi dan penyesuaian infrastruktur pelayanan publik yang telah ada sehingga memenuhi standar ramah disabilitas. Selain itu, pada tahap perencanaan dan penyusunan desain (DED) pembangunan infrastruktur, dilakukan pelibatan aktif organisasi penyandang disabilitas untuk memastikan rancangan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Upaya ini dilakukan secara terpadu oleh perangkat daerah terkait, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sinergi ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya fasilitas pelayanan publik yang inklusif, sejalan dengan visi Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan, sehingga seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati layanan publik dengan nyaman.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

E.1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

IP Trantibumlinmas merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas: sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana. Selain itu, IP Trantibumlinmas juga digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. Dari hasil evaluasi IP Trantibumlinmas tahun 2023 yang dilakukan oleh Ditjen Bina Adwil Kemendagri, nilai IP Trantibumlinmas Provinsi Aceh sebesar 42,10 termasuk dalam kategori cukup baik.

Sementara itu, untuk menilai kinerja Satpol PP dalam menegakkan perda, dan dalam penyelenggaraan Tibumtranmas yang efektif, efesien dan akuntabel dilakukan penilaian Indeks Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU). Dari hasil evaluasi IP Trantibumlinmas tahun 2023 yang dilakukan oleh Ditjen Bina Adwil Kemendagri, nilai IP Trantibumlinmas Provinsi Aceh sebesar 51,25 termasuk dalam kategori cukup baik.

E.2.Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya

Data BPS menunjukkan proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal (siang/malam) merupakan indikator krusial rasa aman. Pada tahun 2020, secara nasional proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya adalah sebesar 62,62 persen, sedangkan untuk Aceh angkanya sedikit lebih rendah yaitu sebesar 61,17 persen. Sampai dengan tahun 2025 BPS belum merilis angka terbaru terkait indikator ini.

F. Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, ketunaan sosial, keterbelakangan keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang terjadi secara mendadak yang kurang mendukung atau menguntungkan. Dalam menunjang urusan kesejahteraan sosial diperlukan dukungan sumber daya manusia Kesejahteraan Sosial memiliki kompetensi yang tersertikasi, potensi sumber kesejahteraan sosial Lembaga yang terakreditasi, perorangan yang tersertifikasi dan pilar-pilar sosial lainnya.

Proses pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diselenggarakan melalui empat pilar. Pilar perlindungan dan jaminan sosial diarahkan kepada jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) non produktif dan terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar korban pada saat dan paska kejadian bencana provinsi, sedangkan pilar rehabilitasi sosial diarahkan guna pemenuhan kebutuhan sosial dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilaksanakan melalui 6 (enam) Unit Pelaksana Tekhnis Daerah sebagai

pelayanan sosial milik pemerintah provinsi serta Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak milik masyarakat yang tersebar di Kabupaten dan Kota di Aceh, serta penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial baik lembaga, perorangan, maupun keluarga perorangan guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

F.1. Sarana Sosial

Panti pelayanan sosial milik Pemerintah Aceh memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial dasar di dalam panti membutuhkan peningkatan sarana seiring dengan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial. Ketersediaan sarana prasarana sosial guna optimalisasi pelayanan sosial yang menjamin pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat di dalam panti. Kondisi sarana prasarana panti pelayanan sosial saat ini sebanyak 6 (enam) unit dalam kondisi baik 1 (satu) unit dalam kondisi kurang baik. Panti pelayanan sosial merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial dasar secara langsung kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Daftar panti pelayanan sosial milik Pemerintah Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2. 58
Daftar Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun 2025

No.	Nama Panti	Jenis PPKS yang dilayani	Daya Tampung	Jumlah Tertampung	Jenis Pelayanan PPKS	Tempat Kedudukan
1.	Panti Sosial Anak Jroh Naguna	Anak Putus Sekolah	50 Orang	33 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Lampineung-Kota Banda Aceh
2.	Panti Sosial Lanjut Usia Geunaseh Sayang	Lanjut Usia Terlantar	70 Orang	55 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Ulee Kareng-Kota Banda Aceh
3.	Panti Sosial Disabilitas Meujroh Meukarya	Disabilitas	60 Orang	39 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Desa Ladong-Kab. Aceh Besar
4.	Panti Sosial Anak Terlantar Aneuk Nanggroe	Anak Terlantar	70 Orang	63 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Desa Geu Gajah-Kab. Aceh Besar
5.	Panti Sosial Tuna Sosial	Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	30 Orang	20 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Desa Ladong-Kab. Aceh Besar
6.	Panti Sosial Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi	Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi	30 Orang	0 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Lampineung-Kota Banda Aceh

Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2025

F.2. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Aceh merupakan daerah dengan sejarah panjang dalam menghadapi tantangan permasalahan sosial dan ekonomi semenjak masa perjuangan kemerdekaan. Meskipun telah mengalami kemajuan dalam penanganan beragam permasalahan sosial seperti Penyelesaian Konflik dan penangangan Tsunami, namun eskalasi permasalahan terus terjadi. Hal ini disebabkan masih masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, akses layanan dan kesehatan dan Pendidikan yang belum merata dan dampak dari bencana alam.

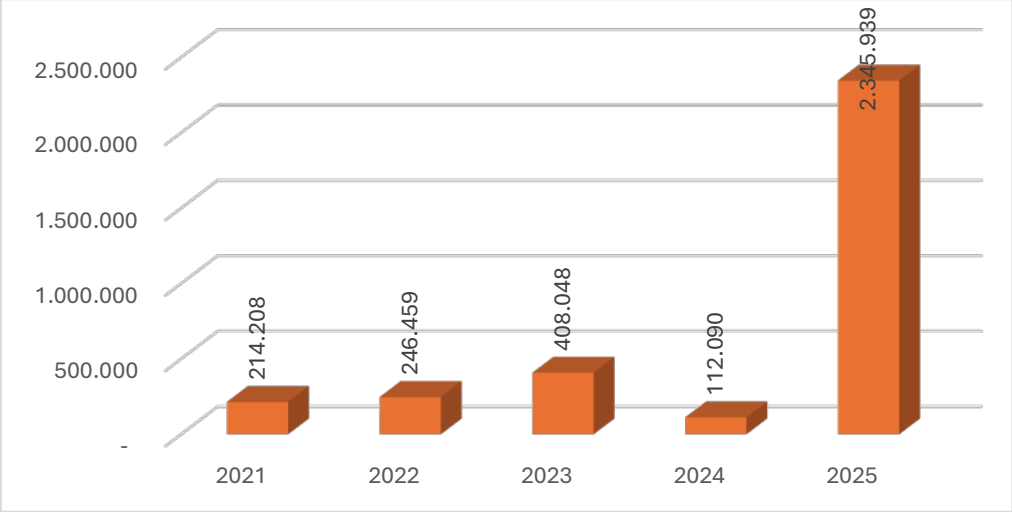

Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2025

Gambar 2. 43
Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 2.43, dapat dilihat bahwa Pemerintah Aceh berupaya melaksanakan optimalisasi penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilaksanakan Dinas Sosial Aceh selama 5 tahun terakhir yaitu periode tahun 2021-2025 sebanyak 2.345.939 jiwa.

F.3. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan Usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan unsur masyarakat yang memberikan dukungan konkrit dalam penanganan Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial (PPKS) disekitarnya. Peningkatan kompetensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan upaya dalam mendorong percepatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Aceh periode tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada Gambar 2.59..

Tabel 2. 59
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Provinsi Aceh
Tahun 2021-2025

No.	Jenis	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Karang Taruna (Lembaga)	1.413	1.462	1.542	1542	1542
2	Organisasi Sosia (Lembaga)	60	60	65	65	65
3	LKS Panti (Lembaga)	164	158	143	143	143
4	PSM (Orang)	1.295	1.302	1.349	1.349	1.349
5	TKSK (Orang)	289	289	290	274	274
6	LK3 (Lembaga)	27	27	26	26	26
7	Dunia Usaha (Lembaga)	13	15	18	18	18
8	Tagana (Orang)	759	873	757	768	7
9	Kader Perempuan (Orang)	23	23	23	23	23
10	Pendamping Sosial (PKH & Rehsos) (Orang)	1.246	1.248	1.251	1.148	1.148
11	Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKSBM) (Lembaga)	371	385	453	441	441
	Jumlah	**5.637**	**5.819**	**5.894**	**4.649**	**4.649**

Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2025

Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan melalui pelaksanaan bimbingan pemantapan dan sertifikasi, sedangkan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui Akreditasi. Apresiasi dalam bentuk penghargaan perlu dilakukan untuk meningkatkan motivasi kepada para Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan menambah minat dan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial.

F.4. Indeks Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan muara utama dari seluruh proses pembangunan nasional maupun daerah. Di Provinsi Aceh, pembangunan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga pada pemerataan aksesibilitas warga terhadap pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) hadir sebagai instrumen strategis untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial secara kuantitatif dan kualitatif. Ikesos

memberikan gambaran mengenai sejauh mana intervensi pemerintah dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan efektivitas jaminan sosial di seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan pengukuran Tahun 2025, nilai IKESOS Provinsi Aceh sebesar 50,38 berada dalam kategori Maju (40,01-60,00). Nilai ini menunjukkan bahwa sistem sosial mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara rinci nilai IKESOS Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 60
Rincian Nilai IKESOS Menurut Dimensi dan Variabel Provinsi Aceh Tahun 2025

Dimensi	Nilai Dimensi	Variabel	Nilai Variabel
Kebutuhan Dasar	51,79	Pangan	76,79
		Papan	67,58
		Kesehatan	44,3
		Pendidikan	33,07
		Jaminan Sosial	29,62
		Rasa Aman	78,85
		Physical Mobility	32,3
Peranan Sosial	39,19	Partisipasi	38,43
		Kohesi Sosial	22,64
		Kelembagaan Inklusif	56,48
Keberdayaan Ekonomi	57,72	Utilitas/Daya Guna	40,73
		Ketahanan Ekonomi	75,03
		Partisipasi Ekonomi	57,41

Sumber : Kementerian Sosial, Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2025.

Berdasarkan tabel, Dimensi Keberdayaan Ekonomi memperoleh nilai tertinggi sebesar 57,72 dan berada dalam kategori "Maju". Capaian ini mencerminkan bahwa kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi telah menunjukkan perkembangan yang positif. Variabel Ketahanan Ekonomi (75,03) telah mencapai kategori "Inklusif", menandakan bahwa kemampuan masyarakat dalam menghadapi guncangan ekonomi dan menjaga keberlangsungan hidup sudah baik.

Selain itu, Dimensi Kebutuhan Dasar juga termasuk dalam kategori “Maju” dengan nilai mencapai 51,79. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sebagian kebutuhan dasar masyarakat sudah mulai terpenuhi. Variabel Rasa Aman (78,85), Pangan (76,79) dan Papan (67,58) telah mencapai kategori "Inklusif". Namun, beberapa variabel lainnya masih memerlukan perhatian lebih, diantaranya Variabel Kesehatan (44,30), Pendidikan (33,07), Jaminan Sosial (29,62), dan *Physical Mobility*

(32,30) masih berada dalam kategori "Berkembang". Kondisi ini mengartikan bahwa akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang merata, sistem jaminan sosial, serta fasilitas pendukung mobilitas fisik masih cukup terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Dimensi Peranan Sosial mencapai nilai paling rendah dibandingkan dimensi lainnya yaitu 39,19 yang artinya termasuk dalam kategori “Berkembang”. Variabel Kelembagaan Inklusif (56,48) yang telah masuk kategori "Maju" menunjukkan bahwa kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung inklusivitas sosial sudah tersedia. Namun, tingkat Partisipasi (38,43) dan Kohesi Sosial (22,64) yang masih dalam kategori "Berkembang" mengindikasikan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan serta kekuatan ikatan dan solidaritas sosial di tingkat komunitas masih perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat yang lebih aktif diperlukan untuk menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan nyata di masyarakat.

2.1.3.2.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan Aceh secara menyeluruh. Hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya pendayagunaan angkatan kerja, produktivitas, tingkat pengangguran terbuka serta besarnya beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif yang tersebar di Aceh. Upaya maksimal dalam pemetaan masalah ketenagakerjaan tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan Aceh secara makro dan ditandai dengan pencapaian indikator ketenagakerjaan sebagai berikut:

A.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Secara umum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami sedikit penurunan dari 65,63% pada Februari menjadi 65,32% pada Agustus 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi sedikit melemah. Dalam konteks perencanaan, kondisi ini perlu menjadi perhatian karena pertambahan penduduk usia kerja belum diikuti secara optimal oleh peningkatan partisipasi kerja dan penyerapan tenaga kerja. Kondisi TPAK Aceh tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar berikut:

Tabel 2. 61
Kondisi TPAK Aceh Februari dan Agustus 2025

Karakteristik	Tahun 2025	
	Februari	Agustus
Penduduk Berumur > 15 tahun	4.120.857	4.155.944
Angkatan Kerja	2.704.621	2.714.518
Bekerja	2.555.818	2.561.329
Pengangguran	148.803	153.189
Bukan Angkatan Kerja	1.416.236	1.441.426
Sekolah	389.637	347.543
Mengurus RT	778.797	810.107
Lainnya	247.802	283.776
TPAK	65,63	65,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2026

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas mengalami peningkatan dari 4.120.857 orang pada Februari menjadi 4.155.944 orang pada Agustus. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertambahan penduduk usia kerja yang berpotensi masuk ke pasar tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja juga meningkat dari 2.704.621 orang menjadi 2.714.518 orang.

Namun peningkatan tersebut relatif kecil dibandingkan pertambahan penduduk usia kerja. Jumlah penduduk yang bekerja sedikit meningkat dari 2.555.818 orang menjadi 2.561.329 orang, sedangkan jumlah pengangguran juga meningkat dari 148.803 orang menjadi 153.189 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tambahan angkatan kerja belum sepenuhnya terserap oleh kesempatan kerja yang tersedia.

Sementara itu, jumlah bukan angkatan kerja meningkat dari 1.416.236 orang menjadi 1.441.426 orang. Kenaikan terbesar terlihat pada kelompok mengurus rumah tangga dari 778.797 orang menjadi 810.107 orang, serta kelompok lainnya dari 247.802 orang menjadi 283.776 orang. Sebaliknya kelompok yang berstatus sekolah menurun dari 389.637 orang menjadi 347.543 orang.

A.2. Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki dan Perempuan

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK menurut jenis kelamin tahun 2023–2025 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan. TPAK laki-laki secara konsisten berada pada kisaran 80%–82%, sedangkan TPAK perempuan berada pada kisaran 47%–50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki usia kerja jauh lebih banyak yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan, dibandingkan penduduk perempuan. Perkembangan TPAK laki-laki dan perempuan dapat dilhat pada Tabel berikut

Tabel 2. 62
TPAK Perempuan dan Laki-laki di Aceh Tahun 2023-2025

Karatektristik TPAK	2023		2024		2025	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Laki-laki	82,13	80,57	81,33	80,68	81,29	80,68
Perempuan	48,21	49,05	47,05	49,62	50,04	50,01

Pada kelompok laki-laki, TPAK menunjukkan kecenderungan relatif stabil namun sedikit menurun. Pada Februari 2023, TPAK laki-laki tercatat sebesar 82,13%, kemudian turun menjadi 80,57% pada Agustus 2023. Pada tahun 2024, TPAK laki-laki berada pada angka 81,33% pada Februari dan 80,68% pada Agustus. Selanjutnya pada tahun 2025, TPAK laki-laki tercatat 81,29% pada Februari dan kembali sebesar 80,68% pada Agustus. Pola ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam pasar kerja sudah tinggi, tetapi tidak mengalami peningkatan berarti selama tiga tahun terakhir.

Sementara itu, TPAK perempuan menunjukkan arah perkembangan yang lebih positif. Pada Februari 2023, TPAK perempuan sebesar 48,21%, meningkat menjadi 49,05% pada Agustus 2023. Pada Februari 2024, TPAK perempuan sempat menurun menjadi 47,05%, namun kembali meningkat menjadi 49,62% pada Agustus 2024. Pada tahun 2025, TPAK perempuan meningkat lebih tinggi, yaitu 50,04% pada Februari dan relatif stabil pada 50,01% pada Agustus. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi, meskipun tingkatnya masih jauh di bawah laki-laki. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan TPAK perempuan menjadi salah satu kunci penting dalam memperluas basis tenaga kerja produktif, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

A.3 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Secara keseluruhan, tiga sektor utama, yaitu pertanian, perdagangan, dan jasa kemasyarakatan/sosial, menyerap sekitar 79% dari total penduduk bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan masih didominasi oleh sektor primer dan sektor jasa tradisional. Kondisi jumlah penduduk yang bekerja pada agustus 2025 dapat dilihat pada Gambar berikut:

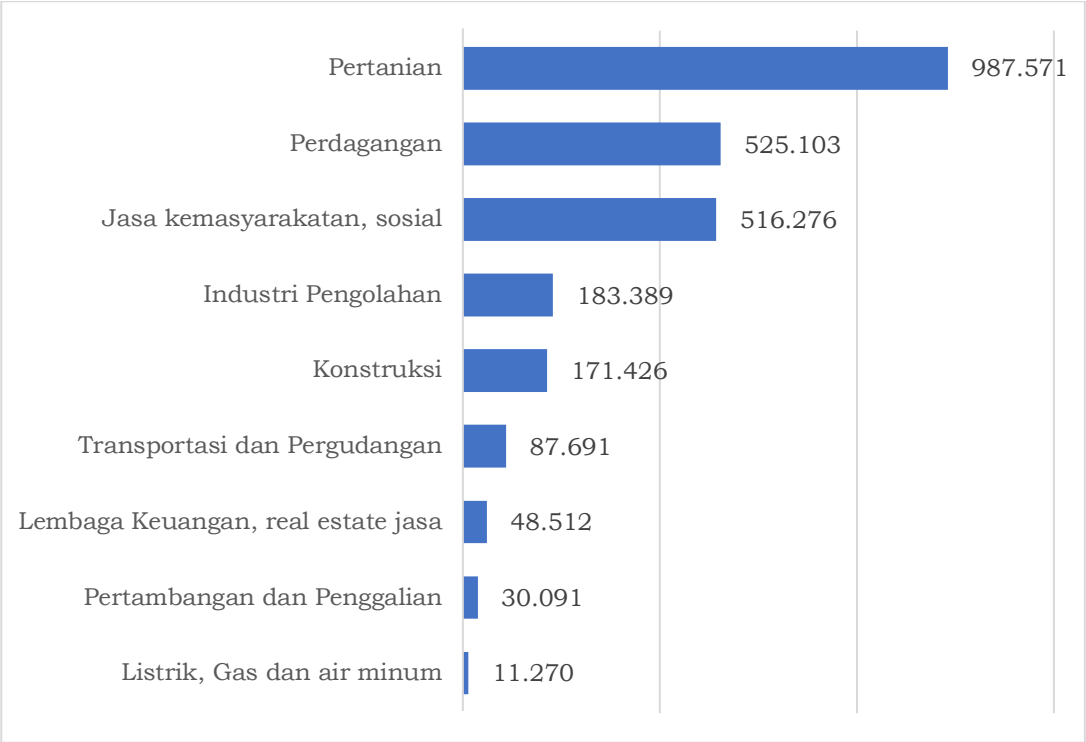

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Gambar 2. 44
Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha, Agustus 2026

Struktur penduduk bekerja menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja masih sangat terkonsentrasi pada sektor pertanian, dengan jumlah pekerja sebanyak 987.571 orang atau sekitar 38,6% dari total penduduk bekerja. Dominasi sektor pertanian menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih sangat bergantung pada sektor primer sebagai penyedia utama lapangan kerja. Sektor kedua terbesar adalah perdagangan, yang menyerap 525.103 orang atau sekitar 20,5% dari total pekerja. Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan menunjukkan kuatnya peran aktivitas ekonomi rumah tangga, usaha mikro, pasar tradisional, perdagangan eceran, dan distribusi barang dalam menyediakan kesempatan kerja.

Sektor konstruksi menyerap 171.426 orang atau sekitar 6,7%, yang menunjukkan adanya kontribusi kegiatan pembangunan infrastruktur dan perumahan terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, sektor ini umumnya bersifat fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh investasi, belanja pemerintah, dan proyek pembangunan. Sektor transportasi dan pergudangan menyerap 87.691orang atau sekitar 3,4%, sedangkan sektor lembaga keuangan, real estate, dan jasa perusahaan menyerap 48.512 orang atau sekitar 1,9%. Rendahnya penyerapan di sektor-sektor ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi modern dan jasa bernilai tambah tinggi masih belum menjadi penyerap tenaga kerja utama.

A.4. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Secara umum tingkat ketergantungan Aceh dan Nasional mengalami penurunan, namun Aceh masih berada dibawah rata-rata nasional.

Dari tahun 2019 hingga 2024 tingkat ketergantungan Aceh mengalami fluktuasi. Di tahun 2019tingkat ketergantungan aceh berada pada 53,75 persen, sementara itu pada tahun 2024 tingkat ketergantungan di Aceh menurun hingga 48,61 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa di setiap 100 orang penduduk usia produktif Aceh harus menanggung 48. Kecenderungan rasio ketergantungan di Aceh adalah menurun. Rasio ketergantungan ini dapat mengukur dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dengan melihat perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur ≥ 65 tahun). Semakin kecil angka rasio ketergantungan hidup akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya. Perkembangan tingkat ketergantungan masyarakat Aceh dari tahun 2019 hingga 2024 terdapat pada Gambar 2.45 berikut :

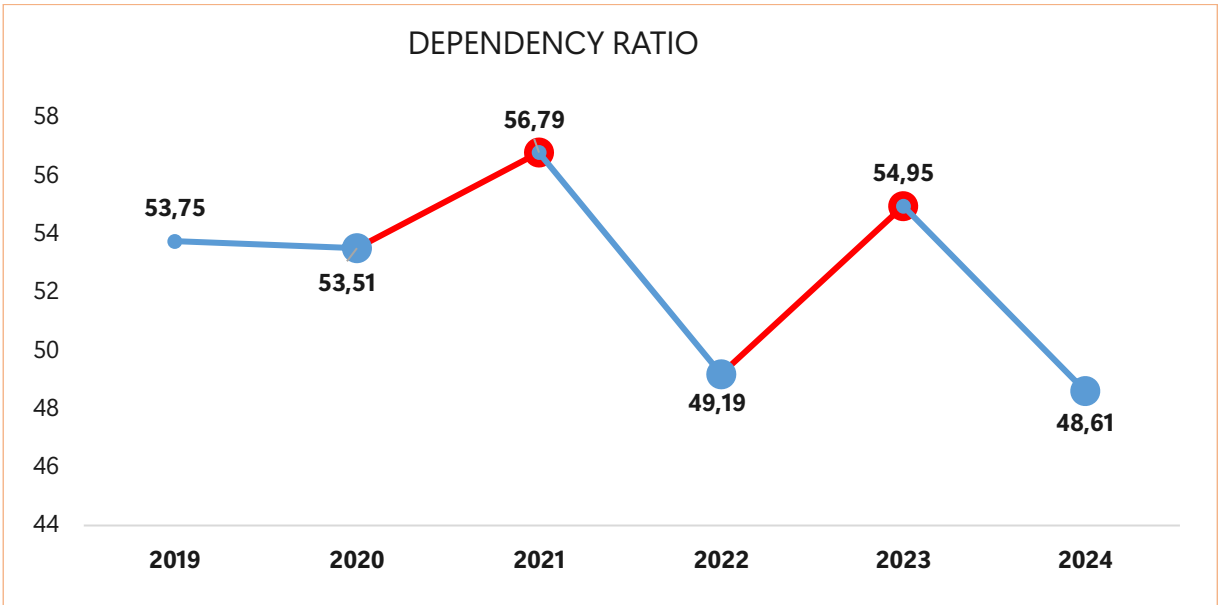

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024 (diolah)

Gambar 2. 45
Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh, Tahun 2019-2024

A.5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja. TPAK adalah proporsi penduduk angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan menganggur terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Perbandingan antara TPAK perempuan dan laki-laki pada Tahun 2021 sampai dengan 2023 menunjukkan perbedaan yang cukup besar, TPAK Perempuan Tahun 2021 yaitu sebesar 48,36 persen lebih rendah dibandingkan dengan TPAK Laki-Laki yaitu sebesar 79,40 persen. Pada Tahun 2022 TPAK Perempuan sebesar 46,15 persen, menurun sebser, 2,21 persen dari Tahun 2021, sedangkan tenaga kerja laki-laki sebesar 81,06 persen, meningkat dari tahun sebelumnya 1,66 persen. Pada Tahun 2023 TPAK Perempuan sebesar 49,05 persen meningkat dari tahun sebelumnya 2,9 persen dan TPAK Laki-laki sebesar 80,57 persen menurun dari tahun sebelumnya 0,49 persen. Data tersebut menggambarkan partisipasi perempuan Aceh dalam bekerja lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Aceh pada Agustus 2025 mencapai 65,32 persen, naik dari 65,11 persen pada Agustus 2024. Ini menunjukkan 65,32% penduduk usia kerja di Aceh aktif secara ekonomi. TPAK laki-laki 82,52% dan perempuan 47,80%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh Agustus 2025 berada di angka 5,64 persen.

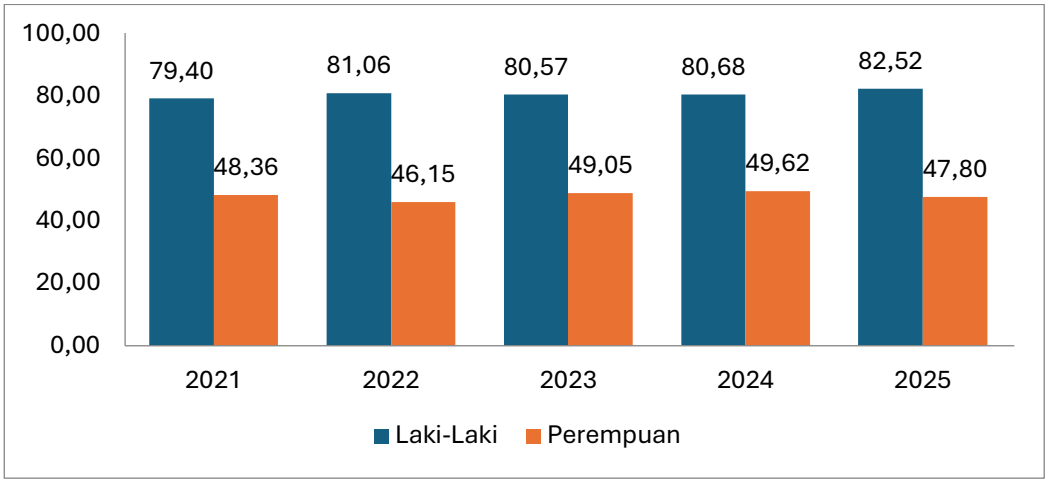

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2. 46
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2021-2025

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

B.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Perkembangan dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh Tahun 2020–2024 sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat pada Gambar 2.47 di bawah ini.

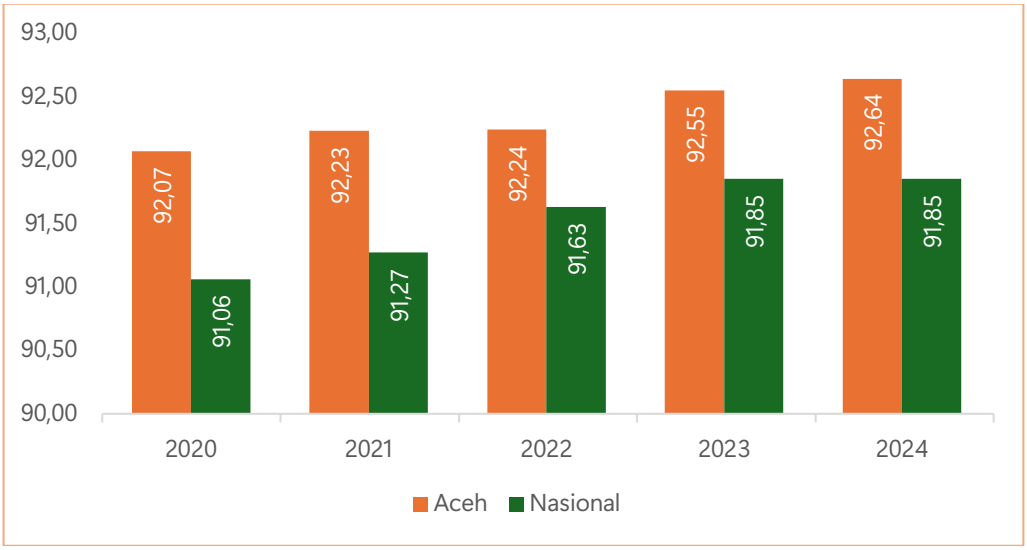

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2. 47
Indeks Pembangunan Gender Aceh Tahun 2020 – 2024

Selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 Indeks Pembangunan Gender Aceh lebih baik dibandingkan dengan Nasional. Capaian IPG Nasional pada tahun 2024 sebesar 91,85 dan IPG Aceh sebesar 92,64. Capaian IPG Aceh pada tahun 2024 sebesar 92,64 naik 0,09 poin dari tahun 2023 yang capaiannya sebesar 92,55. Namun meskipun berada di atas rata-rata nasional tetapi masih saja percepatan pembangunan untuk perempuan Aceh masih lebih lambat dari laki-laki terutama di sektor ekonomi.

B.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Berdasarkan tren, setiap angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh mengalami penurunan dan peningkatan seperti pada gambar di bawah berikut:

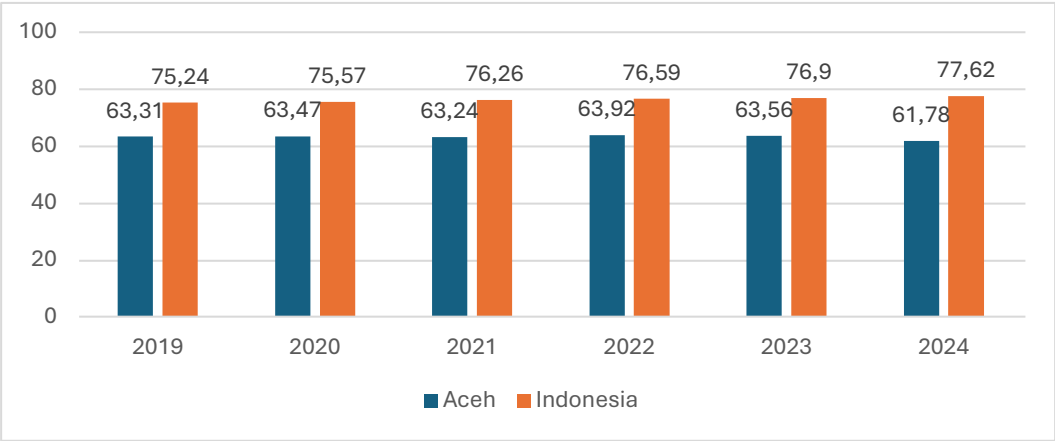

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2. 48
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh Tahun 2019 – 2024

Capaian IDG nasional pada tahun 2022 mengalami kenaikan 0,33 poin dari tahun 2021 yaitu sebesar 76,59, sedangkan capaian tahun sebelumnya sebesar 76,26 dan di tahun 2023 meningkat 0,31 poin menjadi 76,90, dan pada tahun 2024 IDG Nasional mengalami peningkatan sebesar 0,72 poin dari tahun sebelumnya. Provinsi Aceh juga mengalami peningkatan sebesar 0,68 poin, yaitu dari capaian 63,24 tahun 2021 menjadi 63,92 pada tahun 2022 dan di tahun 2023 mengalami penurunan 0,36 poin menjadi 63,56, Pada Tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 1,78 poin dari tahun 2023.

B.3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nilai IKG Aceh tahun 2024 sebesar 0,459 turun sebanyak 0,030 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,489. IKG Aceh berada dalam rentang kategori menengah-atas (0,450-0,495), hal ini menunjukkan ketimpangan gender masih adanya perbedaan nyata antara perempuan dan laki-laki dalam kesehatan reproduksi, pendidikan, partisipasi politik, dan tenaga kerja.

Namun masih lebih tinggi (lebih timpang) dibanding IKG nasional tahun 2024 (0,421). IKG terendah (ketimpangan kecil) yaitu Banda Aceh (0,182), Sabang (0,186) dan Pidie (0,205) hal ini menunjukkan kemajuan relatif dalam kesetaraan. IKG tertinggi (ketimpangan besar) terdapat di Aceh Utara (0,789), Nagan Raya (0,789) dan Gayo Lues (0,613), hal ini menandakan perempuan masih jauh tertinggal dari laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan.

Selama kurun waktu 4 tahun, IKG Aceh mengalami penurunan bertahap dari 0,514 (2020) menjadi sebesar 0,459 (2024), artinya ketimpangan gender perlahan berkurang, namun belum signifikan. Penurunan paling lambat terjadi di dimensi tenaga kerja, karena keterlibatan perempuan di sektor formal masih rendah.

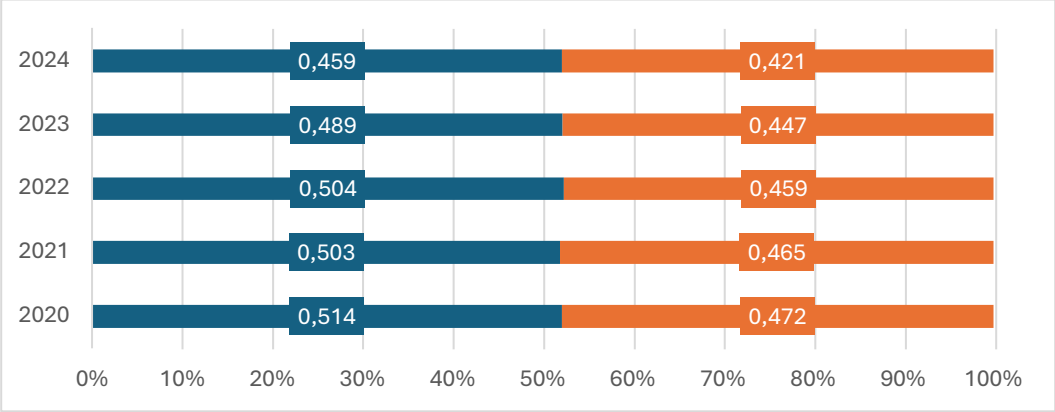

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2. 49
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Aceh Dan Indonesia (IKG)
Tahun 2020-2024

B.4. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Indeks Pemenuhan Hak Anak yang selanjutnya disingkat IPHA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian Pemenuhan Hak Anak. Perbandingan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) di Provinsi Aceh menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung mengalami perbaikan pada beberapa dimensi utama sepanjang periode 2019 hingga 2023. IPHA sendiri merupakan bagian dari Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang mengukur capaian pemenuhan hak anak di berbagai klaster.

IPHA di Aceh disusun berdasarkan empat klaster utama sesuai standar nasional:

1. Hak Sipil dan Kebebasan: Meliputi kepemilikan akta kelahiran dan akses informasi.
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif: Menitikberatkan pada pencegahan perkawinan anak dan kualitas pengasuhan.
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan: Fokus pada status gizi dan fasilitas kesehatan ramah anak.
4. Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang: Mengukur angka partisipasi sekolah dan ketersediaan fasilitas kreatif.

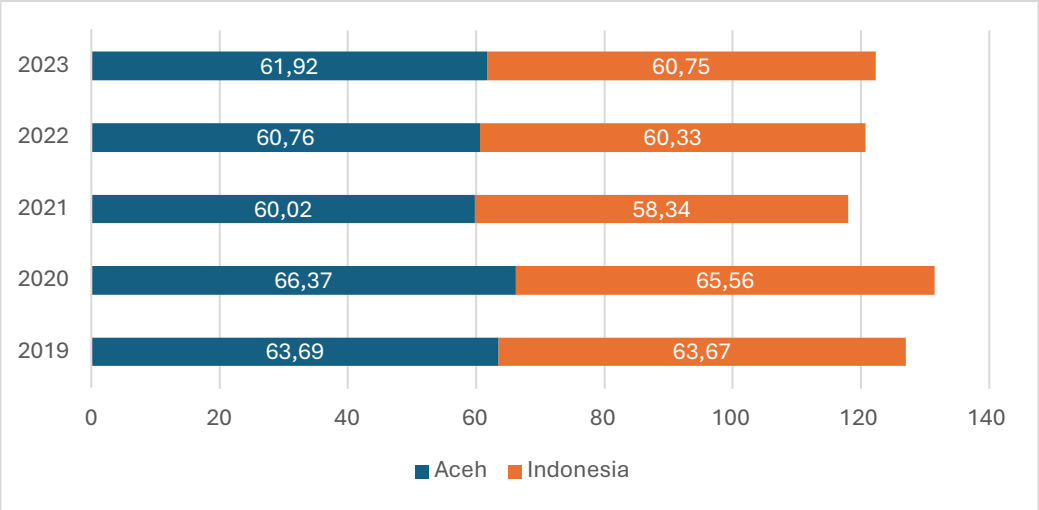

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2. 50
Perbandingan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Aceh dan Indonesia Tahun 2019-2023

B.5. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat IPA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. IPA dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam peningkatan pembangunan perlindungan anak Angka IPA Aceh lebih tinggi dari angka IPA Indonesia. Salah satu

lompatan terbesar terlihat pada Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Dari posisi sebelumnya, IPKA Aceh pada tahun 2021 mencapai 73,83 dan terus didorong melalui penguatan unit layanan seperti UPTD PPA di seluruh kabupaten/kota. Meski ada tren positif, Aceh masih menghadapi tantangan pada dimensi pemenuhan hak (IPHA) yang seringkali berada di bawah rata-rata nasional pada beberapa kluster tertentu, seperti persentase anak yang bekerja. Kota-kota seperti Banda Aceh secara konsisten mencatatkan indeks pembangunan (termasuk IPM yang berpengaruh pada kesejahteraan anak) tertinggi di Aceh, yang menjadi lokomotif kenaikan indeks provinsi.

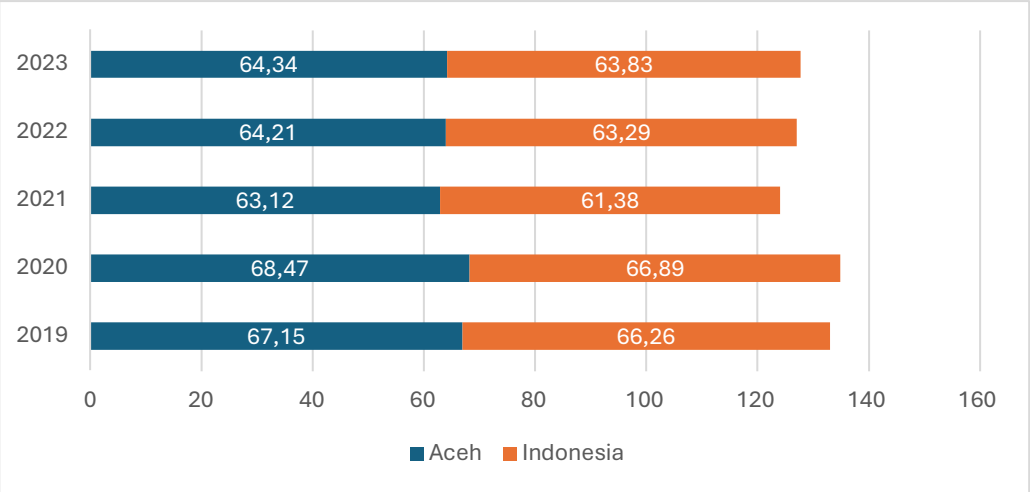

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2. 51
Perbandingan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Aceh dan Indonesia
Tahun 2019 - 2023

B.6. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Indeks Perlindungan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Tahun 2023 IPKA Aceh menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga diperlukan upaya peningkatan terhadap akses internet untuk anak yang sedang bersekolah dan diharapkan mampu menekan jumlah anak yang bekerja dan anak yang terlantar.

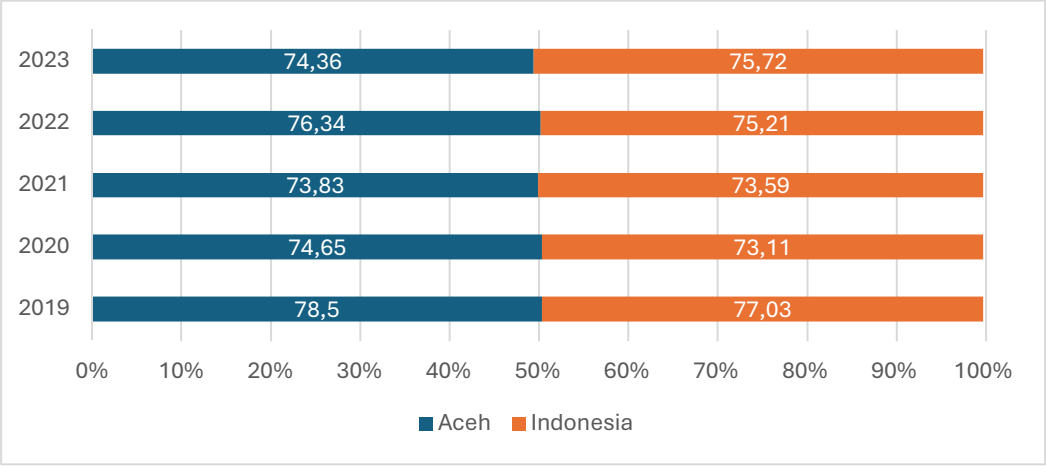

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2. 52
Perbandingan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Aceh dan Indonesia Tahun 2019-2023

B.7. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IKK)

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) digunakan sebagai tolok ukur pembangunan keluarga yang mencakup aspek legalitas, fisik, ekonomi, dan psikososial. Aceh menunjukkan komitmen yang kuat dalam peningkatan kualitas keluarga, terlihat dari posisinya yang menonjol dibandingkan rata-rata nasional dalam kurun waktu. Kualitas keluarga yang berkesetaraan gender dan pemenuhan hak anak melalui pencapaian 5 (lima) dimensi:

1. **Legalitas dan Struktur**: Mencakup kepemilikan dokumen hukum keluarga (akta, buku nikah).
2. **Ketahanan Fisik**: Terkait kecukupan pangan, gizi, dan kesehatan anggota keluarga.
3. **Ketahanan Ekonomi**: Kemandirian finansial dan pendapatan keluarga.
4. **Ketahanan Sosial-Psikologi**: Keharmonisan dan kemampuan menyelesaikan konflik internal.
5. **Ketahanan Sosial-Budaya**: Interaksi keluarga dengan lingkungan sosial dan adat istiadat setempat

Sepanjang periode 2020 hingga 2023, Aceh berhasil menjaga kualitas keluarga di atas rata-rata nasional. Tren data dari tahun 2020-2023 menunjukkan peningkatan perhatian pada isu-isu kekeluargaan, yang berkontribusi pada posisi Aceh yang konsisten di papan atas dalam capaian IKK tingkat provinsi.

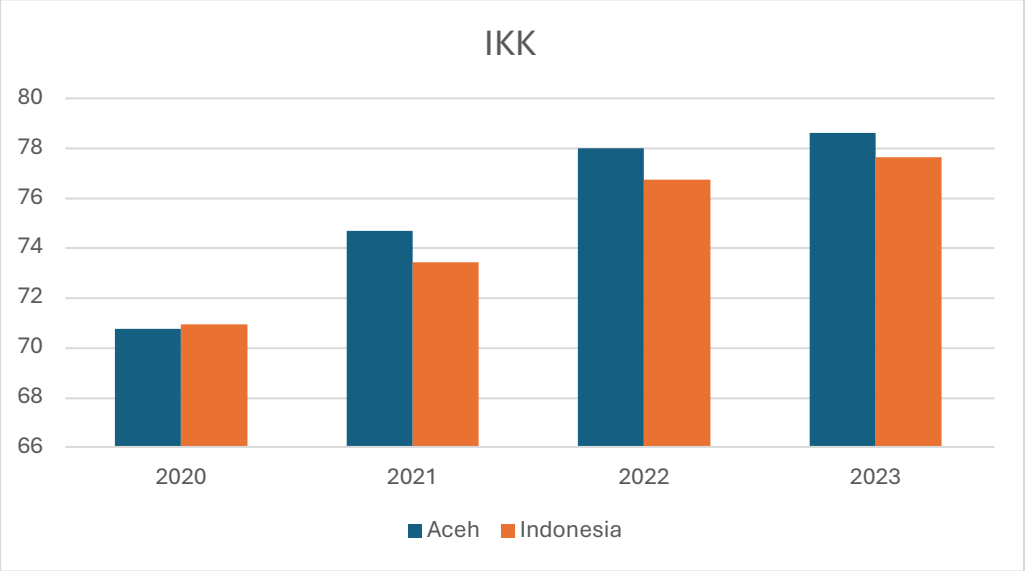

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2. 53
Perbandingan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2020-2023

C. Pangan

Situasi ketahanan pangan sangatlah dipengaruhi oleh ketersedian, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Berbagai permasalahan dan isu pangan yang dihadapi diantaranya: Pertama, dalam aspek ketersediaan pangan, dimana peningkatan produksi sebagian komoditas pangan, khususnya beras, belum bisa mengimbangi kenaikan konsumsi dan kebutuhan akan komoditas ini, sehingga ketergantungan terhadap impor beras dapat mengancam ketahanan pangan.

Kemudian, Ketersediaan pangan utama (Kg/Kap/Th) tahun 2025 sebesar 153,14 turun dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 156,55. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum (dibawah 1500 kkal/kapita/hari) pada tahun 2024 pola pangan harapan sebesar 83.40 dan naik pada tahun 2025 sebesar 83,79, sedang kan target yang ingin dicapai pada tahun 2026 sebesar 84,29 tercatat ada sekitar 10.6% penduduk Aceh masih memiliki asupan kalori di bawah kebutuhan pangan minimum. Menilik pada Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2025 sebanyak 41 kecamatan (14,14%) termasuk ke dalam prioritas 1-3 (rentan rawan pangan) dan sebanyak 249 kecamatan (85,86%) lain telah masuk prioritas 4-6 (tahan pangan) dengan rincian sebagai berikut: 2 kecamatan prioritas 1 (sangat rentan), 12 kecamatan prioritas 2 (rentan), 27 kecamatan prioritas 3 (agak rentan), 53 kecamatan prioritas 4 (agak tahan), 104 kecamatan prioritas 5 (tahan), 92 kecamatan prioritas 6 (sangat tahan).

Tabel 2. 63
Jumlah Kecamatan Daerah Rawan Pangan

No	URAIAN		JUMLAH KECAMATAN	PERSENTASE (%)
1	PRIORITAS 1	Sangat Rentan	2	0,69
2	PRIORITAS 2	Rentan	12	4,14
3	PRIORITAS 3	Agak Rentan	27	9,31
4	PRIORITAS 4	Agak Tahan	53	18,28
5	PRIORITAS 5	Tahan	104	35,86
6	PRIORITAS 6	Sangat Tahan	92	31,72

Sumber: Tahun 2026 (FSVA)

Kedua, dalam aspek keterjangkauan pangan, dimana kemiskinan dan relatif tingginya harga pangan terhadap pendapatan masih menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan akses pangan. Kondisi pasokan pangan Aceh saat ini masih sangat tergantung pada daerah lain terutama dari Sumatera Utara. Hampir semua kebutuhan pangan masyarakat Aceh seperti telur, gula, minyak makan bahkan termasuk rempah-rempah, buah dan sayur dipasok dari provinsi lain, sehingga harga kebutuhan pangan di Provinsi Aceh sering terjadi kenaikan diatas batas normal dan menyebabkan inflasi. Ketiga, dalam aspek pemanfaatan, dimana pola konsumsi sebagian besar masyarakat Aceh masih kurang ideal, dengan karbohidrat masih mendominasi asupan kalori; konsumsi protein hewani, buah-buahan, dan sayuran masih belum mencukupi; serta peningkatan konsumsi makanan olahan dan siap saji di perkotaan maupun perdesaan. Dalam aspek pemanfaatan pangan, keamanan pangan merupakan aspek penting yang juga diperhatikan untuk menentukan kualitas sumber daya manusia. Di era pasar bebas saat ini Aceh harus mampu bersaing dengan derasnya arus masuk produk industri pangan dari daerah maupun negara lain yang telah mapan dalam sistem mutunya. Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Menyikapi persoalan pangan tersebut, maka perlu kebijakan yang diupayakan dalam hal penyediaan pangan dan penanganan rawan pangan antara lain melalui (1) peningkatan ketersediaan pangan yang beragam; (2) menekan jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun; dan (3) peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui pengembangan model pemberdayaan masyarakat.

Secara umum kondisi ketahanan pangan dapat dilihat melalui pencapaian pola pangan harapan (PPH) ketersediaan dan konsumsi pangan. Capaian PPH ketersedian dan konsumsi pangan Aceh selama sepuluh tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada Gambar 2.54.

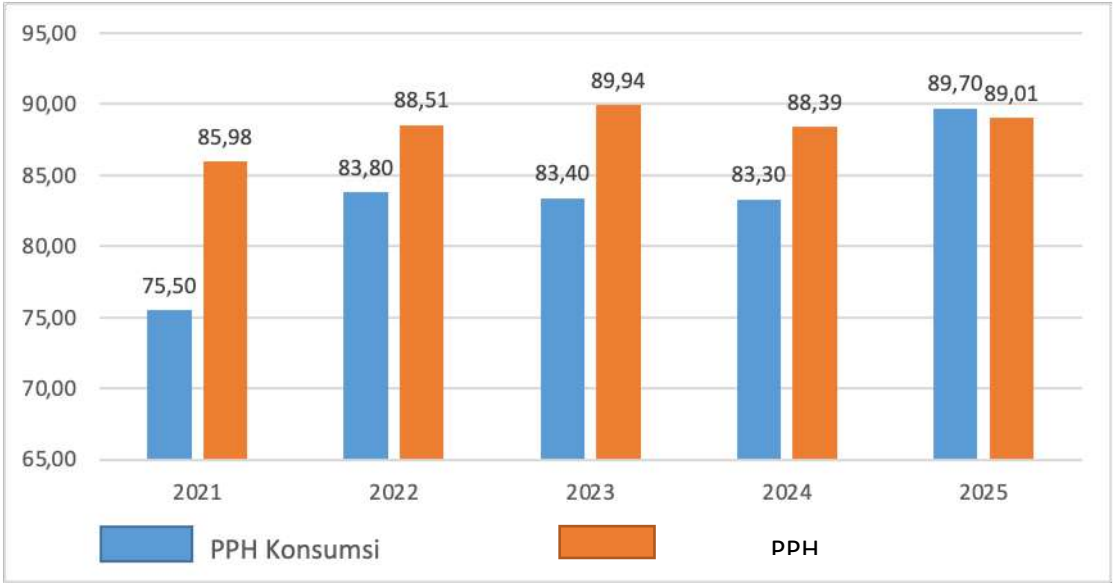

Gambar 2. 54
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2021-2025

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa skor PPH ketersediaan dan konektivitas konsumsi Aceh dari tahun 2021- 2025 belum mencapai angka 100. Skor PPH ketersediaan cenderung meningkat dari tahun 2021 - 2025 sedangkan skor PPH Konsumsi dari 2021 - 2025 juga mengalami kenaikan, namun di tahun 2022 terjadi peningkatan pada angka yang lebih rendah dari tahun 2021.

D. Pertanahan

D.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar persentase luas lahan bersertipikat semakin besar pula tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan suatu daerah. Reformasi agraria menargetkan 4,5 juta ha yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Separuh dari total alokasi 9 juta ha berupa sertifikasi lahan. Dengan demikian, pemerintah akan memberikan status legal bagi tanah-tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat, termasuk yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional Aceh (Desember, 2019) Salah satu untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah adalah melalui Reforma Agraria. Reforma Agraria memiliki dua bentuk yaitu legalisasi aset dan redistribusi tanah. Capaian Reforma Agraria hingga akhir tahun 2019, antara lain: (1) realisasi penerbitan sertipikat tanah transmigrasi sebanyak 56.941 bidang atau seluas 57.169 hektar; (2) legalisasi tanah masyarakat melalui PRONA & Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan realisasi sertipikat sebanyak 17.670.963 bidang

atau seluas 4.476.692 hektar; (3) redistribusi tanah yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) habis dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, tanah terlantar dan Tanah Negara lainnya dengan realisasi sebesar 1.666.349 bidang atau seluas 795.458 hektar; (4) redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dengan realisasi penerbitan sertipikat 47.116 bidang atau seluas 32.753 hektar.

D.2. Jumlah Lahan Masyarakat Miskin Yang Bersertifikat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Redistribusi dan legalisasi aset/tanah bagi masyarakat miskin/ekonomi lemah merupakan salah satu program prioritas daerah dalam mendukung reforma agraria.

Tahun 2025 Dinas Pertanahan Aceh melanjutkan kegiatan Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin terhadap objek tanah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan pembangunan rumah layak huni oleh Dinas Perkim Aceh dan rumah dhuafa oleh Baitul Mal Aceh Tahun Anggaran 2023 dengan lokasi kabupaten/kota berbeda dengan tahun sebelumnya.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan ini, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) melalui Dinas Pertanahan Aceh pada APBA Murni Tahun 2025 sebesar Rp. 101.812.000,00 (seratus satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah). Kemudian, pada perubahan anggaran tahun 2025, ada penambahan anggaran sebesar Rp. 90.640.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total anggaran menjadi Rp. 192.452.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Tabel 2. 64
Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin Tahun 2024 Terhadap Objek Tanah Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni oleh Dinas Perkim & Baitul Mal Aceh Tahun 2023

No	Kab/Kota	Jumlah Lokasi (Kecamatan)	Jumlah Gampong	Jumlah Lahan/Tanah Terinventarisasi dan Administrasi	Jumlah Yang telah bersertipikat	Yang Belum bersertipikat
1	Banda Aceh	9	42	51 Lokasi	25	26
2	Aceh Besar	12	87	121 Lokasi	1	120
3	Aceh Jaya	8	20	26 Lokasi	8	18
4	Pidie	4	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pertanahan Aceh Tahun 2026

Adapun lokasi Kabupaten/Kota pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin TA 2025 sebagai berikut:

1. Kabupaten Aceh Besar;
2. Kabupaten Nagan Raya;
3. Kabupaten Bireuen;
4. Kota Sabang;
5. Kabupaten Pidie Jaya;
6. Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Kabupaten Gayo Lues;
8. Kabupaten Aceh Utara; dan
9. Kota Langsa.

Untuk Kabupaten Aceh Utara dan Kota Langsa tidak dapat dilaksanakan pendataan ke lapangan karena terjadi bencana banjir dan longsor.

D.3. Jumlah Lahan Pemerintah Yang Bersertifikat

Pada tahun 2025, dinas pertanahan Aceh juga melaksanakan kegiatan pengurusan hak atas Instansi Pemerintah yang dilaksanakan dengan memfasilitasi percepatan pensertipikatan tanah pemerintah Aceh dan kegiatan identifikasi dan verifikasi tanah Pemerintah Aceh serta koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/kota dalam penyiapan dokumen kepemilikan aset berupa Tanah milik Pemerintah Aceh. Adapun secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pensertipikatan tanah pemerintah Aceh
2. Penyusunan dan penyiapan dokumen alas hak sertipikat tanah pemerintah.
3. Membantu fasilitasi Pengukuran Tanah Pemerintah Aceh di Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan Mendapatkan informasi awal mengenai status kepemilikan tanah; sebagai dasar hukum yang kuat pemerintah dalam menguasaan tanah dalam pembangunan Melakukan percepatan dalam pensertipkatan tanah Pemerintah Aceh yang belum bersertifikat

Adapun realiasasi pelaksanaan Pengurusan Hak atas Instansi Pemerintah pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 65
Rekapitulasi Data Tanah Pemerintah Aceh yang Sudah dan Belum Bersertipikat Per-Skpa

No	SKPA	Ber sertipikat	STATUS TANAH			Total Proses Pensertipikatan	Terbit Sertipikat	Jumlah Belum Bersertipikat	Total
			Bersertipikat	Belum Bersertipikat					
			Proses Pensertipikatan	Belum Proses	Proses Pensertipikatan				
1	ARPUS	2	2	0	0	2	2	0	2
2	BAITUL MAL	2	0	0	1	1	0	1	3
3	BAPPEDA	1	0	0	1	1	0	1	2
4	BKA	3	0	0	0	0	0	0	3
5	BPBA	2	0	1	0	0	0	1	3
6	BPKA	24	1	9	0	1	1	9	33
7	BPPA	10	0	0	0	0	0	0	10
8	BPSDM	1	0	0	0	0	0	0	1
9	BRA	3	0	0	0	0	0	0	3
10	DESDM	8	0	0	0	0	0	0	8
11	DINKES	6	0	0	4	4	0	4	10
12	DINSOS	7	0	10	8	8	0	18	25
13	DISBUDPAR	11	1	1	5	6	0	6	17
14	DISDIK	461	126	62	314	440	88	376	837
15	DISHUB	24	9	6	6	15	9	12	36
16	DISKOMINSA	5	0	0	1	1	0	1	6
17	DISKOP	2	0	0	0	0	0	0	2
18	DISNAK	5	2	8	4	6	2	12	17
19	DISPORA	7	0	3	0	0	0	3	10
20	DISTANBUN	27	7	14	6	13	7	20	47
21	DKP	30	10	46	23	33	9	69	99
22	DLHK	132	11	35	0	11	10	35	167
23	DP3A	2	1	0	1	2	1	1	3
24	DPDA	13	1	0	0	1	0	0	13
25	DPMG	1	0	1	0	0	0	1	2
26	DPMPTSP	1	1	0	0	1	1	0	1
27	DPRA	2	0	0	1	1	0	1	3
28	DRKA	1	1	0	0	1	0	0	1
29	DSI	0	0	1	0	0	0	1	1
30	INDAG	8	2	6	1	3	2	7	15
31	INSPEKTORAT	1	0	0	0	0	0	0	1
32	KESBANGPOL	1	1	0	0	1	0	0	1
33	KKW	0	0	0	2	2	0	2	2
34	MAA	0	0	0	1	1	0	1	1
35	MOBDUK	10	0	0	1	1	0	1	11
36	MPU	1	0	0	0	0	0	0	1
37	PANGAN	1	1	1	0	1	1	1	2
38	PENGAIRAN	12	6	16	4	10	6	20	32
39	PENGELOLA	98	5	130	15	20	5	145	243
40	PERKIM	2	0	0	3	3	0	3	5
41	PERTANAHAN	1	0	0	0	0	0	0	1
42	PUPR	25	4	96	2	6	4	98	123
43	RSIA	2	0	0	0	0	0	0	2
44	RSJ	3	0	0	0	0	0	0	3
45	RSUDZA	5	0	0	1	1	0	1	6
46	SATPOL PP	1	0	0	0	0	0	0	1
47	SETDA	8	0	3	0	0	0	3	11
	Grand Total	**972**	**192**	**449**	**405**	**597**	**148**	**854**	**1826**

Sumber : Dinas Pertanahan Aceh Tahun 2026

Dari data diatas, jumlah target untuk tahun 2025 adalah sebanyak 467 persil dan realisasi yang telah diajukan dan berproses pada kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota yaitu sebesar 597 persil bidang tanah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah, Selanjutnya dalam pensertipikatan tanah sesuai kebijakan terbaru dari kementrian ATR/ Badan Pertanahan Nasional bentuk sertipikat saat ini mengunakan sertipikat elektronik dan analog.

Dalam rangka pencapaian pensertipikatan tanah Pemerintah Aceh juga di bantu dan difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) melalui Program monitoring, Controling surveillance for of Prevention (MCSP) yang merupakan program yang dibuat KPK untuk pencegahan korupsi diseluruh Indonesia.

D.4. Jumlah Penyelesaian Sengketa Dan Konflik yang Difasilitasi

Penyelesaian konflik pertanahan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur Menurut ketentuan Lampiran Huruf J Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, yaitu penyelesaian permasalahan tanah garapan dalam 1 (satu) kab/kota merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Selanjutnya terdapat pula kewenangan penyelesaian oleh pemerintah pusat melalui ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Kanwil BPN/Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan dalam penyelesaian permasalahan sbb:

Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian (ATR) meliputi:

a) kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, Pemetaan dan/atau perhitungan luas;
b) kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
c) kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
d) kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
e) tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
f) kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
g) kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertipikat pengganti;
h) kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
i) kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
j) penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
k) kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan

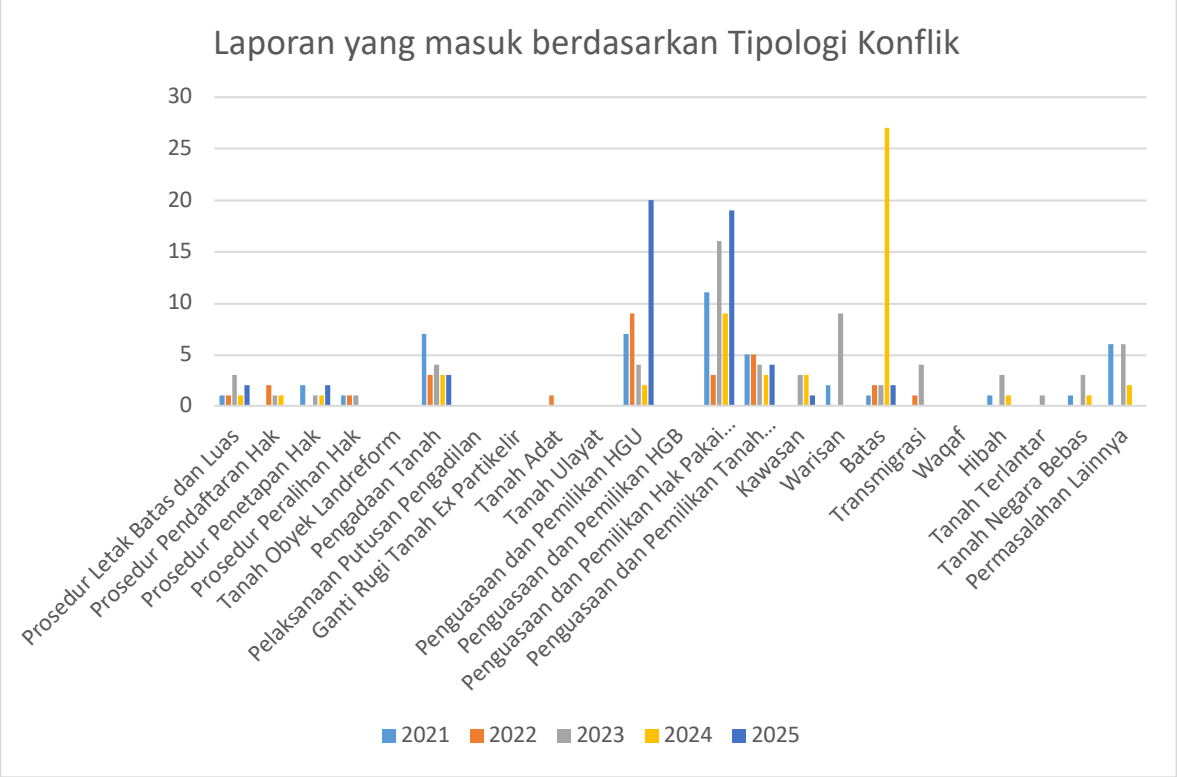

Sumber, Dinas Pertanahan Aceh, 2026

Gambar 2. 55
Jumlah Laporan Sengketa dan Konflik yang Terjadi Berdasarkan Tipologi pada Tahun 2025

Tabel 2. 66
Jumlah Laporan Konflik Tanah Yang Diterima Mulai Tahun 2021 sampai dengan 2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025	Selesai	Tidak Selesai	Total Pelaporan
Lhokseumawe	2	2	3	27			34	**34**
Aceh Singkil	14	8		5	1	21	7	**28**
Nagan Raya	2	1	1		18	3	19	**22**
Bener Meriah	5		7	1	7	15	5	**20**
Subulussalam	2	8	3	3	2	6	12	**18**
Aceh Tamiang	4	1	4	4	3	10	6	**16**
Simeulue	3	1	11		1	1	15	**16**
Aceh Barat			13			2	10	**13**
Aceh Tenggara			13			6	7	**13**
Sabang			1	6	2	1	8	**9**
Aceh Besar		1	4	1	2	6	2	**8**
Aceh Timur	6				2	4	4	**8**
Aceh Utara	1	1	2	1	1	6		**6**
Bireuen	2	1	2		1	3	3	**6**

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025	Selesai	Tidak Selesai	Total Pelaporan
Pidie	3	1		2		3	3	**6**
Gayo Lues					5		5	**5**
Langsa		2		3			5	**5**
Aceh Selatan					4		4	**4**
Aceh Tengah		1	1	1	1	2	2	**4**
Aceh Barat Daya	1				2	1	2	**3**
Banda Aceh					1		1	**1**
Aceh Jaya								
Pidie Jaya								

Sumber, Dinas Pertanahan Aceh, 2026

Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanahan Aceh telah melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi terhadap konflik tanah yang dilaporkan. Tindaklanjut tersebut dilakukan dengan cara meminta Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk percepatan penyelesaian laporan konflik yang diterima. Selain itu, Dinas Peranahan Aceh inten melakukan pembinaan dan pemahaman mekanisme penyelesaian melalui kegiatan penyuluhan hukum terhadap aparatur pemerintah yang menangani pertanahan. Dinas Pertanahan Aceh juga inten melakukan koordinasi dengan pihak Kanwil BPN Aceh dalam rangka percepatan penyelesaian laporan konflik pertanahan yang menjadi kewenangan Kanwil BPN Aceh.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanahan Aceh telah melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi terhadap konflik tanah yang dilaporkan. Tindaklanjut tersebut dilakukan dengan cara meminta Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk percepatan penyelesaian laporan konflik yang diterima. Selain itu, Dinas Peranahan Aceh inten melakukan pembinaan dan pemahaman mekanisme penyelesaian melalui kegiatan penyuluhan hukum terhadap aparatur pemerintah yang menangani pertanahan. Dinas Pertanahan Aceh juga inten melakukan koordinasi dengan pihak Kanwil BPN Aceh dalam rangka percepatan penyelesaian laporan konflik pertanahan yang menjadi kewenangan Kanwil BPN Aceh.

D.5. Terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Pertanahan

Informasi yang terkait dengan lahan menjadi sangat penting dalam pengembangan lahan tersebut secara rapi, adil dan penggunaan yang tepat. Maka dibutuhkan Sistem Informasi Pertanahan yang efektif, efisien dan terintegrasi sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan reforma agraria.

Dalam rangka perencanaan pembangunan dan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, diperlukan pelayanan pemberian informasi yang lebih baik melalui

pembangunan dan pengembangan sistem informasi. Dalam hal ini adalah memberikan layanan informasi tentang pertanahan melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan manajemen pertanahan (SIMTANAH),

Sistem pengelolaan informasi dan manajemen pertanahan (SIMTANAH) adalah sistem informasi yang mengelola dokumen pertanahan secara digital. Sistem ini mendukung lembaga pemerintah dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan memberikan layanan informasi dalam perencanaan mengenai pertanahan secara up to date. SIMTANAH membantu mengefektifkan pengelolaan dokumen dan informasi pertanahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara terpadu dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Aplikasi ini adalah aplikasi yang mengelola informasi tentang pertanahan baik berupa peta (gambar), grafik, table, teks, dan informasi pertanahan lainnya berbasis web online sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi SIMTANAH dimulai dengan penyusunan Grand Design/Road Map, Penyusunan Perencanaan Aplikasi dan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola pada tahun 2019. Pembangunan aplikasi SIMTANAH dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh pada tahun 2020.

Informasi yang terkait dengan lahan menjadi sangat penting dalam pengembangan lahan tersebut secara rapi, adil dan penggunaan yang tepat. Maka dibutuhkan Sistem Informasi Pertanahan yang efektif, efisien dan terintegrasi sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan reforma agraria.

Dalam rangka perencanaan pembangunan dan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, diperlukan pelayanan pemberian informasi yang lebih baik melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi. Dalam hal ini adalah memberikan layanan informasi tentang pertanahan melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan manajemen pertanahan (SIMTANAH),

Sistem pengelolaan informasi dan manajemen pertanahan (SIMTANAH) adalah sistem informasi yang mengelola dokumen pertanahan secara digital. Sistem ini mendukung lembaga pemerintah dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan memberikan layanan informasi dalam perencanaan mengenai pertanahan secara up to date. SIMTANAH membantu mengefektifkan pengelolaan dokumen dan informasi pertanahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara terpadu dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Aplikasi ini adalah aplikasi yang mengelola informasi tentang pertanahan baik berupa peta (gambar), grafik, table, teks, dan informasi pertanahan lainnya berbasis web online sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi SIMTANAH dimulai dengan penyusunan Grand Design/Road Map, Penyusunan Perencanaan Aplikasi dan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola pada tahun 2019. Pembangunan aplikasi SIMTANAH dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh pada tahun 2020.

Tabel 2. 67
Data Penyerahan Hak Akses Sistem Informasi Manajemen Pertanahan sd Tahun 2025

No	PEMEGANG HAK AKSES	HAK AKSES		KONDISI SAAT INI	
1	Dinas Pertanahan Kota Subulussalam	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
2	Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
3	Dinas Pertanahan Kabupaten Gayo Lues	1	HAK AKSES	1	HAK AKSES
4	Dinas Pertanahan Kabupaten Bireun	1	HAK AKSES	1	HAK AKSES
5	Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
6	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Timur	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
7	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
8	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
9	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
10	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
11	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
12	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
13	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara	1	HAK AKSES	1	HAK AKSES
14	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat	1	HAK AKSES	1	HAK AKSES
15	Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
16	Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue	1	HAK AKSES	1	HAK AKSES
17	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
18	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
19	Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
20	Dinas Pertanahan Kota Sabang	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
21	Dinas Pertanahan Kota Langsa	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
22	Bagian Pemerintahan Kabupaten Pidie	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
23	Bagian Pemerintahan Kota Banda Aceh	1	HAK AKSES	0	HAK AKSES
JUMLAH		23	HAK AKSES	5	HAK AKSES

Sumber Data : Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan Aceh, Tahun 2024

D.6. Luas Tanah Objek Reforma Agraria Yang Diredistribusi

Tanah negara dan tanah HGU yang diindikasikan terlantar menjadi salah satu objek TORA yang akan diinventarisasi pengunaan dan penguasaannya dan selanjutkan akan diredistribusi dan dilegalisasi untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mempercepat pelaksanaan TORA, pemerintah Aceh akan melakukan 3 (tiga) tahapan yaitu; 1. Pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial, 2. Redistribusi dan Legalisasi TORA dan, 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel 2. 68
Data Pelepasan Kawasan Hutan Tanah Obek Reforma Agraria Melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sd Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Luas Indikatif (ha)	Persetujuan Pola Penyelesaian PTKH oleh Menteri LHK				
			Nomor	Tanggal	Perubahan Batas KH (ha)	Perhutanan Sosial (ha)	Luas (ha)
1	Aceh Tamiang	6.351,40	S.505/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2019	26 Juli 2019	1.326,99	47,54	1.374,53
2	Aceh Timur	13.114,26	S.505/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2019	26 Juli 2019	139,03	178,06	317,09
3	Kota Langsa	813,34	S.505/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2019	26 Juli 2019	7,51	-	7,51
4	Aceh Barat	66,45	-		28,01		
5	Kota Sabang	68,48	S.373/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2021	21 Oktober 2021	27,17	4,81	31,98
6	Aceh Utara	189,59	S.373/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2021	21 Oktober 2021	78,77	88,77	167,54
7	Aceh Besar	8.927,75	S.128/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2022	30 Mei 2022	373,85	2.756,14	3.129,99
					1.981,33	**3.075,32**	**5.028,64**

Sumber Data : Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan wilayah XVIII Aceh, Tahun 2024

Tabel 2. 69
Data Tanah Objek Reforma Agraria Melalui Penataan Aset dan Penataan Akses sd Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Penataan Aset				Penataan Akses		
		PTSL		Redistribusi Tanah		2021	2022	
		2021	2022	2021	2022			
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kota Banda Aceh	500	-	-	-	-	-	
2	Kota Sabang	500	66	-	-	-	-	
3	Kab. Aceh Besar	6.150	142	500	1	300	300	Belum ada Data
4	Kab. Aceh Barat	4.500	400	500	3	-	300	Belum ada Data
5	Kab. Aceh Selatan	3.500	1.308	-	498	-	-	
6	Kab. Pidie	4.475	205	500	81	-	-	
7	Kab. Aceh Utara	4.174	116	1.500	-	-	300	Belum ada Data
8	Kab. Aceh Timur	7.000	288	1.000	-	200	300	Belum ada Data
9	Kab. Aceh Tengah	3.000	194	500	-	500	300	Belum ada Data
10	Kab. Aceh Tenggara	3.000	61	1.250	-	-	-	
11	Kab. Bireuen	6.000	-	350	1.000	100	300	Belum ada Data
12	Kab. Aceh Singkil	2.500	1.100	-	-	-	-	
13	Kab. Simeulue	3.000	915	-	125	-	-	
14	Kab. Nagan Raya	3.000	109	1.255	2	-	200	Belum ada Data
15	Kab. Aceh Tamiang	2.884	-	550	-	300	300	Belum ada Data
16	Kota Lhokseumawe	2.000	33	-	-	-	-	
17	Kab. Aceh Jaya	1.600	-	500	230	425	200	Belum ada Data
18	Kota Langsa	697	-	-	-	-	-	
19	Kab. Aceh Barat Daya	2.625	-	-	-	-	-	
20	Kab. Gayo Lues	1.526	8	-	-	-	-	
21	Kab. Pidie Jaya	2.500	59	508	-	500	500	Belum ada Data
22	Kab. Bener Meriah	2.000	343	2.000	-	300	500	Belum ada Data
23	Kota Subulussalam	2.033	55	1.095	202	-	-	
Total		69.164	5.402	12.008	2.142	2.625	3.500	-

Sumber Data : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Tahun 2023 (termutakhir)

Tanah negara dan tanah HGU yang diindikasikan terlantar menjadi salah satu objek TORA yang akan diinventarisasi pengunaan dan penguasaannya dan selanjutkan akan diredistribusi dan dilegalisasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Guna mempercepat pelaksanaan TORA, pemerintah Aceh akan melakukan 3 (tiga) tahapan yaitu; 1. Pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial, 2. Redistribusi dan Legalisasi TORA dan, 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel 2. 70
Data Pelepasan Kawasan Hutan Tanah Obek Reforma Agraria Melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sd Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Luas Indikatif (ha)	Persetujuan Pola Penyelesaian PTKH oleh Menteri LHK					
			Nomor	Tanggal	Perubahan Batas KH (ha)	Perhutanan Sosial (ha)	Kemitraan Konservasi (ha)	Luas (ha)
1	Aceh Tamiang	6.543,95	S.505/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2019	26 Juli 2019	1.326,99	47,54		1.374,53
2	Aceh Timur	10.094,08	S.505/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2019	26 Juli 2019	139,03	178,06		317,09
3	Kota Langsa	439,59	S.505/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2019	26 Juli 2019	7,51	-		7,51
4	Aceh Barat	66,45	-		28,01			
5	Kota Sabang	65,98	S.373/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2021	21 Oktober 2021	27,17	4,81		31,98
6	Aceh Utara	178,37	S.373/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2021	21 Oktober 2021	78,77	88,77		167,54
7	Aceh Besar	434,35	S.128/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2022	30 Mei 2022	373,85	2.756,14		3.129,99
8	Aceh Tengah*	9.136,56	S.175/MENLHK/PKTL/PLA.2/7/2023	25 Juli 2023	5432,55	13696,93	1516,62	20646,1
9	Aceh Singkil*	8.635,21						
10	Bener Meriah*	2.343,26						
11	Aceh Barat Daya	13,79						
12	Aceh Jaya	1.341,00						
13	Aceh Selatan	497,73						
14	Aceh Tenggara	2.010,79						
15	Bireuen	165,15						
16	Gayo Lues	1.991,88						
17	Naganraya	3.524,84						
18	Pidie	5.502,69						
19	Pidie Jaya	1,02						
20	Simeulue	1.639,74						
21	Subulussalam	5.569,92						
	Total	**60.196,37**			**7.413,88**	**16.772,25**	**1.516,62**	**25.674,74**

Sumber Data : Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan wilayah XVIII Aceh, Tahun 2024

Tabel 2. 71
Data Tanah Objek Reforma Agraria Melalui Penataan Aset sd Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Penataan Aset																TOTAL	
		Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)								Redistribusi Tanah									
		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Aceh Selatan	3,500	3,500	4,000	4,000	12,000	12,000	2,100	1,962	-	-	1,000	1,000	500	500	1000	-	24,100	22,962
2	Aceh Besar	6,150	6,150	9,000	9,000	5,500	5,500	8,144	447	500	500	2,000	2,000	500	500	500	-	32,294	24,097
3	Pidie Jaya	2,500	2,500	2,799	2,799	2,000	2,000	2,100	257	500	508	1,000	1,000	200	200	400	-	11,499	9,264
4	Pidie	4,475	4,475	4,083	4,083	4,000	4,000	5,800	1,404	500	500	1,000	1,000	500	500	1000	-	21,358	15,962
5	Bireuen	6,000	6,000	9,179	9,179	6,819	6,819	7,700	116	350	350	1,000	1,000	500	500	1000	-	32,548	23,964
6	Aceh Jaya	1,600	1,600	2,300	2,300	2,500	2,500	1,800	247	500	500	1,500	1,500	500	500	800	-	11,500	9,147
7	Aceh Barat	4,500	4,500	2,600	2,600	4,500	4,500	2,300	16	500	500	1,500	1,500	500	500	1000	-	17,400	14,116
8	Bener Meriah	2,000	2,000	4,200	4,200	6,000	6,000	2,700	92	2,000	2,000	2,500	2,500	1,000	1,000	1500	-	21,900	17,792
9	Aceh Utara	4,174	4,174	3,000	3,000	2,000	2,000	6,700	378	1,500	1,502	2,000	2,000	800	800	1000	-	21,174	13,854
10	Aceh Tengah	3,000	3,000	6,368	6,368	6,000	6,000	2,700	527	500	500	2,000	2,000	500	500	1000	-	22,068	18,895
11	Aceh Timur	7,000	7,000	8,000	8,000	3,941	3,941	8,300	102	1,000	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1000	-	31,741	22,543
12	Gayo Lues	1,576	1,526	885	885	2,192	2,192	450	37	-	-	500	500	500	500	500	-	6,603	5,640
13	Nagan Raya	3,000	3,000	2,418	2,369	5,000	5,000	2,300	83	1,255	1,255	2,500	2,500	500	500	800	-	17,773	14,707
14	Aceh Singkil	2,500	2,500	4,527	4,527	4,119	4,119	2,500	492	-	-	800	800	500	500	1000	-	15,946	12,938
15	Aceh Barat Daya	2,625	2,625	3,105	3,105	3,274	3,274	3,200	27	-	-	500	500	750	750	500	-	13,954	10,281
16	Aceh Tamiang	3,700	2,884	2,900	2,900	4,000	4,000	3,000	719	550	550	1,500	1,500	500	500	1000	-	17,150	13,053
17	Langsa	700	697	1,300	1,300	1,011	1,011	2,300	123	-	-	-	-	250	250	-	-	5,561	3,381
18	Aceh Tenggara	3,000	3,000	1,804	1,804	2,000	2,000	3,200	173	1,250	1,250	1,500	1,500	500	500	500	-	13,754	10,227
19	Simeulue	3,000	3,000	4,750	4,750	4,215	4,215	6,100	463	-	-	1,000	1,000	-	-	500	-	19,565	13,428
20	Subulussalam	2,000	2,033	1,427	1,427	1,500	1,500	1,500	219	1,095	1,095	700	700	-	-	-	-	8,222	6,974
21	Sabang	500	500	500	500	500	500	600	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100	-
22	Lhokseumawe	2,000	2,000	2,045	2,045	1,000	1,000	3,000	193	-	-	-	-	-	-	-	-	8,045	-
23	Banda Aceh	500	500	782	782	300	300	400	90	-	-	-	-	-	-	-	-	1,982	-
TOTAL		**70,000**	**69,164**	**81,972**	**81,923**	**84,371**	**84,371**	**78,894**	**8,182**	**12,000**	**12,010**	**26,000**	**26,000**	**10,000**	**10,000**	**15,000**	**-**	**378,237**	**283,225**

Sumber Data : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Tahun 2024 (termutakhir)

Tabel 2. 72
Data Tanah Objek Reforma Agraria Melalui Penataan Akses Sampai Dengan Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Penataan Akses								TOTAL	
		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Aceh Selatan	-	-	-	-	100	100	500	-	600	100
2	Aceh Besar	300	300	300	300	400	400	1,500	-	2,500	1,000
3	Pidie Jaya	500	500	500	500	300	300	400	-	1,700	1,300
4	Pidie	-	-	-	-	400	400	1,500	-	1,900	400
5	Bireuen	100	100	300	300	300	300	1,500	-	2,200	700
6	Aceh Jaya	425	425	200	200	100	100	200	-	925	725
7	Aceh Barat	-	-	300	300	300	300	800	-	1,400	600
8	Bener Meriah	500	500	500	500	300	300	800	-	2,100	1,300
9	Aceh Utara	-	-	300	300	400	400	1,500	-	2,200	700
10	Aceh Tengah	300	300	300	300	200	200	900	-	1,700	800
11	Aceh Timur	200	200	300	300	400	400	1,500	-	2,400	900
12	Gayo Lues	-	-	-	-	100	100	200	-	300	100
13	Nagan Raya	-	-	200	200	400	400	500	-	1,100	600
14	Aceh Singkil	-	-	-	-	100	100	400	-	500	100
15	Aceh Barat Daya	-	-	-	-	400	400	500	-	900	400
16	Aceh Tamiang	300	300	300	300	400	400	500	-	1,500	1,000
17	Langsa	-	-	-	-	-	-	200	-	200	-
18	Aceh Tenggara	-	-	-	-	100	100	200	-	300	100
19	Simeulue	-	-	-	-	400	400	500	-	900	400
20	Subulussalam	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-
21	Sabang	-	-	-	-	400	400	300	-	700	400
22	Lhokseumawe	-	-	-	-	400	400	300	-	700	400
23	Banda Aceh	-	-	-	-	100	100	200	-	300	100
TOTAL		2,625	2,625	3,500	3,500	6,000	6,000	15,000	-	27,125	12,125

Sumber Data : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Tahun 2025 (termutakhir)

E. Lingkungan Hidup

E.1. Tersusunnya RPPLH Provinsi

Dalam Dokumen Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), diamanatkan agar setiap kab/kota dapat menyusun dokumen RPPLH yang merupakan dasar dalam perencanaan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni inventarisasi lingkungan hidup, Pengolahan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup, Analisis Data dan Informasi, Penentuan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahapan penyusunan RPPLH Aceh sebagaimana pada Gambar 2.56.

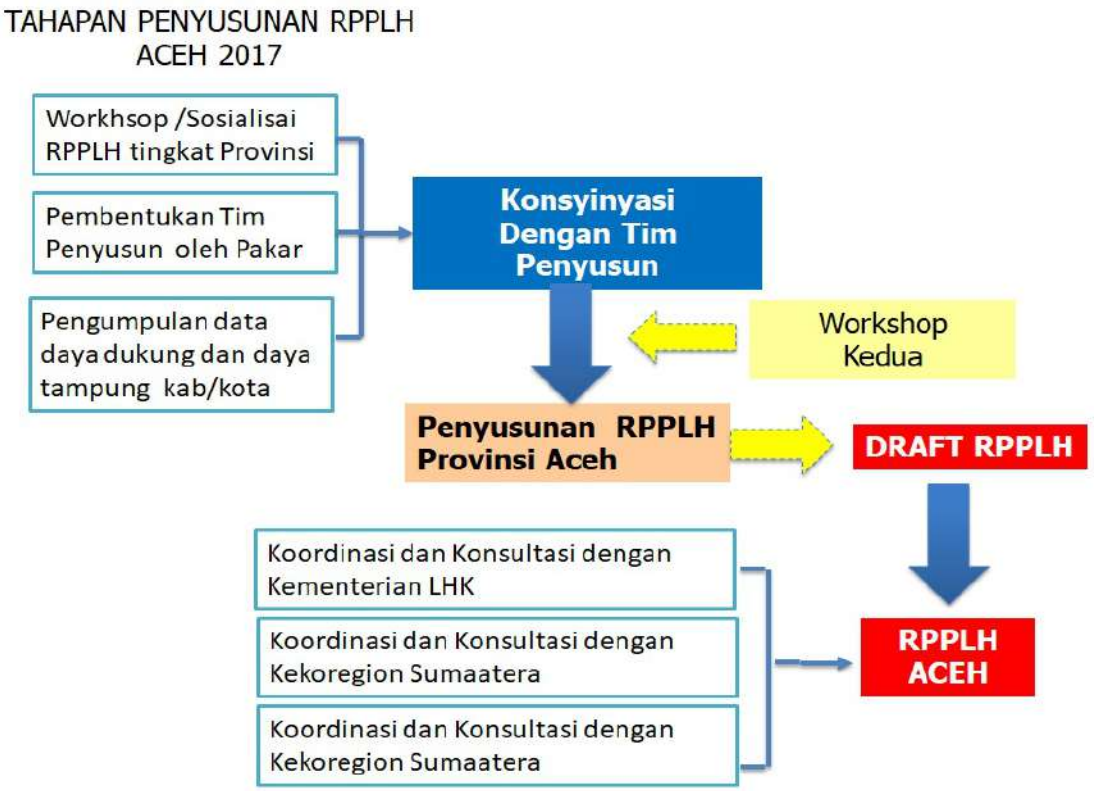

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2017

Gambar 2. 56
Tahapan Penyusunan RPPLH Aceh

Sumber data dan informasi inventarisasi lingkungan hidup yang digunakan di dalam penyusunan RPPLH adalah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), 5 (lima) tahun terakhir, profil daerah, Daerah Dalam Angka, 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 3 (tiga) tahun terakhir atau Data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup, Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Ta hidup mpung dan Data dan informasi kehutanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mengingat pentingnya dokumen RPPLH ini, percepatan penyelesaian dokumen ini sangat dibutuhkan. Sampai saat ini dokumen RPPLH kab/kota masih banyak belum tersedia.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup secara menyeluruh melalui integrasi beberapa komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKLH tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kondisi lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup serta dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis IKLH Provinsi Aceh Tahun 2025, diperoleh nilai IKLH sebesar

83,29, yang berada pada kategori "Sedang", serta menunjukkan peningkatan dibandingkan

tahun sebelumnya sebesar 79,66. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum kualitas lingkungan hidup di Aceh mengalami perbaikan yang cukup signifikan, meskipun belum sepenuhnya optimal dan masih terdapat ketimpangan antar wilayah.

Secara rinci, komponen penyusun IKLH menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda. IKA sebesar 76,97 masih berada pada kategori "Sedang" dan menjadi faktor pembatas utama dalam peningkatan IKLH. Kondisi ini mencerminkan masih tingginya tekanan terhadap sumber daya air, baik akibat aktivitas domestik, pertanian, maupun perubahan penggunaan lahan. IKU sebesar 85,88 berada pada kategori "Baik" dan relatif stabil, didukung oleh kondisi tutupan hutan yang luas dan rendahnya aktivitas industri berat. IKL sebesar 86,24 juga berada pada kategori "Baik" dan menjadi indikator yang paling stabil, meskipun menunjukkan polarisasi antara wilayah hutan dan wilayah perkotaan. Sementara itu, IKAL sebesar 80,80 berada pada kategori "Sedang", dengan keterbatasan data spasial yang masih menjadi kendala dalam analisis yang lebih rinci.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKAL) Tahun 2020-2024

Indeks	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
IKA	57,14	60,41	61,30	67,57	76,97
IKU	89,63	90,62	90,94	91,93	85,88
IKL	76,52	76,24	76,51	60,29	86,24
IKAL	76,51	89,20	86,75	92,15	80,80
IKLH	75,54	78,29	78,53	79,46	82,39

Sumber : DLHK Aceh, Tahun 2026

E.2. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi

Sesuai dengan amanah UU Nomor 32 tahun 2009, RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Pasal 10, Ayat 5). Diharapkan jika dokumen RPPLH tersedia maka bisa langsung diimplementasikan ke dalam RPJM Daerah sehingga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Kondisi saat ini dengan tersusunnya Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat menjadi landasan acuan seluruh perencanaan mempedomani Qanun RPPLH.

E.3. Tersedianya dokumen KLHS Provinsi

Landasan hukum pelaksanaan KLHS tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut undang-undang tersebut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sesuai UU PPLH Pasal 15 Ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau Kebijakan Rencana Program (KRP).

Adapun tujuan KLHS adalah:

1) Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan melalui penyusunan dokumen KLHS;
2) Memperkuat proses pengambilan keputusan atas KRP;
3) Mengarahkan, mempertajam fokus, dan membatasi lingkup penyusunan dokumen lingkungan yang dilakukan pada tingkat rencana dan pelaksanaan usaha/kegiatan.

Sampai saat ini dokumen KLHS yang sudah tersedia adalah KLHS RPJPA, KLHS RPJMA dan KLHS RTRWA. Sementara KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) juga sudah tersedia.

E.4. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi

Tujuan KLHS adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, Rencana dan atau Program. KLHS menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan atau pembangunan dalam suatu wilayah.

Penyelenggaraan KLHS sangat penting untuk menjamin kebijakan dan rencana program yang diimplementasikan telah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. KLHS RPJMA memberikan pilihan scenario pembangunan di Aceh perlu disertai dengan intervensi kebijakan dan rencana aksi baik yang bersifat mitigasi maupun adaptasi antara lain: (a) lebih fokus pada upaya-upaya intensifikasi, (b) menekan upaya ekstensifikasi, utamanya yang akan menyebabkan alih fungsi lahan hutan, dan (c) menyiapkan sejumlah input teknologi kreatif sebagai upaya meningkatkan daya dukung lingkungan hidup sumber daya alam.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan sebuah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan yang dilakukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kondisi kepemilikan penduduk yang telah memiliki KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Akta Nikah tahun 2021-2025 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.73. sebagai berikut

Tabel 2. 73
Kepemilikan KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Nikah Penduduk Aceh

No.	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Penduduk yang Telah Memiliki KTP-Elektronik	3,599,123	97,45	3,668,899	98,12	3,599,123	97,45	3,668,899	98,12	3,860,533	97.81
2	Kepemilikan Akta Kelahiran	1,776,750	93,83	1,755,114	96,63	1,776,750	93,83	1,755,114	96,63	1,784,120	97.65
3	Kepemilikan Akta Nikah	1.122.897	48,81	1.379.828	58,55	1.122.897	48,81	1.379.828	58,55	1.380.425	49,75
4	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	728,139	42,19	745,125	42,42	728,139	42,19	745,125	42,42	1,005,284	58.40

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2025

Berdasarkan Tabel di atas selama periode 2021-2025 penduduk yang telah memiliki KTP- elektronik dan kepemilikan akte kelahiran terus mengalami peningkatan, hal ini menggambarkan bahwa sistem administrasi kependudukan sudah tertata baik dan masyarakat lebih mudah mengakses berbagai layanan kependudukan. Adapun rendahnya kepemilikan akta nikah dan kepemilikan kartu identitas anak terjadi karena rendahnya kesadaran, praktik pernikahan tidak tercatat, akses layanan terbatas, serta kendala administratif dan ekonomi.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Pemberdayaan masyarakat dan gampong merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah yang berperan dalam mendorong kemandirian desa, mengurangi kesenjangan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan kebijakan Indeks Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, sebagai instrumen untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemandirian desa secara

komprehensif. Sejalan dengan kebijakan terseut, perkembangan status desa dan kemandirian desa di Aceh selama periode tahun 2021-2025 menunjukkan tren yang semakin membaik sebagaimana disajikan pada gambar 2.57 berikut :

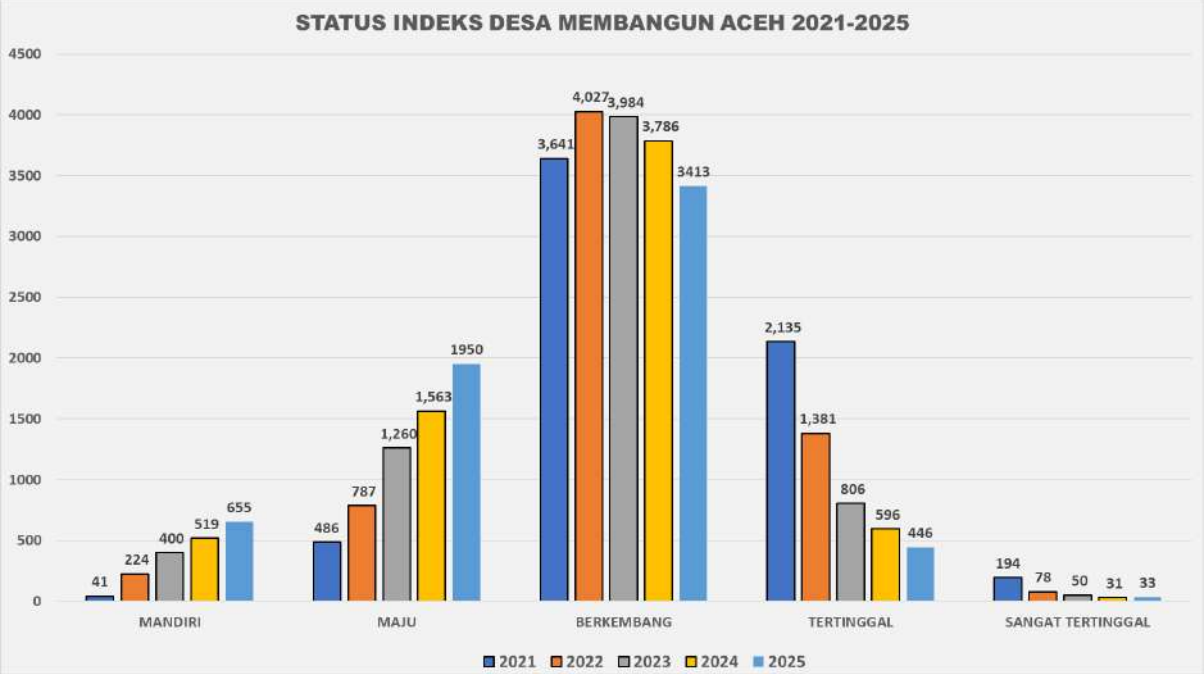

Sumber : DPMG Aceh, 2026

Gambar 2. 57
Status Desa di Aceh Tahun 2021-2025

Dari Gambar 2.1. diatas, dapat dilihat bahwa Perkembangan jumlah desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal mengalami penurunan yang signifikan. Desa sangat tertinggal menurun dari 194 desa pada tahun 2021 menjadi 33 desa pada tahun 2025, sedangkan desa tertinggal berkurang dari 2.135 desa menjadi 446 desa. Penurunan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan desa yang didukung oleh kebijakan pemerintah serta alokasi pendanaan yang memadai.

Sebaliknya, jumlah desa dengan status maju dan mandiri mengalami peningkatan yang cukup pesat. Desa maju meningkat dari 486 desa pada tahun 2021 menjadi 1.950 desa pada tahun 2025, sementara desa mandiri meningkat dari 41 desa menjadi 655 desa pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan adanya transformasi struktur pembangunan desa menuju kondisi yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya kapasitas ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan desa.

Sementara itu, desa berkembang mengalami fluktuasi dan cenderung menurun pada tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya pergeseran status menuju desa maju dan mandiri. Dengan demikian, status desa di Aceh bergerak ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan harapan.

Untuk melihat lebih rinci kondisi tersebut pada tingkat wilayah, rincian status desa menurut kabupaten/kota tahun 2025 disajikan pada table berikut :

Tabel 2. 74
Status Desa Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA	STATUS INDEKS DESA TAHUN 2025					
			BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	TANPA STATUS
1	ACEH BARAT	322	58.39%	18.01%	8.39%	14.29%	0.62%	0.31%
2	ACEH BARAT DAYA	152	56.58%	31.58%	5.92%	5.92%	0.00%	0.00%
3	ACEH BESAR	604	48.18%	38.91%	11.75%	0.99%	0.00%	0.17%
4	ACEH JAYA	172	66.86%	15.12%	6.98%	11.05%	0.00%	0.00%
5	ACEH SELATAN	260	61.54%	13.08%	5.00%	17.31%	3.08%	0.00%
6	ACEH SINGKIL	116	37.07%	31.90%	11.21%	15.52%	4.31%	0.00%
7	ACEH TAMIANG	216	37.04%	34.26%	18.52%	9.72%	0.00%	0.46%
8	ACEH TENGAH	295	44.41%	25.76%	27.80%	2.03%	0.00%	0.00%
9	ACEH TENGGARA	385	40.78%	54.29%	3.12%	1.82%	0.00%	0.00%
10	ACEH TIMUR	513	46.00%	40.74%	8.58%	4.48%	0.19%	0.00%
11	ACEH UTARA	852	65.38%	19.72%	2.00%	12.21%	0.70%	0.00%
12	BENER MERIAH	232	38.36%	29.31%	24.14%	7.76%	0.43%	0.00%
13	BIREUEN	609	58.13%	27.59%	3.94%	9.36%	0.99%	0.00%
14	GAYO LUES	136	50.74%	33.82%	4.41%	11.03%	0.00%	0.00%
15	KOTA BANDA ACEH	90	1.11%	6.67%	92.22%	0.00%	0.00%	0.00%
16	KOTA LANGSA	66	28.79%	43.94%	25.76%	1.52%	0.00%	0.00%
17	KOTA LHOKSEUMAWE	68	11.76%	45.59%	42.65%	0.00%	0.00%	0.00%
18	KOTA SABANG	18	0.00%	44.44%	55.56%	0.00%	0.00%	0.00%
19	KOTA SUBULUSSALAM	82	25.61%	35.37%	30.49%	7.32%	1.22%	0.00%
20	NAGAN RAYA	222	48.20%	35.59%	10.36%	5.86%	0.00%	0.00%
21	PIDIE	730	70.27%	24.38%	2.47%	2.60%	0.27%	0.00%
22	PIDIE JAYA	222	38.74%	50.90%	8.56%	1.35%	0.45%	0.00%
23	SIMEULUE	138	73.91%	15.22%	3.62%	7.25%	0.00%	0.00%

Berdasarkan tabel 2.74 di atas terlihat bahwa sebagian besar desa di kab/kota di Aceh masih didominasi oleh kategori berkembang, meskipun secara bertahap telah mengalami pergeseran ke kategori maju dan mandiri. Namun demikian masih terdapat beberapa daerah yang memiliki desa dengan status sangat tertinggal dalam persentase kecil, antara lain Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Utara, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat wilayah yang memerlukan perhatian khusus melalui pendekatan pembangunan berbasis wilayah dan intervensi kebijakan yang lebih terarah.

Di sisi lain, Kota Banda Aceh dan Kota Sabang telah menunjukkan capaian yang optimal, di mana seluruh desa/kelurahan berada pada kategori maju dan mandiri. Keberhasilan ini mencerminkan kuatnya kapasitas kelembagaan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta optimalisasi potensi lokal dalam mendukung pembangunan desa. Keberhasilan ini menjadi controh praktik baik yang dapat direplikasi dalam pengembangan desa di wilayah lainnya.

Selanjutnya dari aspek pendanaan, dukungan terhadap pembangunan desa juga tercermin dari alokasi dana desa yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel 2.2. berikut :

Tabel 2. 75
Alokasi Dana Desa di Aceh Tahun 2020-2025

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH GAMPONG	TAHUN ANGGARAN 2020	TAHUN ANGGARAN 2021	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2023	TAHUN ANGGARAN 2024	TAHUN ANGGARAN 2025
PROVINSI ACEH		6,497	4,980,088,180,000	4,986,622,278,000	4,669,371,747,000	4,761,060,876,000	4,958,897,983,000	4,284,356,889,762
1	ACEH SELATAN	260	205,268,050,000	205,268,050,000	194,090,688,000	195,811,103,000	196,339,440,000	165,213,857,054
2	ACEH TENGGARA	385	284,561,253,000	284,561,253,000	265,902,419,000	270,051,986,000	281,372,115,000	267,679,738,500
3	ACEH TIMUR	513	387,787,938,000	387,787,938,000	373,119,830,000	376,847,461,000	395,019,867,000	340,806,452,406
4	ACEH TENGAH	295	223,350,548,000	223,350,548,000	209,831,057,000	212,942,662,000	222,523,597,000	199,213,363,264
5	ACEH BARAT	321	250,632,328,000	250,632,328,000	234,408,383,000	224,045,853,000	236,111,096,000	206,061,903,082
6	ACEH BESAR	603	437,555,848,000	437,555,848,000	415,515,724,000	422,285,475,000	440,931,838,000	386,221,429,920
7	PIDIE	730	524,715,756,000	524,715,756,000	494,424,865,000	525,206,131,000	538,343,872,000	399,620,803,158
8	ACEH UTARA	852	626,338,212,000	626,338,212,000	607,509,747,000	620,592,204,000	650,152,994,000	528,434,838,802
9	SIMEULUE	138	119,684,330,000	119,684,330,000	107,641,709,000	101,844,034,000	106,573,474,000	88,154,032,110
10	ACEH SINGKIL	116	108,080,283,000	108,080,283,000	96,138,732,000	92,832,222,000	96,528,106,000	91,895,014,000
11	BIREUEN	609	455,523,085,000	455,523,085,000	442,297,899,000	446,168,583,000	462,263,930,000	418,615,242,318
12	ACEH BARAT DAYA	152	119,823,288,000	119,823,288,000	111,846,686,000	113,155,818,000	118,693,008,000	89,348,729,746
13	GAYO LUES	136	114,193,644,000	114,381,709,000	101,044,300,000	105,937,563,000	110,597,264,000	104,792,202,360
14	ACEH JAYA	172	135,065,795,000	135,065,795,000	118,845,057,000	121,957,443,000	128,024,164,000	118,003,100,600
15	NAGAN RAYA	222	175,871,395,000	175,871,395,000	161,264,111,000	165,760,447,000	172,968,346,000	136,209,907,600
16	ACEH TAMIANG	215	171,672,967,000	171,672,967,000	163,372,347,000	166,158,308,000	177,156,461,000	161,882,032,600
17	BENER MERIAH	232	182,834,539,000	182,834,539,000	167,049,012,000	164,707,235,000	173,100,709,000	163,259,791,960
18	PIDIE JAYA	222	165,862,465,000	165,862,465,000	151,746,896,000	163,021,845,000	169,168,059,000	159,206,462,000
19	KOTA BANDA ACEH	90	75,977,398,000	77,702,442,000	70,100,703,000	73,484,769,000	77,088,372,000	75,522,500,778
20	KOTA SABANG	18	25,156,301,000	26,798,027,000	14,179,325,000	15,014,733,000	15,636,770,000	14,349,540,488
21	KOTA LHOKSEUMAWE	68	60,285,819,000	61,983,149,000	53,928,333,000	56,545,740,000	62,402,165,000	52,451,077,418
22	KOTA LANGSA	66	59,424,404,000	60,706,341,000	53,156,136,000	59,732,506,000	58,843,788,000	56,150,618,958
23	KOTA SUBULUSSALAM	82	70,422,534,000	70,422,530,000	61,957,788,000	66,956,755,000	69,058,548,000	61,264,250,640

Berdasarkan Tabel 2.2, Alokasi Dana Desa di Aceh secara umum menunjukkan tren meningkat, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2023 hingga 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Pidie merupakan daerah dengan alokasi Dana Desa terbesar, sejalan dengan jumlah desa yang lebih banyak.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial, ekonomi dan kependudukan. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk (migrasi).

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Aceh selama periode 2019-2023 terus menunjukkan fluktuasi, yaitu dari 1,93 pada tahun 2019 menjadi 1,54

pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Aceh masih terkendali. *Total Fertility Rate (TFR)* Aceh selama periode 2019-2021 mengalami peningkatan, tahun 2019 TFR Aceh sebesar 2,63 persen meningkat menjadi 2,68 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2023 TFR Aceh mengalami penurunan menjadi 2,32 persen. Cakupan peserta KB Aktif tahun 2019 sebanyak 404.527 orang, pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 407.537 orang. Tetapi pada tahun 2023 cakupan peserta KB Aktif kembali mengalami peningkatan menjadi 525.096 orang.

Tabel 2. 76
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Aceh Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,93	1,56	1,10	1,37	1,54
Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata anak per wanita	2,63	2,68	2,68	2,42	2,32
Cakupan Peserta KB Aktif	Orang	404.527	519.709	557.901	407.537	525.096

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2024

I. Perhubungan

I.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum berupa angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara pada Tahun 2025 secara keseluruhan mengalami tren peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya khususnya pada arus penumpang angkutan laut, sedangkan jumlah arus penumpang yang menggunakan transportasi udara dan darat cenderung menurun meski tidak signifikan. Tren peningkatan jumlah arus penumpang yang menggunakan angkutan umum di Aceh seiring dengan peningkatan frekuensi penyediaan jasa layanan angkutan serta peningkatan dalam pemenuhan aspek standar pelayanan minimal, meski di beberapa bulan terakhir di tahun 2025 sempat mengalami penurunan akibat adanya bencana hidrometeorologi Aceh, di mana hal yang sama juga berdampak pada kinerja sub sektor moda transportasi lainnya akibat sarana dan prasarana transportasi yang terkena dampak bencana tersebut. kepemudaan dan olahraga

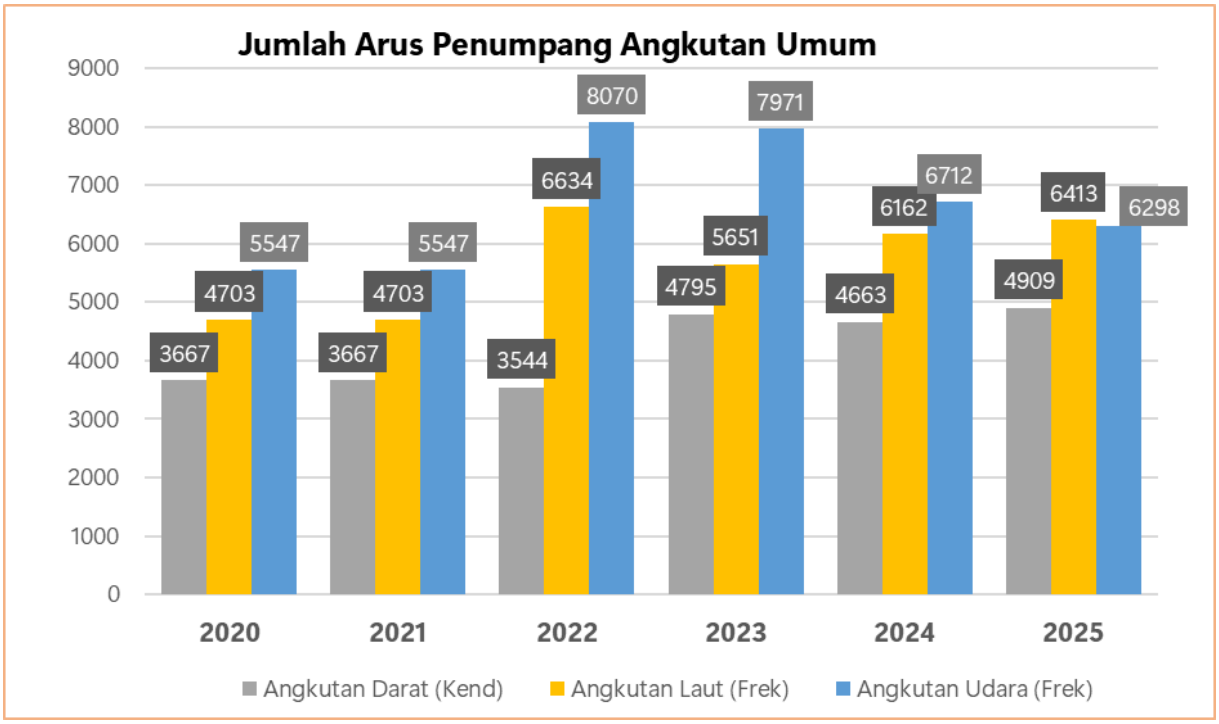

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025

Gambar 2. 58
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2025

I.2. Rasio Ijin Trayek

Seluruh angkutan umum yang melayani trayek antar Kabupaten/Provinsi (AKDP dan AKAP) wajib memiliki izin trayek sesuai dengan trayek yang diusulkan serta armada yang didaftarkan. Hal ini dimaksudkan untuk dilakukannya penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga dapat meminimalisir adanya trayek ilegal (tidak berizin) yang dilakukan para penyedia jasa (operator) angkutan umum. Rasio izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2025 sebanyak 1 : 1405. izin/jumlah penduduk.

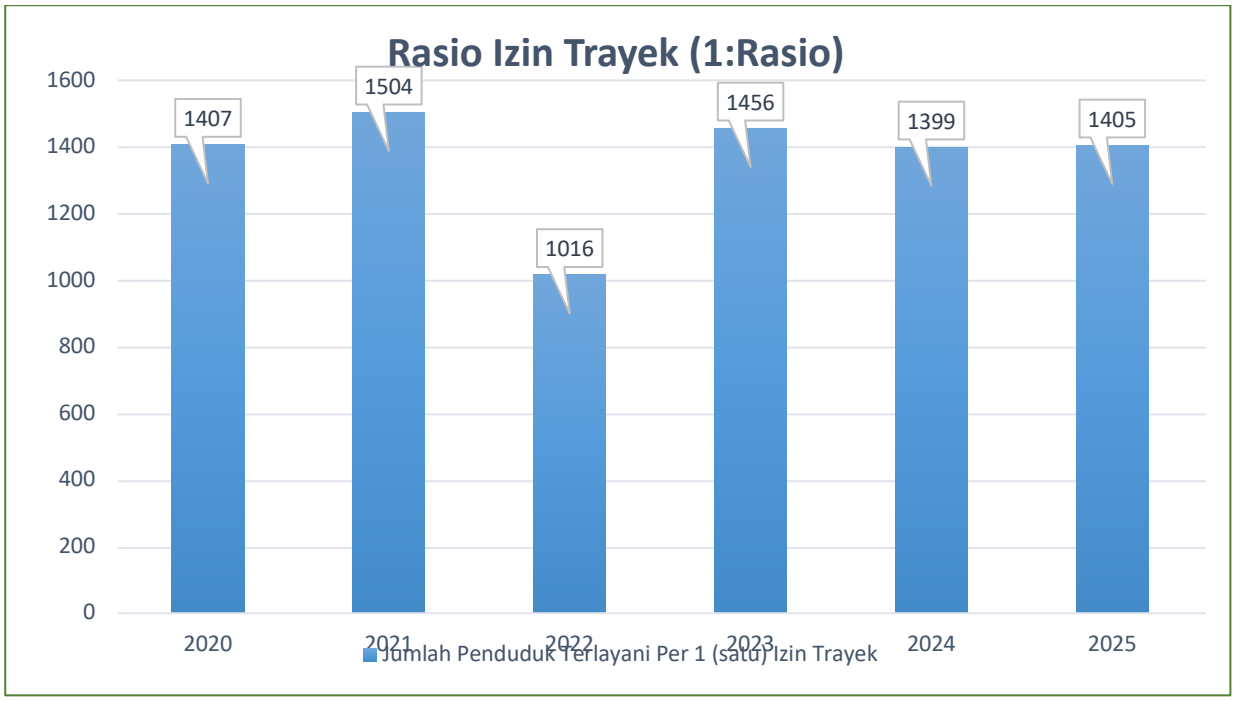

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025

Gambar 2. 59
Rasio Ijin Trayek di Aceh Tahun 2020-2025

I.3. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal

Sarana perhubungan tersebar di 7 zona sebagai pusat kegiatan, yaitu :

a. Zona 1 Pusat Kegiatan di Sabang;
b. Zona 2 Pusat Kegiatan di Banda Aceh (Aceh Besar dan Aceh Jaya);
c. Zona 3 Pusat Kegiatan di Lhokseumawe (Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara);
d. Zona 4 Pusat Kegiatan di Takengon (Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara);
e. Zona 5 Pusat Kegiatan di Blang Pidie (Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan);
f. Zona 6 Pusat Kegiatan di Singkil (Subulussalam dan Simeulue);
g. Zona 7 Pusat Kegiatan di Langsa (Aceh Timur dan Aceh Tamiang).

Fasilitas dan Prasarana Transportasi di Aceh secara garis besar dibedakan menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kemenhub), Pemerintah Provinsi (Dinas Perhubungan Aceh), dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dishub Kab/Kota). Fasilitas prasarana perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terdiri dari 6 pelabuhan penyeberangan, 10 terminal penumpang tipe B fungsional, dan 1 fasilitas penerbangan berupa gedung penumpang VIP yang tersebar di beberapa kabupaten/ kota yang ada di Aceh. Berikut visualisasi peta sebaran prasarana perhubungan kewenangan pemerintah provinsi:







Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025

Gambar 2. 60
Prasarana Transportasi Aceh

Sebagai gambaran secara luas, sampai dengan tahun 2018 Aceh memiliki 12 bandara, 11 pelabuhan laut dan 8 pelabuhan penyeberangan serta 36 terminal yang

terdiri dari 4 tipe A, 11 tipe B dan 20 tipe C. Di tahun 2019 terdapat 1 penambahan status terminal tipe A baru yaitu Terminal Tipe A Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah sehingga jumlah terminal tipe A menjadi 5 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 22 terminal.

Di tahun 2022 terdapat penambahan status terminal tipe B Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sehingga jumlah terminal tipe B menjadi 10 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 20 terminal. Selanjutnya, pada Tahun 2023 terdapat pengurangan jumlah terminal Tipe B, yaitu Terminal Tipe B Nagan Raya dikarenakan belum termasuk dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh, kemudian bertambah 1 unit terminal tipe B yaitu Terminal Tipe B Aceh Timur di Kec. Peureulak yang ditetapkan pada bulan Juli 2025.

Di tahun 2024, status Air Strip di Langsa dihapuskan dari data bandar udara nasional yang tercantum dalam KM Perhubungan No. 33 Tahun 2014 Tatanan Kebandarudaraan Nasional sehingga jumlah bandara turun menjadi 11 bandara, meskipun di dalam KM tersebut terdapat rencana pembangunan Bandara Bireuen yang belum terbangun sampai dengan saat ini, sehingga jumlah bandara tetap menjadi 12 unit. Jumlah pelabuhan, bandara dan terminal di Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2. 77
Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2020-2025

Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Pelabuhan Laut	11	11	11	11	11	11
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	8	8	8	8	8	8
Jumlah Bandar Udara	12	12	12	12	12	12
Jumlah Terminal Tipe A	5	5	5	5	5	5
Jumlah Terminal Tipe B	9	10	11	9	9	10
Jumlah Terminal Tipe C	22	21	20	20	20	20

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025

I.4. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR

Layanan angkatan darat cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun-tahun. Hal ini menujukkan minat masyarakat terhadap angkutan darat semakin menurun. Faktor penyebab utama adalah jarak tempuh dari Banda Aceh ke Medan lebih lama dibandingkan dengan angkutan udara dan pendapatan masyarakat semakin meningkat sehingga mampu untuk menggunakan angkutan udara. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2025 disajikan pada Tabel 2.78.

Tabel 2. 78
Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2025

Uraian		Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase layanan angkutan darat	Aceh	47	10	71.43	32.28	38.07	43,86
	Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Aceh	27	64	66	60	54	54,7
	Nasional	27	27	30	N/A	N/A	

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025

I.5. Pemasangan Rambu-Rambu

Perlengkapan jalan merupakan prasarana jalan yang diharuskan dipasang pada ruas jalan yang bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Perlengkapan jalan terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Rambu–Rambu Lalu Lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan, Delineator, Guard Rail (Pagar Pengaman Jalan), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Cermin Tikungan, Speed Bump, Alat Penerangan Jalan dan Marka Jalan.

Rendahnya persentase fasilitas perlengkapan jalan diakibatkan kebutuhan penanganan pada jalan nasional yang harus diutamakan, peningkatan/rehab panjang jalan Provinsi serta bertambahnya daerah rawan kecelakaan lalu lintas akibat peningkatan jumlah kendaraan (volume lalu lintas).

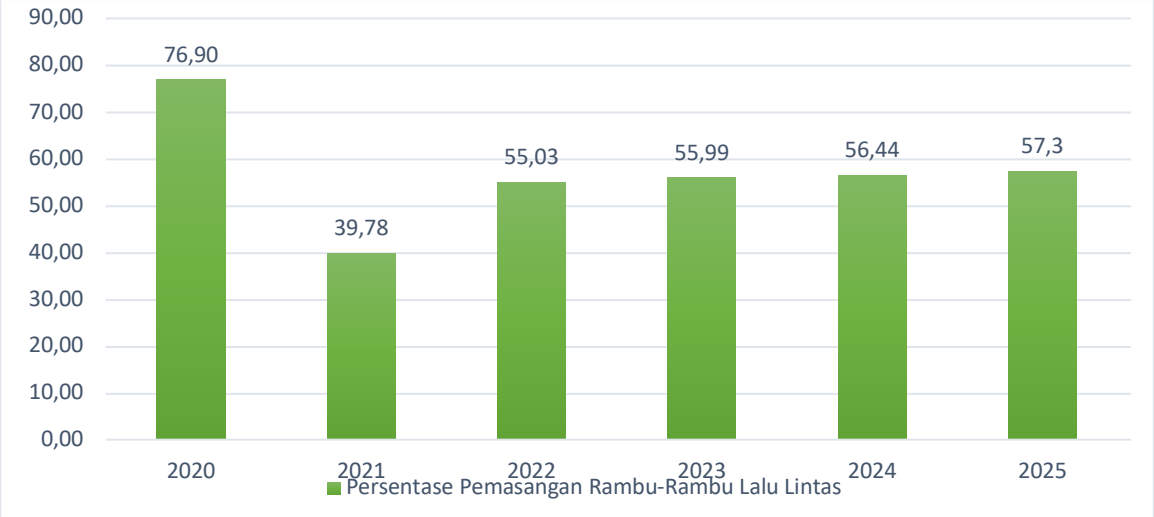

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2024

Gambar 2. 61
Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Aceh Tahun 2020-2025

I.6. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan semakin menurun pada periode 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas dijalan maupun jumlah kepemilikan kendaraan, namun total panjang jalan yang cenderung tetap. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Aceh tahun 2020-2024 di sajikan pada Tabel 2.79

Tabel 2. 79
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Aceh Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total Panjang Jalan (km)	23.650,05	23.650,05	23,650.05	23,650.05	23.766,24	23.766,24
Total Jumlah Kendaraan (unit)	3.058.000	3.544.000	2,611,882	2,842,966	2.623.223	2.617.775
Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (%)	0,13	0,15	110.44	120.21	110,38	110,15
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (%)	773,40	667,30	0.91%	0.83%	0,91%	0,91%

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025

I.7. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2025 didominasi oleh angkutan darat yaitu 2.617.333 orang (63.72%). Sementara jumlah orang yang terangkut angkutan laut yaitu 969.965 orang (23.61%) dan angkutan udara sebesar 420.198 orang (12.66%). Kondisi ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dimana Angkutan laut mendominasi mobilasi orang dari pada angkutan umum lainnya karena adanya pandemi. Seperti, pada Tahun 2022 proporsi jumlah orang terangkut angkutan umum pada moda Angkutan Laut sebesar 69.35 persen diikuti angkutan laut yaitu 25.34 persen dan angkutan udara sebanyak 5.30 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa angkutan darat yang terdiri dari AKAP, AKDP, dan Angkutan Perkotaan/Perdesaan masih menjadi moda primadona utama, yang dibarengi dengan peningkatan drastis di banding dua tahun sebelumnya, meskipun kemudian terdapat tren penurunan pada tahun 2023 karena beberapa faktor yang menyebabkan pendataan jumlah penumpang menjadi tidak optimal namun pada tahun 2024 dan 2025 jumlah orang yang terangkut angkutan umum darat mengalami peningkatan cukup signifikan. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Aceh Tahun 2020-2025 disajikan pada Tabel 2.80.

Tabel 2. 80
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2025

Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Angkutan Darat	633.082	612.980	2,964,869	602.784	2.317.048	2.617.333
Angkutan Laut	566.099	729.669	1,083,553	869.381	960.338	520.198
Angkutan Udara	219.111	157.975	226,687	324.524	422.361	969.965
Jumlah	**1.418.292**	**1.500.624**	**4.275.109**	**1.796.689**	**3.699.747**	**4.107.496**

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025

I.8. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Faktor aksesibiltas daerah menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelayanan transportasi. Implikasi logis dari kondisi prasarana jaringan jalan dari suatu wilayah adalah kemudahan mobilitas masyarakatnya dan juga kemudahan mencapai suatu tujuan. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya.

Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di Aceh dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan. Jumlah orang melalui terminal lebih tinggi dibandingkan jumlah orang melalui bandara dan dermaga.

Selanjutnya persentase jumlah orang melalui terminal, pelabuhan dan bandara pada tahun 2025 mengalami sebaran antar moda yang cukup berimbang, seperti pada jumlah orang melalui terminal yaitu sebesar 58.11 persen cenderung mengalami peningkatan positif dibandingkan dengan persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2024 yaitu sebesar 51.69 persen. Pada kedua jenis moda tranportasi lain yaitu angkutan udara dan laut, juga terdapat tren positif kenaikan dari periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi efisien dan efektif sisi waktu tempuh dan pelayanan dengan jangkauan pelayanan yang lebih membuat hampir semua moda transportasi kini lebih nyaman untuk digunakan. Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal di Aceh Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2. 81
Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2020-2025

Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Terminal	1.153.344	1.154.013	5,797,404	1.114.795	1.489.334	2.100.778
Bandara	427.028	302.616	448,034	642.796	432.806	545.889
Dermaga	566.099	729.669	1,083,553	869.381	959.338	968.227
Jumlah	**2.146.471**	**2.186.298**	**2.186.298**	**2.626.972**	**2.881.478**	**3.614.894**

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh. 2025

J. Komunikasi dan Informatika

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini maka telekomunikasi wajib dikembangkan agar menjadi wahana yang dapat diandalkan. Hal ini sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan peneyelenggaraan pembangunan. Keberadaan website milik Pemerintah Aceh diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat juga digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kondisi kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama ini sudah banyak beralih dari telepon rumah ke telepon selular.

Selain daripada itu, seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan bidang komunikasi dan informatika yang transparan dan akuntabel serta keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan, maka implementasi e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan terus ditingkatkan dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Provinsi Aceh.

Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam mendukung target Program Prioritas Pemerintah Digital pada Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan tujuan utama mengukur kemajuan serta meningkatkan kualitas penerapan layanan digital pemerintah baik di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemantauan SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

Hasil pemantauan tahun 2025 menjadi gambaran atas progres transformasi digital Pemerintah Aceh, sekaligus menjadi panduan strategis dalam menyelaraskan penerapan pemerintah digital dengan kebijakan nasional. Semangat keterpaduan ini diharapkan mampu mewujudkan layanan digital yang berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna, sehingga memberikan manfaat konkret bagi pelaksanaan tugas pemerintahan maupun bagi masyarakat luas. Ke depan, sejalan dengan arah kebijakan nasional yang semakin dinamis, cakupan pemantauan ini akan bertransformasi dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi). Perubahan ini menandakan pergeseran fokus dari sekadar digitalisasi proses bisnis menuju ekosistem digital yang lebih holistik dan berorientasi pada pengguna. Oleh karena itu, perlu melakukan penyesuaian target indeks serta memperkuat komitmen kepemimpinan dalam menyongsong Indonesia Emas, demi percepatan transformasi digital yang berkelanjutan

Pemantauan SPBE Tahun 2025 dilaksanakan dengan mempedomani Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemantauan dan evaluasi SPBE diselenggarakan oleh Kementerian PANRB melalui tools pada laman https://tauval.spbe.go.id/.

Tabel berikut menggambarkan perkembangan capaian Indeks SPBE Pemerintah Aceh sejak tahun 2019 hingga 2025. Indeks SPBE Pemerintah Aceh Tahun 2025 adalah 4,02, di atas target indeks SPBE Rencana Pembangunan Aceh, yaitu 3,50. Dengan demikian, Pemerintah Aceh telah mencapai predikat Indeks SPBE "Sangat Baik".

Tabel 2. 82
Capaian Indikator Indeks SPBE Aceh 2019-2025

Indikator	Tahun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	3,00	3,19	2,76	3,62	3,64	4,02

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2025

Target indeks SPBE Nasional adalah 2,6 dengan predikat indeks "baik". Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada awal pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, indeks SPBE Pemerintah Aceh masih dibawah target indeks SPBE Nasional, yaitu 2,26. Namun sejak tahun 2019 s.d 2024, indeks SPBE Pemerintah Aceh sudah di atas target indeks SPBE Nasional, yaitu >2,6.

Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam capaian indeks SPBE melalui implementasi kebijakan internal, tata kelola, dan layanan SPBE dalam rangka

mendorong peningkatan penerapan SPBE. Berpedoman pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024, pada tahun 2025 Pemerintah Aceh berusaha mempertahankan capaian yang sudah ada dan meningkatkan penerapan SPBE dilingkungan pemerintahan. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh antara lain adanya Pergub Aceh No. 61 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah mencakup seluruh domain pada aspek SPBE dan telah ditindaklanjuti menjadi beberapa keputusan gubernur sebagai landasan operasional.

Untuk mencapai penerapan SPBE yang optimal dan efisien, Pemerintah Aceh melakukan evaluasi secara periodik terhadap seluruh aspek pada penggunaan SPBE yang sudah ada, antara lain pada kebijakan internal terkait tata kelola SPBE. Penggunaan aplikasi pun ditingkatkan dengan menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang telah ditetapkan secara nasional dan memaksimalkan penggunaan fitur-fitur yang sudah diberikan pada aplikasi tersebut. Pelaksanaan SPBE juga diawasi secara seksama dengan melaksanakan audit berkala dan terdokumentasi dengan baik.

K. Persandian

Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Provinsi bertujuan untuk mengamankan dan melindungi informasi yang dikelola oleh Pemerintah Aceh. Kesadaran Keamanan Informasi menjadi landasan utama dan seiring dengan pemanfaatan teknologi yang tentunya harus dilengkapi dengan sistem keamanan informasi yang baik.

Pemerintah Aceh memprioritaskan pengembangan sistem persandian yang memadai dan andal untuk melindungi informasi sensitif dari berbagai ancaman keamanan siber yang semakin kompleks. Dengan meningkatkan tingkat kematangan keamanan sistem persandian, Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menghadirkan lingkungan digital yang aman dan terpercaya bagi perlindungan data pemerintahan sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan publik, maupun informasi milik masyarakat. Kedepannya, diperlukan langkah strategis yang lebih komprehensif untuk meningkatkan keamanan digital guna mendukung transformasi pemerintahan berbasis teknologi secara lebih optimal.

Persandian memiliki peran yang sangat vital dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu untuk mengamankan informasi. Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sektor persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait pengamanan informasi pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan

teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko diantaranya penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 (ayat 2) bahwa Persandian sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

L. Statistik

L.1. Statistik Sektoral Daerah

Keberadaan Statistik Sektoral Daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat data dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dari berbagai bidang kegiatan. Untuk itu Pemerintah Aceh terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral pada lingkup daerah masing-masing. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) menyatakan tujuan dari pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) yang turunannya dapat dilaksanakan pada skala Pemerintah Provinsi seperti Satu Data Aceh adalah untuk:

a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan.
b. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
c. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.
d. Mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Aceh juga telah mengatur terkait Satu Data di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu dan Peraturan Gubernur Aceh

Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Aceh dengan Satu data.

L.2. Geospasial

Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi satu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Selain statistik sektoral, geospasial juga memegang peranan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Geospasial dapat mengambil peran dalam pembangunan dari berbagai sektor. Informasi tentang geospasial menjadi bahan pendukung dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berbasis spasial.

Informasi Geospasial (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011) adalah informasi yang sangat berharga dan dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA), penyusunan rencana tata ruang dan perencanaan lokasi investasi. Selain itu informasi geospasial juga dapat digunakan untuk menentukan garis batas wilayah, pertanahan, pertahanan keamanan, dan lain-lain yang semuanya dapat dijadikan dalam penyusunan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang merupakan solusi sempurna untuk mengatasi tumpang tindih izin penggunaan lahan.

Oleh karena itu ketersediaan informasi geospasial yang akurat dapat mendukung dalam mengambil keputusan yang efisien, efektif dan komunikatif. Selembar peta mengandung beragam informasi yang menyangkut aspek keruangan. Informasi geospasial sangat penting untuk mendukung program pembangunan daerah dan nasional.

Adapun data dan informasi Geospasial yang selama ini tersedia dan di produksi oleh Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA) serta disebarluaskan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebagai wali data ke Geoportal Aceh (https://geoportal.acehprov.go.id). Jumlah data dan informasi geospasial yang tersedia di Geoportal Aceh adalah 320 peta.

M. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

M.1. Koperasi

Perkembangan koperasi di Aceh cukup fluktuatif, jumlah koperasi yang tumbuh terus bertambah. Aceh memiliki 13.793 unit koperasi pada tahun 2025 yang tersebar di 23 kabupaten/kota, dengan focus penguatan UMKM dan ekonomi desa

melalui program seperti Koperasi Merah Putih, begitu juga dengan jumlah koperasi aktif dan koperasi tidak aktif. Secara rinci, perkembangan koperasi di Aceh Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 2. 83
Perkembangan Koperasi di Aceh Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Koperasi (Unit)		
		Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Simeulue	238	157	81
2.	Aceh Singkil	298	251	47
3.	Aceh Selatan	690	396	294
4.	Aceh Tenggara	825	635	190
5.	Aceh Timur	1.037	883	154
6.	Aceh Tengah	731	594	137
7.	Aceh Barat	696	567	129
8.	Pidie	1.172	1.043	129
9.	Bireuen	860	739	121
10.	Aceh Utara	1.238	1.067	129
11.	Aceh Barat Daya	358	226	132
12.	Gayo Lues	284	156	128
13.	Aceh Tamiang	572	368	204
14.	Nagan raya	432	345	87
15.	Aceh Jaya	303	255	48
16.	Bener Meriah	524	373	151
17.	Pidie Jaya	450	340	110
18.	Banda Aceh	643	492	151
19.	Aceh Besar	1.270	1.039	231
20.	Sabang	95	65	30
21.	Langsa	304	236	68
22.	Lhokseumawe	287	163	124
23.	Subulussalam	189	158	31
24.	Provinsi	297	281	16
	Aceh	**13.793**	**10.829**	**2.922**

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh

Dari data diatas dapat dilihat secara kuantitas jumlah koperasi di Aceh yang tersebar 23 Kabupaten/Kota berjumlah 13.793 unit, 10.829 koperasi aktif dan 2.922 Tidak aktif. Kondisi koperasi yang demikian menunjukkan masih adanya tantangan terhadap perkembangan koperasi di Aceh.

Faktor penyebab tidak aktifnya koperasi antara lain disebabkan oleh:

1. Pengelolaan koperasi belum mapan sehingga banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga ekonomi koperasi, diantaranya tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tidak melaksanakan kegiatan usaha, tidak menyampaikan laporan kegiatannya ke Dinas Teknis, dan masih banyak yang belum melakukan pernyataan mandiri *(self declare),* karena masih rendahnya kesadaran pengelola koperasi serta masyarakat/anggota koperasi terhadap manfaat berkoperasi;

2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan koperasi serta kualitas dan kuantitas SDM pembina Koperasi.

Selanjutnya Perkembangan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah mengalami perkembangan cukup signifikan di Provinsi Aceh. Koperasi syariah secara teknis adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsi-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah. Secara rinci, perkembangan koperasi simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam syariah di Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 84
Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kabupaten/kota di Aceh Tahun 2025

No	Kab/Kota	Jenis Koperasi				Total	Jumlah		
		KSP	USP	KSPPS	USPPS		Anggota	Aktif	Tdk. Aktif
1	Banda Aceh	4	358	4	78	444	41.261	346	98
2	Aceh Besar	18	423	29	10	480	29.119	318	162
3	Pidie	9	122	-	7	138	13.033	126	10
4	Pidie Jaya	-	9	9	2	20	4.293	20	-
5	Bireuen	8	93	-	-	101	7.592	88	13
6	Lhokseumawe	-	316	7	12	335	9.617	131	204
7	Aceh Utara	13	80	3	9	105	11.854	53	54
8	Aceh Timur	2	48	-	-	50	3.542	11	39
9	Langsa	7	150	1	9	167	974	30	137
10	Aceh Tamiang	1	37	7	2	47	4.124	30	17
11	Aceh Tenggara	18	161	5	-	184	3.456	51	133
12	Gayo Lues	2	96	-	1	99	5.519	6	93
13	Aceh Tengah	6	252	6	1	265	22.698	34	225
14	Bener Meriah	4	5	10	-	19	2.351	17	2
15	Aceh Jaya	2	17	-	-	19	871	18	1
16	Aceh Barat	70	5	12	-	87	2.215	32	55
17	Nagan Raya	4	56	4	3	67	5.392	43	24
18	Aceh Barat Daya	-	204	2	7	213	19.793	67	146
19	Aceh Selatan	6	401	10	-	417	24.918	303	114
20	Subulussalam	7	8	-	3	18	992	15	3
21	Aceh Singkil	5	113	-	-	118	6.022	62	56
22	Sabang	1	34	4	6	45	3.440	21	24
23	Simeulue	1	105	-	10	116	3.299	27	89
24	Provinsi	3	4	3	12	22	39.970	17	5
Jumlah		**191**	**3.097**	**116**	**172**	**3.576**	**266.345**	**1.866**	**1.704**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh

Dari tabel diatas, terlihat jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sebanyak 109 unit dan Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sebanyak 260 unit di Provinsi Aceh. Selanjutnya, untuk mewujudkan koperasi sehat, mandiri, tangguh dan sesuai aturan, Pemerintah Aceh melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi. Pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat memberikan manfaat. Berikut Tabel Pemeriksaan Kesehatan Koperasi se Provinsi Aceh.

Tabel 2. 84
REKAPITULASI PEMERIKSAAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI SE-ACEH TAHUN 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Koperasi Dinilai	Yangg Sudah Dinilai	Predikat			
				Sehat	Cukup Sehat	Dalam Pengawasan	Dalam Pengawasan Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Provinsi	7	7	3	4	0	0
2	Banda Aceh	10	10	10	0	0	0
3	Aceh Besar	10	10	2	8	0	0
4	Pidie	6	6	3	3	0	0
5	Pidie Jaya	5	5	0	5	0	0
6	Bireuen	10	10	2	8	0	0
7	Lhokseumawe	10	10	5	5	0	0
8	Aceh Utara	10	10	6	4	0	0
9	Aceh Timur	5	5	3	2	0	0
10	Langsa	11	11	0	11	0	0
11	Aceh Tamiang	8	8	2	6	0	0
12	Aceh Tengah	5	5	5	0	0	0
13	Bener Meriah	5	5	3	2	0	0
14	Gayo Lues	3	3	2	1	0	0
15	Aceh Tenggara	0	0	0	0	0	0
16	Aceh Jaya	6	6	0	6	0	0
17	Aceh Barat	5	5	1	4	0	0
18	Nagan Raya	5	5	4	1	0	0
19	Aceh Barat Daya	0	0	0	0	0	0
20	Aceh Selatan	10	10	6	4	0	0
21	Subulussalam	5	5	1	4	0	0
22	Aceh Singkil	6	6	4	2	0	0
23	Simeulue	3	3	1	2	0	0
24	Sabang	5	5	0	5	0	0
Total		**150**	**150**	**63**	**87**	**0**	**0**

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh

Dari tabel diatas, terlihat jumlah koperasi sehat dan cukup sehat sebanyak 150 unit usaha di Provinsi Aceh. Jumlah terbanyak di Kota Langsa sebanyak 11 unit selanjutnya Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireun, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 10 unit. Pemeriksaan kesehatan koperasi merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

M.2. UMKM

Pertumbuhan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kontribusi sektor riil di Aceh, salah satunya sektor UMKM yang merupakan sektor yang strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jumlah UMKM di Aceh terus mengalami pertumbuhan, fasilitasi untuk menumbuhkembangkan UMKM terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada skala ekonomi. Perkembangan jumlah UMKM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 85
Data Agregat Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Aceh

NO.	KABUPATEN/KOTA	MIKRO	KECIL	MENENGAH	TOTAL
1	KAB. SIMEULUE	4.849	1	5	4.855
2	KAB. ACEH SINGKIL	14.025	20	4	14.049
3	KAB. ACEH SELATAN	27.497	91	17	27.605
4	KAB. ACEH TENGGARA	44.200	5	4	44.209
5	KAB. ACEH TIMUR	42.636	70	19	42.725
6	KAB. ACEH TENGAH	18.760	109	15	18.884
7	KAB. ACEH BARAT	25.493	161	26	25.680
8	KAB. ACEH BESAR	58.016	62	13	58.091
9	KAB. PIDIE	44.508	247	22	44.777
10	KAB. BIREUEN	59.173	41	11	59.225
11	KAB. ACEH UTARA	46.713	29	8	46.750
12	KAB. ACEH BARAT DAYA	20.566	89	11	20.666
13	KAB. GAYO LUES	13.996	42	12	14.050
14	KAB. ACEH TAMIANG	31.489	54	1	31.544
15	KAB. NAGAN RAYA	14.008	90	11	14.109
16	KAB. ACEH JAYA	11.023	98	6	11.127
17	KAB. BENER MERIAH	13.909	79	9	13.997
18	KAB. PIDIE JAYA	17.513	81	17	17.611
19	KOTA BANDA ACEH	47.460	26	11	47.497
20	KOTA SABANG	6.212	17	1	6.230
21	KOTA LANGSA	25.726	206	28	25.960
22	KOTA LHOKSEUMAWE	24.543	163	25	24.731
23	KOTA SUBULUSSALAM	10.035	58	12	10.105
	TOTAL	**622.350**	**1.839**	**288**	**624.477**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Aceh secara keseluruhan berjumlah 624.477 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan minat yang tinggi di masyarakat untuk menjadi wirausahawan dan peluang berusaha di Aceh yang masih terbuka. Pada tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan sensus di 7 Kabupaten/Kota di Aceh yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Tamiang, dan Kota Banda Aceh. Sedangkan berkurangnya jumlah usaha kecil dan usaha menengah pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2019 diakibatkan karena terbitnya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 yang mengatur kembali kriteria kelas usaha, dimana sebelumnya sebuah usaha dikelompokkan mikro jika memiliki aset maksimal Rp. 50 juta atau omzet maksimal Rp. 300 Juta menjadi maksimal modal Rp. 1 Milyar atau memiliki omzet maksimal Rp. 2 Milyar, begitu juga dengan kelas kecil dan menengah mengalami kenaikan tingkat kriteria. Sehingga banyak unit usaha yang sebelumnya berada dipengelompokan kecil dan menengah menjadi berada pada kelompok mikro. Hal tersebut juga mangakibatkan rasio proporsi jumlah usaha kecil dan menengah di Aceh menjadi berubah secara signifikan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 86
Perkembangan Jumlah UMKM di Aceh

No	Skala UMKM	Tahun				
		2021*	2022*	2023**	2024	2025
1	Mikro	226.290	224.523	423.178	622.394	622.415
2	Kecil	30.780	61	1.470	1.839	1.839
3	Menengah	2.679	26	202	288	288
Total		**259.749**	**224.610**	**424.850**	**624.521**	**624.542**

*Sumber :*Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, 2026:

Dari data diatas dapat dilihat perkembangan jumlah umkm di Aceh mulai Tahun 2021 sampai 2025. Berdasarkan kriteria penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM, total UMKM di Aceh sebanyak 624.542 unit usaha, dengan perincian Usaha Mikro sebanyak 622.415 unit usaha, Usaha Kecil sebanyak 1.839 dan Usaha Menengah sebanyak 288 unit usaha terjadinya penurunan signifikan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah pada tahun 2022, yang merupakan dampak dari perubahan regulasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 yang mengatur kembali kriteria kelas usaha. Perubahan kriteria usaha tersebut mengakibatkan banyak usaha yang berada pada kelompok kecil dan menengah turun menjadi kelas mikro.

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah menjadi 0,39 persen dari 0,04 persen dari tahun 2022 yang menunjukkan

adanya peningkatan volume usaha pada usaha mikro yang dapat meningkatkan aset maupun omzet usahanya. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan dan peningkatan geliat ekonomi secara umum, selain peningkatan kapasitas usaha itu sendiri. Sedangkan pada tahun 2024, terjadi sedikit penurunan menjadi 0,34 persen. Melihat secara jumlah, baik total UMKM, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, semuanya mengalami peningkatan. Namun pertumbuhan pada kelompok mikro jauh lebih dominan dibandingkan pada kelompok kecil dan menengah, hal ini mengakibatkan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah ini sedikit mengalami penurunan, selanjutnya pada tahun 2025 mengalami peningkatan.

Rendahnya proporsi jumlah usaha kecil dan menengah saat ini menunjukkan sebagian besar usaha belum mampu meningkatkan kapasitas sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing, ini dikarenakan faktor penyebabnya antara lain :

1. Kualitas produk UMKM belum mampu bersaing dengan produk unggulan dari daerah lain;
2. Terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif terhadap bahan baku;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana, informasi dan akses pasar;
4. Rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumberdaya manusia;
5. Terbatasnya dukungan/akses modal.

Selanjutnya terkait Rasio Kewirausahaan di Aceh menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Aceh, rasio kewirausaan Aceh tahun 2024 mencapai 3,94% dan pada tahun 2025 terjadi peningkatan menjadi 4,68%. Berikut Tabel Perkembangan Rasio Kewirausahaan Aceh mulai tahun 2019 sampai 2025.

Tabel 2. 87
Tabel Perkembangan Rasio Kewirausahaan Aceh (2019-2025)

No	Tahun	Rasio Kewirausahaan	Keterangan
1	2019	3,77%	Sebelum Pandemi
2	2020-2021	3,58%	Terdampak Pandemi
3	2023	3,97%	Peningkatan
4	2024	3,94%	Data Agustus 2024
5	2025	4,68%	Data Agustus 2025

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh

Secara umum Rasio Kewirausahaan Aceh meskipun berfluktuasi, menunjukkan kenaikan pada tahun 2023 yang berarti sudah mulai pulih kembali keyakinan dalam masyarakat untuk berwirausaha, selanjutnya mengalami penurunan sebesar 0,03% pada tahun 2024 dan terjadi peningkatan pada tahun 2025 menjadi 4,68%.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Gambar 2. 66
Rasio Kewirausahaan Aceh Tahun 2019-2025

Rasio Kewirausahaan Aceh pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,68%, angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari data Agustus 2024. Angka ini menandakan pertumbuhan UMKM yang cukup baik. Meskipun rasio ini cukup tinggi, Pemerintah Aceh terus mendorong peningkatan jumlah UMKM di Provinsi Aceh, dan berupaya meningkatkan pembinaan untuk usaha mikro yang tersebar diseluruh kabupaten/kota di Aceh sehingga usaha yang dikembangkan dapat terus tumbuh dan berkembang serta terus berupaya memajukan kewirausahaan di Aceh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

N. Penanaman Modal

N.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Secara umum, investasi PMDN Aceh tahun 2025 masih terkonsentrasi pada daerah yang memiliki keunggulan administratif, infrastruktur, dan akses pasar. Banda Aceh menempati posisi tertinggi dengan 5.221 proyek atau sekitar 29,78% dari total proyek PMDN Aceh. Angka ini jauh melampaui daerah lainnya dan menunjukkan bahwa Banda Aceh masih menjadi pusat utama aktivitas investasi domestik. Dominasi ini dapat dipahami karena Banda Aceh memiliki fungsi sebagai ibu kota provinsi, pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, dan layanan administrasi. Ketersediaan infrastruktur, akses pasar, serta kemudahan layanan perizinan juga kemungkinan menjadi faktor yang memperkuat daya tarik investasi di wilayah ini.

Setelah Banda Aceh, jumlah proyek investasi cukup tinggi terdapat di Langsa sebanyak 1.842 proyek, Aceh Tamiang sebanyak 1.273 proyek, Lhokseumawe sebanyak 1.257 proyek, dan Pidie sebanyak 1.227 proyek.

Kelima daerah teratas tersebut menyumbang sekitar 61,72% dari total proyek PMDN Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah aktivitas investasi domestik hanya terkonsentrasi pada beberapa daerah tertentu. Langsa, Lhokseumawe, dan Aceh Tamiang memiliki posisi strategis karena berada pada jalur perdagangan, kawasan perkotaan, serta memiliki basis ekonomi yang relatif lebih berkembang dibandingkan sebagian wilayah lain. Jumlah proyek investasi PMDN berdasarkan lokasi kab/kota dapat dilihat pada Gambar 2.67 berikut:

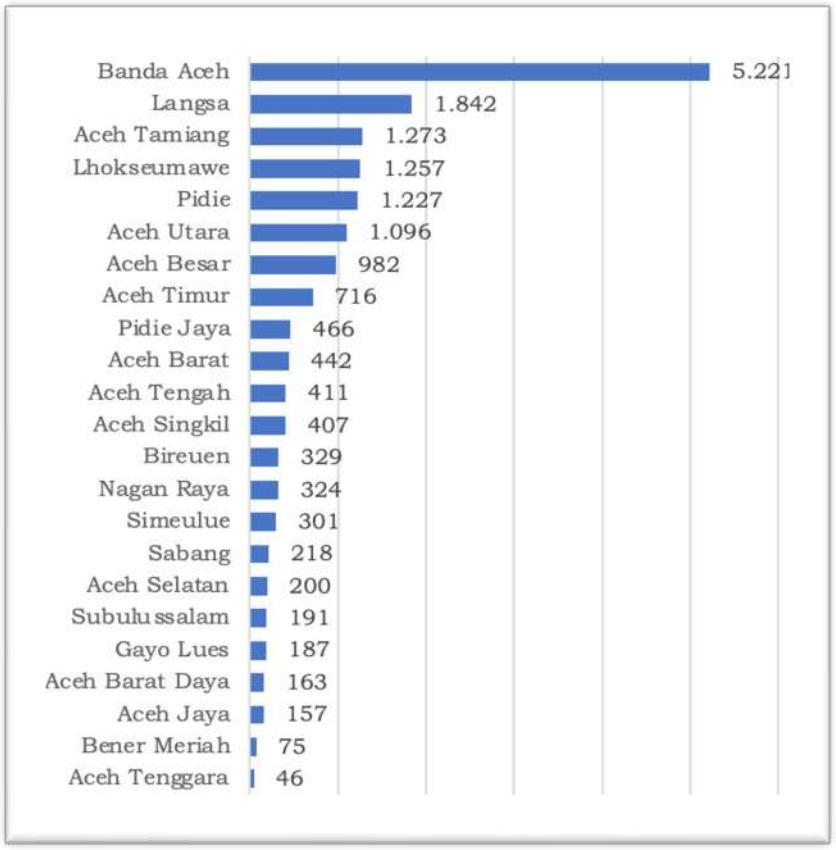

Sumber: DPMPTSP 2024

Gambar 2. 67
Jumlah proyek PMDN berdasarkan lokasi kab/kota, Tahun 2025

Selain PMDN, investasi di Aceh juga ditopang oleh Penanaman Modal Asing (PMA) yang tersebar hampir di seluruh kab/kota, kecuali kabupaten Pidie Jaya. Secara umum, investasi asing di Aceh tahun 2025 masih bersifat selektif dan belum merata antardaerah. PMA cenderung masuk ke daerah yang memiliki aksesibilitas lebih baik, basis ekonomi yang lebih kuat, atau potensi sektor unggulan yang sudah lebih dikenal. Oleh karena itu, strategi peningkatan PMA perlu diarahkan pada penguatan kesiapan daerah, terutama melalui penyediaan profil investasi yang jelas, perbaikan infrastruktur dasar, kepastian perizinan, promosi potensi unggulan, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis sektor lokal. Jumlah proyek investasi asing tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar berikut:

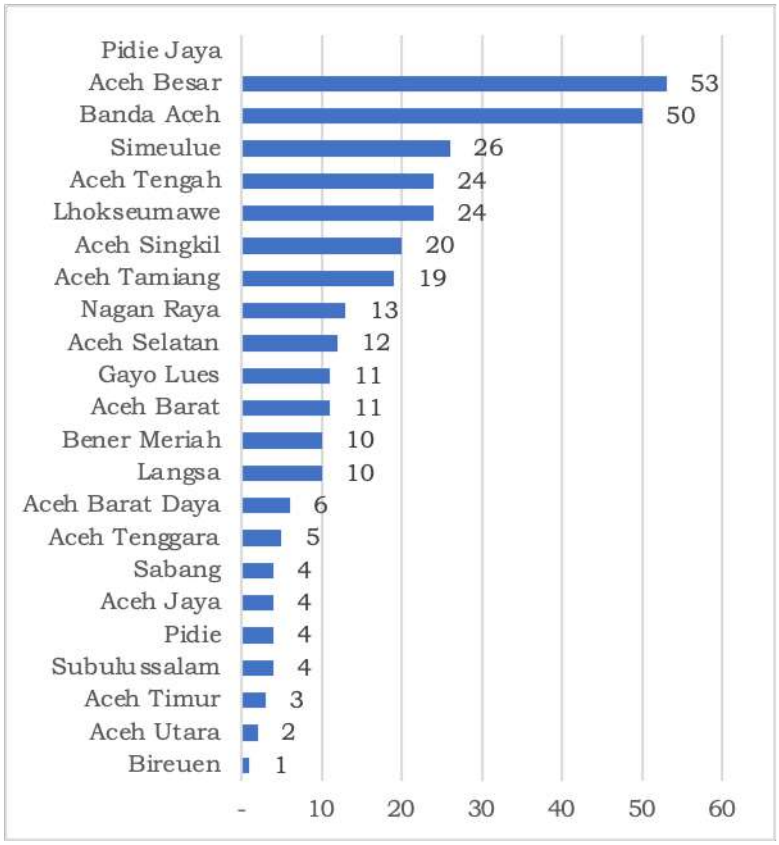

Sumber : DPMPTSP 2024

Gambar 2. 62
Jumlah proyek PMA berdasarkan lokasi kab/kota Tahun 2025

Daerah dengan jumlah proyek PMA tertinggi adalah Aceh Besar sebanyak 53 proyek, disusul Banda Aceh sebanyak 50 proyek. Kedua daerah ini menyumbang sekitar 32,6% dari total proyek PMA Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa kawasan sekitar pusat pemerintahan, pusat jasa, perdagangan, logistik, dan wilayah dengan aksesibilitas relatif baik masih menjadi lokasi utama bagi investor asing. Aceh Besar memiliki keunggulan kedekatan dengan Banda Aceh, Bandara Sultan Iskandar Muda, akses pelabuhan, serta ketersediaan ruang pengembangan ekonomi yang lebih luas. Sementara itu, Banda Aceh memiliki daya tarik sebagai pusat administrasi, jasa, perdagangan, pendidikan, dan layanan bisnis.

N.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Kinerja investasi selama periode 2021–2025 mengalami fluktuasi cukup kuat. Secara akumulatif, total realisasi investasi Aceh selama periode 2021–2025 mencapai sekitar Rp 48,24 triliun, dengan rata-rata sekitar Rp 9,65 triliun per tahun. Namun, besarnya perbedaan antara capaian tertinggi tahun 2023 dan terendah tahun 2022, yaitu sekitar Rp 6,30 triliun, menunjukkan adanya volatilitas investasi yang cukup besar. Perkembangan realisasi investasi Aceh baik PMA maupun PMDN dari tahun 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada Gambar xxx berikut:

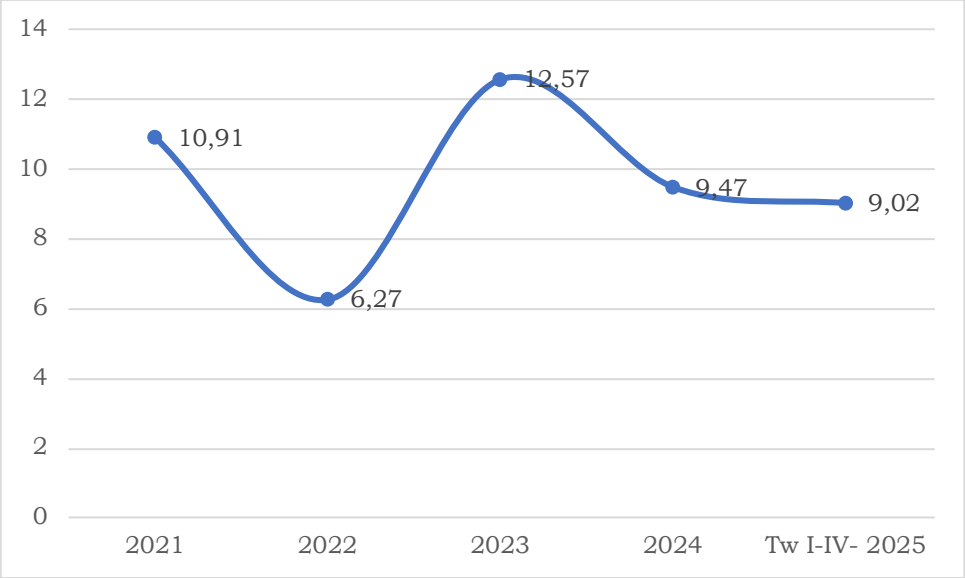

Sumber : DPMPTSP 2024

Gambar 2. 63
Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2021-2025 (Triliun)

Nilai realisasi investasi tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp12,57 triliun, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp 6,27 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi Aceh belum sepenuhnya stabil dan masih dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, kesiapan proyek, daya tarik sektor unggulan, serta kondisi eksternal maupun internal daerah.

Pada tahun 2021, realisasi investasi Aceh mencapai Rp10,91 triliun. Angka ini menunjukkan kinerja investasi yang relatif baik. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam menjadi Rp 6,27 triliun, atau turun sekitar 42,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya perlambatan aktivitas investasi, baik dari sisi penanaman modal dalam negeri maupun asing. Faktor yang dapat memengaruhi antara lain tertundanya realisasi proyek, ketidakpastian ekonomi, kendala perizinan, keterbatasan infrastruktur pendukung, atau belum optimalnya promosi potensi investasi daerah.

Pada periode Triwulan I–IV tahun 2025, realisasi investasi tercatat sebesar Rp 9,02 triliun**.** Nilai ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2024, dengan penurunan sekitar 4,8%**.** Penurunan yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa kinerja investasi Aceh pada tahun 2025 cenderung stabil, meskipun belum mampu kembali mencapai level tertinggi seperti tahun 2023. Dengan kata lain, investasi Aceh setelah tahun 2023 bergerak pada pola moderat, yaitu berada di kisaran Rp 9 triliun**.**

O. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan Aceh, khususnya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, produktif, berdaya saing, serta berkarakter. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh, pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk memperkuat kapasitas generasi muda, meningkatkan prestasi olahraga, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam budaya hidup sehat dan aktif.

Pembangunan kepemudaan difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya saing pemuda melalui pengembangan kapasitas, kewirausahaan, kepeloporan, kepemimpinan, dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah. Pemuda dipandang sebagai agen perubahan dan aset strategis pembangunan yang memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi, kreativitas, serta transformasi sosial dan ekonomi di Aceh.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendidikan dan pelatihan kepemudaan, fasilitasi organisasi dan komunitas pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda berbasis potensi lokal dan ekonomi kreatif, serta peningkatan ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan sosial, budaya, lingkungan, dan digitalisasi. Selain itu, pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, nilai keislaman, dan semangat kolaborasi terus diperkuat guna membentuk generasi muda Aceh yang tangguh, mandiri, dan berintegritas.

Pada urusan olahraga, pembangunan diarahkan pada peningkatan prestasi olahraga daerah, pembudayaan olahraga masyarakat, serta penguatan ekosistem olahraga yang profesional dan berkelanjutan. Olahraga tidak hanya dipandang sebagai sarana peningkatan prestasi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan kesehatan masyarakat, penguatan karakter, serta pemersatu sosial.

Fokus pembangunan olahraga meliputi pembinaan atlet usia dini dan atlet berprestasi secara berjenjang dan berkelanjutan, peningkatan kualitas pelatih dan tenaga keolahragaan, pengembangan sentra pembinaan olahraga, serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang representatif dan merata. Selain itu, penguatan manajemen organisasi olahraga dan dukungan terhadap pelaksanaan kompetisi olahraga secara terstruktur menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim olahraga yang kompetitif dan profesional.

Pemerintah Aceh juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga melalui pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga masyarakat sebagai bagian dari gerakan hidup sehat. Penguatan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, organisasi kepemudaan, organisasi olahraga, lembaga

pendidikan, dunia usaha, dan komunitas menjadi langkah penting dalam memperluas dampak pembangunan kepemudaan dan olahraga secara inklusif.

Dalam konteks pembangunan daerah, urusan kepemudaan dan olahraga diharapkan mampu mendukung pencapaian prioritas pembangunan Aceh, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing daerah, pengembangan ekonomi kreatif, serta pembangunan masyarakat yang sehat, produktif, dan berprestasi.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan, Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh diharapkan dapat mewujudkan generasi muda Aceh yang inovatif, berkarakter, dan berdaya saing, serta meningkatkan prestasi olahraga Aceh di tingkat nasional maupun internasional

O.1. Kepemudaan

Pemuda Aceh adalah denyut nadi perubahan, penjaga harapan, sekaligus penggerak masa depan dalam semangat Asta Cita Presiden, pemuda Aceh tidak hanya menjadi penonton pembangunan tetapi tampil sebagai pelaku utama yang membawa energi, inovasi, dan integritas di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, pemuda dituntut untuk memperkuat jati diri bangsa, menjunjung tinggi nilai Pancasila, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Mereka hadir sebagai generasi yang cerdas, kritis, dan solutif dalam menjawab tantangan zaman mulai dari pembangunan ekonomi yang inklusif serta peningkatan kualitas pendidikan, hingga pelestarian lingkungan.

Pemuda Aceh menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks. Dari sisi pembangunan manusia, masih banyak pemuda yang belum mendapatkan akses pendidikan berkualitas dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Ini berdampak pada tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya Pemuda Aceh. Khususnya bidang ekonomi, tantangan terbesar adalah terbatasnya lapangan kerja dan peluang usaha. Banyak pemuda memiliki ide kreatif, tetapi terkendala modal, akses pasar, dan pendampingan. Hal ini membuat kemandirian ekonomi pemuda belum optimal, padahal Asta Cita mendorong penguatan ekonomi berbasis inovasi dan produktivitas.

Menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi pemuda hari ini tidak cukup dengan pendekatan parsial, melainkan membutuhkan langkah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemuda harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek, dengan membuka akses yang luas terhadap pendidikan, kesempatan, dan ruang aktualisasi diri. serta perlu diberi ruang yang lebih besar dalam kehidupan sosial dan politik. Partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan akan melatih kepemimpinan sekaligus memperkuat demokrasi yang sehat. Pemuda bukan hanya penerus, tetapi juga penentu arah masa depan Aceh.

Adapun data rinci mengenai jumlah pemuda Aceh, pemuda prestasi dan jumlah organisasi kepemudaan tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.88.

Tabel 2. 88
Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan Tahun 2021-2025

Organisasi Kepemudaan	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Pemuda	Orang	1.319.818	1.344.984	1.349.801	1.404.738	1.504.485
Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	80	32	36	20	20
Jumlah Organisasi Kepemudaan Politik (OKP)	Unit	66	68	68	68	75

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Tahun 2025

Kualitas pemuda Aceh hingga tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural. Secara umum, peningkatan kualitas ini tercermin dari membaiknya indikator pembangunan manusia, terutama pada aspek pendidikan dan kesehatan. Akses terhadap pendidikan semakin luas, dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dan tingginya angka partisipasi pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda Aceh kini memiliki fondasi pengetahuan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Namun demikian, peningkatan kualitas tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kemajuan dalam aspek ekonomi dan ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran pemuda masih relatif tinggi, dan kemampuan wirausaha belum berkembang secara optimal. Banyak pemuda yang telah menyelesaikan pendidikan belum mampu terserap secara maksimal di dunia kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja, serta terbatasnya peluang ekonomi di daerah.

Selain itu, partisipasi pemuda dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan masih tergolong rendah. Meskipun terlibat dalam kegiatan sosial, tidak semua pemuda memiliki akses atau kesempatan untuk berperan aktif dalam organisasi strategis maupun proses pembangunan daerah. Ketimpangan antarwilayah juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas pemuda, di mana pemuda di wilayah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berada di daerah terpencil.

Dengan demikian, kualitas pemuda Aceh hingga tahun 2025 dapat dikatakan berada pada tahap berkembang: memiliki dasar yang cukup kuat dalam pendidikan dan kesehatan, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek produktivitas ekonomi, kewirausahaan, dan kepemimpinan. Upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan diperlukan agar potensi besar generasi muda Aceh dapat dioptimalkan sebagai motor penggerak pembangunan daerah di masa depan.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2025 (menggunakan data tahun 2024), Provinsi Aceh memperoleh nilai IPP sebesar 58,00, sedikit berada di bawah capaian nasional yang mencapai 58,33. Dibandingkan tahun 2023, nilai IPP Aceh mengalami penurunan sebesar 2 poin dari 60 menjadi 58. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya capaian pada domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain partisipasi dan kepemimpinan.

Tabel 2. 89
Indeks Pembangunan Pemuda Aceh dan Nasional tahun 2024

Domain IPP	Aceh	Nasional
Pendidikan	76,67	70
Kesehatan dan Kesejahteraan	75	70
Gender dan Diskriminasi	56,67	56,67
Partisipasi dan Kepemimpinan	46,67	50
Lapangan dan Kesempatan Kerja	35	45
IPP Total	**58**	**58,33**

Sumber: kemenpora 2025

Analisis menurut domain menunjukkan bahwa **domain pendidikan** merupakan salah satu kekuatan utama pembangunan pemuda Aceh dengan nilai indeks **76,67**, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 70. Bahkan, Aceh bersama Sumatera Barat menjadi provinsi dengan capaian domain pendidikan tertinggi di Pulau Sumatera. Capaian ini menunjukkan bahwa akses dan partisipasi pendidikan pemuda relatif baik, terutama pada jenjang pendidikan menengah. Selain itu, **domain kesehatan dan kesejahteraan** juga menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai **75**, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 70. Pada tahun 2024, domain ini mengalami peningkatan sebesar 5 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut didukung oleh menurunnya angka kesakitan pemuda serta menurunnya persentase remaja perempuan yang sedang hamil. Di sisi lain, tantangan utama pembangunan pemuda Aceh terdapat pada domain lapangan dan kesempatan kerja yang hanya mencapai nilai 35, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 45. Penurunan domain ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan turunnya nilai IPP Aceh pada tahun 2024. Kondisi tersebut

mengindikasikan masih terbatasnya kesempatan kerja produktif bagi pemuda, termasuk rendahnya proporsi pemuda yang berwirausaha pada sektor pekerjaan kerah putih.

Tantangan lainnya terdapat pada domain partisipasi dan kepemimpinan yang memperoleh nilai 46,67, lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 50. Penurunan capaian domain ini menunjukkan masih terbatasnya keterlibatan pemuda dalam organisasi, pengambilan keputusan, dan aktivitas sosial kemasyarakatan secara berkelanjutan. Rendahnya partisipasi organisasi pemuda menjadi salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan kepemudaan Aceh. Sementara itu, domain gender dan diskriminasi memperoleh nilai 56,67, setara dengan capaian nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan pemuda dari berbagai bentuk diskriminasi telah menunjukkan hasil yang relatif baik, meskipun masih memerlukan penguatan terutama dalam peningkatan partisipasi pendidikan dan kesempatan kerja bagi pemuda perempuan.

Gambar 2. 64
Perbandingan capaian setiap domain Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2024

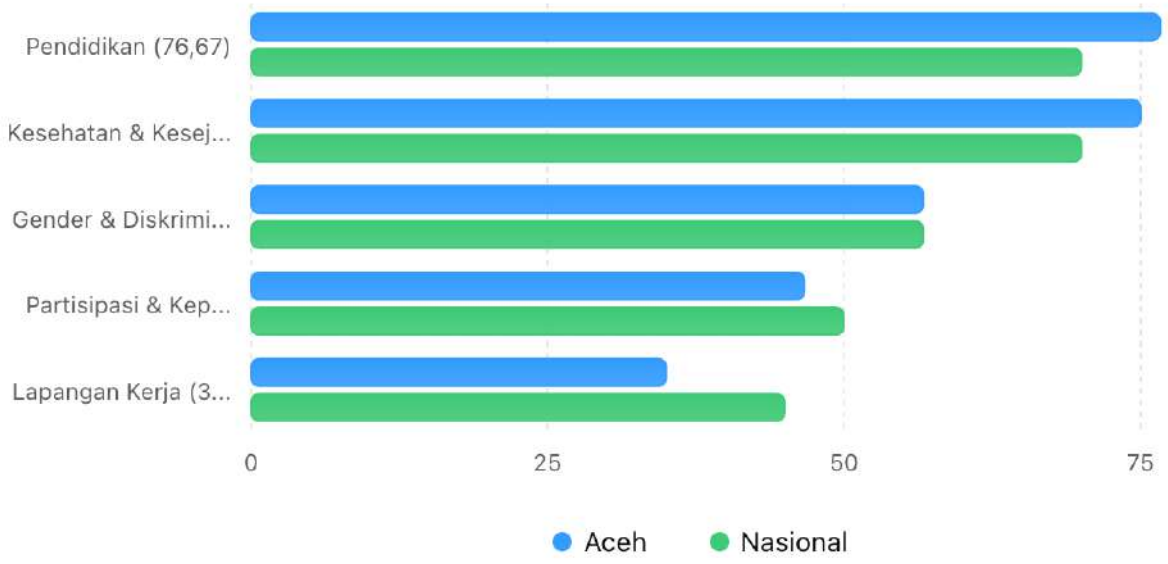

Berdasarkan analisis indikator penyusun IPP, Aceh memiliki beberapa keunggulan yang perlu dipertahankan, antara lain tingginya angka partisipasi sekolah menengah, rendahnya angka kesakitan pemuda, menurunnya angka perkawinan usia anak, rendahnya persentase remaja perempuan yang sedang hamil, serta tingginya keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun demikian, masih terdapat indikator yang perlu menjadi perhatian, terutama rendahnya proporsi pemuda wirausaha kerah putih dan rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi. Dengan memperhatikan capaian dan tantangan tersebut, arah kebijakan pembangunan kepemudaan Aceh Tahun 2027 diarahkan pada: (1)

peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan pemuda yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; (2) perluasan kesempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan pemuda; (3) peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemimpinan, dan pembangunan sosial kemasyarakatan; (4) penguatan layanan kesehatan pemuda dan pencegahan perilaku berisiko; serta (5) penguatan kesetaraan gender dan perlindungan pemuda dari berbagai bentuk diskriminasi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemuda Aceh sebagai modal utama pembangunan daerah sekaligus memanfaatkan momentum bonus demografi secara optimal.

O.2. Keolahragaan

Olahraga memiliki fungsi strategis dalam mendorong kemajuan suatu bangsa, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dalam pembangunan karakter, persatuan, hingga pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks pembangunan nasional, olahraga dapat menjadi salah satu pilar penting yang membentuk kualitas sumber daya manusia.

Pertama, olahraga berfungsi meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat. Individu yang rutin berolahraga cenderung memiliki kondisi fisik dan mental yang lebih baik, sehingga mampu bekerja secara optimal dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan. Tingkat kesehatan yang baik juga berdampak pada berkurangnya beban biaya kesehatan negara. Olahraga juga berperan dalam pembentukan karakter bangsa. Nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, sportivitas, dan tanggung jawab.Dalam berbagai ajang olahraga, masyarakat dari beragam latar belakang dapat bersatu mendukung satu tujuan yang sama. Momen-momen seperti Olympic Games atau FIFA World Cup menunjukkan bagaimana olahraga mampu melampaui perbedaan dan memperkuat rasa kebangsaan serta solidaritas sosial. Yang juga memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi. Industri olahraga menciptakan lapangan kerja, mulai dari atlet, pelatih, hingga sektor pendukung seperti pariwisata dan media. Penyelenggaraan event olahraga berskala nasional maupun internasional dapat meningkatkan pendapatan negara serta memperkenalkan potensi daerah ke dunia luar. Berbagai kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan yang bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh hasil pengukuran Sport Development Index (SDI) Tahun 2024, dimana:

(1) Kondisi dan ketersediaan ruang terbuka olahraga provinsi Aceh juga berada pada kategori tinggi dengan skor indeks 1,000, hal ini menunjukkan bahwa indeks ruang terbuka olahraga Aceh berada pada kategori tinggi.
(2) Indeks literasi fisik yang mulai membaik pada skor 0,637 dengan kategori menengah, hal ini menunjukkan bahwa mulai meratanya pengetahuan,

keterampilan, keterlibatan, dan tanggungjawab masyarakat Aceh dalam melakukan aktivitas fisik untuk kehidupan yang berkualitas.

(3) Mulai tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat Aceh dalam melakukan kegiatan olahraga meskipun berada dalam kategori rendah namun skor sudah mencapai 0,382.

(4) Indeks kesehatan fisik dan kesejahteraan psikis yang mulai membaik meskipun masih berada pada kategori rendah dengan indeks 0,433.

Dengan demikian mulai adanya hasil dari program dan kegiatan pembudayaan dan pembinaan olahraga baik olahraga pendidikan, olahraga olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Pembinaan dan pengembangan pada ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Organisasi olahraga merupakan wadah berkumpulnya para atlet berbagai cabang olahraga yang dibina Pemerintah Aceh. Saat ini terdapat 66 cabang olahraga yang terdaftar dan terhimpun dalam wadah KONI Aceh. Olahraga tersebut merupakan olahraga yang diminati dan digemari oleh masyarakat Aceh seperti sepakbola, badminton, tenis meja, footsal, volyball, futsal, tinju, panjat tebing, atletik, senam dan lain-lain. Meskipun demikian, tidak semua cabang olahraga tersebut mampu dibina oleh Pemerintah Aceh dan tidak semua atlet pada cabang olahraga tesebut mampu dibina oleh Pemerintah Aceh. Selain dikarenakan anggaran yang masih belum memadai, namun juga ketersedian sumber daya manusia olahraga yang masih mencukupi baik pelatih, wasit dan calon atlet. Adapun cabang olahraga, sumber daya manusia keolahragaan dan infrasruktur olahraga Aceh disajikan pada Tabel 2.89

Tabel 2. 90
Cabang Olahraga Atlit dan Infrastruktur Olahraga Aceh Tahun 2021-2025

No.	Keolahragaan	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Cabang Olahraga Binaan	Cabor	29	14	19	27	25
2	Atlit Olahraga Binaan	Orang	309	309	219	172	266
3	Atlit Berprestasi	Orang	84	75	90	43	225
4	Pelatih Berprestasi	Orang	55	15	8	9	12

No.	Keolahragaan	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
5	Pelatih Olahraga Binaan	Orang	56	35	35	35	42
6	Prestasi Olahraga	Cabor	30	12	16	9	365
7	Gedung Pemuda	Unit	1	1	1	1	1
8	Lapangan Olahraga	Unit	19	19	8	1	1

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Tahun 2025

Dari Tabel 2.87. di atas diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat 23 cabang olahraga binaan yang terbagi dalam 4 kegiatan binaan yaitu 1) Binaan PPLPD/SMAKON 15 jenis cabor, 2) Binaan PPLP 4 jenis cabor, 3) Binaan atlet prioritas peparpenas 2024 4 jenis cabor, 4) Binaan atlet prioritas peparpenas 8 jenis cabor cabang. Adapun total atlet binaan adalah 172 atlet dengan pelatih diharapkan dari setiap cabang olahraga binaan akan lahirnya bibit-bibit unggul baru.

Adapun 27 cabang olahraga binaan pada Tahun 2024 diantaranya yaitu: a) Binaan PPLP, yaitu: 1) Atletik; 2) Angkat Besi; 3) Panahan; 4) Pencak Silat, b) Binaan PPLPD/ SMAKON, yaitu : 1) Karate; 2) Tarung Derajat; 3) Sepakbola; 4) Sepak Takraw; 5) Taekwondo, 6) Bola Voly; 7) Kempo; 8) Tinju; 9) Anggar, 10) Bulutangkis; 11) Dayung, 12) Atletik, 13) Angkat Besi, 14)Panjat Tebing, 15) Wushu, c) Binaan Atlet Prioritas Peparpenas, yaitu: 1) Menembak, 2) Atletik, 3) Tenis Meja, 4) Catur, 5) Angkat Berat, 6) Bulutangkis, 7) Anggar, 8) Bocica.

Dari 27 cabor yang dibina 9 cabang olahraga binaan menyumbang medali yaitu: 1) Panahan, 2) Karate, 3) Taekwondo, 4) Anggar, 5) Dayung, 5) Atletik, 6) Tenis Meja, 7) Catur, 8) Angkat Besi, dan 9) Pencak Silat. Selain itu, terdapat cabang olahraga yang juga menyumbangkan medali meskipun bukan binaan yaitu: 1) Catur Kilat Perseorangan, 2) Olah Vocal, dan 3) Dum Domino.

Provinsi Aceh pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh–Sumut menunjukkan prestasi yang sangat membanggakan. Sebagai tuan rumah bersama, Aceh tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga mampu meningkatkan capaian prestasi atlet secara signifikan. Dalam klasemen akhir, Aceh berhasil menembus **peringkat 6 besar nasional**, sebuah pencapaian yang menunjukkan kemajuan pesat dibandingkan PON sebelumnya. Secara keseluruhan, kontingen Aceh berhasil meraih **sekitar 192 medali** dari berbagai cabang olahraga, yang terdiri dari medali emas, perak, dan perunggu. Capaian ini menandai salah satu hasil terbaik sepanjang keikutsertaan Aceh di PON, sekaligus membuktikan peningkatan kualitas pembinaan atlet daerah.

Dengan demikian, prestasi kontingen Aceh pada PON Aceh–Sumut dapat disimpulkan sebagai tonggak penting dalam perkembangan olahraga daerah.

Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan capaian di bidang olahraga, tetapi juga menunjukkan potensi besar generasi muda Aceh dalam berkompetisi di tingkat nasional. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan atlet menuju ajang nasional maupun internasional di masa mendatang.

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Secara nasional, IPO Tahun 2024 mencapai 0,334 dan masih berada pada kategori rendah dalam skala 0–1. Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan adanya peningkatan pada beberapa dimensi pembangunan olahraga, khususnya literasi fisik, partisipasi olahraga, kebugaran jasmani, kesehatan, dan ruang terbuka olahraga. Berdasarkan hasil pengukuran IPO Tahun 2024, Provinsi Aceh mencatat nilai IPO sebesar 0,464, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 0,334. Capaian tersebut menempatkan Aceh pada peringkat kedua nasional, menunjukkan bahwa pembangunan olahraga di Aceh relatif lebih maju dibandingkan sebagian besar provinsi lainnya di Indonesia.

Gambar 2. 65
Indeks Pembangunan Olahraga Aceh dan Nasional tahun 2024

Komponen IPO	Aceh	Nasional
Ruang Terbuka	**1**	0,258
Literasi Fisik	**0,637**	0,584
Ekonomi	**0,574**	0,531
Perkembangan Personal	**0,559**	0,544
Kesehatan	**0,433**	0,424
Partisipasi	**0,382**	0,263
Kebugaran Jasmani	**0,183**	0,196
SDM Olahraga	**0,074**	0,049
IPO Total	**0,464**	**0,334**

Sumber: kemenpora 2025

Kinerja pembangunan olahraga Aceh didukung oleh beberapa dimensi yang menunjukkan capaian sangat baik. Pada dimensi Ruang Terbuka Olahraga, Aceh memperoleh indeks 1,000 atau peringkat pertama nasional. Capaian ini menunjukkan ketersediaan ruang terbuka dan fasilitas olahraga yang relatif memadai sebagai sarana aktivitas fisik masyarakat. Selain itu, Aceh juga memiliki Indeks Literasi Fisik sebesar 0,637 (peringkat 5 nasional), yang mengindikasikan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aktivitas fisik dan olahraga sudah cukup baik.

Dari aspek partisipasi masyarakat, Aceh mencatat Indeks Partisipasi Olahraga sebesar 0,382 (peringkat 7 nasional), lebih tinggi dibandingkan indeks partisipasi nasional yang sebesar 0,263. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya berolahraga mulai berkembang di masyarakat Aceh dan menjadi modal penting dalam

mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Tingginya partisipasi olahraga juga berpotensi mendorong tumbuhnya ekonomi olahraga, mengingat laporan IPO nasional menunjukkan adanya hubungan positif antara literasi fisik, partisipasi olahraga, dan perkembangan ekonomi olahraga. Pada dimensi Kesehatan dan Perkembangan Personal, Aceh masing-masing memperoleh nilai 0,433 dan 0,559, yang menempatkan Aceh dalam kelompok provinsi dengan capaian terbaik secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas olahraga telah memberikan kontribusi positif terhadap kualitas kesehatan masyarakat sekaligus pembentukan karakter, disiplin, dan kesejahteraan sosial.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan. Dimensi Kebugaran Jasmani Aceh masih berada pada nilai 0,183, lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lain dan hanya berada pada kelompok menengah bawah secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya partisipasi olahraga belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kebugaran masyarakat. Selain itu, dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) Olahraga dengan nilai 0,074 masih memerlukan penguatan, terutama melalui peningkatan jumlah dan kualitas pelatih, instruktur, guru olahraga, tenaga keolahragaan, serta pengelola organisasi olahraga yang profesional. Di sisi lain, Indeks Ekonomi Olahraga Aceh sebesar 0,574 menunjukkan bahwa sektor olahraga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan industri olahraga, penyelenggaraan event olahraga berskala regional maupun nasional, sport tourism, serta pemberdayaan UMKM olahraga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kontribusi sektor olahraga terhadap perekonomian Aceh.

Gambar X.XX
Capaian setiap dimensi Indeks Pembangunan Olahraga Aceh dibandingkan rata-rata nasional

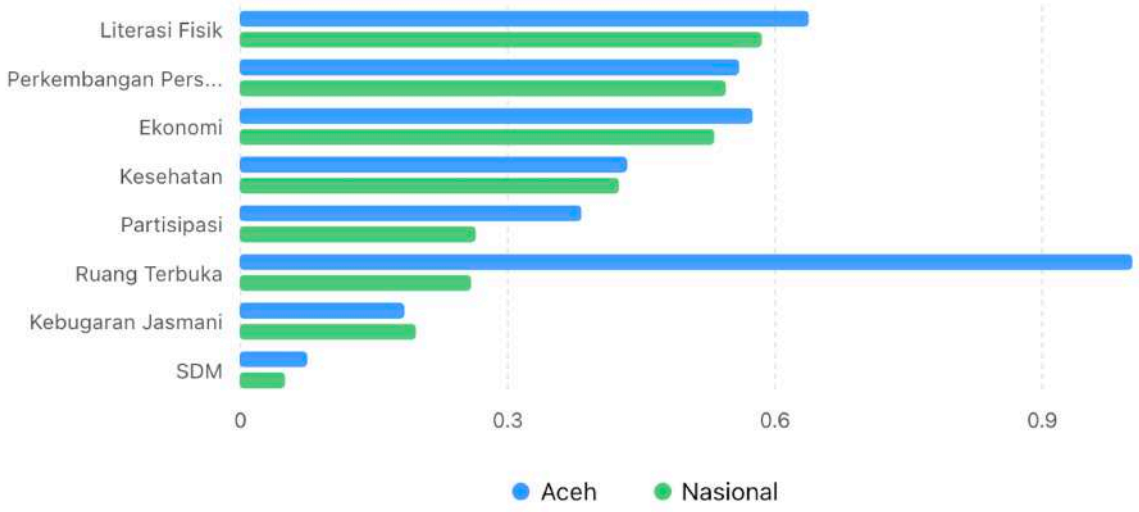

Dengan memperhatikan capaian dan tantangan tersebut, arah kebijakan pembangunan olahraga Aceh diarahkan pada: (1) peningkatan kebugaran jasmani masyarakat melalui perluasan gerakan masyarakat aktif berolahraga; (2) penguatan

SDM olahraga melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga keolahragaan; (3) optimalisasi pemanfaatan ruang terbuka olahraga yang telah tersedia; (4) peningkatan partisipasi olahraga bagi perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil; serta (5) pengembangan industri olahraga dan *sport tourism* sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru daerah.

P. Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan perpustakaan dan kearsipan merupakan bagian strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pelestarian identitas dan memori kolektif daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diarahkan untuk memperkuat literasi masyarakat, meningkatkan akses pengetahuan yang inklusif, serta mewujudkan tata kelola arsip yang tertib, modern, dan akuntabel.

Pembangunan urusan perpustakaan difokuskan pada peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat melalui penguatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, transformasi digital perpustakaan, serta perluasan akses layanan hingga wilayah terpencil dan rentan akses informasi. Perpustakaan tidak hanya diposisikan sebagai pusat informasi tetapi juga sebagai ruang pembelajaran, upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum daerah, pengembangan perpustakaan sekolah, perpustakaan gampong dan perpustakaan khusus, penguatan koleksi bahan pustaka fisik maupun digital, serta peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan. Selain itu, pengembangan perpustakaan digital dan integrasi layanan berbasis teknologi informasi menjadi prioritas guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat, mudah, dan merata di era transformasi digital.

Pada urusan kearsipan, pembangunan diarahkan pada penguatan tata kelola arsip yang tertib dan terpadu guna mendukung reformasi birokrasi, akuntabilitas pemerintahan, serta penyelamatan memori kolektif Aceh. Pengelolaan arsip yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan, perlindungan dokumen negara, pelayanan publik, serta pelestarian sejarah daerah.

Fokus pembangunan kearsipan meliputi peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, penguatan sistem kearsipan berbasis elektronik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan, serta penyelamatan dan pelestarian arsip bernilai sejarah dan budaya Aceh. Selain itu, dilakukan pembinaan dan pengawasan kearsipan terhadap seluruh perangkat daerah dan lembaga kearsipan kabupaten/kota guna mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai standar nasional.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh juga diarahkan untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga pendidikan, komunitas literasi,

lembaga adat, serta berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem literasi dan kearsipan yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan terwujud masyarakat Aceh yang literat, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya arsip sebagai identitas dan warisan sejarah daerah.

Pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan diharapkan mampu mendukung pencapaian prioritas pembangunan Aceh, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, serta pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh secara berkelanjutan.

Q. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki daya akselerasi dalam rangka untuk mendukung upaya perbaikan kesejahteraan hidup rakyat. Pelayanan perpustakaan yang diberikan dapat diakses melalui 2 (dua) cara yaitu akses layanan perpustakaan berkunjung langsung ke gedung perpustakaan dan layanan perpustakaan digital yang dapat diakses melalui aplikasi *playstore i-pustaka*, dimana masyarakat dapat memperoleh bahan bacaan dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke gedung layanan perpustakaan. Layanan *i-pustaka* merupakan salah satu inovasi bidang kearsipan yang diluncurkan tahun 2019.

Pemerintah Aceh berupaya meningkatkan layanan perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki daya akselerasi dalam rangka mendukung upaya perbaikan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu informasi ilmu pengetahuan masyarakat melalui minat baca masyarakat. Pada tahun 2025, jumlah koleksi bahan pustaka perpustakaan yaitu jumlah judul buku cetak sebanyak 84.131 judul dan jumlah buku sebanyak 367.443 Eksemplar, sedangkan koleksi buku digital sebanyak 18.049 judul dan 154.297 Eksemplar. Hal ini terus meningkat dari tahun sebelumnya.

Adapun data rinci mengenai jumlah koleksi buku perpustakaan di Aceh tahun 2019-2025 disajikan pada Tabel 2.90. berikut.

Tabel 2. 91
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Aceh Tahun 2021-2025

No.	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Judul Buku					

No.	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Buku cetak	66.004	63.071	72.342	79.640	84.131
	Buku digital	11.766	12.354	12.510	16.227	18.049
2	Jumlah Eksamplar Buku					
	Buku cetak	285.890	286.485	347.331	365.127	367.443
	Buku digital	86.709	123.989	127.084	153.630	154.297

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2026

Gambar 2. 66
Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2020-2025

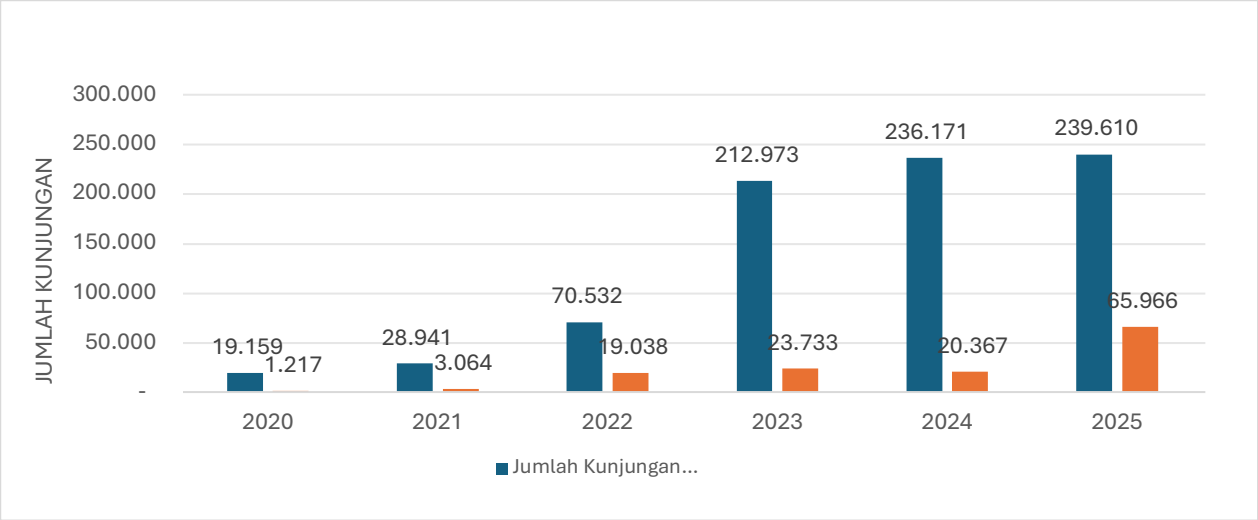

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2026

Berdasarkan Gambar 2.89. diatas, jumlah pemustaka onsite yaitu pemustaka yang berkunjung langsung ke gedung layanan tahun 2025 sebanyak 239.610 pengunjung, sedangkan jumlah pengunjung online yaitu pemustaka yang mengunjungi layanan *i-pustaka* sebanyak 65.966 pengunjung. Meningkatnya jumlah kunjungan ke pustaka diharapkan akan membawa dampak yang positif terhadap peningkatan minat dan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat.

TKM dapat dilihat sebagai indikator budaya baca, dimana TKM mengukur perilaku masyarakat dalam mencari informasi, frekuensi membaca, dan jumlah buku yang dibaca. TKM yang tinggi mencerminkan kebutuhan yang tinggi pula akan akses bahan bacaan. Capaian Tingkat Kegemaran membaca di Aceh tahun 2020-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2. 67
Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2020-2025

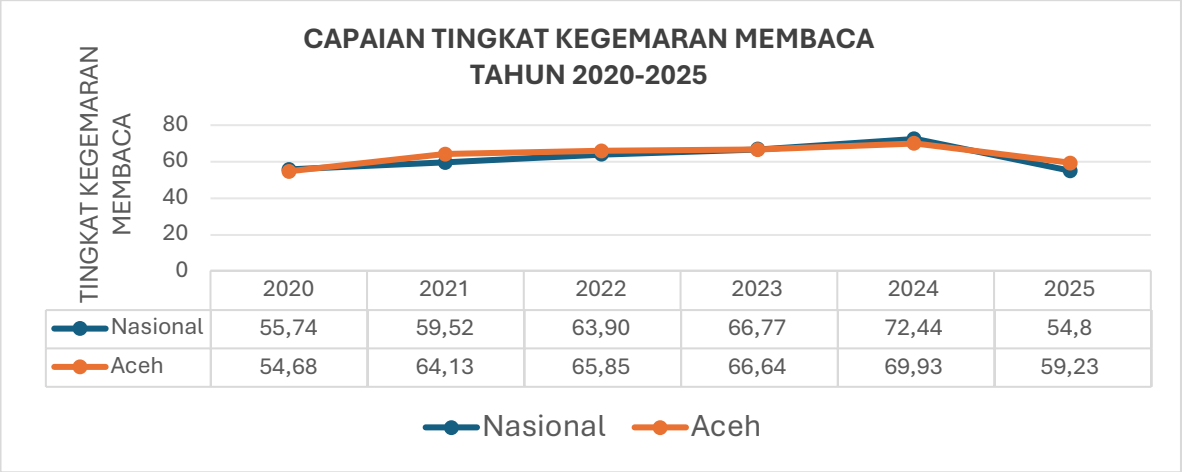

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2026

Dari Gambar 2.89. di atas terlihat bahwa Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Aceh tahun 2025 adalah 59.23 sedangkan TKM Nasional adalah 54.8. Capaian TKM Aceh dan Nasional tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan Survei IPLM dan TKM tahun 2025 sebagai Indikator kinerja di bidang perpustakaan, menggunakan instrument dan metode pengukuran yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Pengukuran TKM tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan instrument dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No.9 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran TKM berfokus pada dimensi pra membaca sebesar 15 persen, dimensi saat membaca sebesar 50 persen, dan dimensi pasca membaca 35 persen.

Hasil pengukuran saat ini tidak menunjukkan penurunan atau kenaikan, melainkan nilai baru dalam perspektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan. Hasil kajian ini merupakan potret awal dari kondisi literasi di setiap daerah yang sekiranya dapat ditindaklanjuti melalui rekomendasi perbaikan kerangka kebijakan, program, anggaran, dan regulasi yang berpihak pada pembangunan urusan perpustakaan dan literasi di daerah

Selain tingkat kegemaran membaca, Perpustakaan Nasional menjadikan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebagai indikator kinerja Bidang Perpustakaan. Pengukuran IPLM tahun 2025 menggunakan instrumen dan metodologi pengukuran yag jauh berbeda dengan pengukuran IPLM tahun-tahun sebelumnya. Pengukuran IPLM didasarkan kepada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 sehingga perubahan ini juga akan berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capian dengan target yang telah ditetapkan di

tahun sebelumnya. Pengukuran IPLM tahun 2025 disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kaupaten/Kota, berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana pengukuran berdasarkan kewilayahan. Pencapaian nilai IPLM Aceh Vs IPLM Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.90 berikut:

Gambar 2. 68
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Aceh Tahun 2021-2025

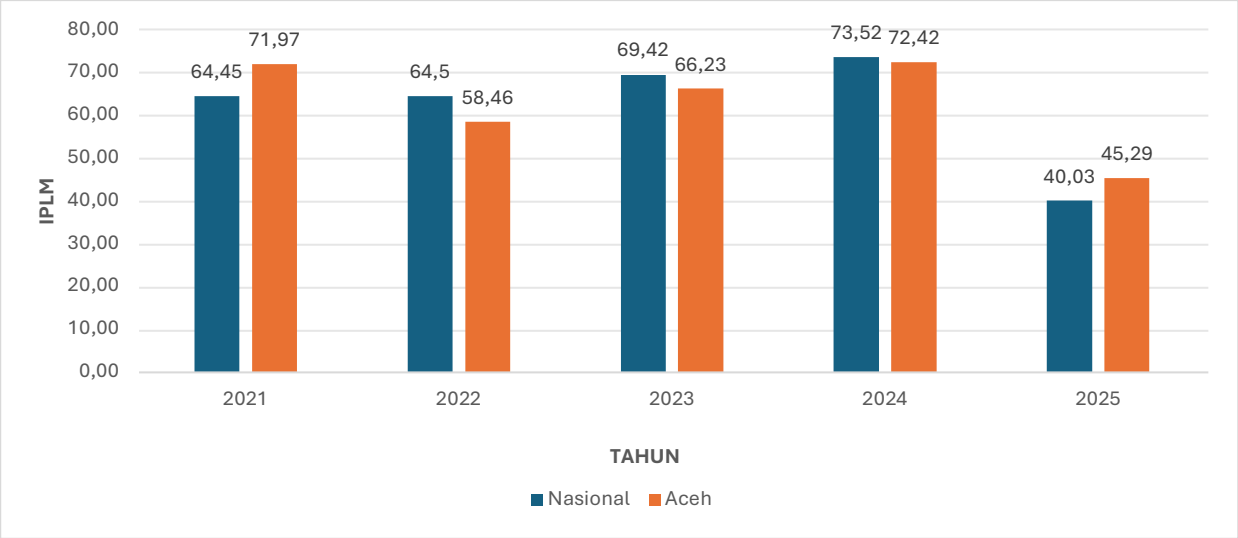

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2026

Pencapaian IPLM Provinsi Aceh tahun 2025 sebesar 54.8 dan masuk dalam kategori rendah. Angka ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya. nilai yang dihasilkan saat ini tidak lagi nilai agregat yang dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam urusan perpustakaan akan tetapi lebih untuk menjamin keadilan pengukuran serta kesesuaian dengan kerangka desentralisasi pemerintahan. Nilai IPLM saat ini tidak dapat dibandingkan antar wilayah. Nilai yang dihasilkan dalam pengukuran ini sepenuhnya berbasis pada data berdasarkan data verifikasi daerah. Data ini merefleksikan kondisi objektif dan faktual yang terjadi di lapangan. Nilai IPLM tahun 2025 bukan hanya berfokus pada nilai capaian, melainkan pemetaan kondisi riil dan presisi pembangunan literasi saat ini sehingga intervensi kebijakan dapat diarahkan pada dimensi dan indikator yang benar-benar membutuhkan penguatan.

Capaian IPLM Nasional tahun 2025 adalah 40,03. Capaian IPLM Aceh jika dibandingkan IPLM Nasional berada di atas rata-rata Nasional dan menenpati urutan kelima tertinggi secara nasional setelah Jawa Timur, Banten, D.I. Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. IPLM diharapkan dapat menjadi ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat dalam suatu daerah.

Selain menjalankan fungsi layanan perpustakaan, Dinas Perpustakan dan Kearsipan Aceh juga melakukan kegiatan pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah (*local content*). Adapun data koleksi deposit Aceh disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 92
Koleksi Buku Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) Aceh
Tahun 2022-2025

NO	URAIAN	Jumlah Judul/Naskah				Jumlah Eksamplar				Ket.
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Koleksi Buku Deposit dan KCKR	3,001	3,150	5,269	5,519	3,754	3,850	6,010	6,310	
2	Koleksi Buku Muatan Lokal	902	950	1,413	1,613	1,009	1,100	1,671	1,921	
3	Jumlah Naskah Kuno/Manuskrip yang telah ganti rugi	246	284	306	343	246	286	306	343	Naskah
4	Jumlah Digitalisasi Naskah Kuno/Manuskrip/Alih Media	74	74	125	200	74	74	125	200	Naskah

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2026

Tabel 2.90. di atas menyajikan data koleksi deposit sampai dengan akhir tahun 2025. Selain itu juga untuk memudahkan pengunjung mendapatkan informasi yang diinginkan, maka dibutuhkan pustakawan yang profesional. Adapun data rinci mengenai jumlah fungsional pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.92. berikut.

Tabel 2. 93
Jumlah Fungsional Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
Tahun 2022-2024

No.	Jabatan	2022										2023	2024
		Jenis Kelamin		Golongan Ruang			Pendidikan						
		L	P	II	III	IV	SMA	D 3	S1	S2	S3		
1	Kabid/Koordinator												
2	Pustakawan Ahli Muda/Sub. Koordinator	3	5		7	1			7	1		8	8
3	Pustakawan Ahli Utama	1				1			1			1	1
4	Pustakawan Ahli Madya	5	8		4	9			11	2		15	14
5	Pustakawan Ahli Muda	7	10		17				17			24	14
6	Pustakawan Ahli Pertama	1			1				1			1	2
7	Pustakawan Penyelia		5		5		1	3	1			5	4
8	Pustakawan Mahir	1			1			1				1	1
	Jumlah	**18**	**28**	**0**	**35**	**11**	**1**	**4**	**38**	**3**	**0**	**46**	**44**

Tabel 2. 94
Jumlah Fungsional Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2025

NO.	JABATAN	JENIS KELAMIN		GOL. RUANG			KELAS		PENDIDIKAN TERAKHIR			
		L	P	II	III	IV	IX	VII	SMA	D3	S1	S2
1	Kabid. / Koordinator											
2	Ketua Tim / Ahli Muda	2	5		2	5					7	1
3	Pustakawan Ahli Utama	1				1					1	
4	Pustakawan Ahli Madya	2	8			10					12	
5	Pustakawan Ahli Muda	6	9		12	3					12	
6	Pustakawan Ahli Pertama	3	18		2		19				21	
7	Pustakawan Penyelia		3		3					3		
8	Pustakawan Mahir	1			1					1		
9	Pustakawan Terampil	2	7					9		9		
Jumlah		17	50		20	19	19	9		13	53	1
		67			67					67		

Sampai dengan tahun 2025, jumlah pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebanyak 67 orang dengan berbagai tingkat jabatan dan golongan. Jumlah tersebut tentu masih kurang apabila dibandingkan dengan tugas utama yang harus dijalankan yaitu meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Dari jumlah 67 orang fungsional pustakawan, yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

R. Kearsipan

Bidang kearsipan terus diupayakan pelacakan terhadap naskah-naskah penting yang bernilai guna tinggi dan yang sampai sekarang ini masih sangat berada pada masyarakat luas, naskah tersebut tersebar di berbagai daerah di Aceh maupun di luar Aceh, bahkan sampai ke luar negeri. Keberadaan arsip-arsip ini naskah kuno, dokumen sejarah, dan manuskripyang mendokumentasikan sejarah panjang Kesultanan Aceh, hubungan kolonial, hingga khazanah keilmuan Islam. **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) m**enyimpan berbagai dokumen sejarah dan arsip daerah. Keberadaan arsip-arsip yang bernilai sejarah ini bahkan tersebar sampai ke luar negeri. Beberapa negara yang menyimpan arsip-arsip Aceh diantaranya adalah : Belanda, Malaisya dan Inggris.

Keberadaan Arsip sebagai memori kolektif bangsa seharusnya dijaga dan dipelihara dengan baik. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh berkewajiban memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk menumbuh kembangkan kesadaran akan pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu dibangun tempat penyimpanan arsip (DEPO) di beberapa wilayah untuk mendukung program penyelamatan arsip. Adapun data rinci mengenai jumlah koleksi arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan OPD pengelola arsip secara baku tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 95
Jumlah Koleksi Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan OPD Pengelola Arsip Secara Baku Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Tahun					Satuan
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Jumlah Arsip	6.065	7.201	9.775	9.954	12.223	Berkas
2	Jumlah Arsip Terolah	9.034	10.032	13.086	6.982	5.250	Berkas
3	Jumlah Arsip Belum Terolah	1.874	1.061	8.490	2.972	9.236	Boks
4	Jumlah Arsip yang telah Alih Media	10.333	14.000	6.830	7.000	6.000	Lembar
5	Jumlah OPD yang telah mengelola	4	5	15	21	21	SKPA

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2026

Adapun data rinci mengenai jumlah koleksi arsip pada JIKN Tahun 2021-2025 yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 96
Jumlah Koleksi Arsip pada JIKN Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Tahun					Jumlah
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Jumlah Arsip yang diinput pada Sistem JIKN	5.000	5.500	5.733	4.405	7.943	Data
2	Kabupaten/Kota yang telah menjalankan JIKN	2	7	8	21	23	Simpul JIKN Kab/Kota

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2026

Jumlah arsip yang sudah terinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) pada website Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2025 adalah sebanyak 7.943 Data.

Gambar 2. 69
Jumlah Pengunjung pada Layanan Arsip/JIKN Tahun 2020-2025

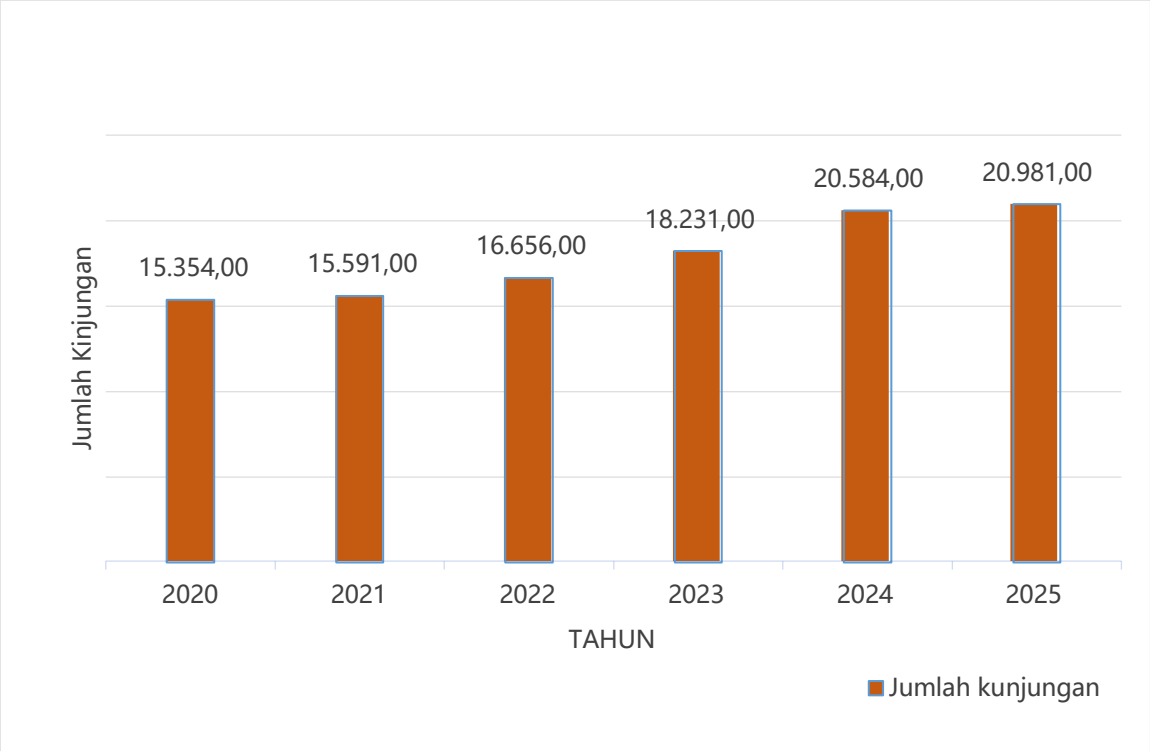

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2026

Adapun Kabupaten/Kota yang telah menjalankan JIKN sampai akhir 2025 sebanyak 23 Kabupaten/Kota. Semua Kabupaten/ Kota di Aceh sudah menerapkan aplikasi JIKN. Jumlah pengunjung pada Layanan Arsip/JIKN terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dilihat dari grafik diatas bahwa kunjungan layanan arsip/JIKN terus terjadi peningkatan dan di tahun 2025 jumlah pengunjung mencapai 20.981 orang.

S. Gedung dan Bangunan Terbengkalai

Pelaksanaan pembangunan di Aceh dari kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 masih menyisakan pembangunan beberapa gedung/bangunan yang belum fungsional dan terbengkalai. Lokasi bangunan tersebar di 19 kabupaten/kota dengan jenis bangunan publik yang beragam, mulai dari gedung/bangunan untuk kebutuhan pendidikan, budaya, sumberdaya air, rumah ibadah, fasilitas olah raga, dan jembatan. Pemerintah Aceh bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota perlu menuntaskan pembangunan gedung/bangunan yang terbengkalai sehingga fungsional dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tabel 2. 97
Gedung dan Bangunan Terbengkalai (tidak fungsional)

NO	JENIS BANGUNAN GEDUNG	LOKASI KAB/KOTA	TAHUN PELAKSANAAN	JMLH BANGUNAN	PRAKIRAAN NILAI LANJUTAN PEKERJAAN	SKPA PELAKSANA
				47	*562.129.384.462*	
1	Pemb.Stadion Olah Raga Sabang	Kota Sabang	2018	1	40.000.000.000	Dispora
2	Gedung RS Gigi Kedokteran USK; Gedung MM Fak. Ekonomi USK; Lab.Terpadu Tarbiyah UNMUHA; Ruang Dikti Keterampilan Hafiz Qur'an Deah Baro; Asrama Mahasiswa P. Aceh Kec. Meuraxa; Asrama Pelajar Aceh Singkil Blower; Gedung oncologycentre	Banda Aceh	2013 - 2021	8	253.559.095.000	Perkim, Dinkes
3	Sarpras Masjid Al-Ikhlas Gp. Ie Alang Kec. Kuta Cot Glie; Jembatan Panca	Aceh Besar	2016 - 2018	2	44.400.000.000	Perkim, PUPR
4	Ruang Kuliah Yayasan P.T Islam Al Hilal Kab. Pidie	Pidie	2014	1	2.000.000.000	Disdik
5	RKB SMKN 1 Ulim; Padang HMT; Lanjutan 4 RKB Lt. 2 SMAN 1 Bandar Dua	Pidie Jaya	2015 - 2016	4	2.200.000.000	Disdik, Disnak
6	D.I. Aneuk Gajah Rheut; D.I. Mon Seukee Pulot	Bireun	2018 - 2020	2	45.000.000.000	Pengairan
7	Jmbt Rangka Baja Krueng Kreh - Pirak Timu; Jmbt Langkahan; Jmbt Rayeek Pangee.	Aceh Utara	2015 - 2017	3	13.700.000.000	PUPR
8	Lab Kimia SMAN 4 Lhoks; Balai Promosi Perdagangan dan Industri Aceh; Gedung Kampus STIE dan STIA; Pabrik Garam Beryodium; Kontruksi Fisik Lanjutan; Asrama Pelajar Aceh Singkil Blower; Pasar Induk Kota Lhoks.	Lhokseumawe	2008 - 2018	7	33.916.289.462	Disdik, Perkim, Budpar, Indag
9	Lanjutan Lab. Kimia SMAN 1 Ranto Peureulak; Lanjutan RKB SMAN 1 Peureulak; Asrama IKAWI Limpuk Abes	Aceh Timur	2008 - 2014	3	3.904.000.000	Disdik, Perkim
10	Pembangunan RSU Regional Langsa	Langsa	2016	1	35.000.000.000	Dinkes
11	Stadion Aceh Tamiang	Aceh Tamiang	2009	1	40.000.000.000	Dispora
12	Sarana Kolam Renang; Lapangan H. M. Hasan Gayo Blang Bebangka; Pemb. Komplek Reje Linge	Aceh Tengah	2008 - 2015	3	5.000.000.000	Disdik, Perkim, Dispora
13	Pemb. Lab Kimia SMAN 1 Putri Betung	Gayo Lues	2008	1	100.000.000	Disdik
14	RKU STAI Sepakat Segenap Kutacane	Aceh Tenggara	2015	1	2.000.000.000	Perkim
15	Sarpras Mesjid Alue Peuyareng	Aceh Barat	2016 - 2018	1	15.000.000.000	Perkim
16	Pembangunan Lanjutan Kantor dan Ruang Pertemuan SMAN 4	Aceh Barat Daya	2007 - 2009	2	750.000.000	Disdik
17	STAI ARRAHMAN; Komplek Pendidikan Pasya Blangkejeren; Sarana Air Bersih SMKN Trumon Timur; Pembangunan Mushalla SMKN 1 Trumon Timur	Aceh Selatan	2014 - 2017	3	2.100.000.000	Dayah, Disdik
18	Kolam Renang Kota dan Kantor MPU	Subulussalam	2013 - 2020	2	8.500.000.000	Dispora, Perkim
19	Jembatan Kilangan	Singkil	2020	1	15.000.000.000	PUPR

Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan bangunan dan gedung pada pemerintah kabupaten/kota dari kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 juga menyisakan kewajiban penuntasan pembangunan gedung/bangunan yang belum fungsional dan terbengkalai yang tersebar di 17 kabupaten/kota sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. 98
Bangunan dan Gedung Terbengkalai kewenangan Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS BANGUNAN GEDUNG	JMLH BANGUNAN	PRAKIRAAN NILAI LANJUTAN PEKERJAAN
			39	*563.620.000.000*
1	Aceh Besar	Jembatan Lampanah Tunong; Jembatan Lam Sie	2	40.000.000.000
2	Pidie	Mesjid Raya Keumala Kec.Keumala; Gedung PDAM Tirta Dharma; Sarana Air Bersih Desa Lhok Panah; Mesjid Agung Al-Falah	4	175.700.000.000
3	Pidie Jaya	Pembangunan Pertokoan Tringgadeng 2 Lantai	1	1.500.000.000
4	Bireun	Gedung Sekolah Tinggi Agama Islam Almuslim; Pustu Lamkuta Kec. Jangka	2	370.000.000
5	Lhokseumawe	Jalan menuju Terminal Type A Kota Lhokseumawe	1	4.500.000.000
6	Aceh Timur	Revitalisasi Pasar Tradisional; Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Peunaron	2	7.800.000.000
7	Tamiang	Jalan Elak Tamiang Bypass; Jembatan Jalan Elak Bypass; Jembatan Pantai Keutapang; Pentas Seni Tamiang	4	141.000.000.000
8	Bener Meriah	Lanjutan Stadion Sepak Bola Mini; Jembatan Gp. Pilar Jaya, Kec. Bandar	2	2.000.000.000
9	Gayo Lues	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Akul; Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Uning Pune	2	3.700.000.000
10	Aceh Tenggara	Ruang Ibadah SDN Lawe Sekerah; RKU STAI Sepakat Segenap Kutacane; Jalan Lingkungan Pasar Salim Pining, Simpang Semadan dan Titi Pasar; Kantor SDN Rambung Teledak; Pengendalian Banjir Sungai Lawe Alas Desa Bale Lutu ; Pengendalian Banjir Sungai Lawe Alas Desa Uning Sigugur; Mesjid Kec. Lawe Alas	6	54.150.000.000
11	Aceh Jaya	Lapangan Volly Gampong Dayah Baro	1	400.000.000
12	Aceh Barat	Stadion Alue Peunyareng Rehab Stadion	1	10.000.000.000
13	Nagan Raya	Pembangunan Gor Kec. Kuala Pesisir	1	1.700.000.000
14	Aceh Barat Daya	Pembangunan Pasar Modern Kab. Aceh Barat Daya	1	70.000.000.000
15	Aceh Selatan	Tapaktuan Sport Center (TSC); Bundaran Mesjid Istiqamah (MI) Tahap II	2	27.100.000.000
16	Subulussalam	Lanjutan Pengadaan Sarana dan Prasarana BBI Subulussalam	1	1.500.000.000
17	Simeulue	Gedung Stadion Kabupaten Simeulue; Pengembangan wisata Pantai Ganting; Landscape Taman PAUD Mulia Dharma; Sarana dan Prasarana MIN Sinabang; Sarana Komplek BLK; Gedung Pelatihan Maritim	6	22.200.000.000

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

2.1.3.3.1. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun di Provinsi Aceh. Peningkatan sektor pariwisata dapat menggerakkan berbagai sektor lain dalam perkonomian seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor industri, perdagangan, transportasi, pertanian dan lain sebagainnya. Secara umum, sektor pariwisata dapat

memberikan efek ganda (*multiplier effect*) bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Besarnya kontribusi sektor pariwisata dapat dilihat melalui pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor yang paling berpengaruh besar dalam pariwisata dan merupakan kategori penanda sektor pariwista dalam struktur PDRB.

Pariwisata di Aceh saat ini telah diarahkan untuk menjadi salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Peningkatan sektor ini bukan hanya mampu menggerakkan sebagian besar sektor penyediaan akomodasi dan makan minum secara khusus. tapi juga mampu memberikan dampak positif bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Pertumbuhan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh dapat dilihat pada gambar berikut:

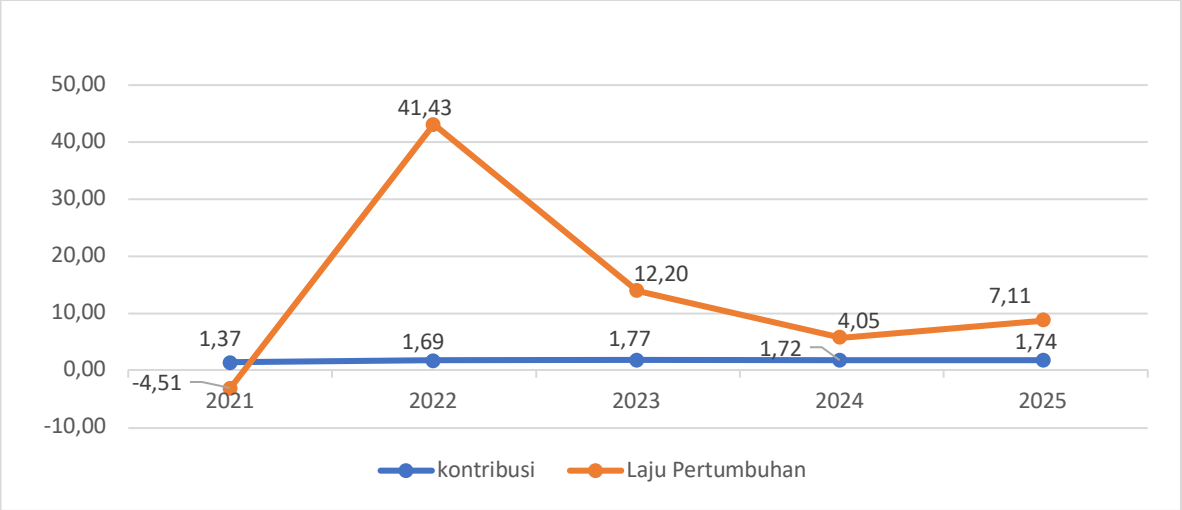

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2026 (diolah)

Gambar 2. 70
Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB Aceh (Persen). Tahun 2021 – 2025

Dalam kurun waktu 2021-2025 pertumbuhan sektor pariwisata di Aceh menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Dari grafik diatas dapat dilihat laju pertumbuhan sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat curam sebesar -4,51 persen pada tahun 2021. Sektor ini mengalami tekanan paling besar akibat pembatasan sosial pada masa pandemi covid-19 sehingga mengalami anjlok yang sangat luar biasa, membuat perekonomian sektor pariwisata menjadi mati suri. Namun sektor pariwisata kembali tumbuh dengan sangat signifikan dan mengalami rebounce pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 41,43 persen akibat dari dampak positif pemulihan perekonomian nasional dan daerahmenjadi titik awal kebangkitan ekonomi dan sangat besar berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023 sektor pariwisata merupakan sektor dengan

pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor perdagangan besar dan eceran, dengan pertumbuhan sebesar 12,20 persen. Pada tahun 2024 sektor ini terus mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,05 persen, meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan gambaran level aktivitas kepariwisataan yang berangsur normal dan secara kuantitatif hilangnya pengaruh efek *rebounce* pada tahun 2022.

Selain infrastruktur sarana dan prasarana pada destinasi maupun objek wisata, permasalahan kelembagaan, tata kelola dan sumber daya manusia (SDM) juga masih menjadi kendala dalam peningkatan pengembangan sektor pariwisata. SDM pariwisata yang berperan sebagai pemandu wisata masih kurang dari segi kuantitas dan kualitasnya, serta pengetahuan kepariwisataan bagi masyarakat umum. Sedangkan upaya promosi dan pemasaran pariwisata di Aceh dengan brand *"The Light of Aceh"* atau disebut juga "Cahaya Aceh" belum mampu dioptimalkan.

A. Capaian IPKN Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2022

Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) pertama kali dicetuskan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno pada tahun 2022. Indikator ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran nasional pentingnya pembangunan ekosistem kepariwisataan di Indonesia dan mengukur besaran peran Pemerintah Daerah terhadap pembangunan kepariwisataan nasional. Aceh mampu bersaing secara nasional dengan meraih peringkat ke-13 dalam capaian indeks tersebut, dengan nilai indeks sebesar 3,58. Sedangkan pada peringkat pertama diperoleh oleh Provinsi Bali dengan nilai sebesar 4,65 dan paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai sebesar 2,65.

Adapun perbandingan nilai capaian Aceh secara nasional dapat dilihat pada gambar berikut :

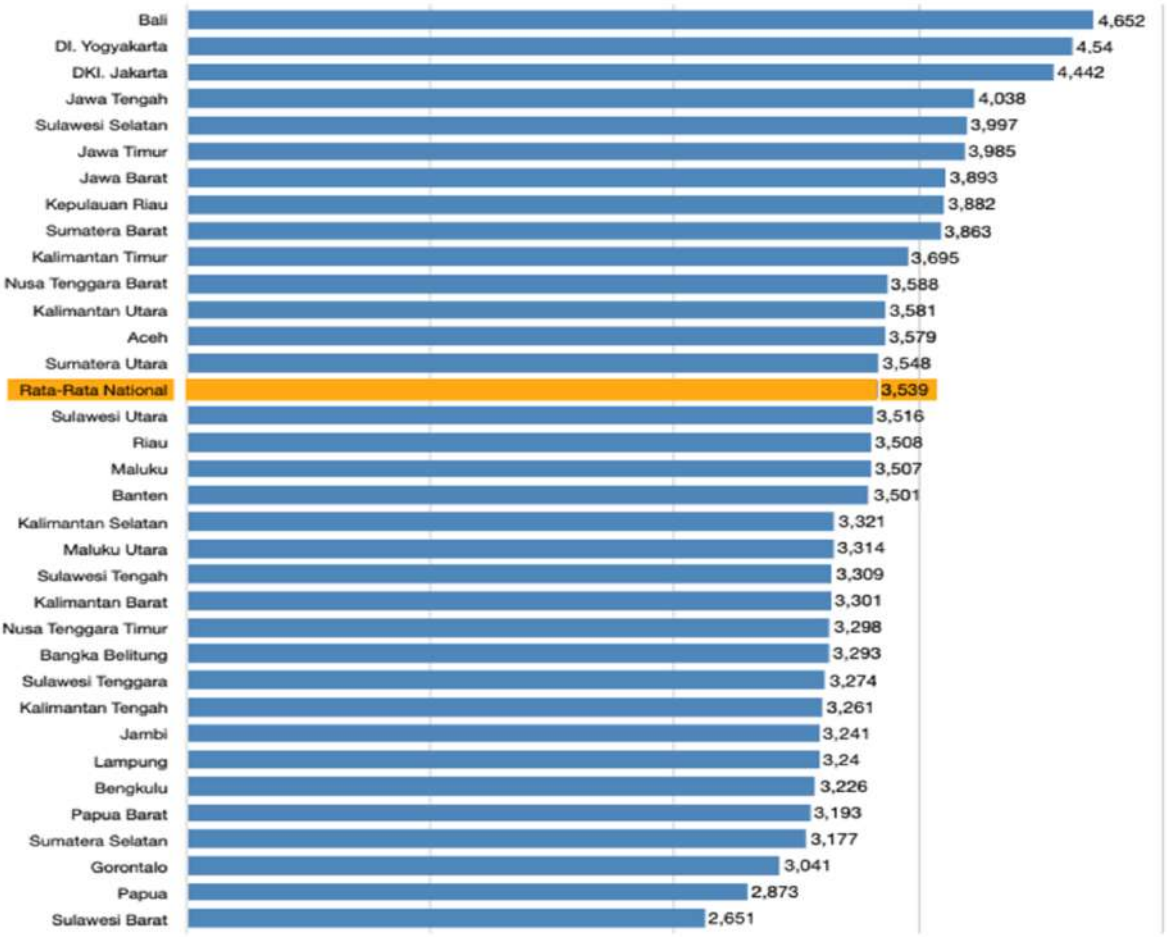

Sumber: Kemenparekraf 2024

Gambar 2. 71
Capaian Pembangunan Kepariwisataan Tingkat Provinsi

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomni Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Aceh menduduki peringkat ke-13 dari 35 provinsi yang ada di Indonesia. Terdapat 5 Sub Indeks Penilaian IPKN yaitu, Enabling Enivornment, Travel and Tourism Policy and Conditions, Infrastructure, Travel and Tourism Demand Drivers, dan T&T Sustainability. Berikut nilai capaian Aceh per Sub Indeks :

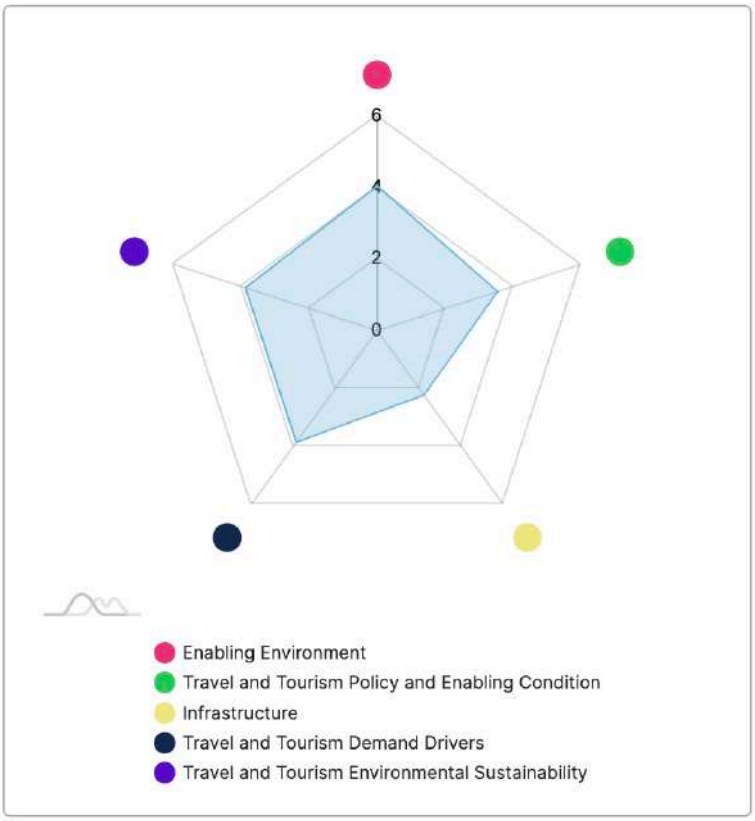

Sumber: Kemenparekraf 2024

Gambar 2. 72
Gambar Capaian IPKN Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2023 Per Sub indeks

Dari data yang dirilis Kemenparekraf dapat dijelaskan nilai dari grafik diatas per sub indeks sebagai berikut:

1) *Enabling Environtment* : Aceh mencapai skor 4,05;
2) *Travel & Tourism Policy and Conditions*, : Aceh mencapai skor 3.55;
3) *Infrastructure* : Aceh mencapai skor 2.23;
4) *Travel & Tourism Demand Drivers*, : Aceh mencapai skor 3.86;
5) *Travel & Tourism Environmental Sustainability*, : Aceh mencapai skor 3.89.

Nilai Provinsi Aceh paling tinggi terdapat pada sub indeks *Enabling Environtment,* hal ini menunjukkan kondisi pemungkin di Aceh yang mendukung perkembangan pariwisata cukup baik, terutama pada indikator kesehatan dan higenitas, lingkungan bisnis, keselamatan dan keamanan. Pada Sub Indeks *T&T Demand Drivers* Aceh bahkan meraih peringkat 5 besar dengan skor 3,86, hal ini menunjukkan daya saing Aceh sangat unggul secara nasional terutama pada sumber daya alam dan sumber daya budayanya. Namun Aceh masih sangat lemah pada sub indikator infrastruktur, baik infrastruktur pelayanan pada objek wisata maupun infrastruktur pendukung seperti transportasi udara dan transportasi laut.

Pembangunan pariwisata Aceh merupakan upaya yang signifikan dalam meningkatkan sektor pariwisata, Aceh memiliki potensi alam yang kaya, budaya yang unik, dan sejarah yang menarik, menjadi perhatian bagi wisatawan yang ingin

berkunjung di Aceh. Dari ketiga Indikator tersebut pembangunan pariwisata dihitung untuk memperoleh ranking dari seluruh provinsi se-Indonesia, tahun 2022 Provinsi Aceh berada di peringkat ke-13.

Salah satu tujuan utama dalam pembangunan pariwisata di Aceh adalah memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat setempat, dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung, diharapkan akan terciptanya lapangan kerja baru, peningkatan masyarakat dan penguatan kearifan lokal sosial ekonomi di Aceh. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang telah mendapatkan HAKI pada tahun 2025 berjumlah 18.412, yang terdiri dari Hak Cipta 14.816, Merek dan Industri 3.335, dan Paten 261.

B. Jumlah Kunjungan Wisata ke Aceh

Secara umum kondisi kepariwisataan Aceh dapat dikatakan mulai membaik, hal ini dapat dilihat dari mulai meningkatnya jumlah kunjungan wisata, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh yang terus mengalami pemulihan kembali pasca terdampak covid pada tahun 2020-2021, sebagaimana data disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 99
Jumlah Kunjungan Wisata ke Aceh Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Wisatawan Nusantara	4.142.179	5.534.405	6.954.578	7.270.318	12.924.997
2	Wisatawan Mancanegara	10.402	-	2.632	29.848	33.854

Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Dari data diatas tercatat pada tahun 2025 terdapat sebanyak 20.096.350 kunjungan wisatawan nusantara, hal ini menandakan minat kunjungan wisatawan dari provinsi lain terhadap Aceh mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Hal yang serupa juga dialami pada jumlah wisatawan mancanegara, dimana pada tahun 2021 tidak ada kunjungan sama sekali akibat dari pembatasan sosial mulai membaik pada tahun 2022 dimana terdapat 2.632 kunjungan wisata dan kemudian meningkat tajam pada tahun 2023 dengan jumlah kunjungan wisata sebanyak 29.848 kunjungan wisatawan manca negara. Wisatawan nusantara berdasarkan jumlah kunjungan pada tahun 2024 mengalami peningkatan mencapai 56,2% dari tahun 2023 sebesar 7.270.318 orang.

Selain infrastruktur sarana dan prasarana pada destinasi maupun objek wisata, permasalahan kelembagaan, tata kelola dan sumber daya manusia (SDM) juga masih menjadi kendala dalam peningkatan pengembangan sektor pariwisata. SDM pariwisata yang berperan sebagai pemandu wisata masih kurang dari segi kuantitas

dan kualitasnya, serta pengetahuan kepariwisataan bagi masyarakat umum. Sedangkan upaya promosi dan pemasaran pariwisata di Aceh dengan brand "The Light of Aceh" atau disebut juga "Cahaya Aceh" belum mampu dioptimalkan.

2.1.3.3.2. Pertanian

Pertanian masih menjadi sektor unggulan dan tulang punggung perekonomian Aceh dengan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Aceh. Lapangan Usaha Pertanian secara umum (termasuk Kehutanan dan Perikanan) tetap menjadi lapangan usaha terbesar berdasarkan PDRB Aceh. Perkembangan PRDB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Provinsi Aceh untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

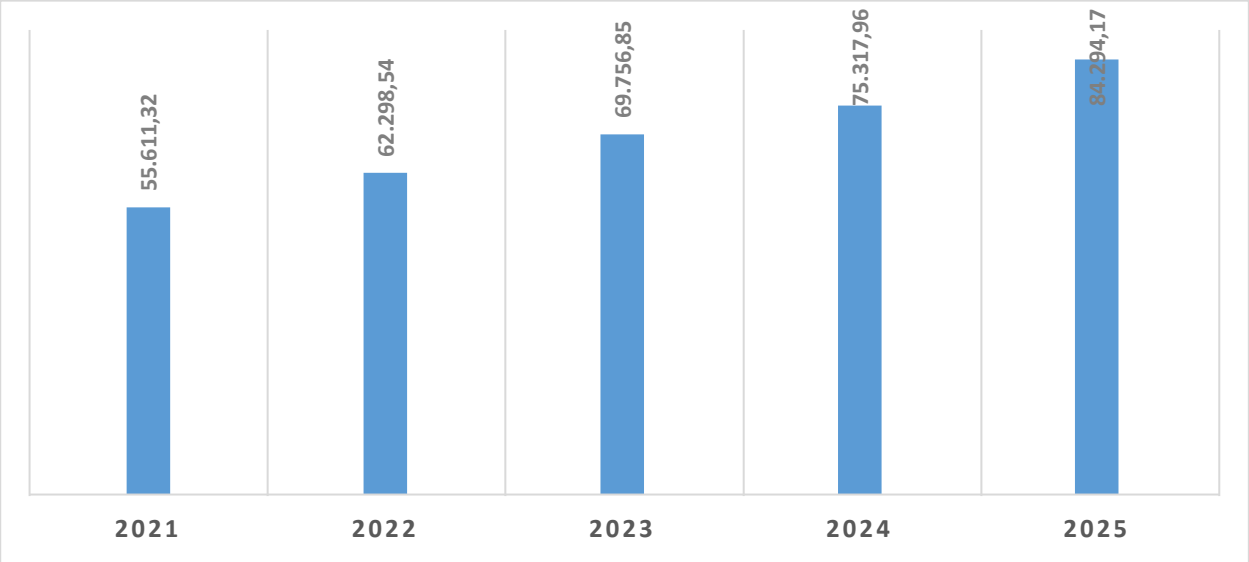

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2026

Gambar 2. 73
PDRB ADHB Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2021-2025

PDRB ADHB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2021-2025 dari Tahun 2021 sampai dengan 2025 masih tetap didominasi oleh Sektor Pertanian, yang meliputi; Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian. Kontribusi dari masing-masing sub sektor terhadap PRDB ADHB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2026

Gambar 2. 74
PDRB Menurut Sub Sektor di Aceh Tahun 2021 – 2025

Besarnya kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap PDRB tidak terlepas dari besarnya jumlah usaha pertanian perorangan atau badan usaha atau usaha lainnya yang menggeluti lapangan usaha ini. Usaha Pertanian Perorangan pada sub sektor Tanaman Pangan menempati urutan pertama yang terbesar, kemudian diikuti oleh Perkebunan, Hortikultura, Peternakan dan seterusnya. Perbandingan Jumlah Usaha Pertanian Perorangan, Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum, dan Usaha Pertanian Lainnya menurut sektor dan sub sektor dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 2. 100
Jumlah Usaha Pertanian Menurut Subsektor dan Jenis Usaha di Aceh (unit)

Subsektor	Usaha Pertanian Perorangan (UTP)	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB)	Usaha Pertanian Lainnya (UTL)
(1)	(2)	(3)	(4)
PERTANIAN			
Tanaman Pangan	465.507	0	33
Hortukultura	180.046	0	129
Perkebunan	372.452	85	52
Peternakan	181.726	1	43
Perikanan	47.242	3	45
Kehutanan	8.804	2	0
Jasa Pertanian	6.210	1	3

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian didominasi oleh Rumah Tangga Petani Tanaman Pangan, diikuti dengan Tanaman Perkebunan, Hortikultura, dan Peternakan.



Sumber: BPS (2025)

Gambar 2. 75
Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian

Kontribusi sektor Pertanian yang sangat dominan dalam perekonomian Aceh salah satunya disebabkan oleh ketersediaan lahan pertanian, terutama Lahan Sawah. Meskipun demikian, luas lahan sawah terus mengalami pengurangan yang cukup signifikan, dari 363.111 Ha pada tahun 2010, menjadi 213.998 ha pada tahun 2023, sesuai dengan SK Menteri ATR BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019.

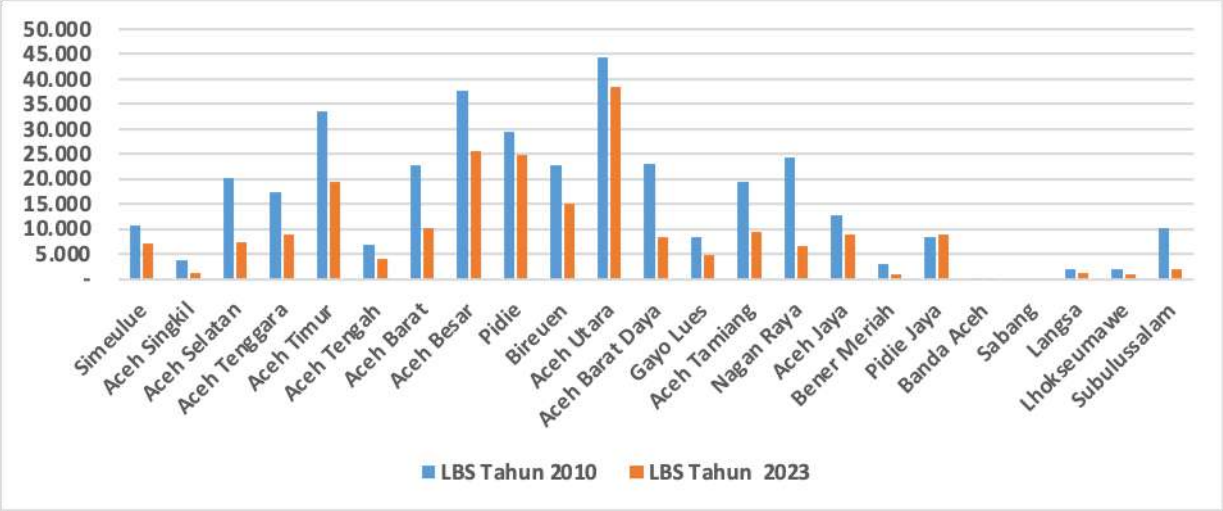

Sumber: SK Menteri ATR/BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019

Gambar 2. 76
Luas Lahan baku Sawah Menurut Kabupaten/Kota

Berkurangnya lahan sawah secara signifikan disinyalir terjadi akibat dari alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan, tegalan, permukiman dan sarana lainnya. Disamping akibat dari konversi lahan, Aceh juga memiliki permasalahan tidak berfungsinya lahan sawah akibat kurangnya jaringan irigasi yang memadai. Bencana juga menjadi salah satu faktor berkurangnya lahan pertanian, seperti bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025 yang telah menyebabkan rusak lahan pertanian, terutama lahan sawah, yang berdampak pada tanaman pangan.

Pada Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdapat 4 komoditi unggulan Aceh, yaitu: Padi, Jagung, Cabai dan Bawang Merah. Dari keempat komoditi ini, Padi merupakan jenis tanaman pangan utama yang memiliki luas lahan dan produksi paling besar di Aceh.

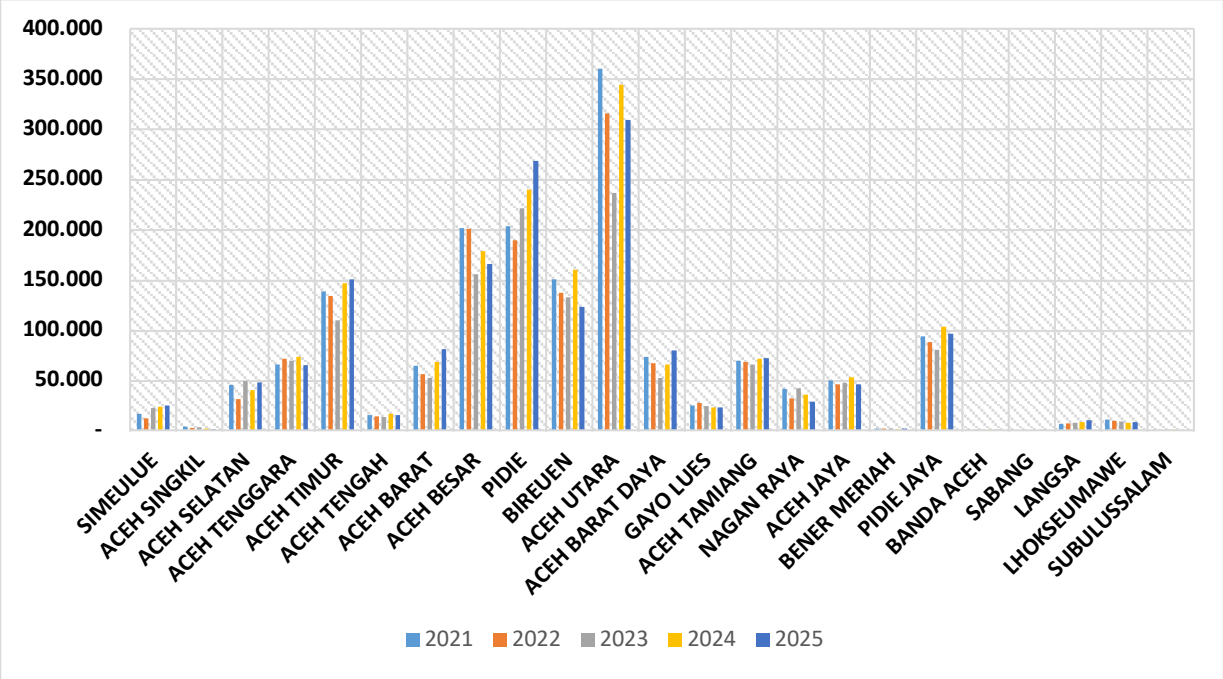

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2026

Gambar 2. 77
Perkembangan Produksi Padi di Provinsi Aceh (Ton) Tahun 2021–2025

Subsektor tanaman pangan, khususnya komoditas padi, tetap memegang peranan strategis dalam struktur perekonomian pertanian Aceh. Selain sebagai komoditas utama penopang ketahanan pangan daerah, padi juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, stabilitas harga pangan, pengendalian inflasi, serta penguatan ekonomi perdesaan. Produksi padi menjadi salah satu indikator ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan perkembangan produksi padi kabupaten/kota selama periode 2021–2025, terlihat bahwa kapasitas produksi Aceh masih relatif kuat, namun menunjukkan konsentrasi produksi pada pesisir timur, ketimpangan spasial

antarwilayah, serta fluktuasi produksi tahunan yang dipengaruhi oleh faktor agroklimat, bencana akibat perubahan iklim, infrastruktur, dan tata kelola budidaya. Produksi padi di Aceh masih sangat bertumpu pada beberapa kabupaten sentra produksi, terutama Aceh Utara, Pidie, Aceh Besar, Aceh Timur, dan Bireuen. Kelima wilayah ini merupakan tulang punggung produksi beras daerah yang secara agregat memberikan kontribusi dominan terhadap total produksi padi Aceh.

Sementara itu, wilayah kepulauan, pegunungan, dan kota administratif seperti Simeulue, Gayo Lues, Sabang, Langsa, Lhokseumawe, dan Subulussalam menunjukkan volume produksi padi yang relatif kecil. Hal ini lebih disebabkan oleh kondisi agroekologi, topografi, dan sempitnya lahan sawah.

Selain besarnya jumlah produksi, produktivitas juga menjadi indikator keberhasilan pengembangan pertanian. Produktivitas padi di Provinsi Aceh dapat dikelompokkan ke dalam tiga klaster utama, yaitu: Klaster Produktivitas Tinggi (60-72 ton/ha), Klaster Produktivitas Menengah (50-60 ton/ha), dan Klaster Produktivitas Rendah (39 – 49 ton/ha).

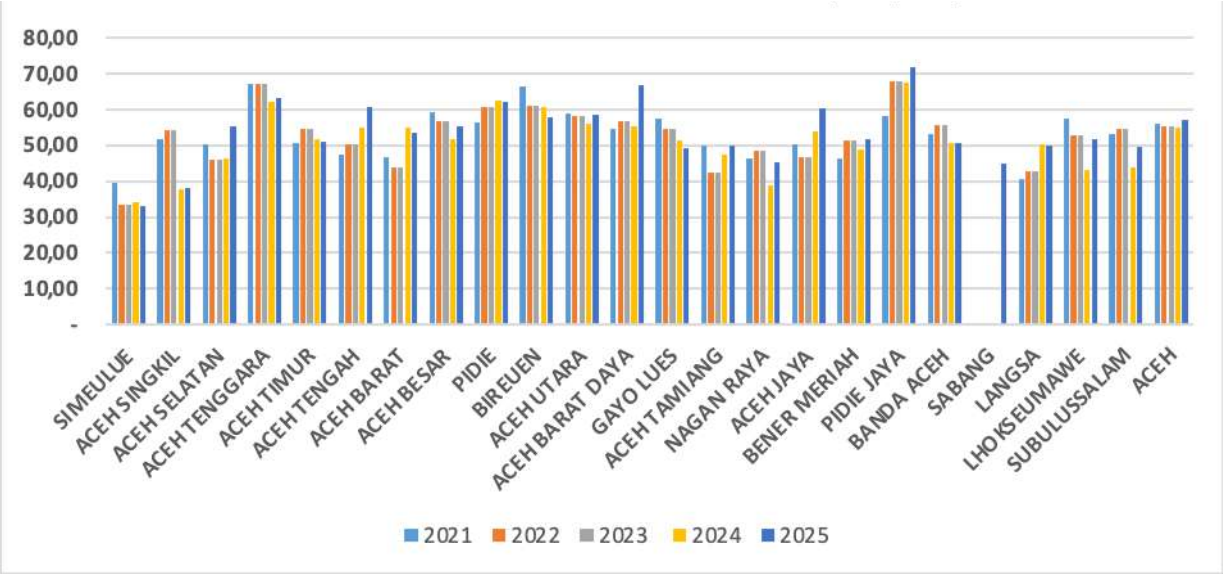

Gambar 2. 78
Perkembangan Produksi Padi di Provinsi Aceh (Ton-GKG), 2021–2025

Beberapa kabupaten menunjukkan capaian produktivitas tinggi dan relatif konsisten (antara 60–72 ton/ha), yaitu: Aceh Tenggara, Pidie Jaya, Pidie, Bireuen, dan Aceh Utara. Selanjutnya kelompok produktivitas menengah (antara 50–60 ton/ha), meliputi: Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Bener Meriah, Banda Aceh, Lhokseumawe dan Subulussalam. Sementara itu Kelompok Produktivitas Rendah, mencakup: Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Langsa

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa secara umum produktivitas padi Aceh relatif baik dengan kecenderungan meningkat, meskipun masih terdapat disparitas antarwilayah, fluktuasi tahunan, serta gap produktivitas antar sentra produksi. Permasalahan yang sering dihadapi oleh Petani Padi adalah kegagalan panen akibat bencana alam, khususnya banjir. Setiap tahunnya ribuan hektare lahan padi terendam banjir yang kemudian akan mati yang berujung gagal panen.

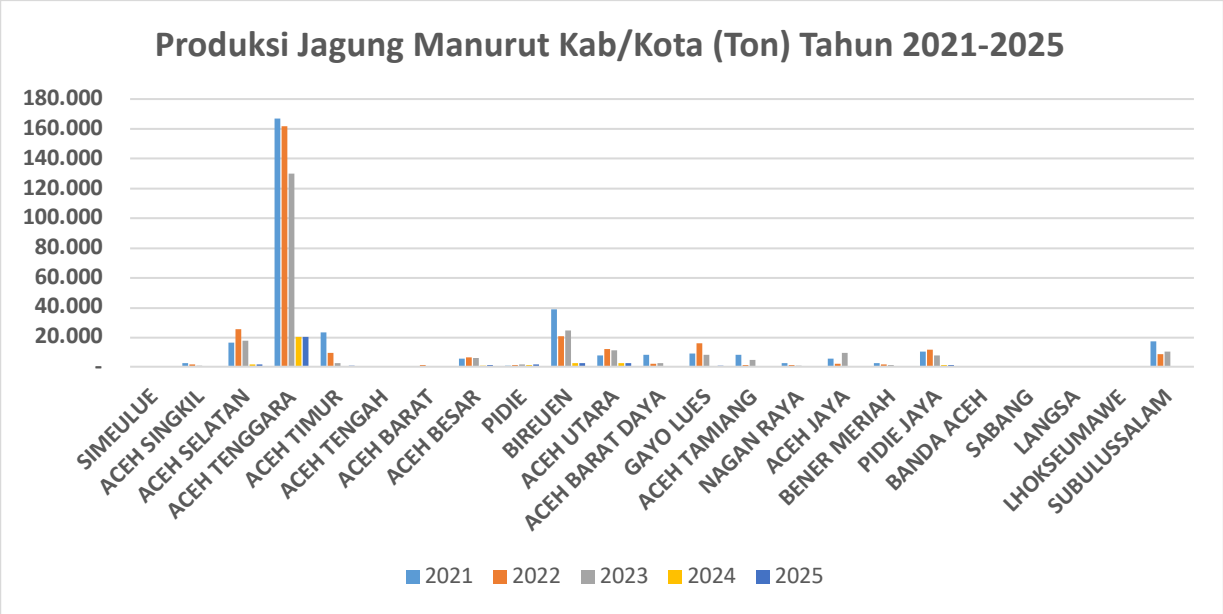

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2026

Gambar 2. 79
Perkembangan Produksi Jagung di Provinsi Aceh (Ton-GKG), 2021–2025

Komoditi pangan lainnya yang sangat penting dalam perekonomian Aceh adalah Jagung. Komoditas jagung memiliki posisi strategis dalam pembangunan pertanian Aceh, yang memiliki keterkaitan sektoral yang kuat (forward dan backward linkage). Hal ini karena pertumbuhannya tidak hanya memengaruhi subsektor tanaman pangan, tetapi juga industri pakan, peternakan unggas, UMKM pangan, serta perdagangan hasil pertanian.

Berdasarkan perkembangan produksi jagung kabupaten/kota selama periode 2021–2025, terlihat bahwa struktur produksi jagung di Aceh masih terkonsentrasi pada satu wilayah utama, yaitu: Aceh Tenggara, disertai kontribusi menengah dari beberapa wilayah penyangga, serta masih rendahnya skala produksi di sebagian besar kabupaten/kota lainnya. Struktur seperti ini menunjukkan bahwa Jagung merupakan komoditi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, namun basis produksinya masih belum tersebar secara merata.

Pada sub sektor Hortikultura, komoditi yang sangat penting bagi Aceh adalah Cabai dan Bawang Merah. Keduanya merupakan komoditi yang mempengaruhi inflasi dan juga menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian petani Aceh. Tabel

di bawah ini memperlihatkan distribusi produksi empat komoditas strategis hortikultura, yaitu bawang merah, cabai rawit, cabai besar, dan cabai keriting, menurut kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Tabel 2. 101
Produksi Tanaman Hortikultura Bawang dan Cabai Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Bawang Merah (Kw)	Cabai Rawit (Kw)	Cabai Besar (Kw)	Cabai Keriting (Kw)
Simeulue	-	176	-	365
Aceh Singkil	-	158	-	537
Aceh Selatan	157	506	-	871
Aceh Tenggara	10.028	5.861	240	9.086
Aceh Timur	-	-	-	-
Aceh Tengah	11.470	950.820	-	1.666.479
Aceh Barat	49	1.060	80	2.220
Aceh Besar	522	50.441	-	31.879
Pidie	95.878	30.364	-	18.228
Bireuen	10	3.526	-	11.257
Aceh Utara	332	16.723	158	17.269
Aceh Barat Daya	-	332	-	602
Gayo Lues	11.389	12.581	-	17.101
Aceh Tamiang	-	420	-	821
Nagan Raya	368	4.207	-	6.812
Aceh Jaya	-	2.974	200	3.477
Bener Meriah	2.295	32.512	541	34.421
Pidie Jaya	317	9.601	17	18.347
Kota Banda Aceh	-	-	-	-
Kota Sabang	-	184	-	297
Kota Langsa	-	40	-	93
Kota Lhokseumawe	-	228	57	532
Kota Subulussalam	-	308	-	258
Aceh	**132.816**	**1.123.021**	**1.293**	**1.840.950**

Secara umum, data menunjukkan adanya konsentrasi produksi yang sangat kuat pada beberapa wilayah sentra, disertai ketimpangan spasial yang tinggi, serta spesialisasi komoditas antarwilayah yang mencerminkan perbedaan agroekologi, kultur budidaya, dan tingkat pengembangan agribisnis hortikultura.

2.1.3.3.3. Perkebunan

Sub sektor perkebunan merupakan salah satu penopang utama struktur ekonomi pertanian Provinsi Aceh, baik dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, pembentukan pendapatan rumah tangga perdesaan, maupun peran strategisnya dalam ekspor komoditas primer.

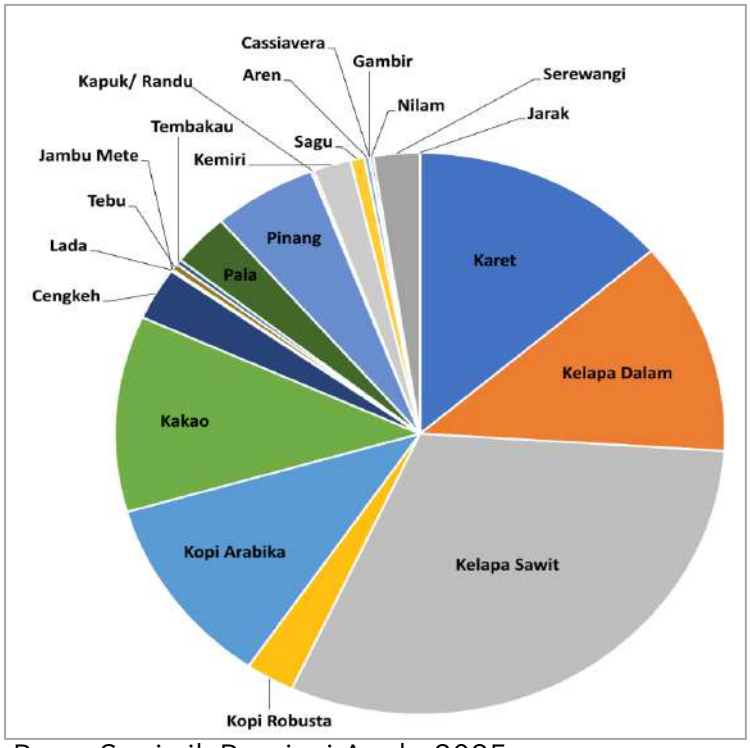

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025

Gambar 2. 80
Proporsi Komoditi pada sub Sektor Perkebunan

Peningkatan persentase kontribusi sub sektor perkebunan sangat dipengaruhi oleh produksi dan produktivitas dari beberapa komoditas utama di Aceh diantaranya Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kakao dan Kelapa Dalam. Grafik di bawah ini menunjukkan komposisi kelima jenis komoditi tersebut dalam peta komoditi unggulan Aceh.

Data luas lahan perkebunan menunjukkan bahwa Provinsi Aceh memiliki basis agribisnis perkebunan yang sangat kuat dan beragam, mencakup komoditas ekspor, komoditas industri, komoditas rempah, serta komoditas lokal bernilai ekonomi tinggi.Namun demikian, struktur lahan perkebunan Aceh juga menunjukkan dominasi yang sangat kuat pada beberapa komoditas utama, sementara sejumlah komoditas lainnya berkembang dalam skala relatif kecil sebagai komoditas *niche*. Grafik di bawah ini menunjukkan Luas Lahan komoditi unggulan perkebunan di Aceh

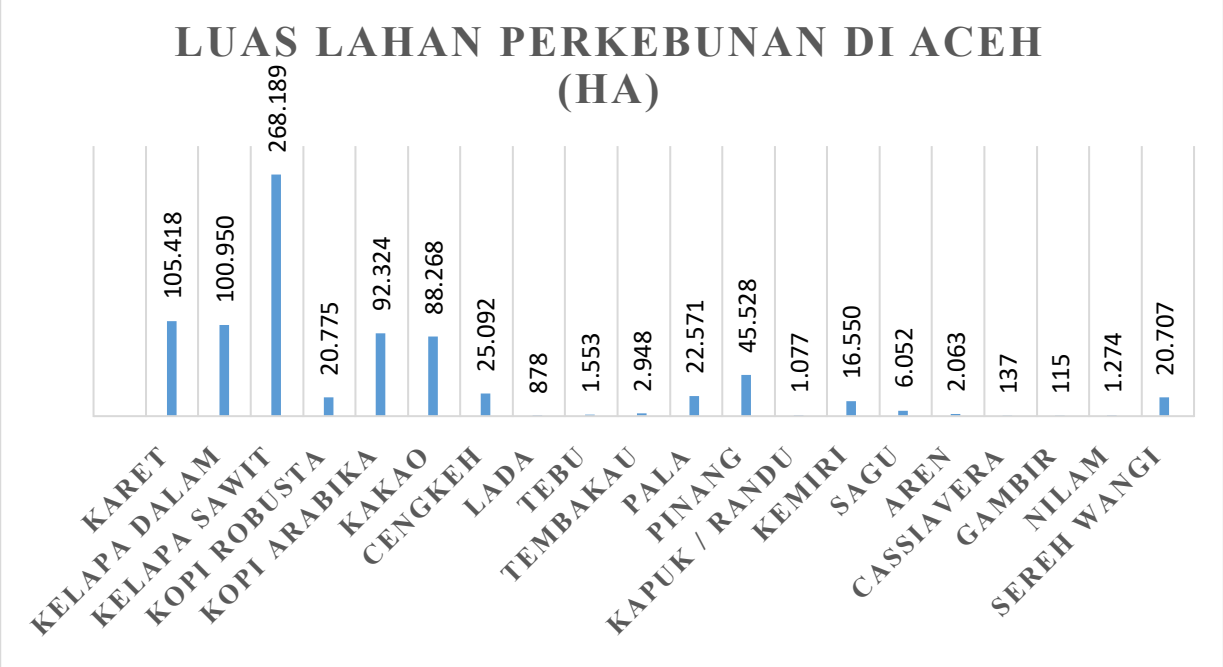

Sumber: Statistik Perkebunan Aceh. 2024 (diolah)

Gambar 2. 81
Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Jenis Komoditas di Aceh

Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2023) kondisi luasan areal tanaman perkebunan rakyat belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dimana pada tahun 2018 luas areal perkebunan sebesar 838.538 Ha, pada tahun 2021 menjadi 845.580 ha, namun pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 837.778 Ha. Hal ini diperkirakan sebagai dampak dari dikeluarkannya lahan-lahan perkebunan yang masuk di dalam kawasan hutan.

Luas areal Perkebunan untuk masing-masing jenis tanaman perkebunan berpengaruh terhadap volume produksinya. Berdasarkan grafik Produksi Komoditi Perkebunan Aceh (Ton), struktur produksi perkebunan Provinsi Aceh menunjukkan adanya dominasi yang sangat kuat oleh beberapa komoditas utama, khususnya komoditas berbasis ekspor dan bahan baku industri, disertai keberadaan sejumlah komoditas sekunder dan komoditas niche yang memiliki nilai ekonomi spesifik.

Struktur produksi komoditi menunjukkan bahwa Aceh memiliki basis perkebunan yang diversified but concentrated, yaitu beragam secara jenis komoditas namun secara volume produksi masih terkonsentrasi pada sedikit komoditas utama. Grafik di bawah ini menunjukkan komoditi-komoditi yang mendominasi perekonomian Aceh, yaitu: Kelapa Sawit, Kelapa Dalam, Karet, Kopi dan Kakao.

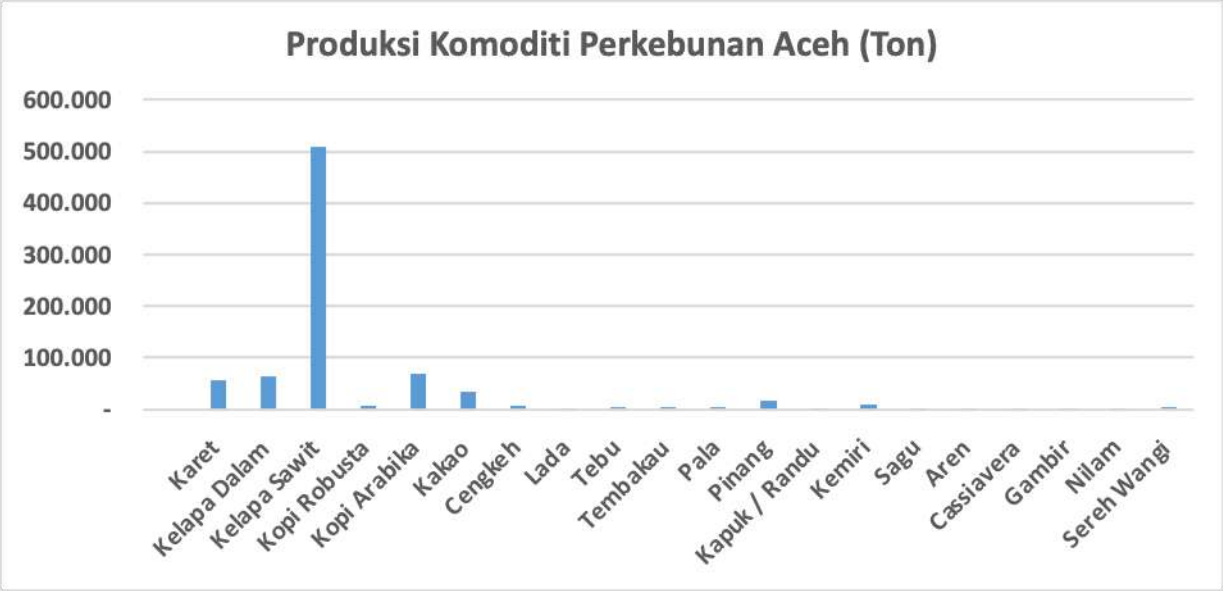

Sumber: : Statistik Perkebunan Aceh. 2025 (diolah)

Gambar 2. 82
Jumlah Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Aceh

Grafik menunjukkan bahwa Kelapa Sawit merupakan komoditas dengan volume produksi tertinggi secara sangat dominan, mencapai kisaran lebih dari 500 ribu ton, jauh melampaui komoditas lainnya. Kelapa Sawit merupakan tanaman perkebunan andalan Aceh saat ini. Kelapa Sawit utamanya dibudidayakan di 15 kabupaten/kota di Aceh. Kelapa Sawit juga menjadi komoditi andalan ekspor Aceh, terutama untuk produk Crude Palm Oil (CPO). Ekonomi yang ditopang oleh komoditas ekspor sangat rentan terhadap *shock* pasar sawit global. Naik turunnya harga sawit global akan secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan petani.

Kopi, Kakao, Karet dan Kelapa juga merupakan komoditi ekspor yang harganya tergantung pada kondisi pasar global, namun volumenya belum sbesar kelapa sawit. Untuk komoditi Kopi, Aceh merupakan penghasil utama Kopi Arabika yang sangat diminati oleh pasar Eropa dan Amerika.

Aceh memiliki portofolio perkebunan yang kaya, yang dapat menjadi modal ketahanan ekonomi. Pengembangan komoditas-komoditas unggulan ini akan memberikan peluang penghasil pendapatan utama bagi banyak rumah tangga petani, yang pada akhirnya akan menjadi penggerak perekonomian daerah. Jumlah petani yang menggantungkan hisup pada sub sector perkebunan ini mencapai 800.933 Kepala Keluarga. Ini berarti bahwa sub sektor ini menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 2 juta jiwa.

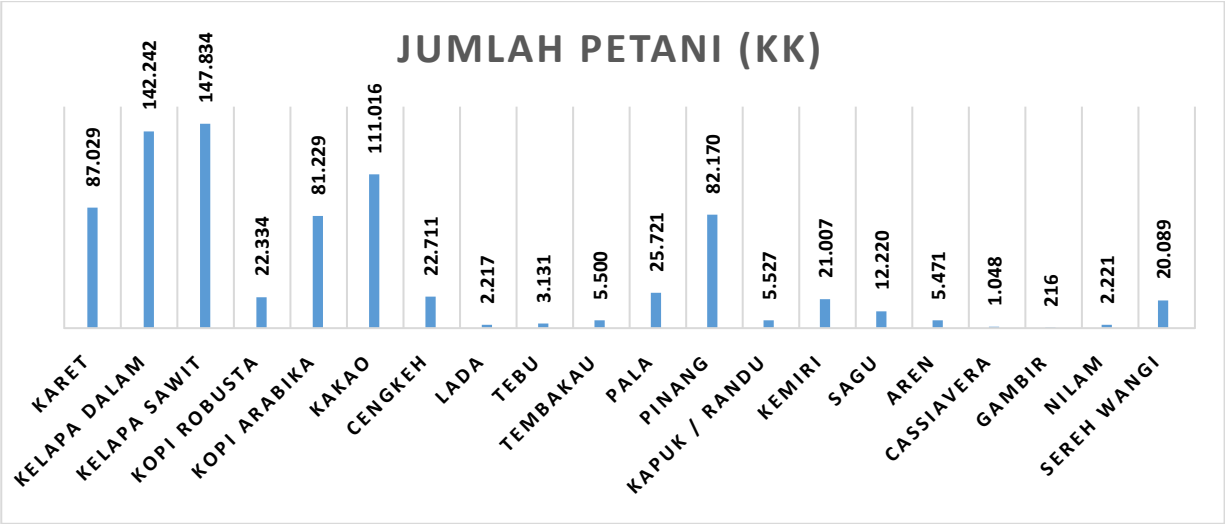

Sumber : Sumber: Statistik Perkebunan Aceh. 2025 (diolah)

Gambar 2. 83
Jumlah Petani Pekebun Menurut Jenis Komoditas

Berdasarkan data luasan budidaya, produksi, dan produktivitas perkebunan, dapat kita simpulkan bahwa Aceh memiliki fondasi ekonomi agraris yang kuat, beragam, dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat agroindustri tropis di kawasan barat Indonesia. Tantangan pembangunan ke depan bukan hanya meningkatkan volume produksi, tetapi mentransformasikan struktur produksi primer menjadi ekonomi perkebunan berbasis nilai tambah, industrialisasi, keberlanjutan lingkungan, dan daya saing global.

2.1.3.3.4. Peternakan

Komoditas peternakan masih menjadi andalan tersendiri di Aceh, meskipun sub sektor peternakan ini belum mampu memenuhi kebutuhan pangan asal hewani yang dibutuhkan para konsumen sehingga masih harus didatangkan dari luar daerah. Namun demikian, secara umum sub sektor peternakan telah mampu memberikan kontribusi terhadap kegiatan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan jenisnya, ternak dikelompokkan menjadi ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda), ternak kecil (kambing, domba dan babi), ternak unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik manila), dan aneka ternak (kelinci, puyuh).

Tabel 2. 102
Populasi Ternak di Aceh Tahun 2025

Kabupaten Kota	Sapi potong	Sapi Perah	Kerbau	Kambing	Domba	Kuda
Simeulue	6.111	-	20.240	2.060	-	-
Aceh Singkil	4.711	-	1.200	4.470	1.123	-
Aceh Selatan	5.170	-	3.750	24.830	4.548	-
Aceh Tenggara	3.006	-	148	7.150	94	94
Aceh Timur	21.532	-	435	14.890	711	-
Aceh Tengah	7.645	5	4.619	6.464	219	735
Aceh Barat	9.859	-	28.012	10.429	872	-
Aceh Besar	82.856	8	10.806	48.995	6.388	45
Pidie	25.221	-	2.996	20.143	793	-
Bireuen	54.843	-	2.700	66.182	35.275	-
Aceh Utara	119.325	-	6.520	121.568	23.874	-
Aceh Barat Daya	5.350	-	4.047	9.432	814	-
Gayo Lues	3.490	-	4.987	2.891	1.080	90
Aceh Tamiang	38.268	-	55	9.146	9.146	6
Nagan Raya	15.201	-	11.280	17.485	2.863	-
Aceh jaya	30.611	-	4.820	17.218	204	6
Bener Meriah	2.796	-	822	1.744	701	187
Pidie Jaya	13.800	-	572	11.239	380	-
Banda Aceh	1.180	-	39	1.971	58	-
Sabang	1.165	-	15	2.752	29	-
Langsa	4.950	-	67	2.627	312	4
Lhokseumawe	6.030	-	25	3.173	238	-
Subulussalam	3.788	-	367	10.012	2.005	8
data aceh dalam angka	466.908	13	108.522	416.871	91.727	1.175

Sumber BPS 2026

Berdasarkan data populasi ternak di Aceh tahun 2025 yang diperoleh dari 23 kabupaten/kota dapat dilihat bahwa sebaran populasi ternak sapi terkonsentrasi di kabupaten Aceh Utara yaitu sebanyak 119.325 ekor sedangkan untuk populasi kerbau terkonsentrasi di kabupaten Aceh Barat dengan populasi sebanyak 28.012 ekor. Sementara untuk ternak kecil seperti kambing dan domba terbanyak di kabupaten Aceh Utara.

Produksi ternak di Provinsi Aceh umumnya didominasi oleh ternak ruminansia dan unggas. Ternak ruminansia meliputi sapi pedaging, kerbau, kambing dan domba, sementara sapi perah, kuda dan babi terdapat dalam jumlah terbatas dan tersebar hanya dibeberapa wilayah kabupaten. Ternak sapi perah dan kuda tidak umum dipelihara oleh masyarakat secara luas, sementara ternak babi dibudidayakan terutama untuk memenuhi kebutuhan warga non muslim. Ternak sapi pedaging yang banyak dijumpai adalah sapi Aceh, sapi Bali, sapi PO dan sapi silangan hasil IB, sementara sapi Brahman Cross (BX) terdapat dalam jumlah terbatas di beberapa wilayah Aceh seperti Aceh Tamiang dan Aceh Tenggara.

Ternak kerbau merupakan ternak ruminansia besar potensial kedua setelah ternak sapi pedaging, yang secara tradisional telah lama diusahakan oleh petani. Namun demikian, keberadaan ternak ini cenderung tergeser oleh ternak sapi yang lebih mudah dipelihara dan memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi. Jenis

ternak kerbau yang diusahakan masyarakat adalah kerbau rawa dan ternak ini umum dijumpai di padang penggembalaan, kawasan hutan dan lahan sawah. Jenis ternak ruminansia kecil umum dijumpai adalah Kambing Kacang, Kambing Jawarandu dan domba lokal. Ternak ruminansia pedaging tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan perayaan keagamaan seperti hari raya Idul Fitri, Idul Qurban, menjelang Ramadhan, megang maupun hajatan keluarga.

Pencapaian target Produksi daging masih relatif baik. Setelah dapat dicapai di atas target terakhir pada Tahun 2022, produksi Telur dan susu menunjukkan tren menurun. Data Produksi Daging Saat ini sudah mulai dipercepat produksinya. Secara lebih detil trend produksi daging berdasarkan jenis ternak ditunjukan dalam tabel 2.102.

Tabel 2. 103
Produksi Daging di Aceh (Ton)Tahun 2020-2024

No	Jenis Daging	Jumlah Produksi Daging (Ton)/Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sapi Potong	12.928	11.674	15.629	11.011	13.799	16.681
2	Kerbau	2.389	2.715	2.604	1.916	1.983	1.248
3	Kambing	1.946	2.001	2.119	1.361	1.040	905
4	Domba	351	445	572	319	270	362
5	Babi	130	57	61	56	12	13
6	Ayam Buras	10.437	8.965	8.694	3.796	7.721	7.568
7	Ayam Ras Petelur	305	167	388	523	164	85
8	Ayam Ras Pedaging	34.437	45.280	42.031	41.726	44.522	46.275
9	Itik	1.119	1.115	1.548	326	859	841
10	Itik Manila	399	303	351	85	262	271
11	Puyuh	9	8	9	6	5	6
	Jumlah	**64.450**	**72.730**	**74.006**	**61.125**	**70.637**	**74.255**

Sumber: Dinas Peternakan Aceh

Produksi ternak berupa daging berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing,domba, dan babi). Produksi daging unggas berasal dari ternak ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, dan itik manila. Produksi aneka ternak berasal dari kelinci dan puyuh. Berdasarkan table yang tersaji di atas terlihat bahwa total produksi daging ternak besar dan kecil pada tahun 2024 sebanyak 70.637 Ton mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 61.125 Ton. Sedangkan produksi daging ternak unggas dan aneka ternak pada tahun 2025 sebanyak 74.255 Ton.

Produksi daging mengalami penurunan pada tahun 2023 akibat perubahan pola pemeliharaan, kualitas pakan. Selain itu, penurunan dapat juga diakibatkan oleh perubahan strategi dalam pengembangbiakan yang lebih fokus pada peningkatan populasi indukan. Diperlukan strategi yang seimbang antara peningkatan populasi dan optimalisasi produksi daging guna memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan industri peternakan di masa depan.

Produksi telur berasal dari 5 komoditas ternak penghasil telur, yaitu ayam buras; ayam ras petelur; itik; itik manila; dan burung puyuh. Komoditas ternak utama penghasil telur adalah ayam ras petelur.

Tabel 2. 104
Produksi Daging Tahun 2020 - 2025

No	Jenis Daging	Jumlah Produksi Daging (Ton)/Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Ayam Buras	11.133	9.564	9.274	4.050	8.237	8.073
2	Ayam Tas Petelur	2.427	9.160	3.735	9.696	3.013	1.562
3	Itik	7.114	7.084	9.838	2.070	5.460	5.347
4	Itik Manila	2.536	1.923	2.233	543	1.662	1.722
5	Puyuh	97	82	95	62	55	60
	Jumlah	**23.307**	**27.813**	**25.175**	**16.421**	**18.427**	**16.764**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2026

Produksi ternak berupa telur berasal dari ayam buras, ayam ras petelur, itik, itik manila dan puyuh. Pada tabel yang tersaji juga dapat dilihat produksi telur pada tahun 2024 sebanyak 18.427 Ton yang artinya mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2023 sebanyak 16.421 Ton.

Apabila dilihat dari capaian target, maka dapat dikatakan bahwa produksi produksi daging dan telur mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian capaian ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap daging dan telur perlu didatangkan dari luar daerah dan bahkan dari luar negeri.

Permasalahan utama pada sub sektor peternakan yakni terbatasnya ketersediaan bibit ternak disebabkan oleh belum optimalnya sistem reproduksi yang menggunakan Inseminasi Buatan (IB); Masih ditemukannya kasus penyakit hewan yang dapat menurunkan produksi ternak seperti SE, gangguan reproduksi, surra dan Parasiter, Masih tingginya pemotongan ternak diluar RPH dan tingginya pemotongan ternak betina produktif. Selanjutnya permasalahan pengembangan ternak unggas diantaranya:

1) terbatasnya populasi ayam petelur karena sulitnya memperoleh bibit ayam petelur dan mahalnya pakan ternak;

2) sistem pengelolaan usaha ayam petelur masih dilakukan dalam skala kecil dan tidak berorientasi bisnis; dan

3) belum adanya industri pakan ternak lokal. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan penyediaan bibit ternak ruminansia berkualitas serta pengembangan industri pakan ternak lokal melalui kawasan peternakan terpadu.

Pemerintah Aceh mempunyai strategi yang tertuang dalam prioritas utama diantaranya, pengembangan kawasan sentra peternakan adalah sentra pembibitan ternak sapi potong, pengembangan industri peternakan rakyat, peningkatan kompentensi dan moral aparatur, peningkatan investasi dan kemitraan permodalan, peningkatan kualitas dan kuantitas produk peternakan yang berdaya saing, penerapan rekayasa teknologi dan sistim informasi peternakan, sistim agribisnis yang terpadu dan intregrate, pengembangan kelembagaan peternakan, peningkatan disertivikasi dan pola konsumsi produk pangan hewan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya peternakan spesifik lokal.

2.1.3.3.5. Nilai Tukar Petani Peternak (NTPt)

Subsektor Petrenakan sebagai salah satu komponen dalam sektor pertanian menunjukkan pekembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Meningkatnya pembangunan peternakan terindikasi dengan peningkatan taraf hidup para peternak. Nilai tukar petani (NTP) merupakan suatu indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan ptani, termasuk peternak. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yag diterima petanidengn indeks harga yang di bayar petani yang di nyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu ndikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indicator untuk melihat tingkat pertumbuhan kemampuan/daya beli petani. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, semakin kuat pula tingkat daya beli petani.

Selama tahun 2021, NTPt Provinsi Aceh tahun 2021 adalah 95,32. NTPt pada tahun 2021 ini disebabkan kenaikan rata-rata harga yang harus dibayarkan petani lebih tinggi dibandingkan kenaikan rata-rata harga yang diterima petani. Pada tahun 2021, rata-rata It adalah 102,14. Pergerakan It petani subsektor peternakan pada tahun tersebut cenderung meningkat dikarenakan pada Bulan Mei terdapat hari raya Idul Fitri. Selama tahun 2021, Ib menurun yang disebabkan menurunnya Indeks KRT. Kelompok bahan makanan memang mengalami deflasi pada bulan tersebut (BPS dalam NTP Subsektor Peternakan Provinsi Aceh 2021, 2022).

Pada tahun 2022, Nilai NTPt Provinsi Aceh kembali menurun menjadi 99,58 yang disebabkan kenaikan rata-rata harga yang harus dibayarkan petani (Ib) sebesar 110,26 lebih tinggi dibandingkan kenaikan rata-rata harga yang diterima petani (It) atau sebesar 109,84. Kenaikan Ib terjadi pada Konsumsi Rumah Tangga terutama pada subkomponen Bibit dan Bakalan, Obat-Obatan dan Pakan Ternak serta Transportasi dan Komunikasi. (BPS dalam Nilai Tukar Petani Provinsi Aceh 2022, 2023).

Nilai NTPt Tahun 2023 adalah sebesar 99,13 atau mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya Tahun 2022. Hal ini disebabkan karena Indeks yang diterima petani (It) mengalami kenaikan sementara Indeks yang dibayar petani (Ib) mengalami penurunan. Kenaikan It akibat dari naiknya harga jual komoditas ternak besar (sapi potong dan kerbau), ternak kecil (kambing), dan unggas (ayam ras pedaging dan ayam kampung). Pada 2024 tahun Nilai Tukar Petani untuk Subsektor Peternakan (NTPT) sebesar 97,14 atau mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya dan pada tahun 2025 Nilai Tukar Petani untuk Subsektor Peternakan (NTPT) sebesar 97.66.

2.1.3.3.6. Kehutanan

Luas kawasan hutan Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.580/MenLHK/Setjen/Set.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh adalah seluas 3.550.390.23 Ha. Kawasan hutan Aceh berdasarkan luas dan fungsi, Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK 6616/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.103.

Tabel 2. 105
Kawasan Hutan Aceh Berdasarkan Luas dan Fungsinya

Kawasan Hutan	Luas (ha)	Persentase
Hutan Konservasi	1.058.364,40	29.81

Kawasan Hutan	Luas (ha)	Persentase
Hutan Lindung	1.781.677,92	50.18
Hutan Produksi Tetap (HP)	549.794,88	15.49
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	145.178,34	4.09
Hutan Produksi Konversi	15.374,88	0.43
Jumlah	3.550.390,23	100,00

Sumber: SK Menteri LHK Nomor SK.580/MenLHK/Setjen/Set.1/12/2018

Tabel 2.103. memberikan informasi kawasan hutan Aceh didominasi oleh hutan lindung seluas 1.781.677,92 Ha atau 50.18 persen dan hutan konservasi seluas 1.058.364,40 Ha atau 29.81 persen dari total luas kawasan hutan.

Luas kawasan hutan Aceh sebesar 62,55 persen dari luas total daratan sebesar 5.675.840,82 Ha. Ditinjau dari peran hutan dalam mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan maka kondisi hutan Aceh perlu dijaga dengan baik.

A. Deforestasi

Pendekatan analisis kerusakan hutan dan lahan dilakukan menggunakan analisis perubahan tutupan lahan pada periode tertentu yang dikelompokkan dan dikalkulasi dengan metodelogi tertentu menjadi nilai kehilangan tutupan hutan (deforestasi). Berdasarkan baseline emisi aceh menggunakan data series selama 27 tahun terakhir (1990–2017), Total Deforestasi mencapai ± 675.864 hektar, atau rata-rata 25.032 hektar per tahun (ILEDSA, Bappeda Aceh 2020). Berbeda dengan situasi provinsi lain di Pulau Sumatera, pada periode 1990-1996 deforestasi belum terjadi di Aceh mengingat pada saat tersebut konflik bersenjata sedang terjadi sehingga aktifitas dalam sektor berbasis lahan masih sangat terbatas. Deforestasi Aceh baru dimulai pada periode 1996 -2000 dengan luas mencapai 86,000. Setelah periode tersebut luas deforestasi tahunan cenderung menurun. Luas deforetasi meningkat kembali pada periode 2006-2013 pasca peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh, sejalan dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan kondisi lahannya, rata-rata deforestasi lebih banyak terjadi di tanah mineral yang mencapai luas 21.675 ha per tahun (87%) dan dalam jumlah sedikit di tanah gambut mencapai luas 3.356 hektar per tahun (13%).

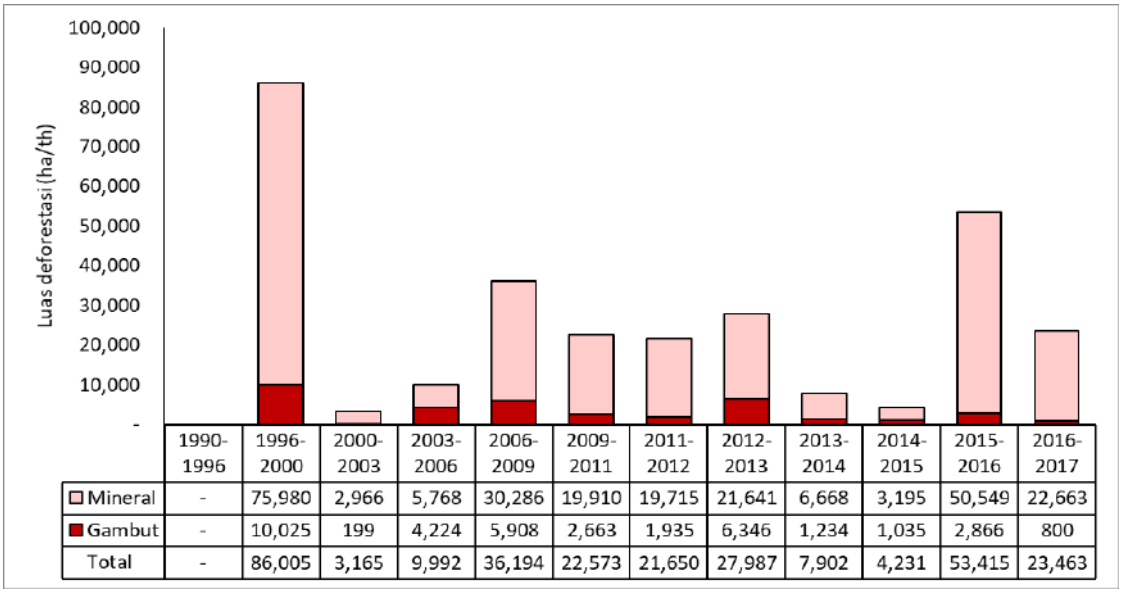

	1990-1996	1996-2000	2000-2003	2003-2006	2006-2009	2009-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Mineral	-	75,980	2,966	5,768	30,286	19,910	19,715	21,641	6,668	3,195	50,549	22,663
Gambut	-	10,025	199	4,224	5,908	2,663	1,935	6,346	1,234	1,035	2,866	800
Total	-	86,005	3,165	9,992	36,194	22,573	21,650	27,987	7,902	4,231	53,415	23,463

ILEDSA, Bappeda Aceh Tahun 2020 (data termutakhir)

Gambar 2. 84
Luas deforestasi di Aceh pada Periode 1990–2017

Baseline deforestasi yang terjadi di Aceh selama periode 1990 -2012 sebagian besar terjadi di luar kawasan hutan negara (APL) mencapai 406.500 hektar (73 % dari luas keseluruhan), sedangkan deforestasi yang terjadi di dalam kawasan hutan sebesar 152.366 hektar atau 27% (ILEDSA, Bappeda Aceh 2020). Deforestasi yang tinggi di luar kawasan hutan sebagian besar adalah deforestasi terencana (deforestasi plan) untuk tujuan pengembangan wilayah dan kegiatan budidaya berbasis lahan khususnya pada kawasan yang telah dibebani izin.

Berdasarkan hasil pemantauan tahunan terhadap perubahan kelas tutupan lahan berhutan menjadi kelas tutupan lahan tidak berhutan di Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2020, diperoleh hasil bahwa selama tahun 2019 s.d 2020 terdapat seluas ± 1.956,83 hektar tutupan hutan yang hilang atau terdeforestasi. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.106.

Tabel 2. 106
Deforestasi 2019-2024

Tahun	Luas (Ha)	Luas Kawasan Hutan SK.580/MENLHK/SETJENSET.1/12/2018	Persentase
2019	15.140	3.550.390,23	0,43
2020	14.759	3.550.390,23	0,42
2021	8.617	3.550.390,23	0,24
2022	9.383	3.550.390,23	0,26
2023	8.906	3.550.390,23	0,25
2024	6.780,35	3.550.390,23	0,19

Sumber : DLHK Aceh, 2025

Tabel 2. 107
Deforestasi Provinsi Aceh Periode Tahun 2022-2023 Menurut Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	FUNGSI KAWASAN HUTAN					TUBUH AIR	APL	JUMLAH (Ha)
		KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK			
1	Aceh Barat		276.69		27.95		0.51	158.28	**463.43**
2	Aceh Barat Daya		14.43	16.77				35.73	**66.92**
3	Aceh Besar		27.62		55.70			2.11	**85.43**
4	Aceh Jaya		44.88	21.75	60.82		1.77	412.62	**541.83**
5	Aceh Selatan	542.54	54.81	94.95	6.83			606.01	**1,305.15**
6	Aceh Singkil	2.66	1.37		52.15	4.49		67.51	**128.17**
7	Aceh Tamiang				31.40			70.72	**102.12**
8	Aceh Tengah	36.70	211.97		45.50		0.01	84.10	**378.27**
9	Aceh Tenggara	34.01	9.01					28.48	**71.50**
10	Aceh Timur		61.05		286.22		7.91	293.31	**648.50**
11	Aceh Utara		9.70		128.60			404.36	**542.66**
12	Bener Meriah		80.59		256.19			75.96	**412.73**
13	Bireuen		33.84		235.62			49.51	**318.97**
14	Gayo Lues	6.77	39.72	13.07	2.09			21.06	**82.71**
15	Kota Subulussalam	38.30	39.44		11.67			248.99	**338.39**
16	Nagan Raya		110.24	48.81	69.79		0.28	133.00	**362.12**
17	Pidie		77.63		12.53			11.83	**102.00**
18	Pidie Jaya		48.17	12.66				364.85	**425.68**
19	Simeulue		7.28		59.69			336.81	**403.78**
Jumlah		**660.98**	**1,148.44**	**208.01**	**1,342.74**	**4.49**	**10.48**	**3,405.21**	**6,780.35**

Catatan :
1. Perhitungan luas deforestasi (dalam hektar) menggunakan Proyeksi Cylindrical Equal Area (World)
2. Data didapatkan dengan analisa spasial identity (data administrasi permendagri, data fungsi kawasan hutan SK.6616/2021 dan Penutupan Lahan Tahun 2022 dan 2023)
3. Sumber Data BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2024

Aktifitas deforestasi tersebut terbesar terjadi di dalam Kawasan Hutan yakni seluas ± 3.375,14 hektar dan seluas ± 3.405,21 hektar lainnya terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL). Kerusakan hutan yang menjadi penyebab deforestasi di Aceh masih didominasi oleh kegiatan illegal berupa: pengembangan komoditi non kehutanan meliputi; pertanian, perkebunan, pertambangan, infrastruktur serta kebakaran hutan dan lahan.

Menurut data KLHK, Aceh memiliki tren deforestasi yang menurun. Hal tersebut menyebutkan Aceh memiliki tren kehilangan tutupan hutan yang terus menurun di 2019 seluas 15.140 hektare, 2020 seluas 14.759 hektare dan cukup stabil 2 tahun terakhir 2021 dan 2022. Memperkirakan Aceh telah kehilangan tutupan hutan seluas ± 9.383 Ha sepanjang 2022. Kehilangan tutupan hutan seluas 8.906 hektare sepanjang 2023, juga terjadi di dalam kawasan ekosistem leuser (KEL) seluas 4.854 hektare. berdasarkan pantauan dan analisis dari citra satelit serta data glad

alert dari global forest watch, sebanyak 50 persen aktivitas penggundulan hutan terjadi di area penggunaan lain (APL), mencapai 4.422 hektare, sisanya terjadi dalam kawasan hutan. Hasil interpretasi (HAkA), aktivitas deforestasi dalam kawasan hutan paling tinggi berada di wilayah hutan lindung, yakni mencapai 1.598 hektare, 1.574 hektare di hutan produksi, dan 832 hektare di Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil. "Jika dirinci, kegiatan deforestasi paling tinggi pada 2023, terjadi di Kabupaten Aceh Selatan dengan luas hutan yang hilang mencapai 1.854 hektare,". Persentase tutupan hutan di Aceh masih menjadi yang terbaik di Sumatera dan menduduki peringkat ke-9 di Indonesia pada 2022, karena luas hutan lahan mineral dan rawa gambut yang tersebar di bagian barat Aceh Selatan. "Sebanyak 55 persen hutan Aceh masih luas dibanding rata-rata hutan di Indonesia, luas hutan kita masih di atas rata-rata nasional," Kabupaten dengan dugaan kehilangan tutupan hutan terbesar adalah kabupaten Aceh Selatan dengan luas 1.883 Ha, diikuti Aceh Jaya 776 Ha dan Aceh Timur 753 Ha. Sekitar 56% dugaan hilangnya tutupan hutan terjadi di Kawasan Hutan. Taman Nasional Gunung Leuser Aceh (TNGL Aceh) yang merupakan kawasan konservasi ternyata memiliki tren kehilangan tutupan hutannya yang terus menurun. Di Tahun 2022 dugaan kehilangan hutan di TNGL Aceh hanya seluas 179 Hektar atau merupakan yang terendah selama 8 tahun terakhir. Tren kehilangan hutan terus meningkat. Kehilangan hutan sangat masif terjadi ada sekitar 716 hektar hutan yang hilang selama tahun 2022. Angka ini bahkan lebih tinggi dibanding akumulasi 4 tahun sebelumnya.

Kerusakan juga disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tanah mineral dan lahan gambut secara umum dipicu oleh kegiatan pembukaan lahan untuk sektor pertanian dan perkebunan melalui pembakaran. Sebagian besar kejadian kebakaran hutan dan lahan di Aceh merupakan tipe kebakaran bawah khususnya yang terjadi pada lahan gambut dengan dampak berupa asap dan hilangnya vegetasi serta komoditi yang dikembangkan di atasnya. Tipe kebakaran ini juga sangat sulit untuk dikendalikan serta memerlukan biaya, waktu serta teknologi (high cost). Kebakaran hutan dan lahan terjadi 63 kali. Lahan yang terbakar seluas 214 hektar.

Lahan gambut Aceh tersebar di wilayah Barat-Selatan Aceh meliputi; Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam dengan luas mencapai ± 338.164 Ha. Dari luas tersebut, sekitar ± 256.362 Ha (75,8 %) berada di APL, dengan fungsi budidaya ± 159.651 Ha. Trend kebakaran hutan dan lahan selama kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.108.

Tabel 2. 108
Kebakaran Hutan Dan Lahan Aceh Tahun 2020 s.d. 2024

NO	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	1,078,00	788,00	175	1642,65	214,00

Sumber: DLHK Aceh Tahun 2025

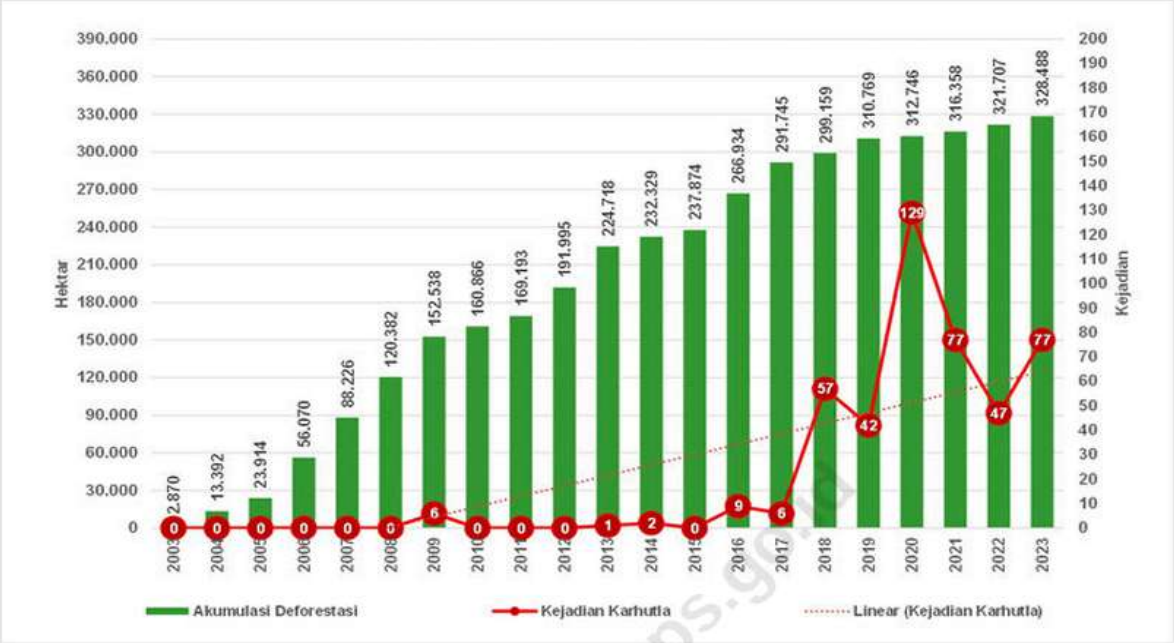

Sumber : Deforestasi KLHK, Grafik Akumulasi Deforestasi dan Intensitas Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh

Gambar 2. 85
Akumulasi Deforestasi dan Jumlah Kejadian Karhutla tahun 2003-2023

Berdasarkan luasan, kebakaran hutan dan lahan di Aceh terjadi penurunan. Upaya mitigasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui peningkatan patroli oleh tenaga pengamanan hutan (PAMHUT), Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) pada masing-masing wilayah KPH. Sosisalisasi dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan bersama-sama TNI, POLRI dan melibatkan masyarakat terutama kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Deforestasi di Aceh tahun 2019 sampai 2024 menurun, sedang pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Deforestasi tertinggi pada tahun 2018 mencapai 11.608 ha atau 0,327 persen dari total luas kawasan hutan disajikan pada Tabel 2.109.

Tabel 2. 109
Persentase Deforestasi di Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	Luas Kawasan Hutan (Ha)	Persentase
2019 - 2020	1.956	3,550,390.23	0,055
2020 - 2021	1,956	3,550,390.23	0,055
2021 - 2022	1,956,83	3,550,390.23	0,055
2022 - 2023	2.069,05	3,550,390.23	0,058
2023 - 2024	6.780,35	3,550,390.23	0,190

Sumber: DLHK Aceh, 2025

Penyebab deforestsi antara lain perambahan permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan dan Illegal Logging. Deforestasi dapat menimbulkan beragam masalah dan kerugian dalam bentuk hilangnya sumber daya hutan dan kemerosotan fungsi ekologis yang tak ternilai. Dalam rangka menekan laju deforestasi Pemerintah Aceh telah melakukan operasi pemberantasan Illegal logging dan tertanganinya kasus illegal logging, operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Deforestasi juga berakibat berkurangnya habitat satwa. Beberapa organisasi masyarakat sipil mencatat bahwa laju berkurangnya populasi satwa dilindungi atau satwa kunci di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) pada tahun 2011 – 2017 mencapai angka cukup tinggi. Setidaknya populasi gajah yang hilang mencapai 14 persen. sedangkan harimau mencapai 4 persen. dan orangutan sebesar 4 persen.

Berkurangnya satwa-satwa kunci tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya konflik dengan manusia secara terus menerus. Baik secara tersembunyi maupun secara terbuka. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mencatat bahwa konflik antara orangutan dengan manusia pada tahun 2017 adalah berjumlah 20 kasus atau lebih besar dibanding tahun 2015 yang hanya sebanyak 17 kasus. Konflik juga terjadi antara manusia dengan harimau. Pada tahun 2017 BKSDA menghimpun data konflik tersebut mencapai 10 kejadian. padahal pada tahun 2016 hanya berjumlah 1 kejadian.

Selain itu, masih tingginya intensitas konflik gajah liar dan masyarakat di Aceh, dengan jumlah kasus sebanyak 872 kasus dalam kurun waktu 2015-2024. Tahun 2024 Dari 290 kasus tersebut, kasus konflik gajah sebanyak 108 kasus, Harimau 43 kasus, Orang Hutan 30 kasus, Beruang 17 Kasus, Buaya 8 Kasus, dengan jumlah konflik yang tertangani 206 kasus atau setara 71, 03%. Tingginya konflik disebabkan maraknya kasus perambahan hutan, alih fungsi hutan dan praktik penebangan liar. Penyebab kematian gajah didominasi konflik gajah dengan masyarakat yakni 57%, sementara 10% akibat perburuan dan 33% mati secara alami.

B. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis di Aceh cenderung menurun dari tahun 2020 sampai 2023, sedangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan. Lahan kritis

terluas yang direhabilitasi pada tahun 2024 seluas 3.437 ha atau 2,46 persen dari total luas hutan dan lahan kritis . Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Aceh tahun 2016 sampai 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.110.

Tabel 2. 110
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2016-2024

Tahun	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Luas total hutan dan lahan kritis (Ha)	Persentase
2016	23.876	99.052.00	24.10
2017	23.876	99.052.00	24.10
2018	3.144	95,884.00	12.87
2019	12.520	94.949,00	15.89
2020	4.009	82.429,00	4,86
2021	2.456	56.753,26	4,32
2022	2.194	56.753,00	3,86
2023	3.157	164.110,00	1,92
2024	3.437	164.110,00	2,46

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2025

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis masih penting untuk dilakukan karena luas hutan dan lahan kritis masih tergolong tinggi. Untuk meningkatkan efektifitas rehabilitasi hutan dan lahan tersebut memerlukan beberapa strategi kunci diantaranya adalah: 1) identifikasi dan validasi serta menetapkan prioritas penanganan pemulihan lahan pada kawasan yang memiliki dampak penting; 2) melakukan analisis kesesuaian lahan dan syarat tumbuh komoditi yang akan digunakan; 3) keterlibatan masyarakat dan para pihak dalam pelaksanaannya; 4) mempertimbangkan karakterisitik sosial budaya masyarakat setempat; dan 5) memberikan jaminan tidak adanya gangguan bagi lahan yang telah direhabilitasi.

Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar, satwa liar yang berkonflik dengan manusia meliputi; Gajah Sumatera (Elephas masximus sumatranus), Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) Orangutan Sumatera (Pongo abelii). Dari 3 species satwa liar tersebut yang paling dominan berkonflik dengan manusia adalah gajah terutama di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Birueun, Aceh Besar, dan Aceh Selatan.

Tabel 2. 111
Data Konflik antara Manusia dan Satwa Liar di Aceh sd Tahun 2024

lo.	Jenis Satwa Liar	Jumlah Konflik	Kabupaten/Kota
1.	Gajah Sumatera	583	Kabupaten Pidie, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang (8 Lokasi, 5 CRU)
2.	Harimau Sumatera	113	Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Bener Meriah, Aceh Tengah, Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh

lo.	Jenis Satwa Liar	Jumlah Konflik	Kabupaten/Kota
			Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Subulussalam.
3.	Orangutan Sumatera	91	Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Langsa, Pidie, Subulussalam.

Sumber: BKSDA Aceh, 2024

Mengingat keberadaan habitat gajah sebagian besar berada diluar kawasan konservasi, maka penanganan konflik yang dilakukan dilaksanakan melalui pembentukan CRU (Conservation Response Unit) yang menjadi unit mitigasi konflik gajah. Ada 5 (lima) CRU yang operasionalnya di dukung Dinas Lingkuungan Hidup dan Kehutanan Aceh yaitu : CRU Alue Kuyun di Kabupaten Aceh Barat, CRU Mila di Kabupaten Pidie, CRU Peusangan di Kabupaten Bener Meriah, CRU Cot Girek di Kabupaten Aceh Utara dan CRU Sebajadi di Kabupaten Aceh Timur. Penanggulangan konflik satwa liar di lakukan dengan beberapa kegiatan seperti : pembangunan parit gajah (Barrier), kawat kejut (Fencing), penanaman tanaman yang tidak disukai gajah, penggiringan gajah dengan mercon dan membentuk kelompok Masyarakat Peduli Konflik Gajah (MPKG).

Salah satu amanah Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2019 Pemerintah Aceh diwajibkan menyusun Pergub tentang Strategi Rencana Aksi Pengelolaan (SRAP) satwa liar, salah satu rencana aksi yang akan dilaksanakan yaitu penetapan Koridor hidupan liar.

Tabel 2. 112
Konflik Satwa Liar di Aceh sd Tahun 2019-2024

Kabupaten/ Kota	Harimau	Orangutan	Gajah
Aceh Barat	1	14	28
Aceh Besar	4	0	10
Aceh Jaya	7	0	74
Aceh Selatan	18	37	6
Aceh Singkil	7	4	0
Aceh Tamiang	10	13	4
Aceh Tengah	4	0	13
Aceh Tenggara	3	9	7
Aceh Timur	3	9	77
Aceh Utara	1	0	44
Bener Meriah	2	0	9
Bireun	1	0	5
Gayo Lues	1	2	14
Langsa	0	3	0
Nagan Raya	2	0	7
Pidie	11	1	86

Kabupaten/ Kota	Harimau	Orangutan	Gajah
Pidie Jaya	1	0	14
Subulussalam	9	17	36

Pengelolaan koridor hidupan liar sangat diperlukan dalam upaya perlindungan dan pengawetan satwa liar di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Disamping itu, pengelolaan koridor satwa liar dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kehilangan habitat dan fragmentasi habitat satwa liar.

Penetapan dan pengelolaan koridor hidupan liar di utamakan pada ekosistem yang merupakan habitat dari beberapa spesies kunci yang merupakan jenis satwa prioritas terancam punah yang dilindungi sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE No. 180/IV/KKH/2015.

Kawasan koridor merupakan areal yang dapat berfungsi sebagai jembatan bagi pergerakan satwa-satwa yang melintas dari satu kawasan habitat ke habitat lainnya atau sebagai tempat mereka bermigrasi (sebagai pengguna koridor atau user), dapat berupa jalan yang dapat dilalui baik oleh satwa arboreal maupun terestrial. Untuk satwa terestrial yang perlu diperhatikan adalah kawasan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sumber pakan dan air untuk mereka makan dan minum maupun dapat digunakan sebagai tempat istirahat saat mereka melintas menuju hutan fragmen atau blok hutan lainnya, Bagi satwa arboreal diperlukan kesinambungan tajuk untuk menjamin keamanan pergerakan mereka dari satu tajuk pohon ke tajuk pohon lainnya.

Pengelolaan koridor hidupan liar sampai dengan 20 (dua puluh) tahun yang akan datang adalah untuk meningkatkan kualitas habitat dan kelangsungan hidup keanekaragaman hayati (population viability) melalui upaya mengurangi ancaman dan gangguan sehingga memungkinkan pergerakan satwa liar dalam suatu bentang alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Koridor Hidupan Liar.

C. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

PDRB Aceh beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. PDRB ADHB mengalami peningkatan dari tahun 2020 senilai Rp.166.372,32 (Milyar) menjadi Rp.243.202,09 (Milyar) pada tahun 2024. PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 senilai Rp.131.580,97 (Milyar) menjadi Rp.153.780,44 (Milyar) pada tahun 2024. PDRB Aceh dan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Aceh tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.113.

Tabel 2. 113
PDRB Aceh dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Aceh

No	Lapangan Usaha/industri	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB ADHB (Milyar Rp)	166.372,32	184.979,88	209.698,36	227.018,20	243.202,09
2	PDRB ADHK (Milyar Rp)	131.580,97	135.274,04	140.971,72	146,932,42	153.780,44
3	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB (Miliar Rp)	2.074,44	1.768,15	1.959,68	2.144,53	1.989,33
4	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHK (Miliar Rp)	1.667,01	1.382,88	1.412,75	1.434,46	1.338,76
5	Distribusi Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB (%)	1,25	0,96	0,93	0,94	0,82
6	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	-0,67	-17,04	2,16	1,54	-6,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025

Tabel 2.110. memberikan informasi kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB mengalami penurunan. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB ADHB dari tahun 2020 senilai Rp.2.074,44 (Milyar) menjadi Rp.1.989,33 (Milyar) pada tahun 2024. Distribusi persentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB dari tahun 2020 sebesar 1,25 persen menjadi 0,82 persen pada tahun 2024. Selanjutnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB ADHK juga mengalami penurunan dari tahun 2020 senilai Rp.1.667,01 (Milyar) menjadi Rp.1.338,76 (Milyar) pada tahun 2024. Kontribusi sektor kehutanan terhadap laju pertumbuhan PDRB ADHK sebesar -0,67% menjadi -6,67 persen.

D. Rasio Luas Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang fungsi utamanya melindungi kelestarian fungsi sumber daya alam. sumber daya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Penetapan luas kawasan hutan dan perairan yang secara khusus dialokasikan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan telah dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan hutan lindung melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 1999 tentang Arahan Fungsi Hutan Aceh yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170 tahun 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Aceh. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018 Tentang Perubahan ketiga atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 865/MENHUT-II/2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan

Konservasi Perairan Provinsi Aceh Secara rinci luas kawasan lindung Aceh, Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK 6616/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.111 berikut ini.

Tabel 2. 114
Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan 2020-2024

Tahun	Luas kawasan lindung (ha)	Total luas kawasan hutan (ha)	Rasio
2021	2.840.042,32	3,550,390.23	79,99
2022	2.840.042,32	3,550,390.23	79,99
2023	2.642.964,03	3.333.973.89	79,27
2024	2.642.964,03	3.333.973.89	79,27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh 2025

E. Penyelesaian Konflik Tenurial

Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengunaan kawasan hutan. Jenis konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan Aceh seperti batas kawasan, pemilikan, dan penguasaan lahan, perizinan, akibat tumpang tindih kebijakan, pemanfaatan dan pengelolaaan sumber daya hutan oleh masyarakat hukum adat dan perhutanan sosial. Pencegahan konflik tenurial dalam kawasan hutan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh melalui UPTD KPH dengan upaya pemetaan potensi konflik, sosialisasi penyuluhan, pemantapan batas kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar hutan.

Konflik tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan lahan serta sumberdaya alam lainnya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, salah satu skema penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Menindaklanjuti peraturan diatas Gubernur membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan pada tahun 2017 dan berlanjut hingga tahun 2019 melalui SK Nomor 522.12/1351/2019. Dalam Keputusan Gubernur tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sebagai ketua Tim Inver.

Tujuan dari skema TORA didalam Kawasan hutan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat didalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa konflik dalam kawasan hutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK

/SETJEN/PLA.2/9/2021 tanggal 10 September 2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) terdapat seluas 95.387 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota yang terdiri dari beberapa kriteria penguasaan lahan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 115
Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh, 2024

Kabupaten	Kawasan HPK tidak produktif	Lahan Garapan Pertanian, Perkebunan dan Tambak	Permukiman Transmigrasi Beserta Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Yang Sudah Memperoleh Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Transmigrasi	Permukiman, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-
Aceh Barat				121	121
Aceh Barat Daya		113		0	113
Aceh Besar	1.276	7.524		128	8.928
Aceh Jaya		939		479	1.418
Aceh Selatan		522		36	558
Aceh Singkil	2.704	10.070	2.446	36	15.256
Aceh Tamiang		5.427	940	38	6.405
Aceh Tengah		20.969		93	21.062
Aceh Tenggara		3.056		55	3.111
Aceh Timur		11.340	1.813	174	13.327
Aceh Utara		186		4	190
Bener Meriah		2.641		53	2.694
Bireuen		370			370
Gayo Lues	654	1.285	544	508	2.991
Kota Langsa		813		2	815
Kota Sabang		46		22	68
Kota Subulussalam	2.460	940	3.644	8	7.052
Nagan Raya		159	2.896		3.055
Pidie		3.135	3.672	182	6.989
Simeulue		423		441	864
Grand Total	7.094	69.958	15.955	2.380	95.387

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2024

Penanganan konflik tenurial melalui skema TORA yang dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terdapat 5 Kabupaten/Kota yang telah direkomendasikan Gubernur untuk dilanjutkan proses penyelesaiannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 1.579,47 Ha diselesaikan melalui perubahan batas dan 319,18 Ha diselesaikan melalui skema Perhutanan Sosial, dan hingga tahun 2021 baru satu Kabupaten yang telah terbit SK dari Menteri LHK dengan rincian pada berikut berikut:

Tabel 2. 116
Penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menurut Kabupaten/Kota di Aceh

No	Kab/Kota	Surat Rekom Gubernur	Pertimbangan Tim Percepatan PPTKH (Ha)		Persetujuan MenLHK (Ha)		Keputusan MenLHK Atas Penataan Batas Perubahan Batas		
			Perubahan Batas	Perhutanan Sosial	Perubahan Batas	Perhutanan Sosial	SK	Tanggal	Luas (Ha)
1	Aceh Tamiang	522.12/4433 Tanggal 19 Maret 2019	1.326,99	47,54	1.326,99	47,54	SK.188/ MENLHK/ SETJEN/PLA.2/4/2020	13 April 2020	1.365,55
2	Aceh Timur	522.12/4434 Tanggal 19 Maret 2019	139,03	178,06	139,03	178,06			
3	Langsa	522.12/4435 tanggal 19 Maret 2019	7,51	00.00	7,51	00.00			
4	Aceh Utara	522/1614 Tanggal 30 Januari 2020	78,77	88,77	78,77	88,77			
5	Sabang	522.12/21064 Tanggal 3 Desember 2019	27,17	4,81	27,17	4,81			

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2024

F. Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial merupakan program strategis pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian, penyuluh kehutanan berperan sebagai peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaaan hutan. Dalam perannya sebagai fasilitator, terdapat 55 izin yang sudah dikeluarkan oleh kementerian LHK, 10 izin telah didampingi oleh penyuluh, dan 25 izin didampingi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedangkan 15 izin lagi belum dapat didampingi dikarenakan keterbatasan tenaga penyuluh. Untuk hal tersebut, DLHK Aceh akan bermitra dengan PKSM dalam rangka memfasilitasi kelompok binaannya. Selain itu, Penyuluh kehutanan juga berfungsi sebagai pendamping dalam penyusunan Rencana Kegiatan Usaha (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Tabel 2. 117
Capaian Izin Perhutanan Sosial Aceh Tahun 2019 - 2023

No.	Tahun	Jumlah Izin	Luasan (Ha)	Jumlah KK
1	2019	3	2.281	234
2	2021	11	14.659	1.400
3	2022	21	42.693,13	2.033
4	2023	25	28.000	2.800
5	2024	27	30.000	3.500
Jumlah		137	228.415,13	24.335

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Tujuan Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan dan menuju kelestarian hutan.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menunjukkan bahwa dari target akses Kelola Perhutanan Sosial Nasional dengan luas 12.700.000 Ha, Target Perhutanan Sosial Aceh seluas 430.841,00 Ha capaian Program Perhutanan Sosial sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 104 izin dengan luasan 172.864,94 Ha yang terbagi dalam Hutan Desa (HD) 47 izin dengan luas 83.882 Ha, Hutan Kemasyarakatan (HKm) 37 izin dengan luas 59.960,9 Ha dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 12 izin dengan luas 7.085 Ha. Dengan capaian outcome penerimaan manfaat dari Kelompok Tani Hutan berjumlah 15.013 KK, Provinsi Aceh memiliki potensi perluasan dan capaian Perhutanan Sosial pada skema Hutan Adat, berdasarkan data dari Go KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) diakses pada bulan Desember 2024 menunjukkan bahwa ada sekitar 112.610,98 Ha luasan indikatif Hutan Adat di Provinsi Aceh.

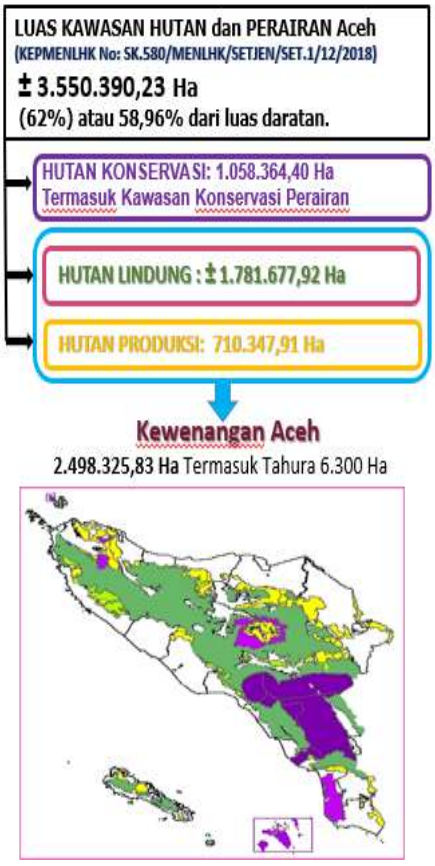

PERHUTANAN SOSIAL ACEH S.D NOVEMBER 2024	
Target Akses Kelola Perhutanan Sosial Nasional	12.700.000,00 Ha
Target Perhutanan Sosial Aceh	430.841,00 Ha
Capaian Perhutanan Sosial Aceh	172.864,94 Ha
Sisa Target Perhutanan Sosial Aceh	257.976,06 Ha

PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL S/D NOVEMBER 2024

NO.	SKEMA	JUMLAH	LUAS (Ha)	KK
1.	Hutan Desa (HD)	47	83.882,00	1.444
2.	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	37	59.349,00	8.782
3.	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	12	7.084,94	4.787
4.	Hutan Adat (HA)	8	22.549,00	-
	JUMLAH	**104**	**172.864,94**	**15.013**

Gambar 2. 86
Capaian Perhutanan Sosial Aceh S.D 2024

G. Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah Aceh ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur Aceh nomor 01 tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan kerja perangkat aceh, cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah sebagai perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 tahun 2018. Peraturan Gubernur ini menetapkan:

1. UPTD Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan; merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2. UPTD Balai Penanganan Sampah Regional Blang Bintang; merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
3. UPTD KPH Wilayah I; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Banda Aceh, dengan wilayah kerja meliputi Unit I KPHP dan Unit XV KPHL mencakup wilayah administratif Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar.
4. UPTD KPH Wilayah II; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Pidie dengan wilayah kerja meliputi Unit II KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya.

5. UPTD KPH Wilayah III; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Jaya dengan wilayah kerja meliputi Unit X KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Aceh Jaya.
6. UPTD KPH Wilayah IV; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Barat, dengan wilayah kerja meliputi Unit XI KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya
7. UPTD KPH Wilayah V; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Utara, dengan wilayah kerja meliputi Unit III KPHP mencakup wilayah administratif Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.
8. UPTD KPH Wilayah VI; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Bener Meriah, dengan wilayah kerja meliputi Unit VI KPHL dan Unit VII KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah.
9. UPTD KPH Wilayah VII; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Langsa dengan wilayah kerja meliputi Unit IV KPHL dan Unit V KPHL mencakup wilayah administratif Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang
10. UPTD KPH Wilayah VIII; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Gayo Lues dengan wilayah kerja meliputi Unit VIII KPHL dan Unit IX KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara.
11. UPTD KPH Wilayah IX; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Selatan dengan wilayah kerja meliputi Unit XII KPHL dan Unit XIII KPHP mencakup wilayah administratif Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil
12. UPTD KPH Wilayah X; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Simeulue dengan wilayah kerja meliputi Unit XIV KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Simeulue
13. UPTD KPHK Tahura PMI; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Saree Kabupaten Aceh Besar dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Hutan Seulawah Agam dan Kelompok Hutan Seulawah Inong di Kabupaten Aceh Besar, Kelompok Hutan Seulawah Inong di Kabupaten Pidie dan kawasan penyangganya.

UPTD Kawasan Pengelolaan Hutan Wilayah I sampai dengan UPTD Kawasan Pengelolaan Hutan Wilayah X mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan hutan meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan pengelolaan hutan di bidang pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, pengolahan hasil hutan, penelitian, pengembangan dan penyuluhan kehutanan, peredaran serta pemasaran hasil hutan.

2.1.3.3.7. Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Kapasitas Terpasang dan Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik PLN

Sistem tenaga listrik di Aceh terdiri dari sistem internoneksi 150 kV Sumbagut dan sistem *isolated* dengan tegangan distribusi 20 kV. Sebagian besar sistem tenaga

listrik Aceh dipasok oleh sistem interkoneksi 150 kV Sumatera dan sebagian kecil masih berada di daerah *isolated* terutama untuk lokasi-lokasi di pulau terpisah. Saat ini daerah yang sudah dipasok sistem interkoneksi meliputi seluruh lokasi di Aceh (daratan), baik melalui jaringan 150kV ataupun 20kV. Beban puncak tertinggi Aceh tahun 2020 bulan Oktober sebesar 542 MW. Peta sistem tenaga listrik Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.88 di bawah ini :

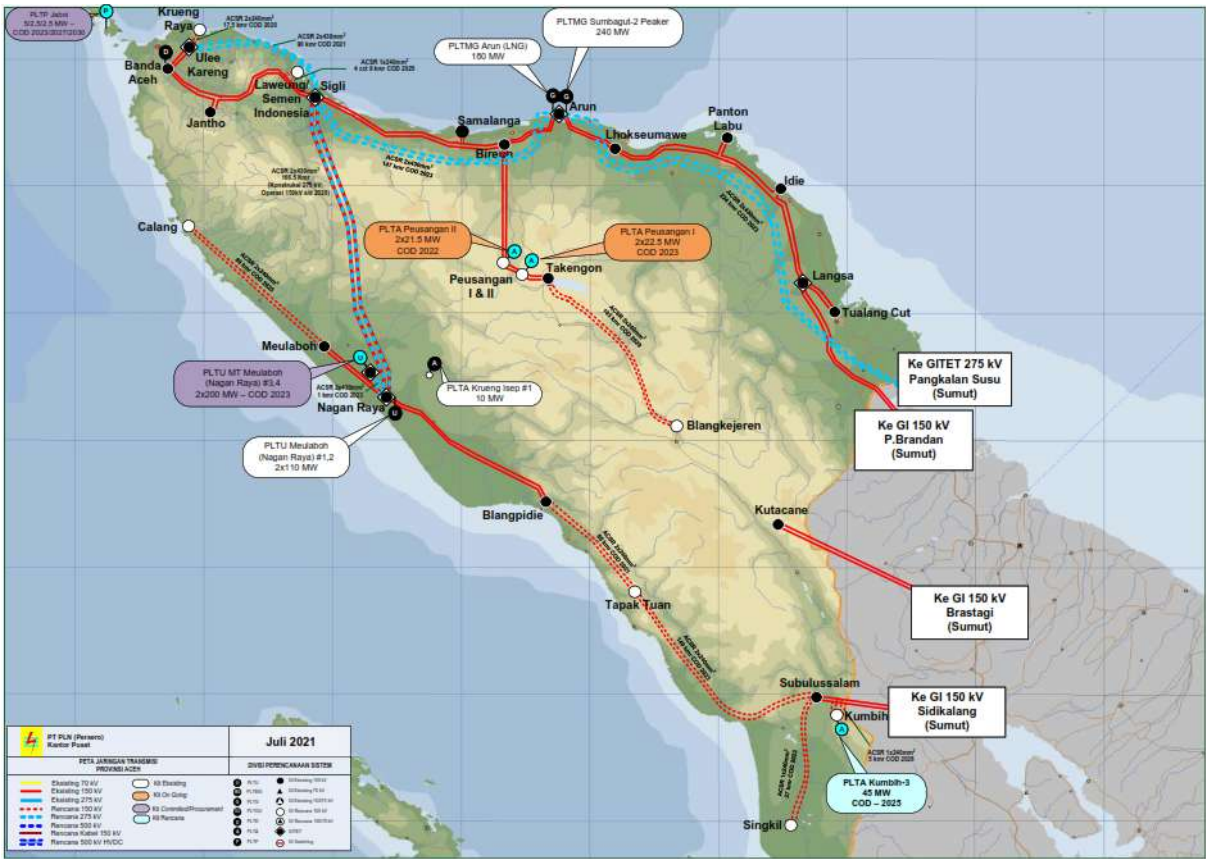

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2021-2030

Gambar 2. 87
Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Aceh

Pada sistem *isolated* 20 kV yang meliputi Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Sistem Blangkejeren (Gayo Lues), Sistem Takengon (Aceh Tengah) terdapat sewa *genset* untuk mensuplai sistem tersebut. Sistem *Isolated* di luar pulau Sumatera adalah Kota Sabang, Sistem Sinabang (Simeulue) dan sistem kecil lainnya.

Kapasitas pembangkit tenaga listrik eksisting, gardu induk dan Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA) dapat dilihat seperti pada Tabel 2.115 dan 2.107.

Tabel 2. 118
Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir
PLN					
PLTU	Sumatera	2	220,0	140,0	136,0
PLTMG	Sumatera	32	424	401,5	407,2
PLTD	Sumatera	18	64,2	42,3	36,5
	Sinabang	18	13,8	9,1	9,1
	Sabang	15	12,9	8,7	8,7
Jumlah PLN		72	735,8	601,6	597,5
IPP					
PLTD	Sumatera	2	23,0	15,7	7,0
PLTM	Sumatera	2	11,0	11,6	11,4
Jumlah IPP		4	34,0	27,3	18,4
Jumlah		76	769,8	628,9	615,9

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2021-2030

Kondisi sistem *isolated* 20 kV yang tersisa adalah sistem *isolated* di kepulauan seperti Sistem Sabang, Sistem Sinabang (Simeulue) dan system kecil lainnya juga masih dipasok oleh PLTD.

Tabel 2. 119
Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA)

No.	Nama GI	Tegangan (kV)	Jumlah Trafo (Unit)	Total Kapasitas (MVA)
1	Alue Dua/ Langsa	150/20	2	90
2	Tualang Cut	150/20	3	110
3	Alue Batee/ Idi	150/20	2	50
4	Lhokseumawe	150/20	2	120
5	Bireuen	150/20	2	120
6	Sigli	150/20	2	90
7	Banda Aceh I / Lambaroe	150/20	3	180
8	Jantho	150/20	1	30
9	Pantonlabu	150/20	2	60
10	PLTU Nagan Raya	150/20	1	30
11	Arun	150/20	1	60
12	Meulaboh	150/20	2	90
13	Blang Pidie	150/20	1	30
14	Kutacane	150/20	1	30
15	Subulussalam	150/20	1	30
16	Takengon	150/20	1	30
17	Samalanga	150/20	1	30
18	Ulee Kareeng	150/20	1	30
19	Krueng Raya	150/20	1	30
TOTAL			30	1210

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2021-2030

B. Persentase Daya Tersambung Per Sektor Pelanggan

Pada tahun 2025 jumlah Pelanggan listrik sebanyak 1.671.383 pelanggan mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 1.724.360 pelanggan. Adapun daya listrik terpasang untuk Provinsi Aceh tahun 2025 sebesar 2.266.932.901 MVA. Jumlah kelompok pelanggan PLN di Aceh terbesar adalah pelanggan kelompok rumah tangga dengan persentase 84,398 persen dengan jumlah pelanggan 1.410.608 Sedangkan Kelompok pelanggan paling rendah di sektor industri yaitu 0.301 persen dengan jumlah pelanggan 5.033 pelanggan. Seperti dapat dilihat pada Tabelxxx di bawah ini.

Tabel 2. 120
Jumlah Pelanggan dan Persentase Pemakaian Tenaga Listrik Tahun 2025

No.	Kelompok Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Persentase (%)
1.	Rumah Tangga	1.410.608	84,398
2.	Sosial	55.865	3,342
3.	Bisnis	184.034	11,011
4.	Industri	5.033	0,301
5.	Pemerintah	15.492	0,927
6.	Lain-lain	351	0,021
Total		1.671.383	100

Sumber : PT.PLN(Persero) Wilayah Aceh 2026

Adapun perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non PLN dengan jumlah rumah tangga total di Aceh menunjukkan nilai rasio ketersediaan daya listrik sebesar 99,96 %. Pertumbuhan *demand* rata-rata tahun 2021 s/d 2030 Provinsi Aceh, untuk masing-masing skenario adalah: Optimis 5,7% dan Moderat 4,8%.Berdasarkan kedua skenario tersebut, diambil skenario moderat sebagai referensi untuk pengembangan infrastuktur ketenagalistrikan. Namun untuk mengantisipasi *gap* antara perencanaan dan realisasi, perlu dilakukan evaluasi dan koreksi sampai kondisi menjadi kembali stabil.

C. Kontribusi Sub Sektor Listrik dan Gas

Secara umum kontribusi subsektor listrik dan gas terhadap PDRB Aceh menurut lapangan usaha dari tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,14 persen. Adapun posisi tahun 2022-2023 relatif menurun menjadi 0.11 persen. Dan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 0,10 persen

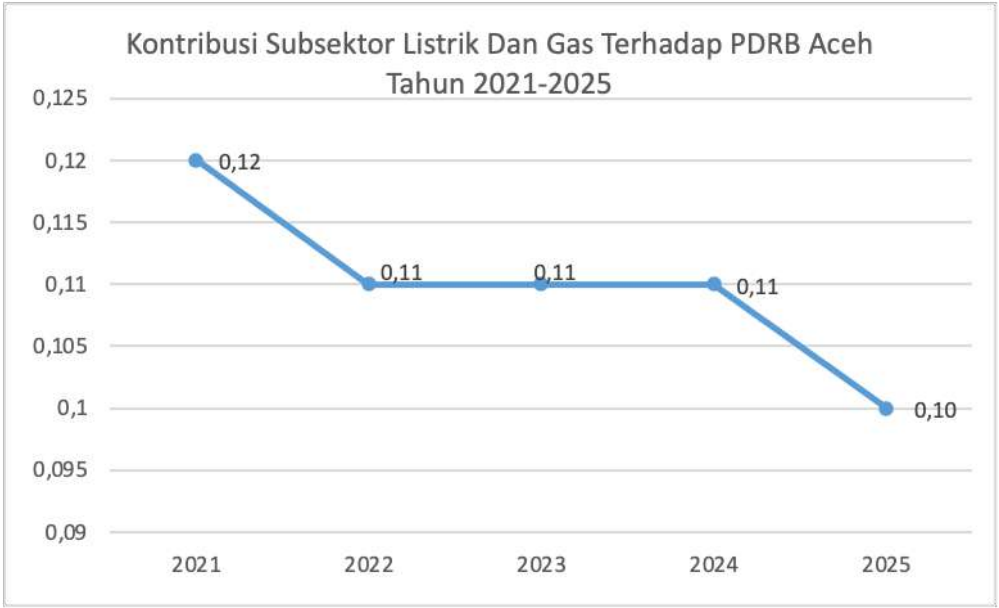

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

Gambar 2. 88
Kontribusi Subsektor Listrik Dan Gas Terhadap PDRB Aceh Tahun 2021-2025

D. Pertambangan Tanpa Ijin

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang melimpah yang dapat diandalkan pada sektor pertambangan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Namun belum semua pemanfaatan sumberdaya tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Masih banyak kegiatan pertambangan (khususnya komoditas emas) masih bersifat ilegal sehingga menimbulkan lebih banyak kerugian dan persoalan baik bagi daerah maupun bagi masyarakat sendiri dibandingkan manfaat yang dapat diperoleh darinya.

Daerah kehilangan pendapatan karena para penambang illegal ini yang lazim kegiatannya disebut pertambangan tanpa izin (PETI) tidak membayar pajak dan royalti. terjadi pemborosan sumberdaya mineral sementara lingkungan menjadi rusak dan tercemar karena cara penambangan dan pengolahan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah good mining practices.

Adapun beberapa lokasi kegiatan pertambangan illegal (PETI) emas di Aceh meliputi:

a. Kabupaten Aceh Barat disepanjang aliran Sungai emas (placer)
b. Kabupaten Nagan Raya di sepanjang Krueng Kila, Beutong (pacer)
c. Kabupaten Aceh Jaya lokasi Gunung Ujeuen, Kecamatan Krueng Sabe (primer)
d. Kabupaten Pidie, di kecamatan Geumpang dan Mane (placer dan primer)

e. Kabupaten Aceh Selatan, kecamatan Manggamat (primer)
f. Kabupaten Aceh Tengah, kecamatan Lumut (primer)

Kegiatan PETI di Aceh telah ada sejak tahun 1930an. Bermula aktifitasnya di bantaran sungai Kr. Kila dan Kr. Cut Kabupaten Nagan Raya dan Kr. Woyla Kabupaten Aceh Barat. masyarakat mencoba mengambil emas dengan cara tradisional yaitu dengan cara mendulang. Sejak saat itu kegiatan PETI mulai tumbuh dan berkembang di beberapa kabupaten lainnya di Aceh. Sejak tahun 2006 kegiatan PETI di Aceh sudah sangat marak dan meresahkan serta terkonsentrasi di Kabupaten Pidie. Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh selatan yang notabenenya memiliki kandungan emas yang cukup potensial untuk ditambang.

Lokasi PETI di Provinsi Aceh yang tersebar di beberapa kabupaten. secara umum terdapat dilahan kawasan hutan baik pada kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi dan lahan areal penggunaan lain (APL) milik masyarakat. Di beberapa tempat terdapat dalam wilayah yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sebagian besar kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten/Kota di Aceh belum dapat ditertibkan dan diarahkan untuk memiliki izin dari pemerintah setempat. Berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota setempat belum juga dapat mengatasi kegiatan penambangan illegal tersebut diantaranya melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan, pengawasan dan penertiban serta penutupan kegiatan pertambangan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan illegal tersebut.

Tabel 2. 121
Kejadian Kecelakaan di Lokasi PETI

NO	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Uraian Kejadian	Jumlah Korban
1.	20 Januari 2014	Desa Pulo Loh Lam Jeu, Kec. Geumpang Kab. Pidie	Kekurangan oksigen dalam lubang tambang pada kedalaman 17 meter	3 (tiga) orang meninggal dunia
2.	3 September 2018	Desa Pulo Loh Kec. Geumpang	Kekurangan oksigen dalam lubang tambang pada kedalaman 17 meter	3 (tiga) orang meninggal dunia
3.	21 April 2019	Desa Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan	Terhimpit batu di lubang penambangan pada kedalaman 100 meter	1 (satu) orang meninggal dunia
4.	14 Maret 2021	Desa Simpang Dua Kec. Kluet Tengah Kemukiman Manggamat Kabupaten Aceh Selatan	Tertimbun oleh longsoran dalam lubang tambang	2 (dua) orang meninggal dunia
5.	10 Juli 2021	Kec. Geumpang Desa Bangkeh Kab Pidie	Tertimbun longsor batuan	4 (empat) orang meninggal dunia

Sumber : Dinas ESDM Aceh, 2023

Beberapa opsi telah diwacanakan untuk mengatasi PETI di daerah ini telah dilakukan diantaranya adalah dengan melegalkan kegiatan PETI dan telah di lakukan di Lokasi Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya (telah adanya WPR yang diterbitkan Bupati Aceh Jaya). Bahkan Undang- Undang No.3 Tahun 2020 tentang perubahan

atas Undang-undang No 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan Batubara, pada pasal 158 disampaikan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (serratus milyar rupiah). Selanjutnya Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Seruan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh (FORKOPIMDA) Tanggal 5 Agustus 2014, namun demikian apakah pilihan untuk melegalkan PETI merupakan pilihan terbaik, masih perlu kajian lintas sektor yang lebih mendalam.

Kendala utama dalam melegalkan kegiatan pertambangan rakyat adalah aspek regulasi di bidang pertambangan diantaranya adalah belum tersedianya ruang wilayah pertambangan yang sampai dengan saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Diperlukan peningkatan pengelolaan usaha pertambangan. untuk itu Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota sudah mengusulkan Wilayah Pertambangan (WP) sebagai usulan dari Pemerintah/Kabupaten Kota kepada Pemerintah Pusat dan mendorong segera ditetapkannya wilayah pertambangan di beberapa daerah tempat berlangsungnya kegiatan PETI selama ini. agar PETI didorong menjadi Izin Prtambangan Rakyat (IPR) yang memenuhi Aspek legal. sehingga dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan rakyat segera dapat dieliminir melalui pembinaan dan pengawasan yang baik.

E. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

Struktur perekonomian Aceh pada tahun 2025 masih didomonasi oleh besarnya kontribusi migas (subsektor pertambangan migas dan industri pengolahan migas). Sub sektor tertinggi berkontribusi yaitu sub sektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi, diikuti sub sektor pertambangan batu bara dan lignit, sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya serta pertambangan biji logam.

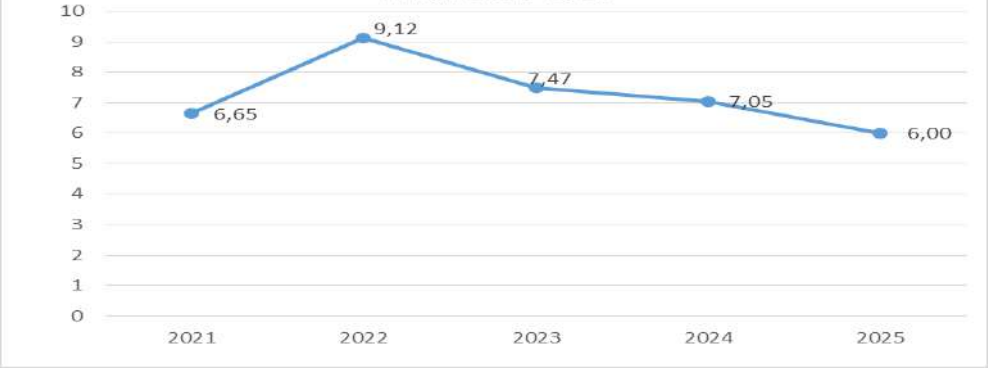

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2026

Gambar 2. 89
Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Provinsi Aceh Tahun 2021-2025

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2025 masih didominasi oleh besarnya kontribusi migas (subsektor pertambangan migas dan industri pengolahan migas). Sub sektor tertinggi berkontribusi yaitu sub sektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi (2,70% atau Rp.6,94 Trilyun), diikuti sub sektor pertambangan batu bara dan lignit (1,71% atau Rp.4,40 Trilyun), sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya (1,34% atau Rp.3,45 Trilyun)serta pertambangan biji logam (0,25% atau Rp.646 Milyar). Adapun perkembangannya dapat dilihat pada gambar 2.88.

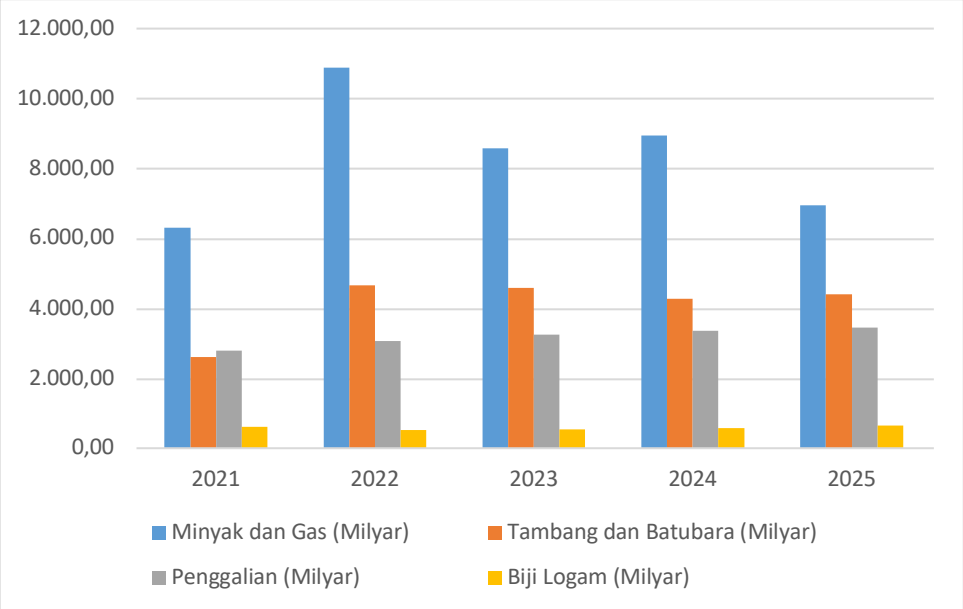

Sumber : BPS(diolah), 2026

Gambar 2. 90
Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan Tahun 2021-2025

2.1.3.3.8. Perdagangan

Sektor Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Sedangkan kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional.

Sektor perdagangan merupakan sektor atau lapangan usaha yang didalamnya meliputi kegiatan ekonomi perdagangan besar dan eceran dari berbagai jenis barang yang memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang

tersebut. Sektor perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan salah satu sektor peyumbang PDRB Aceh terbesar. Pertumbuhan sektor perdagangan tergambarkan terus meningkat setelah mengalami kontraksi sedalam 5,34 persen pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh pembatasan pergerakan orang dan barang selama pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Aceh dapat dilihat pada grafik berikut :

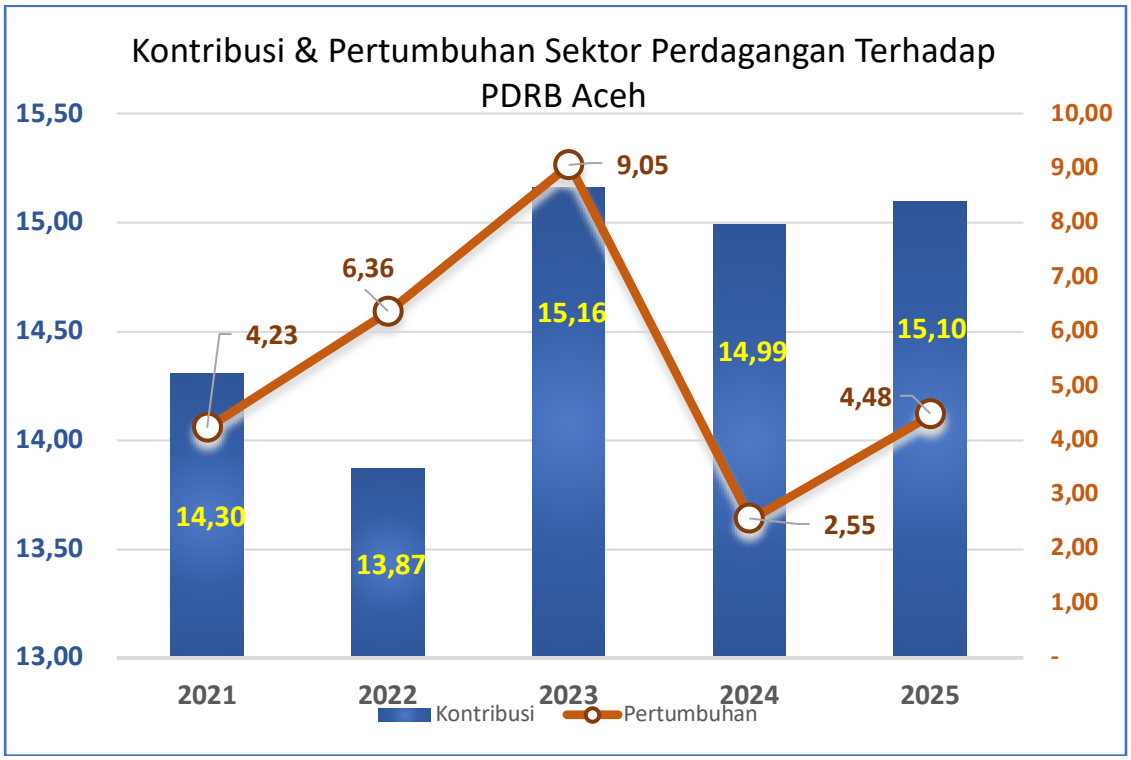

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2026 (diolah)

Gambar 2. 91
Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2021-2025

Dari grafik di atas dapat dilihat peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan terjadi secara signifikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 4,23 persen (yang pada tahun sebelumnya berkontraksi sebesar 5,34 persen), sebagai dampak dari upaya pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi daerah. Tren pertumbuhan sektor perdagangan terus meningkat pada tahun 2022 sebesar 6,36 persen, pada tahun 2023 tumbuh sebesar 9.05 persen, dan pada tahun 2024, meskipun sedikit melambat namun terus mengalami pertumbuhan sebesar 2,55 persen dan pada tahun 2025 tumbuh lebih tinggi sebesar 4,48 persen. Melambatnya pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2024 merupakan fenomena *Base Effect* tinggi pada tahun 2023. Pertumbuhan tinggi pada tahun 2023 didorong oleh pemulihan total aktivitas ekonomi masyarakat pasca-pandemi Covid-19 dan pembukaan jalur-jalur logistik baru, dan dampak dari beberapa event besar yang terjadi di tahun 2023 seperti Pekan Kebudayaan Aceh (PKA), promo besar dealer kenderaan di akhir tahun 2023, dan beberapa event

besar lainnya yang tidak ada ditahun sebelumnya. Berlanjutnya pertumbuhan positif yang terjadi di tahun 2024 dan 2025 menunjukkan daya beli masyarakat terus mengalami peningkatan.

Dari sisi kontribusi sektor perdagangan yang terus mengalami depresi mulai tahun 2020 sampai dengan 2022 yang diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19, juga mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 mencapai share sebesar 15,16 persen. Selanjutnya kontribusi sektor perdagangan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2024 kontribusinya sebesar 14,99 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2025 kembali meningkat dengan kontribusi sebesar 15,10 persen. Berkurangnya persentase share sektor perdagangan pada tahun 2024 dan 2025 diakibatkan karena tekanan meningkatnya kontribusi sektor pertanian, administrasi pemerintah, dan sekor transportasi. Peran sektor perdagangan sangat mempengaruhi PDRB di Aceh, dan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Sedangkan dari sisi ekspor impor, neraca perdagangan Aceh masih mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan karena ekonomi Aceh dipengaruhi oleh faktor eksternal karena masih tingginya kebutuhan pada pasokan barang-barang dari luar Aceh (dominasi barang impor) termasuk untuk kebutuhan pokok, serta produksi industri lokal yang masih kurang optimal. Volume dan nilai ekspor dan impor Aceh selama lima tahun terakhir sebagiamana pada tabel berikut :

Tabel 2. 122
Neraca Perdagangan Provinsi Aceh Tahun 2021-2025

Tahun	Ekspor			Impor			Neraca (USD)	Neraca (%)
	Volume (Kg)	Nilai (USD)	Pertumbuhan (%)	Volume (Kg)	Nilai (USD)	Pertumbuhan (%)		
2021	9.658.678.737	536.923.577	78,73	72.354.765	119.048.308	361,84	417.875.269	52,15
2022	8.900.165.533	745.801.580	38,90	100.488.223	113.741.363	-4,46	632.060.217	51,26
2023	7.934.180.609	621.940.199	-16,61	378.096.488	156.435.520	37,54	465.504.679	-26,35
2024	11.309.768.447	697.315.464	12,12	907.021.321	469.767.014	200,29	227.548.450	-51,12
2025	12.884.410.497	649.224.190	-6,90	1.297.608.294	577.568.143	22,95	71.656.047	-68,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2026 (diolsh)

Perkembangan ekspor Provinsi Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir meskipun berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 ekspor komoditas Aceh senilai 536.923.577 USD atau tumbuh sebesar 78,73% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 nilai ekspor meningkat sebesar 8.900.165.533 USD yang merupakan nilai ekspor tertinggi dalam lima tahun terakhir, atau tumbuh sebesar 38,90 persen. Pada tahun 2023 nilai ekspor Aceh cukup baik yaitu sebesar 7.934.180.609, namun jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 16,61 persen, hal ini disebabkan karena berkurangnya nilai ekspor pada kelompok non migas terutama akibat turunnya harga CPO di pasar global. Pada tahun 2024, nilai ekspor Aceh kembali tumbuh

sebesar 12,12 persen atau senilai 697.315.464 USD, sedangkan pada tahun 2025, meskipun volume ekspor lebih tinggi daripada tahun 2024 namun nilainya sedikit lebih rendah yaitu sebesar 649.224.190 USD atau terdepresi sebesar 6,90 persen. Hal ini selain akibat perubahan harga-harga di pasar dunia, juga dikarenakan perbedaan volume jenis ekspor Aceh.

Komoditas utama yang mempengaruhi nilai ekspor Aceh adalah Batubara, CPO, Kopi dan rempah, dll. Sedangkan negara utama tujuan ekspor utama adalah India, Amerika Serikat, Thailand, Jepang dan Belgia.

Perkembangan impor Aceh dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat cukup stabil, dimana nilai impor terendah Aceh terjadi pada tahun 2022 yaitu senilai 113.741.363 USD, sedangkan impor teritinggi terjadi pada tahun 2025 yaitu senilai 577.568.143 USD. Fluktuasi nilai impor Aceh sejalan dengan besarnya nilai ekspor, sehingga neraca ekspor dan impor Aceh dalam lima tahun terakhir, meskipun berfluktuasi namun tetap mengalami surplus, yang menandai nilai ekspor Aceh lebih besar daripada nilai impor. Surplus terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 632.056.844 USD, sedangkan surplus terkecil terjadi pada tahun. Sedangkan negara asal impor utama adalah Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Qatar, Rusia, dan Tiongkok dengan komoditas paling dominan berupa bahan bakar mineral seperti propana dan butena, pupuk dan bahan kimia anorganik lainnya.

Sedangkan nilai total ekspor barang dan jasa dari Aceh dengan menghitung ekspor luar negeri maupun ekspor antar daerah terus mengalami peningkatan, sebagaimana digambarkan dengan persentase ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Aceh seperti disajikan pada Gambar 2.90.

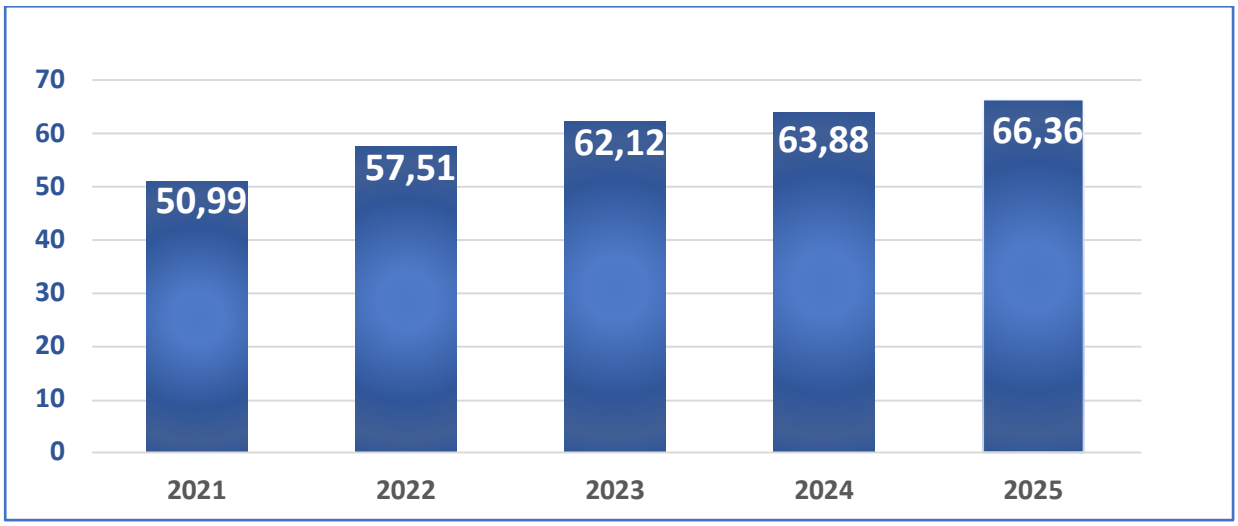

Gambar 2. 92
Persentase Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Provinsi Aceh Tahun 2021-2025

2.1.3.3.9. Perindustrian

Salah satu sektor yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan adalah sektor industri. Sektor industri perlu terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipandang sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri mampu memberikan peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Sumbangannya dalam berbagai sektor pembangunan nasional adalah wujud nyata dan tidak perlu diragukan, seperti menyerap tenaga kerja, memperluas lapangan kerja dan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara.

Perkembangan sektor industri di Aceh dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana dalam periode waktu tersebut sektor industri di Aceh mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2025 yaitu sebesar 4,63 persen dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,14 persen. Namun pertumbuhan dan kontribusi tersebut masih belum optimal dibanding dengan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor yang dibergerak di hulu.

Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Aceh dapat dilihat pada grafik berikut :

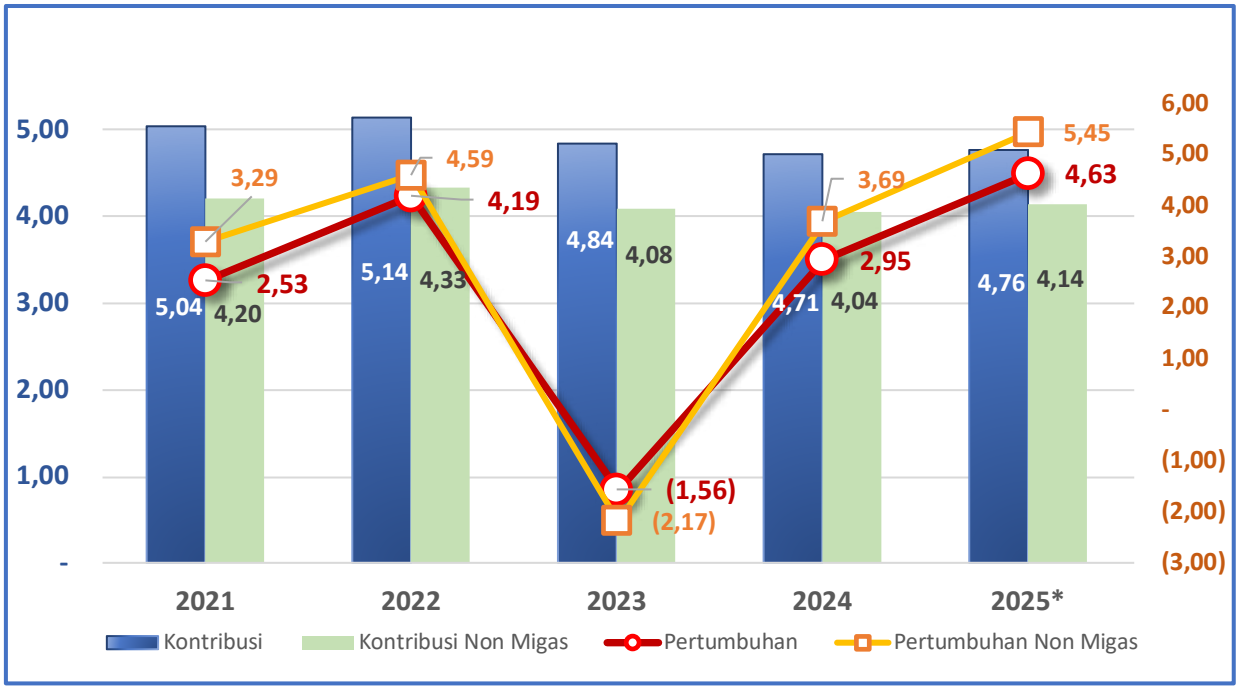

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2026 (diolah)

Gambar 2. 93
Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Aceh (persen) Tahun 2021-2026

Pertumbuhan sektor industri pengolahan di Aceh sempat mengalami lonjakan pertumbuhan pada masa pemulihan ekonomi pasca covid-19, yaitu pada tahun 2021 tumbuh signifikan sebesar 2,53 persen setelah terkontraksi sebesar 4,43 persen pada tahun 2020, tren positif berlanjut hingga pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 4,19 persen. Namun pada tahun 2023 sektor industri kembali mengalami tekanan dan berkontraksi sebesar 1,56 persen, terjadinya kontraksi pada tahun 2023 salah satunya diakibatkan oleh penurunan harga CPO di pasar global. Pada tahun 2024 sektor industri tumbuh kembali sebesar 2,95 persen. Penyebab pertumbuhan ini paling dominan terjadi pada sub sektor industri makanan dan minuman yang dipicu oleh peningkatan kembali harga CPO, sehingga mendorong pelaku industri terkait baik dihulu maupun dihilir meningkatkan produksinya. Sedangkan pada tahun 2025 sektor industri melanjutkan trend pertumbuhan yang cukup signifikan yang tumbuh sebesar 4,63 persen. Pertumbuhan terbesar terjadi pada sub sektor pengolahan tembakau sebesar 12,50 persen, hal ini menunjukkan mulai menggeliatnya industri pengolahan tembakau dan potensi pemasarannya. Subsektor lain yang juga tumbuh cukup tinggi adalah industri kimia, dan industri makanan dan minuman. Namun peranan terbesar dalam pertumbuhan sektor indusrri pengolahan masih bersumber dari sub sektor Industri makanan dan minuman, terutama berasal dari pengolahan CPO, dan Industri kimia.

Dari gambar diatas juga dapat dilihat bahwa pertumbuhan industri pengolahan tanpa migas mampu tumbuh lebih baik dibanding dengan pertumbuhan industri migas, dengan selisih antara 0,4 sampai 0,8 persen terhadap total kontribusi industri pengolahan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pertumbuhan industri migas di Aceh, pertumbuhan industri migas sendiri hanya tumbuh sebesar 1,07 persen di tahun 2025.

Sejalan dengan pertumbuhan, kontribusi sektor industri juga mengalami fluktuasi yang sama, dimana kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,14 persen, lebih baik dari tahun 2021dengan kontribusi sebesar 5,04 persen. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 kontribusi sektor industri menurun menjadi sebesar 4,84 persen dan 4,71 persen, sedangkan pada tahun 2025 mulai meningkat kembali menjadi 4,76 persen. Meskipun kontribusinya terhadap PDRB mengalami fluktuasi, namun dari sisi nilainya dalam rupiah, sektor industri terus mengalami peningkatan. Fluktuasi kontribusi sektor industri dipengaruhi tekanan berbagai sektor lain seperti sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, perdagangan, dan transportasi dan pergudangan. Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi sektor industri masih belum optimal dibandingkan dengan kontribusi sektor-sektor hulu, terutama sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan rata-rata kontribusi selama 5 tahun terakhir sebesar 29,43 – 30,98 persen. Hal ini diakibatkan karena belum tumbuhnya industri pengolahan yang cukup di Aceh, terutama pabrik pengolahan yang berskala sedang maupun besar, sehingga

kontribusi sektor industri pengolahan lebih dominan dipicu oleh Industri berskala kecil.

Sedangkan perkembangan jumlah Sentra IKM terdapat pada table 2.120:

Tabel 2. 123
Sebaran Sentra IKM Aceh Tahun 2023 Menurut Kabupaten/Kota
(Data Termutakhir)

No.	Kabupaten/ Kota	Sentra			Ket
		Jlh. Sentra	Unit Usaha	Tenaga Kerja	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Sabang	1	20	71	
2	Banda Aceh	5	58	77	
3	Aceh Besar	11	241	927	
4	Pidie	24	590	1.890	
5	Pidie Jaya	18	662	1.839	
6	Bireuen	19	578	1.735	
7	Aceh Utara	12	741	1.859	
8	Lhokseumawe	2	90	263	
9	Aceh Timur	15	181	1.479	
10	Langsa	6	81	231	
11	Aceh Tamiang	7	125	318	
12	Gayo Lues	1	1	7	
13	Aceh Tenggara	15	226	226	
14	Aceh Tengah	2	107	531	
15	Bener meriah	3	60	103	
16	Aceh Selatan	4	151	341	
17	Nagan Raya	-	-	-	
18	Aceh Barat Daya	13	89	388	
19	Aceh Barat	9	143	377	
20	Aceh Jaya	7	77	184	
21	Singkil	15	1.116	2.564	
22	Subulussalam	-	-	-	
23	Simeulue	-	-	-	
Jumlah		**189**	**5.337**	**15.410**	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Sentra IKM di Aceh sebanyak 189 sentra dengan unit usaha sebanayak 5.337 unit mampu menyerap 15.410 orang tenaga kerja. Sebaran Sentra IKM terbanyak berada di Kabupaten Pidie sebanyak 24 sentra, kemudian Bireuen 19 sentra, dan Pidie Jaya 18 Sentra. Sedangakan kabupaten Nagan Raya, Subulussalam dan Simeulue masih belum memiliki Sentra IKM. Dengan

melihat potensi yang ada, sentra IKM di Aceh masih perlu ditingkatkan dan dan sebarannya belum merata. Maka perlu didorong bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar setiap daerah memiliki sentra IKM.

2.1.3.3.10. Kelautan dan Perikanan

Sebagai negara dan daerah yang dikelilingi oleh lautan, maka kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia dan juga Aceh. Sektor kelautan dan perikanan menyumbang kontribusi besar dalam penyediaan bahan pangan, peningkatan devisa, peningkatan pendapatan, pembuka lapangan pekerjaan, dan sumber potensi wisata yang sangat besar. Oleh karena itu Pemerintah Aceh menempatkan Sub Sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas pembangunan Aceh dan kabupaten/kota.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Sub sektor perikanan dalam sektor pertanian saat ini masih merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di Provinsi Aceh, dan salah satu sektor yang memiliki peranan yang besar dalam pembangunan ekonomi Aceh. Sumbangan sub sektor perikanan terhadap PDRB meningkat tajam di 2024, setelah mengalami sedikit penurunan di tahun 2021. Besarnya nilai sub sektor perikanan tersebut terdapat pada Gambar 2.92. berikut..

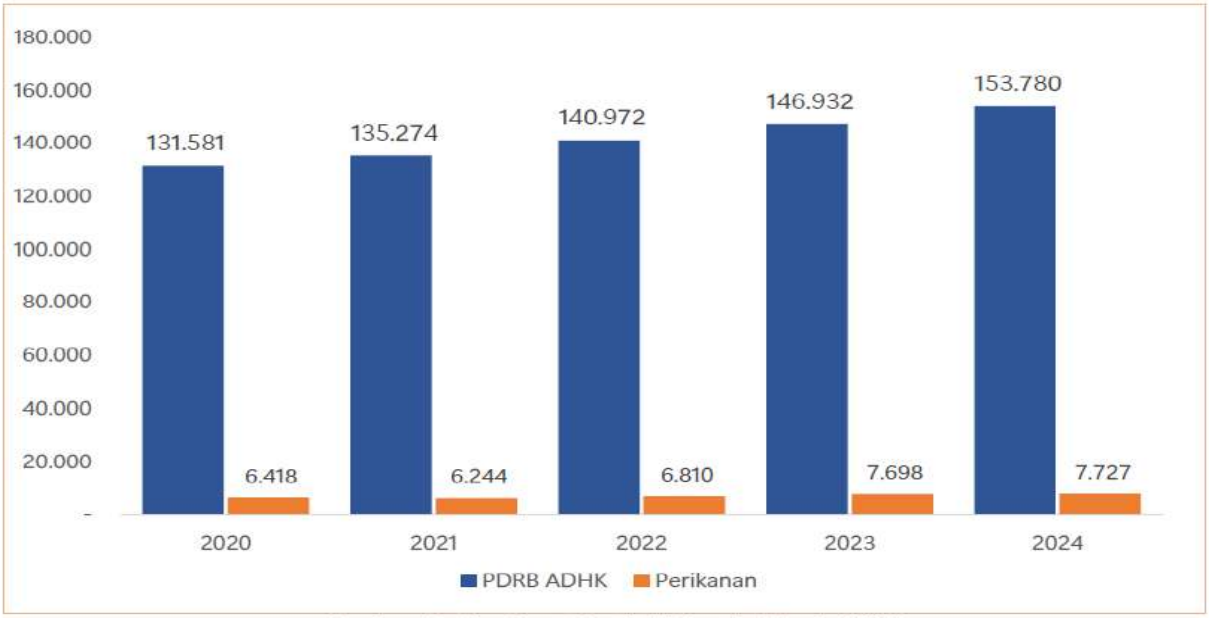

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025

Gambar 2. 94
Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan Terhadap Total PDRB Aceh Tahun 2020-2024

Aceh memiliki luas wilayah laut mencapai 295.000 km² dengan panjang garis pantai mencapai 2.666 km. Bentangan geografis ini menjadikan Aceh sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah Produksi Perikanan tahun 2019 sampai dengan 2024. Produksi Perikanan Tangkat mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2022 mencapai 420 ribu ton, namun pada tahun 2023 menurun menjadi 359 ribu ton dan kembali naik menjadi 361 ribu ton.

Tabel 2. 124
Jumlah Produksi Perikanan di Provinsi Aceh Tahun 2019-2024

Produksi/tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan (ton)	316.483,63	319.648,46	417.947,05	420.500,70	359.453,95	361.376,72
- Perikanan Tangkap (ton)	209.174,39	211.266,13	283.676,35	285.094,73	247.434,35	270.260,17
- Perikanan Budidaya (ton)	107.309,24	108.382,33	134.270,70	135.405,97	112.019,60	91.116,55

Sumber: DKP Aceh, data diolah, 2026

Permasalahan yang dihadapi nelayan yang menyebabkan menurunnya produksi perikanan tangkap saat ini diantaranya adalah perubahan iklim (el nino dan la nina) yang mempengaruhi waktu penangkapan. Di samping itu permasalahan terkait dengan armada penangkatan yang umumnya masih boat tradisional. Dari total jumlah armada tangkap sebanyak 815 unit pada PPS Lampulo, 70% diantaranya berupa boat dengan ukuran 0<GT<5 (boat thep-thep, yang tidak memiliki palka, tidak ada pembaruan teknologi penangkapan, mengoperasikan 1 alat tangkap, dan merupakan *one day fishing*), sisanya sebanyak 30% merupakan boat ukuran 5<GT<10 (boat bak).

Tabel 2. 125
Jumlah kapal (unit) pada PPS Kutaraja Lampulo

Jenis Kapal	Jumlah (Unit)
0 – 5 GT	454
6 – 10 GT	75
11 – 20 GT	58
21 – 30 GT	110
31 – 60 GT	101
> 60 GT	17
Total	815 Unit

Sumber: DKP Aceh, data diolah, 2024

Boat bak dinilai memiliki beberapa keunggulan, diantaranya; sudah dilengkapi palka berukuran antara 5 hingga 7 ton, adanya pembaruan teknologi dalam kegiatan penangkapan (misalnya, menggunakan GPS), dapat menggunakan

beberapa alat tangkap, serta memiliki durasi penangkapan yang lebih lama antara 10-12 hari.

Apabila dilihat dari potensi yang dimiliki, Aceh diperkirakan dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap, terutama jenis ikan TTC (Tuna, Tongkol, dan Cakalang). Besarnya potensi ikan tuna diperkirakan mencapai 344.000 ton/tahun untuk ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) dan sebanyak 132.000 ton/tahun untuk ikan tuna mata besar (Thunnus obesus) berdasarkan Maximum Sustainable Yield (MSY) atau Produksi Maksimum Lestari pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 dan 572. Berdasarkan data *Regional Fisheries Mangement Organization* (RFMO), ikan tuna yang bermigrasi di WPP 571 (Selat malaka) dan WPP 572 (Samudera Hindia) umumnya Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) dan Tuna Sirip Kuning (*Thunnus albacares*). Sebaran dan migrasi ikan tuna WPP 571 dan 572 dapat ditunjukkan dalam Peta Fishing Ground Provinsi Aceh di bawah ini.

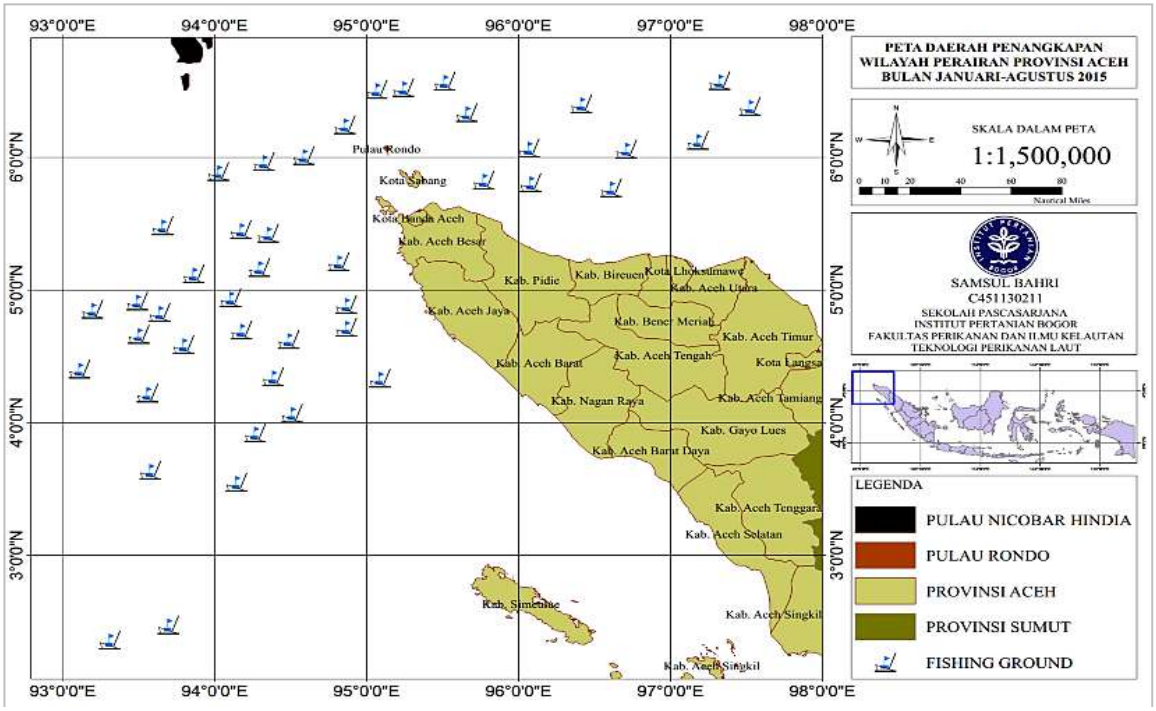

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (2022)

Gambar 2. 95
Peta *Fishing Ground* Ikan Tuna Provinsi Aceh

Sementara itu, Produksi Perikanan Budidaya mencapai 130 ribu ton lebih pada tahun 2021 dan 2022, namun menurun menjadi 110 ribu ton pada tahun 2023 dan turun lagi menjadi 90 ribu ton pada tahun 2024. Penurunan produksi perikanan budidaya diperkirakan sebagai akibat dari beberapa permasalahan yang dihadapi Pembudidaya Ikan di Aceh, diantaranya: tingginya harga pakan (Saat ini pakan masih didatangkan dari luar Aceh sehingga menyebabkan harga pakan relatif tinggi dibandingkan daerah lain), kualitas bibit yang rendah (bibit ikan juga masih didatangkan dari luar daerah, menyebabkan harga jualnya menjadi lebih tinggi namun kualitas tidak terjamin), serta banyaknya pasokan ikan dari luar Aceh dengan

harga yang lebih murah sehingga menurunkan permintaan terhadap ikan hasil budidaya lokal.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yakni dengan pengembangan kawasan perikanan berbasis mukim. Pengembangannya dilakukan di berbagai kabupaten/kota yang memiliki komoditas perikanan budidaya unggulan. Adapun sebaran wilayah yang menjadi klaster pengembangannya tersebar di sepanjang wilayah pesisir timur dan sebagian lainnya berada di pesisir barat dan selatan Aceh. Kawasan budidaya di pesisir timur banyak didominasi oleh komoditas ikan bandeng, Nila dan Udang. Pengembangan kawasan berbasis mukim tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.94 berikut.

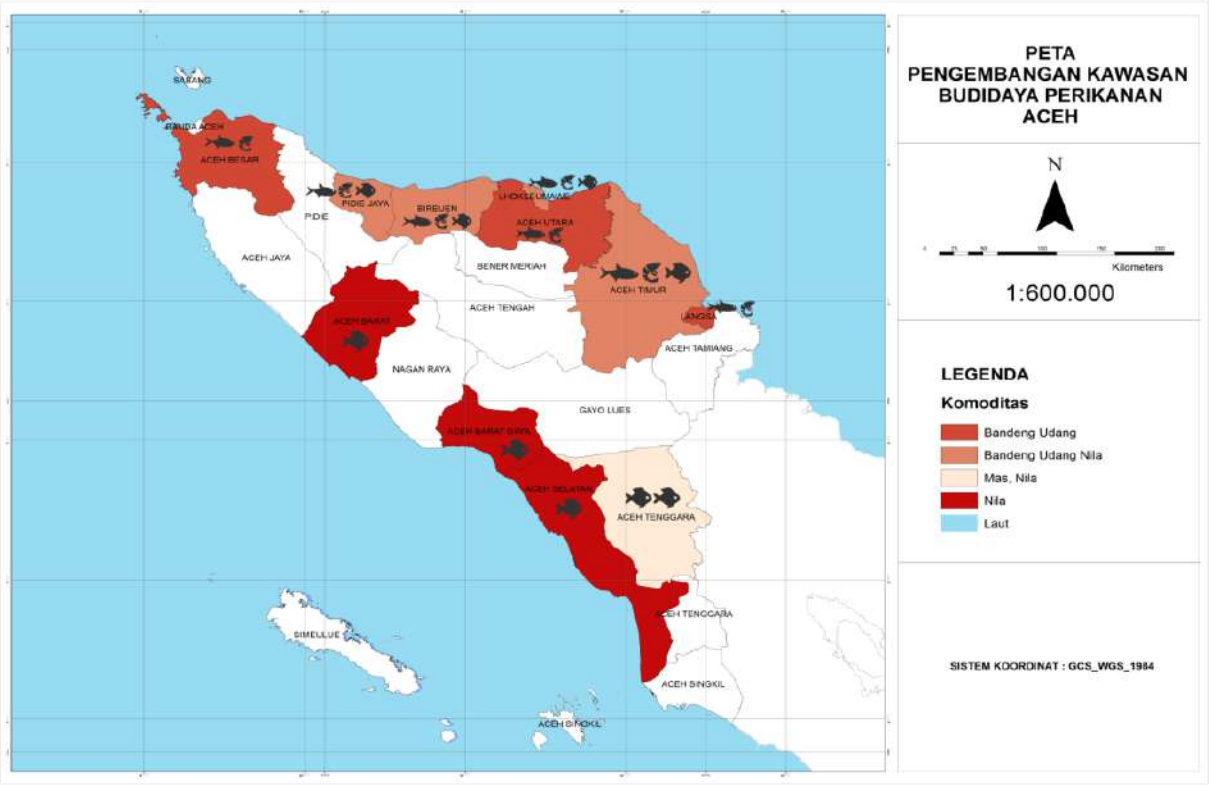

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (diolah)

Gambar 2. 96
Peta Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Berbasis Mukim

Secara umum peningkatan produksi perikanan juga akan berdampak terhadap angka konsumsi ikan. Peningkatan tersebut terlihat dari angka konsumsi yang terus meningkat dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Pada tahun 2019 angka konsumsi ikan di Aceh sebesar 58,97 Kg/Kapita/tahun dan terus meningkat menjadi 68,02 Kg/Kapita/tahun di tahun 2025. Angka tersebut telah melewati angka yang ditargetkan nasional sebesar 47 Kg/Kapita/tahun.

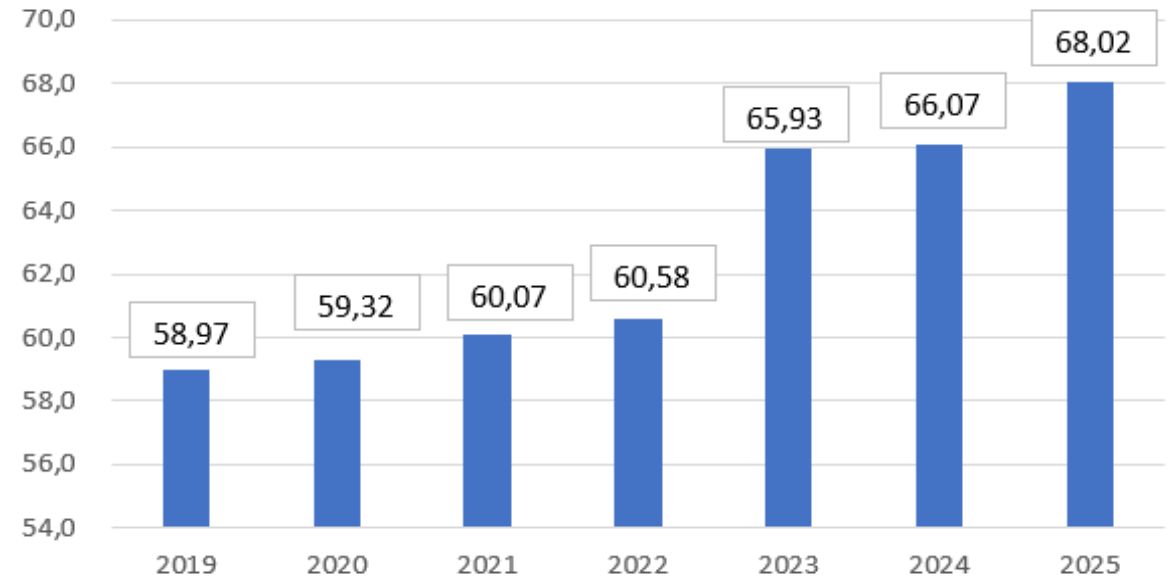

Sumber: DKP Aceh (2026)

Gambar 2. 97
Konsumsi Ika Provinsi Aceh Per kapita Tahun 2019-2025

Selain ikan, komoditi kelautan lainnya yang memegang peranan penting dalam perekonomian Aceh adalah garam konsumsi. Produksi Garam Konsumsi di Aceh sejak tahun 2020 terus mengalami perununan sampai dengan tahun 2023 meski sempat sedikit naik pada tahun 2024 sebagaimana grafik di bawah ini.

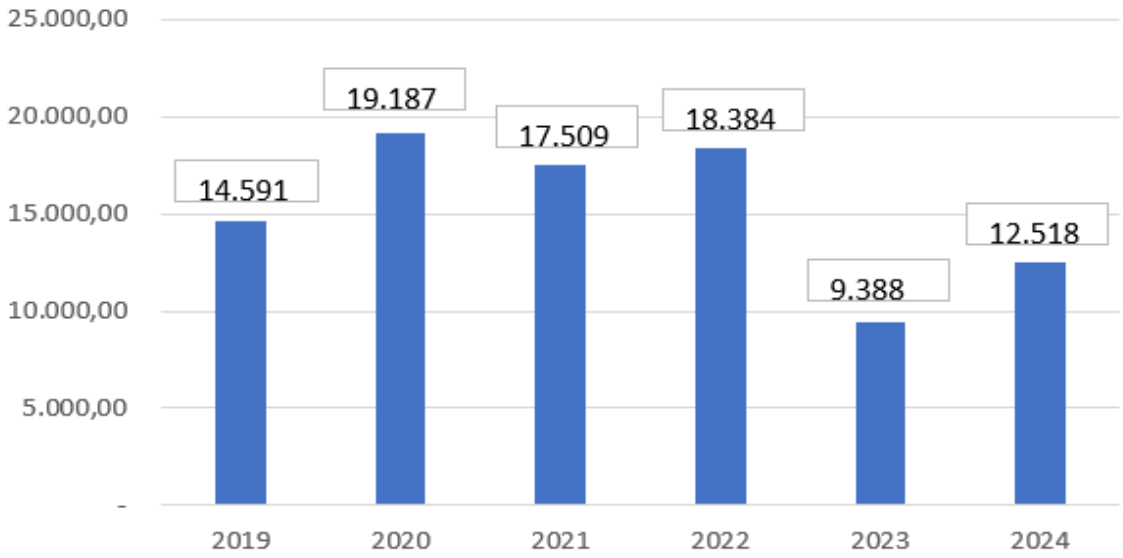

Sumber: DKP Aceh (2026)

Gambar 2. 98
Konsumsi Ikan Provinsi Aceh Per Kapita Tahun 2019-2023

Produksi garam di Provinsi Aceh belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri dengan baik dikarenakan teknologi yang belum memadai dan keadaan cuaca yang tidak menentu. Oleh karena itu, kebutuhan garam Aceh lebih banyak dipenuhi dengan cara mendatangkan garam dari luar Aceh yang memiliki harga jual lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Kondisi ini menyebabkan semakin menurunnya permintaan terhadap garam Aceh.

2.1.3.3.11. Transmigrasi

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan seperti diamanahkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Transmigrasi menjadi salah satu jalan mencapai SDGs Desa, yang memiliki 18 tujuan, yaitu: desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan permukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, Pola transmigrasi Aceh tidak lagi Transmigrasi Umum, melainkan pemberdayaan dengan kearifan lokal, yaitu penempatan warga diprioritaskan bagi warga sekitar dan Kerjasama Antar Kabupaten di Aceh (KSAD) atau lebih dikenal dengan transmigrasi local.

Berdasarkan fungsi dan pelaksanaan sektor ketransmigrasian, terdapat 14 kawasan di Aceh yang saat ini telah ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi yaitu: Kawasan silaut, Simeulue, Kawasan Babah Rot, Aceheh Barat Daya, Kawasan Latiung, Simeulue, Kawasan Harus Muda Jaya, Bireuen, Keutapang Nusantara, Aceh Tengah, Subulussalam, Samar Kilang, Aceh Tengah, Woyla, Aceh Barat, Cot Girek, Aceh Utara, Jantho, Aceh Besar, Patek, Aceh Jaya, Pintu Rime, Gayo Lues, Seulimum, Aceh Besar. Dan masih ada 7 kawasan lainnya yang juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pengembangan transmigrasi (Gosong Telaga , Aceh singkil, Geumpang Mane, Pidie, Ulee Glee, Pidie Jaya, Peunaron Seumanah Jaya, Aceh Timur, Seunagan, Nagan Raya, Alue Punti, Aceh Tamiang, Panton Jaya, Gayo Lues).

Pengembangan kawasan transmigrasi Aceh ke depan direncanakan menjadi kawasan transmigrasi berstatus mandiri. Dengan upaya pelaksanaan program - program transmigrasi , pembinaan dan pemberdayaan transmigrasi, dan perluasan kawasan transmigrasi yang yang berkembang. Namun pada akhir November 2015, Aceh dilanda bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang yang dahsyat, sehingga lima kawasan transmigrasi terdampak banjir bandang dan sempat

terisolasi yaitu Harus Muda Jaya di Kabupaten Bireuen, Cot Girek di Kabupaten Aceh Utara, Pintu Rime Gayo dan Samar Kilang di Kabupaten Bener Meriah, serta Ketapang Nusantara di Kabupaten Aceh Tengah.

2.1.3.4. Penunjang Urusan

2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan surat edaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01568/SES/PP.01/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penyampaian Informasi Penilaian Indek Perencanan Pembangunan Nasional (IPPN) Tahun 2024. Penilaian IPPN Pemerintah Daerah bertujuan untuk menilai kualitas perencanaan setiap Pemerintah Daerah yang ditunjukkan dengan adanya sinergi antar dokumen perencanaan, kualitas perencanaan dan keterhubungan antara rencana dan kinerja. Dari hasil penilaian IPPN Provinsi Aceh Tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 92,34. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi perencanaan di Pemerintah Aceh memperoleh predikat **Sangat Baik.**

Terdapat beberapa aspek yang menjadi penilaian dalam IPPN yang meliputi aspek sinergi, aspek kualitas perencanaan, dan aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja. Aspek Sinergi, bertujuan untuk mengukur kerjasama yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

(a) Keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN
Terdapat beberapa sub indikator yang masih mendapatkan penilaian atau predikat **sangat kurang** yang meliputi: (1) keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan sasaran prioritas nasional (PN) RPJMN, (2) komponen SPM di RPJMD diselaraskan dengan komponen SPM Nasional, (3) target SPM daerah diselaraskan dengan target SPM Nasional.

(b) Keselarasan dokumen RKPD dengan dokumen RKP.
Terdapat beberapa sub indikator yang masih mendapatkan penilaian atau predikat **kurang dan sangat kurang** yang meliputi: (1) tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap kegiatan prioritas pada PN4, PN5, PN6, (2) indikator makro pada RKPD selaras dengan indikator pada RKP.

(c) Kesesuaian anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program prioritas nasional/mayor project dalam dokumen RKPD.
Aspek Kualitas Perencanaan merupakan komponen penilaian terhadap hasil akhir kualitas perencanaan yang dilihat dari berbagai kesesuaian dari tiap tiap bagiannya. Sub komponen dari penilaian kualitas perencanaan di daerah

diukur berdasarkan sebagai berikut: (1) kesesuaian antara isu strategis-target-program/kegiatan/proyek di RPJMD atau RKPD, (2) inovasi perencanaan pembangunan. Dari kedua sub komponen ini hanya pada sub indikator keterkaitan output dengan outcome inovasi yang memperoleh predikat **kurang** (nilai 3,00) dari maksimal 4,50.

Aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja, merupakan indikator untuk mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan. Komponen dari indikator ini adalah target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.

2.1.3.4.2. Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini dari BPK merupakan yang ke sembilan kalinya diperoleh Pemerintah Aceh, secara berturut-turut. 23 Kabupaten/Kota yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 126
Jumlah Opini WTP Kabupaten Kota 2023

No.	Kabupaten/Kota	WTP Dari BPK RI	No.	Kabupaten/Kota	WTP Dari BPK RI
1	Kota Banda Aceh	16 Kali			
2	Aceh Besar	12 Kali	14	Aceh Barat Daya	9 Kali
3	Kota Sabang	12 Kali	15	Aceh Selatan	9 Kali
4	Kota Lhokseumawe	12 Kali	16	Aceh Timur	8 Kali
5	Kota Langsa	11 Kali	17	Aceh Utara	9 Kali
6	Aceh Barat	10 Kali	18	Nagan Raya	6 Kali
7	Aceh Jaya	11 Kali	19	Pidie	10 Kali
8	Aceh Tamiang	10 Kali	20	Pidie Jaya	10 Kali
9	Aceh Tengah	15 Kali	21	Simeulue	9 Kali
10	Bener Meriah	10 Kali	22	Aceh Singkil	8 Kali
11	Bireuen	10 Kali	23	Subulusalam	5 Kali
12	Gayo Lues	10 Kali	24	Aceh Tenggara	8 Kali

Sumber: BPK, 2024

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun Anggaran 2023. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagai salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat kemajuan Rencana, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemerintah Aceh.

Hasil Pemeriksaan BPK memberikan beberapa koreksi diantaranya adalah kelemahan dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan tata kelola aset serta penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh.

2.1.3.4.3. Kepegawaian/Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN)

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Tujuan dari IP-ASN adalah untuk memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Penilaian IP-ASN ini dilakukan terhadap seluruh ASN Pemerintah Aceh dengan jumlah total 36.395 ASN terdiri dari 19.100 PNS dan 17.295 PPPK. Capaian IP-ASN di Aceh periode tahun 2021-2025 pada Tabel 2.116. berikut.

Tabel 2. 127
Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)	86,1	31,53	57,59	76,76	79,25

Sumber : Badan Kepegawaian Aceh, 2025

Dari Tabel 2.116 Berdasarkan data yang tersedia, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam pencapaian nilai Indeks Profesionalisme ASN setiap tahunnya. Pada tahun 202, nilai IP-ASN tercatat cukup tinggi, yakni 86,1, menunjukkan kinerja yang baik dan memuaskan. Namun, pada tahun berikutnya, yaitu 2023, nilai IP-ASN mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 57,59. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi eksternal yang tidak terduga atau adanya tantangan internal yang menghambat kinerja.

Selanjutnya, pada tahun 2024, nilai IP-ASN kembali meningkat menjadi 76,76, dan meningkat lagi menjadi 79,25 di tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan upaya perbaikan yang dilakukan dan adanya peningkatan dalam kualitas kinerja ASN yang lebih optimal. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan drastis hingga mencapai angka 31,53. Penurunan ini menunjukkan adanya masalah serius yang perlu ditangani, baik terkait dengan sistem, sumber daya manusia, maupun faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi kinerja ASN.

Pada tahun 2023, nilai IP-ASN kembali mengalami kenaikan menjadi 57,59, meskipun belum mencapai angka yang memadai dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, tantangan yang ada masih cukup signifikan. Terakhir, pada tahun 2024, nilai IP-ASN tercatat sebesar

76,76, menunjukkan kemajuan yang positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan.

Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) pada tahun 2025 tercatat sebesar 79,25 berdasarkan data sementara yang dirilis pada akhir tahun 2025. Nilai tersebut belum merupakan nilai final, mengingat proses penghitungan IP-ASN secara menyeluruh masih berlangsung dan menunggu penetapan resmi dari instansi yang berwenang. Sampai saat ini Pemerintah Aceh melalui BKA terus melakukan upaya perbaikan dan validasi data kepegawaian secara berkelanjutan untuk memastikan akurasi penghitungan IP-ASN serta mendorong peningkatan profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Aceh.

2.1.3.4.4. Pendidikan, Pelatihan dan Beasiswa

Selama periode 2021–2025, pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional bagi aparatur Pemerintah Aceh menunjukkan tren yang secara umum meningkat, meski sempat mengalami fluktuasi di tengah perjalanannya. Pada 2021, jumlah PNS Aceh tercatat sebanyak 21.830 orang, namun hanya 333 peserta yang mengikuti diklat – setara 1,53% dari total ASN. Angka ini terbilang rendah, kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi yang membatasi penyelenggaraan pelatihan. Memasuki 2022 dan 2023, terjadi peningkatan signifikan. Peserta diklat naik ke 540 orang (2,36%) dan 565 orang (2,50%), seiring dengan mulai pulihnya aktivitas pelatihan. Jumlah PNS pun tumbuh tipis menjadi 22.851 dan sedikit menurun ke 22.640 orang.

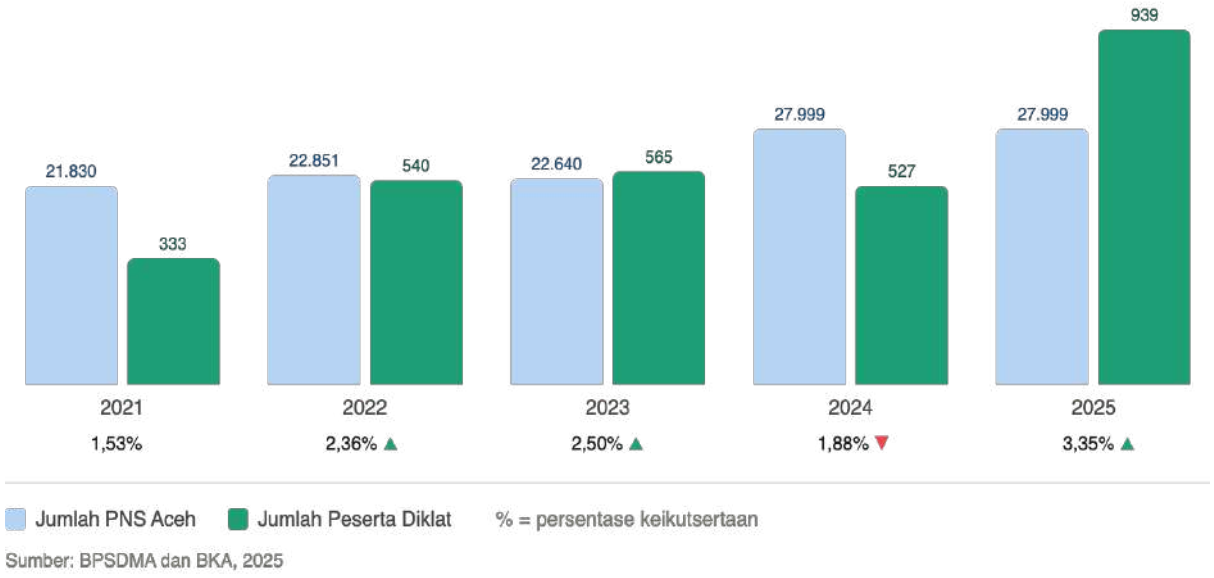

Gambar 2. 99
Diklat Teknis Fungsional – Aparatur Pemerintah Aceh
Jumlah PNS, Peserta Diklat, dan Persentase Keikutsertaan (2021–2025)

Pada 2024, meski jumlah PNS melonjak drastis menjadi 27.999 orang – kemungkinan akibat pengangkatan atau integrasi honorer – jumlah peserta diklat justru turun ke 527 orang, sehingga persentase keikutsertaan terkoreksi ke 1,88%. Ini mengindikasikan kapasitas penyelenggaraan diklat belum mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah ASN. Puncaknya terjadi pada 2025, di mana peserta diklat melonjak tajam ke angka tertinggi, yaitu 939 orang atau 3,35% dari total PNS. Ini menjadi capaian tertinggi sepanjang periode yang tercatat, mencerminkan upaya akseleratif pemerintah dalam peningkatan kompetensi aparatur. Secara keseluruhan, tren positif ini menggambarkan komitmen yang semakin kuat dari Pemerintah Aceh melalui BPSDMA dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia aparaturnya, meskipun masih terdapat ruang yang sangat besar untuk peningkatan: lebih dari 96% PNS pada 2025 belum mengikuti diklat teknis fungsional.

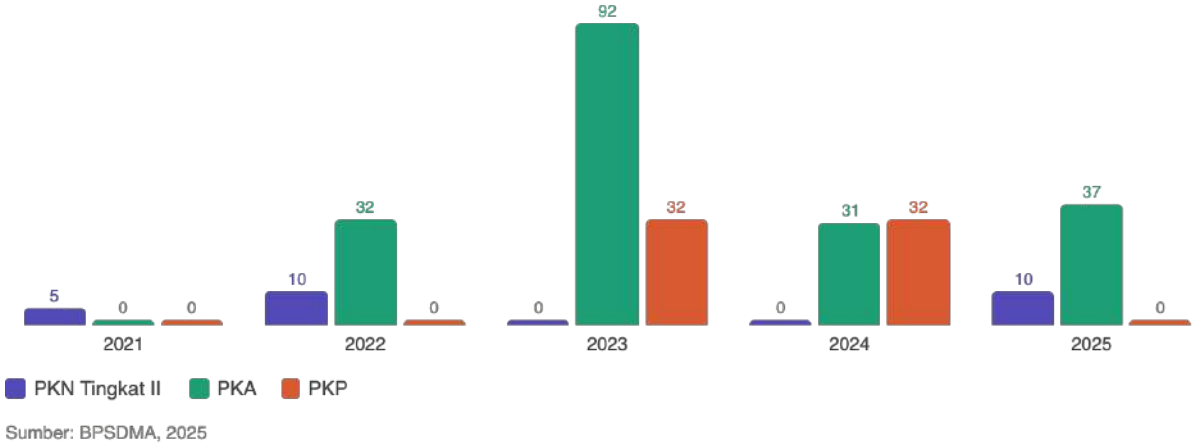

Sumber: BPSDMA, 2025

Gambar 2. 100
Diklat Struktural Kepemimpinan – Pejabat Pemerintah Aceh Peserta PKN Tk. II, PKA, dan PKP per tahun (2021–2025)

Tabel ini menyajikan perkembangan penyelenggaraan Diklat Struktural Kepemimpinan bagi pejabat Pemerintah Aceh dalam rentang 2021–2025, yang mencakup tiga jenis pelatihan: PKN Tingkat II (untuk pejabat eselon I/II), PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator, eselon III), dan PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, eselon IV). Pada 2021, penyelenggaraan diklat masih sangat terbatas. Hanya PKN Tingkat II yang berjalan dengan 5 peserta, sementara PKA dan PKP sama sekali belum terlaksana. Kondisi ini merupakan imbas masa awal pemulihan pascapandemi. Tahun 2022 menandai titik kebangkitan. PKN Tingkat II meningkat menjadi 10 peserta, dan PKA mulai diselenggarakan dengan 32 peserta – sebuah langkah maju yang berarti. PKP masih belum terlaksana pada tahun ini. Puncak penyelenggaraan terjadi pada 2023, yang menjadi tahun paling produktif dalam periode ini. PKA mencatatkan angka tertingginya dengan 92 peserta, sekaligus PKP pertama kali diselenggarakan dengan 32 peserta. Namun, PKN Tingkat II tidak

ada pesertanya sama sekali di tahun ini, mengindikasikan adanya pergeseran prioritas ke level menengah.

Pada 2024, tren PKA mengalami penurunan tajam ke 31 peserta, meski PKP tetap stabil di angka 32. PKN Tingkat II kembali nihil. Tahun 2025, PKN Tingkat II kembali aktif dengan 10 peserta dan PKA sedikit meningkat ke 37 peserta. Akan tetapi, PKP justru tidak diselenggarakan sama sekali, menciptakan celah pembinaan kompetensi di level pengawas. Dari permasalahan itu, diperlukan sinkronisasi yang lebih baik agar ketiga jenjang diklat dapat berjalan secara berkesinambungan setiap tahunnya, demi memastikan seluruh level pejabat struktural mendapatkan penguatan kompetensi kepemimpinan yang memadai.

Pemerintah Aceh dalam mendukung program unggulan Aceh Carong juga memberikan kesempatan beasiswa Diploma, Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) baik dalam negeri maupun luar negeri kepada masyarakat Aceh dan ASN Pemerintah Aceh. Pada tahun 2024, beasiswa Pemerintah Aceh dibuka untuk 21 jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.128.

Tabel 2. 128
Beasiswa Pemerintah Aceh Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang	No.	Jenjang
1	Diploma Aceh Carong bagi Masyarakat Kurang mampu dan Korban Konflik	9	S-2 Tahfidz Luar Negeri
2	S-1 Aceh Carong Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Korban Konflik Kerjasama PTN/PTS Aceh	10	Dokter Spesialis
3	S-1 Prestasi Dalan Negeri	11	S-3 Kerjasama DAAD
4	S-1 Tahfidz Luar Negeri	12	S-3 Dosen PTN/PTS Dalam Negeri
5	S-2 Masyarakat Aceh Dalam Negeri	13	S-3 Masyarakat Aceh Dalam Negeri
6	S-2 Masyarakat Aceh Luar Negeri	14	S-3 Masyarakat Aceh Luar Negeri
7	S-2 Kerjasama Pemerintah Aceh-Luar Negeri (USK-Rhole Island)	15	Dosen PTN/PTS Luar Negeri
8	S-2 Kerjasama DAAD		

Sumber : BPSDM Aceh, 2025

Sumber daya Manusia (SDM) memiliki peran vital dalam pembangunan Aceh, sesuai dengan visi Gubernur Aceh yang menekankan pentingnya kualitas SDM

sebagai pilar utama pembangunan. Misi kelima dari tujuh misi utama yang secara spesifik berfolus pada peningkatan kualitas dan daya saing SDM Aceh menuju masa depan cerah dan sejahtera. Peningkatan kualitas SDM Aceh dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk kelompok usia produktif untuk mendapat pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan sarana dalam menyiapkan SDM Aceh yang berdaya saing tinggi baik nasional maupun internasional dan membuka peluang lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyakatat secara keseluruhan. Jumlah masyarakat Aceh yang menerima beasiswa yang terus meningkat dari tahun 2019-2024 baik yang melanjutkan Pendidikan dalam negeri maupun luar negeri dengan jenjang Pendidikan mulai dari D1,D3,D4, S1, S2, S3, serta dokter sepesialis mengalami fluktuasi. Rincian penerima beasiswa yang melanjutkan Pendidikan tinggi didalam negeri Selama periode 2019-2024 tercatat sebanyak lebih dari 12.566 orang penerima beasiswa Pemerintah Aceh yang telah dan sedang mengenyam pendidikan tinggi dengan berbagai tingkatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.129.

Tabel 2. 129
Rekapitulasi Penerimaan Beasiswa Pemerintah Aceh Jenjang D1, D3, D4, S1, S2, S3 dan Spesialis dalam Negeri dan luar Negeri Tahun 2021-2025

No	Tahun	Dalam Negeri Dan Luar Negeri								Jumlah
		Non Gelar	D1	D3	D4	S1	S2	S3	SPS	
1	2021	-	40	550	5	2106	301	169	106	3277
2	2022	200	38	417	254	1958	142	129	72	3210
3	2023	-	-	347	207	1168	47	72	57	1898
4	2024	-	-	151	124	920	-	45	47	1287
5	2025				414	13	-	11	25	463
Total										

Sumber : BPSDM Aceh, 2025

Selama periode 2021-2025 tercatat sebanyak lebih dari 10.135 orang penerima beasiswa Pemerintah Aceh yang telah dan sedang mengenyam pendidikan tinggi dengan jenjang Pendidikan S1, S2 dan S3. Adanya penurunan pernerima di tahun 2025 dikarenakan tidak adanya penerimaan baru beasiswa pemerintah aceh pada Tahun tersebut. Di Tahun 2025 hanya pembayaran beasiswa lanjutan bagi mahasiswa yg belum menyelesaikan studi.

2.1.3.4.5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang memegang peranan penting dalam mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data dan fakta (evidence based planning). Oleh karenanya, unsur ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Peran dan fungsi penelitian dan pengembangan termasuk inovasi dari suatu daerah dapat diukur tingkat capaiannya dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang di ukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, nilai indeks inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Beberapa indikator di atas juga merupakan salah satu indikator kinerja dalam sistem pemerintahan yang diukur capaiannya setiap tahun.

2.1.3.4.6. Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawasan internal terhadap kinerja pegawai dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan.

Pada Tahun 2025 persentase objek Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintergrasi (SPIP-T) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (K-APIP) mengalami penurunan skor capaian. Realisasi tahun-tahun sebelumnya mencapai Level 3, namun turun menjadi Level 2 dikarenakan adanya penggunaan aturan baru yang terbit dan berlaku pada tahun berjalan (Tahun 2025). Pemberlakuan aturan ini menambah nilai dan poin yang dilakukan evaluasi, sedangkan target dan realisasi yang berjalan tidak mencakup poin yang dilakukan penilaian.

Tabel 2. 130
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintergrasi (SPIP-T) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (K-APIP)

No	Uraian	2021		2022		2023		2024		2025	
		Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level
1	SPIP	2,951	3	3,091	3	3,171	3	3,171	3	2,938	2
2	MRI			2,916	2	3,057	3	3,057	3	2,968	2
3	IEPK			2,504	2	3,170	3	3,020	3	2,904	2
4	Kapabilitas APIP	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000	3	2,240	2

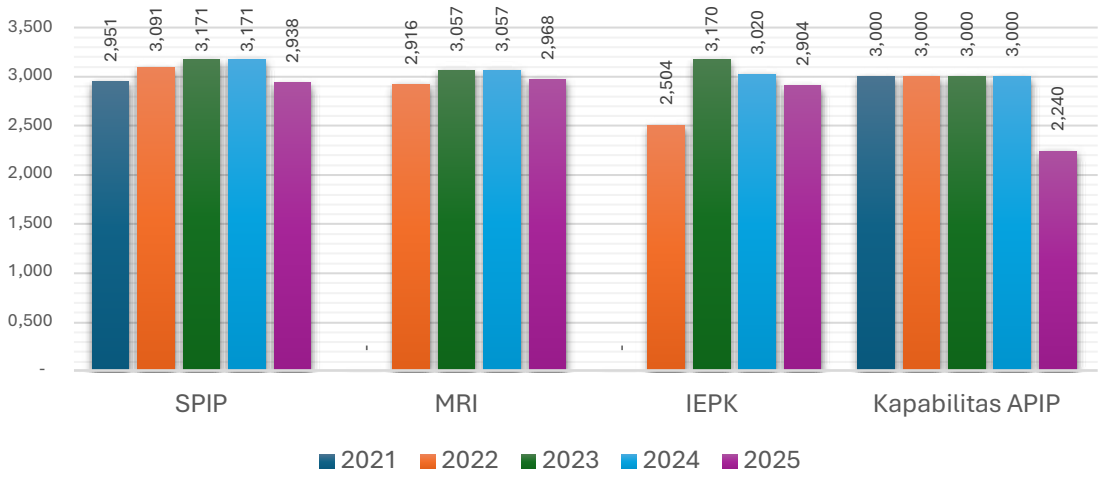

Gambar 2. 101
Capaian SPIP-T dan K-APIP Aceh tahun 2021 - 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengubah nama *Monitoring Center for Prevention* (MCP) menjadi *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP), Capaian MCsP Tahun 2025 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya terjadi keterlambatan dalam proses pengadaan barang/jasa.

Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi. Pada Tahun 2025 Pemerintah Aceh memperoleh Capaian Nilai MCSP sebesar 63,60%. Capaian tersebut menunjukkan adanya pergeseran kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencerminkan masih perlunya penguatan komitmen dan konsistensi dalam pemenuhan indikator MCSP, khususnya pada area-area strategis yang menjadi fokus penilaian berdasarkan posisi data per 21 Januari 2026 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun area intervensinya meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, Pengelolaan BMD dan Optimalisasi Pajak, dengan nilai capaian sebagai berikut :

Tabel 2. 131
Area Intervensi MCSP KPK Tahun 2025

NO	FOKUS INTERVENSI	2025
1	Perencanaan	49
2	Penganggaran	76
3	Pengadaan Barang dan Jasa	53,8
4	Pelayanan Publik	68,3
5	Pengawasan APIP,	69,7
6	Manajemen ASN.	77,5
7	Optimalisasi Pajak Daerah	70
8	Pengelolaan BMA.	71

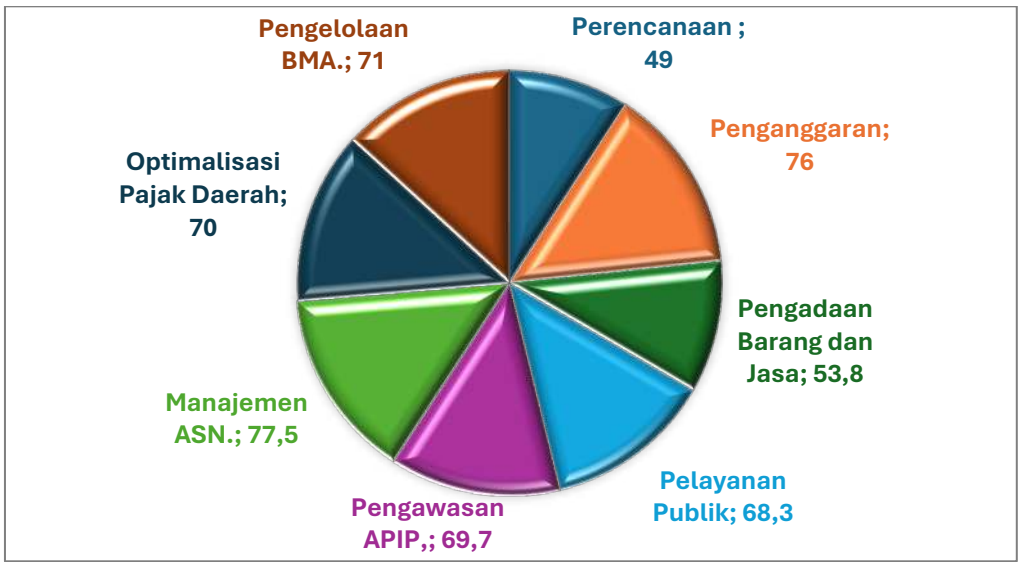

Gambar 2. 102
Skor Capaian MCSP KPK Tahun 2025



Gambar 2. 103
Tren Capaian MCSP Tahun 2021-2025

2.1.3.4.7. Sekretariat DPRD

Layanan bidang urusan Sekretariat DPRA meliputi: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA); tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRA untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPA); dan terintegrasi program-program DPRA untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRA.

Pelayanan Sekretariat DPRA diberikan dalam bentuk dukungan dan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRA baik dalam bentuk dukungan administrasi dan keuangan, sarana dan prasarana, serta fasilitasi terhadap 3 (tiga) fungsi Dewan yaitu Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan.

Fasilitasi rancangan qanun yang dilakukan sejak tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 132
Fasilitasi Rancangan Qanun dan Jumlah Qanun yang ditetapkan DPRA

Tahun	Jumlah Rancangan Qanun yang difasilitasi pembahasan	Jumlah Qanun yang ditetapkan oleh DPRA
2021	12	4
2022	12	5
2023	12	9
2024	11	10
2025	12	5

Sumber : Sekretariat DPRA, 2026

2.1.3.4.8. Indeks Reformasi Hukum

Di Provinsi Aceh, Indeks Reformasi Hukum menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola hukum, menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Kementerian Hukum, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Aceh tahun 2025 adalah 77,70 dengan kategori BB (Baik). Penilaian ini dilakukan untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan sasaran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Aceh.

2.1.3.4.9. Indeks Reformasi Birokrasi

Arah kebijakan reformasi birokrasi Pemerintah Aceh bagaimana di atur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2025-2029 bertujuan untuk mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan Aceh. Berdasarkan publikasi pada portal Reformasi Birokrasi Nasional (www.portalrb.id) capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Aceh tahun 2025 mendapatkan predikat "A-" (Memuaskan) dengan nilai "82,73", meningkat sebesar 6,04 point dari hasil perolehan tahun 2024 sebesar 79,69. Sementara tahun 2024 kenaikan nilai indeks sebesar 5,14 poin dibandingkan nilai indeks Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 74,55. Angka perolehan tahun 2024 ini apabila dibandingkan secara nasional berada diatas angka rata-rata nasional sebesar 71,55.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh tahun 2025



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/23/RB.06/2026 — 10 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025**

Yth.
Sekretaris Daerah Provinsi Aceh
di
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Evaluator Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Aceh. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran "Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif" serta "Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional". Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Indeks RB Pemerintah Provinsi Aceh tahun 2025 adalah **82,73** dengan kategori **"A-"**. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	2024	2025
A	RB General	100*	69,04	70,99
B	RB Tematik	20	10,65	11,74
C	Indeks RB	120	79,69	82,73
			BB	A-

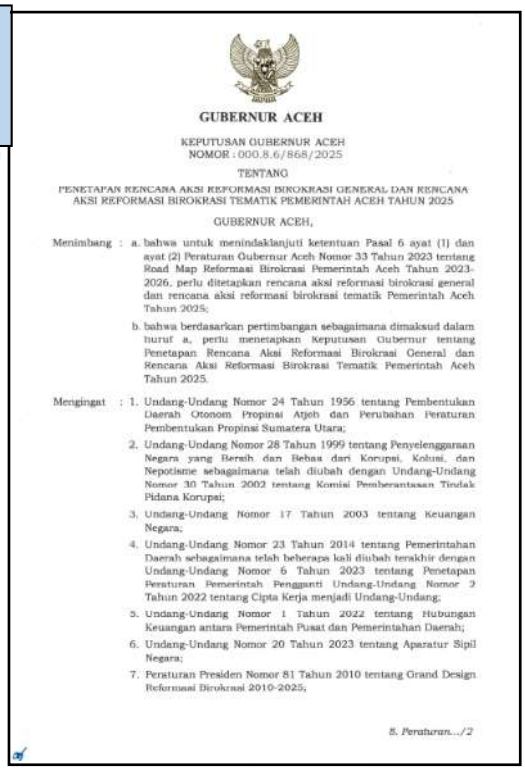

GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR : 000.8.6/868/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH ACEH TAHUN 2025

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan rencana aksi reformasi birokrasi general dan rencana aksi reformasi birokrasi tematik Pemerintah Aceh Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Aceh Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan.../2

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025, Pemerintah Aceh telah menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.8.6/868/2025 tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Aceh Tahun 2025. Dalam surat edaran ini arah kebijakan Reformasi Birokrasi difokuskan kepada 6 tema perioritas pembangunan Nasional yaitu : 1) Penuntasan kemiskinan, 2) Realisasi investasi, 3) Hilirisasi, 4) Ketahanan pangan, 5) Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan, 6) Peningkatan akses kualitas dan mutu layanan

pendidikan. Adapun dalam tahun 2025 Pemerintah Aceh melalui Biro Organisasi Setda Aceh telah menetapkan :

a. Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.8.6/868/2025 tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Aceh Tahun 2025.
b. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2024.
c. Pengimputan, evaluasi dan pengendalian terhadap progres pencapaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025, selanjutnya disampaikan pada portal RB Nasional melalui www.portalrb.id.
d. Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Pemerintah Aceh tahun 2025 dan Desk Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2025 sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap capaian target, indikator, program dan kegiatan Reformasi Birokrasi tahun 2025.

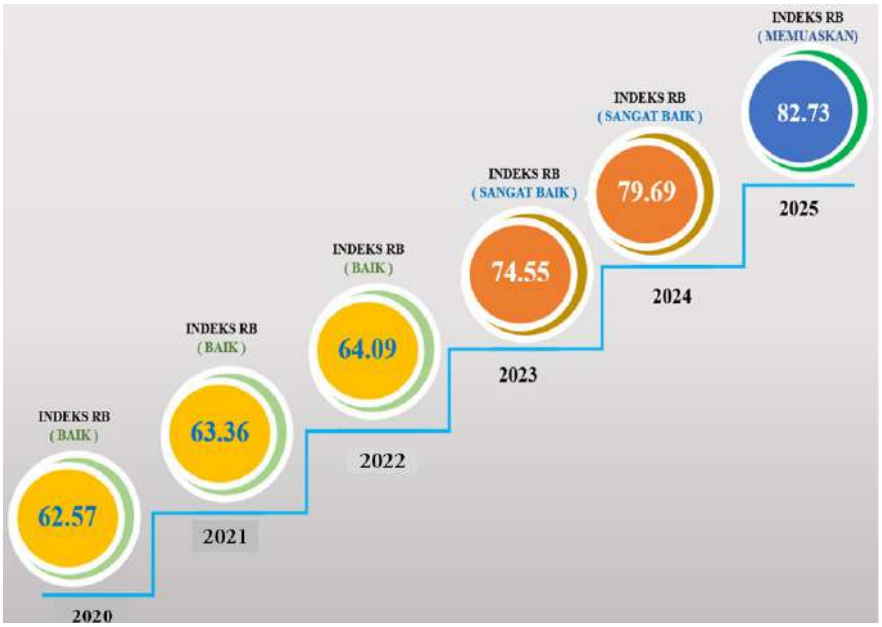

Gambar 2. 104
Grafik Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2020 – 2025

Pembinaan Reformasi Birokrasi Kab/kota

Dalam rangka percepatan pelaksanakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/kota di Aceh, Pemerintah Aceh telah melakukan pembinaan melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokras Kabupaten/Kota
2. Pembinaan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

2.1.3.5. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran pada IDSD 2024 mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum atau WEF (Schwab, 2019). Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data. Pada IDSD 2024 ini dilakukan perubahan terhadap beberapa indikator dan penyesuaian cara penghitungan skor sehingga lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah. Sebagai informasi skor nasional IDSD (berdasarkan skor seluruh provinsi) adalah sebsar 3,43 dari skala 5.

Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (*basic requirement factors*), faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*), dan faktor inovasi dan kecanggihan (*innovation and shopistication factors*). Ketiga faktor penentu daya saing ini diterjemahkan ke dalam tiga komponen awal pembentuk daya saing. Penyusunan IDSD 2024 dilaksanakan melalui serangkaian tahapan mulai dari pemantapan kerangka konseptual, evaluasi indikator, pengumpulan data, pengolahan data, standardisasi data, penghitungan skor akhir dengan agregasi, dan kontrol kualitas data akhir (uji statistik). IDSD 2024 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing seperti pada gambar di bawah ini. Kerangka ini secara umum tidak ada perubahan dengan IDSD 2023. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokkan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks.

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu Kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia

yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek. Sedangkan Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Tahun 2024 nilai capaian IDSD Provinsi Aceh yaitu sebesar 3,49, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian rata-rata Nasional yaitu 3,43. Selengkapnya berikut ini tabel nilai capaian IDSD Kabupaten/Kota se Aceh tahun 2024.

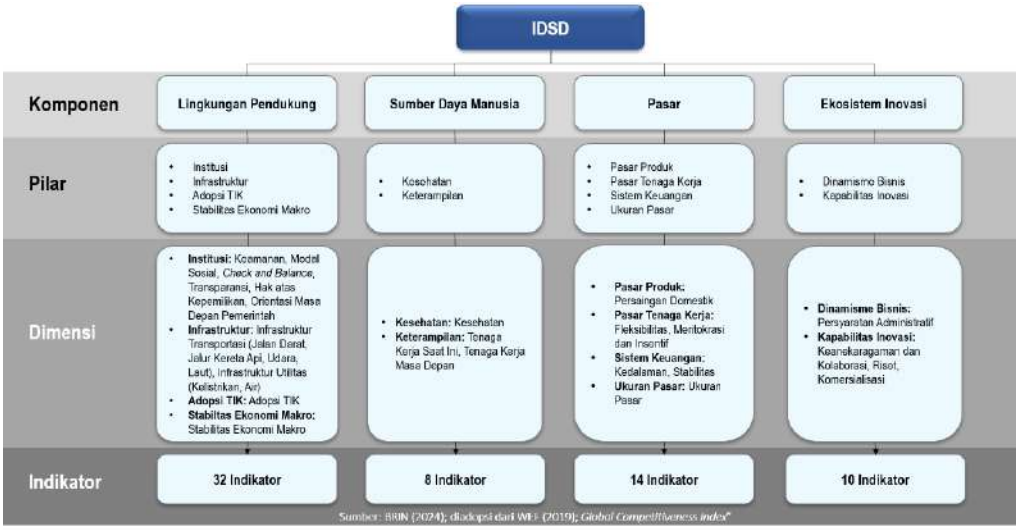

Gambar 2. 105
Kerangka IDSD 2024

Secara regional skor IDSD Aceh tahun 2024 tertinggi ketiga di Sumatera setelah Sumatera Utara (3,71) dan Sumatera Barat (3,70). Selanjutnya berdasarkan pembentuk IDSD nilai tertinggi Aceh diperoleh dari pilar 1 institusi yang mencapai 4,70 dan terendah dari pilar 9 sistem keuangan dengan nilai 2,10 (lihat Gambar

2.103).



3,49
SKOR IDSD 2024
PROVINSI ACEH



6
kab/kota
≥ skor provinsi

NAMA KAB/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR			EKOSISTEM INOVASI			SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
PROVINSI ACEH	4,70	2,75	3,12	3,88	3,78	4,05	4,36	2,76	2,10	4,35	2,78	3,24	3,49
RATA-RATA KAB/KOTA	4,43	2,82	3,78	3,80	3,64	3,88	3,37	3,22	2,18	3,78	4,04	1,86	3,40
SIMEULUE	4,31	2,31	3,92	3,92	3,39	3,79	3,81	2,39	1,78	3,34	4,19	1,88	3,25
ACEH SINGKIL	4,41	3,00	4,17	3,44	3,57	3,58	3,73	3,22	2,37	3,37	3,69	0,98	3,29
ACEH SELATAN	4,54	2,72	3,35	4,06	3,32	3,97	3,56	3,04	2,62	3,77	4,04	1,23	3,35
ACEH TENGGARA	3,76	2,58	2,60	3,79	3,64	3,94	3,65	2,70	2,80	3,66	3,91	1,67	3,22
ACEH TIMUR	4,63	2,61	3,10	3,56	3,68	3,43	2,85	2,97	2,07	4,05	3,66	1,27	3,16
ACEH TENGAH	4,30	3,05	3,60	3,67	3,69	4,01	2,97	2,48	1,71	3,92	4,21	2,30	3,32
ACEH BARAT	4,63	2,73	3,93	3,69	3,62	3,72	2,15	3,05	2,19	4,01	4,33	2,75	3,40
ACEH BESAR	4,58	3,46	3,91	3,99	3,77	3,70	3,87	3,40	1,96	4,15	4,20	2,55	3,63
PIDIE	4,61	2,80	3,10	3,58	3,53	3,83	3,50	3,48	1,94	4,04	3,82	2,51	3,39
BIREUEN	4,65	3,22	3,94	3,64	3,89	4,17	4,01	3,38	1,35	4,16	4,39	2,35	3,60
ACEH UTARA	4,51	2,55	3,83	2,99	3,68	3,64	2,27	2,98	1,63	4,36	3,60	2,78	3,24
ACEH BARAT DAYA	4,68	2,33	3,51	4,38	3,38	4,00	3,75	3,45	2,16	3,61	4,04	0,74	3,34
GAYO LUES	4,37	2,47	2,74	3,89	3,41	3,93	2,83	1,94	1,67	3,42	3,58	1,15	2,95
ACEH TAMIANG	4,31	3,03	4,04	3,72	3,76	3,69	2,24	3,23	2,07	3,91	4,25	0,92	3,26
NAGAN RAYA	4,62	2,65	3,87	3,01	3,72	3,73	1,84	3,18	2,54	3,99	3,75	1,07	3,16
ACEH JAYA	4,75	3,04	3,41	4,02	3,55	4,20	3,24	3,76	1,52	3,43	3,90	1,38	3,35
BENER MERIAH	4,44	2,48	3,65	3,79	3,72	4,17	2,18	2,02	1,36	3,71	4,18	1,35	3,09
PIDIE JAYA	4,76	2,72	3,09	3,98	3,80	4,08	3,14	3,77	1,74	3,54	4,18	1,14	3,33
BANDA ACEH	4,23	3,32	4,87	3,91	3,92	3,92	5,00	4,15	3,74	4,34	4,54	3,96	4,16
SABANG	4,61	3,33	4,72	4,24	3,84	4,33	4,47	3,30	3,06	3,17	4,06	2,17	3,77
LANGSA	4,18	2,93	4,77	3,96	3,74	3,90	5,00	3,92	2,38	3,73	4,49	3,18	3,85
LHOKSEUMAWE	4,25	2,98	4,75	4,11	3,93	3,82	4,39	4,51	2,61	4,00	3,92	2,87	3,85
SUBULUSSALAM	3,77	2,61	4,10	3,98	3,29	3,71	3,02	3,67	2,96	3,28	3,97	0,68	3,25

Gambar 2. 106
Skor IDSD 2024 Provinsi Aceh

Berdasarkan Gambar di atas, diketahui terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota yang memiliki skor IDSD Tahun 2024 diatas Aceh (3,49) dan Nasional (3,43) yang meliputi sebagai berikut: Kota Banda Aceh (4,16) , Kota Lhokseumawe (3,85), Kota Langsa (0,85) Kota Sabang (3,77), Kab. Aceh Besar (3,63) dan Kab. Bireuen (3,60). Sementara itu 3 (tiga) kabupaten/kota dengan IDSD terendah adalah Kab. Gayo Lues (2,95), Kab. Nagan Raya (3,16) dan Kab. Aceh Tenggara (3,22).

2.1.3.6. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Indikator ini dapat memberi gambaran dan menjelaskan tentang kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat melalu aktivitas kegiatan pembangunan perekonomian daerah.

2.1.3.6.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Konsumsi merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang. Pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari oleh manusia tidak terlepas dari aktivitas konsumsi. Pengeluaran konsumsi dapat menjadi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi individu atau rumah tangga. Secara umum pola konsumsi penduduk Aceh didominasi oleh makanan

dibandingkan dengan konsumsi non makanan. Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir puncak persentase pengeluaran makanan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 668 ribu atau sebesar 56,66 persen. Pengeluaran konsumsi non makanan tertinggi juga terjadi pada tahun 2022 sebesar 511 ribu atau sebesar 43,36 persen. Dari nilai pengeluaran tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita masyarakat Aceh dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terkahir mengalami peningkatan. Besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.106 berikut.

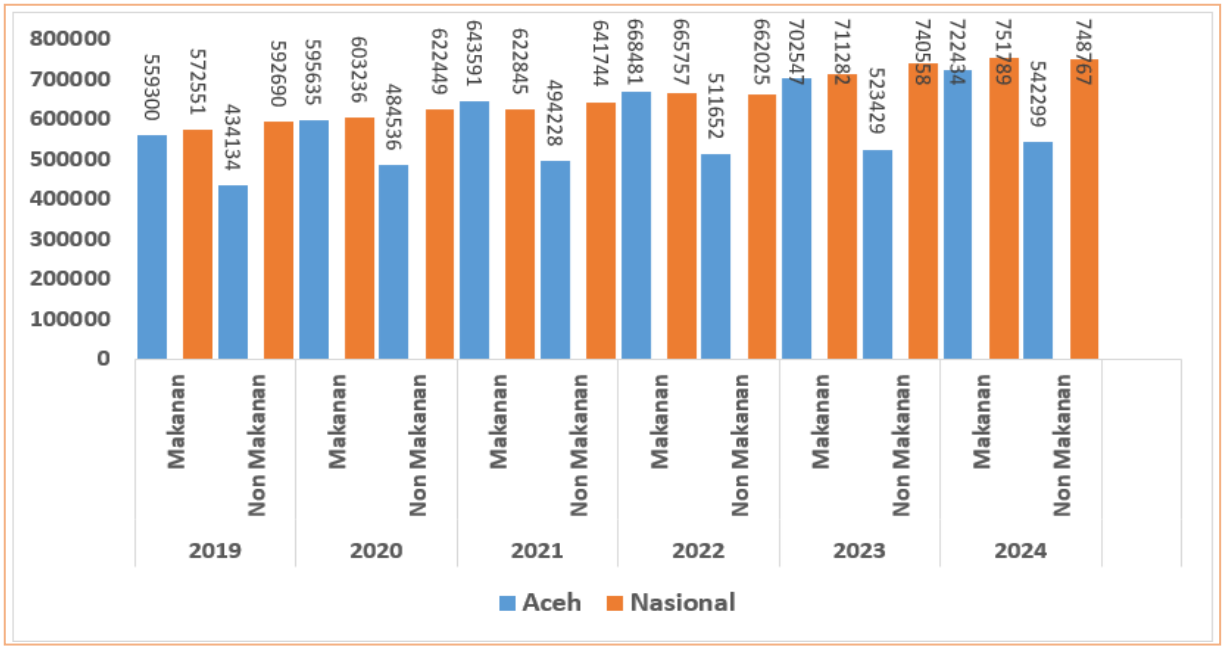

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh dan Nasional, 2025

Gambar 2. 107
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Makanan Dan Non Makanan) Tahun 2019-2024

Pada gambar 2.01 rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan menurut kelompok barang kabupaten/kota, 2019-2024 secara umum berfluktuasi cenderung meningkat dan pengeluaran untuk makanan lebih dominan dari makanan. terus mengalami peningkatan baik untuk pengeluaran makanan maupun non makanan namun rata-rata pengeluaran per kapita Aceh relative berada di bawah rata-rata pengeluaran per kapita Nasional. Pada tahun 2024 pengeluaran konsumsi per kapita perbulan Aceh sebesar Rp.722.434, dan nasional adalah sebesar Rp.751.789 . Sedangkan pengeluaran konsumsi per kapita perbulan untuk non makanan Aceh sebesar Rp.542.299 dan nasional relatif lebih baik yaitu sebesar Rp. 748.767. Dari nilai pengeluaran tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita masyarakat Aceh dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terkahir mengalami peningkatan.

Pengeluaran rata-rata rumah tangga per kapita sebulan pada tahun 2019 yang berada di atas rata-rata Aceh terdapat di 11 (sebelas) kabupaten/kota, tertinggi di Kota Banda Aceh dan berada di atas rata-rata nasional. Sedangkan rata-rata pengeluaran Per kapita yang berada di bawah rata-rata Aceh terdapat di 12 (dua belas) kabupaten/kota dan terendah adalah Kabupaten Siumeulue. Pada tahun 2023 rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi di atas rata-rata Aceh dan Nasional yaitu, Kota Banda Aceh dan Sabang sedangkan yang terendah atau berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional yaitu, Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2. 133
Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita Sebulan menurut Kelompok Barang Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional (Rupiah), Tahun, 2019-2023

KAB/ KOTA/ PROVINSI/ NASIONAL	JENIS KONSUMSI									
	MAKANAN					NON MAKANAN				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
SIMEULUE	484431.95	477616.29	442321.79	568852.19	599919.00	348862.70	357000.95	319763.26	373413.34	449243.00
ACEH SINGKIL	505363.22	524441.60	547719.84	598466.75	717289.00	341165.49	392315.25	417512.91	407514.32	458525.00
ACEH SELATAN	516954.09	571914.39	587808.75	548871.52	535670.00	322048.82	449330.89	384002.94	349266.78	334005.00
ACEH TENGGARA	525849.58	532865.68	565035.34	573133.79	606372.00	311721.31	402438.00	393144.81	438080.00	384152.00
ACEH TIMUR	507356.71	598023.05	570085.02	702802.52	634612.00	275298.40	384624.08	384717.34	425617.16	411578.00
ACEH TENGAH	615661.06	720127.93	731026.26	672034.16	686759.00	522080.16	772672.17	561977.35	568435.01	591628.00
ACEH BARAT	635496.67	730223.66	857354.63	849744.31	847241.00	637461.89	640719.47	675787.94	663669.86	677220.00
ACEH BESAR	595554.95	594044.07	662848.97	604091.90	639948.00	475032.59	503387.27	488223.59	494034.61	560990.00
PIDIE	539946.36	609935.22	654984.20	663711.41	679888.00	318392.38	396693.43	394201.54	397783.05	398984.00
BIREUEN	527577.29	530591.40	687257.31	781514.55	739433.00	379760.95	399495.49	434936.69	527174.47	490321.00
ACEH UTARA	459596.85	473847.01	457953.12	540962.67	577079.00	288738.04	286145.03	280268.23	314296.64	353875.00
ACEH BARAT DAYA	495556.37	554298.96	538141.75	545217.99	635124.00	387137.98	395943.48	366887.81	337359.58	453224.00
GAYO LUES	733859.52	688398.87	830288.66	770559.00	747630.00	536629.69	513728.22	616835.09	542367.55	486345.00
ACEH TAMIANG	442298.43	442060.09	498199.43	559578.72	576131.00	316016.95	353666.92	377340.82	456174.58	447751.00
NAGAN RAYA	534409.54	629615.94	821329.84	901022.02	1357007.00	398667.27	525892.71	532243.65	581394.35	674295.00
ACEH JAYA	619049.40	633064.87	761452.35	738528.18	745983.00	426358.87	409930.82	541880.03	505067.14	540294.00
BENER MERIAH	680702.66	712018.07	649228.11	724104.01	863646.00	478294.07	497186.00	488598.96	532474.20	656660.00
PIDIE JAYA	611552.07	762984.36	700228.21	715606.76	670555.00	394235.01	450972.36	393306.91	414966.46	421075.00
BANDA ACEH	848046.42	839685.19	973987.60	903778.97	939848.00	1122766.21	1161846.30	1423313.17	1296524.52	1157905.00
SABANG	780405.09	802787.91	789613.75	855133.02	840007.00	674699.98	672673.08	625598.41	711078.62	807205.00
LANGSA	582716.27	621888.48	672508.68	662477.22	701105.00	706272.50	721191.97	737249.61	779193.36	690824.00
LHOKSEUMAWE	614100.85	612788.00	710184.00	591351.05	773859.00	570254.66	567103.91	669435.13	622837.43	727866.00
SUBULUSSALAM	490168.01	484105.43	505157.13	619912.03	657093.00	416262.75	433839.15	366292.78	487918.98	578505.00
ACEH	**559,299.00**	**595,634.00**	**643,591.00**	**668,481.00**	**702,547.00**	**434,133.00**	**484,536.00**	**494,228.00**	**511,652.00**	**523,429.00**
NASIONAL	**572,551.16**	**603,235.72**	**622,845.47**	**665,757.00**	**711,282.00**	**592,689.58**	**622,448.97**	**641,744.27**	**662,025.00**	**740,558.00**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh dan Nasional, 2024

2.1.3.6.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator makro strategis dalam menilai tingkat kesejahteraan relatif rumah tangga petani. Secara konseptual, NTP menggambarkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dari hasil penjualan produk pertanian terhadap indeks harga yang dibayar petani untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi. Dengan demikian, NTP

menjadi indikator penting untuk mengukur daya beli, kapasitas surplus usaha tani, serta tingkat ketahanan ekonomi rumah tangga pertanian.

Dalam kerangka pembangunan Aceh, peningkatan NTP dari tahun ke tahun mencerminkan membaiknya posisi tawar petani dalam sistem ekonomi, meningkatnya efisiensi usaha tani, serta adanya perbaikan ekosistem agribisnis yang mendukung peningkatan pendapatan sektor pertanian. Perkembangan NTP Aceh Tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2026

Gambar 2. 108
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), 2021–2025

Berdasarkan grafik perkembangan NTP Provinsi Aceh tahun 2021–2025, terlihat bahwa kinerja kesejahteraan petani menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan progresif, yang merupakan sinyal positif bagi pembangunan sektor pertanian Aceh. Dalam lima tahun terakhir NTP meningkat sekitar 22,26 poin, atau secara relatif tumbuh sekitar 22 persen dibanding posisi awal tahun 2021.

Secara ekonomi, kenaikan NTP secara konsisten mengindikasikan bahwa nilai penerimaan petani tumbuh lebih cepat dibanding pengeluarannya, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya usaha tani. Dengan kata lain, margin ekonomi petani cenderung membaik. Peningkatan NTP di atas angka 100 secara konsisten juga menunjukkan bahwa rumah tangga petani berada pada posisi surplus ekonomi relatif, sehingga memiliki kapasitas konsumsi dan tabungan yang lebih baik. Hal yang paling penting dari kenaikan NTP ini adalah fakta bahwa di tengah tekanan inflasi, gejolak harga pangan, dan ketidakpastian ekonomi global, peningkatan NTP menunjukkan bahwa sektor pertanian Aceh masih berfungsi sebagai stabilisator ekonomi rumah tangga perdesaan.

Kenaikan NTP kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya Harga Komoditas Pertanian (Sawit, Kopi, Kakao, Cabai, dan Padi) yang ikut mendongkrak indeks penerimaan petani. Kenaikan NTP juga disebabkan oleh adanya bantuan dari

Pemerintah, berupa; subsidi pupuk, bantuan benih, mekanisasi pertanian, rehabilitasi irigasi, program penguatan kelembagaan tani, dan stabilisasi harga pangan

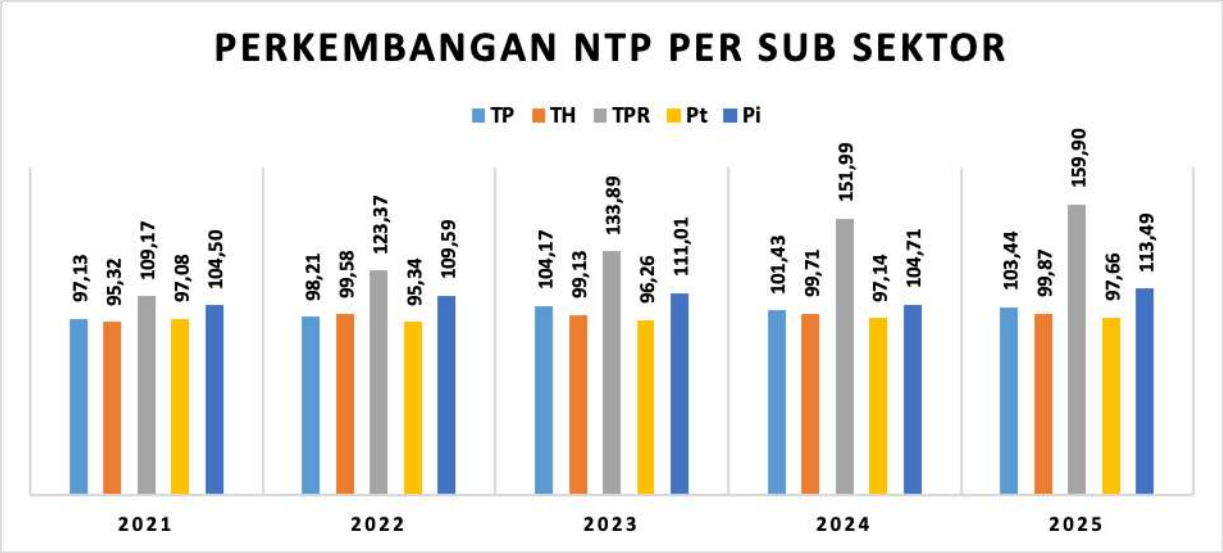

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

Gambar 2. 109
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Berdasarkan Sub Sektor,

Tahun 2021–2025

Berdasarkan grafik Perkembangan NTP per Sub Sektor (Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan PerikaanTahun 2021–2025, terlihat bahwa seluruh subsektor pertanian di Aceh menunjukkan tren yang relatif positif, dengan seluruh indeks berada di atas angka 95 dan mayoritas mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, subsektor pertanian Aceh masih memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik, meskipun dengan capaian dan laju pertumbuhan yang berbeda-beda antar subsektor.

Data di atas menunjukkan bahwa NTP pada sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) mencatat kinerja paling menonjol, dengan Kenaikan hampir 50 poin dalam lima tahun merupakan lonjakan yang sangat signifikan dibanding subsektor lainnya. NTPR tahun 2021 sebesar 109,17, kemudian meningkat menjadi 159,90 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa subsektor perkebunan rakyat menjadi *leading* subsektor dalam peningkatan kesejahteraan petani Aceh. Kenaikan NTPR kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor pendorong, diantaranya: kenaikan harga komoditas unggulan (sawit, kopi, kakao dan nilam) Nilam telah meningkatkan indeks harga yang diterima petani secara signifikan, karena komoditi-komoditi ini terhubung dengan pasar nasional dan ekspor sehingga memiliki daya ungkit ekonomi lebih besar.

NTP sub sektor Tanaman Pangan menunjukkan pergerakan yang cenderung stabil dengan kenaikan moderat, dari 97,13 pada tahun 2021 menjadi 103,44 pada tahun 2025. Kenaikan NTP ini mengindikasikan bahwa pertanian tanaman pangan masih berada pada zona surplus (di atas 100 pada beberapa tahun) karena adanya perbaikan efisiensi usaha tani dan dukungan kebijakan pangan cukup efektif. Namun demikian, sub sector ini belum memberikan kesejahteraan yang memadai bagi petani. Tantangan yang dihadapi sub sector ini adalah margin keuntungan tipis, harga jual sering berfluktuasi, biaya input tinggi, ketergantungan pada pupuk dan irigasi, serta memiliki sensitivitas tinggi terhadap iklim. Dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa Tanaman Pangan masih berfungsi sebagai penopang ketahanan pangan Aceh, tetapi belum menjadi subsektor dengan nilai ekonomi tertinggi bagi rumah tangga petani di Aceh.

NTP sub sector Hortikultura terlaihat stabil, namun nyaris stagnan di kisaran 99–100. Ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan hortikultura hampir seimbang dengan kenaikan biaya produksi. Secara ekonomi, subsektor hortikultura belum sepenuhnya meningkatkan surplus riil petani secara signifikan.

Subsektor Perikanan menunjukkan tren peningkatan NTP yang lebih stabil, dari 104,50 pada tahun 2021 menjadi 113,49 pada tahun 2025. Angka ini sempat terkoreksi pada tahun 2024 (104,71) padahal sebelumnya telah mencapai 111,01 pada tahun 2023. Meskipun adanya fluktuasi, secara umum sector ini mengalami peningkatan yang cukup baik dan menjadi indicator bahwa sektor perikanan Aceh memilikindaya tahan ekonomi yang baik, memberikan kontribusi pendapatan yang stabil bagi masyarakat nelayan, memberikan respons positif terhadap pasar domestik dan ekspor, serta meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap tekanan inflasi. Dengan posisi geografis Aceh yang strategis, berada pada WPP 571 dan 572, s ubsektor ini memiliki potensi menjadi growth engine baru ekonomi biru (blue economy) Aceh.

NTP subsektor Peternakan menjadi sub sector dengan indeks terendah sepanjang periode 2021 sampai dengan 2025 karena tetap berada di bawah 100. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya yang dibayar peternak masih relatif tinggi dibanding nilai yang diterima. Beberapa factor yang disinyalir menjadi penyebab utama, diantaranya: tingginya harga pakan, ketergantungan bahan baku luar daerah, skala usaha kecil, produktivitas ternak rendah, serta lemahnya industri hilir peternakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari kondisi ini adalah Peternakan masih merupakan subsektor paling rentan secara ekonomi.

Dari analisis NTP berdasarkan sub sector, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan petani Aceh tidak tumbuh merata antar subsektor, tetapi cenderung terkonsentrasi pada subsektor yang memiliki orientasi pasar lebih luas dan nilai tambah lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi ekonomi

pertanian Aceh yang sedang bergerak menuju pergeseran pusat kesejahteraan dari subsektor primer tradisional menuju subsektor bernilai tambah tinggi, terutama perkebunan rakyat dan perikanan. Oleh karena itu, kebijakan pertanian tidak lagi cukup menggunakan pendekatan seragam, tetapi harus diarahkan melalui strategi pembangunan subsektoral yang diferensiatif, berbasis daya saing, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani secara inklusif dan berkelanjutan.

2.1.3.6.3. Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mengakses pencapaian ekspor dan impor yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Keterbukaan ekonomi merupakan suatu faktor penting yang berkontribusi pada pertumbuhan suatu daerah. Keterbukaan ekonomi menggambarkan semakin hilangnya hambatan dalam melakukan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif dan semakin lancarnya mobilitas modal antar negara. Secara teori keterbukaan ekonomi memberi keuntungan bagi semua negara yang terlibat di dalamnya. Keuntungan dari keterbukaan ekonomi melalui perdagangan diantaranya berupa pembukaan akses pasar yang lebih luas, pencapaian tingkat efisiensi dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi, serta peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

Keterbukaan ekonomi dapat memberikan peluang pada setiap negara untuk mengekspor barang yang faktor produksinya menggunakan sumber daya berlimpah dan mengimpor barang yang faktor produksinya langka atau mahal jika diproduksi di dalam daerah dengan begitu ekspor impor dapat merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Faktor keterbukaan ekonomi ini juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena perkembangan perdagangan internasional dan antar daerah mampu mendorong berbagai macam sektor pembentuk pertumbuhan ekonomi. Adapun Nilai keterbukaan ekonomi Aceh seperti yang disajikan pada Gambar 2.107.

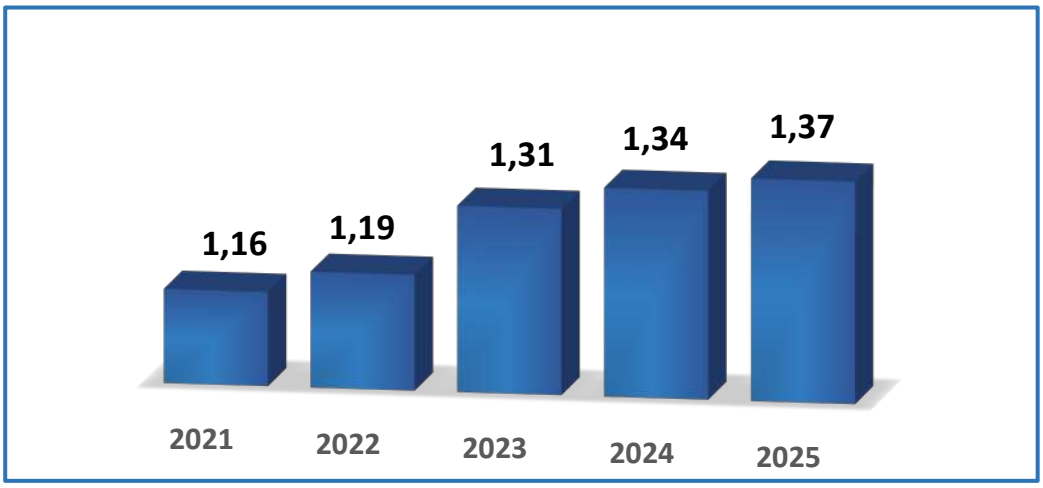

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2026 (diolah)

Gambar 2. 110
Indeks Keterbukaan Ekonomi Aceh Tahun 2021-2025

Nilai tersebut dapat dihitung dari total ekspor dan total impor Aceh terhadap nilai PDRB. Dari grafik diatas menunjukkan bahwa indeks keterbukaan ekonomi Aceh cukup tinggi pada tahun 2021 dengan nilai indeks 1,16 dan terus meningkat setiap tahun sehingga menjadi sebesar 1,37 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Aceh sangat dipengaruhi oleh sektor perdagangan, baik perdagangan internasional maupun perdagangan antar daerah. Tingginya Indeks Keterbukaan Ekonomi ini menunjukkan bahwa Aceh memiliki peluang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang yang dibentuk oleh berbagai sektor dengan yang didukung atau didorong oleh sektor perdagangan. Namun demikian Pemerintah Aceh juga perlu meningkatkan ketahanan dan kestabilan dalam daerah, mengingat tingginya derajat keterbukaan ekonomi juga menunjukkan tingginya pengaruh atau fluktuasi dari faktor-faktor eksternal.

2.1.3.6.4. Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK), Kredit/Pembiayaan, dan Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan adanya dinamika intermediasi keuangan yang cukup kuat selama periode triwulan I 2024 sampai triwulan III 2025.

Pada sisi DPK, terlihat adanya peningkatan bertahap sepanjang tahun 2024, dari Rp 41,39 triliun pada triwulan I menjadi Rp 45,67 triliun pada triwulan IV. Namun, pada triwulan I 2025 DPK menurun menjadi Rp 43,33 triliun, sebelum kembali meningkat pada triwulan II dan III 2025 hingga mencapai Rp 46,04 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana masyarakat secara umum masih tumbuh, meskipun sempat mengalami tekanan pada awal 2025.

Sementara itu, kredit/pembiayaan menunjukkan tren meningkat lebih konsisten. Nilainya naik dari sekitar Rp 39,06 triliun pada triwulan I 2024 menjadi Rp 43,98 triliun pada triwulan IV 2024. Pada tahun 2025, kredit/pembiayaan terus meningkat dari Rp 44,49 triliun pada triwulan I menjadi Rp 45,98 triliun pada triwulan III. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan berjalan cukup aktif, dengan penyaluran pembiayaan yang terus bertambah.

Dari sisi FDR, pada tahun 2024 nilainya masih berada pada kisaran sehat dan relatif stabil, yaitu dari 94,38 persen pada triwulan I menjadi 96,32 persen pada triwulan IV. Namun, pada triwulan I 2025 FDR meningkat tajam menjadi 102,67 persen. Kenaikan ini terjadi karena DPK menurun, sementara kredit/pembiayaan tetap meningkat. Artinya, penyaluran kredit/pembiayaan sudah melampaui dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, sehingga dapat menjadi sinyal adanya tekanan likuiditas.

Pada triwulan II dan III 2025, FDR mulai menurun menjadi 100,60 persen dan 99,83 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan likuiditas seiring meningkatnya kembali DPK. Namun, FDR yang masih mendekati 100 persen tetap menunjukkan bahwa ruang likuiditas perbankan relatif terbatas dan perlu dikelola secara hati-hati. Perkembangan ketiga indikator perbankan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.108 :

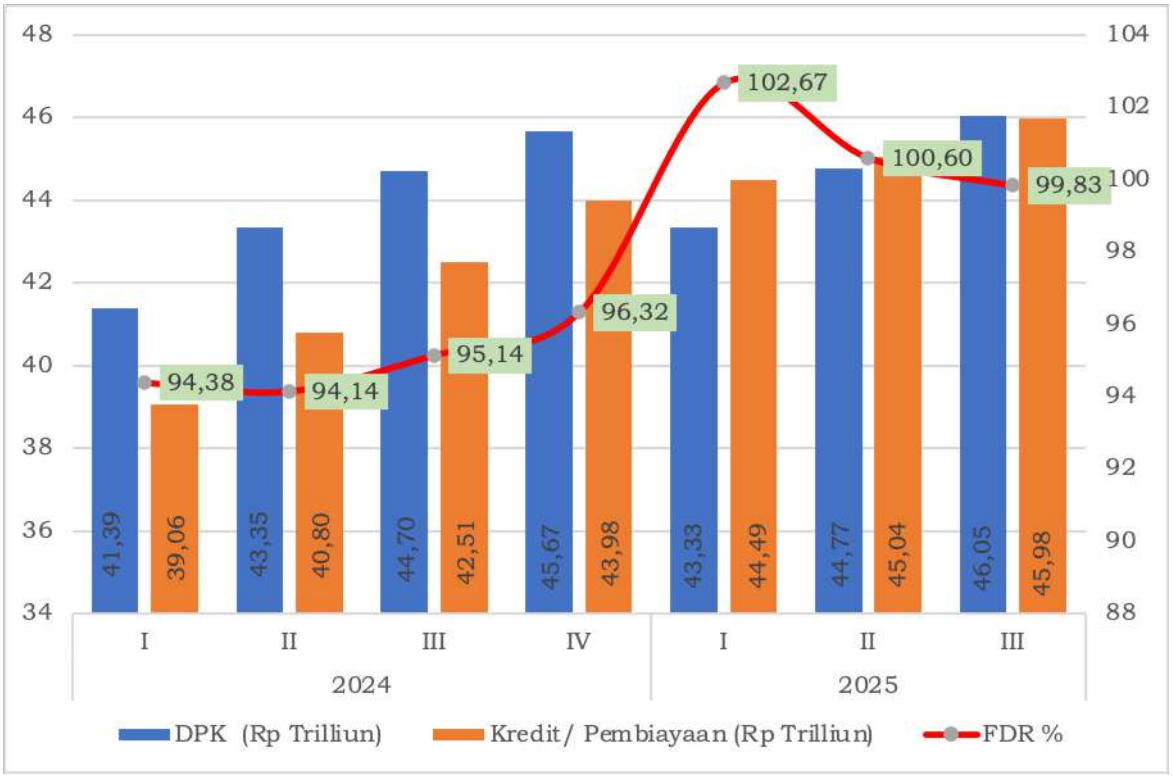

Sumber : Bank Indonesia Cabang Aceh. 2026

Gambar 2. 111
Perkembangan DPK, Pembiayaan dan FDR Tahun 2024-2025

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan digolongkan ke dalam tiga kategori penggunaan diantaranya sebagai modal kerja, investasi dan konsumsi. Berdasarkan Gambar 2.107, total pembiayaan meningkat dari triwulan I 2024 sampai triwulan III 2025. Peningkatan ini terutama didorong oleh pembiayaan konsumsi dan investasi, sementara pembiayaan modal kerja cenderung berfluktuasi dan mulai menurun sejak akhir 2024. Pembiayaan konsumsi menjadi komponen terbesar sepanjang periode tersebut. Nilainya meningkat secara konsisten dari Rp 26,67 triliun pada triwulan I 2024 menjadi Rp 31,16 triliun pada triwulan III 2025. Kenaikan sebesar Rp 4,49 triliun ini menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan rumah tangga masih kuat. Dominasi pembiayaan konsumsi mengindikasikan bahwa aktivitas pembiayaan masih banyak diarahkan untuk kebutuhan konsumtif masyarakat, seperti pembiayaan rumah tangga, kendaraan, perumahan, atau kebutuhan personal lainnya.

Sementara itu, pembiayaan investasi juga menunjukkan perkembangan yang positif. Nilainya naik dari Rp 5,88 triliun pada triwulan I 2024 menjadi Rp 7,97 triliun pada triwulan III 2025. Kenaikan ini relatif besar, yaitu sekitar Rp 2,09 triliun. Hal ini menjadi sinyal positif karena pembiayaan investasi biasanya berkaitan dengan perluasan usaha, pembelian aset produktif, pembangunan fasilitas, atau peningkatan kapasitas produksi. Dengan demikian, peningkatan pembiayaan investasi dapat mencerminkan mulai tumbuhnya kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi daerah. Komponen berdasarkan tujuan penggunaannya dapat dilihat pada Gambar 2.109 berikut:

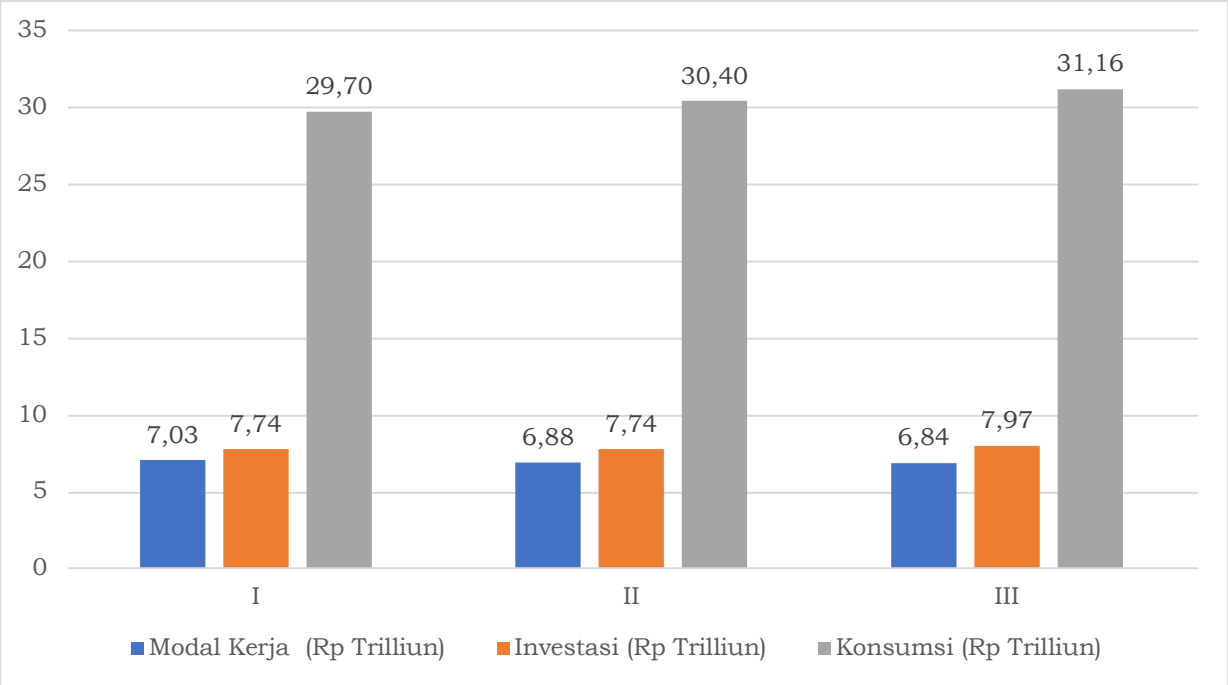

Sumber : Bank Indonesia Cabang Aceh. 2024

Gambar 2. 112
Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

2.1.3.6.5. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum. jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun. ketaatan terhadap RTRW. luas wilayah produktif. luas wilayah industri. luas wilayah kebanjiran. luas wilayah kekeringan. luas wilayah perkotaan. jenis dan jumlah bank dan cabang. jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang. jenis. kelas. dan jumlah restoran. jenis. kelas. dan jumlah penginapan/hotel. persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih. rasio ketersediaan daya listrik. persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

2.1.3.6.6. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh

Kondisi prasarana jaringan jalan mempengaruhi mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka wilayah tersebut mudah dijangkau dari arah manapun. Indeks aksesibilitas dan mobilitas kabupaten/kota di Aceh disajikan secara lengkap pada Tabel 2.134.

Tabel 2. 134
Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Luas (Km^2)	Jumlah Penduduk	Panjang Jalan (Km)	Indeks Aksesibilitas (Km/Km^2)	Indeks Mobilitas (Km/1.000 jiwa)
Simelue	1.821,75	98.633	795,37	0,44	8,06
Aceh Singkil	1.852,82	135.684	556,76	0,30	4,10
Aceh Selatan	4.175,37	241.994	1.232,35	0,30	5,09
Aceh Tenggara	4.179,12	234.430	1.253,58	0,30	5,35
Aceh Timur	5.432,63	443.638	1.766,57	0,33	3,98
Aceh Tengah	4.521,70	226.744	1.159,75	0,26	5,11
Aceh Barat	2.818,17	206.822	867,41	0,31	4,19
Aceh Besar	2.882,83	428.254	1.644,63	0,57	3,84
Pidie	3.133,93	452.547	1.288,84	0,41	2,85
Bireuen	1.793,27	459.073	1.352,21	0,75	2,95
Aceh Utara	2.711,15	631.984	2.223,13	0,82	3,52
Aceh Barat Daya	1.882,28	159.187	844,36	0,45	5,30
Gayo Lues	5.541,28	106.791	1.109,87	0,20	10,39
Aceh Tamiang	2.184,40	309.039	1.082,24	0,50	3,50
Nagan Raya	3.416,32	176.429	1.147,02	0,34	6,50
Aceh Jaya	3.893,05	99.200	710,73	0,18	7,16
Bener Meriah	1.930,75	172.036	1.479,10	0,77	8,60
Pidie Jaya	953,12	166.467	580,56	0,61	3,49
Banda Aceh	55,85	265.019	676,06	12,10	2,55
Sabang	122,04	43.470	209,97	1,72	4,83
Langsa	217,17	197.909	657,87	3,03	3,32
Lhokseumawe	136,49	200.403	447,25	3,28	2,23
Subulussalam	1.183,60	99.062	604,72	0,51	6,10

Sumber: BPS 2025, diolah (termutakhir)

Tabel 2.134. memberikan informasi bahwa indeks aksesibilitas tertinggi ditemukan di Kota Banda Aceh (12,10 km/km^2), sedangkan indeks aksesibilitas terendah di Kabupaten Aceh Jaya dan Gayo Lues (0,20 km/Km^2). Dengan demikian, pembangunan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas pada kabupaten/kota yang memiliki indeks aksesibilitas rendah sangat diperlukan. Selanjutnya, Kabupaten Gayo Lues memiliki indeks mobilitas tertinggi (10,39 km per 1.000 penduduk), sedangkan Kota Lhokseumawe memiliki nilai indeks mobilitas terendah (2,23 km per 1.000 penduduk). Kota-kota di Aceh (kecuali Subulussalam mencapai 6.1) pada umumnya memiliki indeks mobilitas yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya.

2.1.3.6.7. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Selanjutnya Air minum merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang pemenuhannya bukan sekadar akan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, tetapi pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan akses air minum merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dalam rangka penyediaan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal (PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal).

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti permukaan sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).

Pada Tabel 2.134 memperlihatkan bahwa pada tahun 2025, air dalam kemasan (air kemasan bermerek dan air isi ulang) memiliki persentase tertinggi sebagai sumber air utama untuk minum yaitu sebesar 51,64 persen. Selain air isi ulang, sumber utama air untuk minum dengan persentase tertinggi selanjutnya adalah sumur terlindung 18,97 persen dan sumur bor/pompa 9,60 persen. Adapun untuk leding baru mencapai 9,78 persen rumah tangga yang menggunakannya sebagai sumber air utama untuk minum.

Tabel 2.135
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum di Provinsi Aceh, 2025

Kabupaten/Kota	Leding	Pompa	Air Dalam Kemasan	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung
Simeulue	0,59	0,47	78,55	6,29	2,28	8,89
Aceh Singkil	7,31	19,12	27,98	28,74	6,54	0,71
Aceh Selatan	10,96	16,75	46,46	18,39	0,35	4,44
Aceh Tenggara	57,93	15,75	16,72	4,56	0,00	5,03
Aceh Timur	15,65	13,88	36,60	23,25	3,10	1,72
Aceh Tengah	12,13	13,55	17,34	7,71	0,40	45,67
Aceh Barat	1,72	23,26	50,35	23,42	0,03	0,15
Aceh Besar	1,74	4,00	80,36	12,54	0,32	1,04
Pidie	1,47	6,84	56,85	28,19	0,94	2,98
Bireuen	13,48	2,67	45,95	34,56	1,46	0,00
Aceh Utara	13,92	9,59	41,95	31,98	1,38	0,18
Aceh Barat Daya	3,13	33,06	35,30	15,91	3,60	7,34
Gayo Lues	12,81	4,41	45,01	6,75	2,31	23,91
Aceh Tamiang	5,58	11,96	70,17	7,33	3,23	0,00
Nagan raya	0,03	8,45	45,77	23,11	0,78	21,87
Aceh Jaya	13,02	7,04	36,97	22,77	0,02	18,03
Bener Meriah	10,98	6,70	14,64	7,67	2,57	50,06
Pidie Jaya	12,89	1,67	44,69	34,90	5,20	0,27
Banda Aceh	4,09	0,00	95,03	0,88	0,00	0,00
Sabang	4,04	0,30	90,35	4,71	0,00	0,60
Langsa	0,86	10,03	86,58	2,31	0,00	0,23
Lhokseumawe	0,66	1,93	92,62	4,78	0,01	0,00
Subulussalam	0,85	24,82	19,57	34,00	13,42	0,64
Aceh	**9,78**	**9,60**	**51,64**	**18,97**	**1,61**	**6,29**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026

Tabel 2. 136
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Aceh, 2023 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
Simeulue	0,92	0,24	1,76	1,76	100,00
Aceh Singkil	0,90	4,37	2,65	2,65	100,00
Aceh Selatan	0,20	2,44	0,00	0,00	100,00
Aceh Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aceh Timur	0,00	5,74	0,07	0,07	100,00
Aceh Tengah	0,25	0,70	2,24	0,01	100,00
Aceh Barat	0,00	0,97	0,00	0,08	100,00
Aceh Besar	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00
Pidie	2,22	0,50	0,00	0,00	100,00
Bireuen	1,33	0,90	0,00	0,00	100,00
Aceh Utara	0,00	1,89	0,00	0,00	100,00
Aceh Barat Daya	0,20	0,81	0,00	0,00	100,00
Gayo Lues	0,10	1,05	0,00	0,51	100,00
Aceh Tamiang	4,78	0,02	0,00	0,00	100,00
Nagan raya	0,20	1,53	0,00	0,01	100,00
Aceh Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bener Meriah	1,97	0,04	0,13	0,00	100,00

Kabupaten/Kota	Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
Pidie Jaya	4,29	0,00	3,09	0,00	100,00
Banda Aceh	0,29	0,09	0,00	0,00	100,00
Sabang	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Langsa	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Lhokseumawe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Subulussalam	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aceh	0,98	5,28	0,33	0,12	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap air minum yang layak jika menggunakan sumber air minum yang terlindung, seperti leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Termasuk juga memiliki akses air minum layak jika rumah tangga menggunakan air minum berupa air kemasan bermerk atau air isi ulang, namun dengan sumber air utama untuk mandi/cuci/dll. berupa leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak mengalami peningkatan sebesar 3,27 dari 88,79 persen pada tahun 2021 menjadi 92,06 persen pada tahun 2025. Gambar 2.110 menjelaskan bahwa, capaian persentase tumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak Aceh sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 92,06 persen, sedangkan capaian nasional adalah 93,22 persen.

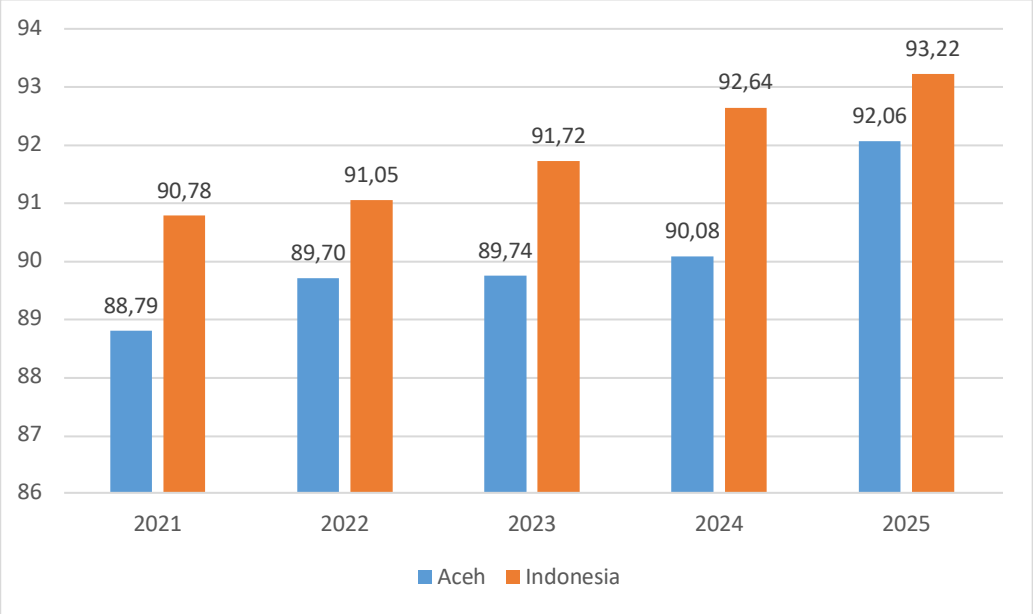

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026

Gambar 2. 113

Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak 2021-2025

Persentase rumah tangga terhadap akses air minum layak menurut Kabupaten/Kota sejak tahun 2021 sampai dengan 2025, Kota Banda Aceh masih

mendominasi tingkat rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak tertinggi sebesar 99,79 persen dan yang terendah adalah Kota Subulussalam sebesar 67,09 persen. Secara rinci persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2021–2025 disajikan pada Tabel 2.137.

Tabel 2. 137
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2021–2025

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Simeulue	87,45	83,69	83,10	82,79	85,13
Aceh Singkil	78,58	84,37	83,99	79,60	81,35
Aceh Selatan	79,65	77,45	82,44	85,87	90,47
Aceh Tenggara	86,71	93,80	88,04	91,40	96,24
Aceh Timur	83,16	82,85	82,46	84,43	86,62
Aceh Tengah	90,10	97,10	91,02	88,27	94,00
Aceh Barat	94,22	95,49	97,09	96,52	97,28
Aceh Besar	82,36	90,38	92,63	90,68	93,98
Pidie	89,24	89,22	87,60	87,57	90,77
Bireuen	93,53	94,79	92,62	90,06	91,39
Aceh Utara	91,09	91,25	92,47	94,56	96,31
Aceh Barat Daya	95,34	89,11	92,69	95,12	93,60
Gayo Lues	84,68	86,19	79,64	80,93	85,23
Aceh Tamiang	83,12	83,82	87,50	89,02	87,41
Nagan raya	90,13	90,49	93,28	90,75	92,35
Aceh Jaya	86,36	83,10	87,87	87,15	92,40
Bener Meriah	89,71	88,48	85,16	84,98	88,37
Pidie Jaya	93,46	90,38	90,26	94,54	90,06
Banda Aceh	99,37	95,66	98,63	99,05	99,79
Sabang	96,18	92,55	92,67	89,92	94,89
Langsa	97,14	98,46	99,11	98,06	97,15
Lhokseumawe	94,44	98,69	98,31	97,41	96,92
Subulussalam	60,87	56,02	55,58	57,25	67,09
Aceh	**88,79**	**89,7**	**89,74**	**90,08**	**92,06**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan, apabila memenuhi kriteria, yaitu menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan, lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises), tersedia setiap saat dibutuhkan, dan memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Fokus capaian air siap minum adalah pada penduduk di daerah perkotaan. Capaian persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Aceh pada tahun 2025 adalah sebesar 23,92 persen sedangkan capaian nasional 38,73 persen seperti tersaji pada Gambar 2.11 Persentase indikator ini pencapaiannya cenderung makin rendah setiap tahunnya.

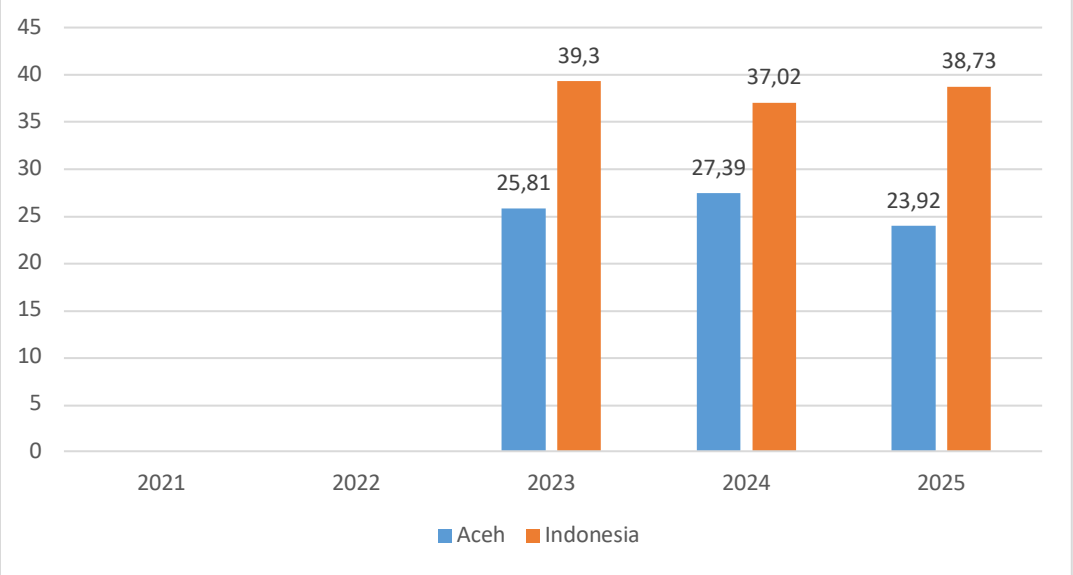

Sumber: Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Volume 11, 2025 Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 114
Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Tahun 2023-2025

Permasalahan dalam penyediaan air bersih untuk air minum adalah belum optimalnya pengelolaan sistem penyediaan air minum sehingga belum memenuhi standar, belum meratanya jaringan air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah, kawasan kumuh dan kawasan khusus. Permasalahan lainnya yaitu tingginya tingkat kebocoran/kehilangan air fisik yang mencapai lebih dari 60 persen dari jumlah produksi dan rendahnya sumber daya manusia, menurunnya kualitas dan kuantitas air baku serta ketersediaan sumber air baku yang tidak merata.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan beberapa upaya berupa fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum kepada PDAM, pembangunan sarana prasarana air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah seperti pada kawasan rumah sehat sederhana/rusunawa, dan kawasan kumuh/nelayan serta pembangunan sistem penyediaan air minum regional pada daerah yang ketersediaan sumber air baku yang tidak merata.

2.1.3.6.8. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik di Aceh periode 2021-2025 meningkat sebesar 0.07. Peningkatan ini dikarenakan sudah beroperasinya beberapa pembangkit listrik baru. Rasio kelistrikan Aceh tahun 2021-2025 disajikan pada Tabel 2.138

Tabel 2. 138
Rasio Kelistrikan Aceh Tahun 2021-2025

Jenis Penerangan	2021	2022	2023	2024	2025
Daya Listrik Terpasang (MW)	712	712	822	1.046	1.046
Konsumsi Listrik perkapita (Kwh)	573	573	641	650	710
Rasio ketersediaan listrik	1,24	1,24	1,30	1,32	1,43

Sumber: Dinas ESDM Aceh. 2026

2.1.3.6.9. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Jumlah Rumah Tangga yang meggunakan listrik di Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 jumlah persentase rumah tangga berlistrik di Aceh mengalami fluktuasi. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Aceh hingga tahun 2023 sebanyak 1.483.479 Rumah Tangga sedangkan pada tahun 2025 sebesar 1.410.608. Persentase jumlah rumah tangga berlistrik di Aceh dapat di lihat pada gambar 2.112 berikut ini.

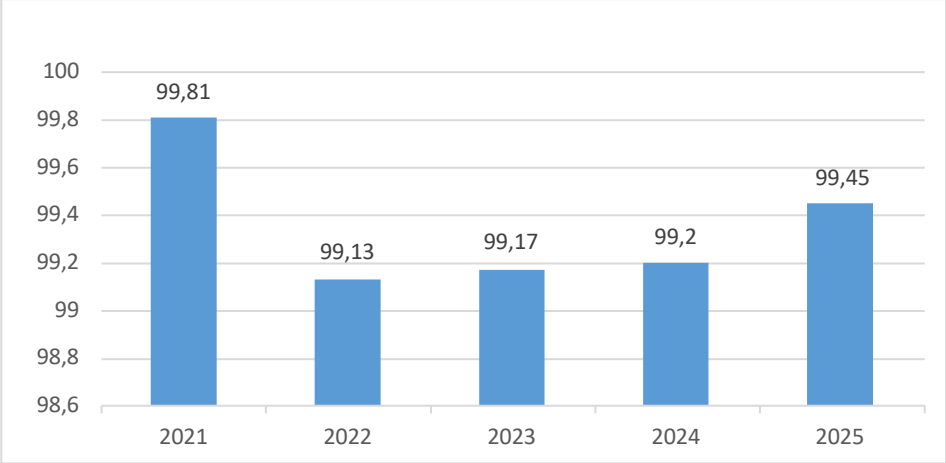

Sumber : Statistik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2026

Gambar 2. 115
Rasio Elektrifikasi Aceh Tahun 2021-2025

Perkembangan Permasalahan kelistrikan di Aceh diantaranya adalah belum tercapainya akses listrik untuk seluruh masyarakat yang tercermin dari belum tercapainya rasio elektrifikasi 100 persen hingga saat ini. Upaya pemerintah Aceh untuk mengatasi permasalahan kelistrikan adalah antara lain: 1) pemanfaatan potensi energi terbarukan untuk desa-desa yang tidak terjangkau jaringan listrik dan 2) meningkatkan rasio elektrifikasi hingga mencapai hasil 100 persen melalui penyambungan listrik gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPA

Pencapaian realisasi keuangan dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan beserta target yang sudah ditetapkan dalam tahun berjalan dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Realisasi Pendanaan Tahun 2025

Realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 10,70 Triliun atau sebesar 100,51 persen dari target RKPA-P Tahun 2025 sebesar Rp. 10,65 Triliun. Realisasi pendapatan ini menurun jika dibandingkan dengan capaian Realisasi pendapatan daerah Tahun 2024 (*audited*) sebesar Rp. 11,40 Triliun.

Di sisi belanja daerah, realisasi belanja Aceh Tahun 2025 mencapai Rp. 10,61 Triliun atau 95,46 persen dari target RKPA-P Tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp. 11,12 Triliun dan nilai capaian realisasi ini lebih rendah dari realisasi belanja Aceh Tahun 2024 (*audited*) mencapai Rp. 11,29 Triliun. Kondisi capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 tersebut menyebabkan terjadinya surplus terhadap anggaran sebesar Rp 0,09 Triliun. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kondisi tersebut, dapat dilihat Tabel 2.139.

Tabel 2. 139

Realisasi Pendanaan RKPA Tahun 2025

No	Uraian	Perubahan RKPA 2025 (Rp)	Semester I		Semester II		Realisasi APBA 2025	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Pendapatan	10.645.119.825.347	4.039.290.907.366	37,95	6.660.155.431.470	62,57	10.699.446.338.835	100,51
2	Belanja (termasuk transfer ke Kab/Kota)	11.117.381.980.981	3.590.902.697.653	32,30	7.021.377.187.132	63,16	10.612.279.884.784	95,46
3	Surplus/Defisit	(472.262.155.634)	448.388.209.713		(361.221.755.662)		87.166.454.051	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

2.2.1.1. Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Target penerimaan pendapatan Aceh dalam RKPA Tahun 2025 diproyeksikan menurun sebesar 4,64 persen dari RKPA Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp. 11.138.965.353.316. Tingkat realisasi pendapatan tahun 2025 terhadap target RKPA

tahun 2025 mencapai 100,51 persen. Jumlah realisasi pendapatan terbesar berasal dari Dana transfer pemerintah pusat.

Pada umumnya Pendapatan Aceh masih didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Dilihat dari target besarnya Pendapatan Aceh, besarnya persentase Pendapatan Asli Aceh (PAA) relatif semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Aceh, PAA tercatat sebesar 25,43 persen, hal ini menunjukkan bahwa daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah disamping pendapatan daerahnya masih didominasi oleh Dana Transfer Pemerintah Pusat. Untuk mengetahui perkembangan secara lebih terperinci mengenai target dan realisasi pendapatan daerah, dapat dilihat Tabel pada berikut.

Tabel 2. 140
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah pada RKPA Tahun 2025

No	Jenis Pendapatan	Perubahan RKPA 2025 (Rp)	Semester I		Semester II		Realisasi APBA 2025	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Pendapatan Asli Aceh**	**2.707.548.137.347**	**1.374.513.691.742**	**50,77**	**1.338.567.266.174**	**49,44**	**2.713.080.957.916**	**100,20**
I.1	Pajak Aceh	1.552.776.409.674	701.584.739.135	45,18	801.377.824.967	51,61	1.502.962.564.101	96,79
I.2	Retribusi Aceh	708.333.834.165	280.100.847.992	39,54	404.673.351.361	57,13	684.774.199.353	96,67
I.3	Hasil pengolahan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	267.905.085.228	270.253.493.775	100,88	-	-	270.253.493.775	100,88
I.4	Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah	178.532.808.280	122.574.610.841	68,66	132.516.089.846	74,23	255.090.700.687	142,88
2	**Pendapatan Transfer**	**7.935.475.288.000**	**2.663.364.165.484**	**33,56**	**5.299.823.141.084**	**66,79**	**7.963.187.306.568**	**100,35**
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	n.a	2.663.364.165.484		5.267.418.182.684		7.930.782.348.168	
2.1.1	Dana Bagi Hasil	n.a	89.675.726.500		241.816.423.500		331.492.150.000	
2.1.3	Dana Alokasi Umum	n.a	1.012.193.514.450		1.238.512.969.010		2.250.706.483.460	
2.1.4	Dana Alokasi Khusus	n.a	254.461.288.734		784.539.785.974		1.039.001.074.708	
2.1.5	Insentif Fiskal	n.a	-				-	
2.1.6	Dana Insentif Daerah	n.a	-				-	

No	Jenis Pendapatan	Perubahan RKPA 2025 (Rp)	Semester I		Semester II		Realisasi APBA 2025	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	*8*	*9*
	Dana Otonomi Khusus	n.a	1.307.033.635.800		3.002.549.004.200		4.309.582.640.000	
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	n.a	-		32.404.958.400		32.404.958.400	
2.2.1	Bantuan Keuangan	n.a	-		32.404.958.400		32.404.958.400	
3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**2.096.400.000**	**1.413.050.140**	**67,40**	**21.765.024.212**	**1.038,21**	**23.178.074.352**	**######**
3.1	Hibah	2.096.400.000	1.413.050.140	67,40	1.765.024.212	84,19	3.178.074.352	151,60
3.3	Dana Darurat	-			20.000.000.000		20.000.000.000	
JUMLAH PENDAPATAN		**10.645.119.825.347**	**4.039.290.907.366**	**37,95**	**6.660.155.431.470**	**62,57**	**10.699.446.338.835**	**100,51**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Untuk menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah terbagi dalam kriteria sebagai berikut:

- Rendah Sekali, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 0-25 persen. Sehingga pemerintah Pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri.
- Rendah, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 25 hingga 50 persen. Dengan kata lain, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Sedang, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 50-75 persen. Artinya, daerah dianggap sudah mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah.
- Tinggi, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai diatas 75 persen. Bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Secara persentase kemandirian keuangan daerah, target pada RKPA Tahun 2025 mencerminkan bahwa keuangan Aceh tergolong dalam kriteria rendah (kriteria

25-50 persen "rendah") atau sebesar 25,43 persen dari pagu Pendapatan Aceh. Jika dilihat dari capaian realisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 tercatat pendapatan asli Aceh sebesar 25,36 persen dari total realisasi Pendapatan Aceh yang berarti bahwa keuangan Aceh tergolong dalam kriteria rendah. Capaian ini lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Pendapatan Asli Aceh (PAA) cenderung berfluktuatif, pada tahun 2021 (*audited*) mencapai Rp. 2,506 Triliun (*audited*), selanjutnya pada tahun 2022, PAA tercatat meningkat mencapai Rp. 2,917 Triliun (*audited*). Peningkatannya berasal dari penerimaan pajak, retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan dan pendapatan lain-lain yang sah. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2023 dengan capaiannya sebesar Rp. 2,987 Triliun, berasal dari peningkatan penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan. Demikian pula pada tahun 2024 capaiannya tercatat meningkat menjadi Rp. 3,226 Triliun (audited), juga berasal dari peningkatan penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Namun di tahun 2025 PAA tercatat menurun menjadi Rp. 2,713 Triliun (*unaudited*). Penurunan terjadi karena penurunan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Konstribusi PAA terhadap pendapatan daerah selama kurun waktu 5 tahun cenderung mengalami peningkatan, kontribusi tertinggi Pendapatan Asli Aceh tahun 2024 berasal dari Pajak Aceh yaitu sebesar 58,82 persen dari jumlah Pendapatan Asli Aceh tahun 2024.

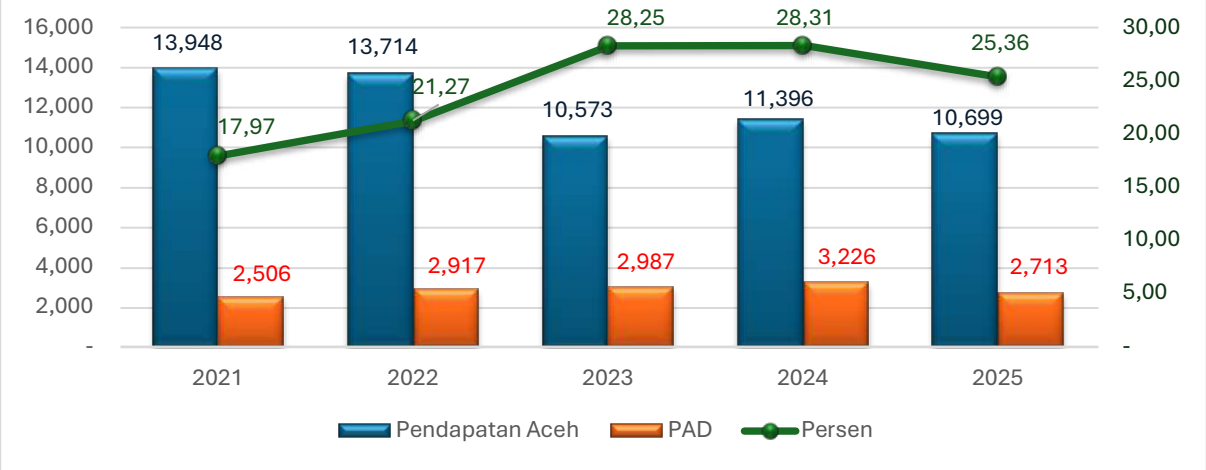

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Gambar 2. 116
Pendapatan Asli Aceh Tahun 2021-2025 (dalam triliyun rupiah)

Berdasarkan strukturnya, realisasi pendapatan Aceh tahun 2025 didominasi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya dengan peranannya sebesar 74,43 persen, diikuti oleh pendapatan asli Aceh dengan peranannya sebesar 25,36 persen, dan lain-lain pendapatan dengan peranannya sebesar 0,22 persen. Gambar 2.2 berikut memberikan gambaran struktur realisasi pendapatan Aceh tahun 2025.

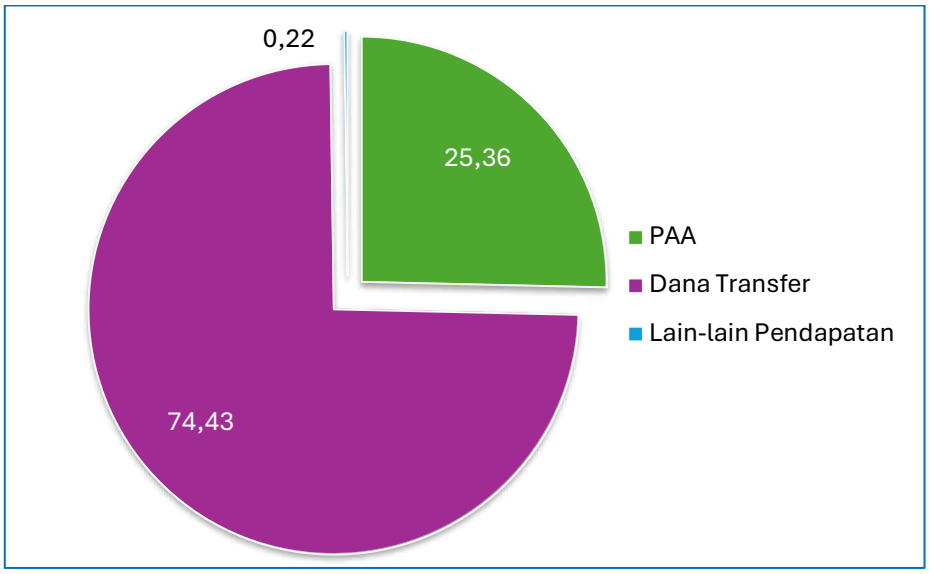

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Gambar 2. 117
Struktur Pendapatan Aceh Tahun 2025

2.2.1.2. Realisasi Belanja Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, pada tahun 2021 jenis belanja daerah terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Demikian pula berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah mengatur jenis belanja menjadi 4 jenis belanja.

Realisasi Belanja Aceh tahun 2025 (sampai dengan periode pelaporan) mencapai 95,46 persen dari proyeksi. Realisasi Belanja Tidak Langsung merupakan belanja dengan capaian realisasi tertinggi terhadap proyeksi RKPA tahun 2025, disebabkan oleh penanganan bencana hidrometeorologi Aceh.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan realisasi belanja dimaksud, dapat dilihat Tabel 2.41.

Tabel 2. 141
Target dan Realisasi Belanja RKPA Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Perubahan RKPA 2025	Semester I		Semester II		Realisasi APBA 2025	
		(Rp)	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	**BELANJA OPERASI**	**8.282.111.588.340**	**2.873.364.884.767**	**34,69**	**4.923.249.953.921**	**59,44**	**7.796.614.838.688**	**94,14**
1.1	Belanja Pegawai	3.596.589.775.543	1.486.278.635.072	41,32	1.895.279.054.130	52,70	3.381.557.689.202	94,02
1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.006.268.115	1.298.690.718.632	32,07	2.672.980.485.724	66,00	3.971.671.204.356	98,07
1.3	Belanja Subsidi	5.282.000.000	320.000.000	6,06	4.702.985.000	89,04	5.022.985.000	95,10
1.4	Belanja Hibah	377.468.934.609	68.048.831.174	18,03	263.291.114.629	69,75	331.339.945.804	87,78
1.5	Belanja Bantuan Sosial	252.764.610.074	20.026.699.889	7,92	86.996.314.437	34,42	107.023.014.326	42,34
2	**BELANJA MODAL**	**1.001.301.008.111**	**146.558.037.258**	**14,64**	**822.615.892.366**	**82,15**	**969.173.929.624**	**96,79**
2.1	Belanja Modal Tanah	n.a	39.819.764		4.561.875.665		4.601.695.429	
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	n.a	106.633.437.206		440.862.168.882		547.495.606.088	
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	n.a	11.453.952.822		224.000.428.775		235.454.381.597	
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	n.a	6.767.415.191		100.873.481.609		107.640.896.800	
2.5	Belanja Modal Aset	n.a	21.663.412.275		49.492.879.734		71.156.292.009	

No.	Jenis Belanja	Perubahan RKPA 2025	Semester I		Semester II		Realisasi APBA 2025	
		(Rp)	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Tetap Lainnya							
2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	n.a	-		2.825.057.700		2.825.057.700	
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.184.012.699**	**-**	**-**	**50.320.641.632**	**1.580,42**	**50.320.641.632**	**1.580,42**
3.1	Belanja Tidak Terduga	3.184.012.699	-	-	50.320.641.632	1.580,42	50.320.641.632	1.580,42
4	**BELANJA TRANSFER**	**1.830.785.371.831**	**570.979.775.628**	**31,19**	**1.225.190.699.213**	**66,92**	**1.796.170.474.841**	**98,11**
4.1	Belanja Bagi Hasil	724.811.997.239	278.577.408.528	38,43	387.083.082.855	53,40	665.660.491.383	91,84
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	1.105.973.374.592	292.402.367.100	26,44	838.107.616.358	75,78	1.130.509.983.458	102,22
JUMLAH BELANJA		**11.117.381.980.981**	**3.590.902.697.653**	**32,30**	**7.021.377.187.132**	**63,16**	**10.612.279.884.784**	**95,46**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Jumlah realisasi Belanja Aceh Tahun 2025 sebesar Rp. 10,612 Triliun atau mencapai 95,46 persen dari proyeksi RKPA-P 2025 yang ditetapkan sebesar Rp.11,117 Triliun. Jumlah realisasi belanja Belanja Operasi sebesar Rp. 7,797 Triliun atau sebesar 94,19 persen, Belanja Modal sebesar Rp. 0,969 Triliun atau sebesar 96,79 persen, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 0,050 Triliun atau sebesar 1.580,42 persen. Nilai realisasi belanja tak terduga disebabkan oleh penggunaan anggaran untuk penanganan bencana di Aceh. Sementara itu, Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp. 1,796 Triliun atau sebesar 98,11 persen terhadap proyeksi RKPA-P 2025. Dari gambaran realisasi tersebut dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran sampai dengan Semester II Tahun 2025 sudah optimal dilaksanakan, hal ini terlihat dari realisasi belanja Aceh sebesar 95,46 persen.

Berdasarkan realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2025, struktur realisasi belanja Aceh didominasi oleh belanja operasi (73,47 persen), diikuti oleh belanja transfer (16,93 persen), belanja modal (9,13 persen), dan belanja tidak terduga (0,47 persen).

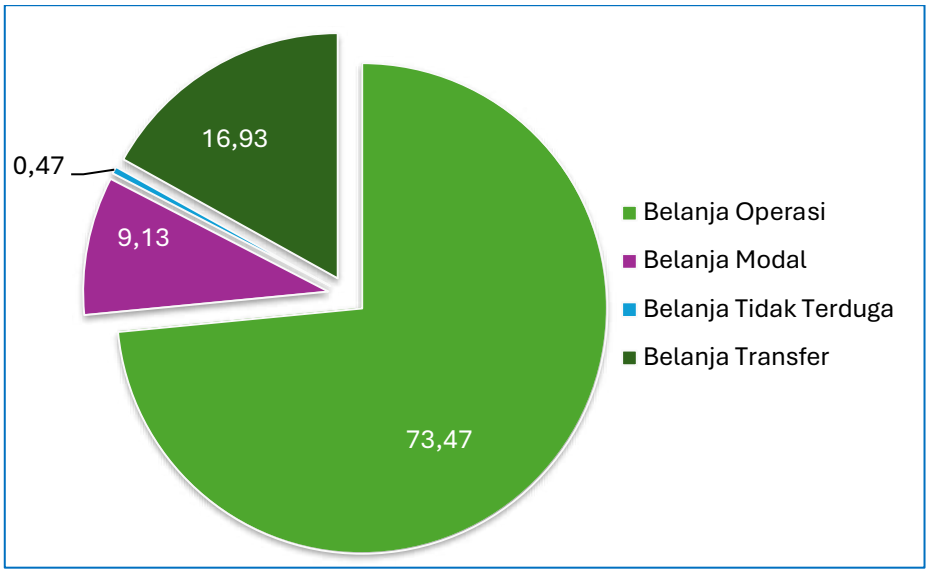

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan (diolah)

Gambar 2. 118

Struktur Belanja Aceh Tahun 2025

Berdasarkan data Percepatan dan Pengendalian Kegiatan APBA, bahwa pelaksanaaan barang dan jasa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, total paket strategis yang dilaksanakan sebanyak 1.776 paket berupa 706 paket konstruksi dan 1.070 paket non konstruksi dengan total nilai seluruh paket sebesar Rp. 1.625,0 Miliyar.

2.2.1.3. Realisasi Pembiayaan Tahun 2025

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, realisasi pembiayaan netto sebesar Rp. 471,106 Milyar berasal dari penggunaan SILPA Tahun lalu dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dari sisi penerimaan pembiayaan. Sedangkan realisasi dari pengeluaran pembiayaan berasal dari realisasi pembentukan dana cadangan. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai realisasi pembiayaan dimaksud, dapat dilihat dapat dilihat Tabel berikut.

Tabel 2. 142
Realisasi Pembiayaan RKPA Tahun 2025

No	Jenis Pembiayaan	Perubahan RKPA 2025 (Rp)	Semester I		Semester I		Realisasi APBA 2025	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	*2*	*3*					*4*	*5*
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**530.262.155.634**	**530.262.155.634**	**100,00**	**128.379.087**	**0,02**	**530.390.534.721**	**100,02**
3.1.1	Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	530.262.155.634	530.262.155.634	100,00	-	-	530.262.155.634	100,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-			128.379.087		128.379.087	-
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**58.000.000.000**	**28.840.306.288**	**49,72**	**30.444.243.130**	**52,49**	**59.284.549.419**	**102,21**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	58.000.000.000	28.840.306.288	49,72	30.444.243.130	52,49	59.284.549.419	102,21
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh	-					-	-
PEMBIAYAAN NETTO		**472.262.155.634**	**501.421.849.345**	**106,17**	**(30.315.864.043)**	**(6,42)**	**471.105.985.302**	**99,76**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

2.2.1.4. Tren APBA

Berdasarkan data realisasi APBA kurun waktu 2021-2025, maka diperoleh gambaran sebagai berikut:

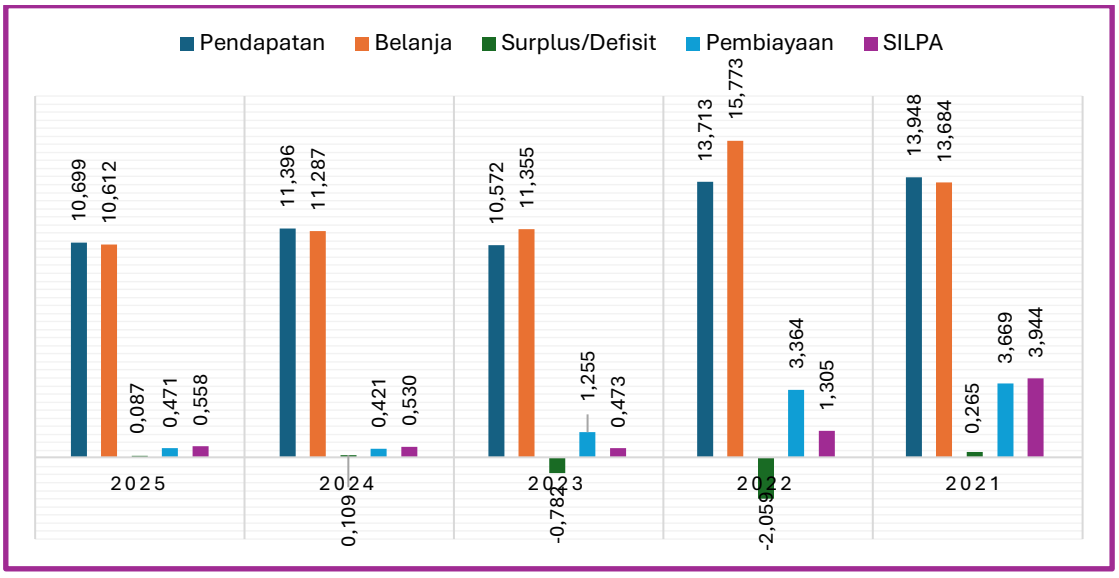

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (2021-2024 audited, 2025 angka sementara)

Gambar 2. 119
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2020-2024 (Dalam Triliun Rupiah)

Dari gambar tersebut di atas dapat diketahui bahwa setiap tahun sejak 2021 hingga 2025 realisasi pendapatan daerah berfluktuatif dan cenderung menurun. pendapatan daerah mengalami penurunan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 disebabkan oleh penurunan penerimaan dana transfer pemerintah pusat, khusunya dana otonomi khusus Aceh. Peningkatan pendapatan daerah terjadi pada tahun 2024 karena meningkatnya realisasi PAA dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan capaian pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 13,948 triliun sedangkan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2023 hanya sebesar Rp 10,573 triliun.

Trend belanja daerah juga mengalami fluktuatif, realisasi belanja terendah terjadi pada tahun 2025. Trend realisasi surplus menunjukkan fluktuatif, defisit terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Pembiayaan daerah netto menunjukkan trend yang semakin menurun, pembiayaan netto tertinggi terjadi pada tahun 2021. Trend SILPA selama periode tahun 2021-2025 juga menunjukkan penurunan. Pada tahun 2021 SILPA tercatat paling tinggi dibandingkan tahun yang lain, salah satunya disebabkan oleh tertundanya pekerjaan proyek-proyek pembangunan akibat pembatasan sosial bersekala besar, adanya *refocusing* anggaran dan lain-lain, di tahun-tahun berikutnya SILPA dapat ditekan lebih rendah karena pencapaian kinerja belanja daerah mencapai rata-rata 90 persen.

2.2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

2.2.2.1. Metode Evaluasi

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2025 perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Format evaluasi yang digunakan sesuai petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2. Jenis belanja yang dievaluasi terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan dalam Tahun Anggaran 2025. Penentuan predikat, ditetapkan berdasarkan kiteria yang telah diatur seperti yang terlihat pada Tabel 2.143.

Tabel 2. 143

Kriteria Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST
2	76 ≤ 90 %	Tinggi	T
3	66 ≤ 75 %	Sedang	S
4	51 ≤ 65 %	Rendah	R
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR

Sumber: Permendagri No. 86 tahun 2017

2.2.2.2. Hasil Evaluasi RKPA Tahun 2025

2.2.2.2.1. Capaian Anggaran

Target anggaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2028 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 adalah sebesar Rp. 45.987.525.189.545, sementara target alokasi anggaran di tahun 2025 melalui RKPA Tahun 2025 sebesar Rp. 11,238 Triliun dengan tingkat realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 terhadap target RPA 2023-2026 sebesar 72,43 persen dengan kriteria nilai sedang.

Besaran proyeksi pendanaan program dan kegiatan pada Perubahan RKPA Tahun 2023 lebih besar (100,93%) dari proyeksi RPA 2023-2026 dengan kebutuhan pendanaan program seluruh SKPA untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 11.382.161.125.182. Untuk tahun 2024 besaran kebutuhan pendanaan program yang ditargetkan pada perubahan RKPA Tahun 2024 sebesar Rp. 11.548.261.271.557 atau 100,82 Persen dari proyeksi RPA 2023-2026 yang tercatat sebesar Rp. 11.454.296.954.309. Sementara itu, pada tahun 2025 proyeksi pendanaan program dan kegiatan pada RKPA Tahun 2025 (Rp. 11,117 triliun) sebesar 96,49 persen dari proyeksi RPA 2023-2026 (Rp. 11,522 triliun).

Ditinjau lebih lanjut dari kinerja yang dicapai dari hasil pelaksanaan RKPA sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran program/kegiatan mencapai 93,61 persen dengan nilai kriteria Sangat Tinggi.

b. Rata-rata tingkat capaian realisasi kinerja program/kegiatan mencapai 91,74 persen dengan nilai kriteria Sangat Tinggi.

c. Urusan yang memiliki nilai realisasi tertinggi adalah Urusan Pemerintahan Pilihan dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 0,688 Triliun atau sebesar 109,11 persen dari Target Anggran RKPA Tahun 2025.

d. Urusan dengan nilai realisasi terendah adalah Unsur Kekhususan dan Keistimewaan Aceh yang hanya mencapai 63,08 persen atau sebesar Rp. 0, 26 Triliun terhadap Target Anggran RKPA Tahun 2025. SKPA yang beradal di bawah urusan ini yaitu Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, Baitul Mal, Keurukon Khatibul Wali dan Badan Reintegrasi Aceh.

2.2.2.2.2. Capaian Kinerja RKPA

Ditinjau secara terhadap capaian kinerja hasil pelaksanaan RKPA Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Rata-rata persentase capaian realisasi kinerja program/kegiatan mencapai 91.74 persen dengan nilai kriteria “Sangat Tinggi”.
b. Jika dilihat lebih terperinci berdasarkan masing-masing bidang urusan, maka bidang urusan yang memiliki persentase kinerja terendah adalah unsur kekhususan dan keistimewaan Aceh dengan capaiannya sebesar 75,16 persen yang termasuk dalam nilai kriteria “Sedang”.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai tingkat realisasi anggaran dan capaian realisasi kinerja pada RKPA Tahun 2025 berdasarkan masing-masing urusan/bidang urusan pemerintahan, dapat dilihat pada Tabel 2.144.

Tabel 2. 144
Tingkat Capaian Realisasi RKPA Tahun 2025
Menurut Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014)	Target Anggaran Perubahan RKPA Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2025	Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2025 (Triwulan IV Tahun 2025)		Predikat Capaian Kinerja RKPA 2025 (ST/T/S/R/SR)	
			(Rp)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**6.510.904.163.612**	**6.013.773.678.174**	**87,73**	**92,36**	**T**	**ST**
1	1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	3.167.247.462.383	3.060.966.153.503	87,52	96,64	T	ST
2	1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	2.176.282.713.518	2.029.994.823.234	100,00	93,28	ST	ST
3	1.03	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	496.147.283.818	387.457.468.432	96,88	78,09	ST	T
4	1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	500.118.563.090	369.252.435.916	100,00	73,83	ST	S
5	1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	84.280.356.147	79.538.140.934	45,24	94,37	SR	ST
6	1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	86.827.784.656	86.564.656.155	96,71	99,70	ST	ST
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**818.882.305.116**	**855.280.036.762**	**76,43**	**104,44**	**T**	**ST**
7	2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	34.804.291.098	33.875.307.887	64,42	97,33	R	ST
8	2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	16.381.862.135	15.199.979.688	100,00	92,79	ST	ST
9	2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	25.394.829.035	26.006.713.693	100,00	102,41	ST	ST
10	2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	15.768.561.910	15.051.273.722	100,00	95,45	ST	ST
11	2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	141.200.152.420	136.231.376.843	100,00	96,48	ST	ST
12	2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12.008.048.283	11.751.535.614	83,99	97,86	T	ST
13	2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.266.777.695	20.960.686.176	21,41	98,56	SR	ST
14	2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	200.000.000	191.044.812	71,70	95,52	S	ST
15	2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	140.910.322.105	152.956.242.727	-	108,55	SR	ST
16	2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	35.270.690.288	34.715.149.118	-	98,42	SR	ST
17	2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	49.441.347.056	59.333.378.089	100,00	120,01	ST	ST
18	2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	24.909.784.815	24.409.063.915	100,00	97,99	ST	ST
19	2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	179.174.595.321	196.729.692.440	100,00	109,80	ST	ST
20	2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	345.825.020	2.587.591.461	100,00	748,24	ST	ST
21	2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	364.650.260	361.761.179	100,00	99,21	ST	ST
22	2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	77.020.164.834	80.168.878.623	100,00	104,09	ST	ST
23	2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	42.898.626.235	43.244.193.059	88,16	100,81	T	ST

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan (UU No. 23 Tahun 2014)	Target Anggaran Perubahan RKPA Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2025	Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPA 2025 (Triwulan IV Tahun 2025)		Predikat Capaian Kinerja RKPA 2025 (ST/T/S/R/SR)	
			(Rp)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
24	2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1.521.776.606	1.506.167.716	46,13	98,97	SR	ST
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		**630.951.140.929**	**688.399.675.776**	**96,28**	**109,11**	**SR**	**ST**
25	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	63.474.746.757	91.945.086.817	100,00	144,85	ST	ST
26	3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	16.151.375.943	20.045.993.303	100,00	124,11	ST	ST
27	3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	322.041.264.409	331.129.399.363	100,00	102,82	ST	ST
28	3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	59.943.482.913	69.993.363.027	100,00	116,77	ST	ST
29	3.29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	126.212.913.407	132.167.980.493	100,00	104,72	ST	ST
30	3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	34.658.064.048	35.591.154.548	70,24	102,69	S	ST
31	3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	4.873.881.592	4.213.066.444	100,00	86,44	ST	T
32	3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	3.595.411.860	3.313.631.782	100,00	92,16	ST	ST
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		**508.691.606.879**	**493.806.092.321**	**100,00**	**97,07**	**ST**	**ST**
33	4.01	Sekretariat Daerah	269.447.343.393	264.295.716.355	100,00	98,09	ST	ST
34	4.02	Sekretariat DPRD	239.244.263.486	229.510.375.966	100,00	95,93	ST	ST
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		**2.244.006.318.650**	**2.198.293.836.929**	**100,00**	**97,96**	**ST**	**ST**
35	5.01	Perencanaan	54.178.185.581	48.953.815.422	100,00	90,36	ST	ST
36	5.02	Keuangan	2.046.071.966.080	2.012.445.079.162	-	98,36	SR	ST
37	5.03	Kepegawaian	23.106.169.387	23.448.883.161	100,00	101,48	ST	ST
38	5.04	Pendidikan dan Pelatihan	78.653.061.226	72.348.751.997	100,00	91,98	ST	ST
39	5.05	Penelitian dan Pengembangan *)	1.981.285.945	1.567.541.550	100,00	79,12	ST	T
40	5.06	Penghubung	40.015.650.431	39.529.765.636	100,00	98,79	ST	ST
VI	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**		**56.927.312.350**	**50.486.807.707**	**100,00**	**88,69**	**ST**	**T**
41	6.01	Inspektorat Daerah	56.927.312.350	50.486.807.707	100,00	88,69	ST	T
VII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		**51.593.918.456**	**49.607.833.521**	**98,34**	**96,15**	**ST**	**ST**
42	8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	51.593.918.456	49.607.833.521	98,34	96,15	ST	ST
VIII	**UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN**		**416.373.455.163**	**262.631.923.595**	**75,16**	**63,08**	**T**	**R**
43	9.01	Kekhususan Aceh						
		Kebudayaan	37.816.885.849	36.274.268.498	60,11	95,92	R	ST
		Keagamaan	347.017.470.602	199.290.584.133	89,01	57,43	T	R
		Kesatuan dan Perdamaian	31.539.098.712	27.067.070.964	76,37	85,82	T	T
Jumlah			**11.238.330.221.155**	**10.612.279.884.784**				
Rata-Rata					**91,74**	**93,61**		
Predikat Kinerja							ST	ST

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)
T = Tinggi (76% ≤ 90%)
S = Sedang (66% ≤ 75%)
R = Rendah (51% ≤ 65%)
SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

Berdasarkan strukturnya, realisasi anggaran program/kegiatan tahun 2025 yang terbesar adalah pendanaan untuk bidang urusan wajib pelayanan dasar yaitu sebesar Rp. 6,014 Triliun atau sebesar 56,67 persen dari total realisasi anggaran program/kegiatan tahun 2025, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Urutan kedua adalah urusan penunjang urusan pemerintah yaitu sebesar Rp. 2,198 Triliun atau sebesar 20,71 persen yang meliputi bidang Perencanaan, bidang Keuangan, bidang Kepegawaian, bidang Pendidikan dan Pelatihan, bidang Penelitian dan Pengembangan dan bidang Penghubung. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan tingkat capaian terbesar ketiga dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 0,855 Triliun atau sebesar 8,06 persen, meliputi meliputi bidang tenaga kerja, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pangan, bidang pertanahan, bidang lingkungan hidup, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang penanaman modal, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang statistik, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, dan bidang kearsipan. Untuk lebih jelas dapat digambarkan pada gambar 2.117.

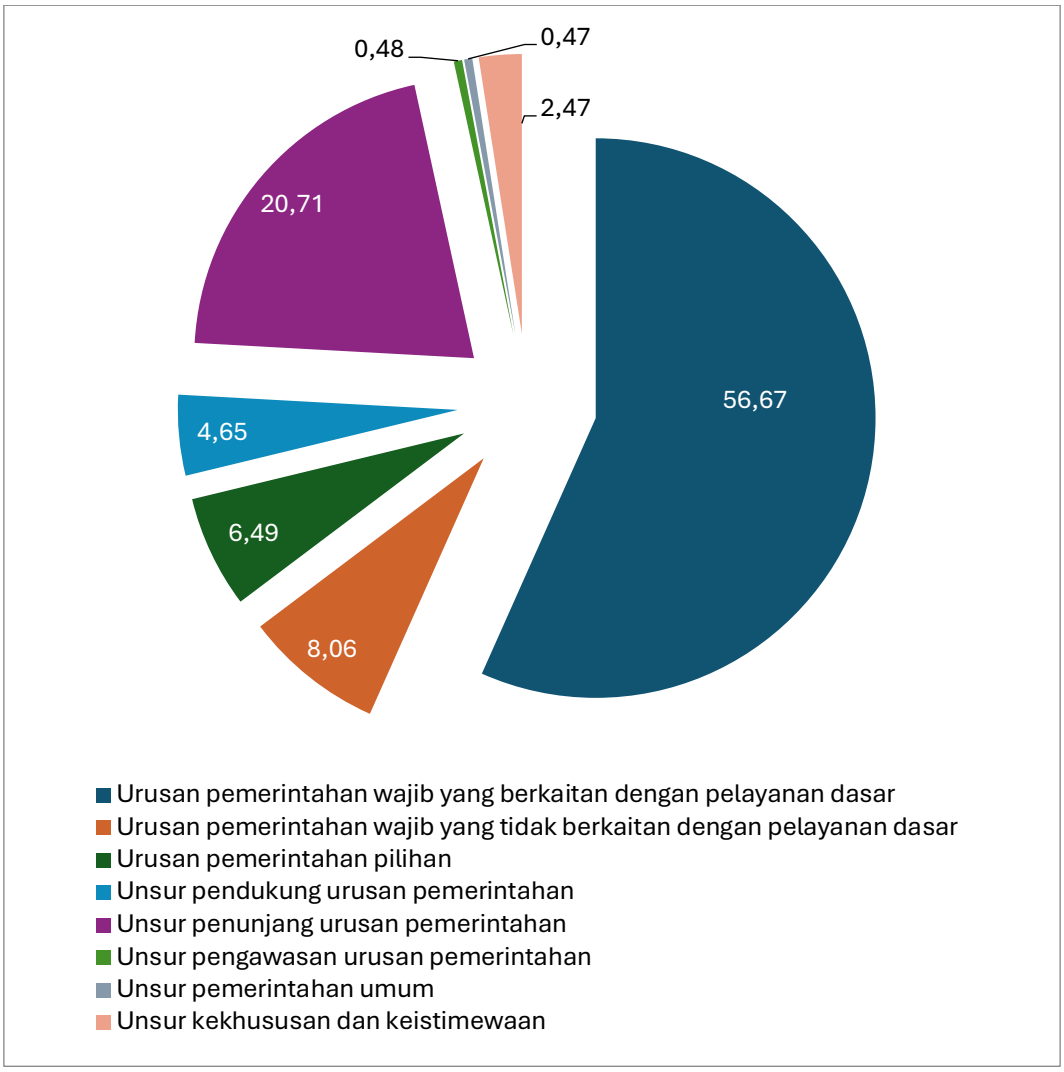

Gambar 2. 120

Struktur Realisasi Belanja Program/Kegiatan RKPA Tahun 2025

2.2.2.2.3. Capaian Indikator Makro Provinsi Aceh Terhadap RKPA Tahun 2025

Pada dimensi ekonomi makro, terdapat empat indikator kunci yang dibandingkan langsung dengan Target RPA 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,97% pada tahun 2025, turun 1,69% dibanding tahun 2024 yang mencapai 4,66%. Capaian ini masih berada di bawah Target RPA 2025 sebesar 3,85%, mengindikasikan bahwa laju pemulihan dan ekspansi ekonomi Aceh belum mencapai sasaran yang ditetapkan. Angka kemiskinan berada di angka 12,22% pada 2025, turun 0,42% dari 12,64% pada 2024. Meskipun terjadi penurunan, capaian ini justru menunjukkan kinerja yang melampaui target RPA 2025 sebesar 14,53%, karena angka kemiskinan yang lebih rendah mencerminkan keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Aceh.

Pengangguran tercatat 5,64% pada 2025, turun tipis 0,11% dari 5,75% di 2024, namun angka ini masih berada di atas Target RPA 2025 sebesar 5,24%, artinya

masalah ketenagakerjaan masih perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan ke depan. Sementara itu, inflasi sebesar 6,71% pada 2025 merupakan catatan kritis yang paling mencolok, karena naik drastis 4,54% dari 2,17% pada 2024 dan jauh melampaui Target RPA 2025 sebesar 2,12%. Lonjakan inflasi ini memerlukan kebijakan pengendalian harga dan stabilisasi ekonomi yang lebih serius dalam perencanaan 2027.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh pada tahun 2025 mencapai 76,23, naik 0,87 poin dari 75,36 pada tahun 2024. Capaian ini telah melampaui Target RPA 2025 sebesar 72,98, menunjukkan kemajuan positif pada kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Komponen-komponen pembentuk IPM dirinci lebih lanjut melalui indikator pendidikan dan kesehatan yang menggambarkan kondisi SDM Aceh secara lebih mendalam.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 9,95 tahun pada 2025, naik 0,31 dari 9,64 tahun di 2024, menunjukkan tren positif meski peningkatannya masih moderat. Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 14,40 tahun pada 2025 hanya naik 0,01 dari 14,39 tahun di 2024, kenaikan yang sangat kecil ini mengisyaratkan perlunya akselerasi kebijakan di sektor pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Umur Harapan Hidup (UHH) tercatat 73,48 tahun pada 2025, naik 0,28 dari 73,20 tahun di 2024, yang mencerminkan perbaikan layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Aceh secara bertahap.

Dua indikator layanan dasar menunjukkan capaian yang menggembirakan. Sanitasi layak mencapai 82,21% pada 2025, naik 1,20% dari 81,01% di 2024, dan telah melampaui Target RPA 2025 sebesar 79,50%. Demikian pula, air minum layak tercatat 92,06% pada 2025, naik 1,98% dari 90,08% di 2024, dan juga telah melampaui Target RPA 2025 sebesar 88,60%. Kedua capaian ini mencerminkan keberhasilan program penyediaan infrastruktur dasar yang dapat dijadikan referensi positif dalam perencanaan 2027, sekaligus memberikan sinyal bahwa investasi pada sektor sanitasi dan air minum perlu dipertahankan dan diperluas jangkauannya, terutama ke wilayah pedesaan dan terpencil di Aceh.

Pada dimensi kesejahteraan ekonomi masyarakat, pengeluaran per kapita mencapai Rp11,19 juta pada 2025, naik Rp0,38 juta dari Rp10,81 juta di 2024, dan telah melampaui Target RPA 2025 sebesar Rp10,08 juta, menandakan peningkatan daya beli masyarakat Aceh secara agregat. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp45,77 juta pada 2025, naik Rp1,99 juta dari Rp43,78 juta di 2024, dan jauh melampaui Target RPA 2025 sebesar Rp26,54 juta. Meski demikian, perlu dicatat bahwa tingginya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku juga dapat dipengaruhi oleh faktor inflasi yang tercatat tinggi pada periode yang sama.

Gini Rasio sebesar 0,274 pada 2025 turun 0,020 dari 0,294 pada 2024, dan berada di bawah Target RPA 2025 sebesar 0,301, mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Aceh sedikit membaik. Namun angka Gini Rasio di kisaran 0,274 tetap menunjukkan masih adanya ketimpangan yang perlu ditangani melalui kebijakan redistribusi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, data pembangunan Aceh tahun 2025 menggambarkan kemajuan yang tidak merata di berbagai sektor. Di satu sisi, capaian positif terlihat pada IPM, sanitasi, air minum, pengeluaran per kapita, PDRB per kapita, dan penurunan kemiskinan yang semuanya melampaui target RPA. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang melambat, angka pengangguran yang masih di atas target, serta lonjakan inflasi yang sangat signifikan menjadi tantangan struktural yang harus menjadi prioritas utama perencanaan di tahun 2027.

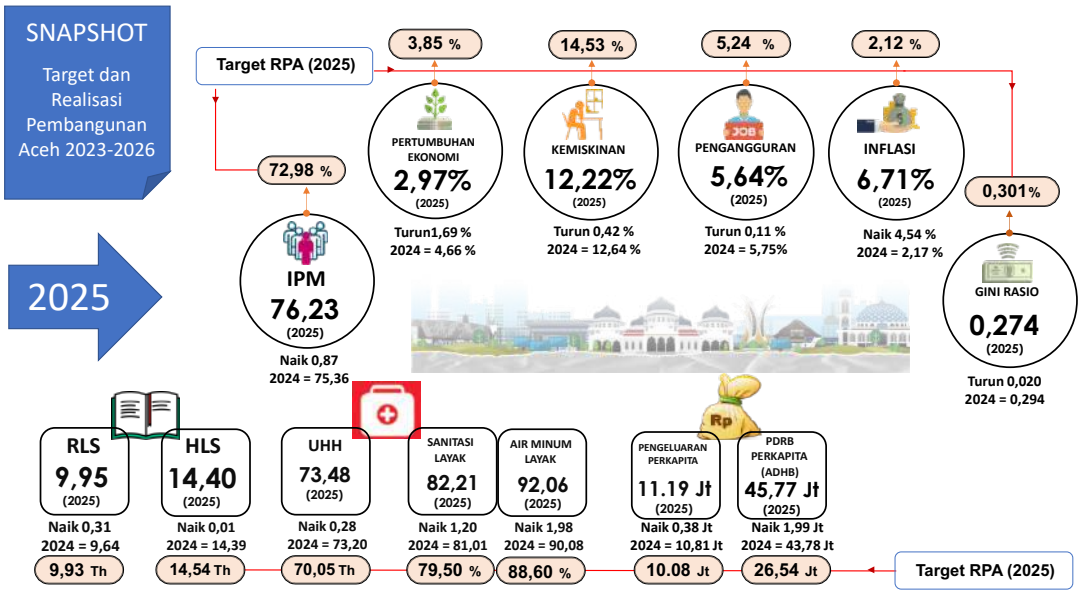

Gambar 2. 121
Target dan Realisasi Indikator Pembangunan Aceh terhadap Target Tahun 2023-2026

2.2.2.2.4. Capaian Indikator Makro Kabupaten/Kota Terhadap RKPA Tahun 2025

Capaian pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten/kota pada Tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Jika di bandingkan dengan tahun 2024 penurunan capaian pertumbuhan ekonomi terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan target RKPA Tahun 2025 hanya terdapat 4 kabupaten yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di Aceh dipicu oleh bencana hidrometeorologi (Siklon Tropis

Senyar) di akhir tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kota Banda Aceh yang tumbuh sebesar 4,66 persen sedangkan terendah terjadi di Kabupaten Aceh Utara yang hanya tumbuh sebesar 0,94 persen.

Kabupaten/kota di Provinsi Aceh memiliki tingkat kemiskinan yang bervariasi. Tingkat kemiskinan di Aceh Kondisi Maret 2025 mengalami penurunan terhadap Maret 2024 sebagai akibat dari perbaikan tingkat kemiskinan di level Kabupaten/Kota dan pencapaiannya sesuai dengan target RKPA Tahun 2025. Penurunan tingkat kemiskinan Tahun 2025 terjadi di selutruh kabupaten/kota di Aceh. Pada tahun 2025, terdapat 11 (sebelas) kabupaten/kota yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan (notifikasi hijau). Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Singkil sebesar 17,07 persen, sedangkan tingkat kemiskinan terendah tercatat di Kota Banda Aceh sebesar 5,45 persen. Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Aceh menjadi perhatian khusus pemerintah Aceh, namun peranan dari pemerintah kabupaten/kota tentu lebih penting dalam menyusun kebijakan-kebijakan dan memonitoring penurunan kemiskinan secara berkala.

Perbandingan antara nilai Persentase Penduduk Miskin dengan Tingkat pengangguran Terbuka di level Kabupaten/Kota menunjukkan fenomena anomali. Khusus untuk 4 (empat) daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Tengah (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara terlihat bahwa angka TPT memiliki nilai paling kecil, namun memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun penduduk daerah tersebut rendah pengangguran, namun mereka memiliki kesejahteraan yang sangat rendah. Hal tersebut disebabkan sektor pertanian yang menjadi lapangan kerja penduduk sehari-hari namun belum dapat diandalkan guna meningkatkan kesejahteraan. Penyebab utama dari keadaan tersebut adalah belum adanya nilai tambah yang memadai dari komoditi pertanian yang dihasilkan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari masih kurangnya skill sumberdaya manusia di bidang pertanian untuk mengolah hasil pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah produk.

Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 (kondisi Agustus 2025) belum memenuhi target RKPA 2025, terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota yang capaiannya sesuai dengan target RKPA 2025 sedangkan 14 (empat belas)

kabupaten/kota targetnya tidak tercapai. TPT tertinggi terjadi di Kota Lhokseumawe sebesar 8,24 persen sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Bener Meriah sebesar 2,10 persen.

Tingkat pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota terhadap RKPA 2025 menunjukkan bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) daerah (notifikasi hijau) yang melebihi target. Sedangkan daerah dengan pencapaian masih di bawah target hanya 2 (dua) daerah, yaitu Kabupaten Pidie Jaya dan Gayo Lues. IPM terendah tercatat di Kota Subulussalam (71,63), sedangkan daerah dengan IPM tertinggi (89,55) tercatat di Kota Banda Aceh. Di samping memiliki tertinggi, IPM Kota Banda Aceh jauh berada di atas rata-rata Aceh (76,23) dan rata-rata Nasional (75,90). Pada tahun 2025, tercatat 19 kabupaten/kota memiliki status pembangunan manusia berkatagori "tinggi" (70 = IPM < 80). Sementara itu, 4 (empat) Kota yaitu Kota Sabang, Lhokseumawe, Banda Aceh, dan Langsa dengan capaian IPM berkatagori "sangat tinggi" (≥80).

Untuk memberikan gambaran secara lebih terperinci mengenai kondisi kinerja kabupaten/kota terhadap target sebagaimana yang telah diuraikan, dapat dilihat Tabel 2.145.

Tabel 2. 145

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten/Kota

Tahun 2025 Terhadap Target RKPA Tahun 2025

NO	Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Tahun 2025							
		Pertumbuhan Ekonomi (%) (ADHK)		Tingkat Kemiskinan (%)		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Indeks Pembangunan Manusia	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Simeulue	3,05	**3,81**	17,51	**15,52**	4,77	5,31	67,56	**71,94**
2	Aceh Singkil	4,00	3,41	11,58	17,07	5,50	6,55	72,61	**72,62**
3	Aceh Selatan	3,70	3,00	11,70	**9,89**	3,80	4,39	71,31	**72,79**
4	Aceh Tenggara	2,75	**2,97**	12,30	**9,78**	4,80	**4,72**	72,80	**74,36**
5	Subulussalam	4,35	3,85	16,00	**13,88**	5,15	**4,87**	68,23	**71,63**
6	Pidie Jaya	4,20	2,59	17,20	**16,12**	4,10	**3,67**	77,10	77,04
7	Banda Aceh	4,80	4,66	6,89	**5,45**	7,74	**7,30**	87,47	**89,55**
8	Aceh Timur	2,56	1,30	14,25	**11,24**	6,11	7,74	68,85	**72,20**
9	Aceh Tengah	3,85	3,01	14,30	**12,29**	2,00	4,03	76,50	**78,09**
10	Aceh Barat	3,60-4,30	**4,44**	17,31	**15,50**	6,44	**5,46**	72,19	**76,30**
11	Aceh Besar	4,30	2,96	12,55	**11,05**	5,97	7,86	74,48	**77,46**
12	Pidie	3,14	2,99	17,58	**16,46**	6,05	**5,71**	71,52	**74,46**
13	Bireuen	5,00	3,26	11,25	**10,30**	3,50	3,82	75,50	**76,29**

NO	Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Tahun 2025							
		Pertumbuhan Ekonomi (%) (ADHK)		Tingkat Kemiskinan (%)		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Indeks Pembangunan Manusia	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
14	Aceh Utara	3,75	0,94	15,00	**14,27**	6,40	6,88	73,00	**74,29**
15	Aceh Barat Daya	4,05	**4,10**	14,00	**13,30**	3,31	3,66	71,50	**72,10**
16	Gayo Lues	3,45	2,08	17,77	**16,77**	2,11	2,24	72,76	72,61
17	Aceh Tamiang	4,00	0,95	11,58	**10,84**	5,17	6,78	73,90	**74,78**
18	Nagan Raya	4,40	4,04	17,50	**15,42**	3,78	5,06	71,53	**73,87**
19	Aceh Jaya	3,83	3,15	11,81	**10,37**	3,01	**2,57**	70,51	**74,20**
20	Bener Meriah	3,85	2,38	10,77	16,20	2-2,25	**2,10**	73,90	**77,48**
21	Sabang	4,00	3,68	12,88	**12,75**	3,30	**2,67**	78,96	**80,04**
22	Langsa	4,80-5,08	2,76	9,54-10,02	**8,59**	6,91-7,24	7,31	81,19-83,17	**81,77**
23	Lhokseumawe	4,23-4,50	3,39	10,33-10,13	**9,01**	7,98-7,48	8,24	81,65-83,65	**81,75**
24	Aceh	4,28-4,51	2,97	14,03	**12,33**	5,24	**4,64**	75,20–76,00	**76,23**

Sumber: Bappeda Aceh (diolah)

Tercapai
Tidak Tercapai

Tingkat ketercapaian dari 4 (empat) buah indikator makro Kabupaten/Kota terhadap target Rencana Kerja Pemerintah Aceh cukup bervariasi selama periode, tergantung pada masing-masing jenis indikator. Penjelasan terhadap hal tersebut dapat diuaraikan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi, pada Tahun 2022 terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota tercatat berhasil mencapai target yang ditetapkan. Kondisi perekonomian Tahun 2023 semakin menunjukkan perbaikan, terdapat 15 (lima belas) daerah yang telah melampaui target, sedangkan 8 (delapan) daerah lainnya belum mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2024, tingkat ketercapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 69,57 persen, terdapat 16 kabupaten/kota yang capaiannya sesuai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas kondisi perekonomian Tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun ini salah satunya dipengaruhi adanya event-event nasional dan imbas perkembangan kondisi perekonomian Indonesia yang makin lama semakin baik. Tahun 2025 memberikan gambaran bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi Aceh mempengaruhi ketercapaian pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota terhadap

target, ditunjukkan dengan hanya terdapat 4 kabupaten yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Tingkat kemiskinan menunjukkan pencapaian target yang cukup signifikan, dari 7 (tujuh) daerah di tahun 2022 menjadi 17 daerah (tahun 2023), menurun menjadi 11 daerah (tahun 2024), selanjutnya pada tahun 2025 meningkat menjadi 21 (dua puluh satu) daerah yang tercapai. Pencapaian ini terlaksana karena adanya intervensi tinggi dari Pemerintah Daerah guna secara terus-menerus mengurangi angka kemiskinan dengan berfokus pada kantong-kantong kemiskinan yang ada. Seluruh kabupaten/kota telah berusaha memaksimalkan melalui anggaran pemerintah yaitu APBK, APBN dan APBA untuk menangani kemiskinan ekstrim. Hal ini juga menjadi fokus dari Bupati/Walikota karena merupakan salah satu indikator dari penilaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), menunjukkan tren yang fluktuatif jumlah daerah yang tidak dapat mencapai target. Pada Tahun 2022 terdapat 12 (dua belas) daerah yang mampu mencapai target TPT, namun jumlah tersebut turun menjadi 8 (delapan) daerah (2023). Pada tahun selanjutnya (2024) hanya 10 (sepuluh) daerah saja dan menurun kembali di tahun 2025 menjadi 9 daerah yang mencapai target TPT yaitu Aceh Tenggara, Subulussalam, Pidie Jaya, Banda Aceh, Aceh Barat, Pidie, Aceh Jaya, Bener Meriah dan Sabang. Kota Lhokseumawe merupakan daerah yang masih memiliki nilai TPT tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Aceh. Tingginya TPT pada daerah ini diakibat oleh banyaknya jumlah penduduk yang menganggur dari jumlah angkatan kerja yang tersedia. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) baik yang bekerja, ataupun yang sedang pengangguran.
d. Selama periode tahun 2022-2025 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Aceh terhadap target menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 11 (sebelas) kabupaten/kota pada tahun 2022 menjadi 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota yang mencapai target IPM pada tahun 2025. Pada tahun 2025, tingkat ketercapaian terhadap target sebesar 91,30 zersen artinya capaian IPM di 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota sesuai dengan target RKPA 2025. Ditinjau dari 4 (empat) komponen pembentuk IPM tahun 2025, Kabupaten Simeulue memiliki Usia Harapan Hidup (UHH) terendah (69,92 tahun), Kabupaten

Aceh Timur memiliki Harapan Lama Sekolah (HLS) terendah (13,09 tahun), Kota Subulussalam memiliki Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terendah (8,75 tahun), dan untuk komponen pengeluaran riil per kapita per tahun, tercatat Kabupaten Simeulue merupakan yang terendah dengan capaian Rp. 8.555 ribu. Sementara itu, Kota Banda Aceh memiliki capaian tertinggi untuk keempat komponen pembentuk IPM di Aceh.

Tabel 2. 146
Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota
yang Mencapai Target Indikator Makro RKPA periode 2022-2025

No.	Indikator Makro	Jumlah/%	2022		2023		2024		2025	
			Tercapai	Tidak	Tercapai	Tidak	Tercapai	Tidak	Tercapai	Tidak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
1	Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah (Kab/Kota)	14	9	15	8	16	7	4	19
		Capaian (%)	60,87	39,13	65,22	34,78	69,57	30,43	17,39	82,61
2	Tingkat Kemiskinan	Jumlah (Kab/Kota)	7	16	17	6	11	12	21	2
		Capaian (%)	30,43	69,57	73,91	26,09	47,83	52,17	91,30	8,70
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah (Kab/Kota)	12	11	8	15	10	13	9	14
		Capaian (%)	52,17	47,83	34,78	65,22	43,48	56,52	39,13	60,87
4	Indeks Pembangunan Manusia	Jumlah (Kab/Kota)	11	12	22	1	22	1	21	2
		Capaian (%)	47,83	52,17	95,65	4,35	95,65	4,35	91,30	8,70

Sumber: Bappeda (diolah)

2.2.2.3. Hasil Capaian Kinerja RPA Tahun 2023-2026

2.2.2.3.1. Capaian Anggaran RPA

Tingkat Penggunaan anggaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) disajikan pada Tabel Rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran program/kegiatan Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026 mencapai 72,43 persen dengan nilai kriteria Sedang. Namun demikian, secara alokasi anggaran RPA untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sejumlah Rp. 33,25 Triliun, realisasinya sudah mencapai 97 persen. Jumlah anggaran Rencana Pembangunan Aceh menggunakan pagu berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026.

Sampai dengan tahun 2025, Unsur Pemerintahan Umum merupakan urusan dengan tingkat realisasi anggaran RPA tertinggi karena terjadi penambahan pagu dalam APBA untuk mendukung kegiatan Pemilu dan Pilkada di Aceh, sedangkan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan memiliki tingkat realisasi anggaran terendah atau sebesar 64,27 persen. Berdasarkan distribusi belanjanya, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar merupakan urusan realisasi belanjanya terbesar yaitu sebesar Rp. 19,170 Triliun atau sebesar 57,55 persen dari total realisasi RPA Tahun 2023 s/d 2026. Realisasi capaian Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026 ditunjukkan pada Tabel Tingkat Capaian Realisasi Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026.

2.2.2.3.2. Capaian Kinerja RPA

Capaian kinerja terhadap hasil pelaksanaan RPA 2023-2026 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rata-rata persentase capaian realisasi kinerja program/kegiatan mencapai 84,60 persen dengan nilai kriteria “Tinggi”.
b. Jika dilihat lebih terperinci berdasarkan masing-masing bidang urusan, maka bidang urusan yang memiliki persentase kinerja tertinggi adalah urusan pemerintahan pilihan. Sedangkan bidang urusan yang memiliki kinerja terendah adalah unsur pemerintahan umum.
c. Beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan tinggi dan rendahnya kinerja setiap bidang urusan pada tabel evaluasi amtara lain:
    - Target kinerjanya belum dilaksanakan atau targetnya tidak dilaksanakan pada tahun berjalan;
    - Terjadinya perbedaan satuan target Renja, Renstra dan RKPD;
    - SKPA belum menyampaikan seluruh capaian kinerja pada level program/kegiatan;
    - Beberapa pagu program dan kegiatan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan sudah sesuai dengan kinerja yang ingin dihasilkan, namun pada saat pagu yang dianggarkan lebih kecil dari pagu anggaran yang direncanakan, tidak dilakukan penyesuaian target yang sesuai dengan pagu

yang dianngarkan (target kinerja tidak berubah sesuai alokasi anggaran yang diterima);

- Beberapa data kinerja program dan kegiatan yang diunduh melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tidak memuat informasi target indikator (indikator kinerja kosong), padahal SKPA sudah menginput target indikator tahun rencana.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai tingkat capaian realisasi kinerja berdasarkan masing-masing bidang urusan, dapat dilihat pada Tabel Tingkat Capaian Realisasi Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026.

Tabel 2. 147
Tingkat Capaian Realisasi Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026	Realisasi Anggaran s/d Tahun Lalu (2024)	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	Realisasi Anggaran RPA s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPA s.d Tahun 2025		Predikat Capaian Kinerja RPA 2023-2026	
							(%)		(ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (5+6)*	*8*	*9= 7/4)*100*	*10*	*11*
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**26.195.389.339.306**	**13.156.412.989.730**	**6.013.773.678.174**	**19.170.186.667.903**	**79,16**	**73,18**	**T**	**S**
1	01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	12.596.715.828.233	6.425.792.311.263	3.060.966.153.503	9.486.758.464.766	92,82	75,31	ST	T
2	01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	6.476.343.453.207	4.070.138.827.012	2.029.994.823.234	6.100.133.650.246	100	94,19	ST	ST
3	01.03	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	3.542.109.870.539	1.461.671.963.792	387.457.468.432	1.849.129.432.224	35,14	52,2	SR	R
4	01.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.949.200.750.000	877.621.826.431	369.252.435.916	1.246.874.262.347	75,5	42,28	T	SR

II-317

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026	Realisasi Anggaran s/d Tahun Lalu (2024)	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	Realisasi Anggaran RPA s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPA s.d Tahun 2025		Predikat Capaian Kinerja RPA 2023-2026	
							(%)		(ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (5+6)*	*8*	*9= 7/4)*100*	*10*	*11*
5	01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	272.336.501.126	146.034.942.992	79.538.140.934	225.573.083.926	71,5	82,83	S	T
6	01.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	358.682.936.201	175.153.118.239	86.564.656.155	261.717.774.394	100	72,97	ST	S
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**3.973.229.546.883**	**2.097.184.380.490**	**855.280.036.762**	**2.952.464.417.252**	**90,18**	**74,31**	**ST**	**S**
7	02.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	256.102.309.522	77.466.756.855	33.875.307.887	111.342.064.742	77,97	43,48	T	SR
8	02.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	75.628.792.558	30.767.544.058	15.199.979.688	45.967.523.746	100	60,78	ST	R

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026	Realisasi Anggaran s/d Tahun Lalu (2024)	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	Realisasi Anggaran RPA s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPA s.d Tahun 2025		Predikat Capaian Kinerja RPA 2023-2026	
							(%)		(ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (5+6)*	*8*	*9= 7/4)*100*	*10*	*11*
9	02.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	135.774.600.126	51.142.301.964	26.006.713.693	77.149.015.657	100	56,82	ST	R
10	02.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	76.493.187.631	29.104.118.347	15.051.273.722	44.155.392.069	100	57,72	ST	R
11	02.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	416.984.377.034	200.713.101.346	136.231.376.843	336.944.478.188	85,03	80,81	T	T
12	02.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	62.842.294.974	28.567.177.438	11.751.535.614	40.318.713.052	100	64,16	ST	R
13	02.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98.467.738.249	42.191.030.206	20.960.686.176	63.151.716.382	100	64,13	ST	R

II-319

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026	Realisasi Anggaran s/d Tahun Lalu (2024)	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	Realisasi Anggaran RPA s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPA s.d Tahun 2025		Predikat Capaian Kinerja RPA 2023-2026	
							(%)		(ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (5+6)*	*8*	*9= 7/4)*100*	*10*	*11*
14	02.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.200.000.000	-	191.044.812	191.044.812	100	15,92	ST	SR
15	02.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	661.302.804.424	167.651.757.375	152.956.242.727	320.608.000.102	87,25	48,48	T	SR
16	02.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	149.557.431.323	80.249.826.903	34.715.149.118	114.964.976.021	100	76,87	ST	T
17	02.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	598.329.512.586	170.055.068.033	59.333.378.089	229.388.446.123	100	38,34	ST	SR
18	02.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	139.984.727.095	52.572.811.316	24.409.063.915	76.981.875.231	100	54,99	ST	R

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026	Realisasi Anggaran s/d Tahun Lalu (2024)	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	Realisasi Anggaran RPA s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPA s.d Tahun 2025		Predikat Capaian Kinerja RPA 2023-2026	
							(%)		(ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (5+6)*	*8*	*9= 7/4)*100*	*10*	*11*
19	02.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	807.521.600.000	846.347.636.951	196.729.692.440	1.043.077.329.391	100	129,17	ST	ST
20	02.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	9.037.383.456	1.058.563.611	2.587.591.461	3.646.155.072	100	40,35	ST	SR
21	02.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	5.868.900.000	754.885.660	361.761.179	1.116.646.839	96,77	19,03	ST	SR
22	02.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	260.011.025.490	178.267.459.465	80.168.878.623	258.436.338.088	100	99,39	ST	ST
23	02.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	208.997.398.047	137.349.283.162	43.244.193.059	180.593.476.221	57,1	86,41	R	T
24	02.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	9.125.464.369	2.925.057.800	1.506.167.716	4.431.225.516	19,09	48,56	SR	SR
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		**2.227.170.496.321**	**1.311.441.852.239**	**688.399.675.776**	**1.999.841.528.016**	**100**	**89,79**	**ST**	**T**

II-321

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026	Realisasi Anggaran s/d Tahun Lalu (2024)	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	Realisasi Anggaran RPA s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPA s.d Tahun 2025		Predikat Capaian Kinerja RPA 2023-2026	
							(%)		(ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (5+6)*	*8*	*9= 7/4)*100*	*10*	*11*
25	03.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	532.394.811.006	163.791.012.726	91.945.086.817	255.736.099.543	100	48,04	ST	SR
26	03.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	91.368.029.498	64.200.764.222	20.045.993.303	84.246.757.525	100	92,21	ST	ST
27	03.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	869.542.032.082	566.056.626.668	331.129.399.363	897.186.026.031	100	103,18	ST	ST
28	03.28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	218.422.288.849	146.406.932.451	69.993.363.027	216.400.295.478	100	99,07	ST	ST
29	03.29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	155.796.782.399	250.240.904.386	132.167.980.493	382.408.884.879	100	245,45	ST	ST
30	03.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	147.515.069.861	76.837.445.196	35.591.154.548	112.428.599.744	100	76,21	ST	T
31	03.31	Urusan Pemerintahan	60.498.730.908	18.906.690.874	4.213.066.444	23.119.757.318	100	38,22	ST	SR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026	Realisasi Anggaran s/d Tahun Lalu (2024)	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	Realisasi Anggaran RPA s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPA s.d Tahun 2025		Predikat Capaian Kinerja RPA 2023-2026	
							(%)		(ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (5+6)*	*8*	*9= 7/4)*100*	*10*	*11*
		Bidang Perindustrian								
32	03.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	151.632.751.718	25.001.475.717	3.313.631.782	28.315.107.499	100	18,67	ST	SR
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		**1.819.864.933.057**	**795.597.992.413**	**493.806.092.321**	**1.289.404.084.734**	**87,13**	**70,85**	**T**	**S**
33	04.01	Sekretariat Daerah	986.297.707.635	429.478.514.495	264.295.716.355	693.774.230.850	74,25	70,34	S	S
34	04.02	Sekretariat DPRD	833.567.225.422	366.119.477.918	229.510.375.966	595.629.853.884	100	71,46	ST	S
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		**10.170.509.007.556**	**4.338.439.562.174**	**2.198.293.836.929**	**6.536.733.399.102**	**81,82**	**64,27**	**T**	**R**
35	05.01	Perencanaan	271.355.295.081	101.677.272.668	48.953.815.422	150.631.088.090	78,93	55,51	T	R
36	05.02	Keuangan	9.011.465.122.244	3.916.880.530.173	2.012.445.079.162	5.929.325.609.335	41,01	65,8	SR	S
37	05.03	Kepegawaian	183.959.603.413	49.207.987.412	23.448.883.161	72.656.870.573	100	39,5	ST	SR
38	05.04	Pendidikan dan Pelatihan	479.736.378.150	198.693.995.279	72.348.751.997	271.042.747.277	87,91	56,5	T	R
39	05.05	Penelitian dan Pengembangan	37.765.304.918	6.258.319.394	1.567.541.550	7.825.860.944	100	20,72	ST	SR
40	05.06	Penghubung	186.227.303.750	65.721.457.247	39.529.765.636	105.251.222.883	83,04	56,52	T	R
VI	**UNSUR PENGAWASAN**		**214.316.596.000**	**104.659.659.371**	**50.486.807.707**	**155.146.467.078**	**82,85**	**72,39**	**T**	**S**

II-323

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026	Realisasi Anggaran s/d Tahun Lalu (2024)	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	Realisasi Anggaran RPA s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPA s.d Tahun 2025		Predikat Capaian Kinerja RPA 2023-2026	
							(%)		(ST/T/S/R/SR)	
							(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (5+6)*	*8*	*9= 7/4)*100*	*10*	*11*
	URUSAN PEMERINTAHAN									
41	06.01	Inspektorat Daerah	214.316.596.000	104.659.659.371	50.486.807.707	155.146.467.078	82,85	72,39	T	S
VII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		**165.000.000.000**	**317.437.002.226**	**49.607.833.521**	**367.044.835.747**	**72,72**	**222,45**	**S**	**ST**
42	08.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	165.000.000.000	317.437.002.226	49.607.833.521	367.044.835.747	72,72	222,45	S	ST
VIII	**UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN**		**1.222.045.270.421**	**576.910.718.286**	**262.631.923.595**	**839.542.641.880**	**82,93**	**68,7**	**T**	**S**
43	09.01	Kekhususan Aceh								
		Kebudayaan	149.966.329.357	59.820.201.697	36.274.268.498	96.094.470.195	78,14	64,08	T	R
		Keagamaan	814.039.341.565	418.474.552.565	199.290.584.133	617.765.136.697	79,84	75,89	T	T
		Kesatuan dan Perdamaian	258.039.599.499	98.615.964.024	27.067.070.964	125.683.034.988	90,82	48,71	ST	SR
Jumlah			**45.987.525.189.545**	**22.698.084.156.929**	**10.612.279.884.784**	**33.310.364.041.713**				
Rata-Rata							**84,6**	**72,43**		
Predikat Kinerja									T	S

Sumber: BPKA (diolah)

Keterangan :

ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) S = Sedang (66% ≤ 75%) SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

T = Tinggi (76% ≤ 90%) R = Rendah (51% ≤ 65%)

Dilihat dari program yang direncanakan dalam pelaksanaan tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa:

- Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD
  Jumlah program yang direncanakan dalam RKPA 2025 sebanyak 213 program, sedangkan jumlah program yang masuk dalam APBA T.A 2025 sebanyak 210 program berdasarkan pengalokasian anggaran pada masing-masing program sehingga konsistensi program RKPA Tahun 2025 dilaksanakan pada APBA 2025 sebesar 98,59 persen.
- Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
  Jumlah program yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2025-2026 sebanyak 234 program pada tahun 2025, sedangkan jumlah program yang direncanakan dalam RKPA Tahun 2025 sebanyak 213 program berdasarkan pengalokasian anggaran, sehingga konsistensi program sebesar 92,61 persen.

2.2.2.3.3. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPA Tahun 2023-2026

Penetapan Indikator Kinerja dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026 ditujukan untuk menetapkan target rencana capaian pembangunan daerah memperhatikan beberapa aspek Pembangunan. Indikator tersebut terbagi atas 3 (tiga) ketegori, yaitu Indikator Makro (IM), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Seluruh target dari indikator tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing SKPA dalam pencapaiannya berdasarkan masing-masing periode. Khusus terhadap IKD, terbagi atas masing-masing aspek Pembangunan yang ditetapkan dalam RPA 2023-2026, yaitu: (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (2) Aspek Daya Saing Daerah; dan (3) Aspek Pelayanan Umum. Aspek Pelayanan Umum terbagi menjadi : (a) Layanan Urusam Wajib Dasar; (b) Layanan Urusan Non Wajib Dasar; (c) Layanan Urusan Pilihan; (d) Penunjang Urusan; (e) Pendukung; dan (f) Keistimewaan Aceh. Untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator, baik IM, IKU, dan IKD menurut masing-masing urusan dapat dilihat Tabel 2.15, kondisi sampai dengan triwulan IV tahun 2025.

Tabel 2. 148
Tingkat Capaian Terhadap Target Indikator RKPA 2023-2026.

NO	Indikator/Bidang Urusan	Jumlah Indikator	Status		Persentase Capaian (%)
			H	M	
1	2	3	4	5	6
1	Indikator Makro (IM)	6	4	2	66,67
2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	18	7	11	38,89
3	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	124	60	64	48,39
	a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	15	8	7	53,33
	b. Aspek Daya Saing Daerah	5	2	3	40,00
	c. Aspek Pelayanan Umum	104	50	54	48,08
	-Layanan Urusan Wajib Dasar	17	7	10	*41,18*
	-Layanan Urusan Wajib Non Dasar	32	20	12	*62,50*
	- Layanan Urusan Pilihan	19	8	11	*42,11*
	- Penunjang Urusan	16	5	11	*31,25*
	- Pendukung	10	7	3	*70,00*
	- Kiistimewaan Aceh	10	3	7	*30,00*
	T O T A L	148	71	77	47,97

Sumber : Bappeda Aceh (diolah)

H = Tercapai
M= Tidak Tercapai

Hasil evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja (IM, IKU, dan IKD) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 47,97 persen. Secara keseluruhan terdapat sejumlah 71 (tujuh puluh satu) indikator telah tercapai (notifikasi hijau), dan sedangkan 77 (tujuh puluh tujuh) indikator belum tercapai (notifikasi merah). Jika ditinjau lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa:

A. Indiktor Makro

Terdapat 6 indikator yang ditargetkan dalam RPA 2023-2026, menunjukkan 2 indikator yang tidak tercapai yaitu tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi dengan kinerjanya masing-masing sebesar 92,91 persen dan 77,14 persen. Selanjutnya, 5 (lima) buah indikator yang telah mencapai target adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, PDRB per Kapita, dan Indeks Gini.

Tabel 2. 149

Capaian Indikator Makro Tahun 2025 Terhadap Target RPA 2023-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPA TAHUN	CAPAIAN TAHUN			TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2025			
			2025	2023	2024	2025	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8			
	INDIKATOR MAKRO						Jumlah	4	2	0
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Index	72,98	74,70	75,36	76,23	104,45%	H		
2	Persentase Penduduk Miskin	%	14,03	14,45	12,64	12,33	113,79%	H		
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,24	6,03	5,75	5,64	92,91%		K	
4	Pertumbuhan PDRB	%	3,85	4,23	4,15	2,97	77,14%		K	
5	PDRB per Kapita (ADHK)	Rp (Juta)	26,54	26,800	27,684	28,145	106,05%	H		
6	Indeks Gini	%	0,301	0,296	0,294	0,274	109,85%	H		

Sumber: Bappeda Aceh (diolah)
Keterangan Notifikasi:

Tercapai Kinerja 76% ≤ 99% Kinerja ≤ 75%

ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)
T = Tinggi (76% ≤ 90%)
S = Sedang (66% ≤ 75%)
R = Rendah (51% ≤ 65%)
SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

B. Indikator Kinerja Utama,

Terdapat 18 indikator kinerja utama yang ditargetkan dalam RPA 2023-2026, sebanyak 7 indikator telah tercapai sedangkan 11 indikator belum tercapai.

Tabel 2. 150

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Terhadap Target RPA 2023-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPA TAHUN	CAPAIAN TAHUN			TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2025			
			2025	2023	2024	2025	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8			
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						Jumlah	7	10	1
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,00	74,55	80,36	80,36	119,94%	H		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPA TAHUN	CAPAIAN TAHUN			TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2025			
			2025	2023	2024	2025	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8			
2	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	Indeks	74,24	77,53	75,8	75,8	102,10%	H		
3	Indeks Resiko Bencana Aceh	Indeks	141/ Sedang	146,9/ Tinggi	144,29/ Tinggi	144,29/ Tinggi	102,33%		K	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,52	78,53	79,66	79,66	104,10%	H		
5	Rasio Konektivitas Daerah	Rasio	0,77	0,71	0,76	0,76	98,70%		K	
6	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,54	14,38	14,39	14,4	99,04%		K	
7	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,50	3,62	3,64	4,09	116,86%	H		
8	Opini BPK	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	-	0,00%		K	
9	Indeks Pembangunan Syariat Islam (IPS)	Indeks	87,00	81,84	83,9	83,9	96,44%		K	
10	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	76,91	72,96	73,94	73,94	96,14%		K	
11	Nilai LPPD Pemerintah Aceh	Skor	2,9000/tinggi	2,8734/ Sedang	2,8734/ Sedang	2,8734/ Sedang	99,08%		K	
12	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	79,50	78,85	81,1	82,21	103,41%	H		
13	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	88,60	89,74	90,08	92,06	103,91%	H		
14	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	92,22	86,13	80,8	80,54	87,33%		K	
15	Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	%	58,14	55,31	56,45	56,54	97,25%		K	
16	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	%	81,74	68,98	100	100	122,34%	H		
17	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	18,71	13,91	15,21	15,21	81,29%		K	
18	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp.Miliar	11.910	12.570	9.470	4.163	34,95%			M

Sumber: Bappeda Aceh (diolah)

Keterangan Notifikasi:

Tercapai Kinerja 76% ≤ 99% Kinerja ≤ 75%

ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)
T = Tinggi (76% ≤ 90%)
S = Sedang (66% ≤ 75%)
R = Rendah (51% ≤ 65%)
SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

C. Indikator Kinerja Daerah

Terdapat 124 indikator kinerja daerah yang ditargetkan dalam tahun 2024, hanya tercapai sebanyak 60 indikator, sementara 64 indikator belum tercapai.

Tabel 2. 151

Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025 Terhadap Target RPA 2023-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPA TAHUN	CAPAIAN TAHUN			TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2025			
			2025	2023	2024	2025	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8			
INDIKATOR KINERJA DAERAH										
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							**Jumlah**	**8**	**4**	**3**
1	Laju Inflasi	%	2,12	1,53	2,17	4,45	47,64%			M
2	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,406	0,394	0,394	0,394	97,04%	H		
3	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70,05	73,06	73,20	73,48	104,90%	H		
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	9,55	9,64	9,95	100,20%	H		
5	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	64,67	64,77	65,11	65,63	101,49%	H		
6	Kontribusi sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB	%	31,32	30,73	30,97	32,03	102,27%	H		
7	Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB	%	6,17	3,74	3,99	3,1	50,24%			M
8	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	7,99	10,85	11,43	12,29	153,82%	H		
9	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	4,60	6,85	7,05	6	130,43%	H		
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,9	1,77	1,72	1,76	92,63%		K	
11	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	5,40	5,63	5,32	5,32	98,52%		K	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPA TAHUN	CAPAIAN TAHUN			TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2025			
			2025	2023	2024	2025	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8			
12	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16	15,17	14,99	14,97	93,56%		K	
13	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	5,3	4,84	4,71	4,83	91,13%		K	
14	Pertumbuhan Industri	%	3	-1,56	2,95	0,25	8,33%			M
15	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa (Ribu)	821,77	806,75	718,96	704,69	85,75%	H		
II. ASPEK DAYA SAING DAERAH								**2**	**1**	**2**
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	%	64,65	57,31	40,58	21,77	33,67%			M
2	Pengeluaran Per Kapita	Rp (Ribu)	10.087	10.334	10.811	11.191	110,94%	H		
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	101,65	114,34	122,11	123,99	121,98%	H		
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Ratio	3,15	1,08	1,11	1,11	35,22%			M
5	Rasio ketergantungan	Indeks	46,48	49,19	35,91	45,8	98,54%		K	
III. ASPEK PELAYANAN UMUM								**50**	**30**	**24**
3.1. LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR								**7**	**8**	**2**
3.1.1.	**Pendidikan**									
3.1.1.1	Rasio Sekolah dengan Akreditasi A	%	96,00	95,43	27,11	27,11	28,24%			M
3.1.2.	**Kesehatan**									
3.1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	/1000 Kelahiran Hidup	8	13	8	9	112,50%		K	
3.1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 Kelahiran Hidup	180	132	98	118	65,56%	H		
3.1.2.3	Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	%	100	100	20,03	100	100,00%	H		
3.1.2.4	Persentase palayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi luar biasa	%	100	100	94,6	92	92,00%		K	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPA TAHUN	CAPAIAN TAHUN			TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2025			
			2025	2023	2024	2025	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8			
3.1.2.5	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Jiwa	Indeks	86,10	78,13	86,10	87,15	101,22%	H		
3.1.2.6	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Zaenal Abidin	Indeks	92,27	81,10	83,82	83,82	90,84%		K	
3.1.2.7	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Ibu Anak	Indeks	85	84,7	81,00	83,34	98,05%		K	
3.1.2.8	Persentase Balita Stunting	%	27,00	29,4	27	28,6	105,93%	H		
3.1.2.9	Persentase pasien dengan gangguan jiwa berat mendapatkan rawatan	%	88	100	100	100	113,64%	H		
3.1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
A.	Pekerjaan Umum									
3.1.3.1	Persentase Luas Genangan Banjir Akibat Luapan Sungai dan Pasang Purnama	%	41,16	39,41	39,91	40,11	97,45%		K	
3.1.3.2	Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik	%	75,12	71,21	72,98	72,98	97,15%		K	
B.	Penataan Ruang:									
3.1.3.3	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	%	88	70	79,5	87,5	99,43%	H		
3.1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**									
3.1.4.1	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni	%	50,92	28,54	30,35	31,93	62,71%			M
3.1.5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPA TAHUN	CAPAIAN TAHUN			TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2025			
			2025	2023	2024	2025	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8			
3.1.5.1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	95	95	95,00%		K	
3.1.5.2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,62/ Sedang	0,54/ Sedang	0,54/ Sedang	0,54/ Sedang	90,00%		K	
3.1.6	**Sosial**									
3.1.6.1	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan	%	100	100	100	100	100,00%	H		
3.2. LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR								**20**	**8**	**4**
3.2.1	**Naker**									
3.2.1.1	Persentase penduduk yang bekerja	%	98,78	93,97	94,25	100	101,24%		K	
3.2.2	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**									
3.2.2.1	Persentase Cakupan Masyarakat yang terlayani Adminduk	%	98,7	99,67	98,57	99,29	100,60%	H		
3.2.3	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
3.2.3.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,28	92,71	93,28	93,28	100,00%	H		
3.2.3.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,5	63,56	61,78	61,78	91,53%		K	
3.2.3.3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	77,3	64,34	77,3	77,3	100,00%	H		
3.2.3.4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100,00%	H		
3.2.4	**Pangan**									
3.2.4.1	Ketersediaan energi	kkal/kapita/hari	3848	3573	3236	3236	84,10%		K	
3.2.4.2	Ketersediaan protein perkapita	gram/kapita/hari	86,47	117,51	107,08	107,08	123,84%	H		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPA TAHUN	CAPAIAN TAHUN			TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2025			
			2025	2023	2024	2025	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8			
3.2.4.3	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	75,28	83,8	83,4	83,4	110,79%	H		
3.2.5	**Tanah**									
13.2.5.1	Penyelesaian kasus tanah negara	%	75	54	50	65	86,67%		K	
3.2.6	**Lingkungan Hidup**									
3.2.6.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	60,80	61,30	63,25	63,25	104,03%	H		
3.2.6.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,81	90,94	92,81	92,81	104,50%	H		
3.2.6.3	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	80,23	86,75	83,24	83,24	103,75%	H		
3.2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
3.2.7.1	Rerata Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,66	0,67	0,685	0,685	103,79%	H		
3.2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
3.2.8.1	Total Fertility Rate (TFR)	Rate	2,11	2,18	2,11	2,11	100,00%	H		
3.2.9	**Perhubungan**									
3.2.9.1	Rasio ijin trayek	Rasio	1:1489	1:1456	1:3999	1:3999	37,48%			M
3.2.9.2	Persentase layanan angkutan darat	%	38,80	32,28	38,07	38,1	98,12%		K	
3.2.9.3	Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	%	45,56	55,99	56,03	56,0	122,98%	H		
3.2.10	**Komunikasi dan Informatika**									
3.2.10.1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	79,8	81,27	98,31	98,31	123,20%	H		
3.2.11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**									
3.2.11.1	Persentase koperasi aktif Lintas Daerah	%	65	51,94	52	92	141,54%	H		
3.2.11.2	Usaha Mikro dan Kecil	%	0,017	1,78	0,03	1,47	8647,06%	H		
3.2.12	**Penanaman Modal**									
3.2.12.1	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Triliun)	11,91	12,570	9,470	4,163	34,95%			M

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPA TAHUN	CAPAIAN TAHUN			TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2025			
			2025	2023	2024	2025	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8			
3.2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**									
3.2.13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang dibina	%	65,00	70	73,53	70,19	107,98%	H		
3.2.13.2	Persentase Atlet yang berprestasi	%	75	41,1	50	4	5,33%			M
3.2.13.3	Persentase gerakan kepramukaan yang aktif	%	80,00	70	91,3	91,3	114,13%	H		
3.2.14	**Statistik**									
3.2.14.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	74,07	43,11	100	100	135,01%	H		
3.2.14.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	74,07	43,11	100	100	135,01%	H		
3.2.15	**Persandian**									
3.2.15.1	Keamanan Siber Pemerintah Aceh	%	95	95	95	98	103,16%	H		
3.2.16	**Kebudayaan**									
3.2.16.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	28,39	25,73	22,81	23,10	81,37%		K	
3.2.16.2	Rasio Jumlah pengunjung museum	Rasio Pengunjung/1000	130,9	148,54	140,62	106,71	81,52%		K	
3.2.17	**Perpustakaan**									
3.2.17.1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,0019	0,0009	0,0009	0,001	52,63%			M
3.2.18	**Kearsipan**									
3.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	82	36,36	72,73	75,93	92,60%		K	
3.3. LAYANAN URUSAN PILIHAN								8	2	9
3.3.1	**Pariwisata**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPA TAHUN	CAPAIAN TAHUN			TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2025			
			2025	2023	2024	2025	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8			
3.3.1.1	Kunjungan wisata	Orang	2.836.869	6.064.178	7.173.457	15.305.502	539,52%	H		
3.3.1.2	Lama kunjungan Wisata	Hari	3	1,44	1,82	1,46	48,67%			M
3.3.1.3	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata	Orang	121.147	136.562	141.645	158.782	131,07%	H		
3.3.2	**Pertanian**									
3.3.2.1	Produksi komoditi pangan utama (Padi)	Ton	1.746.000	1.402.432	1.643.355	1.615.200	92,51%		K	
3.3.2.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	5,65	5,55	5,46	5,70	100,88%	H		
3.3.2.3	Produksi sektor perkebunan	Ton	769.454	761.213,04	761.267,05	513.130	66,69%			M
3.3.2.4	Nilai Tukar Peternak (NTPt)	Indeks	103,11	96,26	98,09	96,86	93,94%		K	
3.3.2.5	Peningkatan Produksi daging Ternak Besar	Ton	24.537	21.016	14.741	14.741	60,08%			M
3.3.3	**Kehutanan**									
3.3.3.1	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	77,06	76,51	76,66	76,66	99,48%	H		
3.3.3.2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	3,3	1,92	2,46	2,46	74,55%			M
3.3.3.3	Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,03	0,058	0,19	0,19	633,33%			M
3.3.4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**									
3.3.4.1	Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	%	23,15	5,06	5,87	5,53	23,89%			M
3.3.5	**Perdagangan**									
3.3.5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	$	291.455.417	461.330.869	674.855.855	50.440.000	17,31%			M
3.3.6	**Perindustrian**									
3.3.6.1	Pertumbuhan Kawasan Industri dan SIKIM	KI/Sentra	2/10	3/14	0/10	0/10	0,00%			M
3.3.7	**Transmigrasi**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPA TAHUN	CAPAIAN TAHUN			TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2025			
			2025	2023	2024	2025	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8			
3.3.7.1	Besaran pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	%	35,71	35,71	35,71	35,71	100,00%	H		
3.3.8	**Kelautan dan Perikanan**									
3.3.8.1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	NTN	103,5	111,01	105,94	116,17	112,24%	H		
3.3.8.2	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	USD	2.358.931	2.141.627	2.793.843	9.120.371	386,63%	H		
3.3.8.3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	NTPi	98,74	112,55	102,68	105,14	106,48%	H		
3.3.8.4	Produksi Perikanan	Ton	493.152,06	359.453,95	361.376,72	107.561,51	21,81%			M
3.4. PENUNJANG URUSAN								5	7	4
3.4.1	**Perencanaan Pembangunan**									
13.4.1.1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	96,9	89,14	92,61	92,61%		K	
13.4.1.2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	98,07	98,59	98,59%		K	
3.4.2	**Keuangan**									
3.4.2.1	Persentase SILPA terhadap APBD	%	5	3,55	4,55	-	91,00%		K	
3.4.2.2	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20	28,18	27,26	16,56	82,80%		K	
3.4.2.3	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	17,15	17,54	13,53	135,30%	H		
3.4.2.4	Penetapan APBD Tepat Waktu	Ya / Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	0,00%			M
3.4.2.5	Pertumbuhan 10 % per tahun (APBA, PAA, CSR dan Dana LSM)	%	10	-81,81	28,58	-	285,80%	H		
3.4.2.6	Persentase PAA terhadap pendapatan	%	32	28,41	28,66	25,6	80,00%		K	
3.4.3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**									
3.4.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,6	59,7	76,76	76,76	92,93%		K	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPA TAHUN	CAPAIAN TAHUN			TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2025			
			2025	2023	2024	2025	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8			
3.4.3.2	ASN yang mengikuti pendidikan formal	%	0,14	0,35	0,21	0,36	257,14%	H		
3.4.3.3	ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis	%	30,22	1,04	25,53	4,66	15,42%			M
3.4.3.4	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	%	62,13	2,8	61,66	4,02	6,47%			M
3.4.4	**Penelitian dan pengembangan**									
3.4.4.1	Penerapan SIDa:									
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	92,00	100	100	100	108,70%	H		
3.4.4.2	Indeks Inovasi Daerah Aceh	Indeks	60,00	55,38	55,87	55,87	93,12%		K	
3.4.5	**Pengawasan**									
3.4.5.1	Meningkatnya level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	3	3	100,00%	H		
3.4.6	**Sekretariat DPRA**									
3.4.6.1	Persentase Qanun yang ditetapkan	%	74,00	75	100	14	18,92%			M
3.5. PENDUKUNG								7	3	0
3.5.1	**Sekretariat Daerah**									
A	**Pemerintahan dan Otonomi Daerah**									
3.5.1.1	Pesentase penyelesaian pemasangan PBU terhadap Penetapan PBU prioritas pasca Permendagri batas daerah	%	2,50	2,30	6,90	6,9	276,00%	H		
3.5.1.2	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	%	83,00	20,00	60,00	82,00	98,80%		K	
B	**Ekonomi**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPA TAHUN	CAPAIAN TAHUN			TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2025			
			2025	2023	2024	2025	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8			
3.5.1.3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	39,08	42,69	42,87	52,34	133,93%	H		
3.5.1.4	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	Rasio	92,2	91,50	91,6	95,14	103,19%	H		
3.5.1.5	Pertumbuhan keuntungan perusahaan daerah (BUMA)	%	1,50	3,09	0,67	6,5	433,33%	H		
3.5.1.6	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Rasio	98	110	99	99	101,02%	H		
C	**Organisasi**									
3.5.1.7	Nilai SAKIP	Nilai	67,50	66,01	67,02	67,02	99,29%	H		
3.5.2	**Kesatuan Bangsa**									
	Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.5.2.1	Skor aspek hak-hak politik	Skor	65,70	74,47	76,1	76,1	115,83%	H		
3.5.2.2	Skor aspek lembaga demokrasi	Skor	75,90	73,12	72,21	72,21	95,14%		K	
3.5.2.3	Skor aspek Kebebasan Sipil	Skor	85,20	85,71	79,09	79,09	92,83%		K	
3.6. KEISTIMEWAAN ACEH								**3**	**2**	**5**
3.6.1	**Syariat Islam**									
3.6.1.1	Angka Melek Alquran	%	88,00	82,00	83,25	83,25	94,60%		K	
3.6.2	**Perdamaian Aceh**									
3.6.2.1	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial	%	26,41	16	0	20,78	78,68%			M
3.6.2.2	Pencegahan dan Mitigasi Konflik	Rasio	0,857	0,714	0,143	0,429	50,06%			M
3.6.3	**Adat Istiadat Aceh**									
3.6.3.1	Rasio Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Rasio	0,0065	0,0276	0,054	0,038	584,62%	H		
3.6.4	**Peran Ulama Aceh**									
3.6.4.1	Rasio fatwa dan tausiah yang diberikan untuk pembangunan Syariat Islam	Rasio	2,45	3,88	3,95	4,49	183,27%	H		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPA TAHUN	CAPAIAN TAHUN			TINGKAT CAPAIAN KINERJA s.d 2025			
			2025	2023	2024	2025	%	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8			
3.6.4.2	Sertifikasi Halal	Rasio	0,73	0,62	0,55	0,41	56,16%			M
3.6.5	**Pendidikan Khusus Aceh**									
3.6.5.1	Rasio Kebijakan/pertimbangan yang diterbitkan	Rasio	1,33	1,00	0,9	0,8	56,25%			M
3.6.6	**Zakat dan Infaq Aceh**									
3.6.6.1	Persentase Pendapatan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama	%	85,00	63,06	96,54	86,86	102,19%	H		
3.6.7	**Peran Lembaga Wali Nanggroe**									
3.6.7.1	Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	Indeks	90	85	71	71	78,89%			M
3.6.8	**Pendidikan Dayah**									
3.6.8.1	Persentase dayah yang mandiri	%	44,00	40,57	39	43	97,73%		K	

Sumber: Bappeda Aceh (diolah)
Keterangan Notifikasi:

Tercapai Kinerja 76% ≤ 99% Kinerja ≤ 75%

ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)
T = Tinggi (76% ≤ 90%)
S = Sedang (66% ≤ 75%)
R = Rendah (51% ≤ 65%)
SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

2.3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Keberhasilan pencapaian target SPM tidak hanya diwujudkan oleh Perangkat Daerah (PD) yang menangani tugas dan fungsi urusan pemerintahan wajib tersebut, namun juga didukung oleh semua pihak, baik dari berbagai unsur Pemerintahan sebagai pelaksana maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan dukungan semua pihak diharapkan target SPM yang telah ditetapkan dapat tercapai seluruhnya. Karena pencapaian target SPM merupakan komitmen Pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pencapaian target SPM juga

dapat turut menyumbang upaya Pemerintah dalam meningkatkan taraf kehidupan dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

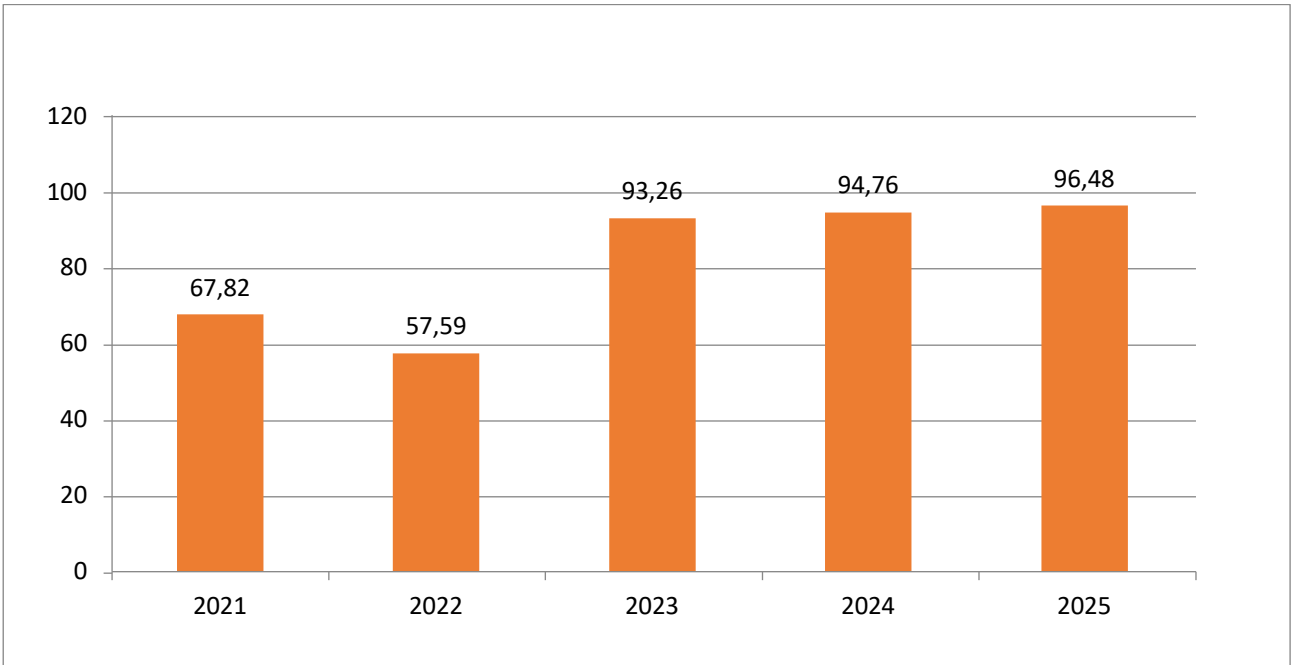

Sumber: Sekretariat Bersama SPM Kemendagri, 2021-2025 (data diolah)

Gambar 2. 122
Capaian SPM Provinsi Aceh Tahun 2021-2025

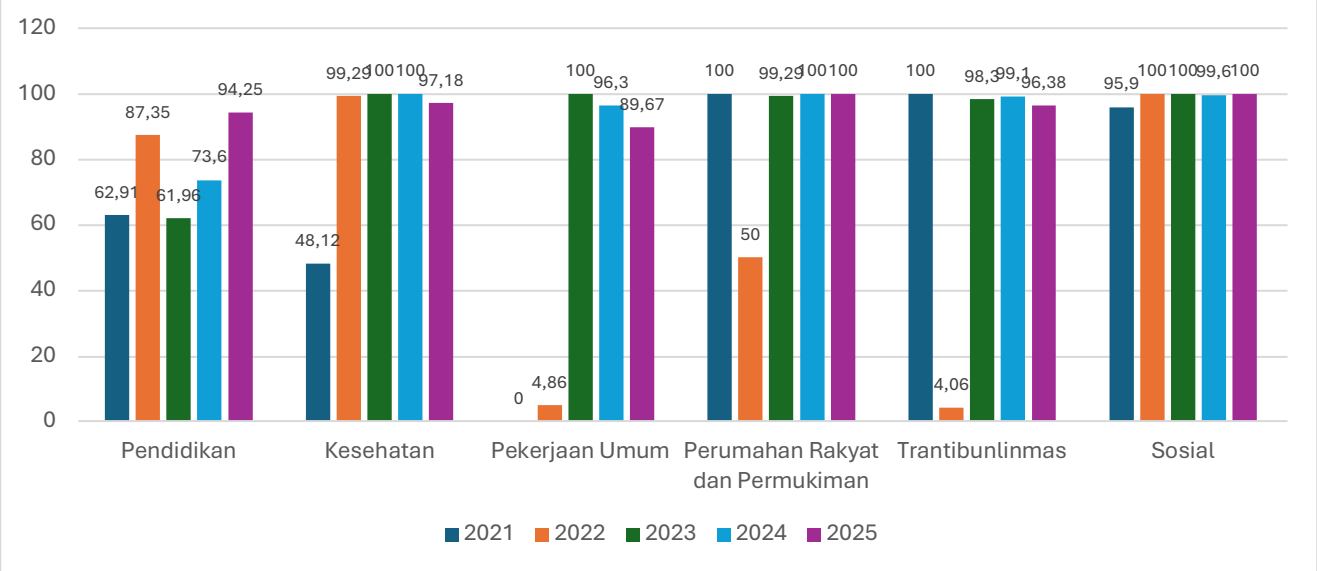

Sumber: Sekretariat Bersama SPM Kemendagri, 2021-2025 (data diolah)

Gambar 2. 123
Capaian SPM Provinsi Aceh Per Bidang Tahun 2021-2025

Dari Gambar 2.119 dan Gambar 2.120 diatas dapat dilihat capaian SPM mengalami fluktuasi baik itu di bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU); Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pera); Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) maupun Sosial. Pada Tahun 2021 capaian SPM Provinsi Aceh berada pada angka 67,82% dan turun pada Tahun 2022 yaitu 57,59%. Pada Tahun 2023 meningkat menjadi 93,26% , Tahun 2024 sebesar 94,76% dan terus meningkat pada Tahun 2025 sebesar 96,48%.

Capaian terbaik SPM terdapat pada Bidang Sosial dimana telah mencapai 100% di Tahun 2025, pada Tahun 2024 sebesar 99,6%, Tahun 2023 dan 2022 sebesar 100% dan Tahun 2021 sebesar 95,9%. Diikuti dengan bidang sosial yang juga mengalami fluktuasi, dan pada Tahun 2025 berada pada angka 100%. Sedangkan, capaian SPM terendah pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU), dimana mendapat nilai terendah dalam dua tahun terakhir, namun mengalami kenaikan secara signifikan di angka 100% pada tahun 2023 dan kembali turun pada tahun 2024 di angka 96,34% dan Tahun 2025 sebesar 89,67%.

Berdasarkan capaian SPM Se-Aceh berbasis aplikasi Tahun 2025 Kabupaten/Kota yang mencapai 100% untuk semua bidang urusan (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum (PU), Perumahan Rakyat, Tamtibunlinmas dan Sosial) yaitu Kota Langsa, diikuti Kabupaten Aceh Utara sebesar 99.69% dan Kabupaten Aceh Tenggara sebesar 99%, sementara Kab/Kota lainnya telah melakukan pelaporan walaupun setiap bidangnya masih belum terlaksana 100%. Gambar 2.3 berikut ini memberikan gambaran Capaian SPM Seluruh Bidang Se-Aceh.

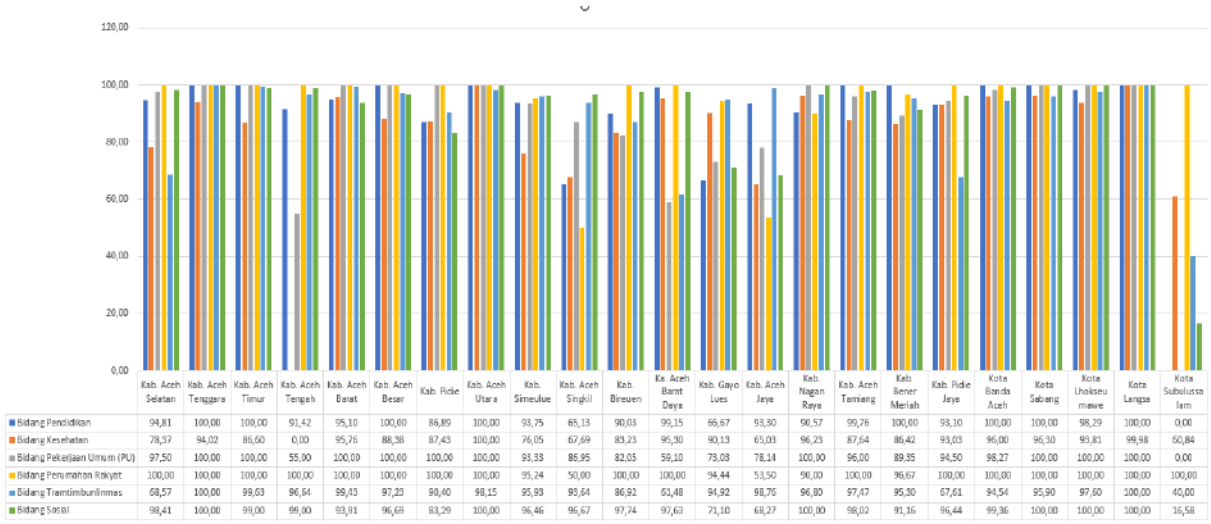

	Kab. Aceh Selatan	Kab. Aceh Tenggara	Kab. Aceh Timur	Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Barat	Kab. Aceh Besar	Kab. Pidie	Kab. Aceh Utara	Kab. Simeulue	Kab. Aceh Singkil	Kab. Bireuen	Ka. Aceh Barat Daya	Kab. Gayo Lues	Kab. Aceh Jaya	Kab. Nagan Raya	Kab. Aceh Tamiang	Keb. Bener Meriah	Kab. Pidie Jaya	Kota Banda Aceh	Kota Sabang	Kota Lhokseu mawe	Kota Langsa	Kota Subulussa lam
Bidang Pendidikan	94,81	100,00	100,00	91,42	95,10	100,00	86,89	100,00	93,75	65,13	90,03	99,15	66,67	93,30	90,57	99,76	100,00	93,10	100,00	100,00	98,29	100,00	0,00
Bidang Kesehatan	78,57	94,02	86,60	0,00	95,76	88,38	87,43	100,00	76,05	67,69	83,23	95,30	90,13	65,03	96,23	87,64	86,42	93,03	96,00	96,30	93,81	99,98	60,84
Bidang Pekerjaan Umum (PU)	97,50	100,00	100,00	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,33	86,95	82,05	59,10	73,03	78,14	100,00	96,00	89,35	94,50	98,27	100,00	100,00	100,00	0,00
Bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,24	50,00	100,00	100,00	94,44	53,50	90,00	100,00	96,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bidang Tramtimbunlinmas	68,57	100,00	99,63	96,64	99,43	97,23	90,40	98,15	95,93	93,64	86,92	61,48	94,92	98,76	96,80	97,47	95,30	67,61	94,54	95,90	97,60	100,00	40,00
Bidang Sosial	98,41	100,00	99,00	99,00	93,91	96,69	83,29	100,00	96,46	96,67	97,74	97,63	71,10	68,27	100,00	98,02	91,16	96,44	99,36	100,00	100,00	100,00	16,58

Sumber: Sekretariat Bersama SPM Kemendagri, 2025 (data diolah)

Gambar 2. 124
Capaian SPM Seluruh Bidang Se-Aceh e-SPM Tahun 2025

Dalam proses capaian SPM, secara umum terdapat beberapa permasalahan dan kendala yaitu sistem perencanaan dan penganggaran kegiatan/program belum sepenuhnya berbasis SPM; belum semua indikator SPM dapat dengan mudah diintegrasikan dengan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah;

Permasalahan teknis pada pengisian dalam e-SPM belum dapat mengakomodir laporan secara faktual.

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara capaian kinerja dengan target kinerja pembangunan yang telah direncanakan.

2.4.1. Implementasi Keistimewaan Aceh Belum Optimal terutama pelaksanaan otonomi khusus Aceh, Syariat Islam, Korban Konflik serta perdamaian.

1. **Implementasi Dinul Islam Aceh belum optimal**, hal ditandai dengan Indeks Pembangunan Syariat Aceh Tahun 2024 masih sekitar sebesar 87,01 dengan rincian dimensi, yaitu aqidah 87,01, akhlak 82,50, melek Al-Qur'an 83,25, manajemen masjid 83,47, ZIS 84,03, hukum jinayat 83,51 dan Lembaga Keuangan Syariah 83,58.
2. **Belum optimalnya pelaksanaan pendataan, pelestarian dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan** yang terdiri dari Manuskrip, Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional, dan Cagar Budaya. Pudarnya pelaksanaan adat istiadat meliputi adat, hukum adat, lembaga adat, dan kapasitas tokoh adat, serta penguatan kembali sistem peradilan adat di gampong dan mukim hal ini ditandai dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Aceh Tahun 2023, yaitu sebesar 55,33 dan nasional 57,13 dan berada pada peringkat 22 Nasional. Disamping itu, masih adanya potensi konflik antara agama terutama di perbatasan dan pertentangan aliran dalam agama Islam.
3. **Belum optimalnya Aspek pendapatan dan Pendistribusian Baitul Mal**, hal ini ditandai dengan besarnya SiLPA dari Ziswaf pada Tahun 2024 ini hampir mencapai Rp. 95,54 Milyar (meningkat 7 persen dibandingkan dengan Tahun 2023). Jumlah ini jika dibandingkan dengan potensi Ziswaf masih tergolong rendah yang disebabkan oleh masih kecilnya pembayaran zakat oleh muzzaki dibandingkan mereka yang sudah mencapai masa nisab. Disamping itu, masih terdapat kendala dalam dengan regulasi dalam penyaluran dan belum optimalnya dalam proses pendistribusian. Selanjutnya, beberapa masalah utama berkenaan dengan pengelolaan aset wakaf seperti tanah wakaf yang tidak produktif, adanya sengketa tanah wakaf, terbatasnya tanah wakaf yang bersertifikat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan minimnya koordinasi antar lembaga terkait, dan permasalahan lainnya dalam pengelolaan oleh Baitul Mal di Aceh dan Kabupaten/Kota.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan implementasi Keistimewaan Aceh belum optimal, antara lain, belum optimalnya kesepakatan politik yang kuat

antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh. Ketidaksepakatan politik atau konflik kepentingan antara kedua belah pihak dapat menghambat proses implementasi dan menyebabkan stagnasi, sumber daya manusia yang memadai, keuangan, dan infrastruktur yang tidak memadai. Kurangnya sumber daya dan kapasitas di tingkat pemerintah daerah Aceh dapat menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan keistimewaan. Ketidakjelasan dalam regulasi dan kebijakan terkait dengan keistimewaan Aceh dapat mempersulit implementasi. Kurangnya panduan yang jelas dan konsisten dari pemerintah pusat mengenai otonomi khusus Aceh dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di tingkat lokal. Implementasi Keistimewaan Aceh mungkin menghadapi resistensi atau penolakan dari pihak-pihak eksternal, termasuk kelompok-kelompok kepentingan di luar Aceh. Faktor-faktor ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan tertentu yang diusulkan atau dijalankan oleh pemerintah Aceh. Praktik korupsi dan tata kelola yang buruk di tingkat lokal dapat menghambat implementasi kebijakan dan program-program yang terkait dengan keistimewaan Aceh. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pemborosan anggaran. Beberapa kebijakan atau program yang terkait dengan keistimewaan Aceh mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Ketidaksesuaian ini dapat mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam implementasi, sehingga menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan.

Untuk meningkatkan implementasi Keistimewaan Aceh, penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh untuk bekerja sama dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, termasuk dengan memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperjelas regulasi dan kebijakan terkait. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses implementasi juga merupakan kunci keberhasilan.

Jika implementasi Keistimewaan Aceh, termasuk pelaksanaan otonomi khusus, penerapan syariat Islam, dan penanganan korban konflik, belum optimal, beberapa akibat yang mungkin timbul antara lain: Ketidakpuasan Masyarakat di kalangan masyarakat Aceh. Jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak mampu memenuhi harapan atau kebutuhan masyarakat, hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Implementasi yang tidak optimal dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan kebijakan di Aceh. Kurangnya kejelasan dalam regulasi dan kebijakan terkait syariat Islam atau otonomi khusus Aceh dapat menghambat kepastian hukum dan menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. Mengakibatkan ketimpangan dalam pembangunan antara daerah yang satu dengan yang lain. Daerah yang mendapatkan manfaat lebih besar dari kebijakan-kebijakan tersebut mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih cepat, sementara daerah

lain dapat tertinggal. Kurangnya Pemenuhan Hak Asasi Manusia, kebijakan-kebijakan tersebut tidak memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Penegakan syariat Islam yang tidak memenuhi standar hak asasi manusia atau perlakuan yang tidak adil terhadap korban konflik dapat menciptakan kerentanan dan ketidakadilan bagi sebagian masyarakat, Ketidakstabilan Politik dan Sosial Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, ketegangan antar-atau dalam daerah, dan konflik kepentingan politik dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial di wilayah tersebut.

Kerugian Ekonomi dan Pemborosan Sumber Daya, program-program yang tidak efektif atau tidak efisien dapat menyia-nyiakan anggaran publik yang berharga, sementara peluang-peluang pembangunan yang terlewatkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh untuk memastikan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat serta memperbaiki hambatan-hambatan yang menghambat pencapaian tujuan tersebut.

2.4.2. Pertumbuhan Ekonomi Aceh belum maksimal dan fluktuatif:

1. **Perkembangan laju perekonomian Aceh mengalami fluktuasi dan masih kurang menggembirakan**, hal ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2024 sebesar 4,66 persen sedangkan nasional 5,03 persen.
2. **Inflasi Aceh masih belum stabil**, hal ini ditandai tahun 2021 angka inflasi Aceh sebesar 2,24 persen, sementara itu di tahun 2022 tercatat sebesar 5,89 persen, di tahun 2023 inflasi yang dapat dikendalikan sebesar 1,53 persen , namun tahun 2024 meningkat kembali menjadi 2,17 persen.
3. **Ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tinggi dan dinamis**, hal ini ditandai dengan rasio gini tahun 2020 sebesar 0,319 naik menjadi 0,323 pada tahun 2021, sementara itu pada tahun 2024 turun menjadi 0,294.
4. **Belum optimalnya iklim berusaha untuk usaha kecil dan mikro**. Hal ini ditandai Masih rendahnya persentase jumlah usaha kecil dan menengah, termasuk jumlah koperasi aktif lintas kabupaten/kota yang hanya mencapai 63 persen dan diharapkan mencapai 67 persen pada tahun 2045,
5. **Masih rendahnya rasio kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh** yaitu sebesar 1,8 persen yang akan ditingkatkan mencapai 1,93 persen,
6. **Masih minimnya pengetahuan dan pemanfaatan ekonomi digital,** terutama bagi pengembangan koperasi, ekonomi kreatif, dan UMKM, Masih rendahnya Proporsi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB,
7. **Belum optimalnya *Return On Asset* (ROA) BUMD** yang hanya 2 persen. Walaupun secara Indonesia ini sudah baik, namun angka idealnya adalah 5-20 persen.

8. **Pembangunan koperasi masih lemah**, hal ini ditandai dengan Masih rendahnya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB yang hanya berskisar 1 persen atau Rp. 1.564.088 juta rupiah sedangkan nasional sudah mencapai Rp. 182.352.359 juta rupiah.
9. **Industri Pengolahan dan pariwisata masih lemah**, hal ditandai dengan Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Aceh masih sangat rendah dan Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi yang hanya 1,5 (%) dimana komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan langsung dijual tanpa melalui proses hilirisasi.

   Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2024 baru sekitar 4,71 persen. Rendahnya pertumbuhan investasi di sektor industri, khususnya pengolahan hasil komoditi unggulan dan belum adanya kawasan industri yang representatif dan produktif.
10. **Iklim investasi belum baik**, hal ini ditandai dengan masih minimnya Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB dan Nilai investasi Aceh masih sangat rendah dengan realisasi investasi pada tahun 2024 sebesar 9,47 triliun. Masih rendahnya nilai investasi tersebut dikarenakan belum optimalnya Kawasan Peruntukan Investasi (KPI) diantaranya : a) Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong; b) Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang; c) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun; dan d) Kawasan Industri Perikanan Lampulo.
11. **Daerah rawan pangan masih tinggi**. Hal ini ditandai dengan masih tingginya persentase daerah rawan pangan di Aceh tahun 2024 yang mencapai 11,42 persen.
12. **Belum memadai fasilitas infrastruktur ketersediaan dan distribusi pangan**. Menurut data terakhir, skor PPH ketersediaan dan konsumsi Aceh tahun 2019 sebesar 66 dan belum mencapai angka 100.
13. **Produktivitas Pertanian semakin menurun**, hal ini ditandai dengan produktivitas padi atau bahan pangan utama bahan lokal yang masih berkisar 5,6 ton per hektar di tahun 2021 turun menjadi 5,5 ton/ha pada tahun 2022. Produksi padi juga mengalami penurunan di tahun 2013 sebanyak 1.937.889,5 ton menjadi 1.533.138,1 ton di tahun 2022. Dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 20,88 persen dalam kurun waktu 10 tahun;

    Luas panen juga mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu pada tahun 2013 luas panen padi Aceh sebesar 411.441,51 ha menjadi 276.639,86 pada tahun 2022 atau terjadi penyusutan sebesar 32,76 persen;
14. **Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan**. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya Nilai Tukar Petani Aceh dengan nasional pada tahun 2024 yaitu

masing-masing 119,25 dan 120,30 dan belum berjalannya industri pengolahan untuk hasil pertanian.

15. **Kesejahteraan Petani belum maksimal**, hal ini ditandai dengan Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Peternak (NTPt) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih sekitar 106,81.

2.4.3. Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola pemerintahan Aceh:

1. **Reformasi Hukum Aceh masih belum optimal,** hal ini ditandai capaian Indeks Reformasi hukum Aceh tahun 2025 adalah 77,70 (kategori baik).
2. **Pemanfaatan Digital untuk pelayanan publik belum optimal, Hal ini ditandai** Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Aceh sebesar 3.64 (sangat baik) pada tahun 2024 sedangkan yang paling tinggi adalah Jawa Barat sebesar 4,73 (memuaskan). Aceh tidak masuk dalam sepuluh besar pemanfaatan IT ini.
3. **Masih belum optimalnya SDM ASN,** hal ini ditandai dengan Indeks Profesionalitas ASN 79,25 (2025).
4. **Masih belum optimalnya Integritas Pemerintah Aceh,** hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Integritas Nasional 72,43 (2021) sedangkan pada tahun 2023 tercatat menurun menjadi 70,97.
5. **Pelaksanaan otonomi khusus Aceh belum optimal** yang diindikasikan belum diaplikasikan secara penuh peraturan-peraturan hukum yang diatur dalam UUPA dan Mulai tahun 2028 Pemerintah Aceh tidak lagi menerima dukungan Dana Otonomi Khusus.
6. **Belum terintegrasinya data dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan**. SIPD masih mencakup perencanaan dan penganggaran sedangkan integrasi dengan monitoring dan evaluasi belum berjalan.
7. **Kemandirian Fiskal Masih Rendah**. Persentase kemandirian fiskal tahun 2024 sebesar 28,67 persen (*unaudited*) atau tergolong dalam kriteria rendah. Pendanaan pembangunan masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat (dana transfer) sebesar 71,31 persen dari total APBA yang menandakan kapasitas fiskal Aceh masih rendah, berkurangnya Dana Otsus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Aceh terutama sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur. Penurunan tersebut mulai tahun 2023 sebesar 50 persen (1 persen dari DAU Nasional) dan pada tahun 2028 menjadi 0 persen, banyak potensi pembiayaan dan kemitraan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya (diantaranya PEN, TJSLP, CSO, dan PPP).

8. **Pembangunan Sumber daya ASN belum optimal**, hal ini ditandai belum optimalnya pelaksanaan Pendidikan pelatihan teknis fungsional aparatur Pemerintah Aceh hanya 3,35 persen.
9. **Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset** untuk mendukung perencanaan pembangunan Aceh. Hal ini dikarenakan penelitian dan pengembangan tidak fokus pada pelayanan Pemerintah daerah dan masih kecilnya penggunaan hasil penelitian dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran.
10. **Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi** melalui penguatan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi dan birokrasi belum berjalan secara efektif dan efisien.
11. **Belum optimalnya tingkat Inovasi Daerah**. Hal ini ditandai dengan pencapaian nilai indeks inovasi daerah Aceh tahun 2024 yang baru mencapai sebesar 55,87 pada level "inovatif" sedangkan level tertinggi adalah "sangat inovatif" (nilai indeks 100-60,01). Sementara itu, Sumatera Barat menduduki peringkat pertama Indeks Inovasi Daerah dengan nilai indeks sebesar 88,92 (katagori "Sangat Inovatif").
12. **Pelayanan dasar belum optimal**, hal ini ditandai pencapaian indeks pencapaian SPM belum mencapai 100 persen. Tahun 2025 Indeks Pemenuhan SPM Aceh sebesar 96,48 persen..
13. **Pembangunan di gampong masih belum optimal**, yang ditandai dengan masih adanya desa tertinggal dan sangat tertinggal. Pada Tahun 2025 jumlah desa tertinggal sebanyak 446 dan sangat tertinggal 33 gampong.
14. **Belum tuntasnya rekonsiliasi dan penanganan korban pasca konflik**. Hal ini ditandai belum tersedianya data korban konflik yang akurat, sehingga pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial korban konflik yang dilaksanakan selama ini belum memberikan hasil yang maksimal.
15. **Masih terdapat potensi lahan HPH/HGU yang tidak dimanfaatkan serta memiliki potensi yang besar untuk dialihfungsikan kepada daerah.** Hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan skala ekonomi masyarakat pengembalian lahan tersebut dapat dilakukan melalui kerangka UUPA guna menerbitkan sertifikat tanah untuk masyarakat (redistribusi).
16. **Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** seperti cakupan akta kelahiran yang masih 97,65 persen pada tahun 2025, sementara yang diharapkan cakupan kepemilikan tersebut adalah sebesar 100 persen. Demikian pula dengan

cakupan akta kematian yang capaiannya masih rendah dan data kependudukan *by name by address* perlu diperbaharui.

2.4.4. Masih tingginya ketimpangan antar wilayah:

1. **Belum optimalnya interkoneksi transportasi di Aceh**, hal ini ditandai masih rendahnya kondisi kemantapan jalan Provinsi, yaitu sebesar 65,56 persen (2025). Sedangkan kondisi mantap jalan nasional di wilayah Aceh sudah mencapai sebesar 91,41 persen;
2. **Belum optimalnya pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRW**; hal ini ditandai belum optimalnya pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Bandar Aceh Darussalam, Kawasan Hutan Aceh, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
3. **Penanganan perumahan dan permukiman masih rendah**, hal ini ditandai dengan masih luasnya permukiman kumuh di Aceh mengalami peningkatan dari 7.526,51 ha Tahun 2023 menjadi 7.627,54 ha di Tahun 2024, Capaian rumah tangga dengan akses air minum layak Aceh Tahun 2025 sebesar 92,06 persen, masih di bawah capaian nasional sebesar 93,22 persen; dan Rumah tangga dengan akses sanitasi layak Aceh adalah 82,21 persen masih di bawah capaian nasional sebesar 85,37 persen pada Tahun 2025;
4. **Infrastruktur dan pelestarian sumber daya air masih belum optimal**, Kondisi infrastruktur dan pelestarian sumber daya air di Aceh masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan rendahnya infrastruktur SDA dalam kondisi baik (60,39% pada 2022), menurunnya debit air andalan, sebagian daerah irigasi yang tidak berfungsi optimal (hanya 82,56% dari luas 65.409 Ha yang berfungsi baik), serta terbatasnya penanganan banjir yang baru mencakup 38,21% dari potensi genangan.

   Beberapa sungai mengalami degradasi dan sedimentasi, sehingga diperlukan penanganan menyeluruh dari hulu hingga hilir: rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis di hulu, pengawasan pemanfaatan sungai serta pembangunan tanggul di bagian tengah, dan pengerukan sedimentasi di hilir yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan perekonomian.

   Permasalahan juga muncul akibat tingginya sedimentasi di muara sungai (antara lain di Krueng Baro, Krueng Ulim, Krueng Pante Raja, Krueng Peudada, Krueng Samalanga, Krueng Jeunib, Krueng Idi, Krueng Langsa, Krueng Tamiang, Krueng Keureuto, Krueng Pase, Krueng Teunom, Krueng Seunagan,

Krueng Tripa, Krueng Singkil, Krueng Labuhan Haji, Krueng Kluet, dan Krueng Sarah), yang menghambat aliran banjir dan lalu lintas kapal nelayan.

Selain itu, pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu karena adanya perbedaan kewenangan BPDAS (BPDAS Krueng Aceh dan BPDAS Sei Wampu). Oleh karena itu, permasalahan utama yang perlu ditangani adalah: 1. Degradasi daerah aliran sungai; 2. Tingginya sedimentasi di muara sungai; 3. Belum terwujudnya pengelolaan sungai secara terpadu dari hulu hingga hilir

5. **Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan**, baik darat, laut dan udara serta belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat. Rasio Konektivitas Daerah Aceh pada Tahun 2024 sebesar 0,73, capaiannya masih dalam katagori rendah.
6. **Kawasan transmigrasi belum optimal**, hal ini dikarenakan banyaknya kawasan transmigrasi nasional maupun lokal yang ditelantarkan.

Ketimpangan antara daerah di Aceh dapat tinggi karena beberapa faktor, diantaranya:

a) Ketidakmerataan Pembangunan Infrastruktur. Beberapa daerah mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur seperti jalan raya, listrik, air bersih, dan telekomunikasi daripada daerah lain. Ketidakmerataan dalam pembangunan infrastruktur ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi antar daerah.

b) Ketergantungan pada Sektor Ekonomi Tertentu, dimana Kabupaten/kota yang tergantung pada sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian atau perikanan, mungkin mengalami ketimpangan ekonomi jika sektor tersebut tidak berkembang dengan merata di seluruh wilayah Aceh. Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kualitas tanah, akses pasar, dan perubahan iklim.

c) Alokasi anggaran yang tidak merata dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat menyebabkan ketimpangan antara daerah. Daerah-daerah yang mendapatkan lebih banyak dana dapat mengalokasikan sumber daya tersebut untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program ekonomi, sementara daerah-daerah lain mungkin terbatas dalam kemampuan mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

d) Kurangnya Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan. Ketimpangan pendidikan dan kesehatan antara daerah di Aceh juga dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. Daerah yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang baik mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

e) Perbedaan dalam Kebijakan Pembangunan Regional. Perbedaan dalam kebijakan pembangunan regional antara pemerintah daerah dapat memperburuk ketimpangan antar daerah. Daerah-daerah yang menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan pro-poor mungkin dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, sementara daerah-daerah lain yang fokus pada kepentingan kelompok tertentu atau pengembangan infrastruktur yang tidak merata dapat memperburuk ketimpangan.

Untuk mengurangi ketimpangan antar daerah di Aceh, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, mendistribusikan sumber daya secara lebih merata, memperkuat infrastruktur, dan mendorong diversifikasi ekonomi di seluruh wilayah Aceh.

Selanjutnya, ketimpangan yang tinggi juga dapat menciptakan ketegangan sosial antara daerah yang berbeda, terutama jika ada persepsi ketidakadilan dalam alokasi sumber daya atau pembangunan oleh pemerintah. Ketegangan sosial ini dapat meningkatkan risiko konflik antar-atau dalam daerah, mengganggu stabilitas politik dan sosial, dan menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Aceh. Daerah-daerah yang miskin atau terpinggirkan mungkin tidak mampu berkontribusi sepenuhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi potensi pembangunan regional dan nasional secara keseluruhan, dapat mendorong migrasi tenaga kerja dari daerah-daerah yang miskin ke daerah-daerah yang lebih makmur, menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi tenaga kerja dan meningkatkan tekanan pada infrastruktur dan layanan di daerah tujuan.

Ketika ketimpangan antar daerah di Aceh tinggi, dapat timbul sejumlah akibat yang merugikan, seperti :

a. Peningkatan Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi, polarisasi ekonomi dan sosial antara Kabupaten/kota yang kaya dan miskin di Aceh. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi, mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang lebih besar, dan memperdalam ketidaksetaraan sosial.

b. Kurangnya Akses Terhadap Layanan Dasar. Daerah-daerah yang miskin atau terpinggirkan mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Ketidakmerataan dalam akses terhadap layanan dasar ini dapat meningkatkan risiko kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan kesehatan antara daerah.

c. Ketergantungan pada Bantuan dan Dana Pemerintah: Daerah-daerah yang miskin atau terpinggirkan mungkin menjadi lebih tergantung pada bantuan pemerintah atau dana pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Ketergantungan ini dapat menghambat pembangunan ekonomi

yang berkelanjutan dan meningkatkan kerentanan ekonomi daerah terhadap perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi global.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Aceh untuk mengurangi ketimpangan antar daerah dengan menerapkan kebijakan dan program yang memperkuat akses terhadap layanan dasar, meningkatkan investasi dalam pembangunan ekonomi lokal, memperkuat infrastruktur, dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Aceh.

2.4.5. Sumber Daya Manusia masih rendah:

1. **Sumber daya manusia masih rendah dan adanya diparitas yang tinggi antar kabupaten/kota**, hal ini ditandai dengan IPM Aceh sebesar 76,23 persen (2025) dan yang paling tinggi adalah Banda Aceh 89,55 persen dan yang paling rendah Subulussalam sebesar 71,63 persen.
2. **Mutu guru belum optimal dan merata**. Guru tersertifikasi pada jenjang pendidikan SMK sudah mencapai 63,13 persen atau 6.062 orang, sedangkan pada jenjang pendidikan SMA guru yang tersertifikasi mencapai 64,20 persen atau 12.279 orang dan pada SLB guru yang tersertifikasi mencapai 50 persen atau 883 orang.
3. **Masih rendahnya APS anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas (69,72 persen)**, hal ini menunjukkan masih banyak anak penyandang disabilitas yang belum terjangkau akses pendidikan.
4. **Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh**, dimana Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Aceh tahun 2025 masih sebesar 45,29 persen. Namun angka ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. **Angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah dan pendidikan dasar**. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu sebesar 34,62 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 17,54 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022 dan Agustus 2023.
6. **Angka ketergantungan penduduk masih tinggi,** hal ini ditandai dengan rasio ketergantungan hidup di Aceh Tahun 2024 tercatat mencapai 48,61 persen lebih baik dari nasional 46,80 persen, namun Aceh perlu mengoptimalkan penurunan angka ini agar masyarakat semakin produktif.
7. **Tingkat Pengangguran Terbuka (%) masih tinggi, yaitu sebesar 5,75 persen (2024) sedangkan nasional sebesar** 4,91 persen.

8. **Tingkat Partisipasi** Angkatan Kerja Perempuan Aceh (%) 49,62 sedangkan nasional 55,41 (2024).
9. **Masih rendahnya kemandirian dayah secara ekonomi**. Tingginya alokasi bantuan sarana prasarana untuk dayah sebanyak 1.827 pada tahun 2025 belum diimbangi dengan penguatan kemandirian ekonomi dan pembekalan life skill santri, sehingga berpotensi menimbulkan ketergantungan fiskal jangka panjang serta lemahnya daya saing lulusan.
10. **Derajat kesehatan masyarakat belum maksimal**, hal ini ditandai dengan Usia Harapan Hidup Aceh sebesar 73,48 persen masih di bawah rata-rata nasional yaitu 74,47 persen pada tahun 2025;
11. **Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil belum optimal**, hal ini ditandai angka Kematian Ibu tahun 2025 di Aceh 188/100.000 kelahiran hidup, kondisi ini belum memenuhi target.
12. **Masih tingginya prevalensi stunting,** data terakhir tahun 2024 menunjukkan angka sebesar 28,6 persen, masih diatas angka Nasional 19,8 persen;
13. **Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan** di tingkat provinsi yang masih bertumpu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.
14. **Penduduk miskin Aceh masih tinggi**, dimana angka kemiskinan Aceh sebesar 12,22 (September 2025) sedangkan Nasional sebesar 8,25 %, sedangkan angka kemiskinan ekstrem Aceh sebesar 0,85 %. (2025)
15. **Pendapatan perkapita Aceh masih rendah**, hal ini ditandai Tahun 2024 sebesar Rp. 39.16 sedangkan nasional Rp. 71.03, pendapatan perkapita penduduk Aceh setengah dari rata-rata pendapatan **perkapita** penduduk Indonesia.
16. **Ketimpangan Gender dan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi**. Hal ini ditandai masih rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik, terutama dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Partisipasi perempuan pada lembaga legislatif di tingkat Aceh sebanyak 11 persen sedangkan di tingkat nasional sebanyak 21 persen, masih rendahnya indeks pemberdayaan gender dibandingkan dengan nasional, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh Tahun 2024 sebesar 69,92 sedangkan nasional telah mencapai 76,90. Sementara itu Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah lebih baik dibandingkan nasional, dimana tahun 2024 IPG Aceh 92,64 sedangkan nasional 91,85.
17. **Pembangunan keluarga masih perlu ditingkatkan,** hal ditandai dengan pembangunan indeks pembangunan keluarga yang belum maksimal.
18. **Pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan belum maksimal**, hal ini ditandai dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2024 yaitu

sebesar 58,00 yang sedikit turun dari capaian tahun sebelumnya. Sementara itu indeks Pembangunan Olahraga pada tahun 2024 sebesar 0,464.

19. **Daya tampung dalam panti masih belum optimal** dibandingkan dengan jumlah PPKS yang ada di Aceh, sehingga pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Aceh belum terpenuhi. Kapasitas Panti Sosial yang ada sangat terbatas belum bisa menampung untuk menangani semua permasalahan PPKS di Aceh.
20. **Penanganan Disabilitas belum maksimal,** penanganan masalah disabilitas masih terkendala fasilitas penunjang baik di panti sosial maupun didalam Masyarakat, sehingga menghambat disabilitas belum bisa secara maksimal menghidupi dirinya sendiri. Hal ini ditandai oleh masih rendahnya persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, yaitu hanya 20 persen dari jumlah 8,361 PPKS.
21. **Kesejahteraan pekerja belum maksimal**, hal ini ditandai oleh masih redahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 20,86 persen. Sedangkan nasional sudah mencapai 26,97 persen.

Penyebab masih rendahnya SDM Aceh adalah adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, meskipun Aceh memiliki banyak sekolah dan lembaga pendidikan, tidak semua wilayah memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Wilayah pedalaman atau terpencil mungkin menghadapi kendala dalam hal infrastruktur pendidikan, kurangnya tenaga pendidik yang berkualifikasi, dan kurangnya dukungan untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Konflik bersenjata yang telah lama berlangsung di Aceh telah mengganggu proses pembangunan SDM. Konflik ini dapat mengganggu akses pendidikan, menghambat pembangunan infrastruktur pendidikan, dan menyebabkan gangguan pada proses belajar-mengajar. Pembangunan SDM memerlukan investasi yang signifikan dari pemerintah dalam hal pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi masih belum fokus dan masif. Namun, Aceh mungkin mengalami kurangnya investasi dan dukungan yang memadai dari pemerintah, yang dapat menghambat kemajuan dalam pembangunan SDM.

Kondisi Kesehatan masyarakat yang buruk, termasuk tingginya angka kematian ibu dan anak, stunting, serta prevalensi penyakit menular seperti malaria dan tuberkulosis, dapat menghambat pembangunan SDM di Aceh. Kondisi kesehatan yang buruk dapat menghambat partisipasi dalam pendidikan dan produktivitas tenaga kerja. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan, beberapa komunitas mungkin kurang menyadari pentingnya pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang ekonomi. Kesadaran akan pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan perlu ditingkatkan di Aceh. Untuk meningkatkan

pembangunan SDM di Aceh, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, meningkatkan kesehatan masyarakat, memperkuat infrastruktur pendidikan, dan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Penyebab masih tingginya disparitas adalah karena konflik dan juga bencana alam, akses layanan dasar yang belum merata, terkendalanya dengan infrastruktur dan akses tranportasi yang belum maksimal, Ketidakseimbangan dalam investasi pembangunan manusia antara wilayah-wilayah di Aceh, Faktor-faktor sosial dan budaya seperti ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan tradisi yang membatasi akses perempuan dan kelompok minoritas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga dapat menyebabkan disparitas dalam IPM di Aceh.

2.4.6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah;

1. Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana **masih rendah, hal ini ditandai** dengan **masih tingginya indeks Risiko Bencana Aceh mencapai 144,30/tinggi (2024) bandingkan nasional adalah sebesar 128,5.**
2. **Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan hidup.** hal ini ditandai dengan Indeks kualitas lingkungan hidup Aceh Tahun 2024, masih sebesar 79,66 walaupun sedikit lebih tinggi dari nasional (73,53), dengan rincian kualitas air 63,25 persen, tutupan lahan 76,66 persen, indeks kualitas udara 92,81 persen, indeks kualitas air laut sebesar 83,24 persen. disamping itu, selama periode Tahun 2003-2022 peningkatan suhu udara sebesar 0.4°C.
3. **Pembangunan kehutanan belum maksimal**, hal ini ditandai dengan masih tingginya deforestasi hutan di Aceh akibat permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan, dan pembalakan liar selama Tahun 2019 - 2020 terdapat seluas ± 1.956,83 hektar tutupan hutan yang hilang atau terdeforestasi, meningkatnya konflik satwa liar dengan manusia sebanyak 275 kasus pada Tahun 2020-2022 terutama dengan Gajah, harimau, orang utan, dan badak Sumatera, Luas lahan kritis di Aceh semakin meningkat dimana pada Tahun 2021 seluas 262.728 ha menjadi 264.922,53 pada Tahun 2022; dan Kurangnya penegakan hukum secara terbuka dan tuntas dalam penanganan kejahatan kehutanan.
4. **Pembangunan energi dan Sumber Daya Mineral belum optimal**, hal ini ditandai dengan rasio elektrifikasi Aceh Tahun 2024 yang belum mencapai 100 persen (99,99 persen) dari yang diharapkan saat ini. Disamping itu, belum optimalnya pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi panas bumi, energi angin (bayu), dan juga energi alternatif lainnya dari bahan nabati.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana yang masih rendah di Aceh dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam di kalangan masyarakat dan pengambil keputusan dapat menjadi faktor utama yang menghambat upaya untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Praktek-praktek eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti penebangan hutan liar, overfishing, atau penambangan yang tidak terkendali, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan menimbulkan dampak jangka panjang bagi keberlanjutan ekosistem. Praktik korupsi dan tata kelola yang buruk dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menghambat upaya untuk melaksanakan kebijakan dan program perlindungan lingkungan hidup serta mendorong praktek-praktek eksploitasi yang merugikan. Ketidakstabilan politik dan konflik di Aceh dapat mengganggu upaya untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konflik dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur, pengungsi, dan ketidakpastian keamanan, yang semuanya dapat memperburuk kondisi lingkungan hidup. Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mitigasi bencana dapat menghambat kemampuan pemerintah dan lembaga terkait untuk bertindak secara efektif. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem lainnya di Aceh. Kurangnya perencanaan adaptasi dan mitigasi yang memadai dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar akibat bencana-bencana tersebut.

Jika pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah di Aceh, beberapa akibat yang mungkin timbul antara lain: kerusakan lingkungan yang parah, seperti deforestasi, kerusakan lahan, kerusakan ekosistem terumbu karang, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Ini akan berdampak buruk pada ekosistem dan spesies yang ada di Aceh. krisis kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan polusi udara, air, dan tanah. Ini dapat menyebabkan peningkatan penyakit pernapasan, penyakit kulit, dan masalah kesehatan lainnya, yang pada gilirannya akan membebani sistem kesehatan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.: Kerusakan lingkungan dan bencana alam dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Aceh. Misalnya, banjir, tanah longsor, atau gempa bumi dapat merusak infrastruktur, properti, dan tanaman, serta mengganggu kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ketidakmampuan dalam mengelola risiko bencana dan mengadaptasi perubahan iklim dapat meningkatkan kerentanan Aceh terhadap bencana alam dan fenomena ekstrem lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian manusia, kerugian ekonomi, dan memerlukan upaya pemulihan yang mahal. Kerusakan lingkungan dan bencana alam dapat mengganggu produksi pangan dan rantai pasokan makanan di Aceh. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian keamanan pangan, peningkatan harga pangan,

dan meningkatnya risiko kelaparan dan malnutrisi di kalangan masyarakat. Kerusakan lingkungan dan bencana alam dapat menyebabkan gangguan sosial, termasuk konflik antar-masyarakat, pengungsi, dan migrasi paksa. Ini dapat menciptakan ketegangan sosial, memicu konflik, dan meningkatkan tekanan pada infrastruktur dan layanan publik di daerah tujuan migrasi.

Oleh karena itu, penting bagi Aceh untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan bencana, dan mengadopsi strategi adaptasi perubahan iklim yang tepat. Ini melibatkan investasi dalam infrastruktur pengelolaan bencana, penegakan hukum lingkungan yang ketat, pendidikan lingkungan yang lebih luas, dan promosi kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

Untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana di Aceh, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ini meliputi peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan, penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran lingkungan, investasi dalam infrastruktur pengelolaan bencana, dan promosi kebijakan dan praktik yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

2.5. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan di atas dan merujuk pada Rancangan RPJMA Tahun 2025-2049, maka isu-isu strategis pembangunan Aceh Tahun 2027 dapat diuraikan sebagai berikut :

2.5.1. Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk memperkuat Syariat Islam, dan budaya Aceh dengan cara meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi Syariat Islam dan budaya Aceh. Melakukan program pendidikan dan penyuluhan syariat Islam kepada masyarakat. Meningkatkan implementasi hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan dan mendorong promosi dan pelestarian cagar budaya dan objek kemujuan kebudayaan Aceh sebagai bagian dari identitas daerah. mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan mengakui serta melindungi hak-hak masyarakat Aceh untuk menjalankan agama dan budaya mereka. Disamping itu, pengelolaan harta agama terhadap wakaf perlu ditangani secara serius seperti menajemen kelembagaan dan status hukum aset wakaf (sertifikasi tanah wakaf).

2.5.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting

Pemerintah Aceh dapat mengimplementasikan beberapa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan angka stunting yang meliputi:

1. Peningkatan Akses Makanan Bergizi dengan upaya meningkatkan akses masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan anak-anak, ke makanan bergizi seimbang melalui promosi praktik pemberian makanan tambahan, edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, dan penyediaan suplemen gizi bagi kelompok rentan.
2. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat termasuk daerah terpencil, terutama ibu hamil dan anak-anak, ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas, termasuk pemeriksaan kehamilan rutin, pemantauan pertumbuhan anak, imunisasi, dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan penanganan penyakit menular dan tidak menular
3. Pendidikan Kesehatan dan Penyuluhan Gizi dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan dan penyuluhan gizi kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil dan keluarga dengan anak balita, tentang pentingnya pola makan sehat, praktik pemberian makan yang baik, dan pentingnya nutrisi selama masa kehamilan dan pertumbuhan anak.
4. Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan dengan mengimplementasikan program pemberian makanan tambahan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan anak-anak balita yang mengalami stunting.
5. Akses Sanitasi dan Air Bersih dengan meningkatkan akses kepada masyarakat, terutama di pedesaan, ke sanitasi yang layak dan air bersih untuk mencegah penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi status gizi.
6. Kolaborasi dan Sinergi antara pemerintah daerah berbagai stakeholder termasuk lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya menurunkan stunting.

2.5.3. Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.

Pemerintah Aceh dapat mengimplentasikan pemerataan Pendidikan, perkuatan pendidikan vokasi dan meningkatkan minat baca Masyarakat dengan cara sebagai berikut:

1. Menurunkan Disparitas Indeks Pembanguan Manusia (IPM)

   Untuk menurunkan disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh, diperlukan upaya lintas sektor yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan akses pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat
- Mendorong pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
- Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
- Pemberdayaan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya
- Kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil

2. Memperkuat Pendidikan Vokasi

Untuk memperkuat pendidikan vokasi, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendidikan vokasi
- Mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
- Membangun kemitraan dengan industri dan perusahaan lokal
- Memberikan bantuan keuangan atau beasiswa bagi siswa
- Melakukan evaluasi rutin terhadap program pendidikan vokasi

3. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat

Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Peningkatan Akses terhadap Bahan Bacaan
- Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Buku
- Integrasi Literasi dalam Kurikulum Pendidikan
- Pembangunan Keterampila
- Kolaborasi dengan Pihak-pihak Terkait
- Pengembangan Inisiatif Inovatif dalam promosi literasi
- Membangun budaya membaca yang kuat dan berkelanjutan

2.5.4. Penanggulangan Kemiskinan.

Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya untuk mengurangi kemiskinan dengan peningkatan akses layanan dasar akses masyarakat terutama pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak; pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau pengembangan pertanian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya beriktunya dengan memberikan bantuan tunai, pangan, atau pendidikan kepada keluarga miskin; membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi

kemiskinan. Disamping itu, perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dilakukan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

2.5.5. Peningkatan Pendapatan Perkapita, Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Pemerintah Aceh dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya mendukung peningkatan UMKM terhadap akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk bagi UMKM, dan pengembangan produk berseritifikasi halal. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, membangun jalan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas. Meningkatkan promosi investasi dan kemitraan dengan sektor swasta, serta menyediakan insentif dan kemudahan perizinan. Optimalisasi potensi pariwisata Aceh, termasuk wisata bahari, agrowisata, wisasta budaya dan sejarah, ekowisata, wisata spiritual, wisata edukasi, wisata minat khusus lainnya serta membangunan membangun infrastruktur wilayah yang mendukung. Disamping itu, pengembangan pariwisata di Aceh perlu dilakukan dalam kerangka dan branding pada wisata halal/*Muslim Friendly* . Mengembangkan sektor-sektor baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, serta menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

2.5.6. Optimalisasi Riset dan Inovasi serta Digitalisasi

Riset dan Inovasi merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dan sangat penting untuk kemajuan suatu daerah yang didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk optimalisasi riset dan inovasi dengan cara pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang riset dan teknologi, mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik. membangun infrastruktur penelitian dan inovasi untuk mendorong kolaborasi antar lembaga pemerintahan, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan perusahaan swasta dengan dikoordinir oleh Bappeda Aceh. Selanjutnya membangun budaya inovasi dan kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh yang didukung oleh kebijakan dan regulasi yang pengembangan riset dan inovasi, serta meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan melalui anggaran pemerintah dan kerjasama dengan lembaga penelitian.

2.5.7. Membuka Lapangan Kerja dan Meningkat Produktivitas Masyarakat.

Permasalahan lapangan kerja di Aceh saat ini masih menjadi permasalahan utama yang didukung oleh beberapa faktor, yaitu masih tingginya angka

pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja. Hal ini tergambar dari rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja yang terbatas, serta lemahnya perlindungan tenaga kerja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Aceh yang belum cukup kuat dan terbatasnya investasi juga menjadi penghambat penciptaan lapangan kerja.

Berbagai upaya pembangunan yang dapat dilakukan dalam menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat antara lain, yaitu: 1) pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan penguatan mutu produk UMKM diarahkan pada sertifikasi produk terutama sertifikat halal; 2) memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dengan teknologi pertanian modern, pelatihan keterampilan, dan akses pasar; 3) meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan; 4) menyediakan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas; 5) mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perkebunan, dan industri manufaktur sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif; 6) mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi; 7) mengembangkan ekonomi berbasis komunitas seperti pertanian organik dan pariwisata berbasis masyarakat; dan 8) mengembangkan sektor pertanian dengan memberikan dukungan kepada petani.

2.5.8. Memperkuat Industri Pengolahan dan Ekspor

Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya untuk memperkuat industri pengolahan dan eksport dengan cara mengembangkan kawasan industri dan pusat produksi khusus dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan positioning pada Industri Halal sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang Islami. Untuk meningkatkan nilai tambah, Pemerintah Aceh berfokus pada agroindustry terintegrasi terhadap komoditi unggulan dan strategis, terutama: Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao, Nilam, dan Pala), Komoditi Pertanian (Padi dan Jagung), Komoditi Peternakan (Sapi/Kerbau, kambing/domba dan ungags), serta Komoditi Perikanan (Perikanan Tangkap dan Budidaya).

Untuk mendukung pengembangan industri terintegrasi, Pemerintah Aceh membangun infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, jaringan transportasi darat dan laut secara mamadai, serta memberikan kemudahan akses terhadap modal usaha, teknologi, dan juga standarisasi produk untuk memenuhi persyaratan pasar global, dan mendorong sertifikasi produk halal.

Pemerintrah Aceh membangun jejaring dan kerjasama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan akses pasar internasional. Pemerintah Aceh mengusung paradigma baru yang bervisi global karena memiliki keunggulan

geostrategis Aceh. Posisi geostrategis didadap karena keberadaan Aceh diantara ekosistem ekonomi global, seperti: Indo-Pasifik, IORA *(Indian Ocean Rip Association),* IMT-GT, BRICS, kerjasama Indonesia-India, kerjasama Indonesia-Turkiye, Selat Malaka, posisi yang dekat pasar dan pintu gerbang pariwisata dunia ke Indonesia, Terusan Kra, serta akses langsung Aceh ke berbagai penjuru dunia melalui Selat malaka dan Samudera Hindia.

2.5.9. Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Pemerintah Aceh dapat mengambil upaya strategis untuk pengembangan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan melalui skema ekonomi hijau dan ekonomi biru. dengan upaya meningkatkan investasi dalam pertanian berkelanjutan dengan dukungan kepada petani. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi produk. Memberikan bantuan langsung dan pembiayaan kepada petani untuk memperoleh sarana produksi yang ramah lingkungan dengan mendorong pengembangan pertanian organik sebagai alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan dan memperkuat pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau. Selanjutnya mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya praktik pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, serta mengembangkan strategi promosi dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk pangan lokal Aceh.

2.5.10. Memperkuat Perkotaan dan Pendesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Pembangunan saat ini juga diarahkan pada peningkatan perkotaan dan pedesaanb sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masa depan, dalam hal ini, Pemerintah Aceh dapat melakukan dengan upaya mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah perkotaan dan pedesaan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah melalui pusat-pusat pelayanan dan perdagangan di perkotaan dan pedesaan. Memberikan dukungan kepada UMKM melalui penyediaan akses modal, pelatihan keterampilan, dan promosi pasar. Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di kota-kota dan desa-desa yang memiliki potensi wisata. Meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi dan meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur di perkotaan dan pedesaan.

2.5.11. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas

Tata kelola pemerintahan merupakan cerminan kinerja pemerintahan dalam memastikan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dengan cara melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika dan integritas. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian untuk memastikan penggunaan sumber daya publik yang efektif. Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika. Mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas. Membangun komitmen kuat dari pemimpin pemerintah untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan.

2.5.12. Memperkuat Otonomi Khusus

Otonomi Khusus Aceh memberikan kewenangan lebih luas dalam mengatur daerahnya, terutama terkait penerapan hukum Syariah, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam. Otonomi khusus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh dapat mengimplementasikan upaya untuk memperkuat otonomi khusus kedepan di arahkan pada memperkuat implementasi hukum dan peraturan terkait otonomi khusus Aceh. Meningkatkan kapasitas institusi pemerintahan dalam mengelola urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Menyusuna perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi Aceh serta dapat memberikan manfaat bagi semua komponen masyarakat Aceh. Menyusun qanun yang mendukung implementasi otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional serta membangun kerjasama yang baik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Selanjutnya memperkuat peran lembaga adat dan agama dalam pengelolaan urusan keagamaan dan kebudayaan.

2.5.13. Kemandirian dalam Ruang Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terlalu bergantung pada pendanaan pemerintah pusat atau sumber luar lainnya. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian dalam ruang fiskal dengan cara memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan reformasi perpajakan dan penegakan hukum. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan dan perpajakan. Meningkatkan sumber pendapatan daerah di luar transfer pemerintah pusat. Menggalakkan promosi investasi dan kebijakan kemudahan berinvestasi seperti memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha serta

pengembangan ekonomi lokal. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mendorong pengembangan sistem perekonomian daerah yang mandiri. Membangun komitmen yang kuat bersama stakeholder untuk memperkuat kemandirian fiskal di Aceh.

2.5.14. Penanganan PPKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk penangganan PPKS dan disablitas, memperkuat gender dan keluarga dengan cara mengembangkan program rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi penyandang disabilitas. Memperkuat aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas, mendorong implementasi pendidikan inklusif di Aceh serta pelatihan keterampilan, akses modal usaha bagi PPKS, penyandang disabilitas, dan perempuan. Memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi dengan melakukan program pendidikan dan kesadaran gender untuk meningkatkan kesetaraan gender. Selanjutnya memberikan dukungan kepada keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan keterampilan parenting.

2.5.15. Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk melaksanakan Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan dengan cara: mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Mendorong investasi dalam pengembangan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor dan mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan. Selanjutnya melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat. Menerapkan pendanaan insentif kinerja berbasis ekologi dengan skema Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE). Mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan untuk mengatasi degradasi, deforestasi, alam dan alih fungsi lahan kawasan hutan lindung, mangrove dan Kawasan Hidrologi Gambut (KHG)/Kawasan Lindung Aceh. Membangun kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan.

2.5.16. Pengurangan Risiko Bencana

Aceh merupakan daerah dengan Indek Risiko Bencana yang tinggi. Beberapa bencana yang sering terjadi di Aceh antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Aceh dalam upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan membuat dan melaksanakan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif dan terpadu. Meningkatkan infrastruktur dan sistem peringatan dini untuk memantau dan memberi peringatan dini tentang ancaman bencana. Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana dan

tindakan darurat. Mengendalikan pemanfaatan lahan yang rawan bencana. Pengelolaan keanekaragaman hayati (flora dan fauna), pengendalian pencemaran lingkungan dan mitigasi ancaman perubahan iklim. Meningkatkan infrastruktur kedaruratan seperti rumah sakit, pos evakuasi, dan shelter. Meningkatkan pengelolaan air dan drainase untuk mengurangi risiko banjir. Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana.

2.5.17. Memperkuat Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan di Aceh mencakup pembangunan infrastruktur, ekonomi, penanggulangan kemiskinan, perumahan, dan konektivitas antar wilayah. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi secara merata, menyelesaikan ketimpangan antar wilayah dan antar sektor, potensi wilayah tertinggal juga menjadi perhatian dan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah terpinggirkan. Pembangunan Aceh ke depan juga berfokus pada peningkatan infrastruktur layanan dasar masyarakat dan pembangunan jalan nasional dan provinsi menjadi prioritas utama dalam menjaga konektivitas antar wilayah. Selain itu, pemerintah Aceh juga mendorong pemanfaatan lahan transmigrasi untuk menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses layanan kesehatan dan mendorong pengembangan ekonomi lokal di wilayah pinggiran dan terpencil serta memperkuat pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

2.5.18. Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas

Memmperkuat sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya penting seperti: 1). mengembangkan rencana pembangunan infrastruktur jangka panjang yang komprehensif dan terintegrasi serta alokasi anggaran sesuai dengan skala prioritas; 2). meningkatkan pengembangan infrastruktur transportasi, termasuk jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara; 3). mengembangkan infrastruktur energi yang handal dan berkelanjutan; 4). memperluas akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak di seluruh wilayah Aceh; 5) meningkatkan akses dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi; 6) meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; dan 7) mengembangkan infrastruktur pariwisata yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

2.6. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran

Pasal 96 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi yaitu: pembentukan perda provinsi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah provinsi. Selanjutnya pada Pasal 108 dan 161 dijelaskan bahwa DPRD berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Sementara itu, pada Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penelaahan pokok pokok pikiran merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program/kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RKPA tahun 2027 pokok pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan riil anggaran oleh Bappeda setelah berkoordinasi dengan SKPA terkait. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan ke dalam SIPD dengan tahapan sebagai berikut:

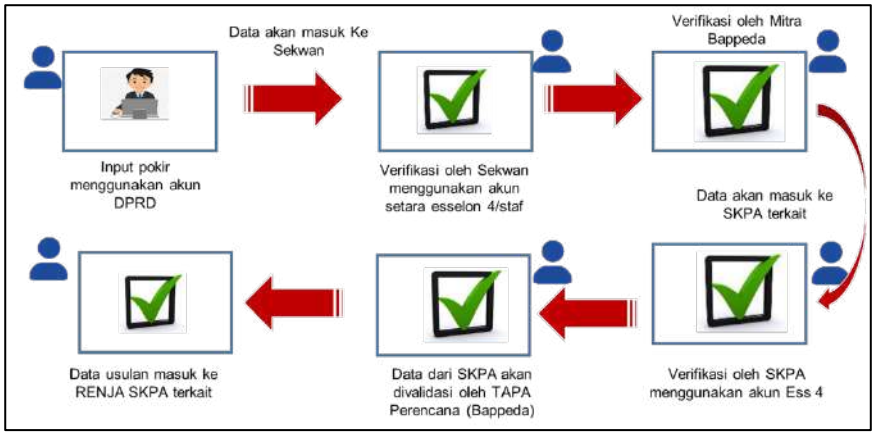

Gambar 2. 125
Alur Pengajuan Pokok Pokok Pikiran DPRA

POKIR memiliki peranan yang strategis dalam penyusunan RKPD. Hal ini disebabkan karena melalui POKIR yang diperoleh dari hasil kunjungan kerja dan hasil reses DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihannya masing-masing. Melalui penyampaian POKIR ini akan menjadi masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah. Selanjutnya, berdasarkan masukan hasil penelaahan POKIR yang dirumuskan dalam bentuk permasalahan akan menjadi pertimbangan dalam penentuan sasaran dan prioritas pembangunan. Berdasarkan hasil inputan POKIR dalam aplikasi e pokir SIPD 2027 terdapat 7793 usulan dengan status 83 usulan dibatalkan, 768 usulan dikembalikan, 396 usulan ditolak, 26 usulan pengajuan usulan, 128 usulan validasi mitra Bappeda, 1 usulan validasi Sekretariat Dewan, 282 usulan verifikasi perangkat daerah dan 6109 usulan verifikasi TAPD. Lebih jelas terkait usulan POKIR dapat dilihat pada aplikasi e-pokir SIPD RI 2027.

Berdasarkan table 2.152, dapat dilihat bahwa Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRA tahun 2027 yang telah disusun dengan menghubungkan permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta Prioritas Pembangunan Aceh. Dengan demikian, setiap usulan POKIR diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan dan isu strategis tersebut, sekaligus menjamin keterwakilan aspirasi masyarakat. Hal ini penting mengingat pokok-pokok pikiran DPRA merupakan sarana penyaluran aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota DPRA melalui berbagai kegiatan, seperti reses, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2. 152

Keselarasan Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD Tahun 2027 dengan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Aceh

No.	Pokok Pokok Pikiran DPRA	Isu Strategis Pembangunan Aceh	Prioritas Pembangunan Aceh
1	2	3	4
1	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana masjid, meunasah; Pembangunan sarana dan prasarana dayah/pesantren (ruang kelas, asrama, dll)	Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh	Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah

No.	Pokok Pokok Pikiran DPRA	Isu Strategis Pembangunan Aceh	Prioritas Pembangunan Aceh
1	2	3	4
2	Pembangunan rumah layak huni (RLH); Pengadaan sarana dan prasarana pertanian (bibit, pupuk,alsintan), Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (alat tangkap, motor tempel, freezer, palka ikan, cool box) Pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan (bibit, kolam, pakan), Pengadaan bantuan peralatan UMKM, Pengadaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	Penanggulangan Kemiskinan; Peningkatan Pendapatan Perkapita, Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh; Memperkuat Pembangunan Kewilayahan.	Penurunan Angka Kemiskinan
3	Bimbingan teknis dan pelatihan tenaga kerja	Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat;Membuka Lapangan Kerja dan Meningkat Produktivitas Masyarakat;Memperkuat Industri Pengolahan dan Ekspor.	Penciptaan Lapangan Kerja
4	Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan,	Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan Infrastruktur Yang Berkualitas
5	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah (RKB, Laboratorium, Mobilier, Komputer, dll)	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting; Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat; Penanganan PPKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga.	Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi
6	Pengadaan bibit penghijauan lingkungan, Pembangunan penguatan tebing sungai, Peningkatan vegetasi DAS	Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan; Pengurangan Risiko Bencana.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

2.7. Inovasi

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. Menteri Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) diberi wewenang melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017.

Nilai IID didapatkan atas penilaian terhadap 2 aspek yaitu aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Pengukuran pada aspek SPD diarahkan kepada 3 variabel yaitu Institusi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ekosistem Inovasi dan Kajian. Penilaian ketiga variable diukur melalui 15 indikator dengan rincian 10 indikator untuk pengukuran variable Institusi, 2 indikator untuk mengukur variable Sumber Daya Manusia dan 4 indikator untuk menilai Ekosistem Inovasi dan Kajian.

Satuan Pemerintah Daerah (SPD) memberikan konstribusi 25,2% dari nilai total IID. Variable Institusi dengan 10 indikator penilai yaitu Visi dan Misi Pemda yang memiliki arah Inovasi, APBD tepat waktu & mandatory spending, Kualitas peningkatan perizinan, Jumlah pendapatan perkapita, Penurunan tingkat pengangguran terbuka, Jumlah peningkatan investasi, Jumlah peningkatan PAD, Opini BPK, Nilai capaian Lakip, Penurunan Angka Kemiskinan, memberikan konstribusi sebesar 67% dari total nilai SPD. Dari indikator-indikator ini, APBD tepat waktu & mandatory spending berkonstribusi paling tinggi pada penilai variable Institusi diikuti oleh Kualitas Peningkatan Perizinan, Perununan tingkat pengangguran terbuka, Jumlah Peningkatan Investasi, Jumlah Peningkatan PAD dan Opini BPK. Hal ini menjelaskan bahwa adanya penuruan kualitas dari indikator untuk pengukuran variable Institusi memberikan dampak penurunan yang signifikan terhadap nilai SPD.

Selain dari penilaian SPD angka IID juga dipengaruhi oleh Satuan Inovasi Daerah (SID) yang memberikan sumbangan sebesar 74,80% dari nilai total IID. Nilai SID ini didapatkan dengan menjumlahkan nilai kematangan data dukung Inovasi Daerah berdasarkan formula yang ditentukan oleh BSKDN. Terdapat 5 variabel yang digunakan untuk mengukur kematangan sebuah Inovasi Daerah melalui penilaian yang dilakukan terhadap 20 indikator. Dari ke 5 variabel tersebut variable Infrastrukur memberi kontribusi nilai yang paling tinggi yaitu 30 atau 27% dari nilai total kematangan data dukung sebuah Inovasi Daerah yaitu sebesar 111. Indikator yang memberikan penilaian kepada variable Infrastruktur masing-masing Indikator Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan Sumber Daya Manusia Terhadap Inovasi Daerah, Dukungan Anggaran, Bimbingan Teknik Inovasi Daerah dan Integrasi Program dalam RPD.

Tren nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Aceh dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, dimana pada tahun 2021 nilai IID adalah sebesar 46,40 dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 62,23. Bagan di bawah ini menampilkan Capaian Provinsi Aceh dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021-2025.

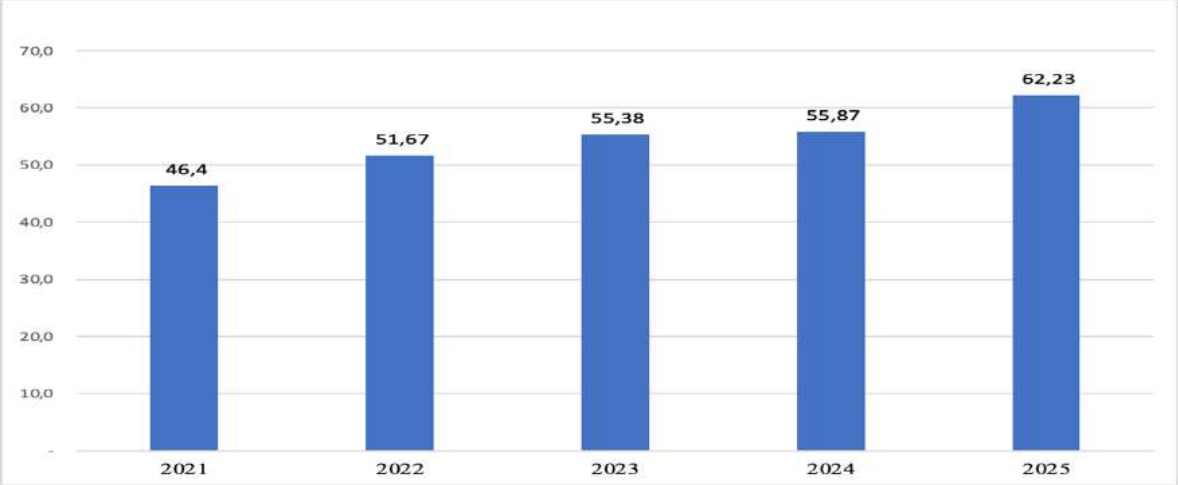

Sumber: BSKDN Kemendari Tahun 2025

Gambar 2. 126
Nilai Indeks Inovasi Aceh Tahun 2021-2025

Mengenai instrumen penilaian Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, tingkat pembaruan inovasi di tingkat pemerintah daerah diukur melalui beberapa tahapan sistematis. Berdasarkan Gambar 4.7, sebanyak 83% inovasi Aceh telah dilakukan tahap penerapan, 5% berada pada tahap uji coba, dan 12% masih dalam tahap inisiatif. Tingginya persentase penerapan menunjukkan bahwa sebagian besar inovasi telah terimplementasi secara operasional, meski masih terdapat potensi pengembangan (stok inovasi) pada tahap awal yang perlu dioptimalkan.

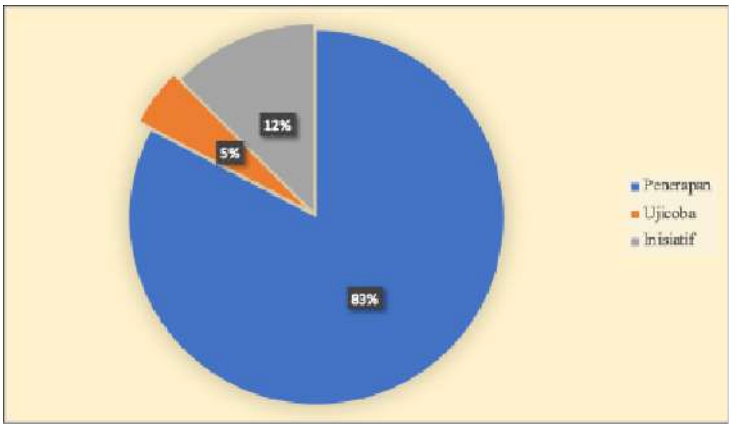

Gambar 2. 127
Distribusi Tahapan Inovasi Daerah Provinsi Aceh Tahun 2025

Dari sisi bentuk inovasi yang ditunjukkan pada Gambar 4 dibawah ini menyebutkan bahwa inovasi Pelayanan Publik sebesar 61%, inovasi tata kelola pemerintahan sebesar 17%, dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah sebesar 22%.

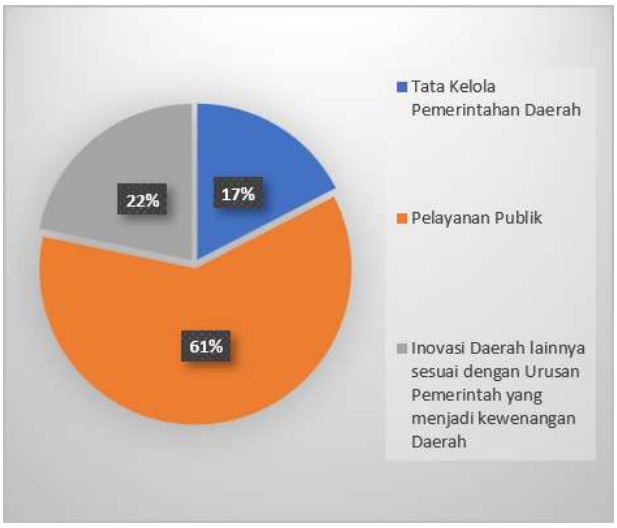

Gambar 2. 128
Distribusi Tahapan Inovasi Daerah Provinsi Aceh Tahun 2025

Terkait jenis inovasi yang tertera pada Gambar 2.129 menunjukkan dominasi inovasi berbasis digital sebesar 62%, melampaui inovasi non-digital yang sebesar 38%. Tren ini merefleksikan komitmen Pemerintah Aceh dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengakselerasi efektivitas pelayanan publik, menciptakan efisiensi birokrasi, serta memperluas aksesibilitas layanan bagi masyarakat

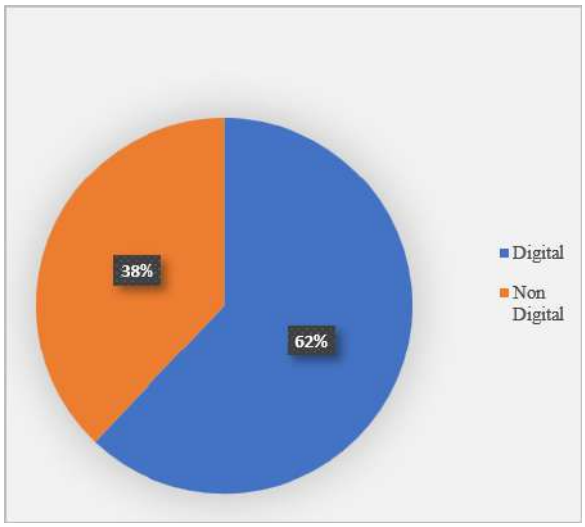

Gambar 2. 129
Persentase Jenis Inovasi Daerah Provinsi Aceh Tahun 2025

Performa inovasi Aceh secara komprehensif divisualisasikan melalui diagram jaring laba-laba pada Gambar 2.130. Sepanjang periode 2024-2025, terjadi peningkatan signifikan pada beberapa variabel kunci, antara lain variabel infrastruktur, output pengetahuan dan teknologi, kecanggihan produk, kecepatan bisnis proses, hasil kreatif dan institusi.

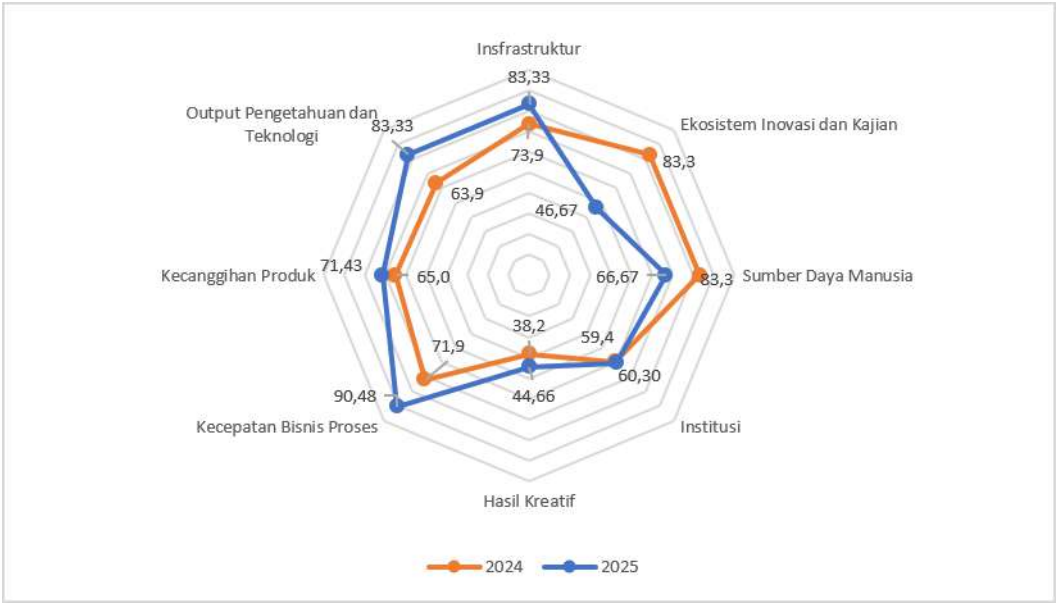

Gambar 2. 130
Performa Inovasi Aceh Tahun 2025

BAPPEDA Aceh, melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terus mendorong ekosistem inovasi melalui bimbingan teknis, pendampingan, serta program peer-learning dengan menjadikan SKPA inovatif sebagai mentor bagi unit lainnya. Dari total 58 inovasi yang dihasilkan oleh 19 SKPA pada tahun 2025, terdapat sebaran tingkat kematangan yaitu 2 inovasi mencapai skor kematangan maksimal yaitu 111, sementara 15 inovasi memperoleh skor kematangan antara 100 – 108 dan 41 inovasi berada pada skor kematangan antara 70-99. Jumlah Inovasi SKPA yang terinput dapat dilihat pada Gambar 2.131 berikut ini.

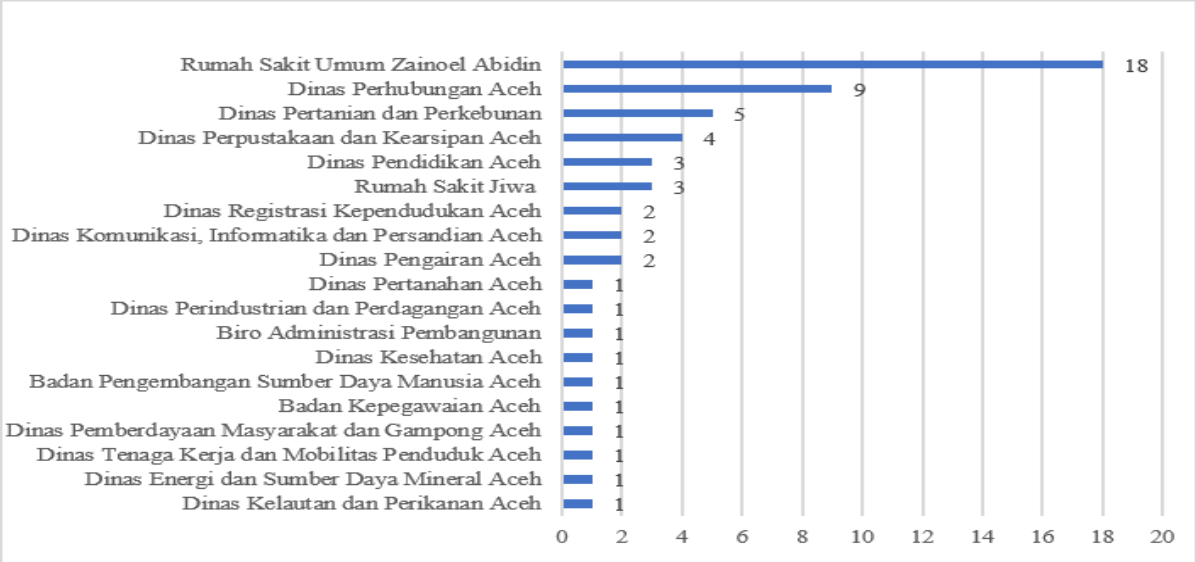

Gambar 2. 131
Jumlah Inovasi SKPA Tahun 2025

Kontribusi inovasi antar-SKPA menunjukkan keberagaman yang signifikan. RSUD Dr. Zainoel Abidin menjadi kontributor terbanyak dengan 18 inovasi (skor 91-105), disusul oleh Dinas Perhubungan dengan 9 inovasi (skor 76-99), dan Dinas Pertanian dan Perkebunan sebanyak 5 inovasi (skor 89-105). Beberapa SKPA menunjukkan kualitas kematangan yang sangat tinggi meski dengan jumlah inovasi terbatas, seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang menghasilkan 2 inovasi dengan skor mencapai 108-111. Di sisi lain, terdapat sejumlah SKPA yang telah berkontribusi dengan masing-masing 1 inovasi (seperti Dinas Pertanahan, Dinas Kesehatan, dan BPSDM). Variasi ini mengindikasikan bahwa kapasitas inovasi belum merata sepenuhnya antar-perangkat daerah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas kematangan administratifnya.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 388 ayat (9) dan (11), ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan penilaian serta penghargaan atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. Sebagai petunjuk

pelaksanaan bagi daerah dalam menyelenggarakan praktik-praktik inovatif, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 25 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.10.30.2/1439/2025 mengenai Penetapan Pemenang dan Pemberian Penghargaan Anugerah Inovasi Tahun 2025, yang terdiri dari kategori inovasi aceh, kategori inovasi terbaik berkelanjutan, kategori SKPA sangat inovatif, dan kategori SKPA dengan inovasi terbanyak.

Kategori inovasi aceh terdiri dari 5 pemenang, yaitu Inovasi Aplikasi Trans Koetaradja (Inovasi Terbaik I), Inovasi Solusi Cepat Adminduk (Inovasi Terbaik II), Inovasi Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Benih Bersertifikat (Inovasi Terbaik III), Inovasi Seuramoe Sehat Jiwa (Inovasi Terbaik Harapan 1), dan Inovasi CAT-UDIN (Inovasi Terbaik Harapan II). Selain itu, untuk kategori inovasi terbaik berkelanjutan ditetapkan Inovasi TAGTO. Secara detail terkait inovasi terbaik tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

A. Inovasi Aplikasi Trans Koetaradja (Dinas Perhubungan)

A.1 Latar Belakang

Implementasi Aplikasi Trans Koetaradja didasarkan pada UU No. 14/2008 (Keterbukaan Informasi Publik), UU No. 25/2009 (Pelayanan Publik), dan Pergub Aceh No. 47/2016. Inovasi ini merupakan wujud nyata transformasi digital (e-government) menuju konsep Smart City di Aceh. Sebelum adanya aplikasi, pengguna menghadapi ketidakpastian seperti jadwal keberangkatan dan posisi bus yang tidak terukur; keterbatasan informasi rute yang memicu keterlambatan; menurunnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum akibat layanan yang kurang informatif.

Aplikasi ini hadir sebagai solusi modern untuk meningkatkan efisiensi mobilitas melalui fitur unggulan seperti pantauan posisi bus secara real-time, teknologi AR Shelter untuk menemukan halte terdekat, serta akses informasi 14 koridor yang tersedia gratis di Android dan iOS. Inovasi ini bertujuan mengubah gaya hidup masyarakat agar beralih ke transportasi umum guna mengurangi kemacetan, menekan emisi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan Pemerintah Aceh.

A.2 Tujuan

a. Menyediakan akses informasi real-time untuk pengguna bus Trans Koetaradja.
b. Meningkatkan kenyamanan dan efisiensi penggunaan transportasi publik.

c. Mendorong perubahan perilaku masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

A.3 Manfaat

a. Waktu tunggu menjadi lebih terprediksi dan efisien bagi pengguna.
b. Aplikasi memperluas jangkauan informasi, menjangkau semua kalangan usia dan wilayah.
c. Mendukung komitmen pemerintah daerah terhadap transportasi ramah lingkungan dan smart city.

A.4 Hasil

Mendorong peningkatan jumlah pengguna transportasi umum, karena masyarakat merasa lebih percaya terhadap layanan yang disediakan. Pemerintah juga merasakan manfaat dari sisi pengelolaan, di mana data operasional yang terekam melalui sistem aplikasi membantu dalam pengambilan keputusan, evaluasi layanan, dan perbaikan rute secara berkala.

B. Inovasi Solusi Cepat Adminduk (Dinas Registrasi Kependudukan Aceh)

B.1 Latar Belakang

Administrasi Kependudukan di Aceh menghadapi tantangan besar seiring dengan pertumbuhan penduduk yang mencapai 5,62 juta jiwa pada tahun 2025. Meskipun negara telah menjamin hak setiap warga untuk memiliki dokumen kependudukan tanpa diskriminasi melalui UU Nomor 24 Tahun 2013 dan berbagai bantuan turunannya, kendala geografis di lapangan masih menjadi hambatan utama. Banyak masyarakat di wilayah pelosok mengeluhkan jarak tempuh yang jauh serta biaya transportasi yang tinggi menuju pusat layanan Disdukcapil, yang jika dibiarkan dapat menghambat akses mereka terhadap bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Menjawab permasalahan tersebut, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) melahirkan inovasi FastDuk (Solusi Cepat Layanan Adminduk) sebagai langkah nyata untuk mendekatkan layanan masyarakat, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Berkolaborasi dengan Disdukcapil di 23 Kabupaten/Kota, FastDuk bekerja secara proaktif melalui sistem jemput bola ke lokasi-lokasi yang sulit terjangkau transportasi maupun jaringan internet. Melalui komitmen kepemimpinan dan evaluasi berkala terhadap daerah dengan cakupan adminduk rendah, inovasi ini memastikan hadirnya negara dalam memberikan pelayanan yang gratis, transparan, dan akuntabel hingga tingkat gampong.

Sejak diluncurkan pada tahun 2022, FastDuk telah membuktikan efektivitasnya dengan mencetak sebanyak 38.954 dokumen kependudukan bagi masyarakat yang selama ini terkendala akses. Fokus yang intensif di wilayah seperti Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tenggara, hingga Simeulue telah memberikan kepastian hukum bagi pelayanan warga setempat secara instan di tempat layanan. Keberhasilan ini tidak hanya membantu memenuhi target kinerja Ditjen Dukcapil Kemendagri, tetapi juga menjadi jembatan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kemudahan akses layanan publik yang membahagiakan.

B.2 Tujuan

a. Mempercepat Layanan: Memangkas waktu menunggu sehingga pengurusan dokumen kependudukan menjadi jauh lebih singkat dan cepat selesai.
b. Meningkatkan Efisiensi Birokrasi: Memanfaatkan teknologi digital agar aparatur bekerja lebih efektif dan sistem pelayanan menjadi lebih terpadu.
c. Memberikan Pelayanan yang Humanis: Menjamin layanan yang ramah, responsif, dan mudah diakses oleh semua orang, termasuk kelompok disabilitas, lansia, dan masyarakat rentan lainnya.
d. Menjamin Akurasi Data: mengedit data kependudukan selalu ditukar dan akurat melalui sistem SIAK Terpusat guna mempermudah akses warga ke berbagai layanan publik.
e. Memperluas Jangkauan: Menghadirkan layanan langsung hingga pelosok daerah terpencil agar masyarakat yang sulit transportasi tetap mendapatkan hak dokumennya.
f. Menciptakan Layanan Bersih: Menghapus praktik pungli dan calo dengan cara turun langsung ke lapangan, sehingga prosesnya transparan, jujur, dan gratis.

B.3 Manfaat

a. Pengurusan Dokumen Lebih Kilat: Mempercepat pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, hingga surat pindah sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama.
b. Layanan Adil dan Merata: Memudahkan warga di wilayah pelosok (3T), lansia, penyandang disabilitas, serta keluarga kurang mampu untuk mendapatkan dokumen kependudukan tanpa hambatan geografis.
c. Transparan dan Bebas Pungli: Masyarakat dapat menyatukan proses pengurusannya secara langsung, sehingga menutup celah praktik pungutan pembohong atau percaloan.
d. Birokrasi yang Ringkas: Menghapus prosedur yang berbelit-belit melalui sistem digital yang lebih sederhana dan standar.

e. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat: Menciptakan rasa puas dan nyaman karena pelayanan yang diberikan lebih responsif dan mudah diakses.
f. Kunci Akses Layanan Dasar: Membantu warga mendapatkan haknya dalam program bantuan kemiskinan, layanan kesehatan, dan pendidikan, serta memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga.

B.4 Hasil

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sudah melalui inovasi Fastduk telah mencetak 38.954 dokumen dalam rentan waktu 4 tahun dari tahun 2021 hingga 2024. Dengan rincian tahun 2021 sebanyak 2,500 di 5 titik kabupaten/kota, Tahun 2022 sebanyak 14,481 di 11 titik kabupaten/kota, Tahun 2023 sebanyak 8,765 dokumen di 12 titik kabupaten/kota, dan Tahun 2024 sebanyak 13,208 dokumen di 10 titik kabupaten/kota. Efisiensi dan efektifitas pelayanan bagi kelompok rentan Adminduk, lansia, disabilitas, kelompok miskin dan seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan kepercayaan terhadap Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dan Dukcapil. Tersedianya data kependudukan yang update.

C. Inovasi Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Benih Bersertifikat (Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh)

C.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan budidaya pertanian berkelanjutan di Provinsi Aceh berpedoman pada amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 serta regulasi sektoral hortikultura dan perkebunan guna menjamin kemandirian pangan nasional. Sebagai satu-satunya lembaga penjamin mutu, UPTD BPSBTPHP Distanbun Aceh memegang peran penting dalam pengawasan peredaran benih untuk memastikan prinsip enam tepat: tepat jumlah, mutu, varietas, waktu, tempat, dan harga. Namun, saat ini pelayanan masih menghadapi kendala signifikan, mulai dari keterbatasan personel Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan, proses verifikasi data rekomendasi penakar yang masih manual, hingga sulitnya penyelesaian kasus hukum akibat purnatugasnya pejabat PPNS di bidang perbenihan.

Menjawab tantangan tersebut, UPTD BPSBTPHP meluncurkan inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Sinaberkat (Sistem Informasi Pelayanan Benih Bersertifikat) sebagai langkah transformasi digital yang kreatif dan efisien. Fokus utama inovasi ini adalah mengintegrasikan manajemen mutu dengan sistem informasi yang transparan untuk mengatasi isu-isu strategis, seperti seringnya perpanjangan perpanjangan rekomendasi pedagang benih akibat penilaian manual.

Dengan adanya sistem ini, proses pemantauan terhadap Surat Rekomendasi, Sertifikat Kompetensi, maupun IUPB dapat dilakukan secara otomatis, sekaligus menyediakan data ketersediaan benih yang dapat diakses oleh publik secara terbuka untuk memudahkan pengendalian peredaran di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.

Pengembangan sistem Sinaberkat membawa pembaharuan fundamental melalui penyediaan basis data beragam yang komprehensif, fitur pelacakan distribusi dari produsen hingga konsumen, serta notifikasi jadwal perawatan bagi petani. Integrasi teknologi ini tidak hanya memudahkan antarmuka pengguna bagi masyarakat, tetapi juga secara nyata meningkatkan efektivitas kinerja petugas PBT di lapangan di tengah keterbatasan jumlah personel yang ada. Melalui digitalisasi ini, diharapkan pengawasan benih bersertifikat di Provinsi Aceh menjadi lebih akuntabel, meminimalisir kesalahan administratif, dan mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang didukung oleh benih berkualitas tinggi.

C.2 Tujuan

a. Kepatuhan Perizinan Mutlak: Seluruh penangkar dan pedagang benih di Aceh wajib memiliki legalitas formal yang sah, baik berupa Rekomendasi (Tanaman Pangan), Sertifikat Kompetensi (Hortikultura), maupun IUPB (Perkebunan).
b. Kedisiplinan Masa Berlaku: Terciptanya sistem pengawasan yang memastikan pembaruan dokumen tepat waktu sebelum masa berlaku habis (1 tahun untuk Rekomendasi dan Sertifikat Pedagang, serta 2 tahun untuk Sertifikat Penangkar). Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi tegas sesuai regulasi.
c. Standarisasi Mutu: Menjamin seluruh pelaku usaha perbenihan sepenuhnya patuh terhadap persyaratan teknis dan tata niaga yang berlaku demi menjaga kualitas benih di pasar.
d. Optimalisasi Pengawasan: Terwujudnya rasio ideal petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT) di setiap kabupaten/kota untuk menjangkau seluruh wilayah kerja secara efektif.
e. Digitalisasi Efisiensi: Pemanfaatan aplikasi Sinaberkat sebagai alat bantu utama bagi petugas PBT dalam memantau peredaran benih bina secara real-time, akurat, dan mudah.

C.3 Manfaat

a. Jejaring Kerja Internal.

   Pengembangan aplikasi Sinaberkat mengintegrasikan seluruh lini organisasi di Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, mulai dari Kepala Dinas, Kepala UPTD, hingga pejabat struktural dan fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT). Kolaborasi internal ini bertujuan untuk mensinkronkan data jumlah

penangkar, luas lahan, dan stok benih bersertifikat secara real-time. Dengan koordinasi yang solid, perencanaan sasaran tanam dan target produksi tanaman di Provinsi Aceh dapat disusun secara lebih akurat dan terukur.

b. Jejaring Kerja Eksternal,

Melalui pendekatan Pentahelix, Sinaberkat membangun ekosistem kolaborasi yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak:

- Pemerintah: Distanbun Aceh sebagai regulator, perencana, dan pelaksana kebijakan.
- Akademisi: Sebagai konseptor dan pakar dalam pemuliaan tanaman untuk menjamin kualitas genetik benih.
- Komunitas/Asosiasi: Para penangkar sebagai garda terdepan dalam memproduksi benih berkualitas.
- Pebisnis: Bertanggung jawab dalam memperluas jangkauan pemasaran dan distribusi benih.
- Media: Sebagai sarana promosi, publikasi, dan penyebaran informasi ketersediaan benih kepada masyarakat luas.

C.4 Hasil

Sebagai solusi atas kendala layanan manual yang tidak efektif dan rentan kesalahan, dilakukan transformasi digital melalui pengembangan aplikasi berbasis web Sinaberkat (Sistem Informasi Pelayanan Benih Bersertifikat). Pengembangan ini fokus pada tiga fitur utama untuk meningkatkan produktivitas dan transparansi:

a. Pendaftaran Online: Calon pedagang dan penangkar dapat mengajukan permohonan rekomendasi atau sertifikat kompetensi secara daring, sehingga proses legalitas menjadi lebih cepat dan akomodatif.
b. Sistem Notifikasi Otomatis: Fitur peringatan dini bagi pelaku usaha, petugas PBT, dan admin provinsi saat masa berlaku dokumen mendekati kedaluwarsa (expire). Hal ini bertujuan untuk meniadakan kasus keterlambatan perpanjangan izin.
c. Publikasi Stok Real-Time: Penyediaan informasi ketersediaan benih dari tiap penangkar secara terbuka. Fitur ini memudahkan masyarakat mengakses benih bermutu serta membantu pengambil kebijakan memantau keseimbangan stok secara akurat di lapangan.

D. Inovasi Seuramoe Sehat Jiwa (Rumah Sakit Jiwa Aceh)

D.1. Latar Belakang

Inovasi Seuramoe Sehat Jiwa hadir sebagai respons atas keterbatasan durasi rehabilitasi psikososial di RSJ Aceh yang selama ini hanya berlangsung 10 hari. Berdasarkan data tahun 2022 hingga 2024, durasi singkat tersebut belum efektif meningkatkan kemandirian pasien, yang terlihat dari meningkatnya angka rawat ulang (readmission) hingga 13,9% dan tingginya jumlah pasien gelandangan. Berlandaskan UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, program ini dirancang untuk memberikan pelayanan rehabilitasi yang lebih komprehensif, mencakup aspek psikiatrik, medik, hingga sosial demi memulihkan fungsi kognitif dan adaptasi spiritual pasien secara optimal.

Program ini mengusung konsep "Hospital Without Wall", sebuah terobosan layanan pascarawat selama enam bulan atau lebih yang membawa proses pemulihan lebih dekat ke masyarakat. Dengan mengadopsi teori psikologi individu Alfred Adler, inovasi ini fokus pada pengembangan potensi manusia untuk mengatasi kesulitan dan membangun interaksi sosial yang sehat. Berbeda dengan layanan konvensional yang hanya dilakukan saat pasien rawat inap, Seuramoe Sehat Jiwa merupakan layanan strategis terintegrasi yang melibatkan dukungan lintas sektor untuk memberdayakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) agar mampu mengelola kondisi biopsikososial dan vokasional mereka secara mandiri.

Implementasi program ini telah menunjukkan hasil nyata di Rehabilitasi Terpadu Kota Malaka. Dari 59 pasien yang ditangani sepanjang Juni-Desember 2024, terdapat peningkatan signifikan pada kemampuan merawat diri, ibadah mandiri, hingga keterampilan produktif seperti berkebun dan berwirausaha. Selain itu, program ini berhasil memperbaiki kualitas masa rawat ulang yang lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Melalui tahapan penguatan regulasi, penyediaan sarana, dan pelatihan khusus terapi okupasi, Seuramoe Sehat Jiwa terbukti efektif dalam memulihkan pasien hingga mereka siap kembali ke tengah masyarakat dengan kondisi yang lebih sehat, mandiri, dan produktif.

D.2. Tujuan

Inovasi Seuramoe Sehat Jiwa bertujuan memberikan rehabilitasi komprehensif bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa melalui layanan edukasi, fisik, biopsikososial, spiritual, hingga pelatihan vokasional dan kewirausahaan selama 3 hingga 6 bulan. Program ini ditargetkan mampu menurunkan angka lama rawat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kemenkes, menekan angka rawat ulang (readmission), serta mengurangi jumlah pasien terlantar. Selain itu, inovasi ini fokus pada peningkatan keterampilan hidup agar rehabilitan dapat hidup mandiri.

D.3. Manfaat

D.3.1. Manfaat bagi Pasien

a. Meningkatkan Kemandirian: Membentuk pribadi yang lebih mandiri dan mampu mengelola aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa ketergantungan penuh pada orang lain.
b. Meningkatkan Kualitas Hidup: Membantu individu mendapatkan kehidupan yang lebih layak, sejahtera, dan bermakna di tengah masyarakat.
c. Mengembangkan Potensi Diri: Membuka peluang bagi individu untuk menggali bakat dan kemampuan terpendam demi mencapai tujuan hidup yang lebih baik.
d. Menghapus Stigma: Melalui pemulihan yang nyata, persepsi negatif dan diskriminasi terhadap penyandang gangguan jiwa dapat berkurang secara signifikan.

D.3.2. Manfaat bagi Masyarakat

a. Mempermudah Akses Perawatan: Menjadi solusi bagi keluarga atau masyarakat yang kesulitan dalam merawat serta memberdayakan ODGJ pascarawat inap di RS Jiwa.
b. Pusat Pemberdayaan yang Efektif: Menyediakan layanan rehabilitasi dan terapi okupasi yang fokus pada pembentukan kemandirian dan produktivitas pasien.
c. Meningkatkan Partisipasi Publik: Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menyebarkan informasi positif mengenai keberadaan pusat rehabilitasi terpadu.
d. Membangun Lingkungan Inklusif: Membuktikan kepada masyarakat bahwa ODGJ mampu hidup mandiri dan produktif, sehingga stigma buruk perlahan hilang.
e. Mendukung Ekonomi Kreatif Rehabilitan: Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dengan cara menampung atau membeli hasil karya dari bengkel kerja (workshop) para ODGJ.

D.3.4. Hasil

Hasil dari program SEURAMO JIWA memastikan pasien dapat kembali ke keluarga dan masyarakat dalam kondisi terbaik. Tingkat kepulihan pasien dipastikan langsung oleh Dokter Spesialis Jiwa, sementara kemandiriannya dinilai secara

mendalam oleh Psikolog Klinis dan perawat. Selain itu, pasien juga dinyatakan produktif melalui bukti nyata kemampuan mereka dalam menjalankan pekerjaan.

E. Inovasi CAT-UDIN (Badan Kepegawaian Aceh)

E.1. Latar Belakang

Di era digital saat ini, Badan Kepegawaian Aceh (BKA) berkomitmen meningkatkan efisiensi manajemen SDM, khususnya pada pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Pangkat PNS. Langkah ini diambil untuk memperbarui metode konvensional yang sebelumnya dilakukan secara manual. Proses lama dinilai kurang efektif karena memakan banyak waktu dan biaya—mulai dari pencetakan hingga penilaian materi—serta memiliki risiko tinggi terhadap kesalahan manusia, keterlambatan, dan rendahnya tingkat transparansi dalam penilaian.

Sebagai solusi inovatif, BKA mengembangkan sistem CAT-UDIN (Computer Assisted Test untuk Ujian Dinas dan Penyesuaian Pangkat). Inovasi ini mengalihkan seluruh tahapan ujian ke platform digital, mulai dari penyimpanan bank soal yang aman hingga distribusi materi secara daring. Dengan otomatisasi ini, risiko kecurangan dapat diminimalisir dan integritas ujian tetap terjaga sesuai dengan amanah undang-undang mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel.

Implementasi CAT-UDIN diharapkan mampu mempercepat perolehan hasil ujian secara akurat sekaligus memangkas birokrasi yang panjang. Selain meningkatkan efisiensi operasional, sistem ini bertujuan untuk membangun kepercayaan pegawai melalui proses seleksi yang lebih transparan dan objektif. Secara keseluruhan, CAT-UDIN menjadi tonggak penting dalam transformasi digital pemerintahan di Aceh demi mewujudkan tata kelola sumber daya manusia yang lebih modern dan profesional.

E.2. Tujuan

a. Digitalisasi Penuh: Menggantikan sistem kertas manual dengan aplikasi digital yang modern untuk seluruh tahapan ujian.

b. Efisiensi Tinggi: Mempercepat proses persiapan hingga pelaksanaan ujian, sehingga lebih hemat waktu dan sumber daya.

c. Transparansi Hasil: Penilaian otomatis yang langsung keluar setelah ujian selesai untuk menjamin hasil yang objektif dan akurat.

d. Keamanan Data: Melindungi soal dan identitas peserta dengan enkripsi serta sistem login yang ketat guna mencegah kecurangan.

e. Akses Fleksibel: Memudahkan peserta mengerjakan ujian dari mana saja melalui koneksi internet tanpa terikat lokasi tradisional.

E.3. Manfaat

a. Optimalisasi Efisiensi: Mengotomatisasi seluruh tahapan ujian—mulai dari distribusi soal hingga penilaian—sehingga memangkas waktu, biaya, dan beban administrasi secara signifikan.

b. Transparansi & Akuntabilitas: Menjamin proses yang jujur melalui jejak digital yang dapat dilacak serta penilaian sistematis yang menutup celah intervensi atau kecurangan.

c. Akurasi Hasil: Menghilangkan risiko kesalahan manusia dan bias penilaian dengan algoritma komputer, sehingga hasil ujian jauh lebih presisi dan dapat diterbitkan lebih cepat.

d. Kenyamanan Peserta: Memberikan pengalaman ujian yang modern dan praktis melalui navigasi soal yang mudah serta kepastian hasil yang cepat, sehingga mengurangi kecemasan peserta.

E.4. Hasil

Inovasi CAT-UDIN telah merevolusi pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Pangkat di Aceh. Dengan beralih dari sistem manual ke digital, proses ujian kini menjadi jauh lebih cepat, hemat, dan akurat. Sistem terintegrasi ini berhasil memangkas birokrasi, menghapus biaya cetak-distribusi, serta menjamin hasil yang objektif. Kini, ASN dapat mengikuti ujian dengan penuh keyakinan berkat transparansi yang terjaga. CAT-UDIN adalah bukti nyata bahwa digitalisasi mampu menciptakan tata kelola kepegawaian Aceh yang lebih modern, bersih, dan tepercaya.

F. Inovasi TAGTO (Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Aceh), Kategori Inovasi Terbaik Berkelanjutan

F.1. Latar Belakang

Penyakit gondok atau pembesaran kelenjar tiroid masih menjadi tantangan kesehatan yang serius bagi masyarakat Aceh karena berdampak langsung pada sistem metabolisme tubuh. Selama ini, operasi menjadi jalan keluar utama, namun prosedur ini sering kali dihindari pasien karena rasa takut akan risiko bius total, bekas luka (jaringan parut), hingga biaya yang tinggi. Menjawab kekhawatiran tersebut, RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) menghadirkan inovasi TAGTO (Terapi Ablasi Gondok Tanpa Operasi), sebuah terobosan medis invasif minimal yang memungkinkan penyembuhan gondok jinak tanpa perlu melalui meja bedah.

Melalui layanan TAGTO, RSUDZA mengunggulkan teknologi Radiofrequency Ablation (RFA) yang bekerja dengan cara menghancurkan jaringan nodul menggunakan panas gelombang radio secara presisi. Keunggulan utama metode ini adalah pasien tidak perlu menjalani rawat inap, rasa nyeri yang sangat minimal, dan waktu pemulihan yang jauh lebih singkat dibandingkan operasi konvensional. Selain itu, karena tidak ada penyayatan besar, hasil estetika pada leher pasien tetap terjaga, sehingga meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas hidup mereka pasca-tindakan.

Layanan pionir di Indonesia ini telah terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), sehingga dapat diakses secara gratis oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari wilayah terpencil hingga perkotaan. Kolaborasi antara tim ahli endokrinologi RSUDZA dengan berbagai pihak terkait memastikan prosedur ini berjalan sesuai standar medis terbaru. Inovasi TAGTO tidak hanya memberikan kesembuhan yang efisien bagi pasien, tetapi juga mendukung efisiensi layanan di rumah sakit melalui sistem rawat jalan yang lebih praktis dan ekonomis.

F.2. Tujuan

Pasien gondok jinak kini memiliki pilihan terapi ablasi non-bedah yang menawarkan tingkat kesembuhan tinggi dengan komplikasi minimal. Layanan ini memastikan masyarakat Aceh mendapatkan akses kesehatan modern yang setara dengan negara maju secara merata dan efisien.

F.3. Manfaat

Layanan ini menghadirkan terobosan dalam penanganan benjolan tiroid (gondok) jinak melalui prosedur ablasi minimal invasif. Metode ini menjadi alternatif unggul selain operasi konvensional karena prosedurnya lebih singkat, efisien secara biaya, dan dapat dilakukan melalui rawat jalan. Selain menjaga estetika tanpa bekas luka, terapi ini meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas pasien dengan risiko efek samping yang rendah. Saat ini, layanan kami juga menjadi pusat pendidikan utama untuk diagnosis dan terapi minimal invasif di Indonesia

F.4. Hasil

Terapi ablasi tanpa operasi menawarkan solusi pengobatan gondok yang efisien dengan tingkat keberhasilan tinggi dan risiko komplikasi yang rendah. Secara klinis, pasien akan merasakan penyusutan volume gondok secara bertahap serta perbaikan pada aspek estetika. Sebagai pusat keunggulan, RSUD Dr. Zainoel Abidin juga berperan aktif dalam mendidik calon Konsultan Endokrinologi (EMD) untuk menguasai prosedur minimal invasif pada kasus gondok jinak.

Sementara itu, terdapat 10 SKPA dengan kategori SKPA sangat inovatif, sebagai berikut:

a. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan nilai rata-rata sebesar 94,56
b. Rumah Sakit Jiwa Aceh dengan nilai rata-rata sebesar 93,50
c. Dinas Perhubungan Aceh dengan nilai rata-rata sebesar 93,05
d. Badan Kepegawaian Aceh dengan nilai rata-rata sebesar 89,63
e. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dengan nilai rata-rata sebesar 87,85
f. Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh dengan nilai rata-rata sebesar 87,44
g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dengan nilai rata-rata sebesar 85,63
h. Dinas Kesehatan Aceh dengan nilai rata-rata sebesar 82,19
i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dengan nilai rata-rata sebesar 82,13
j. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Aceh dengan nilai rata-rata sebesar 81,81

Selain itu, pada Kategori SKPA dengan Inovasi terbanyak adalah sebagaii berikut:

a. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Aceh sebanyak 18 inovasi.
b. Dinas Perhubungan Aceh sebanyak 9 inovasi.
c. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebanyak 5 inovasi.
d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebanyak 4 inovasi.
e. Rumah Sakit Jiwa Aceh sebanyak 3 inovasi.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN ACEH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global

Kondisi perekonomi global saat ini sedang menghadapi ketidakpastian. Salah satu faktor pemicu yang paling signifikan adalah konflik geopolitik antar beberapa negara. Selain perang militer, stabilitas ekonomi dunia juga sedang terancam oleh perang dagang yang intensitasnya terus meningkat sejak Presiden Donald Trump memasuki masa jabatan periode kedua. Tekanan geopolitik dan kebijakan tarif Presiden Trump menyebabkan disrupsi pada rantai pasokan global, risiko kembalinya tekanan inflasi tinggi di negara maju, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian kebijakan perdagangan AS juga mendorong perubahan tatanan ekonomi global yang memicu instabilitas ekonomi, serta perpecahan ekonomi yang dapat mengurangi efisiensi perdagangan internasional. Perekonomian global pada tahun 2026 mengalami perlambatan dibandingkan capaian tahun 2025 yang berada pada kisaran 3,3-3,4 persen. Perlambatan ini terutama dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah sejak awal tahun 2026 yang mengganggu rantai pasok energi dan komoditas global, di samping faktor ketegangan dagang yang masih berlanjut. *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* April 2026 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1 persen pada tahun 2026 dan meningkat tipis menjadi 3,2 persen pada tahun 2027, dengan catatan asumsi konflik tetap berlangsung. Inflasi global diperkirakan naik menjadi sekitar 4,4 persen pada tahun 2026 akibat lonjakan harga energi, sebelum kembali melandai pada tahun 2027.

Selanjutnya, *World Bank* melalui Global Economic Prospects memberikan proyeksi yang lebih konservatif, yaitu pertumbuhan global sebesar 2,5 persen pada tahun 2026, dengan penekanan bahwa negara berkembang dan emerging markets (EMDEs) akan mengalami tekanan pendapatan per kapita terberat sejak masa pandemi. World Bank memperkirakan perbaikan bertahap pada periode 2027-2028 seiring pulihnya pasokan energi dan penguatan perdagangan dunia. Sementara itu, OECD dalam Economic Outlook edisi Juni 2026 menyajikan dua skenario akibat ketidakpastian konflik kawasan Teluk, yaitu skenario gangguan terbatas waktu dengan pertumbuhan global 2,8 persen pada 2026 dan naik menjadi 3,1 persen pada 2027, serta skenario gangguan berkepanjangan yang hanya menghasilkan pertumbuhan 2,1 persen pada 2026 dan 1,8 persen pada 2027 disertai inflasi yang jauh lebih tinggi. Ketiga lembaga sepakat bahwa risiko utama bersumber dari konflik Timur Tengah, fragmentasi geopolitik, dan ketidakpastian terkait realisasi manfaat produktivitas investasi kecerdasan buatan

(AI). Di sisi lain, investasi teknologi dan AI, dukungan fiskal serta moneter di sejumlah negara maju, dan ketahanan sektor swasta menjadi faktor penopang yang menahan perlambatan lebih dalam.

Harga minyak dan gas global meningkat tajam sejak pecahnya konflik di Timur Tengah, dengan IMF mengasumsikan harga minyak rata-rata 82,22 dolar AS per barel pada tahun 2026 sebelum melandai ke 75,97 dolar AS per barel pada tahun 2027. Sebagai negara net importir minyak namun net eksportir gas dan batu bara, Indonesia menghadapi dampak ganda, yaitu tekanan pada subsidi dan neraca perdagangan migas di satu sisi, serta potensi keuntungan dari harga ekspor gas dan batu bara yang lebih tinggi di sisi lain. OECD mencatat pertumbuhan perdagangan global melambat dari 5,0 persen pada tahun 2025 menjadi 3,1 persen pada tahun 2026 dan diperkirakan melambat lebih lanjut menjadi 2,9 persen pada tahun 2027. Penurunan tarif efektif Amerika Serikat melalui struktur tarif baru dinilai meringankan beban sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia, namun pelemahan permintaan global tetap menjadi tantangan bagi kinerja ekspor komoditas unggulan Indonesia.

Inflasi global diperkirakan meningkat pada tahun 2026, namun menurun pada tahun 2027 seiring normalisasi harga energi. Bagi Indonesia, ketiga lembaga memperkirakan inflasi domestik naik ke kisaran 3,1-3,4 persen pada tahun 2026 akibat rambatan harga energi global, meskipun kebijakan pembekuan harga BBM bersubsidi turut meredam tekanan tersebut. Bank Indonesia diperkirakan mempertahankan suku bunga kebijakan secara prudent hingga akhir tahun 2026. Selanjutnya, investasi terkait teknologi dan kecerdasan buatan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan global, terutama di Amerika Utara dan Asia. Bagi Indonesia, World Bank menyoroti pelemahan pasar tenaga kerja domestik dan perlambatan konsumsi rumah tangga, sementara realisasi investasi diperkirakan tetap tumbuh didukung oleh peran Danantara, regulasi yang lebih akomodatif, dan reformasi kebijakan investasi asing.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2026 mencapai Rp. 6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 3.447,7 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 terhadap triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,81 persen (Gambar 3.1).

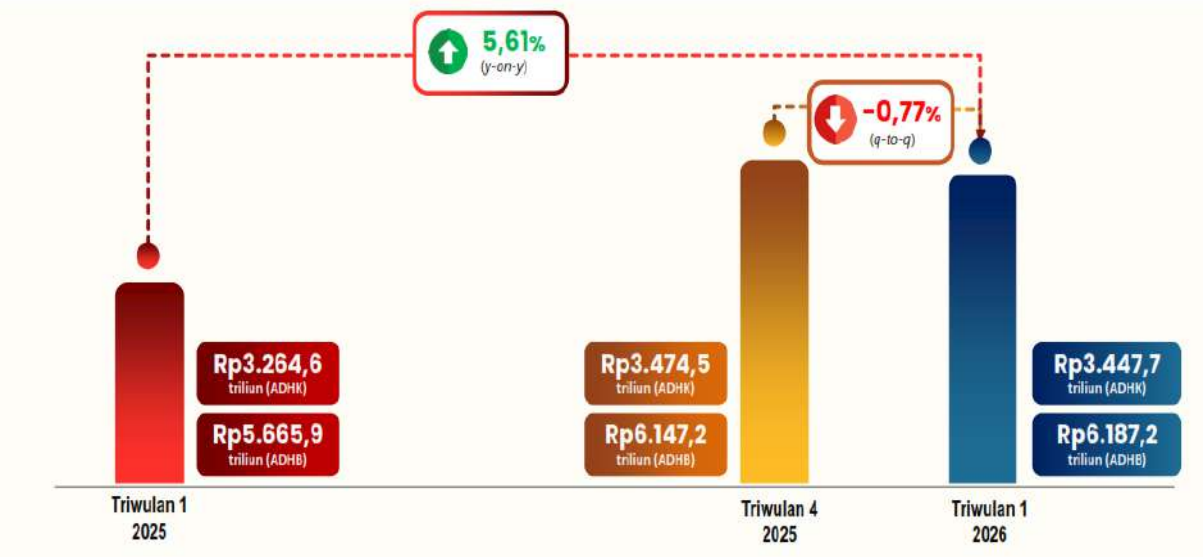

Sumber : Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS), Mei 2026

Gambar 3. 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan I - 2026 (y-on-y) (persen)

Ketiga lembaga internasional (IMF, World Bank dan , OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,0-5,1 persen pada tahun 2027, mencerminkan perbaikan bertahap dibandingkan tahun 2026 seiring normalisasi harga energi dan pulihnya permintaan global. World Bank menjadi yang paling konservatif dengan proyeksi 4,7 persen pada tahun 2026, merevisi turun dari 4,8 persen akibat terbatasnya dorongan harga minyak serta sentimen risk-off terhadap pendapatan berbasis komoditas. OECD memproyeksikan pola serupa, yaitu 4,7 persen pada tahun 2026 yang kemudian naik menjadi 5,0 persen pada tahun 2027 seiring redanya tekanan harga energi dan biaya pinjaman. IMF tetap menjadi yang paling optimistis dengan proyeksi 5,0 persen pada tahun 2026 dan 5,1 persen pada tahun 2027, serta stabil pada kisaran 5,2 persen pada tahun-tahun berikutnya.

Secara umum, ketiga lembaga tersebut menggarisbawahi bahwa pencapaian pertumbuhan di atas 5 persen sangat bergantung pada kemampuan Indonesia meredam dampak rambatan harga energi global, menjaga daya beli rumah tangga di tengah pelemahan pasar tenaga kerja, serta mengoptimalkan realisasi investasi melalui Danantara dan reformasi struktural guna meningkatkan produktivitas dan integrasi rantai nilai global.

3.1.3. Kondisi Perekonomian Aceh

Kondisi perekonomian Aceh akibat bencana hidrometeorologi di tahun 2025 telah menyebabkan disrupsi ekonomi yang cukup masif di Aceh pada triwulan IV -

2025. Bencana yang menerjang delapan belas kabupaten/kota ini telah menurunan aktivitas produksi, menghambat konektivitas dan mobilitas penduduk, memperlambat kinerja ekspor dan impor, serta mengurangi daya meli dan konsumsi masyarakat. Bencana ini secara langsung menghambat perekonomian Aceh, yang tercermin dari terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi, lonjakan inflasi yang cukup signifikan, serta meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi. Berikut digambarkan mengenai kondisi eksisting indikator makro Aceh tahun 2025 -2026.

3.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Aceh yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, pada triwulan I - 2026 mencapai Rp. 66,39 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 39,95 triliun. Laju pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I - 2026 tercatat sebesar 4,09 persen (y-on-y) dan negatif 0,61 persen (q-to-q). Lebih jelas mengenai pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I - 2026 dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.

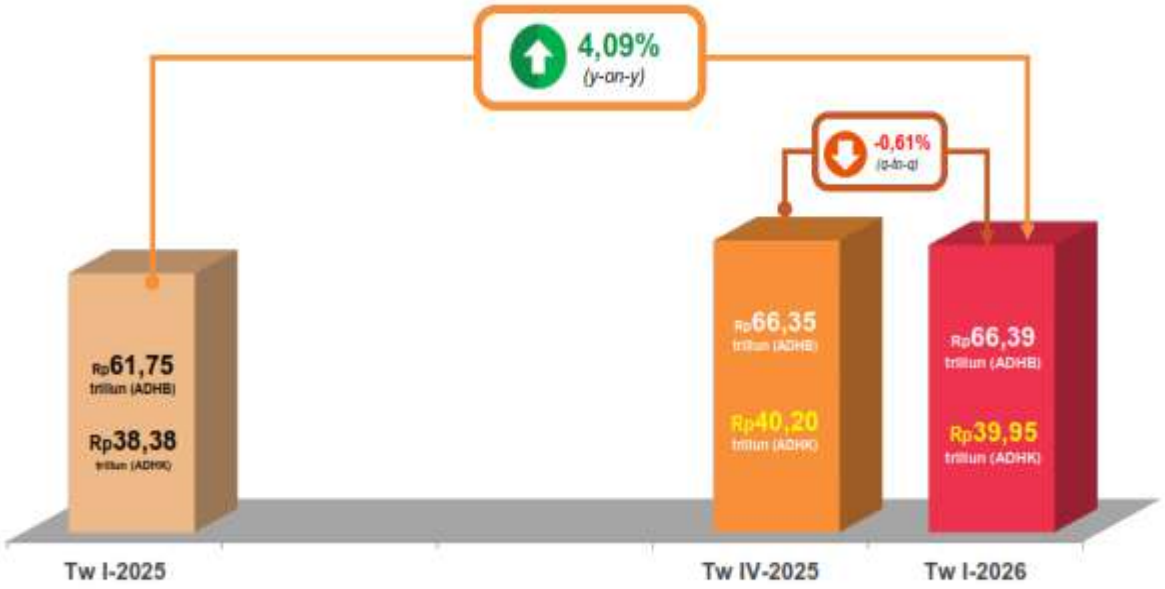

Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 05 Mei 2026

Gambar 3. 2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan I - 2026 (y-on-y) (persen)

Dari Gambar 3.3 diketahui struktur ekonomi Aceh masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 31,70 persen terhadap total PDRB Aceh. Sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang 15,92 persen, administrasi pemerintahan 8,99 persen, konstruksi 8,72 persen, serta

transportasi dan pergudangan 6,53 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah Jasa Keuangan dan Asuransi dengan laju pertumbuhan masing-masing 17,97 persen dan diikuti kontruksi sebesar 15,95 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 13,54 persen. Sektor konstruksi tumbuh signifikan seiring meningkatnya penjualan semen sekitar 30 persen yang didorong rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan hunian sementara, hunian tetap, jalan, dan jembatan

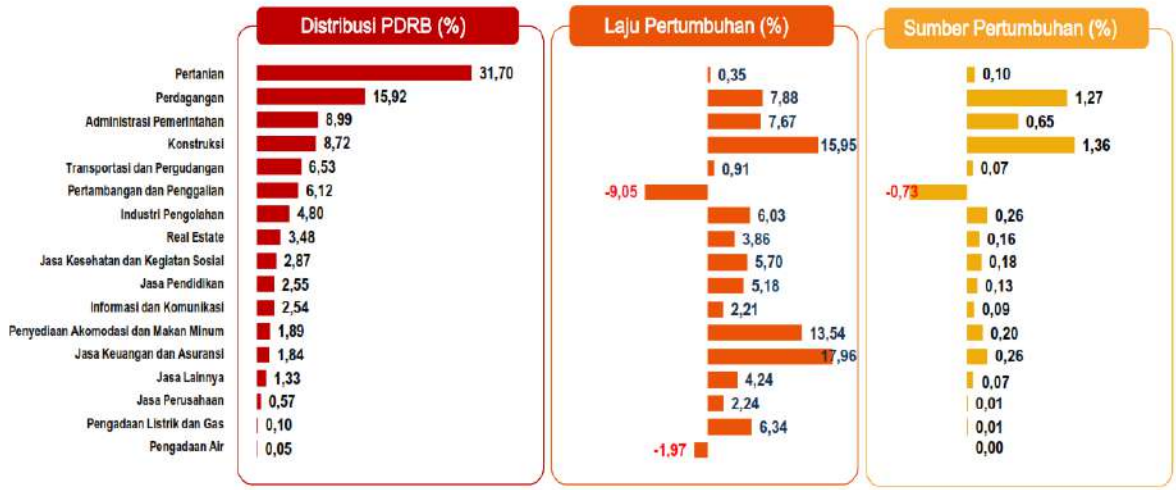

Sumber : Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 05 Mei 2026

Gambar 3. 3
Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Triwulan I - 2026 (y-on-y) (persen)

Dari sisi konsumsi, daya beli masyarakat meningkat akibat bertambahnya jumlah ASN serta pembayaran gaji dan tunjangan hari raya (THR). Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat 2,70 persen secara tahunan. Dari sisi eksternal, ekspor luar negeri meningkat sejalan dengan naiknya ekspor batu bara, sedangkan impor menurun akibat turunnya impor pupuk dan migas. Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan dengan lebih dari 650 SPPG aktif turut memberikan dampak terhadap aktivitas penyediaan makan minum, industri makanan, dan perdagangan (lihat Gambar 3.4).

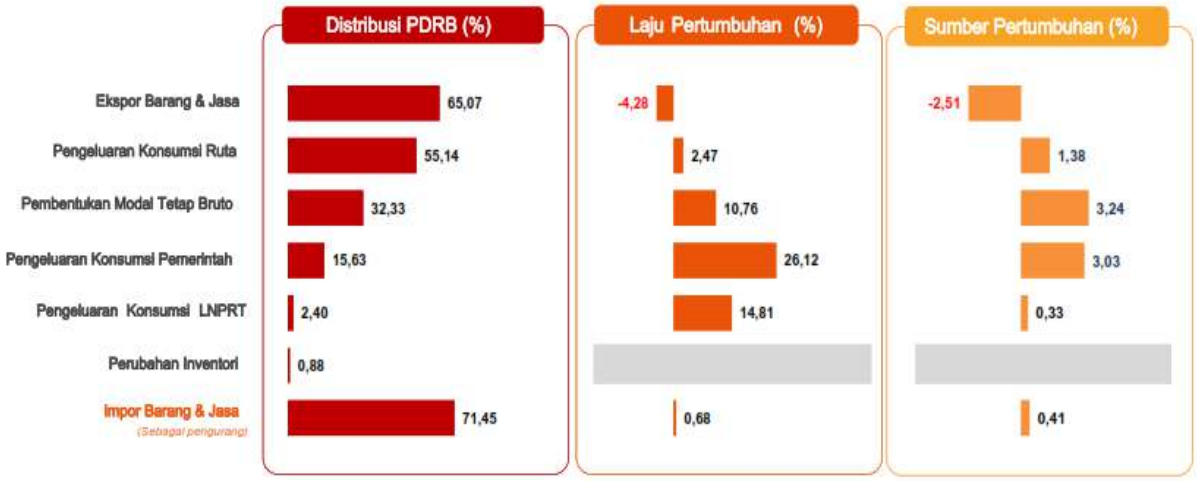

Sumber : Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 05 Mei 2026

Gambar 3. 4
Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan I - 2026 (y-to-y) (persen)

Secara regional, laju pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I-2026 yang tercatat sebesar 4,09 persen, berkontribusi sebesar 4,88 persen terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kepulauan Riau yakni sebesar 7,04 persen dengan kontribusi sebesar 7,30 persen. Sementara itu provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi regional Sumatera adalah Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 23,50 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,98 persen, diikuti oleh Provinsi Riau dengan kontribusi sebesar 23,29 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4, 89 persen. Lebih jelas kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi se-Sumatera triwulan I– 2026 dapat dilihat pada Gambar 3.5.

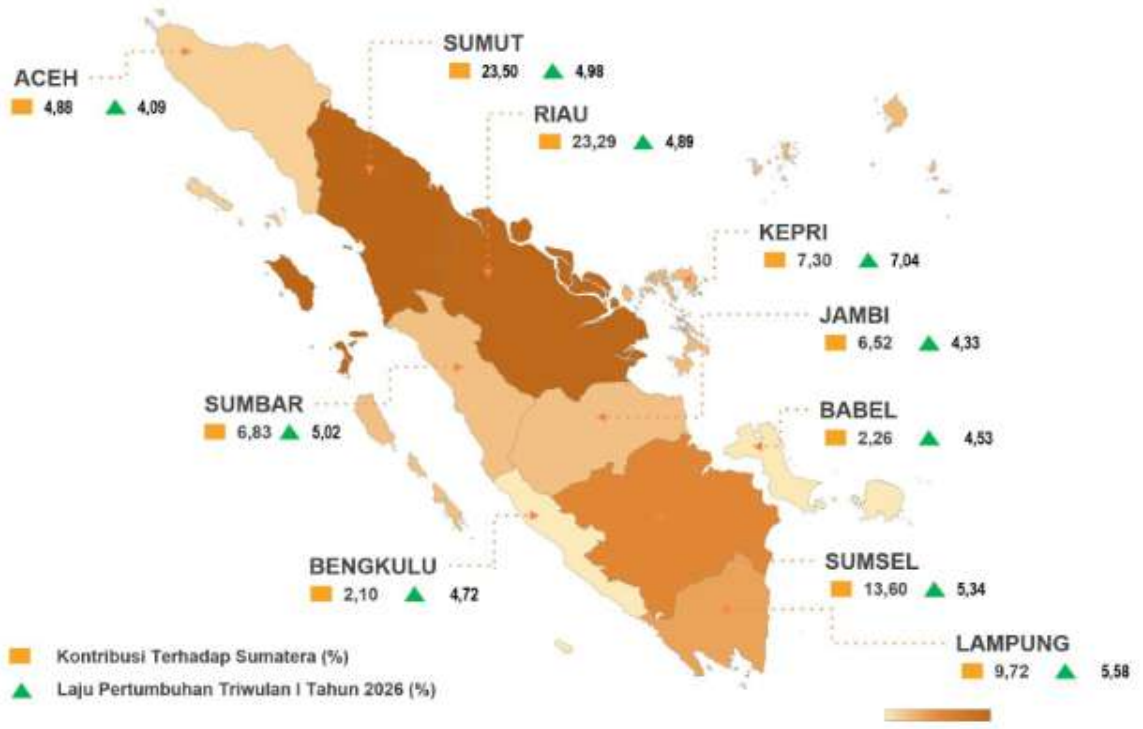

Sumber Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 05 Mei 2026

Gambar 3. 5

Perbandingan Kinerja Ekonomi Provinsi se-Sumatera Triwulan I - 2026 (y-on-y) (persen)

3.1.3.2. Inflasi

Inflasi Aceh pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,31 persen (y-on-y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,40. Inflasi tertinggi terjadi di Kab. Aceh Tengah, yaitu sebesar 6,07 persen (y-on-y) dengan IHK sebesar 116,58, dan terendah terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, sebesar 4,84 persen (y-on-y) dengan IHK sebesar 114,58. Perbandingan IHK dan tingkat inflasi pada bulan Desember 2025 berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1
Perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Tingkat Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Maret 2026

Wilayah	IHK	Inflasi Y-on-Y (Persen)	Inflasi m-to-m (Persen)
1	2	3	4
Kab. Aceh Tengah	116,58	6,07	-0,56
Kota Meulaboh	114,81	4,95	0,10
Kab. Aceh Tamiang	114,64	4,84	0,46

Wilayah	IHK	Inflasi Y-on-Y (Persen)	Inflasi m-to-m (Persen)
1	2	3	4
Kota Banda Aceh	112,58	5,20	0,12
Kota Lhokseumawe	113,22	5,46	0,11
Aceh	114,01	5,31	0,04

Sumber Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2026

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 5,36 persen; Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,90 persen; Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 7,16 persen; Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,36 persen; Kesehatan sebesar 2,40 persen; Transportasi sebesar 1,29 persen, ; Informasi, Komunikatif, dan Jasa Keuangan sebesar 0,75 persen; Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 0,97 persen; Pendidikan sebesar negatif 0,11 persen; Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 9,12 persen; dan Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 15,78 persen. Lebih jelas mengenai inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran Maret 2026 (y-on-y) dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3. 2
Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Maret 2026 (y-on-y) (persen)

No	Kelompok Pengeluaran	Inflasi (%)	Andil Inflasi (%)
1	2	3	4
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	5,36	2,03
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,90	0,05
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	7,16	1,07
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,36	0,05
5	Kesehatan	2,40	0,04
6	Transportasi	1,29	0,13
7	Informasi, Komunikatif, dan Jasa Keuangan	0,75	0,03
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,97	0,01
9	Pendidikan	-0,11	~0
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	9,12	0,98

No	Kelompok Pengeluaran	Inflasi (%)	Andil Inflasi (%)
1	2	3	4
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	15,78	0,92

Sumber Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2026

Selanjutnya terdapat 5 komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Maret 2026, antara lain: Tarif Listrik sebesar 0,89 persen; Emas Perhiasan sebesar 0,86 persen; Beras sebesar 0,80 persen; Nasi dengan Lauk sebesar 0,46 persen; dan Sigaret Kretek Mesin sebesar 0,22 persen. Sementara itu, komoditas yang memiliki andil terhadap deflasi diantaranya adalah Cabai Merah sebesar negatif 0,18 persen; Kentang sebesar negatif 0,09 persen; Bawang Putih sebesar negatif 0,06 persen, Baju Muslim Wanita sebesar negatif 0,05 persen; dan Cabai Rawit sebesar 0,04 persen.

Bencana Hidrometeorologi membuat hasil panen (cabai, kentang, dan bawang putih) menjadi komoditas dengan andil terhadap deflasi terbesar pada periode Maret 2026. Keterbatasan mobilitas dari daerah penghasil menuju area distribusi menciptakan disrupsi pasar (hasil panen yang melimpah tidak dapat disalurkan ke luar daerah). Kelimpahan barang membuat harga komoditas hasil panen mengalami penurunan di dalam daerah dan menyebabkan penurunan IHK. Lebih jelas mengenai komoditas yang memberikan andil kepada inflasi/deflasi Maret 2026 (y-on-y) dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3
Andil Beberapa Komoditas Terhadap Inflasi/Deflasi MARET 2026 (y-on-y) (persen)

No	Andil Inflasi (%)		Andil Deflasi (%)	
1	2	3	4	5
1	Tarif Listrik	0,89	Cabai Merah	-0,18
2	Emas Perhiasan	0,86	Kentang	-0,09
3	Beras	0,80	Bawang Putih	-0,06
4	Nasi dengan Lauk	0,46	Baju Muslim Wanita	-0,05
5	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,22	Cabai Rawit	-0,04

Sumber Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 05 Januari 2026

3.1.3.3. Gini Ratio

Gini ratio Aceh pada September 2025 berada pada tingkat 0,274 poin. G*ini Ratio* di daerah perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,316 poin

mengalami penurunan sebesar 0,013 poin jika dibandingkan dengan gini ratio pada Maret yang tercatat sebesar 0,282. Sementara itu *Gini Ratio* di Pedesaan mengalami sedikit peningkatan (sebesar 0,001), dimana *Gini Ratio* pada September 2025 tercatat sebesar 0,225 poin dan sebesar 0,224 pada Maret 2026 yang tercatat sebesar 0,253. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan distribusi pendapatan di wilayah perkotaan. Di sisi lain, distrinusi pendapatan di wilayah pedesaan tampak cukup stagnan. Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut ini.



Sumber Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2025

Gambar 3. 6
Perkembangan *Gini Ratio* Aceh September 2020 – Maret 2025 (Indeks)

Jika dibandingkan dengan gini ratio nasional gini ratio Aceh pada September 2025 jauh lebih baik, dimana gini ratio Aceh tercatat sebesar 0,282 dan nasional sebesar 0,375. Secara nasional pada Maret 2025, provinsi dengan gini ratio tertinggi adalah DKI Jakarta yang tercatat sebesar 0,441, dan terendah tercatat di Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 0,222 (lihat Tabel 3.4)

Tabel 3. 4
Gini Ratio Menurut Provinsi Periode September 2024 – September 2025

No	Provinsi	September 2024			Maret 2025			September 2025		
		Perkotaan	Pedesaan	K+D	Perkotaan	Pedesaan	K+D	Perkotaan	Pedesaan	K+D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ACEH	0,332	0,253	0,294	0,329	0,224	0,282	0,316	0,225	0,274
2	SUMATERA UTARA	0,333	0,236	0,306	0,324	0,228	0,295	0,305	0,233	0,283
3	SUMATERA BARAT	0,313	0,226	0,287	0,307	0,232	0,282	0,301	0,236	0,28
4	RIAU	0,333	0,271	0,306	0,345	0,267	0,307	0,337	0,268	0,304
5	JAMBI	0,353	0,279	0,315	0,328	0,275	0,301	0,32	0,266	0,291
6	SUMATERA SELATAN	0,357	0,3	0,331	0,37	0,224	0,311	0,352	0,215	0,298
7	BENGKULU	0,409	0,278	0,343	0,424	0,269	0,349	0,411	0,267	0,339
8	LAMPUNG	0,329	0,27	0,301	0,319	0,261	0,292	0,312	0,265	0,287

No	Provinsi	September 2024			Maret 2025			September 2025		
		Perkotaan	Pedesaan	K+D	Perkotaan	Pedesaan	K+D	Perkotaan	Pedesaan	K+D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	KEP. BANGKA BELITUNG	0,251	0,189	0,235	0,232	0,199	0,222	0,224	0,191	0,214
10	KEP. RIAU	0,36	0,236	0,357	0,383	0,238	0,382	0,388	0,242	0,385
11	DKI JAKARTA	0,431	-	0,431	0,441	-	0,441	0,423	-	0,423
12	JAWA BARAT	0,439	0,327	0,428	0,426	0,323	0,416	0,408	0,308	0,397
13	JAWA TENGAH	0,392	0,317	0,364	0,39	0,306	0,359	0,381	0,296	0,35
14	DI YOGYAKARTA	0,429	0,355	0,428	0,434	0,334	0,426	0,419	0,337	0,414
15	JAWA TIMUR	0,388	0,332	0,373	0,383	0,326	0,369	0,376	0,319	0,359
16	BANTEN	0,361	0,246	0,359	0,335	0,221	0,33	0,314	0,234	0,312
17	BALI	0,352	0,285	0,348	0,352	0,277	0,353	0,338	0,269	0,333
18	NUSA TENGGARA BARAT	0,388	0,32	0,364	0,397	0,323	0,369	0,386	0,328	0,364
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0,282	0,306	0,316	0,28	0,298	0,315	0,276	0,309	0,322
20	KALIMANTAN BARAT	0,341	0,258	0,314	0,348	0,267	0,316	0,341	0,267	0,308
21	KALIMANTAN TENGAH	0,322	0,282	0,304	0,31	0,272	0,292	0,311	0,256	0,284
22	KALIMANTAN SELATAN	0,326	0,259	0,298	0,304	0,248	0,287	0,292	0,252	0,281
23	KALIMANTAN TIMUR	0,315	0,282	0,31	0,316	0,287	0,312	0,3	0,325	0,31
24	KALIMANTAN UTARA	0,245	0,265	0,259	0,262	0,253	0,261	0,255	0,242	0,251
25	SULAWESI UTARA	0,351	0,331	0,347	0,343	0,332	0,343	0,338	0,339	0,341
26	SULAWESI TENGAH	0,34	0,271	0,309	0,305	0,249	0,279	0,312	0,24	0,277
27	SULAWESI SELATAN	0,369	0,33	0,36	0,373	0,333	0,363	0,363	0,315	0,35
28	SULAWESI TENGGARA	0,374	0,337	0,365	0,359	0,345	0,363	0,369	0,328	0,357
29	GORONTALO	0,4	0,402	0,413	0,389	0,376	0,392	0,378	0,359	0,383
30	SULAWESI BARAT	0,404	0,296	0,33	0,434	0,259	0,316	0,424	0,26	0,308
31	MALUKU	0,284	0,236	0,291	0,276	0,249	0,296	0,262	0,228	0,273
32	MALUKU UTARA	0,328	0,243	0,296	0,34	0,249	0,299	0,329	0,236	0,275
33	PAPUA BARAT	0,296	0,416	0,385	0,279	0,409	0,374	0,289	0,418	0,383
34	PAPUA BARAT DAYA	0,262	0,418	0,347	0,251	0,478	0,363	0,246	0,47	0,361
35	PAPUA	0,322	0,505	0,405	0,314	0,511	0,404	0,318	0,479	0,397
36	PAPUA SELATAN	0,351	0,429	0,424	0,326	0,418	0,412	0,317	0,431	0,426
37	PAPUA TENGAH	0,253	0,374	0,355	0,207	0,348	0,333	0,222	0,361	0,34
38	PAPUA PEGUNUNGAN	0,244	0,349	0,346	0,301	0,345	0,349	0,297	0,332	0,347
39	INDONESIA	0,402	0,308	0,381	0,395	0,299	0,375	0,383	0,295	0,363

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

3.1.3.4. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Aceh pada September 2025 tercatat sebesar 12,22 persen, mengalami penurunan sebesar 0,42 persen jika dibandingkan dengan periode September 2024 yang tercatat sebesar 12,64 persen. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada September 2025 berjumlah sebesar 703,33 ribu orang, mengalami penurunan sebesar 15,63 ribu orang jika dibandingkan dengan periode September 2024 yang berjumlah sebesar 718,96 ribu orang. Kemiskinan yang terjadi pada periode September 2024 hingga Maret 2025 menunjukkan tren penurunan yang berkelanjutan. Capaian ini mencerminkan perbaikan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Lebih jelas mengenai perkembangan persentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Aceh periode September 2020 s.d September 2025 dapat dilihat pada Gambar 3.7 berikut ini.

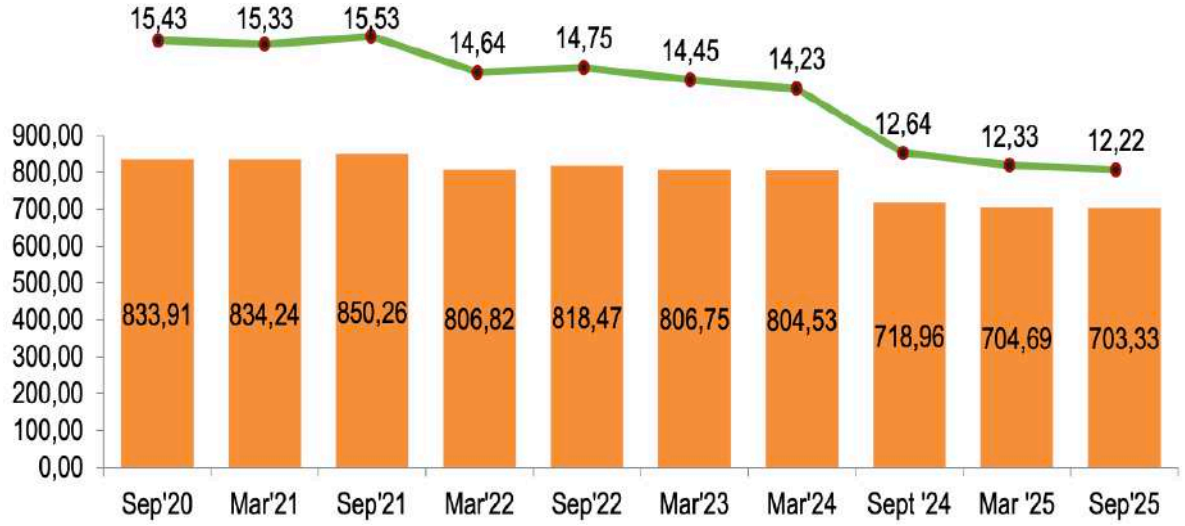

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Aceh, 2026

Gambar 3. 7
Perkembangan Kemiskinan Aceh Periode September 2020 – September 2025

Berdasarkan Gambar 3.8 diketahui bahwa tingkat kemiskinan di perkotaan jauh lebih rendah dibandingkan dengan perdesaan, dimana tingkat kemiskinan pada September 2025 di perkotaan tercatat sebesar 8,15 persen dan di perdesaan sebesar 14,51 persen. Penurunan Tingkat kemiskinan di perkotaan pada September 2025 terjadi mengalami penurunan sebesar 0,39 persen, sementara itu Tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan naik sebesar 0,07 poin persen Peningkatan Kenaikan tingkat kemiskinan di perdesaan dapat terjadi karena gelombang urbanisasi, ketergantungan perekonomian pada sektor agrikultur, rendahnya divesifikasi kegiatan ekonomi, dan keterbatasan mobilitas penduduk. Dengan berpindahnya penduduk berumur produktif ke perkotaan, pendapatan kumulatif masyarakat perkotaan terus menurun, menyebabkan tingkat kemiskinan di perdesaan.

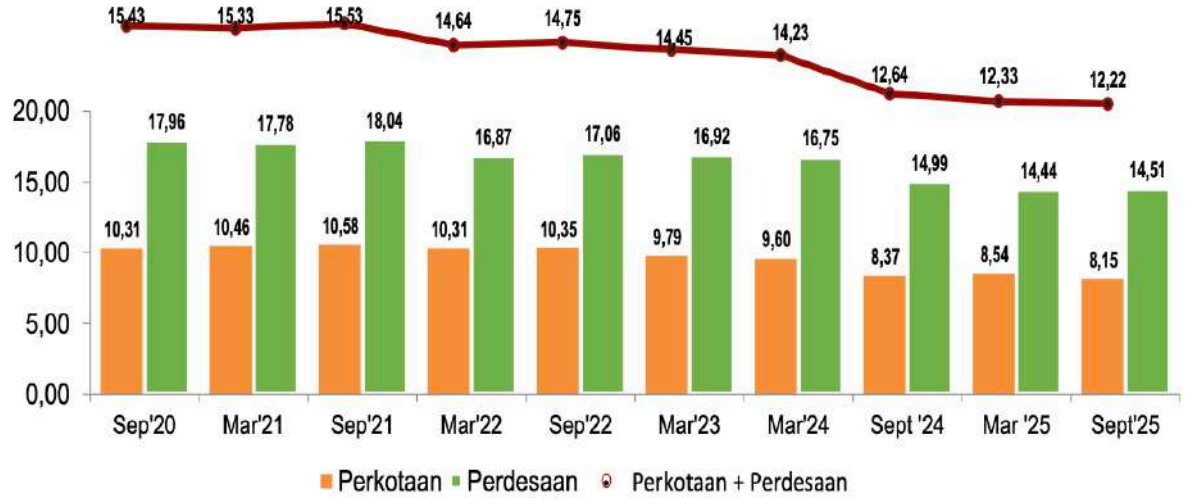

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Aceh, 2026

Gambar 3. 8
Persentase Penduduk Miskin Menurut Perkotaan dan Perdesaan Periode September 2020 – September 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meggambarkan proksimitas pendapatan masyarakat miskin dengan garis kemiskinan secara kumulatif. Garis Kemiskinan Aceh sendiri mencapai Rp676.247 per kapita/bulan pada September 2025. Pada Gambar 3.9 dapat dilihat bahwa Indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan menunjukkan peningkatan sebesar 0,029 dari Maret 2025 menjadi 1,216 di bulan September 2025. Sementara itu Indeks Kedalaman Kemiskinan di perdesaan mengalami kenaikan yang lebih drastis, dimana terjadi peningkatan sebesar 0,33 dari periode Maret 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan semakin jauh dari garis kemiskinan, dalam kata lain daya beli masyarakat miskin perkotaan di Provinsi Aceh tampak melemah. (lihat Gambar 3.9).

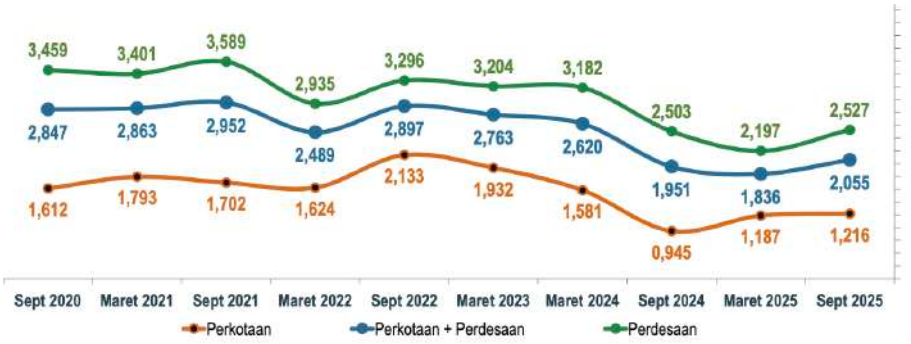

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Aceh, 2026

Gambar 3. 9
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Periode
September 2020 – September 2025

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Aceh pada September 2025 tercatat sebesar 0,523, meningkat sebesar 0,103 dibandingkan dengan bulan Maret 2025 yang sebesar 0,420. Indeks Keparahan yang meningkat menunjukkan bahwa ketimpangan antara kelompok miskin semakin membesar. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa intervensi kebijakan, seperti subsidi atau program bantuan sosial perlu dikembangkan lagi untuk dapat menjangkau kelompok yang paling rentan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan pendapatan secara keseluruhan di masa mendatang. Meskipun demikian, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Aceh tampak menurun. Lebih jelas mengenai indeks keparahan kemiskinan Aceh periode Maret 2019 s.d Maret 2025 dapat dilihat pada Gambar 3.10 berikut ini.



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Aceh, 2026

Gambar 3. 10
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Periode
September 2020 – September 2025

3.1.3.5. Pengangguran

Berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja (Sakernas), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,88 persen, mengalami peningkatan sebesar 3,8 persen poin jika dibandingkan dengan Februari 2025 yang tercatat sebesar 5,50 persen. TPT laki laki (6,09 persen) lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan yang tercatat sebesar 5,51 persen. TPT diwilayah perkotaan juga masih tinggi (8,03 persen) dibandingkan dengan wilayah perdesaan yang tercatat sebesar 4,34 persen pada Februari 2026 (lihat Gambar 3.11).

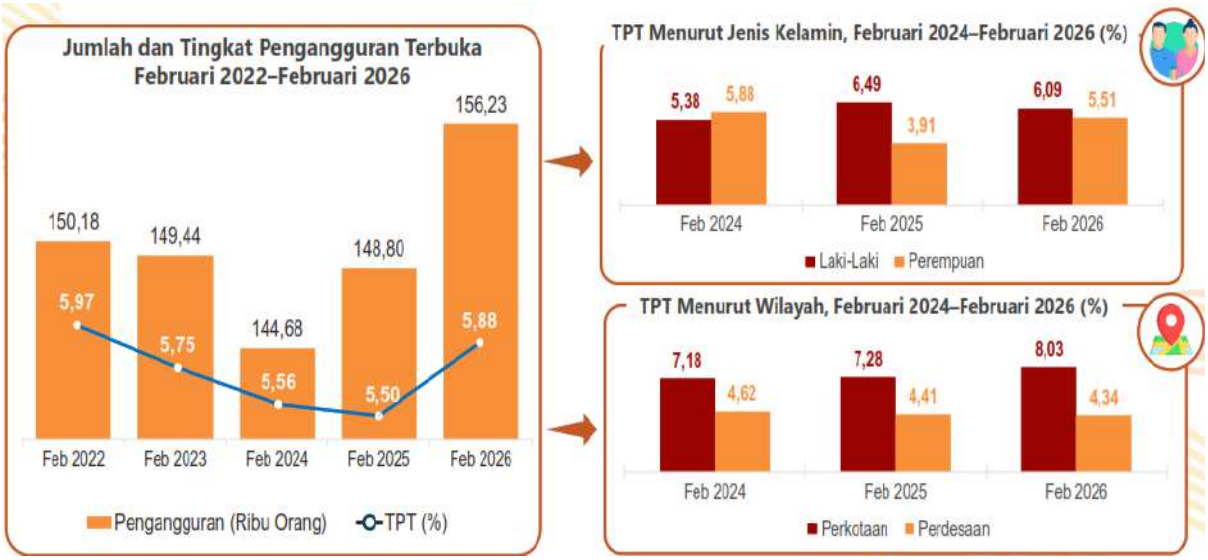

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Aceh, 05 Mei 2026

Gambar 3. 11
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh Periode Februari 2022 - Februari 2026

Jumlah penduduk usia kerja di Aceh Februari 2026 tercatat sebesar 4,19 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 66,51 ribu orang jika dibandingkan Februari 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,66 juta orang merupakan angkatan kerja dan 1,53 juta orang termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja terdiri atas 2,5 juta orang bekerja dan 156,23 ribu orang pengangguran. Jika dibandingkan dengan Februari 2025, jumlah penduduk bekerja mengalami penurunan sebesar 55,34 ribu orang, sementara jumlah pengangguran meningkat sebesar 7,43 ribu orang. Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.12 berikut ini.



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Aceh, 05 Mei 2026

Gambar 3. 12
Struktur Ketenagakerjaan Aceh, Februari 2026

Dari Gambar 3.14, diketahui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2026 tercatat sebesar 63,44 persen, mengalami penurunan sebesar 2,19 persen poin jika dibandingkan dengan TAPK Februari 2025 yang tercatat sebesar 65,63 persen. TPAK laki-laki sebesar 81,45 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 45,50 persen. Jika dibandingkan Agustus 2025, TPAK laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,16 persen poin, sedangkan perempuan mengalami penurunan sebesar 4,54 persen poin. Lebih jelas mengenai TAPK periode menurut jenis kelamin periode Februari 2024 s.d Februari 2026 dapat dilihat pada Gambar 3.13 berikut.

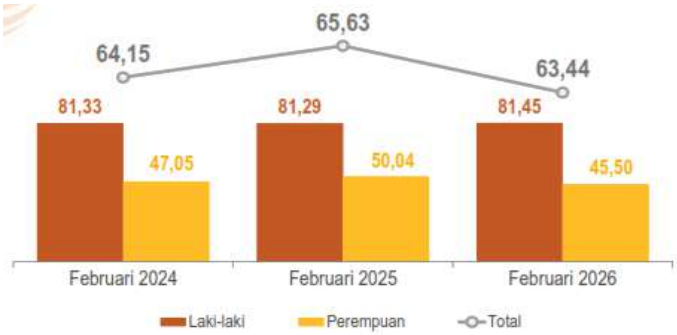

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Aceh, 05 Mei 2026

Gambar 3. 13
Tingkat Pastisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin, Februari 2024 –Februari 2026

Selanjutnya, menurut status pekerjaan dari 2,5 juta orang yang bekerja Februari 2026 tercatat sebesar 31,44 persen adalah buruh/karyawan/pegawai, diikuti berusaha dibantu buruh tidak tetap mencapai 19,18 persen dan berusaha sendiri sebesar 18,44 persen. Lebih jelas mengenai status pekerjaan Februari 2026 dapat dilihat pada Gambar 3.14 berikut ini.

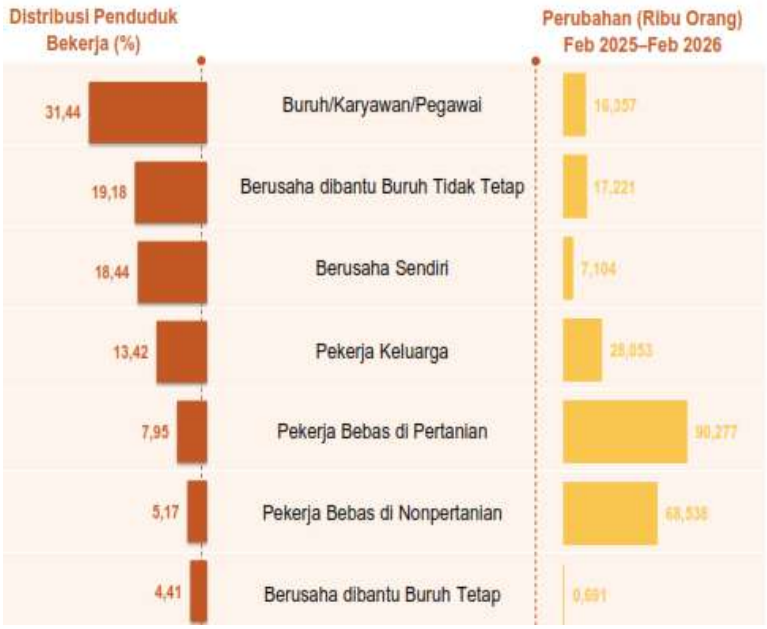

Sumber Berita Resmi Statistik, BPS Aceh 05 Mei 2026

Gambar 3. 14
Status Pekerjaan, Februari 2026

3.1.3.6. Kinerja Investasi

Kondisi investasi di Aceh dapat dilihat dari 2 indikator yang meliputi Indeks Daya Saing Investasi (IDSI) yang dirilis oleh DPMPSTP Aceh dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). IDSD disusun dalam rangka memberikan evaluasi dan perbaikan iklim investasi di 23 kabupaten/kota se-Aceh. Tingkat daya saing investasi menjadi salah satu parameter yang memperlihatkan iklim investasi suatu daerah. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka semakin kondusif pula iklim investasi yang tercipta yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Indeks Daya Saing Investasi merupakan alat ukur yang tepat dan saat ini banyak dimanfaatkan sebagai acuan bagi pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Penyusunan Indeks Daya Saing Investasi ini mengadopsi metodologi Asia

Competitiveness Institute (ACI) National University of Singapore (NUS) yang terdiri dari 4 (empat) lingkup antara lain : Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, yang meliputi keseluruhan kondisi ekonomi di daerah, Lingkup Perencanaan Pemerintah dan Institusi, yang mencakup keberhasilan institusi pemerintahan dan juga harapan dari kemajuan di sektor publik, Lingkup Kondisi Finansial, Bisnis dan Tenaga Kerja, yang mewakili kinerja dan potensi perusahaan dan juga kondisi yang dihadapi perusahaan, dan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, yang mengombinasikan infrastruktur dengan penyediaan fasilitas sosial dasar. Termasuk juga 12 sub lingkup dan 76 indikator ekonomi lainnya.

Data yang digunakan dalam penyusunan Indeks Daya Saing Investasi ini diperoleh dari berbagai sumber antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk menganalisis berbagai data, digunakan metode statistik skor terstandarisasi. Skor terstandarisasi adalah perbandingan relatif kinerja suatu Kabupaten/Kota dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten/Kota. Dengan menganalisis data yang ada, dapat diidentifikasi bukan hanya peringkat Daya Saing Keseluruhan, tetapi juga indikator spesifik dimana sebuah Kabupaten/Kota berkinerja baik atau mengalami kesulitan. Simulasi peningkatan daya saing (Simulasi What If) dapat dijadikan sebagai rujukan dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada setiap Kabupaten/Kota untuk meningkatkan Daya Saing Daerah.

Dari Tabel 3.5 diketahui Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2025 memperlihatkan Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten/kota se Aceh yang diukur melalui 4 (empat) lingkup. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat rentang total nilai dari yang terendah sebesar -1,258 diperoleh Kabupaten Simeulue, sampai yang tertinggi sebesar 1,535 diperoleh oleh Kota Banda Aceh. Sebagai ibukota provinsi, Kota Banda Aceh tetap jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain di Aceh. Dari tahun 2019 sampai dengan 2025 Kota Banda Aceh memperoleh peringkat teratas untuk Indeks Daya Saing Investasi Aceh, disusul oleh Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Utara masing-masing di peringkat 2 dan 3.

Tabel 3. 5
Indeks Daya Saing Investasi (IDSI) Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Stabilitas Ekonomi Makro	Pemerintahan dan Institusi Publik	Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur	Nilai Indeks Daya Saing	Peringkat
Banda Aceh	1,684	-0,589	2,636	2,407	1,535	1
Aceh Besar	1,203	0,233	1,196	1,753	1,096	2
Aceh Utara	1,273	1,287	1,387	-0,281	0,917	3
Lhokseumawe	0,616	0,216	1,033	1,379	0,811	4
Aceh Barat	0,958	1,182	0,400	0,025	0,641	5
Aceh Tengah	0,359	0,271	0,767	0,776	0,543	6
Nagan Raya	1,546	0,045	0,777	-0,336	0,508	7
Bireuen	0,596	0,814	0,675	-0,478	0,402	8
Bener Meriah	-0,627	1,071	-0,341	0,347	0,112	9
Aceh Tamiang	0,037	-0,312	0,354	0,235	0,078	10
Aceh Timur	0,336	0,119	-0,277	0,005	0,046	11
Sabang	-0,887	-0,245	-0,616	1,059	-0,172	12
Pidie	0,069	0,346	0,213	-1,461	-0,208	13
Aceh Barat Daya	-0,572	-0,262	-0,530	0,012	-0,338	14
Langsa	-0,551	-0,972	-0,237	0,248	-0,378	15
Aceh Selatan	-0,569	0,335	-0,089	-1,257	-0,395	16
Singkil	-0,459	0,554	-1,236	-0,531	-0,418	17
Gayo Lues	-0,715	0,049	-0,561	-1,032	-0,565	18
Aceh Jaya	-0,779	-0,073	-1,188	-0,398	-0,610	19
Pidie Jaya	-0,904	0,505	-0,854	-1,689	-0,735	20
Aceh Tenggara	-0,861	-0,673	-0,525	-0,888	-0,737	21
Subulussalam	-0,643	-1,514	-1,366	-0,649	-1,043	22
simeulue	-1,296	-2,877	-1,614	0,753	-1,258	23

Sumber: DPMPTSP Aceh, 2025

Selanjutnya, terkait dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dari Gambar 3.15 diketahui skor IDSD Aceh tahun 2025 adalah sebesar 3.61 diatas rata rata nasional yang tercatat sebesar 3,50. Skor IDSD Tahun 2025 tertinggi diperoleh oleh DKI Jakarta, disusul Bali dan DI Yogyakarta pada posisi 2 dan 3.

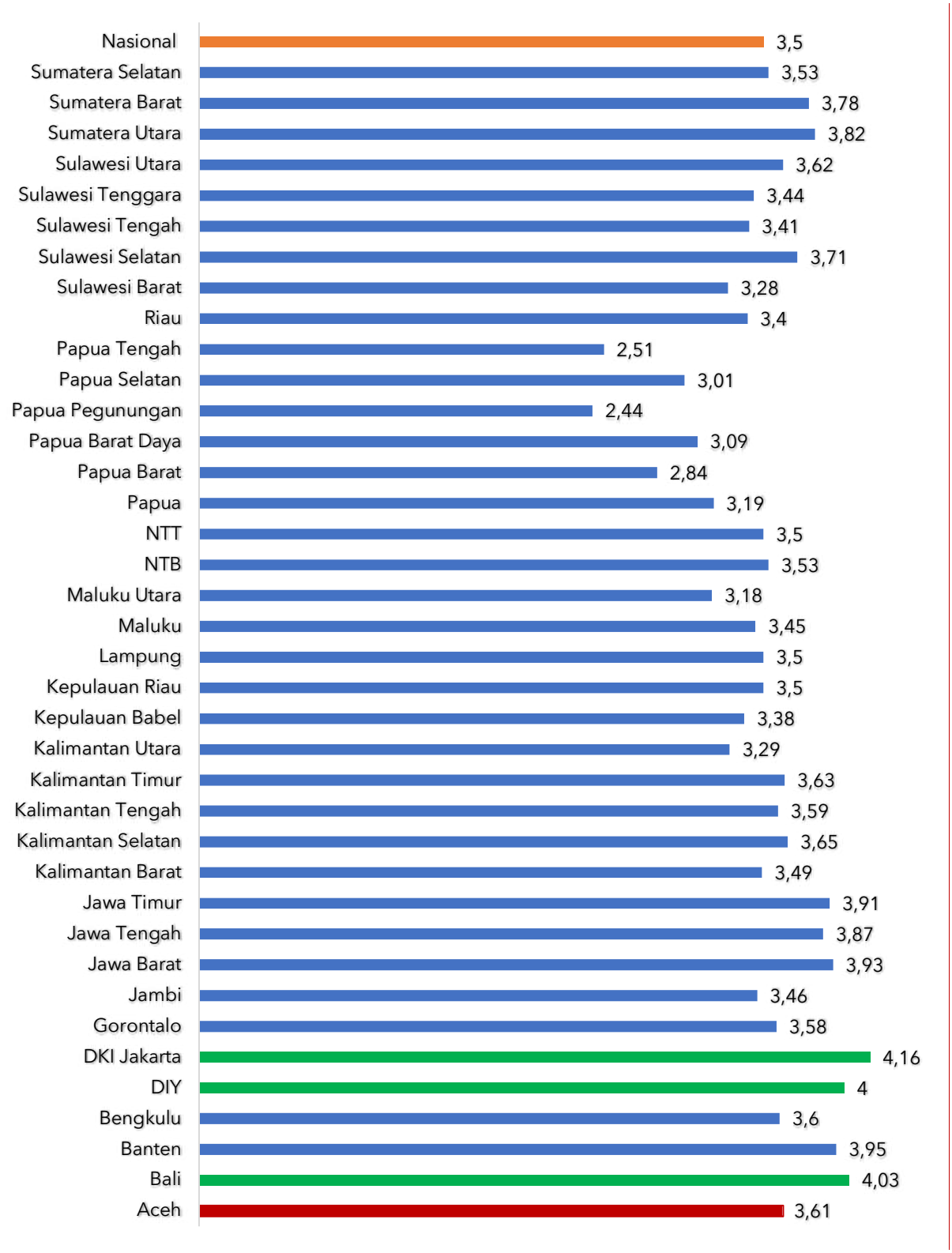

Sumber: BRIN, 2025

Gambar 3. 15
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025

Tabel 3. 6
Tabel Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Aceh Tahun 2025

NAMA KAB/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,30	3,37	3,68	4,02	3,79	3,67	2,55	2,96	2,90	4,38	2,79	3,54	3,50
PROVINSI ACEH	4,71	3,28	3,38	3,84	3,79	3,95	4,47	2,67	2,21	4,38	2,80	3,90	3,61
RATA-RATA KAB/KOTA	4,65	2,84	4,05	3,86	3,65	4,22	3,38	3,09	2,38	3,80	3,26	2,38	3,46
SIMEULUE	4,75	2,29	3,94	3,97	3,39	4,04	3,75	2,13	2,02	3,36	2,07	1,76	3,12
ACEH SINGKIL	4,64	2,89	4,64	3,44	3,57	3,98	3,72	2,74	2,85	3,38	2,97	1,65	3,37
ACEH SELATAN	4,79	2,74	3,35	4,07	3,33	4,39	3,57	3,00	2,38	3,78	3,61	2,06	3,42
ACEH TENGGARA	4,48	2,49	3,32	3,84	3,65	4,17	3,57	3,08	2,90	3,68	2,75	2,35	3,36
ACEH TIMUR	4,75	2,92	3,77	3,59	3,68	3,83	2,82	2,98	1,82	4,07	2,59	1,25	3,17
ACEH TENGAH	4,57	3,14	3,86	3,64	3,69	4,47	2,98	1,91	1,81	3,94	4,61	2,92	3,46
ACEH BARAT	4,64	2,71	3,75	3,55	3,62	4,11	2,67	2,80	2,55	4,04	2,85	3,52	3,40
ACEH BESAR	4,84	3,45	4,17	4,01	3,77	4,13	3,85	3,34	2,36	4,17	3,92	3,65	3,80
PIDIE	4,74	2,85	3,52	3,69	3,53	4,12	3,49	3,35	2,40	4,06	2,73	3,30	3,48
BIREUEN	4,71	3,22	4,05	3,72	3,90	4,41	4,06	3,57	1,75	4,18	3,23	3,44	3,69
ACEH UTARA	4,56	2,72	4,33	3,36	3,69	4,06	2,31	3,00	1,76	4,38	3,41	3,50	3,42
ACEH BARAT DAYA	4,86	2,61	3,63	4,43	3,39	4,31	3,69	3,84	2,43	3,63	4,53	1,50	3,57
GAYO LUES	4,72	2,49	3,21	4,05	3,42	4,40	2,87	2,70	1,76	3,43	2,92	1,60	3,13
ACEH TAMIANG	4,45	3,08	4,25	3,77	3,77	3,95	2,16	3,40	2,23	3,92	3,00	1,48	3,29
NAGAN RAYA	4,73	2,46	4,12	3,67	3,73	4,12	1,86	2,67	2,30	4,01	3,89	1,51	3,26
ACEH JAYA	4,84	2,79	3,80	4,22	3,56	4,49	3,23	3,37	2,01	3,45	2,37	1,65	3,32
BENER MERIAH	4,61	2,48	4,20	3,49	3,73	4,57	2,16	2,41	1,47	3,72	3,98	2,23	3,25
PIDIE JAYA	4,80	2,54	3,26	4,02	3,81	4,39	3,15	3,02	2,02	3,56	3,08	1,79	3,29
KOTA BANDA ACEH	4,19	3,30	5,00	3,92	3,93	4,12	5,00	3,69	3,86	4,37	3,26	3,98	4,05
KOTA SABANG	4,83	3,31	4,92	4,28	3,85	4,62	4,46	2,95	3,27	3,18	3,22	1,53	3,70
KOTA LANGSA	4,26	2,85	4,85	4,02	3,74	4,20	5,00	4,02	2,30	3,75	3,35	3,42	3,81
KOTA LHOKSEUMAWE	4,58	2,98	4,91	4,15	3,94	4,03	4,47	3,89	3,21	4,02	3,23	3,43	3,90
KOTA SUBULUSSALAM	4,50	2,97	4,38	3,91	3,29	4,23	2,96	3,31	3,19	3,29	3,50	1,32	3,40

Sumber: BRIN, 2025

Dari Tabel 3.6 diatas diketahui skor IDSD Aceh tahun 2025 sudah berada diatas rata rata nasional. Dari 17 pilar yang menjadi komponen penilaian terdapat 5 (lima) pilar yang nilainya masih berada dibawah rata rata nasional seperti pada pilar 2 (infrastruktur), pilar 3 (adopsi TIK), pilar 4 (stabilitas ekonomi makro), pilar 8 (pasar tenaga kerja) dan pilar 9 (sistem keuangan). Sementara itu, dari tabel diatas juga diketahui IDSD tahun 2025 untuk kabupaten/kota skor tertinggi diperoleh oleh Kota Banda Aceh (skor 4,05) diikuti Kota Lhokseumawe (skor 3,90) dan Kota Langsa (skor 3,81) pada posisi 2 dan 3.

3.1.3.7. Kinerja Perdagangan

Neraca perdagangan Aceh pada Februari 2026 mencatatkan kinerja positif dan surplus sebesar 20,77 juta USD, dimana nilai ekspor barang asal Aceh pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 64,64 juta USD, sementara nilai impor ke Aceh tercatat sebesar 43,86 juta USD. Nilai ekspor Februari 2026 naik sebesar 35,84 persen jika dibandingkan dengan Januari 2026. Pada bulan Februari 2026,

komoditas yang diekspor dari Aceh berupa komoditas nonmigas dengan total sebesar 64,64 juta USD. Dibandingkan bulan sebelumnya ekspor komoditas nonmigas menunjukkan peningkatan hingga 35,84 persen. Dibandingkan secara y-on-y dengan Februari 2025 menunjukkan peningkatan sekitar 19,82 persen. Kelompok komoditas terbesar yang diekspor pada bulan Februari 2026 berasal dari kelompok komoditas Batubara senilai 39,40 juta USD yang berkontribusi terhadap total nilai ekspor non migas hingga 60,96 persen. Diikuti kelompok Lemak & Minyak Nabati (CPO) senilai 12,47 juta USD atau berperan sekitar 19,29 persen. Kemudian kopi dan rempah-rempah senilai 9,24. juta USD dengan peranan sekitar 14,29 persen. Diurutan berikutnya komoditas berbagai produk kimia sebesar 1,58 juta USD berperan sekitar 2,45 persen dari total ekspor. Selain komoditas utama yang biasa diekspor, yang lainnya masing-masing kurang dari 1 juta USD dengan peranan masing-masing dibawah 2 persen. Lebih jelas mengenai perkembangan ekspor Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3. 7
Ringkasan Perkembangan Ekspor Aceh 2025 -2026

Uraian		Nilai FOB (USD)			%Perubahan M to M	%Perubahan Y to Y	%Peran Feb 2026 terhadap total
		Feb-25	Jan-26	Feb-26			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Migas	-	-	-	-	-	-
B	Non Migas	53.942.872	47.580.649	64.635.471	35,84	19,82	100,00
Total		53.942.872	47.580.649	64.635.471	35,84	19,82	100,00

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Aceh, 01 April 2026

Tabel 3. 8
Ekspor Barang Asal Aceh Menurut Kelompok Komoditas 2025-2026

Kelompok	Nilai FOB (USD)			% Perubahan M to M	% Perubahan Y to Y	% Peran Feb 2026 Terhadap Total
	Feb-25	Jan-26	Feb-26			
1	2	3	4	5	6	7
Bahan Bakar Mineral (Batubara)	33.826.594	40.975.857	39.403.327	-3,84	16,49	60,96
Lemak & Minyak Hewan Nabati	-	-	12.466.521			19,29
Kopi dan Rempah-rempah	12.832.262	2.871.422	9.235.081	221,62	-28,03	14,29

Kelompok	Nilai FOB (USD)			% Perubahan M to M	% Perubahan Y to Y	% Peran Feb 2026 Terhadap Total
	Feb-25	Jan-26	Feb-26			
1	2	3	4	5	6	7
Daging dan Ikan Olahan	690.150	376.300	600.300	59,53	-13,02	0,93
Berbagi produk Kimia	1.420.277	911.335	1.582.944	73,70	11,45	2,45
Bahan Anyaman Nabati, produk nabati lainnya	1.285.041	1.884.798	979.209	-48,05	-23,80	1,51
ikan dan Udang	100.560	208.342	-	-100,00	-100,00	0,00
Buah-buahan	595.538	136.538	237.565	73,99	-60,11	0,37
Perabot Penerangan rumah	473	724	-	-100,00	-100,00	0,00
Minyak astiri, Kosmetik wangi-wangian	187.800	103.680	17.500	-83,12	-90,68	0,03
Garam, Belerang, Kapur	65.765	54.120	22.140	-59,09	-66,33	0,03
Total Kelompok Komoditas	51.004.460	47.523.116	64.544.587	35,82	26,55	99,86
Lainnya	2.938.412	57.533	90.883	57,97	-96,91	0,14
Total	53.942.872	47.580.649	64.635.470	35,84	19,82	-100,00

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Aceh, 01 April 2026

Negara yang menjadi tujuan utama ekspor Aceh pada Februari 2026 adalah India dengan nilai sebesar 51,02 juta USD dengan kontribusi terhadap total ekspor sebesar 78,93 persen yang didominasi oleh Batubara, CPO dan Berbagai Produk Kimia. Ekspor ke Amerika Serikat di posisi kedua senilai 3,73 juta USD dengan komoditas utama kopi dan rempah-rempah. Thailand diperingkat ketiga dengan nilai sebesar 2,44 juta USD dengan komoditas utama batubara serta daging dan ikan olahan. Lebih jelas mengenai negara tujuan ekspor komoditas Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3. 9
Ekspor Komoditas Aceh Menurut Negara Tujuan 2025-2026

Negara		Nilai FOB (USD)			%Perubahan M to M	%Perubahan Y to Y	%Peran Feb 2026 terhadap total
		Feb-26	Jan-26	Feb-26			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
133	India	32.360.623	41.350.267	51.018.063	23,38	57,65	78,93
411	United States	6.255.103	1.759.025	3.725.180	111,78	-40,45	5,76
121	Thailand	965.296	328.336	2.441.646	643,64	152,94	3,78
111	Japang	3.291.053	2.340.420	1.801.219	-23,04	-45,27	2,79
516	Belgium	2.063.405	-	802.146		-61,13	1,24
124	Malaysia	273.055	314.152	257.739	-17,96	-5,61	0,40
131	Vietnam	1.625.089	142.220	-	-100,00	-100,00	0,00
412	Canada	982.664	-	570.259		-41,97	0,88
116	Tiongkok	797.794	527.100	1.313.205	149,14	64,60	2,03
122	Singapore	190.331	52.059	1.379	-97,35	-99,28	0,00
123	Philipines	2.890.448	-	-		-100,00	0,00
Total kelompok negara		51.694.861	46.813.579	61.930.836	32,29	19,80	95,82
Lainnya		2.248.011	767.072	2.704.635	252,59	20,31	4,18
Total		53.942.872	47.580.651	64.635.471	35,84	19,82	100,00

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Aceh, 01 April 2026

Sementara itu, berdasarkan lapangan usaha nilai komoditas ekspor Aceh pada Februari 2026 didominasi oleh hasil usaha pertambangan senilai 39,43 juta USD atau menyumbang sekitar 61,00 persen terhadap total nilai ekspor, diikuti hasil industri pengolahan senilai 15,03 juta USD kemudian dari hasil pertanian senilai 10,18 juta USD (lihat Tabel 3.10).

Tabel 3. 10
Nilai Ekspor Komoditas Aceh Menurut Lapangan Usaha 2025-2026

Sektor Lapangan Usaha		Nilai FOB (USD)			%Perubahan M to M	%Perubahan Y to Y	%Peran Feb 2026 terhadap total
		Feb-25	Jan-26	Feb-26			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian	14.145.820	4.768.330	10.179.935	113,49	-28,04	15,75
B	Pertambangan	33.892.359	41.029.977	39.425.467	-3,91	16,33	61,00
C	Industri Pengolahan	5.904.694	1.782.343	15.030.068	743,28	154,54	23,25
Total		53.942.873	47.580.650	64.635.470	35,84	19,82	100,00

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Aceh, 01 April 2026

Selanjutnya, jika dilihat dari nilai impor Aceh pada Februari 2026 adalah senilai 43,86 juta USD, naik hingga sebesar 45,57 persen dibandingkan Januari 2026. Jika dibandingkan tahun lalu (y-o-y) menunjukan penurunan signifikan hingga 40,04 persen. Impor Aceh didominasi oleh komoditas Bahan Bakar Mineral/Gas, yaitu senilai 42,64 juta USD dan sisanya berupa han bakar minyak senilai 1,22 juta USD. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.11 dan Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3. 11
Ringkasan Perkembangan Impor Aceh 2025-2026

Uraian		Nilai FOB (USD)			%Perubahan M to M	%Perubahan Y to Y	%Peran Feb 2026 terhadap total
		Feb-25	Jan-26	Feb-26			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Migas	58.967.073	24.193.215	43.864.026	81,31	- 25,61	100
	Aspal dan Pelumas Lainnya	-	-	1.222.866			2,79
	Propana & Butana	58.967.073	24.193.215	42.641.160	76,25	- 27,69	97,21
B	Non Migas	14.192.754	5.531.998	-	-100,00	-100,00	-
Total		73.159.827	29.725.213	43.864.026	47,57	-40,04	100,00

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Aceh, 01 April 2026

Tabel 3. 12
Impor Aceh Menurut Komoditas Unggulan 2025-2026

Komoditas		Nilai FOB (USD)			%Perubahan M to M	%Perubahan Y to Y	%Peran Feb 2026 terhadap total
		Feb-25	Jan-26	Feb-26			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Gandum-ganduman	0	0	0			-
25	Garam,belerang,kapur	0	0	0			-
27	Bahan bakar mineral/Gas	58.967.073	24.193.215	43.864.026	81,31	-25,61	100,00
28	Bahan kimia anorganik	8.904.640	0	0		-100,00	-
31	Pupuk	5.288.114	2.775.850	0	-100,00	-100,00	-
84	Mesin/Pesawat Mekanik	-	2.756.148	-	-100,00		-
	Total Kelompok Komoditas	73.159.827	29.725.213	43.864.026	47,57	40,04	100,00
	Lainnya	0	0	0			-
	Total	73.159.827	29.725.213	43.864.026	47,57	40,04	100,00

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Aceh, 01 April 2026

Berdasarkan kondisi eksisting perekonomian Aceh diatas dan arah kebijakan ekonomi sebagaimana yang terdapat dalam RPJMA Tahun 2025-2029 serta kerangka ekonopmi makro dan pokok-pokok kebiajakn fiskal tahun 2027 yang dipublish oleh Kementerian Keuangan RI, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian ekonomi melalui hilirisasi produksi pangan utama, minyak dan gas, peningkatan Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, dan industrialisasi sektor unggulan, serta sektor berbasis agro lainnya;
2. Peningkatan stabilitas ekonomi makro melalui peningkatan penerimaan Aceh, pembukaan jaringan pasar domestik dan global; pengembangan kawasan transmigrasi berstatus mandiri; pengembangan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal melalui pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan HGU; mewujudkan lumbung pangan Aceh, peningkatan pembangunan infrastruktur investasi daerah; dan peningkatan ketersediaan lapangan kerja sektor Formal dan Informal;
4. Mempercepat progres rekontruksi jalur distribusi utama dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur logistic antar kabupaten/kotadan antar provinsidengan kualitas yang lebih tahan bencana (*restore faster, build back better*);

5. Mempercepat rehabilitasi lahan pertanian untuk mendorong sektor pertanian dan mengendalikan inflasi. Kebijakan diarahkan pada dua klaster yaitu: (a) pemulihan produksi melalui rehabilitasi infrastruktur irigasi dan alat mesin pertanian (alsintan), bantuan benih cepat tanam, serta pemulihan produksi perikanandan peternakan, (b) manajemen pasokan melalui penguatan sinergi TPID berbasis data stok dan distribusi antar daerah untuk menjaga stabilitas harga;
6. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk proyek rekonstruksi infrastruktur dan fasilitas umum;
7. Untuk mendukung pengendalian inflasi, program TPID tetap mengacu pada framework 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi rantai pasok, komunikasi yang efektif) yang diperkuat dengan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Target indikator makro Aceh dalam RKPA tahun 2026 selain berpedoman pada RPJMA Tahun 2027-2029 juga berpedoman pada target indikator makro provinsi yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2027. Berdasarkan hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPA Tahun 2027 yang diselenggarakan pada 17 Juni 2026 di Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, maka target bebeberapa indikator makro Aceh tahun 2026 mengalami penyesuaian jika dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMA Tahun 2025-2029 seperti pada indikator LPE, PDRB Per Kapita, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rasio Gini. Penyesuaian beberapa target indikator makro tahun 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025. Lebih jelas mengenai taget indikator makro RKPA Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3. 13
Target Ekonomi Makro Aceh Tahun 2027

NO	INDIKATOR	TARGET RPJMA 2025-2029	TARGET RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9	4,1 – 4,5
2.	PDRB Per Kapita (juta)	55,7	49,5 – 54,0
3.	Kontribusi PDRB Provinsi	1,1	1,1
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,00 – 10,60	12,22 – 13,60
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30 - 4,45	4,45 – 5,50
6.	Rasio Gini	0,284 - 0,289	0,274 – 0,284
7.	Indeks Modal Manusia	0,590	0,590

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan RKP 2027

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Aceh

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Aceh

Realisasi pendapatan Aceh periode Tahun 2024-2025 mengalami kontraksi. Pada tahun 2024 realisasi pendapatan Aceh tercatat sebesar Rp. 11.396.045.068.929,60. Sementara itu, realisasi pendapatan Aceh hanya mencapai Rp. 10.682.974.283.132,50 pada tahun 2025, mengalami penurunan sebesar Rp. 713.070.785.797,15 atau sebesar 6,26 persen. Penurunan terbesar terdapat pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat sebesar Rp. 2.696.643.322.800, berkurang sebesar Rp. 529.049.603.054 dari tahun 2024. Komponen utama dari PAD yang mengalami penurunan paling besar ialah Pajak Aceh, yang diterima sebesar Rp. 2.696.643.322.800, berkurang sebesar Rp. 428.460.881.494 dari tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan pajak disebabkan karena berlakunya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sesuai Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana penerapan opsen PKB dan opsen BBNKB sebagai penerimaan kabupaten/kota.

Sementara itu, penurunan Pendapatan Transfer disebabkan oleh penurunan Transfer Ke Daerah (TKD), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dengan berkurangnya TKD, jumlah belanja pemerintah ikut berkurang, mengakibatkan penurunan setoran pajak yang bersumber dari belanja pemerintah.

Sementara itu, pendapatan Aceh tahun 2027 bedasarkan proyeksi yang dilakukan oleh BPKA berjumlah sebesar Rp. 10.013.916.686.521. Proyeksi pendapatan Provinsi Aceh tampak menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, 2025, dan APBA tahun 2026 yang masing-masing sebesar Rp. 11.396.045.068.929,60, Rp. 10.682.974.283.132,50, dan Rp. 11.682.353.912.048,00 Lebih rinci mengenai realisasi dan proyeksi/target pendapatan Aceh Tahun 2024-2028 dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Terdapat dua hal penting perlu dicatat mengenai Pendapatan Aceh di tahun 2027. Pertama, Pemerintah Pusat melakukan efisiensi Transfer Ke Daerah (TKD), sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Efisiensi anggaran ini akan terus berlanjut pada tahun 2027 dan berdampak secara signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah yang terus mengalami tren penurunan.

Kedua, Penurunan pendapatan di tahun 2027 juga dapat terjadi karena adanya penurunan Dana Otsus sesuai dengan Pasal 183 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjelaskan bahwa dana

otsus berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas (2008 s.d 2022) yang besarnya setara dengan 2 (dua) persen plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh (2023-2027) yang besarnya setara 1 (satu) persen dari plafon DAU Nasional. Tahun 2023 merupakan tahun pertama penurunan dana otsus menjadi sebesar 1 persen dari DAU Nasional.

Untuk mengantisipasi hal tersebut diatas, maka arah kebijakan Pendapatan Aceh tahun 2027 adalah mewujudkan kemandirian fiskal dalam rangka meningkatkan kemampuan Aceh untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengen mengurangi ketergantungan pada pendanaan pemerintah pusat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi sebagai berikut:

1. Intensifikasi untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Aceh (PAA) yang disertai dengan reformasi kebijakan yang disertai dengan upaya penegakan hukum;
2. Memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dalam mendukung pembanguna Aceh;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan dan perpajakan;
4. Meningkatkan sumber pendapatan daerah di luar transfer pemerintah pusat seperti dana Corporate Social Responsibility (CSR);
5. Meningkatkan upaya pengumpulan dana yang bersumber dari Zakat Infaq dan Sadaqah (ZISWAF) serta Waqaf yang bersifat produktif;
6. Menggalakkan promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal; dan
7. Pembentukan lembaga keuangan syariah milik Aceh yang menjamin pembiayaan dan/atau pinjaman melalui program kemitraan.

Tabel 3. 14
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Aceh Tahun 2024-2028

U R A I A N	2024	2025	APBA 2026	RKPA 2027	RKPA 2028
	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)			
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	**11.396.045.068.929,60**	**10.682.974.283.132,50**	**11.682.353.912.048,00**	**10.013.916.686.521**	**11.682.353.912.048**
PENDAPATAN ASLI ACEH	**3.225.692.925.855,61**	**2.696.643.322.800,91**	**4.648.857.324.508,00**	**2.980.420.098.981**	**4.648.857.324.508**
Pajak Aceh	1.930.621.844.261,00	1.502.160.962.766,16	1.971.946.210.642,00	1.891.615.693.847	1.971.946.210.642
Retribusi Aceh	790.966.745.324,61	684.774.219.352,66	751.907.776.848,00	702.248.016.626	751.907.776.848
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	267.660.903.349,00	270.253.493.775,00	329.563.729.463,00	224.583.303.268	329.563.729.463
Lain-Lain PAD yang Sah	236.443.432.921,00	239.454.646.907,09	1.595.439.607.555,00	161.973.085.240	1.595.439.607.555
PENDAPATAN TRANSFER	**8.167.778.560.238,00**	**7.962.807.309.468,00**	**7.031.400.187.540,00**	**7.031.400.187.540**	**7.031.400.187.540**
Dana Perimbangan	**8.167.778.560.238,00**	7.930.782.348.168,00	3.031.206.482.540	3.031.206.482.540	3.031.206.482.540
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	32.024.961.300,00			
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur			4.000.193.705.000	4.000.193.705.000	4.000.193.705.000
Insentif Fiskal					
Dana Insentif Daerah (DID)					

U R A I A N	2024	2025	APBA 2026	RKPA 2027	RKPA 2028
	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)			
1	2	3	4	5	6
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**2.573.582.836,00**	**23.523.650.863,55**	**2.096.400.000,00**	**2.096.400.000**	**2.096.400.000**
Pendapatan Hibah	2.573.582.836,00	3.523.650.863,55	2.096.400.000	2.096.400.000	2.096.400.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	20.000.000.000,00	0,00	0	0

Sumber: LRA Tahun 2024 (*Audited*), LRA Tahun 2025 (*Unaudited*), APBA TA. 2026 , dan RPJMA 2025-2029

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Aceh

Realisasi belanja Aceh tahun 2025 mencapai Rp. 10.605.390.658.878. Realisasi belanja tersebut masih berada dibawah belanja pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp. 11.287.148.887.851. Penurunan sebesar 6,04 persen tersebut terjadi pada semua belanja baik belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer. Penurunan tersebut sangat relevan mengingat pendapatan Aceh yang terus mengalami penurunan di tahun 2023, terutama pada sumber pendapatan transfer dana Otsus. Dampak dari penurunan dana Otsus, berimplikasi pada belanja bantuan keuangan berupa dana Otsus ke Kabupaten/ Kota sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh No.1 tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus yang membagi peruntukan transfer Otsus ke Kabupaten/Kota sebesar 40 persen dan provinsi sebesar 60 persen.

Sementara itu Belanja Provinsi Aceh pada tahun 2027 diperkirakan berjumlah sebesar Rp. 10.374.275.027.386, yang secara umum terdiri dari: a.) Belanja Operasi sejumlah Rp 8.143.197.472.809; b.) Belanja Modal sejumlah Rp. 570.797.541.737; c.) Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 41.312.080.000; dan d.) Belanja Transfer sejumlah Rp. 1.618.967.932.840. Belanja Operasi terdiri dari a.) Belanja Pegawai sejumlah Rp. 4.012.726.229.438; b.) Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 3.738.573.675.541; c.) Belanja Subsidi sejumlah Rp. 7.282.000.000; d.) belanja hibah Rp. 384.615.067.829; serta e.) Belanja Bantuan Sosial Rp. 500.000.

Belanja Transfer terdiri dari dua komponen. Pertama, Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 706.461.444.840 yang terdiri dari a.) Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sejumlah Rp. 304.305.310.002 dan b.) Dana Bagi Hasil Pendapatan Pajak Aceh sejumlah Rp. 402.156.134.838. Komponen kedua adalah Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 912.506.488.000, yang terdiri dari a.) DOKA sejumlah Rp. 678.042.668.000; b.) TDBH MIGAS sejumlah Rp. 21.802.462.000; c.) Pembangunan Ibu Kota Aceh sejumlah Rp. 14.961.358.000; d.) Bantuan Keuangan Venue dan Peralatan Pora Kab. Aceh Jaya sejumlah Rp. 80.000.000.000; e.) Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pora Kab. Aceh Jaya sejumlah Rp. 20.000.000.000; f.) Bantuan Keuangan MTQ Kab. Aceh Barat Daya sejumlah Rp. 12.500.000.000; g.) Bantuan Keuangan Pembebasan Lahan dan Pembangunan Jalan Pengalihan Jl. Dr.T Syarief Thayeb ke Jl. Seulanga sejumlah Rp. 5.000.000.000; h.) Bantuan Keuangan Mukim sejumlah Rp. 5.000.000.000; i.) Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Barat sejumlah Rp. 10.000.000.000; j.) Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Kota Subulussalam sejumlah Rp. 5.000.000.000; k.) Bantuan Keuangan Peningkatan Jalan Seuneudon-Pante Breueh Kab. Aceh Utara sejumlah Rp. 10.000.000.000; dan l.) Bantuan Keuangan Pembangunan Jalan Dua Jalur Sekolah Unggul SMA Garuda Kab. Aceh Utara sejumlah Rp. 10.000.000.000.

Tabel 3. 15
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Aceh Tahun 2024-2028

URAIAN	2024	2025	APBA 2026	RKPA 2027	RKPA 2028
	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)			
1	2	3	4	5	6
BELANJA	**11.287.148.887.851**	**10.605.390.658.878**	**10.776.703.271.580**	**10.374.275.027.386**	**8.198.917.569.388**
BELANJA OPERASI	**8.209.331.872.526**	**7.806.919.611.641**	**8.359.017.875.925**	**8.143.197.472.809**	**6.291.758.135.223**
Belanja Pegawai	3.371.730.786.947	3.381.475.779.772	3.950.568.302.136	4.012.726.229.439	2.946.517.614.479
Belanja Barang dan Jasa	3.726.959.739.159	3.982.057.886.739	3.932.231.368.093	3.738.573.675.541	2.522.300.689.221
Belanja Subsidi	6.386.180.000	5.022.985.000	8.325.600.000	7.282.000.000	8.000.000.000
Belanja Hibah	1.017.004.886.267	331.339.945.804	467.892.605.696	384.615.067.829	700.850.000.000
Belanja Bantuan Sosial	87.250.280.153	107.023.014.326	-	500.000	114.089.831.523
BELANJA MODAL	**1.244.417.671.176**	**951.979.930.765**	**695.828.424.740**	**570.797.541.737**	**1.157.159.434.165**
BELANJA TIDAK TERDUGA	**19.848.398**	**50.320.641.632**	**40.053.918.092**	**41.312.080.000**	**50.000.000.000**
BELANJA TRANSFER	**1.833.379.495.751**	**1.796.170.474.841**	**1.681.803.052.823**	**1.618.967.932.840**	**700.000.000.000**
Belanja Bagi Hasil	881.118.949.469	665.660.491.383	696.305.565.621	706.461.444.840	700.000.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	952.260.546.282	1.130.509.983.458	985.497.487.202	912.506.488.000	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2025 (*audited*), 2026 (*LRA Unaudited*), dan RPJMA 2025-2029

Selanjutnya, sesuai dengan arah kebijkan fiskal Nasional RKP 2027 yaitu "**Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat"**, maka kebijakan belanja Aceh tahun 2027 diarahkan pada penguatan kualitas belanja dalam rangka mencapai pertumbuhan lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan sesuai dengan tema RKPA tahun 2027 yaitu: **Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan**. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi antara lain:

1. Melakukan efisiensi belanja non prioritas (program penunjang urusan pemerintahan daerah) terutama belanja barang dan jasa tanpa mengurangi tingkat pelayanan public;
2. Meningkatkan kualitas belanja modal untuk mendukung prioritas pembangunan yang selaras dengan visi dan misi daerah;
3. Mendukung mitigasi dan penanggulangan bencana melalui percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bagi wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025 sesuai dengan dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) Tahun 2026-2028;
4. Menerapkan prinsip *value for money*, dimana setiap penggunaan anggaran harus memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
5. Penguatan sinergitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Aceh

Realisasi pembiayaan Aceh tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Realisiasi pembiayaan Aceh tahun 2025 berjumlah sebesar Rp. 481.235.306.025, sedangkan pembiayaan netto tahun 2024 sebesar Rp. 421.372.974.556. Peningkatan pembiayaan tersebut dipengaruhi SilPa Aceh pada tahun 2025 yang meningkat sebesar Rp. 56.966.174.692, atau sebesar 12,04 persen dari tahun 2024. Peningkatan penerimaan pembiayaan Aceh dapat dicapai melalui optimalisasi peran sektor Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) seperti Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim serta PEMA sebagai upaya mewujudkan ruang fiskal Aceh yang lebih besar dari deviden pembiayaan tersebut sebagaimana Qanun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Aceh.

Pembiayaan Aceh tahun 2027 direncanakan sebesar Rp. 360.358.340.865, dengan proyeksi SiLPA yang terdepresiasi. Untuk melihat realisasi dan proyeksi pembiayaan Aceh dari Tahun 2024 s.d 2028 dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut.

Tabel 3. 16
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Aceh Tahun 2024-2028

URAIAN	2024	2025	APBA 2026	RKPA 2027	RKPA 2028
	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)			
1	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN	**421.372.974.556**	**481.235.306.025**	**(905.650.640.468)**	**360.358.340.865**	**513.043.347.076**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**474.004.949.183**	**530.262.092.934**	**550.912.662.925**	**360.358.340.865**	**553.043.347.076**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	473.295.918.242	530.262.092.934	550.912.662.925	360.358.340.865	553.042.347.076
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	-	-			
Sisa Belanja Lainnya	-	-		-	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	709.030.941	-	-	-	1.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**52.631.974.627**	**49.026.786.909**	**1.456.563.303.393**	**-**	**40.000.000.000**
Pembentukan Dana Cadangan	52.631.974.627	49.026.786.909	1.456.563.303.393	-	40.000.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-		-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-		-

URAIAN	2024	2025	APBA 2026	RKPA 2027	RKPA 2028
	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)			
1	2	3	4	5	6
Pembentukan Dana Abadi Daerah					

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2025 (*audited*), 2026 (*LRA Unaudited*), dan RPJMA 2025-2029

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2025-2029, maka Visi Pembangunan Nasional periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Makna dari visi diatas adalah mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Untuk pencapaian visi diatas, terdapat 8 (delapan) misi yang dituangkan kedalam Delapan Asta Cita yang meliputi sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan indutri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Indonesia Emas 2045, maka Astacita yang merupakan misi dari Presiden yang memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

17 PROGRAM PRIORITAS	8 PROGRAM HASIL CEPAT TERBAIK
1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air; 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara; 3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi; 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi; 5. Pemberantasan kemiskinan; 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba; 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat; 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi serta digitalisasi; 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif; 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak Perempuan, anak, serta penyandang disabilitas; 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup; 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi, baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yangh membutuhkan; 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;' 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah; 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	1. Memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten; 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional; 4. Membangun sekolah sekolah unggul terintegrasi dis etiap kabupaten dan memperbaiki sekolah sekolah yang perlu direnovasi; 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut; 6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI dan pejabat negara; 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB ke 23 persen.

Gambar 4. 1
17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh

Tujuan dan sasaran pembangunan Aceh tahun 2027 dirumuskan dalam rangka menjabarkan visi dan misi pembangunan Aceh yang terdapat dalam RPJMA Tahun 2025-2029 secara lebih terukur dan mencakup target yang lebih spesifik. Sesuai dengan RPMJA Tahun 2025-2029. Visi Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029 adalah:

"ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN"

Makna Visi Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

Islami adalah dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seluruh Masyarakat Aceh menjalankan aktivitas dalam seluruh aspek kehidupan berlandaskan Syariat Islam.

Maju adalah dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seluruh Masyarakat Aceh telah mencapai tingkat peradaban dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi;

Bermartabat adalah dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seluruh Masyarakat Aceh yang religius, memiliki harga diri, peradaban, pengetahuan, dan kepercayaan yang tinggi sebagai sebuah bangsa;

Berkelanjutan adalah dimaknai sebagai suatu kondisi dimana proses pembangunan daerah dan aktivitas kehidupan masyarakat berlangsung harmoni dengan kondisi lingkungan hidup yang tetap lestari.

Untuk pencapaian Visi Pembangunan Aceh diatas, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi yang meliputi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah;
2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA;
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas;
4. Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas;
6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum;
7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.

Untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, terintegrasi dan tepat sasaran, maka diperlukan sinergitas dan keselarasan berbagai kebijakan antara pembangunan nasional dan daerah. Dari Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 terlihat keselarasan antara Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029.

Tabel 4. 1
Keselarasan Antara Visi Pembangunan Nasional dan Aceh Tahun 2025-2029

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	Visi Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029
1	2
BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045	ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 dan Visi/Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih

Tabel 4. 2
Keselarasan Antara Misi Pembangunan Aceh dan Nasional Tahun 2025-2029

Misi RPJMA 2025-2029		Misi RPJMN 2025-2029	
1		2	
1	Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah	1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2	Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA		
3	Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas	2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
		5	Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
		6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
		3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Misi RPJMA 2025-2029		Misi RPJMN 2025-2029	
1		2	
4	Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional Aceh, koneksitas, dan berkelanjutan	3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
5	Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas	4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
6	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum	7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
7	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya	8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur yang meliputi sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah.

1.1. Meningkatkan Aqidah, Syariah, Akhlak dan Muamalah dengan sasaran sebagai berikut:

1.1.1. Meningkatnya pelaksanaan syariat Islam

1.1.2. Meningkatnya penyaluran terhadap pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah

1.2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan muamalah, dengan sasaran sebagai berikut:

1.2.1. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam serta kemakmuran mesjid

1.3. Meningkatkan pengawasan kehidupan keagamaan
1.3.1. Meningkatnya pembinaan akhlak dan kerukunan antar dan sesama ummat
1.3.2. Meningkatnya upaya pencegahan potensi konflik.

Misi 2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA.
2.1. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh dengan sasaran sebagai berikut:
2.1.1. Terakomodirnya butir-butir MoU Helsinki dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2.1.2. Menguatnya pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe.
2.1.3. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaraan Ketentraman dan Ketertiban.
2.1.4. Terwujudnya pelaksanaan kebudayaan dan adat istiadat.
2.1.5. Terwujudnya pelaksanaan keistimewaan di bidang Pendidikan.
2.1.6. Terwujudnya peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Misi 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas.
3.1. Mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut:
3.1.1. Terwujudnya peningkatan produksi hilirisasi pangan utama.
3.1.2. Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.
3.1.3. Terwujudnya industrialisasi sektor unggulan.
3.2. Meningkatkan stabilitas ekonomi makro, dengan sasaran:
3.2.1. Meningkatnya penerimaan Aceh.
3.2.2. Terbukanya jaringan pasar domestik dan global.
3.2.3. Pengembangan kawasan transmigrasi berstatus mandiri.
2.3.4. Terwujudnya perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3.3. Menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, dengan sasaran:
3.3.1. Pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan HGU.
3.3.2 Terwujudnya lumbung pangan Aceh.
3.3.3 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Investasi Daerah.
3.3.4. Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja Sektor Formal dan Informal.

Misi 4. Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan.
4.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, perumahan dan pulau terluar, dengan sasaran:
4.1.1. Meningkatnya Ketahanan Air Daerah

4.1.2. Meningkatnya penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman yang layak huni.
4.1.3. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan.
4.1.4. Tersedianya jaringan listrik yang terkoneksi dan mandiri sampai ke pulau terluar.
4.1.5. Meningkatnya koneksitas wilayah dan pulau terluar untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang.

4.2. Meningkatkan kesesuian pembangunan dengan rencana tata ruang, dengan sasaran:
4.2.1. Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4.2.2. Tersedianya jaringan teknologi informatika yang terkoneksi.

Misi 5. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas.

5.1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya Manusia, dengan sasaran:
5.1.1. Meningkatnya akses pendidikan.
5.1.2. Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang merata.
5.1.3. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat.
5.1.4. Meningkatnya Kualitas dan Derajat Kesehatan untuk Semua

5.2. Menguatkan kesetaraan gender, hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas, dengan sasaran:
5.2.1. Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Disabilitas.
5.2.2. Meningkatnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif

5.3. Peningkatan Prestasi Olah Raga serta Kepemudaan, dengan sasaran:
5.3.1. Meningkatnya kualitas olahraga dan kepemudaan

Misi 6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum.

6.1. Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintah Aceh, dengan sasaran:
6.1.1. Terwujudnya tata kelola Pemerintah Aceh yang baik dan bersih (*Good Governance dan Clean Government*).
6.1.2. Tersedianya database perencanaan dan penganggaran serta pengawasan yang valid, akurat, dan terintegrasi.
6.1.3. Terwujudnya kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah Aceh yang berintegritas dan melayani.
6.1.4. Terwujudnya sistem digitalisasi dalam pelayanan publik.

6.1.5. Terwujudnya Optimalisasi Peran dan Fungsi APIP dalam Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan.
6.1.6. Terwujudnya Kepatuhan Hukum dalam melayani Publik
6.2. Meningkatkan stabilitas politik, dengan sasaran:
6.2.1. Terwujudnya partisipasi politik secara demokratis.

Misi 7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.;
7.1. Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Lestari, dengan sasaran:
7.1.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
7.1.2. Meningkatnya Kelestarian Hutan dan keanekaragaman hayati.
7.1.4. Terwujudnya pengelolaaan sumber energi baru dan terbarukan.
7.2. Meningkatkan Resiliensi Terhadap Bencana, dengan sasaran:
7.2.1. Meningkatnya Ketahanan Daerah.

Lebih jelas mengenai tujuan dan sasaran serta target indikator outcome pembangunan Aceh tahun 2027 sesuai dengan RPJMA Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2027

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2027
1	2	3	4	5
	MISI - 1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah.			
1.1.	Meningkatkan Aqidah, Syariah, dan Akhlak	Indeks Pembangunan Syariat	Indeks	81,25 - 88,00
1.1.1.	Meningkatnya pelaksanaan Syariat Islam	Persentase dayah yang mandiri	%	50,38
1.1.2.	Meningkatnya penyaluran terhadap pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah	Indeks Zakat Nasional Aceh	Indeks	0,68
1.2.	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan muamalah	Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB (ADHB)	%	28,23
1.2.1.	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan Syariat Islam serta kemakmuran mesjid	Indeks kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan syariat islam	%	85
1.3.	Meningkatkan pengawasan kehidupan keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	74,46 - 74,71
1.3.1.	Meningkatnya pembinaan akhlak dan kerukunan antar dan sesama ummat	Persentase dimensi toleransi	%	66
1.3.2.	Meningkatnya upaya pencegahan potensi konflik	Persentase potensi konflik yang tertangani	%	100
	MISI - 2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA			

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2027
1	2	3	4	5
2.1.	Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh	Persentase kajian Wali Nanggroe terhadap implementasi MoU Helsinki dan UUPA	%	90
2.1.1.	Terakomodirnya butir-butir MoU Helsinki dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Indeks Reintegrasi Aceh	Indeks	0,2
2.1.2.	Menguatnya pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	Persentase pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga Wali Nanggroe	%	90
2.1.3.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaraan ketentraman dan ketertiban	Indek Pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	55
		Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban	%	95
		Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	%	63,35
2.1.4.	Terwujudnya pelaksanaan kebudayaan dan adat istiadat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	57,69 - 57,74
2.1.5.	Terwujudnya pelaksanaan keistimewaan dibidang pendidikan	Persentase penerapan kurikulum pendidikan islami dan ke-Aceh-an di kabupaten/kota	%	52,17
2.1.6.	Terwujudnya peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah	Persentase fatwa dan tausiyah yang telah ditetapkan untuk diterapkan	%	27,32
	MISI - 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas.			
3.1.	Mewujudkan kemandirian ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,9

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2027
1	2	3	4	5
3.1.1.	Terwujudnya peningkatan produksi hilirisasi pangan utama	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	Indeks	121,81
3.1.2.	Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	3,87
		Peringkat Inovasi Daerah	Peringkat	12,2
		Presentase Dana untuk Inovasi dari APBA	%	0,63
3.1.3.	Terwujudnya industrialisasi sektor unggulan	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	Ribu Orang	13,3
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	0,42
		Proporsi UMKM terhadap jumlah angkatan kerja (%) (sebagai proxy proporsi PDRB ekonomi kreatif)	%	16,54
		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	5,05
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	%	1,97
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	0,81
3.2.	Meningkatkan stabilitas ekonomi makro	Inklusi Keuangan	%	95,56
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	%	1,1
		Rasio Gini	Indeks	0,284 - 0,289
		Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5
		Tingkat Kemiskinan	%	9,00-10,60

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2027
1	2	3	4	5
3.2.1.	Meningkatnya penerimaan Aceh	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	1,14
3.2.2.	Terbukanya jaringan pasar domestik dan global	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	% PDRB	65,43-66.09
		Indeks Harga Konsumen	%	109
3.2.3.	Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi berstatus mandiri	Persentase kawasan transmigrasi berstatus mandiri	%	28,57
3.2.4.	Terwujudnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Persentase Desa Mandiri	%	1,36
3.2.5.	Pendalaman/intermediasi sektor keuangan	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	%	0,51
		Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata- rata Tahunan*	Nilai	2549810
		Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	2,29
		Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)*	%	20,86
		Total Kredit/PDRB (%)	%	20,09
3.3.	Menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal	PDRB per kapita (Rp Juta)	Rp Juta	55,7
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,30-4,45
3.3.1.	Meningkatnya pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan HGU	Persentase pemanfaatan lahan terlantar	%	17,32
3.3.2.	Terwujudnya lumbung pangan Aceh	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,54
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%)	%	7,49

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2027
1	2	3	4	5
3.3.3.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	% PDRB	33,10 - 33,43
3.3.4.	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja Sektor Formal dan Informal	Persentase lapangan kerja Menurut Status Formal dan Informal	%	45,8 : 54,2
		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	46,75
	MISI - 4. Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan.			
4.1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, perumahan dan pulau terluar	Indeks Williamson	Indeks	0,389
4.1.1.	Meningkatnya ketahanan air daerah	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	39,16
		Indeks Ketahanan Air Daerah	Indeks	3,65
4.1.2.	Meningkatnya penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman yang layak huni	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	%	72,44
4.1.3.	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	%	5,72
4.1.4.	Tersedianya jaringan listrik yang terkoneksi dan mandiri sampai ke pulau terluar	Rasio Elektrifikasi	%	99,72
4.1.5.	Meningkatnya koneksitas wilayah dan pulau terluar untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang	Rasio Konektivitas	Rasio	0,71

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2027
1	2	3	4	5
4.2.	Meningkatkan kesesuian pembangunan dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuain pembangunan dengan tata ruang	%	74
4.2.1.	Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase kepatuhan pembangunan terhadap rencana tataruang	%	74
4.2.2.	Tersedianya jaringan teknologi informatika yang terkoneksi	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,9
	MISI - 5. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas			
5.1.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,59
5.1.1.	Meningkatnya akses pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,88 - 14,89
5.1.2.	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Kualitas Pendidikan (SPM)	%	75,67
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	10,50 - 15,00
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	2,00 - 4,00
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	%	60,29

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2027
1	2	3	4	5
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	33,00 - 35,00
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	28,50 - 30,50
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	13,74
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	10,55 - 10,57
5.1.3.	Meningkatnya minat baca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca	Indeks	73,2
5.1.4.	Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71
5.2.	Menguatkan kesetaraan gender, hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	66,7
5.2.1.	Meningkatnya keluarga berkualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan, anak, dan kesejahteraan disabilitas	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,43
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,5
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	68,6
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	72,34

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2027
1	2	3	4	5
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	%	24,06
5.2.2.	Meningkatnya sistem kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0,575
5.3.	Peningkatan prestasi olah raga serta kepemudaan	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,533
5.3.1.	Meningkatnya kualitas olahraga dan kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	66
	MISI - 6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh serta membina stabilitas politik, dan supremasi hukum.			
6.1.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintah Aceh	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83
6.1.1.	Terwujudnya tata kelola Pemerintah Aceh yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government)	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,53
		Nilai SAKIP	Nilai	68,5
		Opini BPK	Opini	WTP
6.1.2.	Tersedianya database perencanaan dan penganggaran serta pengawasan yang valid, akurat, dan terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	95
6.1.3.	Terwujudnya kompetensi sumberdaya aparatur Pemerintah Aceh yang berintegritas dan melayani	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	85

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2027
1	2	3	4	5
6.1.4.	Terwujudnya sistem digitalisasi dalam pelayanan publik	Indeks Transformasi Digital	Indeks	51,36
6.1.5.	Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi APIP dalam pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Integritas Nasional	Indeks	72
		Maturitas SPIP terintegrasi	Level	3
6.1.6.	Terwujudnya kepatuhan hukum dalam melayani publik	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	73,5
6.2.	Meningkatkan stabilitas politik	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	77,70-77,75
6.2.1.	Terwujudnya partisipasi politik secara demokratis	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	76,1
	MISI - 7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.			
7.1.	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan yang lestari	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	%	66,54
		Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	46,31
7.1.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	83,27
		Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	%	22,5
7.1.2.	Meningkatnya kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0,599
7.1.3.	Terwujudnya pengelolaan sumber energi baru dan terbarukan	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	SBM/Rp milyar	106

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2027
1	2	3	4	5
		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	%	12,79
7.2.	Meningkatkan resiliensi terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	178,41
7.2.1.	Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,52

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

4.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional 2027

Sesuai dengan arah kebijakan tahun 2027 sebagaimana yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, maka tema RKP Tahun 2027 adalah Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri. Berdasarkan tema diatas, maka fokus RKP Tahun 2027 adalah pada direktif presiden dan intervensi prioritas pengungkit pertumbuhan dan berdampak pada pembangunan yang meliputi:

1. Produktivitas

   Fokus pada (1) kualitas SDM, tenaga kerja produktif dan inovasi, dengan proyek prioritas nasional (ProSN) yang mencakup makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, sekolah rakyat dan sekolah unggul, layanan berkualitas dan akses kesehatan gratis, IPTEK dan inovasi unggul (digitalisasi pendidikan) dan pendidikan dan pelatihan vokasi; (2) stimulus untuk produktivitas dan daya beli masyarakat dengan proyek prioritas nasional (ProSN) meliputi kartu kesejahteraan dan jaminan sosial nasional, koperasi desa/kelurahan merah putih, pembiayaan perumahan dan penanganan pemukiman kumuh; (3) digitalisasi dan efisiensi tata kelola dengan proyek prioritas nasional (ProSN) antara lain satu data sosial ekonomi (DTSEN), layanan digital optimal dan terintegrasi di sektor strategis dan pemerintahan digital yang merata; (4) regulasi dan kelembagaan mencakup diplomasi Tangguh (perlindungan, ekonomi, budaya, kepemimpinan, pertahanan dan kedaulatan) dan integrasi tata kelola pemerintah.

2. Investasi

   Fokus pada (1) efisiensi dan efektivitas investasi dengan proyek strategis nasional (PoSN) yang meliputi investasi hijau berkelanjutan dan kemudahan perizinan, (2) infrastruktur dan konektivitas ekonomi yang meliputi infrastruktur dasar, konektivitas logistic, pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, (3) inovasi pembiayaan pembangunan yang meliputi optimalisasi danantara dan peran BUMN dan pembiayaan pembangunan berbasis konvensional dan syariah, (4) investasi berorientasi industri dan expor yang meliputi kawasan industry/kawasan ekonomi khusus dan destinasi pariwisata prioritas.

3. Industri

   Fokus pada (1) industri nasional yang meliputi pengelolaan sampah, industri pertahanan, pengembangan mobnil nasional dan industry strategis nasional, (2) hilirisasi sumber daya alam strategis yang meliputi hilirisasi kelautan dan perikanan (pengembangan industri garam dan produk hasil laut), hilirisasi perkebunan dan kehutanan (hilirisasi kelapa

sawit), hilirisasi mineral kritis, (3) swasembada pangan, enegri dan air yang meliputi swasembada pangan, energi dan air.

Merujuk pada trisula pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat tiga pilar utama pembangunan nasional yang menjadi sasaran pembangunan nasional tahun 2027 yaitu (1) pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, (2) penurunan kemiskinan dan (3) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Lebih jelas mengenai target indikator untuk masing-masing pilar disajikan pada pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4. 4
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027

Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9 – 7,5
GNI per capita (US$)	5,980-6,050
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	39,57
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,84
Penurunan Kemiskinan	
Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 6,5
Kemiskinan Ekstrem (%)	0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30 – 4,87
Rasio Gini	0,375 – 0,378
Sumber Daya Manusia Berkualitas	
Indeks Modal Manusia (IMM)	0,57

Sumber: Rancangan RKP 2027

Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.4, maka terdapat 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) tahun 2027 yang meliputi sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan , energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Selanjutnya, kedelapan PN tersebut diatas dilaksanakan secara konkret melalui 8 (delapan) klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang meliputi sebagai berikut:

1. Kedaulatan Pangan;
   Meliputi program sebagai berikut: 5.000 kampung nelayan merah putih, 4.582 kapal ikan modern, 40.000 lokasi budidaya ikan darat tematik, revitalisasi tambak nila salin 14.090 Ha di Pantura, modeling dan replikasi 2.000 Ha tambak udang terintegrasi, 2.000 Ha kawasan sentra industri garam nasional, pengembangan kawasan pangan terintegrasi, pengembangan kawasan perkebunan (sawit, tebu, kakao, kelapa, kopi, jambu mete dan rempah), peningkatan produksi daging, susu dan telur.
2. Kemandirian Energi dan Air;
   Meliputi program sebagai berikut: mandatori biodiesel 50 (B50), mandatori bioethanol (E20), program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW, implementasi standar kinerja energi minimum (SKEM), konversi 6 juta unit motor BBM ke motor listrik, pembangunan jaringan gas kota (jargas) untuk 1 juta sambungan rumah (SR), peningkatan lifting minyak dan gas bumi, 10 *small scale green modular refinery* and 6 *storage* (*deployable mass model*), eksplorasi 10 blok migas baru, elektrifikasi 10.000 desa, pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL), PLTA skala besar terintegrasi, kompor listrik untuk 2-5 juta rumah tangga, optimalisasi 45.000 sumur minyak masyarakat, optimalisasi lifting di 13.824 sumur tua dan swasembada air.

3. Pendidikan;
   Meliputi program sebagai berikut: makan bergizi anak sekolah, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah/madrasah, bantuan perlengkapan sekolah, 500 sekolah nasional terintegrasi, studio guru, digitalisasi pendidikan (2 juta papan interaktif digital), 20 sekolah garuda baru, 80 sekolah garuda transformasi, 514 sekolah rakyat, 10 universitas baru (medical university berbasis STEMM, 500.000 lulusan SMK Go Global, akademi olahraga naisonal dan pusat pelatihan nasional,

peningkatan kesejahteraan guru, transfer langsung tunjangan, perlindungan anak di ruang digital melalui PP TUNAS.

4. Kesehatan;
   Meliputi program makan bergizi gratis ibu hamil, ibu menyusui dan balita, 66 rumah sakit upgrade, pemeriksaaan kesehatan gratis dan penuntasan turberkulosis.
5. Hilirisasi dan Industrialisasi;
   Meliputi program sebagai berikut: hilirisasi industri strategis (18 proyek), mobil nasional, motor nasional, ekosistem industri kedirgantaraan, dan pengembangan industry semikonduktor.
6. Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana;
   Meliputi program *giant sea wall*, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera, Gerakan ASRI (gentengnisasi, pengendalian sampah, penghijauan), 3 juta rumah (1 juta rumah baru dan 2 juta renovasi rumah).
7. Ekonomi Kerakyatan dan Desa;
   Meliputi program 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih, dan percepatan pembangunan daerah 3T.
8. Penurunan Kemiskinan;
   Meliputi program sebagai berikut: PRO-KESRA bantuan sosial terintegrasi dan PRO-KESRA untuk 10 juta penduduk berusaha dan bekerja.

Selain itu, dalam arah pengembangan kewilayahan sesuai dengan tema RKP Tahun 2027, terdapat 5 (lima) fokus prioritas pembangunan kewilayahan tahun 2027 yang meliputi sebagai berikut:

1. Pembangunan kota terpadu;
   Diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana permukiman, pengendalian pemanfaatan ruang dan penyediaan tanah diperkoataan dengan kegiatan prioritas meliputi wilayah metropolitan dan kawasan perkotaan non wilayah metropolitan.
2. Pembangunan wilayah kepulauan;
   Diarahkan pada pengembangan ekonomi kawasan pesisir dan pulau pulau kecil, peningkatan konektivitas antar wilayah dan penyediaan sarana dan prasarana dasar diwilayah pesisir dan pulau pulau kecil.
3. Pemulihan wilayah pascabencana;
   Diarahkan pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan penanganan pascabencana wilayah lainnya dengan kegiatan prioritas meliputi peningkatan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, percepatan pemulihan bencana bidang fisik dan percepatan pemulihan bidang non fisik.

4. Pembangunan perdesaan daerah afirmasi dan transmigrasi;
   Diarahkan pada pembangunan bottom-up dan inklusi serta pengembangan ekonomi local meliputi kegiatan pemenuhan layanan dasar, infrastruktur dasar dan konektivitas termasuk daerah tertinggal, penguatan tata kelola pemerintah, pengembangan ekonomi skala local berbasis kawasan (kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan) dan redistribusi tanah.
5. Pembangunan Papua.
   Diarahkan pada Papua sehat, cerdas dan produktif dengan kegiatan prioritas peningkatan potensi ekonomi lokasl dan kawasan strategis, peningkatan kualitas SDM, layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan), penguatan tata kelola, perlindungan masyarakat dan perubahan iklim.

Untuk mendukung Astacita dan 17 program prioritas, maka ditetapkan target indikator outcome prioritas nasional berdasarkan urusan tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4. 5
Target Indikator Outcome Prioritas Nasional Tahun 2027

NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL 2027	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Angka Kematian Ibu (AKI)	97	(per 100.000 kelahiran hidup)
2	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	99	(%)
3	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1	%
4	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	20	%
5	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	70	%
6	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Desa Mandiri	25	%
7	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Indeks Demokrasi Indonesia	80	indeks
8	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	21	(%)
9	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Rasio Elektrifikasi	100	%
10	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	%
11	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas	100	%

NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL 2027	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus		
12	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi	45	%
13	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Indeks pembangunan literasi masyarakat	73	Indeks
14	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	1.500.000	Keluarga
15	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya	20.410.000	Ton
16	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penemuan Kasus TBC	90	%
17	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	75	%
18	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	3	%
19	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	31	%
20	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	50	%
21	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	68	Indeks
22	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	5.748.850	Orang
23	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Indeks Kewaspadaan Nasional	77	Nilai
24	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase kondisi mantap jalan	73	%
25	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Rasio PDB Pariwisata	5	%
26	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	85	%
27	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi	55.273.025	Ton
28	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85	%
29	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	38	%

NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL 2027	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	84	%
31	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77	poin
32	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	71	Nilai
33	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3	Poin
34	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Penanaman Modal	3	triliun rupiah
35	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	86	%
36	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	50	Kasus
37	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	209.537	Bidang Tanah
38	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	312.600	Kepala Keluarga
39	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73	Nilai
40	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	100	%
41	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	62	Nilai
42	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	68	Nilai
43	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	58	Nilai
44	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	64	Nilai
45	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	75	Nilai
46	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	70	Nilai
47	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	60	Nilai
48	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	71	Nilai
49	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	63	Nilai

NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL 2027	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88	%
51	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	84	%
52	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim keamanan SMA	74	Nilai
53	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim keamanan SMK	71	Nilai
54	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim keamanan SDLB	79	Nilai
55	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim keamanan SMPLB	75	Nilai
56	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim keamanan SMALB	74	Nilai
57	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim kebinekaan SMA	70	Nilai
58	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim kebinekaan SMK	66	Nilai
59	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim kebinekaan SDLB	65	Nilai
60	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim kebinekaan SMPLB	67	Nilai
61	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim kebinekaan SMALB	66	Nilai
62	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim Inklusivitas SMA	64	Nilai
63	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim Inklusivitas SMK	61	Nilai
64	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim Inklusivitas SDLB	68	Nilai
65	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim inklusivitas SMPLB	71	Nilai
66	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim inklusivitas SMALB	70	Nilai
67	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	Persentase
68	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	Persentase
69	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	Persentase
70	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	Persentase
71	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	Persentase
72	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rasio Kewirausahaan	3	Persentase
73	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	70	Nilai
74	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penetapan RDTR	1.059	Perda/Perkada
75	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang	83	Persentase

NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL 2027	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi		
76	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Indeks Pembangunan Pemuda	69	Nilai
77	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	80	Persentase
78	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	16	%
79	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	60	Persentase
80	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	55	Persentase
81	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	5.981.316	Ha
82	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	80	Nilai
83	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	80	Nilai
84	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	80	Nilai
85	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	8	Persentase
86	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	3.500.000.000.000	Rp
87	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis	250.000	Ha
88	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	78	Indeks
89	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Nilai Ekspor Barang di Proviinsi	992	SBM/Milyar Rupiah
90	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Provinsi	610	Rp. Juta Per Tahun
91	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	73	Nilai
92	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	2	Nilai
93	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Jumlah lulusan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan kerja swasta dan /atau OPD	10.288	orang
94	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja	2.452.337	orang

NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL 2027	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
95	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Kategori Baik	9	%
96	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "Sangat Baik"	365	Daerah
97	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan	657	Miliar Rupiah
98	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Presentase Peningkatan Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkinerja baik	64	%
99	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Luas Kawasan yang terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha)	13.440	Ha
100	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan ketentuan yang berlaku	50	%
101	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Tingkat Keselamatan Transportasi di Daerah	100	%
102	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi di Daerah	1	Rasio
103	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	1.915	%
104	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Nonmigas	795	%

Sumber: E Rakortek SIPD 2026, Rakortekrenbang Nasional 2026

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat pada Tabel 4.5 diatas, maka terdapat beberapa *highlight intervensi* di Sumatera tahun 2027 yang meliputi sebagai berikut:

1. Penurunan biaya logistik untuk meningkatkan keunggulan komparatif investasimelalui lanjutan pembangunan/peningkatan Jalan Tol Trans Sumatera dan Kereta Api, serta optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama.
2. Penguatan pembangunan perkotaan terpadupada WM Medan dan Palembang, serta non-WM.
3. Pengembangan kawasan komoditas unggulan dan Ekonomi Birumeliputi penguatan rantai nilai pertanian, perkebunan, dan kelautan.
4. Pengembangan kawasan swasembada pangan, air, dan energipadakawasan strategis.
5. Peningkatan investasiindustri, promosi investasi, dan perluasan insentif pada pusat-pusat pertumbuhan (KPBPB, KI, dan Kawasan Pariwisata).

6. Penguatan peran BP Batam melalui sinkronisasi kewenangan atas lahan, perizinan, dan infrastruktur untuk mendorong investasi berorientasi ekspor. Penguatan ini ditujukan untuk mengembangkan kawasan industri, digitalisasi perizinan, serta transformasi KPBPB Batam sebagai hub logistik maritim internasional.
7. Penguatan peran BP Sabang melalui peningkatan koordinasi dan pelayanan kawasan untuk mendukung pengelolaan pelabuhan, perdagangan, dan pariwisata bahari. Penguatan ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja kawasan dan daya saing di KPBPB Sabang.
8. Percepatan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinandifokuskan pada kawasan afirmasi, daerah tertinggal, serta kawasan transmigrasi, melalui pemenuhan infrastruktur dan akses layanan dasar, peningkatan produktivitas ekonomi lokal perdesaan, serta pemerataan perlindungan sosial adaptif.
9. Percepatan pemulihan wilayah terdampak bencanamelalui implementasi Rencana Induk PRRP, penguatan infrastruktur tahan bencana, serta pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang adaptif terhadap risiko bencana.
10. Penguatan pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan pariwisataserta peningkatan ketahanan terhadap risiko bencana.

4.2.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027

4.2.2.1. Tema Pembangunan Aceh Tahun 2027

Pasal 263 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sesuai dengan aturan diatas, maka dalam penyusunan arah kebijakan RKPA Tahun 2027 harus berpedoman pada arah kebijakan yang terdapat dalam RPJMA Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027 dan mendukung Proyek Strategis Nasional (ProSN). Selain itu, mengingat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada tahun 2025, maka dalam penyusunan RKPA Tahun 2027 juga harus mengadopsi kebijakan yang terdapat dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun 2026-2028. Merujuk pada ketentuan diatas, maka tema pembangunan RKPA Tahun 2027 adalah "**Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan**". Melalui tema tersebut, maka fokus pembangunan Aceh tahun 2027 adalah dapat diuraikan sebagai berikut: (1) **Pertumbuhan Ekonomi Yang Tangguh dan Berkelanjutan**, diarahkan pada percepatan investasi, pengembangan sektor unggulan (pertanian, perikanan dan

pariwisata), hilirisasi produk local serta pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas antarwilayah (2) **Penurunan Kemiskinan**, diarahkan pada program pengentasan kemiskinan berbasis data terpadu, peningkatan pendapatan masyarakat dan perlindungan sosial yang tepat sasaran serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan (3) **Penciptaan Lapangan Kerja**, diarahkan pada pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan muda serta perluasan program padat kerja (4) **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi**, diarahkan pada beasiswa unggulan aceh yang inklusif, pembangunan sekolah sekolah unggul, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan guru, (5) **Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah**, dengan diarahkan pada penciptaan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, profesional, dan berintegritas, peningkatan kapasitas badan pengelolaan keuangan Aceh, dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah untuk mendukung kemandirian fiskal dan peningkatan profesionalisme ASN.

Selain itu, RKPA Tahun 2027 juga difokuskan pada **pemulihan wilayah pascabencana** yang diarahkan pada pembangunan kembali wilayah yang terdampak bencana secara yang lebih aman dan tangguh serta berkelanjutan melalui rehabilitasi dan rekonstrukasi infrastruktur, permukiman, sosial, ekonomi dan fasilitas public serta perlindungan lingkungan hidup dan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mencegah degradasi lingkungan, memperbaiki fungsi ekosistem, dan menurunkan risiko banjir pada masa depan yang mengacu pada dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh Tahun 2026-2028.

Selanjutnya, sasaran pembangunan Aceh tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4. 6
Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2027

Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Berkelanjutan	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,1 – 4,5
PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	49,5 – 54,0
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,1
Indeks Ekonomi Hijau Daerah	66,54
Tingkat Inflasi	1,5 – 3,5
Penurunan Intensitas Emisi GRK	46,31
Indeks Risiko Bencana	178,41
Indeks Ketahanan Pangan	77,54
Indeks Williamson	0,389
Penurunan Kemiskinan	
Tingkat Kemiskinan (%)	12,22 – 13,60
Rasio Gini	0,274 – 0,284
Penciptaan Lapangan Kerja	

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,45 – 5,50
Peningkatan Kualitas SDM, Sain dan Teknologi	
Indeks Modal Manusia	0,590
Peringkat Inovasi Daerah	12,2
Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah	
Indeks Reformasi Birokrasi	83
Inklusi Keuangan	95,56

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan Rancangan RKP Tahun 2027

Sasaran pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pencapaian sasaran nasional. Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa sasaran pembangunan Aceh dalam RKPA tahun 2027 sepenuhnya selaras dengan target indikator sasaran pembangunan Aceh yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2027. Keberhasilan target dalam dokumen perencanaan nasional sangat bergantung pada kontribusi seluruh pemerintah daerah. Dengan demikian, keselarasan sasaran pembangunan bukan sekadar memenuhi ketentuan perencanaan, tetapi merupakan strategi untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan anggaran daerah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan dan karakteristik daerah.

Tabel 4.7
Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Nasional dan Aceh Tahun 2027

No	Indikator	Target Provinsi (RKP 2027)	Target RKPA 2027
1	2	3	4
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,1 - 4,5	4,1 - 4,5
2	Tingkat Kemiskinan (%)	12,22 - 13,60	12,22 - 13,60
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,45 - 5,50	4,45 - 5,50
4	Rasio Gini	0,274 - 0,284	0,274 - 0,284
5	Indeks Modal Manusia	0,59	0,59
6	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	49,5 - 54,0	49,5 - 54,0
7	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,1	1,1

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

4.2.2.2. Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027

Berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan, identifikasi isu strategis, arah kebijakan nasional dan daerah serta dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan guna mencapai sasaran

pembangunan daerah secara optimal, maka terdapat 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Aceh (PA) tahun 2027 yang meliputi sebagai berikut:

1. Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah);
2. Penguatan Implementasi Kekhususan dan Keistiwewaan Aceh;
3. Penurunan Angka Kemiskinan;
4. Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumberdaya Alam dan Maritim;
5. Penciptaan Lapangan Kerja;
6. Peningkatan Infrastruktur Yang Berkualitas;
7. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi;
8. Transformasi Digital Yang Terintegrasi;
9. Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah.
10. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Lebih jelas mengenai 10 (sepuluh) PA tahun 2027 dan keselarasannya dengan misi RPJMA Tahun 2025-2029 dan Prioritas Nasional (PN) tahun 2027 dilihat pada Gambar 4.2, Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 berikut ini.



Gambar 4. 2
10 (Sepuluh) Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027

Tabel 4. 7
Keselarasan Antara Misi RPJMA Tahun 2025-2029 dan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027

No	Misi RPJMA	No.	Prioritas Pembangunan Aceh (PA)
1	2		3
1	Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah	1	Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah).
2	Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA	2	Penguatan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh
3	Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas	3	Penurunan Angka Kemiskinan
		4	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumberdaya alam dan maritim
		5	Penciptaan lapangan kerja
		8	Transformasi digital yang terintegrasi
4	Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan	6	Peningkatan infrastruktur yang berkualitas
5	Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas	7	Peningkatan sumber daya manusia, sains dan teknologi
6	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum	9	Tata Kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah
7	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya	10	Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Tabel 4. 8
Keselarasan Antara Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Aceh 2027

No	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Aceh
1	2	3
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia	Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah).
		Penguatan implementasi kekhususan dan keistiwewaan Aceh
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan , energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penciptaan Lapangan Kerja
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan infrastruktur yang berkualitas
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan sumber daya manusia, sains dan teknologi
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumberdaya alam dan maritim
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;	Penurunan Kemiskinan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah
		Transformasi Digital yang Terintegrasi
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber: RPJMN dan RPJMA Tahun 2025-2029

Selanjutnya, dalam rangka melihat keterkaitan antara 10 Prioritas Pembangunan Aceh (PA) tahun 2027 dengan arah kebijakan yang ada dalam RPJMA Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4. 9
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027 dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025 – 2029

No	Prioritas Pembangunan Aceh	Arah kebijakan RPJMA
1	2	3
1	Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah	Penguatan implementasi Syariat Islam, kekhususan dan keistimewaan, dan perdamaian Aceh
2	Penguatan Implementasi Kekhususan Dan Keistiwewaan Aceh	Penguatan implementasi Syariat Islam, kekhususan dan keistimewaan, dan perdamaian Aceh
3	Penurunan Angka Kemiskinan	Peningkatan infrastruktur yang berkualitas
4	Hilirisasi Dan Industrialisasi Berbasis Sumberdaya Alam dan Maritim	Peningkatan infrastruktur yang berkualitas
5	Penciptaan Lapangan Kerja	Peningkatan infrastruktur yang berkualitas
6	Peningkatan Infrastruktur Yang Berkualitas	Peningkatan infrastruktur yang berkualitas
7	Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi
8	Transformasi Digital Yang Terintegrasi	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi
9	Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah	Tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah
10	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan infrastruktur yang berkualitas

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Selain memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan RPJMA Tahun 2025-2029, Prioritas Pembangunan Aceh (PA) tahun 2027 yang dirumuskan juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan dan isu strategis serta pokok-pokok pikiran DPRA sehingga setiap kebijakan dan program prioritas yang mendukung Prioritas Pembangunan Aceh (PA) diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dan isu

strategis serta menjamin keterwakilan masyarakat melalui pokok pokok pikiran DPRA yang merupakan sarana penyaluran aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota DPRA melalui kegiatan rese, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Lebih jelas mengenai keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh (PA) dengan permasalahan dan isu strategis serta pokok pokok pikiran DPRA dapat dilihat pada Tabel 4.10, Tabel 4. 11 dan Tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4. 10
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh dengan Permasalahan Pembangunan Aceh Tahun 2027

No	Prioritas Pembangunan Aceh	Permasalahan Pembangunan Aceh
1	2	3
1	Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah	Implementasi Keistimewaan Aceh Belum Optimal terutama pelaksanaan otonomi khusus Aceh, Syariat Islam, Korban Konflik serta perdamaian
2	Penguatan Implementasi Kekhususan dan Keistiwewaan Aceh	Implementasi Keistimewaan Aceh Belum Optimal terutama pelaksanaan otonomi khusus Aceh, Syariat Islam, Korban Konflik serta perdamaian
3	Penurunan Angka Kemiskinan	Masih tingginya ketimpangan antar wilayah; Sumber daya manusia masih rendah; Implementasi Keistimewaan Aceh Belum Optimal terutama pelaksanaan otonomi khusus Aceh, Syariat Islam, Korban Konflik serta perdamaian
4	Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumberdaya Alam dan Maritim	Pertumbuhan ekonomi Aceh belum maksimal dan fluktuatif
5	Penciptaan Lapangan Kerja	Sumber daya manusia masih rendah; Masih tingginya ketimpangan antar wilayah
6	Peningkatan Infrastruktur Yang Berkualitas;	Masih tingginya ketimpangan antar wilayah
7	Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi	Sumber Daya Manusia masih rendah
8	Transformasi Digital Yang Terintegrasi	Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola pemerintahan Aceh
9	Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah	Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola pemerintahan Aceh

No	Prioritas Pembangunan Aceh	Permasalahan Pembangunan Aceh
1	2	3
10	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah

Tabel 4. 11
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh dengan Isu Strategis Pembangunan Aceh Tahun 2027

No	Prioritas Pembangunan Aceh	Isu Strategis Pembangunan Aceh
1	2	3
1	Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah	Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh
2	Penguatan Implementasi Kekhususan dan Keistiwewaan Aceh	Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh; Memperkuat Otonomi Khusus
3	Penurunan Angka Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan; Peningkatan Pendapatan Perkapita, Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh; Memperkuat Pembangunan Kewilayahan;
4	Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumberdaya Alam dan Maritim	Peningkatan Pendapatan Perkapita, Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh;Memperkuat Industri Pengolahan dan Ekspor; Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru; Memperkuat Perkotaan dan Pendesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
5	Penciptaan Lapangan Kerja	Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat;Membuka Lapangan Kerja dan Meningkat Produktivitas Masyarakat;Memperkuat Industri Pengolahan dan Ekspor;

No	Prioritas Pembangunan Aceh	Isu Strategis Pembangunan Aceh
1	2	3
6	Peningkatan Infrastruktur Yang Berkualitas	Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas
7	Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting; Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat; Penanganan PPKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga;
8	Transformasi Digital Yang Terintegrasi	Optimalisasi Riset dan Inovasi serta Digitalisasi
9	Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas; Kemandirian dalam Ruang Fiskal
10	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan; Pengurangan Risiko Bencana;

Tabel 4. 12
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027 dengan Pokok Pokok Pikiran DPRA

No	Prioritas Pembangunan Aceh	Pokok Pokok Pikiran DPRA
1	2	3
1	Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana masjid, meunasah; Pembangunan sarana dan prasarana dayah/pesantren (ruang kelas, asrama, dll)
2	Penurunan Angka Kemiskinan	Pembangunan rumah layak huni (RLH); Pengadaan sarana dan prasarana pertanian (bibit, pupuk,alsintan), Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (alat tangkap, motor tempel, freezer, palka ikan, cool box) Pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan (bibit, kolam, pakan), Pengadaan bantuan peralatan UMKM, Pengadaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

No	Prioritas Pembangunan Aceh	Pokok Pokok Pikiran DPRA
1	2	3
3	Penciptaan Lapangan Kerja	Bimbingan teknis dan pelatihan tenaga kerja
4	Peningkatan Infrastruktur Yang Berkualitas	Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan,
5	Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah (RKB, Laboratorium, Mobilier, Komputer, dll)
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengadaan bibit penghijauan lingkungan, Pembangunan penguatan tebing sungai, Peningkatan vegetasi DAS

Sumber: E Pokir SIPD RI

Selanjutnya, mengingat prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan instrumen untuk mewujudkan visi, misi, dan janji politik kepala daerah terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat selama proses pemilihan. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat dan saling memperkuat antara prioritas pembangunan daerah dengan janji kepala daerah terpilih. Lebih jelas keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh tahun 2027 dengan janji kepala daerah dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4. 13
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027 dengan Janji Kepala Daerah

No	Prioritas Pembangunan Aceh	Janji Kepala Daerah
1	2	3
1	Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah	Kekhususan dan keistimewaan aceh dalam penguatan perdamaian; Renovasi dan pembangunan sekolah/dayah

No	Prioritas Pembangunan Aceh	Janji Kepala Daerah
1	2	3
2	Penguatan Implementasi Kekhususan dan Keistiwewaan Aceh	Sertifikat tanah rakyat Aceh
3	Penurunan Angka Kemiskinan	Ketersediaan pupuk, benih unggul, dan pestisida langsung ke petani; Rumah layak bagi rakyat Aceh; Penguatan UMKM rakyat Aceh
4	Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumberdaya Alam dan Maritim	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya; Industri pariwisata dan industri halal;
5	Penciptaan Lapangan Kerja	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya
6	Peningkatan Infrastruktur Yang Berkualitas;	Infrastruktur yang berkualitas
7	Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi	Beasiswa putra putri Aceh ke universitas terbaik dunia, Pendidikan, sains dan teknologi setara seluruh Aceh; Kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas; Pemberantasan narkoba; Industri kreatif dan prestasi olahraga;
8	Transformasi Digital Yang Terintegrasi	Digitalisasi dan teknologi modern di semua sektor
9	Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah	BUMA otaritas pengembangan, konsolidasi dan rehabilitasi pertanahan Aceh; Penyempurnaan sistem penerimaan asli Aceh; Tata kelola birokrasi dan pencegahan korupsi; Peningkatan pelayanan publik unggul;Membentuk badan asuransi Aceh
10	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pelestarian lingkungan hidup;

Lebih jelas mengenai arah kebijakan, program prioritas, indikator, target indikator dan pagu per PA dijelaskan sebagai berikut.

PA-1:
Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah)

PRIORITAS ACEH (PA-1) adalah Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah), dengan fokus pada peningkatan pengamalan nilai aqidah, syariah, akhlak dan muamalah. Penguatan pelaksanaan syariat Islam dilakukan dengan beberapa kebijakan antara lain : (a) Pengelolaan Harta Agama (zakat, infaq, sadaqah dan waqaf), (b) Penguatan masjid sebagai rumah Ibadah yang juga memiliki fungsi iradah, imarah dan riayah, (c) Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan dayah, dan (d) Penguatan peran ulama. Untuk sasaran pembangunan PA-1 dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut ini.

Tabel 4. 14
Sasaran Pembangunan PA-1
"Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah)"

Indikator Kinerja	Target 2027
1	2
Indeks Pembangunan Syariat	81,25 – 88,00
Persentase Dayah yang Mandiri	50,38
Indeks Zakat Nasional Aceh	0,68
Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB (ADHB)	28,23
Indeks Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat Dalam Menjalankan Syariat Islam	85
Persentase dimensi toleransi	66
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,46 – 74,71
Persentase Potensi Konflik yang Tertangani	100

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Lebih detail mengenai Program Prioritas (PP) tahun 2027 yang mendukung PA-1 dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut ini.

Tabel 4. 15
Program Prioritas Mendukung PA-1
"Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah)"

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				276.190.905.681	
1	PROGRAM BAITUL MAL ACEH	Indeks Wakaf Nasional Aceh	Indeks	0,71	74.983.837.866	BAITUL MAL
		Persentase Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya	%	91		BAITUL MAL
2	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	75	5.982.257.661	BIRO ISRA SEKDA ACEH
3	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Persentase Fatwa dan Tausyiah yang ditetapkan	%	97	4.926.632.265	MPU
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Indeks kompetensi kurikulum dayah	Indeks	73,03	156.974.714.700	DAYAH
		Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA)	Indeks	55	-	DAYAH
		Persentase kelengkapan sarana belajar mengajar	%	68,69		DAYAH
		Persentase kompetensi tenaga pengajar/teungku dayah	%	71,66		DAYAH
5	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Indeks kesadaran masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam	%	85	33.323.463.189	DSI

Sumber: SIPD RI 2027 dan RPJMA 2025-2029



PA - 2
Penguatan Implementasi Kekhususan dan Keistiwewaan Aceh

PRIORITAS ACEH (PA-2) adalah Penguatan Implementasi Kekhususan dan Keistimewaan Aceh. PA-2 difokuskan pada percepatan peningkatan kesejahteraan serta inklusivitas masyarakat melalui kebijakan penguatan lembaga kekhususan Aceh seperti Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga pengawal keberlanjutan perdamaian Aceh, menjamin stabilitas Aceh-Nasional melalui komitmen yang telah ditandatangani sehingga mendorong gaya hidup aktif rakyat Aceh dalam memupuk persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan bagi para kombatan GAM, korban konflik, dan perbedaan antar kelompok masyarakat menjadi prioritas pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut ini.

Tabel 4. 16
Sasaran Pembangunan PA-2
"Penguatan Implementasi Kekhususan dan Keistimewaan Aceh"

Indikator Kinerja	Target 2027
1	2
Persentase Kajian Wali Nanggroe Terhadap Implementasi MoU Helsinki dan UUPA	90
Indeks Reintegrasi Aceh	0,2
Persentase pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga Wali Nanggroe	90
Indek Pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	55
Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban	95
Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	63,35
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,69 – 57,74
Persentase penerapan kurikulum pendidikan islami dan ke-Aceh-an di kabupaten/kota	52,17
Persentase fatwa dan tausiyah yang telah ditetapkan untuk diterapkan	27,32

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Lebih detail mengenai program prioritas tahun 2027 yang mendukung PA-2 dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut ini.

Tabel 4. 17
Program Prioritas Mendukung PA-2
"Penguatan Implementasi Kekhususan dan Keistimewaan Aceh"

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				110.377.771.531	
1	PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH	Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	Indeks	92,00	15.775.827.336	KKW
2	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Indeks Adat Istiadat Aceh	Indeks	30	300.000.000	MAA
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	62,89	4.000.000.000	BUDPAR
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah LSM/ORMAS yang terdaftar	Organisasi Masyarakat	20	130.051.909	KESBANG POL
5	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase masyarakat penerima akses informasi sejarah	Persentase	8,77	-	BUDPAR
6	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Tersusunnya Mapping/Pemetaan Sengketa dan konflik tanah dan terfasilitasinya sengketa dan konflik tanah (%)	Persentase	85	150.000.000	TANAH
7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Sengketa dan konflik tanah ulayat lintas kab/kota yang diselesaikan	Persentase	10,53	30.000.000	TANAH

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ke museum	Persentase	0,5	3.757.320.000	BUDPAR
9	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) yang terkelola dengan baik	Persentase	90,53	-	DINSOS
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	0,91	2.837.700.000	BUDPAR
11	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Persentase	6,56	-	BUDPAR
12	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase	46	1.600.000.000	KESBANGPOL
13	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan peraturan daerah	Persentase	39	23.263.497.786	SATPOL PP DAN WH

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase penyelesaian pelanggaran qanun syariat islam dan kebijakan kepala daerah	Persentase	100		SATPOL PP DAN WH
		Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban	Persentase	90		SATPOL PP DAN WH
14	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan potensi konflik sosial	Persentase	82	200.000.000	KESBANG POL
15	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas pendidikan politik	Persentase	23	29.720.460.000	KESBANG POL
16	PROGRAM REINTEGRASI ACEH	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	Persentase	16,11	28.612.914.500	BRA
		Persentase korban konflik yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Persentase	15,43		BRA
		Persentase korban	Persentase	22,49		BRA

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
		pelanggaran HAM yang direkomendasikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh				

Sumber: SIPD RI 2027 dan RPJMA 2025-2029



PA - 3
Penurunan Kemiskinan

PRIORITAS ACEH (PA - 3) adalah Penurunan Kemiskinan. PA-3 fokus pada percepatan penurunan angka kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan, melalui kebijakan antara lain meliputi sebagai berikut: (a). Pengunaan data kemiskinan yang akurat dan terpadu untuk merencanakan melaksakan dan evaluasi program program pengantasan kemiskinan; (b). Pemberian dukungan modal menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor padat karya; (c). Memberikan dukungan modal pelatihan dan akses pasar bagi UMKM sehingga dapat membantu mereka untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan; (d). Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar; e). Layanan Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas melalui program jaminan Kesehatan Aceh; (f). Memberikan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pendampingan dibidang kewirausahaan dan manajemen keuangan; (g). Memberikan akses Pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan vokasi untuk dapat meningkatkan peluang ekonomi di masa depan. Sasaran utama pembangunan PA-3 meliputi sebagai berikut (Tabel 4.18).

Tabel 4. 18
Sasaran Pembangunan PA-3
"Penurunan Kemiskinan"

Indikator Kinerja	Target 2027
1	2
Tingkat Kemiskinan (%)	12,22 – 13,60
Gini Ratio	0,274 – 0,284

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Terkait program prioritas tahun 2027 yang mendukung PA-3 "Penurunan Kemiskinan" dapat dilihat pada Tabel 4.19 berikut ini.

Tabel 4. 19
Program Prioritas Mendukung PA-3
"Penurunan Kemiskinan"

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				1.106.391.849.596	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan BUMG Maju	Persentase	6	2.845.850.780	DPMG
		Persentase lembaga kemasyarakatan gampong, adat dan lembaga lainnya yang aktif	Persentase	47,5		DPMG
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	92.500	14.603.000.000	DKP
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	276.000	14.924.400.000	DKP
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN	Persentase Keberhasilan Panen	Persentase	95,3	75.000.000	TANBUN

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
	GAN BENCANA PERTANIAN					
5	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Bakteri yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak	Persentase	0,1	20.000.000	DISNAK
		Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Parasit yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak	Persentase	7,08		DISNAK
		Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Virus yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak	Persentase	6,48		DISNAK
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	59,65	5.579.200.000	DKP
7	PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH	Meningkatnya Kertesediaan Kepemilikan Lahan Untuk Fasilitas Publik dan Tanah Masyarakat Miskin	Persil	400	192.482.266	TANAH
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Persentase	43	26.525.000.000	TANBUN
		Pertumbuhan produksi telur (ayam, itik, puyuh)	Ton	564.655		DISNAK

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Ton/Ha	5,57	36.853.780.616	TANBUN
		Pertumbuhan Produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas)	Ton	12.670		DISNAK
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	Surat Keputusan	60	6.795.000.000	TANBUN
		Indek Terima Peternak (ItPt)	Indeks	106,66		DISNAK
11	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase legalisasi aset dan penataan akses hasil reforma agraria	Persentase	11	50.195.740	TANAH
12	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,213	311.066.128.000	PERKIM
13	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persentase	40,63	1.040.000.000	NAKER
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi meningkat kapasitas produksinya	Koperasi	4	2.984.787.500	KOP UKM
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Persentase	68,7	199.362.302	DINSOS

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persentase	68,7		
		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Persentase	68,7		
		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase	68,7		
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Persentase	68,7		

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
16	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Kewirausahaan Daerah	Rasio	4,04	33.197.206.863	KOP UKM
17	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	15.000.000.000	DINSOS
		Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	Persentase	100		DINSOS
		Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	Persentase	93,51		DINSOS
18	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Warga NegaraMigran Korban Tindak Kekerasan (KTK)Dalam & Luar Negeri yang mendapatkan layanan pemulangan.	Persentase	100	56.181.906	DINSOS
19	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	Persentase	15	3.322.078.000	DLHK
		Persentase Peningkatan	Persentase	10		DLHK

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
	BIDANG KEHUTANAN	Kelompok Petani Hutan (				
20	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	ersentase Koperasi Sehat	Persentase	40	200.000.000	KOP UKM
21	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan (%)	Persentase	0,3	7.732.774.125	KOP UKM
		Indek Tutupan Lahan (IKL)	Indeks	87,08		KOP UKM
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Persentase	0,7		KOP UKM
22	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	Persentase	99,72	4.603.487.500	ESDM
23	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan	Persentase	40,63	350.000.000	NAKER
24	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan UsahaKecil	Persentase	1,15	4.500.000.000	KOP UKM
25	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	Persentase	40,63	110.000.000	NAKER
26	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	ersentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dan Kemiskinan	Persentase	32,92	11.497.134.604	DINSOS
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persentase	31,92		DINSOS

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	30,92		DINSOS
27	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	Persentase	100	10.715.566.937	DINSOS
		Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti (%)	Persentase	100		DINSOS
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	Persentase	100		DINSOS
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	Persentase	100		DINSOS
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	Persentase	100		DINSOS

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
28	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKBa)	(Per 1.000 Kelahiran)	7	591.353.232.457	DINKES
		Prevalensi Stunting	Persentase	24		DINKES
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita	Persentase	9,5		DINKES
		Persentase RS Regional yang Fungsional	Persentase	43,6		DINKES
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persentase	41,3		DINKES
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	Persentase	100		DINKES
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Luar Biasa	Persentase	100		DINKES
		Angka Kematian Ibu (AKI)	((per 100.000 kelahiran hidup))	72		DINKES
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (	Persentase	99,5		DINKES
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persentase	74		DINKES
		Cakupan penerima	Persentase	55		DINKES

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
		pemeriksaan kesehatan gratis				
		Persentase hipertensi dalam pengendalian	Persentase	13		DINKES
		Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	Persentase	77,5		DINKES
		Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	Persentase	77,5		RSIA
		Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	Persentase	77,5		RSJ
		Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	Persentase	77,5		RSUDZA

Sumber: SIPD RI dan RPJMA Tahun 2025-2029



PA - 4
Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam

PRIORITAS ACEH (PA-4) adalah "Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam dan Maritim". PA-4 difokuskan pada pengembangan potensi sumberdaya alam dan maritim yang tersedia disertai dengan upaya maksimal untuk meningkatkan nilai tambah. Disamping meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan industrialisasi tersebut juga dimaksudkan untuk dapat membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial. Terdapat beberapa arah kebijakan PA-4 yang meliputi sebagai berikut : (a). Mengupayakan peningkatan nilai tambah komoditi unggulan pertanian dan kelautan Aceh menjadi produk turunan sebagai komoditas ekspor. Beberapa produk yang diupayakan untuk peningkatan nilai tambah antara lain: komoditi pertanian dan perkebunan seperti *Crude Palm Oil* (CPO), Kopi, Nilam, Karet dan hasil laut; (b). Hilirisasi produk CPO dan Migas akan dilakukan dan akan ditambah dengan hilirisasi sumber daya alam lainnya, seperti mineral lainnya, produk agro, serta produk maritim. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu

diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi hijau/biru; (c). Pelatihan dan Pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal; (d). Memberikan kemudahan bagi investor serta melakukan perlindungan bagi industri lokal; (e). Mempermudah perizinan, permodalan, dan mengupayakan akses pasar; (f). Mengembangkan inovasi dan penerapan teknologi dan penerapan hilirisasi. Sasaran pembangunan PA-4 disajikan pada Tabel 4.20 berikut ini.

Tabel 4. 20
Sasaran Pembangunan PA-4
"Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam dan Maritim"

Indikator	Target 2027
1	2
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,1 – 4,5
Nilai Tukar Petani (Indeks)	121,81
Indeks Inovasi Daerah	60
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,87
Peringkat Inovasi Daerah	12,2
Persentase Dana Untuk Inovasi dari APBA	0,63
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	13,3
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah UKM)	0,42
Proporsi UMKM terhadap Jumlah Angkatan Kerja %)	16,54
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5,05
Rasio PDRB Penyediaan Akomudasi Makan dan Minum (%)	1,97
Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	0,81
Inklusi Keuangan (%)	95,56
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,1
Tingkat Inflasi	1,5 – 3,5
Rasio Gini	0,284 – 0,291
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB %)	1,14
Eksport Barang dan Jasa (% PDRB)	65,43 – 66,09
Indeks Harga Konsumen	109
Persentase Kawasan Transmigrasi Berstatus Mandiri	28,57
Persentase Desa Mandiri	1,36
Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,51
Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata Rata Tahunan	2.549.810
Return of asset (ROA) BUMD (%)	2,29
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	20,86
Total Kredit/PDRB (%)	20,09
Persentase Pemanfaatan Lahan Terlantar	17,32
Indeks Ketahanan Pangan	77,54
Prevalensi Ketidakcukupan Komsumsi Pangan	7,49

Indikator	Target 2027
1	2
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	33,10 – 33,43

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Lebih jelas mengenai program prioritas mendukung PA-4 disajikan pada Tabel 4.21 berikut ini.

Tabel 4. 21
Program Prioritas Mendukung PA-4
"Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam dan Maritim"

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				15.672.492.600	
1	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	4,9	50.000.000	ESDM
2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase kepatuhan pelaporan informasi industri	%	90	50.830.000	INDAG
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan ekspor	Persentase	4,00	150.000.000	INDAG
		Nilai Ekspor bersih Aceh	USD	247.958.493		INDAG
4	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah izin yang dikeluarkan	%	100	38.840.000	INDAG
5	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Proporsi penggunaan produk lokal dalam promosi yang difasilitasi	%	100	35.000.000	INDAG

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Menjamin ketersediaan stok bapokting dan keterjangkauan harga	%	25	140.000.000	INDAG
7	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	42,70	2.980.650.154	INDAG
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	%	0,62		INDAG
8	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase fasilitasi pelaku usaha dalam izin perdagangan	%	100	155.000.000	INDAG
9	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perusahaan Berizin yang dibina	%	95	3.611.316.600	INDAG
10	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi	%	6,81	8.065.855.846	INDAG
11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	395.000.000	INDAG

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan SIPD RI



PA - 5
Penciptaan Lapangan Kerja

PRIORITAS ACEH (PA-5) adalah "Penciptaan Lapangan Kerja. PA-5 fokus pada upaya penciptaan lapangan kerja dalam rangka perluasan lapangan berusaha akan dilakukan dengan arah kebijakan yangmeliputi sebagai berikut: (a). Mewujudkan Penguatan UMKM Rakyat Aceh; (b). Mewujudkan Industri Pariwisata dan Industri Halal, dan (c). Mewujudkan industri kreatif. Adapaun sasaran pembangunan PA-5 dapat dilihat pada Tabel 4.22 berikut.

Tabel 4. 22
Sasaran Pembangunan PA-5
"Penciptaan Lapangan Kerja"

Indikator	Target 2027
1	2
PDRB per Kapita (Rp Juta)	49,5 – 54,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,45 – 5,50
Persentase Lapangan Kerja Menurut Status Formal dan Informal	45,8 – 54,2
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	46,75

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan SIPD RI

Lebih detail mengenai program prioritas yang mendukung PA-5 dapat dilihat pada Tabel 4.23 berikut ini.

Tabel 4. 23
Program Prioritas Mendukung PA-5
"Penciptaan Lapangan Kerja"

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2027	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				2.525.000.000	
1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	36,17	475.000.000	NAKER

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2027	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Pemerintah (Perusahaan)	Perusahaan	329		NAKER
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi melalui pelatihan dan pemagangan yang ditempatkan	%	47,30	1.600.000.000	NAKER
3	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	Perusahaan	2044	450.000.000	NAKER

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan SIPD RI

Dari Tabel 4.23 diketahui total anggaran dalam rangka mendukung PA-5 relatif sangat kecil yakni sebesar Rp. 2.525.000.000 dengan didukung oleh tiga program prioritas utama yaitu: 1) Program Hubungan Industrial, 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan 3) Program Pengawasan Ketenagakerjaan. Rendahnya anggaran pendukung PA-5 disebabkan karena PA-5 merupakan tujuan/sasaran/dampak dari pelaksanaan dari prioritas pembangunan Aceh lainnya seperti pada PA3- Penurunan Kemiskinan, PA-4 Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam dan Maritim, dan PA-6 Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas.



PA - 6
Peningkatan Infrastruktur Yang Berkualitas

PRIORITAS ACEH (PA-6) adalah "Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas". Fokus PA-6 adalah untuk peningkatan konektivitas, integrasi antar wilayah, serta pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, dengan sasaran pembangunan PA-6 dapat dilihat pada Tabel 4. 24 berikut ini.

Tabel 4. 24
Sasaran Pembangunan PA-6
"Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas"

Indikator	Target 2027
1	2
Indeks Williamson	0,389
Indeks Ketahanan Air Daerah	3,65
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39,16
Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	72,44
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	5,72
Komsumsi Listrik per Kapita	7,79
Rasio Konektivitas	0,71
Persentase Kesesuaian Pembangunan dengan Tata Ruang	74
Persentase Kepatuhan Pembangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	74
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,9

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Lebih jelas mengenai program prioritas yang mendukung PA-6 dapat dilihat pada Tabel 4.25 berikut.

Tabel 4. 25
Program Prioritas Mendukung PA-6
"Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas"

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				647.932.953.644	
1	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Kualitas Penyeleggaraan Pembangunan	Persentase	88	6.115.520.000	BIRO ADPEM SEKDA ACEH
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	Persentase	81,50	166.869.900.000	PERKIM
3	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	Dokumen	2	25.000.000	TANAH
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pemenuhan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Regional	Persentase	9,0	-	PERKIM
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persentase	22,54		PERKIM
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pemenuhan Layanan Air Minum SPAM Lintas Kab/Kota	Persentase	20,5	5.000.000.000	PERKIM
6	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan	Indeks	78,49	96.903.601.350	DISHUB

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Masyarakat Berkeselamatan di Daerah Perlintasan Sebidang Kereta Api dengan Jalan Provinsi	Persentase	20	549.800.000	DISHUB
8	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kapasitas Air Baku	Persentase	1,11	93.576.570.770	PENGAIRAN
		Persentase irigasi modern (%)	Persentase	71,27		PENGAIRAN
		Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik (%)	Persentase	56,83		PENGAIRAN
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase	3,12	586.354.112	PUPR
10	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan nusantara	Persentase	18	1.285.702.900	BUDPAR
11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	Persentase	69,38	137.897.200.000	PERKIM
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	Persentase	81,69	116.085.392.372	PUPR

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan	Indeks	78,16	21.960.559.140	DISHUB
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	Persentase	85	1.077.353.000	PUPR

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan SIPD RI 2027



PA - 7
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi

PRIORITAS ACEH (PA-7) adalah "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi". PA-7 fokus pada peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pengembangan pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kemampuan, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak untuk menekankan pentingnya mempromosikan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Adapun sasaran pembangunan PA-7 dapat dilihat pada Tabel 4.26 berikut.

Tabel 4. 26
Sasaran Pembangunan PA-7
"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi"

Indikator	Target 2027
1	2
Indeks Modal Manusia	0,59
Harapan Lama Sekolah	14,88 – 14,89
Kualitas Pendidikan (SPM)	75,67
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	10,50 – 15,00
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	2,00 – 4,00

Indikator	Target 2027
1	2
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	60,29
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	33,00 – 35,00
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	28,50 – 30,50
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,74
Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,55 – 10,57
Tingkat Kegemaran Membaca	73,2
Usia Harapan Hidup (UHH)	71
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66,7
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,43
Indeks Pembangunan Gender	93,5
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	68,6
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	72,34
Indeks Kesejahteraan Sosial	0,575
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24,06
Indeks Pembangunan Olahraga	0,533
Indeks Pembangunan Pemuda	66

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Lebih jelas mengenai program prioritas yang mendukung pelaksanaan PA-7 dapat dilihat pada Tabel 4.27 berikut.

Tabel 4. 27
Program Prioritas Mendukung PA-7
"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi"

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU	SKPA
1	2	3	4	5		7
	TOTAL				884.496.294.522	
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang sudah menggunakan pelayanan administrasi Pemerintahan secara digital melalui SIGAP	Persentase	46	639.196.918	DPMG
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi Berizin	Persentase	1,31	200.000.000	KOP UKM
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	Persentase	60	395.669.080	DINKES
4	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks pembangunan literasi masyarakat	(Indeks)	75,5	2.925.029.468	ARPUS
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	(Indeks)	67,15	101.940.000	DPMG
		Persentase kabupaten kota menuju layak anak (KLA)	Persentase	86,9		DPMG
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKBa)	(Per 1.000 Kelahiran)	7	108.955.720.148	DINKES

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU	SKPA
1	2	3	4	5		7
		Prevalensi Stunting	Persentase	24		DINKES
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita	Persentase	9,5		DINKES
		Persentase RS Regional yang Fungsional	Persentase	43,6		DINKES
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persentase	41,3		DINKES
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	Persentase	100		DINKES
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Luar Biasa	Persentase	100		DINKES
		Angka Kematian Ibu (AKI)	((per 100.000 kelahiran hidup))	72		DINKES
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (	Persentase	99,5		DINKES
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persentase	74		DINKES

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU	SKPA
1	2	3	4	5		7
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	55		DINKES
		Persentase hipertensi dalam pengendalian	Persentase	13		DINKES
		Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	Persentase	77,5		DINKES
		Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	Persentase	77,5		RSIA
		Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	Persentase	77,5		RSJ
		Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	Persentase	77,5		RSUDZA
7	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi yang Meningkat Kapasitas SDM	Koperasi	250	200.000.000	KOP UKM
8	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA	Persentase	11	169.245.614	DPMG
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persentase	50,88-53,22		DPMG

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU	SKPA
1	2	3	4	5		7
		Tingkat pemahaman data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	Persentase	13,02		DPMG
9	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indeks PengawasanKearsipan	Rasio	80,00	314.294.800	ARPUS
10	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan olahraga	Persentase	60,6	41.502.000.000	PORA
11	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina	Persentase	0,05	5.600.000.000	PORA
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase gerakan kepramukaan yang aktif	Persentase	96	3.000.000.000	PORA
13	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal	(Orang)	175	61.178.543.419	BPSDM
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persentase	3,3		BPSDM
14	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	Persentase	2,3	110.000.000	DP3A

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU	SKPA
1	2	3	4	5		7
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	(Indeks)	63,2		DP3A
15	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Akreditasi Sekolah SLB	Persentase	85	95.000.000	DISDIK
		Akreditasi Sekolah SMA	Persentase	94		DISDIK
		Akreditasi Sekolah SMK	Aduan	98		DISDIK
16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM kesehatan yang standar	Persentase	34	950.000.000	RSUDZA
17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar (%)	Persentase	70,5	48.814.386	DP3A
		Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan kualitasÂ keluarga	Persentase	25,8		DP3A
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	umlah kebijakan yang dihasilkan dibandingkan dengan target atau kebutuhan kebijakan	Rasio	1,6	128.780.000	MPA

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU	SKPA
1	2	3	4	5		7
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	50	348.000.000	KOMINSA
20	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Rasio arsip yang dimanfaatkan	Rasio	0,70	40.000.000	ARPUS
21	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat DigitalisasiArsip	Indeks	95	0	ARPUS
22	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	76,2	94.914.000	DP3A
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	80		DP3A
23	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprenhensif	Persentase	100	513.086.000	DP3A
24	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Iklim Inklusivitas SMK	Nilai	58	656.986.060.689	DISDIK
		Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB (Nilai)	Nilai	83		DISDIK
		ndeks Iklim Keamanan Sekolah SMA	Nilai	74		DISDIK

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU	SKPA
1	2	3	4	5		7
		Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB (Nilai)	Nilai	83		DISDIK
		ndeks Iklim Keamanan Sekolah SMK (Nilai)	Nilai	74		DISDIK
		Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB (Nilai)	Nilai	77		DISDIK
		Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	Nilai	80		DISDIK
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	Nilai	74		DISDIK
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB (Nilai)	Nilai	76		DISDIK
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMK (Nilai)	Nilai	73		DISDIK
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB (Nilai)	Nilai	78		DISDIK
		Indeks Inklusivitas SDLB (Nilai)	Nilai	79		DISDIK
		deks Inklusivitas SMA (Nilai)	Nilai	63		DISDIK
		Indeks Inklusivitas SMALB (Nilai)	Nilai	75		DISDIK
		Indeks Inklusivitas SMPLB (Nilai)	Nilai	91		DISDIK
		Indeks Literasi SDLB (Nilai)	Nilai	94		DISDIK
		Indeks Literasi SMA	Persentase	76		DISDIK
		Indeks Literasi SMALB	Persentase	88		DISDIK
		Indeks Literasi SMK	Persentase	63		DISDIK
		Indeks Literasi SMPLB	Persentase	91		DISDIK
		Indeks Numerasi SDLB	Persentase	86		DISDIK
		Indeks Numerasi SMA	Persentase	81		DISDIK
		Indeks Numerasi SMALB (%)	Persentase	88		DISDIK
		Indeks Numerasi SMK	Persentase	62		DISDIK

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU	SKPA
1	2	3	4	5		7
		Indeks Numerasi SMPLB	Persentase	89		DISDIK
		Kepuasan Dunia Kerja terhadap Kompetensi Lulusan SMK	Persentase	90		DISDIK
		Kualitas Pembelajaran SDLB	Nilai	74		DISDIK
		Kualitas Pembelajaran SMA	Nilai	67		DISDIK
		Kualitas Pembelajaran SMALB	Nilai	75		DISDIK
		Kualitas Pembelajaran SMK	Nilai	65		DISDIK
		Kualitas Pembelajaran SMPLB	Nilai	75		DISDIK
		Penyerapan Lulusan SMK	Persentase	91		DISDIK

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan SIPD RI



PA - 8
Transformasi Digital Yang Terintegrasi

PRIORITAS ACEH (PA-8) adalah "Transformasi Digital yang Terintegrasi" PA-8 fokus pada peningkatan digitalisasi dan teknologi maju (*advance technology*) dengan arah kebijakan yang meliputi: (a). Intensifikasi ekonomi digital, (b). pengarusutamaan digitalisasi untuk mencapai pembangunan inklusif, dan (c). Percepatan R&D dan C&I serta memanfaatkan potensi teknologi maju. Adapun sasaran pembangunan PA-8 dapat dilihat pada Tabel 4.28 berikut.

Tabel 4. 28
Sasaran Pembangunan PA-8
"Transformasi Digital yang Terintegrasi"

Indikator	Target 2027
1	2
Indeks Transformasi Digital	51,36

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Lebih jelas mengenai program prioritas yang mendukung pelaksanaan PA-8 dapat dilihat pada Tabel 4.29 berikut.

Tabel 4. 29
Program Prioritas Mendukung PA-8
"Transformasi Digital yang Terintegrasi"

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2027	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				14.957.592.089	
1	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	83,25	3.205.443.038	BIRO PBJ
2	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Terintegrasinya sistem informasi pertanahan se kab/kota se Aceh	Persentase	13,04	156.149.051	TANAH
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Nilai LPPD	Persentase	2,955	700.000.000	BIRO PEMOTDA
		Persentase kerjasama daerah	Persentase	55,00	-	BIRO PEMOTDA

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2027	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase segmen batas daerah yang dievaluasi	Persentase	50	-	BIRO PEMOTDA
4	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi	Persentase	89	1.500.000.000	BIRO ORGAN
5	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	2,25	3.800.000.000	KOMINSA
6	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	81,5	5.248.000.000	KOMINSA
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	50	348.000.000	KOMINSA

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan SIPD RI 2027

PA - 9
Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah

PRIORITAS ACEH (PA-9) adalah "Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah". PA-9 fokus pada peningkatan kualitas dan efektivitas pemerintahan Aceh melalui reformasi dan inovasi, dengan arah kebijakan yang meliputi sebagai berikut: (a). Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Aceh melalui pengembangan sistem informasi dan pengawasan yang efektif; (b). Pengembangan pemerintahan yang berbasis pada teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik; (c). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui

pengembangan mekanisme partisipasi yang efektif; (d). Penguatan kelembagaan pemerintahan Aceh dilakukan melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan. Adapun sasaran pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.30 berikut.

Tabel 4. 30
Sasaran Pembangunan PA-9
"Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah"

Indikator	Target 2027
1	2
Indeks Reformasi Birokrasi	83
Indeks Pelayanan Publik	4,53
Nilai SAKIP	68,5
Opini BPK	WTP
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	95
Indeks Profesionalisme ASN	85
Indeks Demokrasi Indonesia	77,70 – 77,75
Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	76,1
Indeks Reformasi Hukum	73,5
Maturitas SPIP terintegrasi (Level)	3
Indeks Transformasi Digital	51,36
Indeks Integritas Nasional	72

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Lebih jelas mengenai program prioritas yang mendukung pelaksanaan PA-9 dapat dilihat pada Tabel 4.31 berikut. Dari Tabel dibawah ini diketahui total pagu pendukung PA-9 mencapai Rp. 7.250.224.528.939. Tinggingya pagu alokasi ini disebabkan karena program prioritas pendukung PA-9 termasuk program penunjang pemerintah daerah provinsi (belanja rutin) seluruh SKPA yang mencapai Rp. 5.413.733.877.550. Selain itu, total pagu pendukung PA-9 juga mencakup belanja transfer dan bantuan keuangan ke kabupaten/kota. Belanja Transfer terdiri dari dua komponen. Pertama, Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 706.461.444.840 yang terdiri dari a.) Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sejumlah Rp. 304.305.310.002 dan b.) Dana Bagi Hasil Pendapatan Pajak Aceh sejumlah Rp. 402.156.134.838. Komponen kedua adalah Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 912.506.488.000, yang terdiri dari a.) DOKA sejumlah Rp. 678.042.668.000; b.) TDBH MIGAS sejumlah Rp. 21.802.462.000; c.) Pembangunan Ibu Kota Aceh sejumlah Rp. 14.961.358.000; d.) Bantuan Keuangan Venue dan Peralatan Pora Kab. Aceh Jaya sejumlah Rp. 80.000.000.000; e.) Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pora Kab. Aceh Jaya sejumlah Rp. 20.000.000.000; f.) Bantuan Keuangan MTQ Kab. Aceh Barat Daya sejumlah Rp. 12.500.000.000; g.) Bantuan Keuangan Pembebasan Lahan dan Pembangunan Jalan Pengalihan Jl. Dr.T Syarief Thayeb ke Jl. Seulanga sejumlah Rp. 5.000.000.000; h.) Bantuan Keuangan Mukim sejumlah Rp. 5.000.000.000; i.) Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh

Barat sejumlah Rp. 10.000.000.000; j.) Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Kota Subulussalam sejumlah Rp. 5.000.000.000; k.) Bantuan Keuangan Peningkatan Jalan Seuneudon-Pante Breueh Kab. Aceh Utara sejumlah Rp. 10.000.000.000; dan l.) Bantuan Keuangan Pembangunan Jalan Dua Jalur Sekolah Unggul SMA Garuda Kab. Aceh Utara sejumlah Rp. 10.000.000.000.

Tabel 4. 31
Program Prioritas Mendukung PA-9
"Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah"

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				7.250.224.528.939	
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase FasilitasiPelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRA	Persentase	95	107.141.852.685	SEKWAN
2	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Indeks penyelesaian fasilitas perundangundangan	Persentase	85	3.518.539.813	BIRO HUKUM SEKDA ACEH
		Persentase penyelesaian bantuan hukum	Persentase	85		BIRO HUKUM SEKDA ACEH
3	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPA	Persentase	98	1.530.764.334	BAPPEDA
4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	4.550.224.030	BAPPEDA

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100		BAPPEDA
		Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100		BAPPEDA
5	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks	90,2	485.204.582	DPMPTSP
6	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	Persentase	90	3.282.917.160	BPA
7	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	Persentase	98,28	184.102.630	DRKA
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100		DRKA
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100		DRKA

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100		DRKA
8	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persentase	28,02	182.169.333	DRKA
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase	60		DRKA
9	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Kematangan Organisasi Kelitbangan	Indeks	57,00	869.229.460	BAPPEDA
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	70		BAPPEDA
10	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan kualitas laporan keuangan	Persentase	90,82	1.154.251.510	BPKA
11	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dapat di akses	Persentase	100	80.000.000	DPMPTSP

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
12	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	Persentase	68,89	222.065.000	DRKA
13	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBA tepat waktu (Indeks kualitas pelayanan keuangan)	Indeks	3,5	1.665.593.609.360	BPKA
14	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kemandirian fiskal Aceh	Persentase	27,8	15.870.541.664	BPKA
15	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	49.292.180	DRKA
16	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase Meningkatnya perankelembagaan pertanahan secara mandiri (%)	Persentase	75,000	94.717.000	TANAH
17	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)	triliun rupiah	10,00	135.073.000	DPMPTSP
18	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam Penyampaian LKPM	Persentase	10	100.000.000	DPMPTSP
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	Persentase	100	5.413.733.877.550	SELURUH SKPA

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	Persentase	83,5	11.099.183.500	INSPEKTORAT
21	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks PembangunanStatistik (IPS)	Poin	2,3	500.000.000	KOMINSA
22	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase perumusanbahan kebijakan umumperekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	99	973.376.000	BIRO EKONOMI SEKDA ACEH
23	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundangundangan	Persentase	100	12.496.292.236	BAPPEDA
24	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Aparatur yang memenuhi kompetensi	Level	3	5.379.097.000	INSPEKTORAT
24	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi	Perusahaan	300	218.965.000	DPMPTSP

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2026	PAGU (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
25	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, BimbinganTeknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase	40	756.846.911	BAPPEDA
		Persentase kajian berabasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase	70		BAPPEDA
		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	90		BAPPEDA
26	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase penyelesaian pemetaan pertanahan	Persentase	11,00	22.337.000	TANAH

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan SIPD RI 2027



PA - 10
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

PRIORITAS ACEH (PA-10) adalah "Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup". PA-10 fokus pada penguatan manajemen kelestarian lingkungan dan ekosistemnya dengan arah kebijakan yang meliputi sebagai berikut; (a). Pengembangan program lingkungan, (b). Pengadaan teknologi lingkungan dan (c). peningkatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil. Adapun dengan sasaran pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.32 berikut.

Tabel 4. 32
Sasaran Pembangunan PA-10
"Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup"

Indikator	Target 2027
1	2
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,27

Indikator	Target 2027
1	2
Indeks Ekonomi Hijau Daerah	66,54
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,599
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	22,5
Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	106
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	12,79
Indeks Risiko Bencana (IRB)	178,41
Indeks Ketahanan Daerah	0,52
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) Kumulatif	46,31

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Lebih jelas mengenai program prioritas yang mendukung pelaksanaan PA-10 dapat dilihat pada Tabel 4.33 berikut.

Tabel 4. 33
Program Prioritas Mendukung PA-10
"Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup"

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2027	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				30.074.662.180	
1	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,592	5.367.385.176	DLHK
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup	Persentase	35	74.151.300	DLHK
3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	Persentase	10	42.092.300	DLHK

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2027	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
		Lingkungan Hidup				
4	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,52	3.007.641.104	BPBA
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luas Kawasan Konservasi (Ha)	Ha	71,05	15.000.000	DKP
6	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Luas Wilayah Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Km2	7053	70.000.000	ESDM
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Rehalibitasi lahan di sempadan sungai	Ha	15	50.000.000	DLHK
8	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik	Persentase	21,38	5.050.000.000	ESDM
9	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase	20	15.750.000	DLHK

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2027	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
10	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Produksi Garam	Ton	12,956	2.056.400.000	DKP
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	56,5	12.499.000.000	DLHK
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Persentase Rumah Tangga	31,75	-	DLHK
12	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Ton	7.860,00	32.679.000	DLHK
13	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	77,77	1.493.142.600	DLHK
14	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Persentase	15	146.041.300	DLHK

No	Nomenklatur Program	Indikator	Satuan	Target 2027	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Peningkatan Kelompok Petani Hutan	Persentase	10	-	DLHK
15	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	80	155.379.400	DLHK

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029 dan SIPD RI 2027

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota se-Aceh. Sinkronisasi tersebut menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta konsisten dengan dokumen perencanaan daerah, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), maupun dokumen perencanaan kabupaten/kota. Selain itu, penyusunan RKPA Tahun 2027 juga memperhatikan sinkronisasi dengan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai bagian dari upaya memastikan agenda pemulihan pascabencana berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Aceh menetapkan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagai pedoman strategis guna memperkuat keterpaduan program dan kegiatan lintas tingkatan pemerintahan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara sinergis, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan wilayah secara komprehensif.

Dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2027, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran diarahkan untuk memperkuat konsistensi antara prioritas nasional, prioritas pembangunan Aceh, prioritas pembangunan kabupaten/kota, serta agenda rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam dokumen R3P. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan kesinambungan kebijakan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, termasuk dalam proses penganggaran agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki keterkaitan langsung dengan target pembangunan lintas dokumen dan lintas kewenangan. Pemerintah Aceh mendorong agar pemerintah kabupaten/kota menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian indikator pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan daya saing ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, penguatan pelayanan publik, serta percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana. Melalui sinkronisasi yang kuat antara dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut, diharapkan tercipta efisiensi penggunaan sumber

daya, menghindari duplikasi intervensi, dan memperkuat efektivitas pembangunan yang berorientasi pada hasil.

Sejalan dengan kondisi Aceh pascabencana yang terjadi pada Oktober 2025, arah kebijakan pembangunan Tahun 2027 menempatkan tema kebencanaan sebagai salah satu fokus utama pembangunan daerah, baik dalam aspek penanggulangan, rehabilitasi, rekonstruksi, maupun mitigasi risiko bencana ke depan. Pengalaman penanganan bencana yang telah terjadi menjadi pijakan penting dalam membangun sistem pembangunan yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan mengusung prinsip "*Build Back Better, Safer, and Sustainable*", pembangunan Tahun 2027 diarahkan tidak hanya untuk memulihkan kondisi pascabencana, tetapi juga untuk membangun kembali wilayah terdampak dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman, dan lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan melakukan identifikasi dan pemetaan potensi bencana berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing serta mengintegrasikan program pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah, meliputi penguatan sistem mitigasi, pembangunan infrastruktur tahan bencana, peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat, penguatan sistem peringatan dini, serta rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis ketahanan wilayah. Dengan demikian, pembangunan Aceh Tahun 2027 diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penguatan ketahanan daerah melalui sinergi pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh, pengembangan wilayah diimplementasikan dengan pendekatan keterkaitan aspek fisik alam, sosial ekonomi, dan/atau budaya untuk mengoordinasikan pembangunan dan keterpaduan pengembangan. RTRW bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang maju, aman, nyaman, produktif, dan bekelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan di Aceh harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta melakukan upaya mitigasi dan adaptasi dengan penanganan yang bersifat hulu-hilir. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan degradasi lingkungan yang menjadi ancaman di terutama pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi pengembangan tinggi dan sangat tinggi. Sementara itu, pembangunan wilayah di diarahkan untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Pembangunan

perekonomian Aceh berbasis pada sektor pertanian, Pengolahan, perdagangan dan pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk memadukan fungsi budidaya dan lindung serta keterpaduan pengelolaan alam darat dan pesisir. Dalam upaya pemerataan pembangunan di Aceh, maka pembangunan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan/disparitas antarwilayah maupun di dalam wilayah dengan peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan perdesaan; peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah; serta peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui strategi seperti

a. Peningkatan sistem pusat pemukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan pedesaan;
b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah;
c. Peningkatan pelestarian kawasan lindung;
d. Pemanfaatan kawasan budidaya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup;
e. Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah;
f. Pengembangan kawasan strategis provinsi.

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kota

5.2.1. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

Evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota terhadap capaian indikator makro Tahun 2025 menjadi bagian yang sangat penting dalam proses penyusunan arah kebijakan pembangunan Tahun 2027, sebagai upaya memastikan bahwa perencanaan yang disusun didasarkan pada bukti, data, dan hasil capaian pembangunan yang terukur. Evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan indikator makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan, serta indikator strategis lainnya yang mencerminkan kualitas pembangunan di masing-masing kabupaten/kota. Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Aceh dapat mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, mengukur efektivitas intervensi kebijakan, serta menilai kontribusi pembangunan kabupaten/kota terhadap pencapaian target pembangunan Aceh secara agregat.

Hasil evaluasi capaian indikator makro Tahun 2025 juga menjadi dasar penting untuk melihat tren perkembangan pembangunan daerah, baik tren positif yang perlu dipertahankan maupun berbagai tantangan dan permasalahan yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Analisis tren ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memahami pola perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dapat dilakukan penyesuaian kebijakan yang lebih tepat sasaran pada perencanaan Tahun 2027. Dengan pendekatan tersebut, penyusunan program dan kegiatan pembangunan tidak hanya bersifat administratif dan rutinitas tahunan, tetapi benar-benar responsif terhadap dinamika kondisi daerah, kebutuhan masyarakat, dan isu strategis yang berkembang.

Selain evaluasi capaian indikator makro dan analisis tren pembangunan, penyusunan arah kebijakan pembangunan Tahun 2027 perlu didukung oleh upaya identifikasi secara komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi capaian pembangunan pada masing-masing kabupaten/kota. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami akar permasalahan, potensi unggulan, tantangan pembangunan, serta berbagai faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, karakteristik kewilayahan, serta tingkat kerentanan terhadap bencana yang memengaruhi perbedaan capaian pembangunan antarwilayah.

Pendekatan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa intervensi pembangunan kewilayahan yang dirumuskan mampu merespons kondisi capaian indikator makro yang ada secara lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis kebutuhan daerah. Kabupaten/kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, angka kemiskinan yang relatif tinggi, kualitas pendidikan dan kesehatan yang belum optimal, maupun tingkat kerentanan bencana yang tinggi memerlukan strategi pembangunan yang berbeda dengan wilayah yang telah menunjukkan capaian pembangunan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan kewilayahan perlu dilaksanakan secara adaptif dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan permasalahan spesifik masing-masing daerah.

Dalam konteks pembangunan Aceh Tahun 2027, pendekatan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penentuan prioritas pembangunan, pengalokasian sumber daya yang lebih efektif, penguatan sinergi program lintas sektor, serta penyusunan kebijakan afirmatif bagi wilayah yang masih menghadapi ketertinggalan pembangunan. Dengan demikian, intervensi pembangunan yang dilakukan akan semakin mampu mempercepat pencapaian target indikator makro

daerah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

5.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Provinsi Aceh menunjukkan perkembangan yang semakin positif dan konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025 yang mencapai angka 76,23, meningkat dibandingkan tahun 2024, serta menunjukkan akselerasi pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya. Dalam rentang waktu 2020–2025, IPM Aceh mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,79 persen per tahun, dari 73,29 pada tahun 2020 menjadi 76,23 pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat mulai memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan manusia secara menyeluruh. Peningkatan tersebut tidak hanya mencerminkan perbaikan pada satu aspek tertentu, tetapi menunjukkan penguatan yang relatif merata pada seluruh dimensi pembentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Pada dimensi kesehatan, peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir pada tahun 2025 menjadi 73,48 tahun, atau meningkat 0,28 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan adanya perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Tren ini mengindikasikan semakin membaiknya intervensi pada sektor kesehatan, termasuk penguatan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan imunisasi, perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak, penurunan prevalensi stunting, serta penguatan upaya promotif dan preventif di tingkat masyarakat. Untuk menjaga dan meningkatkan tren tersebut menuju Tahun 2027, arah kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada penguatan sistem kesehatan primer, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, penguatan layanan kesehatan di wilayah terpencil, serta peningkatan program intervensi gizi dan kesehatan lingkungan. Program prioritas seperti penguatan Puskesmas, penanganan stunting terintegrasi, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, dan penguatan sistem kesehatan tangguh bencana menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan dimensi kesehatan IPM.

Pada dimensi pendidikan, peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dari 14,39 tahun menjadi 14,40 tahun serta peningkatan signifikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dari 9,64 tahun menjadi 9,95 tahun menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan dan keberlanjutan pendidikan masyarakat. Peningkatan RLS yang lebih tinggi dibandingkan HLS menunjukkan adanya keberhasilan dalam mempertahankan peserta didik agar tetap berada dalam sistem pendidikan formal, sekaligus memperlihatkan peningkatan capaian pendidikan penduduk usia

dewasa. Tren ini menjadi indikator penting bahwa kualitas dan akses pendidikan mulai menunjukkan perbaikan yang lebih merata. Untuk Tahun 2027, upaya peningkatan IPM pada dimensi pendidikan perlu diselaraskan melalui program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi, pengurangan angka putus sekolah, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, penguatan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja, serta peningkatan akses pendidikan di daerah tertinggal dan wilayah terdampak bencana. Selain itu, program beasiswa afirmatif, pendidikan inklusif, dan penguatan literasi digital juga menjadi strategi penting dalam mempercepat peningkatan indikator pendidikan.

Pada dimensi standar hidup layak, rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan mengalami peningkatan sebesar 3,51 persen atau naik sebesar Rp380 ribu, dari tahun sebelumnya menjadi Rp11.191.000 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi yang semakin membaik. Dimensi ini sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, stabilitas harga, dan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan Tahun 2027, peningkatan standar hidup layak harus didukung melalui program penguatan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan investasi daerah, hilirisasi sektor unggulan, penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasional dan kewirausahaan. Sinkronisasi program pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan pendapatan masyarakat harus menjadi prioritas agar peningkatan dimensi standar hidup layak dapat berlangsung lebih cepat dan merata.

Secara keseluruhan, tren peningkatan seluruh dimensi pembentuk IPM pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Aceh berada pada jalur yang positif dan progresif. Namun demikian, untuk mencapai target pembangunan manusia yang lebih tinggi pada Tahun 2027, diperlukan penguatan perencanaan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based planning), dengan menjadikan capaian indikator Tahun 2025 sebagai dasar evaluasi dan pijakan penyusunan program dan kegiatan. Sinkronisasi program antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota harus diarahkan untuk memperkuat intervensi pada sektor-sektor yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan IPM, sehingga target pembangunan manusia tidak hanya tercapai secara angka, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan Tahun 2027 harus menjadi momentum percepatan transformasi pembangunan manusia melalui intervensi yang lebih terarah, terukur, dan

berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Perkembangan dimensi penyusun IPM selama tahun 2020–2025 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5. 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh Menurut Dimensi Penyusunnya, Tahun 2020–2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Umur Panjang dan Hidup Sehat							
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	72,69	72,71	72,92	73,06	73,20	73,48
Pengetahuan							
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	14,31	14,36	14,37	14,38	14,39	14,40
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	9,33	9,37	9,44	9,55	9,64	9,95
Standar Hidup Layak							
Pengeluaran Riil per Kapita (yang dise-suaikan)	ribu rupiah	9,49	9,57	9,96	10,33	10,81	11,19

Sumber: BPS Aceh, 2026

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang semakin menggembirakan dan mencerminkan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang semakin merata di seluruh wilayah. Salah satu indikator penting yang menggambarkan keberhasilan pembangunan manusia di Aceh adalah tidak adanya lagi kabupaten/kota yang berada pada kategori IPM rendah maupun sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh wilayah di Aceh telah berhasil melampaui ambang batas kategori pembangunan manusia tinggi, yang sekaligus menjadi indikator bahwa intervensi pembangunan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli masyarakat telah memberikan hasil yang nyata. Capaian tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan dasar dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah yang semakin terarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari total 23 kabupaten/kota di Aceh, sebanyak 19 daerah telah berada pada kategori pembangunan manusia tinggi dengan rentang nilai IPM antara 70 hingga

80. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar wilayah di Aceh telah mampu membangun fondasi pembangunan manusia yang cukup kuat, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Pencapaian ini menunjukkan adanya pemerataan hasil pembangunan yang semakin baik, terutama jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya di mana masih terdapat daerah dengan kategori pembangunan manusia menengah. Meningkatnya jumlah daerah yang masuk kategori tinggi menjadi sinyal positif bahwa kesenjangan pembangunan antarwilayah mulai menunjukkan tren yang semakin membaik, meskipun masih terdapat variasi capaian antar daerah yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Lebih lanjut, terdapat empat daerah yang telah mencapai kategori pembangunan manusia sangat tinggi (IPM ≥ 80), yaitu Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, dan Sabang. Capaian ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan di Aceh memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih maju, didukung oleh akses layanan pendidikan yang lebih baik, fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, tingkat urbanisasi yang lebih tinggi, serta aktivitas ekonomi yang lebih berkembang. Di antara seluruh kabupaten/kota, Banda Aceh mencatat capaian tertinggi dengan nilai IPM sebesar 89,55, yang menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang sangat baik dan menjadi benchmark bagi daerah lainnya. Tingginya capaian Banda Aceh dipengaruhi oleh tingginya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, kualitas layanan kesehatan, serta tingkat pengeluaran masyarakat yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Di sisi lain, IPM terendah di Aceh tercatat di Subulussalam sebesar 71,63. Meskipun menjadi yang terendah di tingkat provinsi, capaian tersebut tetap berada dalam kategori pembangunan manusia tinggi, yang menunjukkan adanya kemajuan signifikan dibandingkan kondisi pembangunan manusia pada periode-periode sebelumnya. Namun demikian, selisih capaian IPM antara daerah tertinggi dan terendah masih menunjukkan adanya disparitas pembangunan antarwilayah yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Kesenjangan tersebut mencerminkan adanya perbedaan kapasitas daerah dalam penyediaan layanan dasar, aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, struktur ekonomi daerah, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Tahun 2027 perlu difokuskan pada penguatan intervensi di daerah-daerah dengan capaian IPM yang masih relatif rendah melalui pendekatan afirmatif, pemerataan pembangunan layanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Secara keseluruhan, capaian IPM kabupaten/kota Tahun 2025 menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Aceh telah bergerak menuju kondisi yang semakin baik dan merata. Kondisi ini menjadi modal penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan Tahun 2027, di mana evaluasi capaian IPM antarwilayah harus menjadi dasar dalam menetapkan prioritas pembangunan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan pembangunan berbasis wilayah (spatial-based development) dan berbasis bukti (evidence-based planning) menjadi penting untuk memastikan bahwa intervensi pembangunan dapat menjawab kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Dengan demikian, Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota perlu memperkuat sinergi program dan penganggaran agar peningkatan kualitas pembangunan manusia dapat berlangsung lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mempersempit kesenjangan pembangunan antarwilayah menuju Aceh yang lebih maju dan sejahtera. Perkemnbangan Nilai IPM di Kabupaten/Kota antara tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5. 2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024-2025

No	Kabupaten/Kota	2024	2025
1	2	3	4
1	Simeulue	70,95	71,94
2	Aceh Singkil	71,76	72,62
3	Aceh Selatan	71,82	72,79
4	Aceh Tenggara	73,59	74,36
5	Aceh Timur	71,29	72,20
6	Aceh Tengah	77,27	78,09
7	Aceh Barat	75,45	76,30
8	Aceh Besar	76,57	77,46
9	Pidie	73,60	74,46
10	Bireuen	75,39	76,29
11	Aceh Utara	73,35	74,29
12	Aceh Barat Daya	71,16	72,10
13	Gayo Lues	71,75	72,61
14	Aceh Tamiang	74,00	74,78
15	Nagan Raya	73,10	73,87
16	Aceh Jaya	73,40	74,20
17	Bener Meriah	76,58	77,48
18	Pidie Jaya	76,39	77,04
19	Banda Aceh	88,85	89,55
20	Sabang	79,50	80,04
21	Langsa	80,96	81,77
22	Lhokseumawe	80,89	81,75

No	Kabupaten/Kota	2024	2025
1	2	3	4
23	Subulussalam	70,64	71,63
24	Aceh	75,36	76,23

Sumber: BPS Aceh, 2026

5.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, di mana secara nominal masih mengalami pertumbuhan, namun secara riil menghadapi tekanan perlambatan pada akhir tahun. Berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai perekonomian Aceh pada triwulan IV tahun 2025 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp66,35 triliun, meningkat sebesar Rp0,79 triliun dibandingkan triwulan III tahun 2025 yang sebesar Rp65,56 triliun. Sementara itu, perekonomian Aceh tanpa sektor migas menunjukkan peningkatan yang lebih baik, yakni dari Rp63,34 triliun menjadi Rp64,74 triliun atau naik sebesar Rp1,40 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara nominal aktivitas ekonomi masyarakat masih tumbuh dan sektor nonmigas semakin menjadi penopang utama perekonomian daerah, terutama di tengah fluktuasi sektor pertambangan dan migas yang cenderung tidak stabil.

Namun demikian, apabila dilihat dari sisi riil menggunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, kinerja ekonomi Aceh pada triwulan IV tahun 2025 menunjukkan perlambatan. Nilai PDRB Aceh dengan migas tercatat sebesar Rp40,20 triliun, sedikit menurun dibandingkan triwulan III tahun 2025 yang sebesar Rp40,22 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara nominal terjadi peningkatan, namun secara volume produksi riil ekonomi Aceh mengalami stagnasi bahkan kontraksi tipis. Di sisi lain, PDRB tanpa migas justru mengalami pertumbuhan dari Rp38,71 triliun menjadi Rp39,05 triliun, atau naik sebesar Rp0,34 triliun. Hal ini menegaskan bahwa sektor-sektor ekonomi nonmigas masih memiliki daya tahan dan kapasitas pertumbuhan yang lebih stabil dibandingkan sektor migas, sehingga penguatan sektor nonmigas perlu menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan.

Secara kumulatif tahunan (c-to-c), perekonomian Aceh pada tahun 2025 tumbuh sebesar 2,97 persen dengan migas dibandingkan tahun 2024, sedangkan tanpa migas tumbuh lebih tinggi sebesar 3,33 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa ekonomi Aceh masih mampu tumbuh positif, meskipun laju pertumbuhannya relatif melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan tersebut menjadi indikasi adanya tantangan struktural dalam perekonomian Aceh, terutama pada sektor-sektor yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti migas, fluktuasi harga komoditas, serta gangguan akibat bencana dan kondisi cuaca ekstrem pada akhir tahun 2025. Secara tahunan (year-on-year), ekonomi

Aceh pada triwulan IV tahun 2025 dibandingkan triwulan IV tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar 1,61 persen dengan migas dan 0,73 persen tanpa migas, yang menunjukkan adanya tekanan pada aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat pada akhir tahun. Bahkan secara triwulanan (quarter-to-quarter), ekonomi Aceh dengan migas juga terkontraksi sebesar 0,05 persen, sementara ekonomi nonmigas masih mampu tumbuh sebesar 0,88 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa ketahanan ekonomi Aceh lebih banyak ditopang oleh sektor nonmigas.

Dari sisi struktur ekonomi, perekonomian Aceh masih sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor utama penggerak ekonomi daerah. Pada triwulan IV tahun 2025, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 34,79 persen terhadap total perekonomian Aceh dengan migas dan sebesar 35,66 persen tanpa migas, menjadikannya sektor dominan dalam struktur PDRB Aceh. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor primer ini menunjukkan bahwa perekonomian Aceh masih memiliki karakteristik ekonomi berbasis sumber daya alam dan aktivitas produksi primer. Di satu sisi, hal ini menjadi kekuatan karena sektor pertanian memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi dan berkontribusi besar terhadap penghidupan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan. Namun di sisi lain, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ini juga menimbulkan kerentanan terhadap perubahan iklim, bencana alam, gangguan produksi, dan fluktuasi harga komoditas.

Dalam konteks perencanaan pembangunan Tahun 2027, kondisi perekonomian tahun 2025 ini menjadi dasar evaluasi penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan ekonomi Aceh ke depan perlu diarahkan pada transformasi struktur ekonomi melalui penguatan sektor-sektor produktif nonmigas, hilirisasi komoditas unggulan pertanian, peningkatan nilai tambah industri pengolahan, pengembangan UMKM, penguatan investasi daerah, serta pengembangan sektor perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Mengingat sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian, program pembangunan Tahun 2027 harus diarahkan pada modernisasi pertanian, penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi, penguatan sistem irigasi, perlindungan petani, serta penguatan rantai pasok hasil pertanian. Selain itu, sejalan dengan pengalaman bencana pada Oktober 2025, pembangunan ekonomi juga harus mengintegrasikan pendekatan ketahanan bencana agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap resilien melalui prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable. Dengan demikian, arah pembangunan ekonomi Aceh Tahun 2027 diharapkan mampu memperkuat daya tahan ekonomi daerah, meningkatkan produktivitas sektor unggulan, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas serta merata di seluruh wilayah Aceh.

Tabel 5. 3
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kota se-Aceh Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan (%)
1	2	3
1	Simeulue	3,81
2	Aceh Singkil	3,41
3	Aceh Selatan	3,00
4	Aceh Tenggara	2,97
5	Aceh Timur	1,30
6	Aceh Tengah	3,01
7	Aceh Barat	4,44
8	Aceh Besar	2,96
9	Pidie	2,99
10	Bireuen	3,26
11	Aceh Utara	1,01
12	Aceh Barat Daya	4,10
13	Gayo Lues	2,08
14	Aceh Tamiang	0,95
15	Nagan Raya	4,04
16	Aceh Jaya	3,15
17	Bener Meriah	2,38
18	Pidie Jaya	2,59
19	Banda Aceh	4,74
20	Sabang	3,68
21	Langsa	2,76
22	Lhokseumawe	3,39
23	Subulussalam	3,85
	Aceh	2.97

Sumber: BPS Aceh, 2026

Berdasarkan Tabel 5.3 Capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2025 menunjukkan adanya dinamika perkembangan ekonomi yang cukup beragam antarwilayah, yang mencerminkan perbedaan karakteristik ekonomi, potensi sumber daya, struktur lapangan usaha, serta kapasitas pembangunan masing-masing daerah. Secara agregat, pertumbuhan ekonomi Aceh tercatat sebesar 2,97 persen, namun jika dilihat pada tingkat kabupaten/kota terdapat variasi pertumbuhan yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa performa ekonomi daerah tidak bergerak secara seragam, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan sektor unggulan dan kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonominya. Evaluasi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi ini menjadi penting sebagai dasar dalam melihat tren perkembangan wilayah sekaligus menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan

Tahun 2027 yang lebih terarah, berbasis bukti, dan sesuai dengan karakteristik kewilayahan.

Beberapa daerah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di atas rata-rata provinsi, seperti Banda Aceh sebesar 4,74 persen, Aceh Barat sebesar 4,44 persen, Aceh Barat Daya sebesar 4,10 persen, Nagan Raya sebesar 4,04 persen, serta Subulussalam sebesar 3,85 persen. Tingginya pertumbuhan di wilayah tersebut menunjukkan adanya penguatan aktivitas ekonomi yang cukup baik, baik pada sektor perdagangan, jasa, pertanian, maupun sektor pendukung lainnya. Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan dan jasa menunjukkan pertumbuhan tertinggi, yang mengindikasikan semakin kuatnya sektor tersier seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan jasa pemerintahan. Sementara wilayah seperti Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Nagan Raya menunjukkan penguatan pada sektor primer dan perdagangan yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, terdapat beberapa daerah yang pertumbuhan ekonominya masih berada di bawah rata-rata provinsi, bahkan relatif rendah, seperti Aceh Tamiang sebesar 0,95 persen, Aceh Utara sebesar 1,01 persen, dan Aceh Timur sebesar 1,30 persen. Kondisi ini menjadi sinyal penting bahwa masih terdapat tantangan dalam penguatan ekonomi wilayah, baik dari sisi produktivitas sektor unggulan, investasi, daya saing daerah, maupun penguatan infrastruktur ekonomi. Rendahnya pertumbuhan di beberapa daerah dapat disebabkan oleh perlambatan sektor dominan, rendahnya diversifikasi ekonomi, maupun terbatasnya nilai tambah dari aktivitas ekonomi yang ada. Oleh karena itu, daerah-daerah dengan pertumbuhan rendah perlu menjadi perhatian khusus dalam kebijakan pembangunan ke depan melalui intervensi yang lebih fokus dan afirmatif.

Variasi pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota ini menunjukkan pentingnya pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan (spatial-based development) dalam penyusunan program pembangunan Tahun 2027. Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda, sehingga intervensi pembangunan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Wilayah kepulauan seperti Simeulue yang tumbuh 3,81 persen memerlukan penguatan konektivitas, sektor perikanan, dan pariwisata bahari. Wilayah dataran tinggi seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues perlu didorong melalui penguatan komoditas perkebunan unggulan, agrowisata, dan industri hilir berbasis pertanian. Sementara wilayah pesisir dan sentra produksi seperti Aceh Selatan, Aceh Jaya, dan Sabang perlu diperkuat melalui pengembangan perikanan, perdagangan, dan sektor pariwisata.

Dalam konteks penyusunan program pembangunan Tahun 2027, data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Tahun 2025 harus menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih adaptif, terarah, dan berbasis potensi lokal. Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun program yang sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing wilayah, seperti penguatan hilirisasi produk pertanian dan perkebunan, pengembangan kawasan industri berbasis komoditas unggulan, peningkatan konektivitas antarwilayah, penguatan UMKM, peningkatan investasi, pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung produktivitas ekonomi. Dengan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dan potensi daerah, diharapkan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2027 dapat lebih merata, berkualitas, dan inklusif, sekaligus mampu mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

5.2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Aceh pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang relatif positif, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktivitas ekonomi. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja pada November 2025 tercatat sebanyak 2,717 juta orang, meningkat sebanyak 16 ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2025. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Namun demikian, di tengah peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 65,13 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah angkatan kerja meningkat secara absolut, proporsi penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja mengalami sedikit penurunan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pilihan untuk tidak bekerja sementara, maupun keterbatasan kesempatan kerja.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, jumlah penduduk yang bekerja pada November 2025 tercatat sebanyak 2,565 juta orang atau meningkat sebanyak 3,37 ribu orang dibandingkan Agustus 2025. Peningkatan jumlah pekerja ini menunjukkan bahwa perekonomian Aceh masih mampu menciptakan lapangan kerja baru, meskipun dalam jumlah yang relatif terbatas dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar berasal dari sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan peningkatan sebesar 1,07 persen poin. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pemerintahan masih menjadi salah satu

sektor dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Aceh, di samping sektor pertanian, perdagangan, dan jasa lainnya. Kondisi ini juga mencerminkan perlunya diversifikasi sumber pertumbuhan lapangan kerja agar ketergantungan terhadap sektor tertentu dapat dikurangi.

Dari aspek kualitas pekerjaan, terdapat perkembangan positif pada peningkatan pekerja formal. Pada November 2025, sebanyak 928 ribu orang atau 36,20 persen dari total penduduk bekerja berada dalam kegiatan formal, meningkat sebesar 0,11 persen poin dibandingkan Agustus 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ketenagakerjaan ke arah yang lebih formal, yang umumnya memberikan perlindungan kerja, pendapatan yang lebih stabil, dan jaminan sosial yang lebih baik. Namun demikian, proporsi pekerja formal yang masih berada di bawah 40 persen menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di Aceh masih berada pada sektor informal yang rentan terhadap ketidakpastian pendapatan dan perlindungan kerja yang terbatas. Oleh karena itu, penguatan sektor formal melalui investasi, pengembangan industri, dan penguatan UMKM menjadi agenda penting dalam pembangunan ekonomi ke depan.

Di sisi lain, tantangan ketenagakerjaan masih terlihat dari meningkatnya persentase setengah pengangguran sebesar 2,11 persen poin dan pekerja paruh waktu sebesar 0,97 persen poin pada November 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun penduduk bekerja mengalami peningkatan, kualitas dan jam kerja yang tersedia belum sepenuhnya optimal. Setengah pengangguran menggambarkan adanya tenaga kerja yang bekerja di bawah kapasitas produktifnya, baik dari sisi jam kerja maupun pemanfaatan keterampilan. Hal ini menjadi perhatian penting karena dapat memengaruhi produktivitas tenaga kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja ke depan tidak hanya perlu berfokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas pekerjaan yang mampu memberikan pendapatan layak dan keberlanjutan ekonomi.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,64 persen (Agustus). Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja, meskipun masih relatif terbatas. Secara umum, kondisi ketenagakerjaan Aceh tahun 2025 memberikan gambaran bahwa pasar kerja masih mengalami tekanan dari pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan kapasitas penciptaan lapangan kerja berkualitas. Oleh karena itu, dalam penyusunan program pembangunan Tahun 2027, isu ketenagakerjaan perlu menjadi prioritas strategis melalui penguatan program penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi, pengembangan kewirausahaan, penguatan sektor produktif berbasis potensi wilayah, hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan investasi, serta

penguatan konektivitas ekonomi antarwilayah. Dengan demikian, pembangunan ketenagakerjaan ke depan diharapkan tidak hanya mampu menekan angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 5. 4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	TPT (%)
1	Simeulue	5,31
2	Aceh Singkil	6,55
3	Aceh Selatan	4,39
4	Aceh Tenggara	4,72
5	Aceh Timur	7,74
6	Aceh Tengah	4,03
7	Aceh Barat	5,46
8	Aceh Besar	7,86
9	Pidie	5,71
10	Bireuen	3,83
11	Aceh Utara	6,88
12	Aceh Barat Daya	3,66
13	Gayo Lues	2,24
14	Aceh Tamiang	6,78
15	Nagan Raya	5,06
16	Aceh Jaya	2,57
17	Bener Meriah	2,10
18	Pidie Jaya	3,67
19	Banda Aceh	7,30
20	Sabang	2,67
21	Langsa	7,31
22	Lhokseumawe	8,24
23	Subulussalam	4,87
	Aceh	5.64

Sumber BPS Aceh, 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2025 menunjukkan adanya disparitas kondisi ketenagakerjaan antarwilayah yang cukup signifikan. Secara agregat, TPT Aceh tercatat sebesar 5,64 persen, yang menggambarkan bahwa dari seluruh angkatan kerja, masih terdapat sebagian penduduk yang aktif mencari pekerjaan namun belum memperoleh kesempatan kerja. Kondisi ini menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas pembangunan ekonomi daerah dalam menciptakan lapangan kerja. Namun demikian, jika dilihat lebih rinci pada tingkat kabupaten/kota, terlihat adanya variasi

yang cukup lebar, yang mencerminkan perbedaan struktur ekonomi, kapasitas penyerapan tenaga kerja, tingkat urbanisasi, serta karakteristik pasar kerja di masing-masing wilayah.

Beberapa daerah menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif tinggi dan berada di atas rata-rata provinsi, seperti Lhokseumawe sebesar 8,24 persen, Aceh Besar sebesar 7,86 persen, Aceh Timur sebesar 7,74 persen, Langsa sebesar 7,31 persen, dan Banda Aceh sebesar 7,30 persen. Tingginya tingkat pengangguran di wilayah-wilayah tersebut menunjukkan bahwa meskipun aktivitas ekonomi cukup berkembang, terutama di kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, daya serap lapangan kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Kondisi ini sering terjadi pada wilayah perkotaan yang memiliki tingkat mobilitas penduduk lebih tinggi, konsentrasi lulusan pendidikan yang lebih besar, serta ekspektasi kerja formal yang lebih tinggi dibandingkan ketersediaan lapangan kerja yang ada.

Sebaliknya, terdapat beberapa daerah dengan tingkat pengangguran yang relatif rendah, seperti Bener Meriah sebesar 2,10 persen, Gayo Lues sebesar 2,24 persen, Aceh Jaya sebesar 2,57 persen, dan Sabang sebesar 2,67 persen. Rendahnya tingkat pengangguran di wilayah tersebut menunjukkan adanya keseimbangan yang relatif lebih baik antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, terutama pada sektor-sektor berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha keluarga. Namun demikian, rendahnya TPT tidak selalu mencerminkan tingginya kualitas pekerjaan, karena masih dimungkinkan adanya dominasi pekerja informal, setengah pengangguran, atau pekerja dengan produktivitas rendah.

Perbedaan tingkat pengangguran antarwilayah ini menunjukkan bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Aceh memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih spesifik berbasis kewilayahan (*spatial-based employment policy*). Wilayah dengan TPT tinggi membutuhkan intervensi yang lebih kuat dalam penciptaan lapangan kerja baru, penguatan investasi, pengembangan industri pengolahan, sektor perdagangan dan jasa, serta penguatan kewirausahaan. Sementara wilayah dengan TPT rendah perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, hilirisasi sektor unggulan, dan penguatan nilai tambah ekonomi agar pendapatan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada penurunan angka pengangguran, tetapi juga peningkatan kualitas dan keberlanjutan pekerjaan.

Dalam penyusunan program pembangunan Tahun 2027, data TPT kabupaten/kota Tahun 2025 menjadi dasar evaluasi penting untuk merumuskan

kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran dan berbasis potensi daerah. Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota perlu menyelaraskan program penciptaan lapangan kerja dengan karakteristik ekonomi wilayah, seperti penguatan sektor pertanian modern di wilayah agraris, pengembangan industri kecil dan menengah di wilayah sentra produksi, penguatan sektor perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah dengan potensi wisata. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga kerja, serta penguatan kewirausahaan muda perlu menjadi agenda prioritas. Dengan demikian, arah pembangunan ketenagakerjaan Tahun 2027 diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran secara lebih merata, memperkuat produktivitas tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

5.2.1.4 Tingkat Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada Maret 2025 menunjukkan tren yang semakin membaik dan menjadi indikator positif dalam kinerja pembangunan sosial daerah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2025 tercatat sebanyak 704,69 ribu jiwa atau sebesar 12,33 persen dari total penduduk, menurun sebesar 0,31 persen poin dibandingkan September 2024 yang sebesar 12,64 persen. Penurunan ini memperlihatkan bahwa intervensi pembangunan, baik melalui penguatan perlindungan sosial, stabilisasi harga kebutuhan pokok, penguatan ekonomi masyarakat, maupun program pemberdayaan ekonomi telah memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Jika dilihat dalam tren jangka menengah sejak tahun 2020, tingkat kemiskinan Aceh menunjukkan pola fluktuatif, namun sejak tahun 2022 hingga 2025 bergerak pada tren penurunan yang lebih konsisten, baik dari sisi persentase maupun jumlah absolut penduduk miskin.

Struktur kemiskinan di Aceh masih menunjukkan dominasi pengeluaran pada komponen makanan, di mana garis kemiskinan makanan mencapai Rp515.075 per kapita per bulan atau berkontribusi sebesar 76,17 persen terhadap total garis kemiskinan sebesar Rp676.247 per kapita per bulan, sementara komponen nonmakanan sebesar Rp161.172 atau 23,83 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemiskinan di Aceh masih sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar. Artinya, tekanan inflasi pangan, gangguan distribusi bahan pokok, dan rendahnya produktivitas rumah tangga miskin sangat berpengaruh terhadap perubahan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, strategi pengendalian kemiskinan ke depan harus memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, stabilisasi harga bahan

pokok, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta penguatan program perlindungan sosial yang adaptif terhadap gejolak ekonomi dan bencana.

Dilihat berdasarkan karakteristik wilayah, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat sebesar 14,44 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 8,54 persen. Disparitas ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Aceh masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan yang umumnya bergantung pada sektor pertanian primer dengan produktivitas rendah, akses infrastruktur terbatas, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pengurangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara seragam, tetapi harus berbasis kewilayahan dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Intervensi di wilayah perdesaan harus difokuskan pada penguatan ekonomi produktif berbasis desa, peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan akses pasar, dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin.

Selain tingkat kemiskinan, indikator kualitas kemiskinan juga menunjukkan perbaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2025 tercatat sebesar 1,84, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,42. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin juga semakin menurun. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa kualitas hidup kelompok miskin mulai membaik, meskipun masih diperlukan intervensi yang lebih terarah agar kelompok rentan tidak kembali jatuh ke dalam kemiskinan, terutama akibat tekanan ekonomi, bencana, dan inflasi pangan.

Dalam penyusunan target pembangunan Tahun 2027, pola penetapan target pengurangan kemiskinan harus didasarkan pada evaluasi tren historis dan kapasitas intervensi program yang realistis. Dengan tren penurunan sebesar 0,31 persen poin dalam periode terakhir, maka target kemiskinan Tahun 2027 perlu dirancang secara progresif namun terukur, misalnya dengan mendorong penurunan ke kisaran 11,50–11,80 persen, dengan asumsi penguatan intervensi yang lebih terintegrasi. Target tersebut harus didukung oleh sinkronisasi program lintas sektor, terutama program penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian, bantuan sosial terarah, pengendalian inflasi, penguatan perlindungan sosial adaptif, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan rentan bencana. Dengan pendekatan *evidence-based planning* dan berbasis kewilayahan, target pengurangan kemiskinan Tahun 2027 dapat disusun lebih akurat, terukur, dan selaras dengan upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh secara berkelanjutan.

Tabel 5. 5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, Maret 2025

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	Simeulue	15,58	15,52
2	Aceh Singkil	22,51	17,07
3	Aceh Selatan	25,39	9,89
4	Aceh Tenggara	22,52	9,78
5	Aceh Timur	52,23	11,24
6	Aceh Tengah	27,76	12,29
7	Aceh Barat	34,55	15,50
8	Aceh Besar	49,90	11,05
9	Pidie	77,70	16,46
10	Bireuen	51,60	10,30
11	Aceh Utara	93,43	14,27
12	Aceh Barat Daya	21,47	13,30
13	Gayo Lues	16,59	16,77
14	Aceh Tamiang	33,96	10,84
15	Nagan Raya	27,24	15,42
16	Aceh Jaya	10,50	10,37
17	Bener Meriah	25,59	16,20
18	Pidie Jaya	27,62	16,12
19	Banda Aceh	15,87	5,45
20	Sabang	4,55	12,75
21	Langsa	16,28	8,59
22	Lhokseumawe	19,90	9,01
23	Subulussalam	11,95	13,88
	Aceh	704,69	12,33

Sumber: BPS Maret 2025

Data jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada Maret 2025 menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan utama pembangunan daerah dengan karakteristik dan tingkat keparahan yang berbeda antarwilayah. Secara agregat, jumlah penduduk miskin di Aceh tercatat sebanyak 704,69 ribu jiwa atau sebesar 12,33 persen dari total penduduk. Meskipun angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya, distribusi kemiskinan antar kabupaten/kota masih cukup bervariasi, baik dari sisi jumlah absolut maupun persentasenya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara lebih terarah, berbasis wilayah, dan mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi masing-masing daerah.

Dari sisi jumlah absolut penduduk miskin, daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Aceh Utara sebanyak 93,43 ribu jiwa, diikuti Pidie sebanyak 77,70 ribu jiwa, Aceh Timur sebanyak 52,23 ribu jiwa, dan Bireuen sebanyak 51,60 ribu jiwa. Tingginya jumlah penduduk miskin di daerah-daerah tersebut berkaitan erat dengan jumlah penduduk yang besar, dominasi sektor ekonomi primer dengan produktivitas terbatas, serta masih adanya persoalan akses terhadap pelayanan dasar dan peluang ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi di wilayah dengan jumlah penduduk miskin besar perlu difokuskan pada pengurangan kemiskinan secara masif melalui penguatan ekonomi produktif, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, jika dilihat dari sisi persentase penduduk miskin, daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Aceh Singkil sebesar 17,07 persen, diikuti Gayo Lues sebesar 16,77 persen, Pidie sebesar 16,46 persen, Bener Meriah sebesar 16,20 persen, dan Pidie Jaya sebesar 16,12 persen. Tingginya persentase kemiskinan di daerah-daerah ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum masih relatif rendah dan sebagian besar penduduk berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi umumnya memiliki tantangan geografis, keterbatasan konektivitas, ketergantungan pada sektor primer, serta akses ekonomi yang belum optimal.

Sebaliknya, daerah dengan tingkat kemiskinan terendah terdapat di Banda Aceh sebesar 5,45 persen, diikuti Langsa sebesar 8,59 persen, Lhokseumawe sebesar 9,01 persen, Aceh Tenggara sebesar 9,78 persen, dan Aceh Selatan sebesar 9,89 persen. Rendahnya tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan seperti Banda Aceh, Langsa, dan Lhokseumawe menunjukkan adanya pengaruh positif dari struktur ekonomi yang lebih beragam, akses layanan dasar yang lebih baik, dan kesempatan kerja yang lebih luas. Hal ini memperlihatkan bahwa diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas sektor nonpertanian menjadi faktor penting dalam menekan tingkat kemiskinan.

Analisis data ini menunjukkan adanya dua pola utama dalam penanganan kemiskinan, yaitu pendekatan berdasarkan jumlah absolut penduduk miskin dan pendekatan berdasarkan tingkat keparahan atau persentase kemiskinan. Daerah dengan jumlah penduduk miskin besar memerlukan intervensi skala besar untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin secara signifikan, sedangkan daerah dengan persentase kemiskinan tinggi membutuhkan intervensi yang lebih intensif dan mendalam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara struktural. Dalam penyusunan program pembangunan Tahun 2027, pendekatan penanggulangan kemiskinan harus diarahkan secara berbasis kewilayahan (spatial-based poverty reduction), dengan mengintegrasikan program perlindungan sosial, penguatan

ekonomi produktif, pengembangan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan konektivitas wilayah.

Dengan menjadikan data kemiskinan Tahun 2025 sebagai basis evaluasi dan penyusunan target Tahun 2027, Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota telah menetapkan target penurunan kemiskinan yang lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi harus menjadi prioritas intervensi afirmatif, sementara daerah dengan jumlah penduduk miskin besar harus difokuskan pada program yang berdampak luas dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis data (evidence-based planning) dan berbasis wilayah menjadi kunci dalam memastikan efektivitas program pengurangan kemiskinan, sehingga target penurunan kemiskinan Tahun 2027 dapat dicapai secara lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Aceh.

5.2.2 Target Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten/Kota di Aceh

Target keberhasilan pembangunan Aceh merupakan agregat dari kondisi kinerja makro Kabupaten dan kota. Tolak ukur keberhasilan tersebut tergambar dari beberapa indikator kinerja serta merupakan dampak dari segala pencapaian program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Untuk itu merupakan amanah bagi Pemerintah Aceh untuk dapat memberikan arah kebijakan pembangunan yang tepat bagi kabupaten dan kota. Pemerintah Aceh akan terus mendorong terutama bagi kabupaten/Kota dengan indikator makro berkinerja lemah untuk dapat ditingkatkan.

Sebagaimana sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2027 maka Pemerintah Aceh telah menargetkan capaian pada beberapa indikator makro pada tahun 2027 antara lain; Pertumbuhan PDRB yang ditargetkan mencapai 9,00 - 10,60 persen; Indeks Modal Manusia (IMM) sebesar 0,59; Persentase Penduduk Miskin menjadi 5,9 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di targetkan 4,30 - 4,45 persen; dan Indeks Gini menjadi 0,284 - 0,289 poin. Target capaian tersebut merupakan hasil dari capaian indikator pembangunan Pemerintah Aceh tersebut yang merupakan target bersama dari seluruh capaian Kabupaten dan Kota sehingga diperlukan sinkronisasi dalam upaya pencapaian target tersebut.

Pada tahun 2027, pemerintah Aceh optimis dalam menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, IPM, penurunan jumlah pengangguran dan kemiskinan dengan beberapa program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari program dan kegiatan tersebut pda tahun sebelumnya. Kinerja dari Pemerintah Aceh terkait peningkatan beberapa indikator Makro Pembangunan tersebut diharapkan juga

dapat disinergikan dengan berbagai kebijakan dalam bentuk perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan pada Kabupaten/Kota. Berikut pada tabel dapat dilihat target indikator kinerja Makro yang tersebar pada 23 Kabupaten/ Kota.

Tabel 5. 6
Capaian Indikator Makro Tahun 2025 dan Target 2027
Kabupaten/Kota Se-Aceh

NO	KABUPATEN/KOTA	PERTUMBUHAN EKONOMI		KEMISKINAN		TPT		IPM	
		CAPAIAN 2025	TARGET 2027	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	CAPAIAN 2025	TARGET 2027
1	Simeulue	3,81	5,45	15,52	12,91	5,31	5,29	71,94	74,64
2	Aceh Singkil	3,41	3,5 - 4,0	17.07	17,07 - 16,5	6,55	6,55 - 5,60	72,62	72,48 - 72,60
3	Aceh Selatan	3,00	4,64	9,89	8,80	4,39	3,63	72,79	73,55
4	Aceh Tenggara	77,46	4,75	9,78	9,10	4,72	4,68	74,36	74,47
5	Aceh Timur	1,30	2,41	11,24	12,50	7,74	7,63	72,20	74,70
6	Aceh Tengah	03.01	4.75	12.92	12.92	04.03	3.74	78.09	77.03
7	Aceh Barat	4,44	5,30 - 6,20	15,50	14,50 - 15,50	5,46	5,20	76,30	76,73
8	Aceh Besar	2,96	5,10	11,05	9,91	7,86	7,36	77,46	78,00
9	Pidie	2,99	4,35-4,55	16,46	17,60-18,15	5,71	5,15-5,55	74,46	74,40-74,90
10	Bireuen	3,26	3,5	10,3	9,9	3,82	3,8	76,29	76,5
11	Aceh Utara	0,94	4,10	14,27	13,17	6,88	5,80	74,29	75,60
12	Aceh Barat Daya	4,10	4,70	13,30	12,00	3,63	3,40	72,10	73,50
13	Gayo Lues	2,08	3,77	16,77	16,72	2,24	2,06	72,61	71,61
14	Aceh Tamiang	0,95	4	10,84	10,26	6,78	5,91	74,78	75,9
15	Nagan Raya	4,04	4,92	15,42	16,2	5,06	5,03	73,87	75,11
16	Aceh Jaya	2,97	3,8 - 4,00	10,37	9,87	2,57	2,55	74,2	74,5
17	Bener Meriah	2,38	3,51	16,20	15,84	2,10	2,14	77,48	78,09
18	Pidie Jaya	4,55	4,88	16,12	14,5	3,67	3,55	77,04	77,3
19	Banda Aceh	4,66	6,22	5,45	6,63	7,3	6,14	89,95	88,81
20	Sabang	3,68 **	4,35	12,75	12,26	2,67	2,16	80,04	81,3
21	Langsa	2,76	4,66	8,59	8,25	7,31	7,19	81,77	81,6
22	Lhokseumawe	3,39	3,42-3,90	9,01	8,85-8,70	8,24	8,00-7,80	81,75	82,10-82,50
23	Subulussalam	3,85	4,3	13,88	13,38	4,87	4,2	71,63	73,27

Sumber: Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Aceh, 2026.

Berdasarkan capaian indikator makro kabupaten/kota tahun 2025 dan target pembangunan tahun 2027, arah pembangunan kewilayahan Aceh menunjukkan adanya perbedaan karakteristik dan tantangan pembangunan antar daerah. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, beberapa daerah masih mencatatkan laju pertumbuhan yang relatif rendah seperti Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,94 persen, Aceh Tamiang sebesar 0,95 persen, dan Aceh Timur sebesar 1,30 persen. Kondisi

tersebut menunjukkan perlunya penguatan investasi produktif, hilirisasi komoditas unggulan, dan peningkatan konektivitas kawasan industri dan perdagangan, khususnya pada wilayah timur Aceh yang selama ini menjadi basis sektor perkebunan dan industri migas. Sebaliknya, wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan seperti Banda Aceh, Aceh Barat, dan Pidie Jaya menunjukkan capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik sehingga diarahkan sebagai pengungkit pertumbuhan regional melalui penguatan sektor jasa, perdagangan, dan ekonomi perkotaan.

Dari aspek kemiskinan, tantangan pembangunan masih terkonsentrasi pada beberapa daerah seperti Aceh Singkil, Gayo Lues, Pidie Jaya, Bener Meriah, Simeulue, Aceh Barat, dan Nagan Raya yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya bersifat inklusif dan belum mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, arah pembangunan tahun 2027 difokuskan pada penguatan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, pengembangan kawasan perdesaan, peningkatan kualitas layanan dasar, serta penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sejumlah daerah perkotaan dan kawasan industri masih menunjukkan angka pengangguran relatif tinggi, seperti Lhokseumawe sebesar 8,24 persen, Aceh Besar sebesar 7,86 persen, Aceh Timur sebesar 7,74 persen, Banda Aceh sebesar 7,30 persen, dan Langsa sebesar 7,31 persen. Tingginya TPT pada wilayah tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai. Oleh sebab itu, pengembangan kawasan pertumbuhan dalam RPJMN dan RPJMA diarahkan untuk memperkuat sektor industri pengolahan, ekonomi kreatif, UMKM, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja berbasis kebutuhan pasar regional.

Dari sisi kualitas pembangunan manusia, Kota Banda Aceh masih menjadi daerah dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi sebesar 89,95, diikuti Sabang, Langsa, dan Lhokseumawe yang telah berada pada kategori IPM tinggi. Sebaliknya, beberapa daerah seperti Simeulue, Subulussalam, Aceh Singkil, dan Gayo Lues masih memiliki IPM relatif rendah sehingga memerlukan percepatan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Dalam target pembangunan tahun 2027, peningkatan IPM diarahkan secara lebih merata melalui penguatan akses pendidikan menengah dan vokasi, peningkatan layanan kesehatan dasar, percepatan penurunan stunting, serta penguatan konektivitas pelayanan publik di wilayah terpencil dan kepulauan.

Secara kewilayahan, pembangunan Aceh tahun 2027 diarahkan melalui penguatan fungsi kawasan pertumbuhan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Kawasan Banda Aceh–Jantho diprioritaskan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan jasa regional; kawasan Arun–Lhokseumawe sebagai pusat industri dan logistik; kawasan Takengon dan Dataran Tinggi Gayo sebagai pusat agroindustri kopi dan pariwisata berkelanjutan; serta kawasan pesisir barat-selatan sebagai basis pengembangan perkebunan, ketahanan pangan, dan konektivitas wilayah. Sementara itu, Kabupaten Simeulue diposisikan sebagai kawasan afirmasi yang diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar, ketahanan kebencanaan, dan pemerataan pelayanan publik.

Selain itu, pembangunan kewilayahan Aceh juga mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, terutama pada kawasan pesisir barat-selatan, wilayah kepulauan, dan daerah pegunungan tengah Aceh. Oleh karena itu, arah pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan pada penguatan resiliensi wilayah melalui pembangunan infrastruktur adaptif, mitigasi bencana, rehabilitasi lingkungan, penguatan ketahanan pangan dan air, serta pengembangan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Berdasarkan capaian distribusi kesejahteraan masyarakat, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh yang diukur melalui Gini Ratio tahun 2025 tercatat sebesar 0,282 yang menunjukkan ketimpangan relatif rendah namun masih memperlihatkan disparitas pembangunan antarwilayah. (BPS Aceh) Dengan demikian, arah pembangunan kewilayahan Aceh tahun 2027 diarahkan pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan kesenjangan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan akses infrastruktur dan pelayanan dasar secara berkelanjutan

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan Aceh tahun 2027 difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan ketimpangan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan wilayah terhadap risiko kebencanaan dan perubahan iklim. Kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan masih adanya disparitas pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di beberapa daerah, tingginya tingkat pengangguran terbuka pada kawasan perkotaan dan industri, serta belum meratanya capaian Indeks Pembangunan Manusia antar kabupaten/kota.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan pembangunan tahun 2027 diarahkan pada penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah. Kawasan Banda Aceh–Jantho

diarahkan sebagai pusat jasa, pendidikan, pemerintahan, dan ekonomi kreatif berbasis perkotaan. Kawasan Arun–Lhokseumawe diprioritaskan sebagai pusat industri, energi, dan logistik regional melalui penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun serta revitalisasi industri pengolahan. Sementara itu, kawasan Dataran Tinggi Gayo difokuskan pada pengembangan agroindustri kopi, ekonomi kreatif, dan pariwisata berkelanjutan berbasis konservasi lingkungan.

Pada wilayah dengan pertumbuhan ekonomi relatif rendah seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues, arah kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan investasi produktif, penguatan infrastruktur konektivitas kawasan produksi, pengembangan UMKM berbasis komoditas unggulan, serta peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pemerintah Aceh juga perlu mendorong pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah dan memperluas kesempatan kerja.

Dalam rangka pengurangan kemiskinan dan penguatan pemerataan pembangunan, kebijakan tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan perlindungan sosial adaptif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, khususnya pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Simeulue, Aceh Singkil, Pidie, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Program pembangunan perdesaan, penguatan ekonomi masyarakat berbasis kawasan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi menjadi prioritas utama untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan antarwilayah.

Pada aspek ketenagakerjaan, kebijakan pembangunan diarahkan pada penciptaan lapangan kerja produktif melalui pengembangan sektor industri pengolahan, ekonomi kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa modern, terutama pada daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tinggi seperti Lhokseumawe, Banda Aceh, Aceh Besar, Langsa, dan Aceh Timur. Selain itu, penguatan pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, serta pengembangan kewirausahaan muda menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah.

Dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia, arah kebijakan tahun 2027 difokuskan pada percepatan peningkatan IPM melalui penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara merata antarwilayah. Pemerintah Aceh perlu memperluas akses pendidikan menengah dan vokasi, memperkuat layanan kesehatan dasar dan rujukan, mempercepat penurunan stunting, serta meningkatkan kualitas layanan publik pada daerah tertinggal, kepulauan, dan kawasan pedalaman seperti Simeulue, Subulussalam, Aceh Singkil, dan Gayo Lues.

Selain itu, pembangunan kewilayahan Aceh tahun 2027 juga diarahkan pada penguatan ketahanan wilayah terhadap risiko kebencanaan dan perubahan iklim. Kawasan pesisir barat-selatan Aceh, wilayah kepulauan, dan kawasan pegunungan tengah diarahkan untuk memperkuat sistem mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur adaptif, rehabilitasi lingkungan, serta penguatan ketahanan pangan dan air. Pendekatan pembangunan berbasis resiliensi wilayah menjadi penting mengingat Aceh merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor yang relatif tinggi di Indonesia.

Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, kebijakan tahun 2027 juga diarahkan pada penguatan konektivitas antar pusat pertumbuhan dan kawasan produksi melalui pembangunan jalan strategis, pengembangan pelabuhan dan transportasi laut, peningkatan jaringan irigasi, penguatan infrastruktur digital, serta pemerataan akses energi dan telekomunikasi. Dengan tingkat Gini Ratio Aceh tahun 2025 sebesar 0,282, kebijakan pembangunan diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan perkotaan, tetapi juga mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota secara berkelanjutan.

5.3 Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota

Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Aceh masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Disparitas tersebut dipengaruhi oleh belum meratanya kualitas infrastruktur dasar, perbedaan kapasitas ekonomi wilayah, keterbatasan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta konsentrasi aktivitas ekonomi pada kawasan tertentu. Kabupaten/kota yang memiliki akses lebih baik terhadap jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan pusat perdagangan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan wilayah kepulauan, daerah pedalaman, dan kawasan rawan bencana. Kondisi tersebut berdampak terhadap distribusi investasi, produktivitas ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah.

Selain faktor ekonomi dan infrastruktur, Aceh juga menghadapi tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi. Sebagian wilayah Aceh berada pada kawasan rawan gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, abrasi pantai, dan bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Kawasan pesisir barat-selatan Aceh, wilayah tengah pegunungan Gayo, serta daerah kepulauan seperti Simeulue memiliki tingkat kerentanan yang memerlukan pendekatan pembangunan berbasis mitigasi risiko bencana dan penguatan ketahanan wilayah. Oleh karena itu, arah pembangunan kewilayahan Aceh tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan pada penguatan resiliensi wilayah melalui

pembangunan infrastruktur adaptif, penguatan sistem logistik kebencanaan, serta peningkatan kapasitas pelayanan dasar pada kawasan rawan bencana.

Sebagai upaya memastikan target pembangunan kewilayahan Aceh Tahun 2027 dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMA Aceh Tahun 2025–2029 dan RPJMN Tahun 2025–2029, diperlukan penguatan mekanisme pengendalian, evaluasi, dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan secara berkelanjutan. Langkah yang perlu dilakukan meliputi pelaksanaan evaluasi berkala terhadap progres pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan kewilayahan, serta penilaian efektivitas dan efisiensi program dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, pemanfaatan data pembangunan yang akurat dan terintegrasi, serta penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam proses perencanaan dan penganggaran. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian kebijakan, penyempurnaan desain intervensi, dan pengalokasian sumber daya secara lebih tepat sasaran, sehingga pembangunan kewilayahan dapat berjalan lebih optimal, adaptif, dan mampu mempercepat pengurangan kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai risiko pembangunan dan kebencanaan.

Berdasarkan RPJMA Aceh Tahun 2025–2029 dan RPJMN Tahun 2025–2029, arah pembangunan kewilayahan Aceh dilakukan melalui pendekatan pengembangan kawasan secara terintegrasi guna memperkuat pusat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, meningkatkan konektivitas daerah, serta mempercepat pemerataan pembangunan. Pendekatan tersebut dilaksanakan melalui pola pengembangan kawasan yang terdiri atas kawasan pertumbuhan, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air, dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi dan rawan bencana.

A. Kawasan Pertumbuhan

Pengembangan kawasan pertumbuhan diarahkan sebagai motor penggerak ekonomi regional melalui penguatan fungsi perkotaan, industri, jasa, perdagangan, dan konektivitas antarwilayah.

Kawasan Perkotaan Banda Aceh–Jantho diarahkan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa, dan pelayanan regional Aceh. Kawasan ini juga menjadi simpul utama konektivitas transportasi dan pengembangan ekonomi berbasis jasa modern serta ekonomi kreatif. Dalam RPJMN 2025–2029, kawasan ini turut diprioritaskan untuk penguatan infrastruktur

perkotaan, pengembangan sistem transportasi terpadu, penguatan layanan pendidikan tinggi, serta peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan regional.

Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun–Lhokseumawe dikembangkan sebagai pusat industri strategis Aceh berbasis hilirisasi energi, petrokimia, logistik, dan industri pengolahan yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Pemerintah Pusat merencanakan penguatan jaringan gas, revitalisasi kawasan industri, pengembangan pelabuhan logistik, serta peningkatan konektivitas jalan nasional pendukung kawasan industri.

Kawasan Perkotaan Takengon dan Kawasan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif Unggulan Dataran Tinggi Gayo–Danau Laut Tawar diarahkan sebagai pusat pengembangan agroindustri kopi, pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan ketahanan air berbasis kawasan pegunungan. RPJMN juga mengarahkan pengembangan destinasi pariwisata unggulan berbasis ekowisata, peningkatan konektivitas antar destinasi wisata, dan penguatan hilirisasi komoditas kopi Gayo berorientasi ekspor.

Kawasan Perkotaan Meulaboh difokuskan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah barat Aceh melalui penguatan sektor perdagangan, perikanan, jasa pelabuhan, dan konektivitas kawasan pesisir barat-selatan. Pemerintah Pusat juga merencanakan penguatan konektivitas jalan lintas barat Aceh dan pengembangan infrastruktur mitigasi bencana pesisir.

Kawasan Perkotaan Langsa diarahkan sebagai pusat perdagangan regional timur Aceh yang mendukung pengembangan industri perkebunan, logistik, dan jasa distribusi antarwilayah. Pengembangan kawasan ini didukung melalui peningkatan infrastruktur transportasi dan sistem distribusi logistik regional.

Kawasan Perkotaan Subulussalam dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan barat daya Aceh berbasis perkebunan, perdagangan lintas wilayah, dan penguatan konektivitas Aceh–Sumatera Utara. Pemerintah Pusat juga mengarahkan peningkatan akses jalan strategis dan penguatan konektivitas kawasan *hinterland*.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang diarahkan sebagai pusat perdagangan internasional, pariwisata bahari, logistik maritim, dan ekonomi berbasis kepelabuhanan yang terintegrasi dengan jalur pelayaran internasional. Dalam RPJMN 2025–2029, Sabang diprioritaskan untuk pengembangan pelabuhan internasional, penguatan sektor pariwisata bahari, serta peningkatan konektivitas transportasi laut dan logistik regional.

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Pengembangan kawasan komoditas unggulan diarahkan untuk memperkuat hilirisasi ekonomi daerah dan meningkatkan nilai tambah sektor primer berbasis potensi lokal.

Kawasan Kopi Dataran Tinggi Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dikembangkan sebagai sentra kopi unggulan nasional dan ekspor melalui penguatan agroindustri, sertifikasi produk, hilirisasi kopi, dan pengembangan rantai pasok berkelanjutan. Pemerintah Pusat juga merencanakan penguatan industri pengolahan kopi dan peningkatan akses pasar ekspor.

Kawasan Sawit dan Karet Pesisir Timur Laut Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang diarahkan pada penguatan industri perkebunan dan pengolahan hasil berbasis komoditas unggulan melalui revitalisasi perkebunan rakyat dan pengembangan industri hilir.

Kawasan Sawit dan Karet Pesisir Barat–Selatan Aceh meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, hilirisasi industri, dan penguatan konektivitas distribusi hasil komoditas.

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Pengembangan kawasan ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi Aceh secara berkelanjutan.

Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh meliputi Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang yang diarahkan sebagai sentra produksi pangan melalui modernisasi pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan produktivitas lahan, dan penguatan cadangan pangan daerah.

Kawasan Swasembada Air dan Energi Dataran Tinggi Gayo difokuskan pada pengembangan energi terbarukan, konservasi sumber daya air, serta pembangunan infrastruktur ketahanan lingkungan berbasis kawasan pegunungan.

Kawasan Swasembada Pangan dan Energi Pesisir Barat Aceh meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya yang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan regional serta pengembangan energi berbasis sumber daya lokal.

D. Kawasan Afirmasi

Kabupaten Simeulue ditetapkan sebagai kawasan afirmasi percepatan pemerataan pembangunan mengingat karakteristik wilayah kepulauan, keterbatasan aksesibilitas, serta tingginya kerentanan terhadap bencana tsunami dan gempa bumi. Dalam RPJMN 2025–2029, Pemerintah Pusat merencanakan penguatan konektivitas transportasi laut dan udara, peningkatan infrastruktur dasar, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan sistem mitigasi bencana terpadu.

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) diarahkan sebagai kawasan konservasi strategis nasional yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem, ketahanan air, keanekaragaman hayati, serta mitigasi perubahan iklim. Pemerintah Pusat juga mengarahkan penguatan rehabilitasi hutan, konservasi DAS, pengurangan risiko bencana ekologis, serta pengembangan ekonomi masyarakat berbasis konservasi dan ekowisata berkelanjutan.

Selain pengembangan kawasan tersebut, RPJMN 2025–2029 juga mengarahkan pelaksanaan berbagai program strategis nasional di Aceh, antara lain pembangunan dan peningkatan jalan nasional lintas barat dan lintas tengah Aceh, penguatan konektivitas pelabuhan dan bandara regional, revitalisasi jaringan irigasi, pengembangan kawasan industri dan logistik Arun–Lhokseumawe, pembangunan infrastruktur ketahanan pangan dan energi, percepatan transformasi digital pelayanan publik, serta penguatan sistem mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Pemerintah Pusat juga mengarahkan penguatan program pengurangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penurunan stunting, dan pengembangan ekonomi hijau berbasis potensi lokal Aceh.

Berdasarkan data capaian indikator makro tahun 2025 dan target pembangunan kewilayahan tahun 2027, arah pembangunan Aceh difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta pengurangan ketimpangan antarwilayah. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh yang diukur melalui Gini Ratio pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,282 yang menunjukkan adanya perbaikan distribusi pengeluaran masyarakat dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun demikian, disparitas pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan sehingga kebijakan pembangunan Aceh tahun 2027 diarahkan pada penguatan konektivitas wilayah, peningkatan daya saing ekonomi lokal, pengurangan risiko kebencanaan, serta pemerataan kualitas pembangunan antar kabupaten/kota secara berkelanjutan.

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ACEH

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan rencana program, kegiatan dan subkegiatan prioritas daerah yang dirumuskan melalui konsep THIS (tematik, holistik, integrative dan spasial. Pendekatan tematik-holistik mengutamakan kegiatan kegiatan yang mendukung prioritas nasional yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh K/L dan antar SKPD di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Disamping itu, pendekatan integrative-spasial mengarah pada pengintegrasian program/kegiatan/sub kegiatan dan pertimbangan dimensi ruang antar SKPD dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.

6.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bersumber dari APBN Tahun 2027

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2025-2029, pembangunan wilayah Sumatera diarahkan sebagai "**Mata Rantai Utama Bioindustri dan kemaritiman yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan**". Pada tahun 2027 pembangunan wilayah Sumatera diprioritaskan pada penguatan konektivitas dan efisiensi logistic sebagai penggerak utama dalam meningkatkan keterhubungan antarwilayah serta kelancaran rantai pasok yang diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, Perkebunan, perikanan dan industry berbasis sumberdaya unggulan sebagai penopang utama bioindustry. Selain itu, peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Indusri (KI), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta penguatan ekonomi biru sebagai hub pertumbuhan regional yang tetrhung antarwilayah.

Disamping itu, pembangunan wilayah Sumatera juga difokuskan pada peningkatan dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar, terutama pada kawasan afirmasi, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, dan wilayah kepulauan. Khusus wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pembangunan tahun 2027 difokuskan pada pembangunan ketahanan wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata ruang yang adaptif terhadap risiko bencana melalui percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana dengan mengimplementasikan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera (Renduk PRRP). Adapun *highlight intervensi* khusus Aceh dalam RKP Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6. 1
Highlight Intervensi RKP 2027 di Provinsi Aceh

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
1	2	3
A. Pembangunan Perdesaan, Daerah Afirmasi dan Transmigrasi		
Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi	A1. Kawasan Afirmasi Simeulue (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan)	Elektrifikasi Desa
B. Pembangunan Kota Terpadu		
Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi	B1. Kawasan Kota Langsa	Jalan Tol Bijai - Langsa (bagian dari Tol Sumatera)*
	B2. Kawasan Perkotaan Banda Aceh - Jantho dan KPBPB Sabang (Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar)	Jalan Tol Sigli - Banda Aceh (bagian dari Tol Sumatera)*
		Penuntasan Missing Link Jalan Provinsi Ruas Jantho - Keumala*
C. Pembangunan Wilayah Kepulauan		
Swasembada Pangan, Energi dan Air	C1. Kawasan Swasembaga Pangan dan Energi Pesisir Barat (Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat. Kab. Aceh Barat Daya)	Pembangunan Jaringan Irigasi Daeri Irigasi Lhok Guci*
D. Pemulihan Pascabencana		
Stimulus Untuk Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat	D1. 18 Kabupaten/Kota Terdampak Bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera**
Fokus Pembangunan Kewilayahan Prioritas Lainnya		
Hilirisasi SDA Strategis	Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun-Lhokseumawe (Kota Lhokseumawe dan Kab. Aceh Utara)	KEK Arun Lhokseumawe*
Swasembada Pangan, Energi dan Air	Provinsi Aceh	Konversi Unit Motor BBM ke Motor Listrik
		Kompor Listrik untuk Rumah Tangga

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
1	2	3
		Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi (Padi,Jagung, Kedelai)
		Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kakao, Pala)
		Optimalisasi Sumur Minyak Masyarakat
	Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh (Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur dan Kab. Pidie)	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan*
		Bendungan Keureuto*
		Bendungan Rukoh*

Sumber: Rancangan RKP 2027

Keterangan:

- Highlight intervensi mengacu pada Buku I PKPN RKP 2027
- * Merupakan indikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2026-2027
- ** Lokasi prioritas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana fokus pada pemulihan wilayah pascabencana sebagai respon terhadap dinamika pembangunan terkini.

6.2 Hasil kesepakatan Musrenbangnas Tahun 2026

Berdasarkan Desk Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2026 antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, telah diterima 27 usulan dengan 18 usulan yang direkomendasikan (Tabel 6.2). Rincian usulan dapat dilihat pada table 6.3.

Tabel 6. 2
Rekapitulasi Hasil Pembahasan Desk PKPN Musrenbangnas Tahun 2026

NO	KRITERIA KESEPAKATAN TERHADAP USULAN	FOKUS PEMBANGUNAN					
		INDUSTRI NASIONAL	INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS EKONOMI	KUALITAS SDM, TENAGA KERJA PRODUKTIF, DAN INOVASI	STIMULUS UNTUK PRODUKTIVITAS DAN DAYA BELI MASYARAKAT	SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, DAN AIR	TOTAL USULAN
1	Direkomendasikan	0	2	3	3	10	18
2	Tidak Direkomendasikan	0	0	0	0	4	4
3	Tidak terbahas	0	0	5	0	0	5
Total usulan daerah		**0**	**2**	**8**	**3**	**14**	**27**

Tabel 6. 3
Hasil Kesepakatan Pembahasan Output Desk PKPN Terpilih Musrenbangnas Tahun 2026

No	Program Prioritas	Output	Lokasi	Volume	Satuan	Pagu Usulan (Rp.)	Kesepakatan
1	Kawasan Padi	Kawasan Padi	Provinsi Aceh, Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, Pidie Jaya	63000	Ha	23.440.000.000	Direkomendasikan
2	Kawasan Jagung	Kawasan Jagung	Provinsi Aceh, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Besar, Pidie, Aceh Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Pidie Jaya, Kota Subulussalam	10000	Ha	23.984.550.000	Direkomendasikan
3	SMK yang di Revitalisasi	SMK yang di Revitalisasi					Tidak Terbahas
4	Kedelai	Kawasan Kedelai	Pidie, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Pidie Jaya	1000	Ha	1.800.000.000	Direkomendasikan
5	SMA yang Direvitalisasi	SMA yang Direvitalisasi	Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie Jaya, Sabang, Langsa,	100	Paket	200.000.000.000	Direkomendasikan

No	Program Prioritas	Output	Lokasi	Volume	Satuan	Pagu Usulan (Rp.)	Kesepakatan
			Lhokseumawe, Subulussalam				
6	Satuan PAUD yang Direvitalisasi	Satuan PAUD yang Direvitalisasi	Aceh Selatan, Bireuen	22	Paket	5.200.000.000	Direkomendasikan
7	Cetak Sawah	Cetak Sawah	Simeulue, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya	3000	Ha	70.000.000.000	Direkomendasikan
8	Optimasi Lahan	Optimasi Lahan	Aceh Timur, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Utara, Pidie Jaya	10300	Ha	25.300.000.000	Direkomendasikan
9	Rehabilitasi Lahan Sawah	Rehabilitasi Lahan Sawah	Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Utara	1850	Ha	24.975.000.000	Tidak Direkomendasikan
10	Bantuan Ternak Unggas	Bantuan Ternak Unggas	Aceh	18000		9.817.150.000	Direkomendasikan
11	SLB yang di Revitalisasi	SLB yang di Revitalisasi					Tidak Terbahas
12	SMP yang Direvitalisasi	SMP yang Direvitalisasi					Tidak Terbahas
13	KPM Yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial Ekonomi	KPM Yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial Ekonomi	Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Langsa, Lhokseumawe, Subulussalam	24092		120.460.000.000	Direkomendasikan
14	SD yang Direvitalisasi	SD yang Direvitalisasi					Tidak Terbahas
15	Sekolah Rakyat	Sekolah Rakyat	Provinsi Aceh	6	Lokasi	5.047.000.000	Direkomendasikan
16	Warga KAT yang diberdayakan	Warga KAT yang diberdayakan	Aceh Utara	43		310.030.000	Direkomendasikan
17	Penanganan Perlintasan Sebidang	Penanganan Perlintasan Sebidang	Provinsi Aceh, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe	13		28.713.222.020	Direkomendasikan
18	Satuan Pendidikan Nonformal yang di Revitalisasi	Satuan Pendidikan Nonformal yang di Revitalisasi					Tidak Terbahas
19	Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM	Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM	Aceh Barat, Subulussalam	2	Paket	135.929.064.000	Direkomendasikan
20	Kawasan Kopi	Kawasan Kopi	Provinsi Aceh, Aceh Tengah, Pidie, Gayo	8000	Ha	60.000.000.000	Tidak Direkomendasikan

No	Program Prioritas	Output	Lokasi	Volume	Satuan	Pagu Usulan (Rp.)	Kesepakatan
			Lues, Bener Meriah				
21	Surat Tanda Budidaya (STDB) Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Surat Tanda Daftar Budidaya(STDB) Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Provinsi Aceh, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Subulussalam	2141	STB	856.400.000	Tidak Direkomendasikan
22	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Semusim dan Tahunan	Surat Tanda Daftar Budidaya(STDB) Tanaman Semusim dan Tahunan	Provinsi Aceh, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Pidie Jaya	951	STDB	380.400.000	Tidak Direkomendasikan
23	Kawasan Pala	Kawasan Pala	Provinsi Aceh, Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Barat Daya	1900		3.064.155.000	Direkomendasikan
24	Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke Masyarakat	Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke Masyarakat	Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie Jaya, Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe, Subulussalam	23		36.209.659.000	Direkomendasikan
25	Kampung Nelayan yang ditingkatkan Fasilitasnya	Kampung Nelayan yang ditingkatkan Fasilitasnya	Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang,	18	Lokasi	396.000.000.000	Direkomendasikan

No	Program Prioritas	Output	Lokasi	Volume	Satuan	Pagu Usulan (Rp.)	Kesepakatan
			Nagan Raya, Aceh Jaya, Pidie Jaya, Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe				
26	Pemasangan Sumbangan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T	Pemasangan Sumbangan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T	Provinsi Aceh	2446	Unit	8.000.000.000	Direkomendasikan
27	Rehabilitasi Daerah Imbuhan Mata Air secara vegetatif	Rehabilitasi Daerah Imbuhan Mata Air secara vegetatif	Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, Langsa	90	Ha	1.200.380.000	Direkomendasikan

6.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Bersumber dari APBD Tahun 2027

Berdasarkan inputan aplikasi SIPD RI rencana belanja Aceh tahun 2027 berjumlah sebesar Rp. 10.374.275.027.386. Berikut disajikan pagu per SKPA tahun 2027, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 6.4 berikut ini.

Tabel 6. 4
Pagu Tahun 2027 Berdasarkan SKPA Tahun 2027

Kode SKPA	Nama SKPA	Pagu (Rp.)
1	2	3
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	3.002.068.409.175
1.01.0.00.0.00.08.0000	Dinas Pendidikan Dayah	188.151.518.714
1.01.0.00.0.00.09.0000	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	7.458.710.051
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan Aceh	768.151.811.070
1.02.0.00.0.00.02.0000	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	898.298.874.769
1.02.0.00.0.00.03.0000	Rumah Sakit Jiwa	124.107.060.040
1.02.0.00.0.00.04.0000	Rumah Sakit Ibu dan Anak	96.992.164.003
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	194.709.020.212
1.03.0.00.0.00.02.0000	Dinas Pengairan	140.727.246.437
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	669.057.044.215
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	87.300.066.201
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.531.913.029
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	70.410.003.255
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	34.900.064.759

Kode SKPA	Nama SKPA	Pagu (Rp.)
1	2	3
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.247.036.758
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pangan	18.407.076.210
2.10.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanahan	11.335.425.499
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	226.215.192.018
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Registrasi Kependudukan	11.846.834.500
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	21.181.187.759
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	190.902.626.093
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	38.603.484.424
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	62.127.182.519
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27.192.856.656
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	79.633.572.494
2.22.0.00.0.00.06.0000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	9.568.181.496
2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	51.394.534.038
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30.028.498.261
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	89.928.562.894
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	173.814.682.703
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	37.336.269.139
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	29.462.358.525
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	42.273.606.657
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	276.949.677.895
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPR Aceh	237.448.120.507
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	62.363.269.701
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.822.241.761.815
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Aceh	24.991.444.921
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89.447.647.636
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	37.514.941.606
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	65.775.668.433
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.047.479.827
9.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	38.216.783.648
9.01.0.00.0.00.02.0000	Dinas Syariat Islam Aceh	62.559.586.531
9.01.0.00.0.00.03.0000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	15.136.008.180
9.01.0.00.0.00.04.0000	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	36.929.134.436
9.01.0.00.0.00.05.0000	Sekretariat Baitul Mal Aceh	90.290.427.677
Grand Total		10.374.275.027.386

Sumber: SIPD RI 2027

6.4 Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun 2027

6.4.1 Kebutuhan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, dan/atau faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Secara geografis, Aceh memiliki karakteristik wilayah yang kompleks, terdiri dari daerah pegunungan di bagian tengah, dataran rendah di wilayah pesisir timur dan barat, serta jaringan daerah aliran sungai (DAS) yang besar dan panjang. Sejumlah DAS utama seperti Krueng Aceh, Krueng Peusangan, Krueng Pase, Krueng Meureubo, Krueng Tripa, dan Krueng Alas mengaliri lintas kabupaten/kota dan menjadi tumpuan utama aktivitas sosial, ekonomi, dan permukiman masyarakat.

Bencana hidrometeorologi di Aceh yang terjadi pada akhir tahun 2025 dipicu oleh curah hujan dengan intensitas sangat tinggi yang terjadi secara terus-menerus sejak tanggal 25 hingga 28 November 2025. Fenomena ini disebabkan oleh kemunculan dan pengaruh sistem siklon tropis Senyar di wilayah sekitar Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Data meteorologis menunjukkan bahwa intensitas hujan di sejumlah wilayah Aceh mencapai tingkat yang sangat ekstrem. Di Kabupaten Bireuen, misalnya, tercatat curah hujan harian mencapai 411 mm per hari, angka yang jauh melampaui rata-rata curah hujan bulanan normal. Dengan kata lain, volume hujan yang seharusnya turun dalam waktu lebih dari satu bulan tercurah hanya dalam satu hari, dan kondisi ini berlangsung selama beberapa hari berturut-turut. Akibat curah hujan ekstrem tersebut, tanah di berbagai wilayah Aceh mengalami kejenuhan maksimum dan tidak lagi mampu menyerap air hujan. Limpasan permukaan meningkat secara signifikan, debit sungai naik dengan sangat cepat, dan sistem drainase perkotaan maupun perdesaan tidak mampu menampung volume air yang masuk. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya banjir meluas, banjir bandang, dan tanah longsor di berbagai wilayah Aceh. Di daerah hulu dan lereng pegunungan, longsor membawa material lumpur, kayu, dan batuan ke badan sungai, memperparah penyumbatan alur air dan meningkatkan daya rusak banjir di wilayah hilir. Bantaran sungai di banyak lokasi mengalami kerusakan parah, permukiman terendam, infrastruktur terputus, dan aktivitas sosial ekonomi lumpuh. Bencana hidrometeorologi ini berdampak luas, mencakup 18 kabupaten/kota, 200 kecamatan, dan 3.103 gampong di seluruh Aceh. Banjir Aceh Tahun 2025 menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat signifikan. Tercatat sebanyak 670.266 kepala keluarga atau 2.581.880 jiwa

terdampak langsung. Korban manusia meliputi 4.939 orang luka ringan, 474 orang luka berat, 529 orang meninggal dunia, serta 31 orang dinyatakan hilang.

Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hirometeorologi di Aceh Tahun 2026-2028 merupakan proses perencanaan pembangunan daerah yang secara konprehensif disusun untuk memulihkan wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2025. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) disusun oleh Pemerintah Aceh melalui BPBA dan Bappeda Aceh serta difasilitasi oleh BNPB dengan melibatkan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan seperti SKPA, Lembaga Vertikal, BPBD/Bappeda/SKPK Kabupaten/Kota terdampak, CSO, Badan Usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, R3P disusun berdasarkan pada hasil Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) yang dipadukan dengan kebijakan dan kemampuan pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan sumber dana lainnya yang sah.

Pemulihan suatu wilayah pascabencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah terdampak bersama-sama dengan pemerintah pusat, masyarakat, dan dunia usaha. Maka rencana pemulihan yang memuat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana harus diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penyediaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan dengan menghimpun potensi-potensi sumber pendanaan yang tersedia, terutama dari APBN, APBD Kabupaten/Kota terdampak dan APBA provinsi, APBN dan DIPA kementerian/lembaga yang lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatannya, sekaligus dana yang bersumber dari dunia usaha dan organisasi pembangunan multilateral. Proses penilaian kebutuhan pascabencana sampai pada penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana dapat dilihat pada Gambar 6.1.

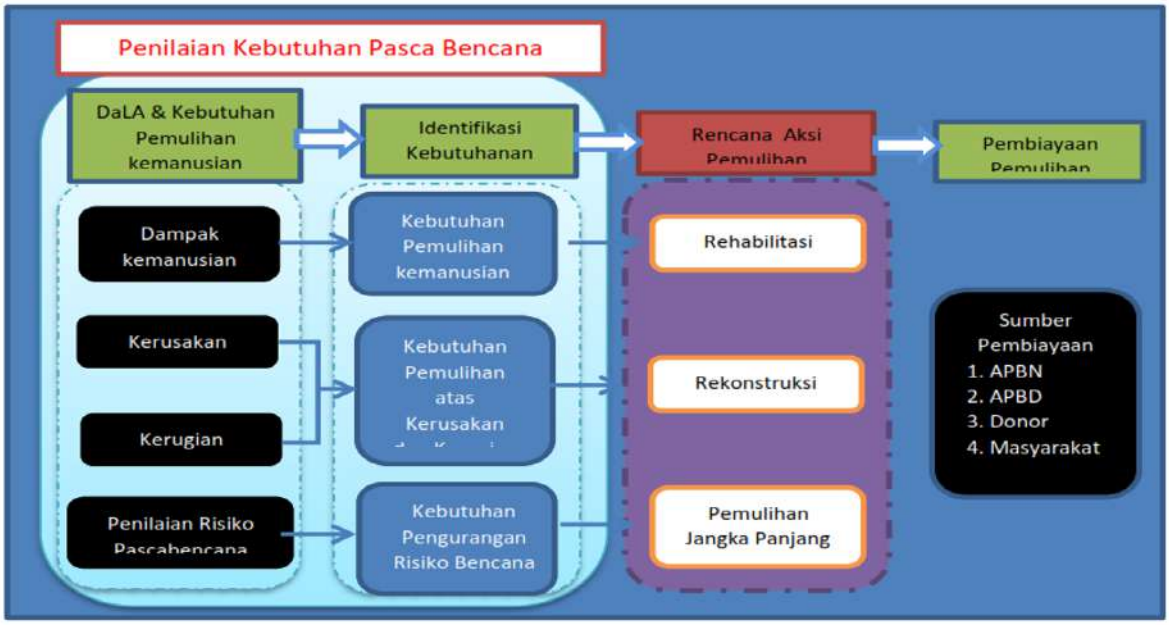

Gambar 6. 1
Proses Penilaian Kebutuhan Pascabencana dan Penyusunan Rencana Aksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2026 Tentang Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera, menjelaskan bahwa perhitungan kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan melalui proses penapisan kebutuhan pendanaan yang dihasilkan dari hasil pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang disusun daerah kabupaten/kota terdampak dan kebutuhan pendanaan Rencana Aksi Kementerian/Lembaga (Renaksi K/L). Kegiatan yang sama secara volume, lokasi, dan besaran rupiah antara dokumen Jitupasna R3P dan Renaksi K/L disepakati untuk dijadikan prioritas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun anggaran 2026, 2027 dan 2028. Adapun kebutuhan alokasi indikatif Provinsi Aceh berdasarkan kewenangan pusat dan daerah untuk Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 6.5 berikut ini.

Tabel 6. 5
Kebutuhan Indikatif Alokasi Pendanaan PRRP Provinsi Aceh Tahun 2026-2028

No	Sektor Pemulihan	Kegiatan 3 Tahun	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
	Kewenangan Pusat dan Daerah		
1	Permukiman	58	7.517.282.440.000
2	Infrastruktur	1058	48.660.361.793.600
3	Ekonomi	788	6.221.793.001.939
4	Sosial	4049	15.430.362.615.415
5	Lintas Sektor	73	316.471.998.000
	TOTAL	6026	78.146.271.848.954
	Kewenangan Pusat		
1	Permukiman	42	7.460.782.440.000
2	Infrastruktur	302	25.981.638.868.600
3	Ekonomi	465	3.212.535.394.439
4	Sosial	1235	7.322.217.247.651
5	Lintas Sektor	45	252.580.098.000
	TOTAL	2089	44.229.754.048.690
	Kewenangan Daerah		
1	Permukiman	16	56.500.000.000
2	Infrastruktur	756	22.678.722.925.000
3	Ekonomi	323	3.009.257.607.500
4	Sosial	2814	8.108.145.367.764
5	Lintas Sektor	28	63.891.900.000
	TOTAL	3937	33.916.517.800.264

Sumber:
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2026

Dari Tabel 6.3 diketahui kebutuhan pendanaan indikatif PRRP Tahun 2026-2028 untuk Aceh berjumlah sebesar Rp. 78.146.271.848.954 yang terbagi atas: (a) nilai kebutuhan indikatif kegiatan yang disepakati untuk dibiayai Kementerian/Lembaga berdasarkan kewenangan pemerintah pusat melalui DIPA Kementerian/Lembaga selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan sebesar Rp. 44.229.754.048.690, dan (b) nilai kebutuhan indikatif kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah yang disepakati dalam forum pendampingan daerah untuk dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 33.916.517.800.264. Usulan kegiatan dan pembiayaan indikatif pada Tabel 6.3 tidak memasukkan kegiatan dan alokasi anggaran untuk Hunian Tetap (Huntap) yang dibangun secara insitu atau melalui relokasi mandiri, yang akan dibiayai melalui mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) dibawah koordinasi BNPB dengan sasaran sebanyak 35.823 unit Huntap dengan kebutuhan pembiayaan sebesar Rp. 2,15 Triliun.

Kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan kewenangan pusat dan daerah yang dilaksanakan selama 3 tahun oleh 23 Kementerian/Lembaga. Total kebutuhan pendanaan kewenangan pusat untuk Aceh selama periode tahun 2026-2028 berjumlah sebesar Rp. 39.035.501.453.031 yang dibagi menjadi tiga tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut: (a) tahun 2026 sebesar Rp. 17.618.949.274.861 dengan total kegiatan sebanyak 1.362, (b) tahun 2027 sebesar Rp. 14.068.824.562.944 dengan total kegiatan sebanyak 884 dan (c) tahun 2028 sebesar Rp. 7.347.727.615.225 dengan kegiatan sebanyak 999. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 6.6 dan Tabel 6.7.

Tabel 6. 6
Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran dari 23 K/L di Aceh
(Kewenangan Pusat)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PROVINSI ACEH							
		KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUNAN						TOTAL	
		2026		2027		2028		Kegiatan	Anggaran
		Keg	Anggaran	Keg	Anggaran	Keg	Anggaran	3 Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**K/L UTAMA**								
1	BMKG	2	1.500.000.000	14	93.795.666.666	13	30.554.000.000	29	125.849.666.666
2	BP BUMN	3	449.874.000	3	833.333.333	3	1.071.666.667	9	2.354.874.000
3	Kemendikdasmen	210	3.321.721.135.689	0	-	0	-	210	3.321.721.135.689
4	KemenESDM	11	2.123.201.500	0	-	0	-	11	2.123.201.500
5	Kemenhub	28	63.437.696.900	10	375.696.299.600	5	322.800.000.000	43	761.933.996.500
6	Kemenperin	18	117.210.500.000	17	91.506.500.000	19	33.187.000.000	54	241.904.000.000
7	KemenPKP	10	1.819.237.888.000	7	4.153.516.446.000	0	-	17	5.972.754.334.000
8	KemenPU	229	7.484.022.288.000	290	8.271.956.109.000	538	6.327.950.381.000	1.057	22.083.928.778.000
9	Kementerian Agama	162	399.056.423.000	123	340.845.900.000	122	338.800.900.000	407	1.078.703.223.000
10	Kementerian ATR	27	18.499.010.045	64	72.113.045.800	28	22.979.020.100	119	113.591.075.945
11	Kementerian Desa PDT	10	3.500.000.000	10	5.750.000.000	10	5.750.000.000	30	15.000.000.000
12	Kementerian Kehutanan	16	34.829.905.333	19	28.033.029.333	19	29.309.179.333	54	92.172.114.000
13	Kementerian Kelautan dan Perikanan	26	277.960.000.000	8	152.700.000.000	8	111.030.000.000	42	541.690.000.000
14	Kementerian Kesehatan	0	-	0	-	0	-	0	-

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PROVINSI ACEH							
		KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUNAN						TOTAL	
		2026		2027		2028		Kegiatan	Anggaran
		Keg	Anggaran	Keg	Anggaran	Keg	Anggaran	3 Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Kementerian Lingkungan Hidup	27	21.600.000.000	33	6.860.389.000	0	-	60	28.460.389.000
16	Kementerian Perdagangan	3	2.500.000.000	4	2.856.478.100	4	1.292.900.000	11	6.649.378.100
17	Kementerian Pertanian	343	1.562.930.497.000	10	21.630.000.000	0	0	353	1.584.560.497.000
18	Kementerian Sosial	16	2.066.816.550.000	7	16.746.000.000	7	16.746.000.000	30	2.100.308.550.000
19	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi	41	38.701.655.667	40	44.901.655.667	41	64.801.655.667	122	148.404.967.001
20	Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	143	352.159.316.394	189	352.345.710.445	148	9.636.245.791	480	714.141.272.630
21	Kementerian Kebudayaan	18	20.300.000.000	18	18.875.000.000	18	16.550.000.000	54	55.725.000.000
22	Kementerian PPPA	19	10.393.333.333	17	10.863.000.000	15	7.602.000.000	51	28.858.333.333
23	Kemendiktisaintek	0	-	1	7.000.000.000	1	7.666.666.667	2	14.666.666.667
	Total KL Utama	1.362	17.618.949.274.861	884	14.068.824.562.944	999	7.347.727.615.225	3.245	39.035.501.453.031

Sumber:
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2026

Tabel 6. 7
Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran dari 23 K/L di Aceh
(Kewenangan Daerah)

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROVINSI ACEH							
		KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUNAN						TOTAL	
		2026		2027		2028		Kegiatan	Anggaran
		Keg	Anggaran	Keg	Anggaran	Keg	Anggaran	3 Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**K/L UTAMA**								
1	BMKG	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BP BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kemendikdasmen	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KemenESDM	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kemenhub	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kemenperin	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KemenPKP	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KemenPU	327	5.051.232.009.000	447	5.006.421.741.000	1.530	5.830.065.532.000	2304	15.887.719.282.000
9	Kementerian Agama	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kementerian ATR	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kementerian Desa PDT	20	19.900.000.000	22	19.800.000.000	17	14.350.000.000	59	54.050.000.000
12	Kementerian Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kementerian Kelautan dan Perikanan	6	794.668.000.000	4	761.668.000.000	4	750.668.000.000	14	2.307.004.000.000

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROVINSI ACEH							
		KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUNAN						TOTAL	
		2026		2027		2028		Kegiatan	Anggaran
		Keg	Anggaran	Keg	Anggaran	Keg	Anggaran	3 Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Kementerian Kesehatan	108	347.103.456.326	0	-	0	-	108	347.103.456.326
15	Kementerian Lingkungan Hidup	30	40.958.381.750	70	114.315.620.000	8	704.000.000	108	155.978.001.750
16	Kementerian Perdagangan	96	253.244.000.000	46	163.958.000.000	58	541.336.000.000	200	958.538.000.000
17	Kementerian Pertanian	0	-	0	-	0	-	0	-
18	Kementerian Sosial	9	16.013.866.666	7	7.847.200.000	7	4.877.200.000	23	28.738.266.666
19	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi	0	-	-	-	-	-	-	-
20	Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5	1.437.500.000	5	305.000.000	5	625.000.000	15	2.367.500.000
21	Kementerian Kebudayaan	347	62.786.000.000	347	68.911.600.000	347	43.749.400.000	1041	175.447.000.000
22	Kementerian PPPA	10	8.844.000.000	9	7.384.000.000	6	5.047.333.333	25	21.275.333.333
23	Kemendiktisaintek	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total KL Utama	958	6.596.187.213.742	957	6.150.611.161.000	1.982	7.191.422.465.333	3.897	19.938.220.840.075

Sumber: Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2026

6.3.2 Kebutuhan Dana Rehabilitasi dan Rekontruksi Kewenangan Pemerintah Aceh Tahun 2006-2028

Kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi kewenangan Pemerintah Aceh periode 2026–2028 mencapai **Rp14,38 triliun**. Angka ini merupakan kebutuhan pendanaan yang masih harus dipenuhi untuk melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada sektor-sektor yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh melalui berbagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan pascabencana masih memerlukan investasi yang sangat besar, terutama pada sektor infrastruktur dan sumber daya air yang menjadi fondasi utama pembangunan daerah.

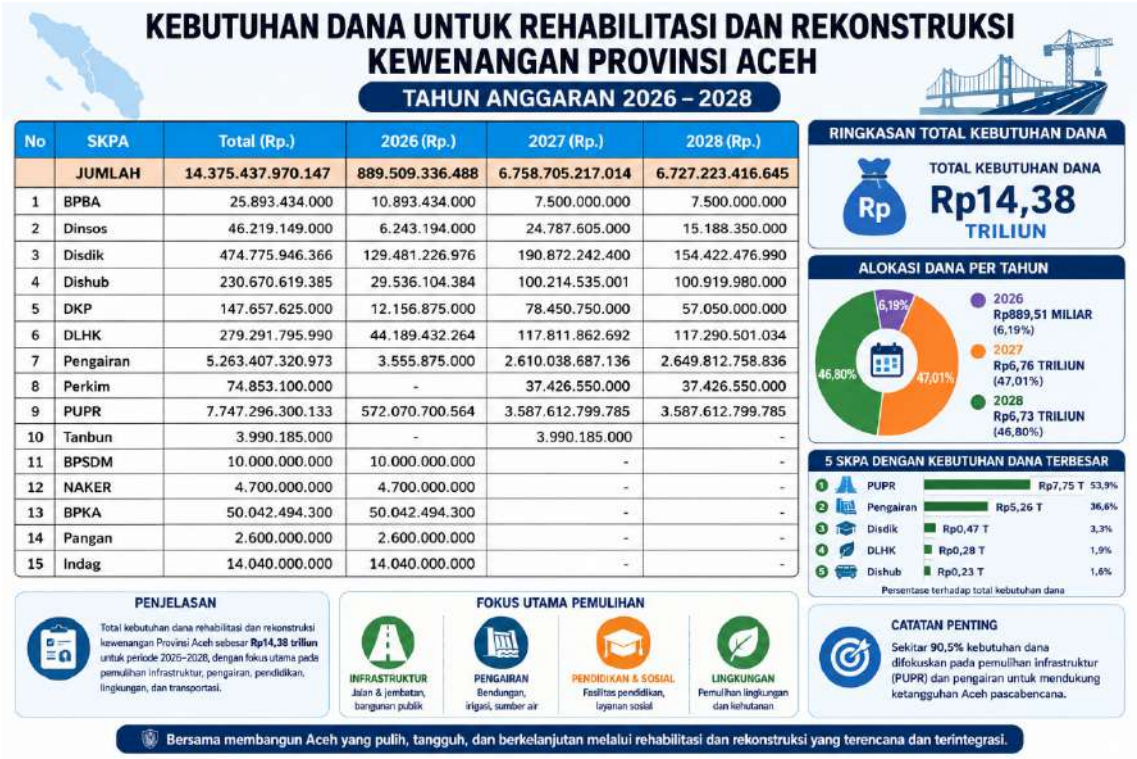

No	SKPA	Total (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)
	JUMLAH	14.375.437.970.147	889.509.336.488	6.758.705.217.014	6.727.223.416.645
1	BPBA	25.893.434.000	10.893.434.000	7.500.000.000	7.500.000.000
2	Dinsos	46.219.149.000	6.243.194.000	24.787.605.000	15.188.350.000
3	Disdik	474.775.946.366	129.481.226.976	190.872.242.400	154.422.476.990
4	Dishub	230.670.619.385	29.536.104.384	100.214.535.001	100.919.980.000
5	DKP	147.657.625.000	12.156.875.000	78.450.750.000	57.050.000.000
6	DLHK	279.291.795.990	44.189.432.264	117.811.862.692	117.290.501.034
7	Pengairan	5.263.407.320.973	3.555.875.000	2.610.038.687.136	2.649.812.758.836
8	Perkim	74.853.100.000	-	37.426.550.000	37.426.550.000
9	PUPR	7.747.296.300.133	572.070.700.564	3.587.612.799.785	3.587.612.799.785
10	Tanbun	3.990.185.000	-	3.990.185.000	-
11	BPSDM	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
12	NAKER	4.700.000.000	4.700.000.000	-	-
13	BPKA	50.042.494.300	50.042.494.300	-	-
14	Pangan	2.600.000.000	2.600.000.000	-	-
15	Indag	14.040.000.000	14.040.000.000	-	-

Gambar 6. 2
Kebutuhan Dana Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kewenangan Provinsi Aceh Tahun 2006-2028

Dilihat dari distribusi waktu pelaksanaan, kebutuhan dana tidak tersebar merata setiap tahun. Pada tahun 2026 dialokasikan sekitar Rp889,51 miliar atau hanya 6,19 persen dari total kebutuhan. Tahun ini lebih berfungsi sebagai tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan prioritas yang mendesak. Sebaliknya, puncak pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi direncanakan pada tahun 2027 dengan kebutuhan dana sebesar Rp6,76 triliun atau 47,01 persen dari total kebutuhan.

Besaran yang hampir sama juga dialokasikan pada tahun 2028, yaitu Rp6,73 triliun atau 46,80 persen. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan fisik dan program pemulihan akan dilaksanakan dalam dua tahun terakhir periode perencanaan.

Dari sisi kelembagaan, kebutuhan dana sangat terkonsentrasi pada dua SKPA utama. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membutuhkan anggaran sebesar Rp7,75 triliun, atau sekitar 53,9 persen dari total kebutuhan. Besarnya alokasi ini menunjukkan bahwa pemulihan jalan, jembatan, bangunan publik, serta infrastruktur strategis lainnya menjadi prioritas utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Infrastruktur merupakan faktor kunci untuk memulihkan konektivitas wilayah, mendukung aktivitas ekonomi, serta menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

SKPA dengan kebutuhan terbesar kedua adalah Dinas Pengairan, yang memerlukan dana sebesar Rp5,26 triliun atau sekitar 36,6 persen dari total kebutuhan. Besarnya kebutuhan pada sektor ini mencerminkan pentingnya pemulihan bendungan, irigasi, pengendalian banjir, dan infrastruktur sumber daya air lainnya. Infrastruktur pengairan memiliki peran vital dalam mendukung ketahanan pangan, menjaga produktivitas pertanian, serta mengurangi risiko bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Aceh.

Apabila digabungkan, kebutuhan dana pada PUPR dan Dinas Pengairan mencapai sekitar Rp13,01 triliun, atau sekitar 90,5 persen dari total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi kewenangan provinsi. Fakta ini memperlihatkan bahwa fokus utama rehabilitasi pascabencana di Aceh adalah pemulihan infrastruktur fisik dan sumber daya air. Tanpa pemulihan kedua sektor tersebut, proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat akan berjalan lebih lambat dan kurang efektif.

Selain dua SKPA utama tersebut, beberapa instansi lain juga memiliki kebutuhan yang cukup signifikan. Dinas Pendidikan memerlukan dana sekitar Rp474,78 miliar untuk pemulihan fasilitas pendidikan dan sarana pendukung pembelajaran. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) membutuhkan sekitar Rp279,29 miliar untuk rehabilitasi lingkungan dan kawasan hutan yang terdampak bencana. Dinas Perhubungan memerlukan sekitar Rp230,67 miliar untuk pemulihan sarana transportasi dan konektivitas wilayah. Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) membutuhkan sekitar Rp147,66 miliar guna mendukung pemulihan sektor perikanan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Dari perspektif pembangunan, infografis ini menunjukkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, sosial, lingkungan hidup, ekonomi masyarakat, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Namun demikian, sektor

infrastruktur tetap menjadi prioritas utama karena menjadi prasyarat bagi keberhasilan pemulihan sektor lainnya.

Secara strategis, kebutuhan dana sebesar Rp14,38 triliun ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Aceh masih menghadapi tantangan pendanaan yang cukup besar. Mengingat kemampuan fiskal daerah yang terbatas, pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dukungan dari berbagai sumber pendanaan, baik melalui APBN, APBA, Dana Alokasi Khusus, dana hibah, kerja sama dengan dunia usaha, maupun dukungan lembaga pembangunan nasional dan internasional. Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh kemampuan membangun kolaborasi dan mobilisasi sumber daya untuk mewujudkan Aceh yang lebih pulih, tangguh, dan berkelanjutan pascabencana.

Tabel 6. 8
Kebutuhan Dana Kewenangan Pemerintah Aceh Per SKPA Tahun 2026-2028

No	SKPA	Total (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)
		14.375.437.970.147	889.509.336.488	6.758.705.217.014	6.727.223.416.645
1	BPBA	25.893.434.000	10.893.434.000	7.500.000.000	7.500.000.000
2	Dinsos	46.219.149.000	6.243.194.000	24.787.605.000	15.188.350.000
3	Disdik	474.775.946.366	129.481.226.976	190.872.242.400	154.422.476.990
4	Dishub	230.670.619.385	29.536.104.384	100.214.535.001	100.919.980.000
5	DKP	147.657.625.000	12.156.875.000	78.450.750.000	57.050.000.000
6	DLHK	279.291.795.990	44.189.432.264	117.811.862.692	117.290.501.034
7	Pengairan	5.263.407.320.973	3.555.875.000	2.610.038.687.136	2.649.812.758.836
8	Perkim	74.853.100.000	-	37.426.550.000	37.426.550.000
9	PUPR	7.747.296.300.133	572.070.700.564	3.587.612.799.785	3.587.612.799.785
10	Tanbun	3.990.185.000	-	3.990.185.000	-
11	BPSDM	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
12	NAKER	4.700.000.000	4.700.000.000	-	-
13	BPKA	50.042.494.300	50.042.494.300	-	-
14	Pangan	2.600.000.000	2.600.000.000	-	-
15	Indag	14.040.000.000	14.040.000.000	-	-

Sumber : Bappeda Data diolah

Berdasarkan data **Kebutuhan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kewenangan Pemerintah Aceh Tahun 2026-2028**, total kebutuhan pendanaan mencapai **Rp14,38 triliun**. Angka ini menggambarkan besarnya kebutuhan investasi yang harus disediakan Pemerintah Aceh untuk memulihkan infrastruktur, lingkungan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan berbagai sektor strategis lainnya pascabencana. Distribusi kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berfokus pada pemulihan kerusakan yang terjadi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana di masa mendatang.

Dari sisi tahapan waktu, kebutuhan pendanaan menunjukkan pola yang sangat terkonsentrasi pada tahun 2027 dan 2028. Pada tahun **2026** kebutuhan anggaran hanya sebesar **Rp889,51 miliar** atau sekitar **6,19 persen** dari total kebutuhan. Tahun ini lebih diarahkan sebagai fase awal yang mencakup perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pekerjaan mendesak, serta kegiatan persiapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam skala besar. Sementara itu, pada tahun **2027** kebutuhan meningkat drastis menjadi **Rp6,76 triliun** atau sekitar **47,01 persen** dari total kebutuhan. Besaran yang hampir sama juga dialokasikan pada tahun **2028**, yaitu **Rp6,73 triliun** atau sekitar **46,80 persen**. Pola ini menunjukkan bahwa pelaksanaan utama rehabilitasi dan rekonstruksi akan berlangsung pada dua tahun terakhir periode perencanaan.

Analisis kelembagaan menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan sangat didominasi oleh dua SKPA utama, yaitu **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)** dan **Dinas Pengairan**. Dinas PUPR membutuhkan dana sebesar **Rp7,75 triliun**, atau sekitar **53,9 persen** dari total kebutuhan. Anggaran tersebut terutama diperuntukkan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan provinsi, jembatan, bangunan publik, pengaman pantai, serta berbagai infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Besarnya alokasi pada sektor ini menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur merupakan dampak terbesar yang harus segera dipulihkan untuk mengembalikan konektivitas wilayah dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, **Dinas Pengairan** membutuhkan dana sebesar **Rp5,26 triliun** atau sekitar **36,6 persen** dari total kebutuhan. Anggaran ini diarahkan untuk rehabilitasi bendungan, jaringan irigasi, pengendalian banjir, pengamanan sungai, dan berbagai infrastruktur sumber daya air lainnya. Tingginya kebutuhan pada sektor pengairan menunjukkan bahwa bencana yang terjadi tidak hanya merusak sarana fisik, tetapi juga mengganggu sistem pengelolaan sumber daya air yang sangat penting bagi sektor pertanian, ketahanan pangan, dan pengurangan risiko bencana di masa depan.

Jika kedua SKPA tersebut digabungkan, kebutuhan pendanaannya mencapai sekitar **Rp13,01 triliun** atau **90,5 persen dari total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi**. Hal ini menegaskan bahwa fokus utama program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berada pada pemulihan infrastruktur dan sumber daya air sebagai fondasi utama pembangunan kembali wilayah terdampak.

Di luar kedua sektor tersebut, kebutuhan yang cukup besar juga terdapat pada **Dinas Pendidikan** sebesar **Rp474,78 miliar**. Anggaran ini mencerminkan pentingnya pemulihan fasilitas pendidikan, sekolah, sarana pembelajaran, dan layanan pendidikan agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Selanjutnya, **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)** membutuhkan sekitar **Rp279,29 miliar** untuk rehabilitasi lingkungan, pemulihan kawasan hutan, daerah aliran sungai, serta upaya konservasi yang mendukung pengurangan risiko bencana.

Pada sektor transportasi, **Dinas Perhubungan** memerlukan sekitar **Rp230,67 miliar** untuk memperbaiki sarana dan prasarana transportasi yang terdampak bencana. Sementara itu, **Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)** membutuhkan sekitar **Rp147,66 miliar** guna memulihkan fasilitas perikanan dan mendukung keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir yang terdampak.

Beberapa SKPA lainnya memiliki kebutuhan yang relatif lebih kecil, seperti **Dinas Sosial** sebesar **Rp46,22 miliar**, **BPBA** sebesar **Rp25,89 miliar**, **BPKA** sebesar **Rp50,04 miliar**, **Perkim** sebesar **Rp74,85 miliar**, serta beberapa SKPA lainnya seperti Tanaman Pangan dan Perkebunan (Tanbun), BPSDM, Naker, Pangan, dan Indag. Walaupun nilainya tidak sebesar sektor infrastruktur, program-program tersebut tetap memiliki peran penting dalam memastikan pemulihan sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemulihan ekonomi masyarakat, dan penguatan kelembagaan pascabencana.

Dari perspektif strategi pembangunan, data ini menunjukkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh diarahkan pada tiga tujuan utama. Pertama, **memulihkan infrastruktur dasar dan sumber daya air** sebagai fondasi aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Kedua, **memulihkan sektor sosial dan pendidikan** untuk menjamin keberlangsungan layanan masyarakat. Ketiga, **meningkatkan ketahanan lingkungan dan kapasitas kelembagaan** guna mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

Secara keseluruhan, kebutuhan pendanaan sebesar **Rp14,38 triliun** memperlihatkan bahwa tantangan utama Pemerintah Aceh bukan hanya pada pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi juga pada upaya memperoleh sumber pembiayaan yang memadai. Mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah, keberhasilan pelaksanaan program ini akan sangat

bergantung pada dukungan Pemerintah Pusat melalui APBN, optimalisasi APBA, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, dukungan lembaga donor, serta kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pembangunan lainnya. Dengan dukungan pendanaan yang memadai dan pelaksanaan yang terkoordinasi, rehabilitasi dan rekonstruksi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan Aceh sekaligus membangun wilayah yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan.

Tabel 6. 9
Kebutuhan Dana Kewenangan Pemerintah Aceh Per Sektor Tahun 2026-2028

NO	SEKTOR	KEBUTUHAN	TAHUN ANGGARAN 2026	TAHUN ANGGARAN 2027	TAHUN ANGGARAN 2028
1	EKONOMI	168.287.810.000	28.796.875.000	82.440.935.000	57.050.000.000
2	INFRASTRUKTUR	13.316.227.340.492	605.162.679.948	6.335.292.571.922	6.375.772.088.621
3	LINTAS SEKTOR	355.227.724.290	105.125.360.564	125.311.862.692	124.790.501.034
4	SOSIAL	530.995.095.366	145.724.420.976	215.659.847.400	169.610.826.990
5	PERUMAHAN	4.700.000.000	4.700.000.000		
6	Grand Total	14.375.437.970.147	889.509.336.488	6.758.705.217.014	6.727.223.416.645

Sumber Bappeda, data diolah

Berdasarkan tabel **Kebutuhan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kewenangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2026–2028**, total kebutuhan pendanaan mencapai **Rp14,38 triliun**. Kebutuhan tersebut terbagi ke dalam lima sektor utama, yaitu ekonomi, infrastruktur, lintas sektor, sosial, dan perumahan. Distribusi kebutuhan menunjukkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh sangat didominasi oleh sektor infrastruktur yang menjadi tulang punggung pemulihan wilayah pascabencana.

Sektor **infrastruktur** merupakan sektor dengan kebutuhan terbesar, yaitu mencapai **Rp13,32 triliun** atau sekitar **92,6 persen** dari total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Besarnya kebutuhan ini menunjukkan bahwa kerusakan akibat bencana terutama terjadi pada jalan provinsi, jembatan, jaringan irigasi, bendungan, pengendalian banjir, bangunan publik, serta berbagai sarana dan prasarana dasar lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Dominasi sektor infrastruktur mengindikasikan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memulihkan konektivitas wilayah, sistem sumber daya air, dan pelayanan publik yang menjadi fondasi pembangunan daerah.

Dari sisi tahapan pelaksanaan, kebutuhan sektor infrastruktur tersebar hampir merata pada tahun 2027 dan 2028. Pada tahun 2026 dialokasikan sebesar **Rp605,16 miliar**, kemudian meningkat sangat signifikan pada tahun

2027 menjadi **Rp6,34 triliun**, dan kembali meningkat menjadi **Rp6,38 triliun** pada tahun 2028. Pola ini menunjukkan bahwa tahun 2026 lebih diarahkan sebagai fase persiapan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan kegiatan prioritas, sedangkan pembangunan fisik dalam skala besar akan dilaksanakan pada tahun 2027 dan 2028.

Sektor **sosial** menempati urutan kedua dengan kebutuhan sebesar **Rp530,99 miliar** atau sekitar **3,7 persen** dari total kebutuhan. Kebutuhan pada sektor ini mencerminkan pentingnya pemulihan fasilitas pendidikan, pelayanan sosial, perlindungan masyarakat, serta berbagai sarana yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat pascabencana. Distribusi kebutuhan sosial menunjukkan bahwa pelaksanaan terbesar direncanakan pada tahun 2027 sebesar **Rp215,66 miliar**, diikuti tahun 2028 sebesar **Rp169,61 miliar**, dan tahun 2026 sebesar **Rp145,72 miliar**. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan sosial dilakukan secara bertahap seiring dengan proses pemulihan infrastruktur dasar.

Sektor **lintas sektor** membutuhkan dana sebesar **Rp355,23 miliar** atau sekitar **2,5 persen** dari total kebutuhan. Kebutuhan ini mencakup berbagai program yang bersifat multidimensi, seperti rehabilitasi lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sistem penanggulangan bencana, serta program-program yang mendukung ketahanan wilayah secara menyeluruh. Kebutuhan sektor ini relatif merata selama tiga tahun pelaksanaan, yaitu sekitar **Rp105,13 miliar** pada tahun 2026, **Rp125,31 miliar** pada tahun 2027, dan **Rp124,79 miliar** pada tahun 2028.

Sektor **ekonomi** membutuhkan dana sebesar **Rp168,29 miliar** atau sekitar **1,2 persen** dari total kebutuhan. Walaupun porsinya relatif kecil dibandingkan sektor infrastruktur, sektor ini memiliki peran penting dalam memulihkan mata pencaharian masyarakat, mendukung usaha mikro dan kecil, sektor perikanan, perdagangan, serta aktivitas ekonomi lokal yang terdampak bencana. Kebutuhan terbesar sektor ekonomi berada pada tahun 2027 sebesar **Rp82,44 miliar**, diikuti tahun 2028 sebesar **Rp57,05 miliar**, dan tahun 2026 sebesar **Rp28,80 miliar**. Pola ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi dilakukan setelah infrastruktur dasar mulai pulih sehingga aktivitas usaha masyarakat dapat kembali berkembang.

Sementara itu, sektor **perumahan** memiliki kebutuhan yang relatif kecil, yaitu **Rp4,7 miliar** atau hanya sekitar **0,03 persen** dari total kebutuhan. Seluruh kebutuhan sektor ini direncanakan pada tahun 2026. Kecilnya kebutuhan perumahan menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan rehabilitasi perumahan kemungkinan telah menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota, sehingga porsi kewenangan

Pemerintah Aceh pada sektor ini sangat terbatas.

Dari perspektif tahunan, total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi menunjukkan pola yang sangat terkonsentrasi pada dua tahun terakhir. Tahun **2026** membutuhkan dana sebesar **Rp889,51 miliar** atau sekitar **6,19 persen** dari total kebutuhan. Pada tahun **2027**, kebutuhan meningkat drastis menjadi **Rp6,76 triliun** atau **47,01 persen** dari total kebutuhan. Tahun **2028** juga membutuhkan dana yang hampir sama besar yaitu **Rp6,73 triliun** atau **46,80 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dirancang untuk dilaksanakan secara intensif pada tahun 2027–2028 setelah proses perencanaan, penganggaran, dan persiapan teknis selesai dilakukan pada tahun 2026.

Secara keseluruhan, struktur kebutuhan ini memperlihatkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi kewenangan Pemerintah Aceh berorientasi kuat pada pemulihan **infrastruktur dan sumber daya air** sebagai fondasi pembangunan kembali wilayah terdampak. Namun demikian, keberhasilan program ini juga membutuhkan dukungan sektor sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana agar proses pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga mampu mewujudkan Aceh yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan di masa depan. Mengingat total kebutuhan mencapai **Rp14,38 triliun**, sementara dana yang telah tersedia melalui APBA dan RKPA hanya sekitar **Rp1,17 triliun**, maka diperlukan dukungan tambahan dari APBN, Dana Hibah BNPB, transfer keuangan daerah, CSR, serta berbagai sumber pendanaan lainnya untuk menutup kesenjangan pendanaan yang masih sangat besar.

6.5 Dukungan Daerah Terhadap RKP 2027

6.5.1 Dukungan Daerah Terhadap Astacita dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2027

Tabel 6. 10
Dukungan Daerah Terhadap Astacita dan Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2027

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL				4.145.245.439.571	
1	Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);				31.320.460.000	KESBANGPOL
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	109.460.454	KESBANGPOL

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	28.700.852	KESBANGPOL
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40.503.302	KESBANGPOL
				Pembentukan Paskibraka	1.265.120.000	KESBANGPOL
				Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	54.638.000	KESBANGPOL

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	32.369.696	KESBANGPOL
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	69.207.696	KESBANGPOL
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	198.182.054	KESBANGPOL

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	59.267.130	KESBANGPOL

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	43.189.954	KESBANGPOL
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	29.347.291.908	KESBANGPOL
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	72.528.954	KESBANGPOL

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;				114.372.836.486	TANBUN, PANGAN, ESDM, DKP, DISNAK, PENGAIRAN
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	75.000.000	TANBUN

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	10.000.000	TANBUN
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	10.000.000	TANBUN
				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	15.070.000.000	TANBUN
				Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	10.000.000	TANBUN
				Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4.605.000.000	TANBUN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	19.756.280.616	TANBUN

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	80.000.000	TANBUN
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	75.000.000	TANBUN
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	520.000.000	TANBUN
				Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	15.022.500.000	TANBUN
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota	75.000.000	TANBUN
				Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	75.000.000	TANBUN

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	6.500.000.000	TANBUN
				Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	75.000.000	TANBUN
				Sinkronisasi dan Koordinasi penyuluh pertanian (ASN, Swadaya dan Swasta) lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	60.000.000	TANBUN
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	3.611.316.600	TANBUN
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	30.000.000	PANGAN
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu)	500.000.000	PANGAN

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	120.000.000	PANGAN
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	200.000.000	PANGAN
				Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	250.000.000	PANGAN
				Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	54.712.000	PANGAN
				Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	145.288.000	PANGAN

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	500.000.000	PANGAN
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	500.000.000	PANGAN
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	500.000.000	PANGAN
			Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	54.349.015	PANGAN
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	48.540.000	PANGAN

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	97.110.985	PANGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	70.000.000	ESDM
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	5.000.000.000	ESDM
				Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	50.000.000	ESDM

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4.603.487.500	ESDM
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	50.000.000	ESDM
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	10.000.000	DISNAK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	10.000.000	DISNAK
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	20.000.000	DISNAK
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	6.800.000.000	DISNAK
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1.400.000.000	DISNAK
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	10.000.000	DISNAK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.000.000.000	PENGAIRAN
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5.000.000.000	PENGAIRAN
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.000.000.000	PENGAIRAN
				Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	76.570.770	PENGAIRAN
				Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	218.281.000	PENGAIRAN

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	500.000.000	PENGAIRAN
				Rehabilitasi Bendung Irigasi	5.000.000.000	PENGAIRAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	667.400.000	DKP
				Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	5.183.600.000	DKP
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3.563.400.000	DKP
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	5.500.000.000	DKP

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.000.000	DKP
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.000.000	DKP
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan indutri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui				586.645.619.474	PUPR, DISHUB, PERKIM, KOP UKM, DKP

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
	peran aktif koperasi;					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	7.741.840	PUPR
				Pembangunan Jalan	20.000.000.000	PUPR
				Pembangunan Jembatan	24.645.000.000	PUPR
				Pemeliharaan Berkala Jalan	3.647.960.010	PUPR
				Pemeliharaan Rutin Jalan	29.530.000.000	PUPR
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.949.060.045	PUPR

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	4.461.014.436	PUPR
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.006.425.396	PUPR
				Rekonstruksi Jalan	29.332.445.959	PUPR
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	505.744.686	PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	29.280.000	PUPR
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	498.275.147	PUPR

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	58.798.965	PUPR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	29.379.250	PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	99.973.750	PUPR
				Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	98.000.000	PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	45.000.000	PUPR
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	95.000.000	PUPR

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	610.000.000	PUPR
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	100.000.000	PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	478.324.000	DISHUB
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.535.076.000	DISHUB
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	91.460.000.000	DISHUB

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Pengumpan Regional			
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	958.084.350	DISHUB
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	2.472.117.000	DISHUB
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	549.800.000	DISHUB
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B	84.116.067	DISHUB
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	428.201.972	DISHUB

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	139.130.000	DISHUB
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	378.590.000	DISHUB
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	750.206.472	DISHUB
				Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	318.393.933	DISHUB
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	1.525.622.696	DISHUB
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	126.528.000	DISHUB

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	750.074.196	DISHUB
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10.879.925.804	DISHUB
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	6.515.000.000	DISHUB
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	64.770.000	DISHUB
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	166.869.900.000	PERKIM

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.425.800.000	PERKIM
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.574.200.000	PERKIM
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	1.024.072.000	PERKIM
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	137.897.200.000	PERKIM
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	DKP

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	398.000.000	DKP
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000.000	DKP
				Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.700.000.000	DKP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	667.400.000	DKP
				Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	5.183.600.000	DKP
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3.563.400.000	DKP

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	5.500.000.000	DKP
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.000.000	DKP
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.000.000	DKP
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	179.200.000	DKP

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.400.000.000	DKP
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000	KOP UKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pendampingan dan Fasilitasi Koperasi	2.984.787.500	KOP UKM

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	200.000.000	KOP UKM
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000	KOP UKM
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda				1.501.140.810.570	DISDIK, BPSDM, DINKES RSUZA, RSIA, RSJ, DP3A, DISPORA, DINSOS, NAKERMOBDUK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
	(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;					
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	550.000.000	DISDIK
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	142.556.757	DISDIK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengadaan Mebel Sekolah	1.727.790.048	DISDIK
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	22.040.200.000	DISDIK
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	1.030.000.000	DISDIK
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	834.600.000	DISDIK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	20.000.000	DISDIK
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2.893.386.000	DISDIK
				Pembangunan Fasilitas Parkir	127.440.000	DISDIK
				Pembangunan Ruang Laboratorium	600.000.000	DISDIK
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.605.689.600	DISDIK
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.162.191.749	DISDIK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	15.215.144.252	DISDIK
				Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	700.000.000	DISDIK
				Pengadaan Mebel Sekolah	21.202.544.720	DISDIK
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	238.845.880.000	DISDIK
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	46.574.000	DISDIK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	159.008.428.133	DISDIK
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	42.584.400.000	DISDIK
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	50.000.000	DISDIK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200.000.000	DISDIK
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.151.288.000	DISDIK
				Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.830.000.000	DISDIK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	838.997.024	DISDIK
				Pembangunan Fasilitas Parkir	200.000.000	DISDIK
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.601.069.600	DISDIK
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	80.000.000	DISDIK
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	575.296.930	DISDIK
				Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	9.137.323.890	DISDIK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengadaan Mebel Sekolah	8.384.176.728	DISDIK
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	96.968.300.000	DISDIK
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	77.740.858	DISDIK
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	16.394.400.000	DISDIK
				Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	170.000.000	DISDIK
				Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	822.446.400	DISDIK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	200.000.000	DISDIK
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	250.000.000	DISDIK
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	200.000.000	DISDIK
				Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	518.196.000	DISDIK
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	1.275.217.398	DISDIK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.000.000	DISDIK
			Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	85.000.000	DISDIK
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	512.000.000	BPSDM

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.083.039.655	BPSDM
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	51.419.994.768	BPSDM
				Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	2.000.000.000	BPSDM

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	359.343.000	BPSDM
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	4.986.965.577	BPSDM
				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	817.200.419	BPSDM

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	126.922.000	DINKES
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	200.000.000	DINKES
				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	196.935.604	DINKES
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	500.000.000	DINKES

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	84.000.000.000	DINKES
				Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	250.000.000	DINKES
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	492.007.000	DINKES
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	100.000.000	DINKES
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8.122.868.000	DINKES

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	200.000.000	DINKES
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	100.000.000	DINKES
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	100.000.000	DINKES
				Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	214.100.000	DINKES
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	400.000.000	DINKES
				Pengelolaan Imunisasi	200.000.000	DINKES

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	591.353.232.457	DINKES
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	400.000.000	DINKES
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	300.000.000	DINKES
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	100.000.000	DINKES
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	500.000.000	DINKES
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	150.000.000	DINKES

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	300.000.000	DINKES
				Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	100.000.000	DINKES
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	550.000.000	DINKES
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	150.000.000	DINKES
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	309.000.000	DINKES
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	200.000.000	DINKES

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit dengue	100.000.000	DINKES
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	50.000.000	DINKES
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	300.000.000	DINKES
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	486.320.000	DINKES
				Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit Tuberkulosis	310.800.000	DINKES
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit Zoonosis	50.000.000	DINKES

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	100.000.000	DINKES
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	200.000.000	DINKES
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100.000.000	DINKES
				Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	8.646.767.544	DINKES
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	150.000.000	DINKES
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100.000.000	DINKES

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100.000.000	DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.000.000	DINKES
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	650.000.000	DINKES
			Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	200.000.000	DINKES
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	719.820.000	RSIA
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	340.332.645	RSIA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	9.157.775.000	RSJ
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.000.000.000	RSJ
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	671.258.000	RSJ
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.926.213.200	RSUZA
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Provinsi	27.523.438	DP3A

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Kewenangan Provinsi			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	74.416.562	DP3A
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	27.659.742	DP3A
				Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	69.630.000	DP3A
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi	27.143.000	DP3A

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	44.812.872	DP3A
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	100.000.000	PORA
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1.000.000	PORA
				Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	500.000.000	PORA
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	100.000.000	PORA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	7.500.000.000	PORA
				Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1.000.000	PORA
				Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	100.000.000	PORA
				Seleksi Atlet Daerah	1.500.000.000	PORA
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	50.000.000	PORA
				Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	30.000.000.000	PORA
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	400.000.000	PORA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	1.050.000.000	PORA
				Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	200.000.000	PORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	1.550.000.000	PORA
				Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	500.000.000	PORA
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	1.000.000.000	PORA
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	500.000.000	PORA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	500.000.000	PORA
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	1.000.000.000	PORA
				Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	150.000.000	PORA
				Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	200.000.000	PORA
				Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	200.000.000	PORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	3.000.000.000	PORA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	31.270.000	DINSOS
				Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1.400.000	DINSOS
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	26.406.000	DINSOS
				Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	26.406.000	DINSOS
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	150.846.000	DINSOS
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	248.750.000	DINSOS
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	97.572.000	DINSOS
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	142.475.000	DINSOS

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pemulasaraan	2.100.000	DINSOS
				Penyediaan Alat Bantu	8.000.000	DINSOS
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	472.776.415	DINSOS
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	39.990.565	DINSOS
				Penyediaan Permakanan	650.165.000	DINSOS
				Penyediaan Sandang	110.295.020	DINSOS
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.600.000.000	NAKERMOBDUK
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	26.620.000	NAKERMOBDUK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	73.380.000	NAKERMOBDUK
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	200.000.000	NAKERMOBDUK
				Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	250.000.000	NAKERMOBDUK
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;				11.903.401.000	INDAG
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1.945.000	INDAG

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2.045.000	INDAG
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	46.840.000	INDAG
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Internasional/Nasional	150.000.000	INDAG

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	38.840.000	INDAG
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	20.000.000	INDAG
				Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	15.000.000	INDAG
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	30.130.000	INDAG

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	15.500.000	INDAG
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	16.395.000	INDAG
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	805.850.154	INDAG
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.895.000.000	INDAG
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	250.000.000	INDAG

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50.000.000	INDAG
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	105.000.000	INDAG

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.002.935.846	INDAG
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	62.920.000	INDAG

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	50.000.000	INDAG
			Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pemantauan Mutu Produk	46.633.702	INDAG
				Pengembangan Layanan Kalibrasi	73.608.302	INDAG
				Pengembangan Layanan Pengujian	112.700.302	INDAG
				Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	17.057.694	INDAG
			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	95.000.000	INDAG

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;				42.691.982.863	DPMG, KOP UKM, NAKERMOBDUK
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	150.000.000	DPMG
				Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	65.000.000	DPMG
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12.471.698	DPMG
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	85.000.000	DPMG
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	326.725.220	DPMG

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	197.800.000	DPMG
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	600.000.000	DPMG

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	363.274.780	DPMG
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.584.776.000	DPMG
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.000.000	DPMG
		PROGRAM PENATAAN DESA	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	72.528.302	DPMG
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	10.000.000	DPMG

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	37.200.000	DPMG
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Start-Up	495.000.000	KOP UKM
				Pembinaan dan Fasilitasi Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri	3.173.976.000	KOP UKM
				Pembinaan dan Fasilitasi Wirausaha Tematik	831.024.000	KOP UKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Pembinaan dan Fasilitasi Pemulihan Usaha	29.945.617.992	KOP UKM

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	3.251.588.871	KOP UKM
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	40.000.000	NAKERMOBDUK
				Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	1.000.000.000	NAKERMOBDUK
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	218.487.550	NAKERMOBDUK
				Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	131.512.450	NAKERMOBDUK
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,				1.742.581.153.977	BKA, BPKA, BAPPEDA, INSPEKTORAT, SEKDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
	judi dan penyelundupan;					
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	80.000.000	BKA
				Pengelolaan Mutasi ASN	30.000.000	BKA
				Pengelolaan Promosi ASN	425.060.000	BKA
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	75.000.000	BKA
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	129.088.000	BKA
				Pengelolaan Data Kepegawaian	32.000.000	BKA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	30.000.000	BKA
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	546.616.334	BKA
			Pengembangan Kompetensi ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	40.000.000	BKA
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	10.000.000	BKA
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	63.000.000	BKA
				Pembinaan Disiplin ASN	35.000.000	BKA
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	35.000.000	BKA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	59.174.120	BPKA
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	182.396.500	BPKA
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	610.549.540	BPKA
				Pengamanan Barang Milik Daerah	212.269.350	BPKA
				Penilaian Barang Milik Daerah	40.290.000	BPKA
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	30.402.100	BPKA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyusunan Standar Harga	19.169.900	BPKA
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	749.164.107	BPKA
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	66.627.250	BPKA
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	62.119.000	BPKA
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	100.440.000	BPKA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.091.816.883	BPKA
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	29.380.000	BPKA
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	243.806.236	BPKA
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	95.190.000	BPKA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	93.557.000	BPKA
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	174.670.790	BPKA
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	950.780.450	BPKA
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	154.993.300	BPKA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUAdan Perubahan PPAS	106.070.696	BPKA
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	81.450.100	BPKA
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	39.612.600	BPKA
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	39.612.600	BPKA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	39.611.550	BPKA
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	37.563.223	BPKA
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	52.112.390	BPKA
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	29.747.500	BPKA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	50.776.920	BPKA
				Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	1.449.325	BPKA
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	210.314.384	BPKA
				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	232.793.016	BPKA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	247.410.536	BPKA
				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	281.051.304	BPKA
				Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	51.475.360	BPKA
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	912.506.488.000	BPKA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	706.461.444.840	BPKA
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	41.312.080.000	BPKA
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	151.620.000	BPKA
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	38.440.000	BPKA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11.883.297.634	BPKA
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	30.163.000	BPKA
				Penagihan Pajak Daerah	1.175.932.000	BPKA
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	133.840.000	BPKA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	155.324.000	BPKA
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	764.990.400	BPKA
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	406.859.430	BPKA
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	913.279.700	BPKA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80.110.000	BPKA
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	98.750.000	BPKA
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	37.935.500	BPKA
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1.048.753.791	BAPPEDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	429.961.327	BAPPEDA
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	94.271.302	BAPPEDA
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	340.022.660	BAPPEDA
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	365.000.000	BAPPEDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	345.000.000	BAPPEDA
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	325.100.000	BAPPEDA
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	852.115.722	BAPPEDA
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	400.057.448	BAPPEDA
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	349.941.780	BAPPEDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100.000.000	BAPPEDA
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	154.197.500	BAPPEDA
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	390.000.000	BAPPEDA
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	225.031.960	BAPPEDA
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.054.804.365	BAPPEDA
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	373.516.295	BAPPEDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Pembangunan Daerah			
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	282.683.685	BAPPEDA
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	854.595.560	BAPPEDA
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	3.462.135.000	BAPPEDA
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.470.680.475	BAPPEDA
				Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	4.997.876.857	BAPPEDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Invensi dan Inovasi	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	85.760.250	BAPPEDA
				Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	427.000.000	BAPPEDA
				Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	85.608.880	BAPPEDA
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	75.800.000	BAPPEDA
				Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	82.677.781	BAPPEDA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah	157.740.000	INSPEKTORAT

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	928.358.000	INSPEKTORAT
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal	944.097.000	INSPEKTORAT
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.262.559.000	INSPEKTORAT
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.831.950.000	INSPEKTORAT
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.419.589.500	INSPEKTORAT
				Pengawasan Umum dan TeknisKabupaten/Kota	2.161.620.000	INSPEKTORAT
				Reviu Laporan Keuangan	904.680.000	INSPEKTORAT
				Reviu Laporan Kinerja	488.590.000	INSPEKTORAT

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	739.054.000	INSPEKTORAT
				Pendampingan dan Asistensi UrusanPemerintahan Daerah	3.470.180.000	INSPEKTORAT
				Pendampingan, Asistensi dan VerifikasiPenegakan Integritas	218.855.000	INSPEKTORAT
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, danPenilaian Reformasi Birokrasi	51.800.000	INSPEKTORAT
			Perumusan Kebijakan Teknis di BidangPengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di BidangPengawasan	899.208.000	INSPEKTORAT
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.069.000.000	SEKDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	533.520.000	SEKDA
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Fasilitasi dan Evaluasi Produk HukumKabupaten/Kota	522.320.000	SEKDA
				Fasilitasi Penyusunan Produk HukumPenetapan	32.000.000	SEKDA
				Fasilitasi Penyusunan Produk HukumPengaturan	1.281.722.000	SEKDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	79.977.813	SEKDA
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	123.948.000	SEKDA
				Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	123.946.000	SEKDA
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	123.946.000	SEKDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	5.000.000.000	SEKDA
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	371.840.000	SEKDA
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	371.840.000	SEKDA
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	77.823.506	SEKDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	160.917.540	SEKDA
				Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	538.508.280	SEKDA
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	290.941.000	SEKDA
				Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	76.648.000	SEKDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.730.598.242	SEKDA
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	152.544.938	SEKDA
				Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	107.752.000	SEKDA
				Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	69.709.532	SEKDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	1.050.595.086	SEKDA
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	3.523.767.906	SEKDA
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	132.674.500	SEKDA
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	131.874.800	SEKDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	132.422.731	SEKDA
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	198.827.500	SEKDA
				Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	397.689.713	SEKDA
				Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	414.405.425	SEKDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30.000.000	SEKDA
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	80.000.000	SEKDA
				Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	50.000.000	SEKDA
			Pelaksanaan Otonomi Daerah	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	75.000.000	SEKDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	85.000.000	SEKDA
				Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	60.000.000	SEKDA
			Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	220.000.000	SEKDA
				Fasilitasi Penataan Wilayah	100.000.000	SEKDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	163.175.031	SEKDA
				Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	141.328.643	SEKDA
				Penataan Analisis Jabatan	125.886.553	SEKDA
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	106.248.291	SEKDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	229.663.373	SEKDA
				Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	347.559.520	SEKDA
				Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	286.138.589	SEKDA
				Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	100.000.000	SEKDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	91.000.000	SEKDA
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	91.000.000	SEKDA
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	91.000.000	SEKDA
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	150.976.000	SEKDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	276.400.000	SEKDA
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	91.000.000	SEKDA
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	91.000.000	SEKDA
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	91.000.000	SEKDA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	49.392.630	DRKA
			Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	94.710.000	DRKA
				Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	40.000.000	DRKA
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	17.460.000	DRKA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	40.000.000	DRKA
			Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	124.709.333	DRKA
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	73.641.000	DRKA
				Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40.000.000	DRKA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	28.440.000	DRKA
				Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	29.680.000	DRKA
				Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	28.360.000	DRKA
				Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	21.944.000	DRKA

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	49.292.180	DRKA
		PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	60.789.500	TANAH
				Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	75.359.551	TANAH
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	20.000.000	TANAH

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	150.000.000	TANAH
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.000.000	TANAH
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	25.000.000	TANAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Provinsi	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	32.624.000	TANAH

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan	Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	62.093.000	TANAH
		PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH	Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Aset Pemerintah	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	126.639.066	TANAH
			Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik Masyarakat Miskin	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	65.843.200	TANAH
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk				114.589.175.201	DLHK, DKP, PENGAIRAN

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
	mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Penetapan koridor hidupan liar	45.000.000	DLHK
				Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	4.800.000.000	DLHK
				Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	50.000.000	DLHK
			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	69.682.745	DLHK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	402.702.431	DLHK
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	24.173.600	DLHK
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	49.977.700	DLHK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	42.092.300	DLHK
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	250.000.000	DLHK
				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2.950.000.000	DLHK
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	122.078.000	DLHK
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	50.000.000	DLHK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	67.500.000	DLHK
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	805.583.000	DLHK
			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	805.583.000	DLHK
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	190.721.700	DLHK
				Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.200.000.000	DLHK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.817.555.925	DLHK
				Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	650.000.000	DLHK
				Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	19.176.500	DLHK
			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	45.000.000	DLHK
			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan (PPKH)	45.000.000	DLHK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.667.237.000	DLHK
				Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	22.500.000	DLHK
			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	135.000.000	DLHK
				Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan	67.500.000	DLHK
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	15.750.000	DLHK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	40.500.000	DLHK
				Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	9.019.160.000	DLHK
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	3.439.340.000	DLHK
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	32.679.000	DLHK
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	36.000.000	DLHK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	41.957.200	DLHK
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	52.560.000	DLHK
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	235.567.000	DLHK
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.034.195.000	DLHK
				Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	92.863.400	DLHK
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	102.301.500	DLHK

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Tingkat Daerah Provinsi			
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	43.739.800	DLHK
		PROGRAMPERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	53.884.700	DLHK
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	101.494.700	DLHK
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	5000000	DKP

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000	DKP
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000	DKP
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	605.000.000	DKP
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	241.400.000	DKP
				Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	5.000.000	DKP

No	Astacita /Prioritas Nasional	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.205.000.000	DKP
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	433.577.721	PENGAIRAN
				Normalisasi/Restorasi Sungai	17.000.000.000	PENGAIRAN
				Operasi dan Pemeliharaan Embung	500.000.000	PENGAIRAN
				Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	20.000.000.000	PENGAIRAN
				Pembangunan Tanggul Sungai	36.500.000.000	PENGAIRAN
				Pemeliharaan Sungai	500.000.000	PENGAIRAN
				Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	348.141.279	PENGAIRAN
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	5.500.000.000	PENGAIRAN

6.4.2. Dukungan Daerah Terhadapan Highlight Intervensi RKP 2027

Berdasarkan Rancangan RKP 2027 terdapat 15 (lima belas) highlight intervensi RKP di Aceh tahun 2027 sebagaimana yang dijelaskan pada Sub Bab 6.1. Untuk mendukung highlight intervensi tersebut terdapat beberapa program prioritas pembangunan daerah dalam RKPA 2027, secara detail dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu dapat dilihat pada Tabel 6.8 berikut.

Tabel 6. 11
Dukungan Daerah Terhadap Highlight Intervensi RKP 2027

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	DUKUNGAN DAERAH RKPA 2027				
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Pembangunan Perdesaan, Daerah Afirmasi dan Transmigrasi							
Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi	**A1.** Kawasan Afirmasi Simeulue (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan)	Elektrifikasi Desa	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4.603.487.500	ESDM
B. Pembangunan Kota Terpadu							

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	DUKUNGAN DAERAH RKPA 2027				
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi	**B1.** Kawasan Kota Langsa	Jalan Tol Bijai - Langsa (bagian dari Tol Sumatera)*	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	7.741.840	PUPR
	B2. Kawasan Perkotaan Banda Aceh - Jantho dan KPBPB Sabang (Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar)	Jalan Tol Sigli - Banda Aceh (bagian dari Tol Sumatera)*			Pembangunan Jalan	20.000.000.000	PUPR
		Penuntasan Missing Link Jalan Provinsi Ruas Jantho - Keumala*			Pembangunan Jembatan	24.645.000.000	PUPR
					Pemeliharaan Berkala Jalan	3.647.960.010	PUPR
					Pemeliharaan Rutin Jalan	29.530.000.000	PUPR
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.949.060.045	PUPR

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	DUKUNGAN DAERAH RKPA 2027				
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	4.461.014.436	PUPR
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.006.425.396	PUPR
					Rekonstruksi Jalan	29.332.445.959	PUPR
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	505.744.686	PUPR
C. Pembangunan Wilayah Kepulauan							

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	DUKUNGAN DAERAH RKPA 2027				
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7	8
Swasembada Pangan, Energi dan Air	**C1.** Kawasan Swasembaga Pangan dan Energi Pesisir Barat (Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat. Kab. Aceh Barat Daya)	Pembangunan Jaringan Irigasi Daeri Irigasi Lhok Guci*	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.000.000.000	PENGAIRAN
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5.000.000.000	PENGAIRAN
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.000.000.000	PENGAIRAN
					Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	76.570.770	PENGAIRAN

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	DUKUNGAN DAERAH RKPA 2027				
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	218.281.000	PENGAIRAN
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	500.000.000	PENGAIRAN
					Rehabilitasi Bendung Irigasi	5.000.000.000	PENGAIRAN
Fokus Pembangunan Kewilayahan Prioritas Lainnya							
Swasembada Pangan, Energi dan Air	Provinsi Aceh						

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	DUKUNGAN DAERAH RKPA 2027				
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi (Padi,Jagung, Kedelai)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	19.756.280.616	TANBUN
		Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kakao, Pala)			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	80.000.000	TANBUN
					Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	75.000.000	TANBUN
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	520.000.000	TANBUN
					Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana	15.022.500.000	TANBUN

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	DUKUNGAN DAERAH RKPA 2027				
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pendukung Pertanian		
		Optimalisasi Sumur Minyak Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	50.000.000	ESDM
	Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh (Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur dan Kab. Pidie)	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan*	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.000.000.000	PENGAIRAN

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	DUKUNGAN DAERAH RKPA 2027				
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
		Bendungan Keureuto*			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5.000.000.000	PENGAIRAN
		Bendungan Rukoh*			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.000.000.000	PENGAIRAN
					Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	76.570.770	PENGAIRAN
					Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	218.281.000	PENGAIRAN

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	DUKUNGAN DAERAH RKPA 2027				
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	SKPA
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	500.000.000	PENGAIRAN
					Rehabilitasi Bendung Irigasi	5.000.000.000	PENGAIRAN

Sumber: Rancangan RKP 2027 dan SIPD RI 2027

6.4.3. Dukungan Daerah Terhadapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) RKP 2027

Adapun Dukungan Pemerintah Provinsi Aceh dalam mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 6. 12
Dukungan Daerah Terhadap Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
1	4.582 Kapal Ikan Modern	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	667.400.000	DKP
				Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	5.183.600.000	DKP
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3.563.400.000	DKP
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	5.500.000.000	DKP

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.000.000	DKP
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.000.000	DKP
2	40.000 Lokasi Budidaya Ikan Darat Tematik	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	DKP
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	398.000.000	DKP

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000.000	DKP
				Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.700.000.000	DKP
3	Modeling dan Replikasi 2.000 Ha Tambak Udang Terintegrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000.000	DKP
				Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.700.000.000	DKP
4	2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	605.000.000	DKP

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
5	Pengembangan kawasan Pangan Terintegrasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4.605.000.000	TANBUN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	80.000.000	TANBUN
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	75.000.000	TANBUN
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	520.000.000	TANBUN
				Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	15.022.500.000	TANBUN

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000.000	DKP
				Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.700.000.000	DKP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	667.400.000	DKP
				Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	5.183.600.000	DKP
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3.563.400.000	DKP
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan	5.500.000.000	DKP

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Sampai Dengan 12 Mil	penangkapan ikan terukur		
6	Pengembangan kawasan perkebunan (Sawit, Tebu, Kakao, Kelapa, Kopi, Jambu, Mete, Rempah)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	15.070.000.000	TANBUN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	19.756.280.616	TANBUN
				Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	80.000.000	TANBUN
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	3.611.316.600	TANBUN

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
7	Peningkatan produksi Daging, Susu, Telur	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	10.000.000	DISNAK
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	10.000.000	DISNAK
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	20.000.000	DISNAK
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	6.800.000.000	DISNAK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1.400.000.000	DISNAK
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	10.000.000	DISNAK
8	Mandatori Biodiesel 50 (B50)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	19.756.280.616	TANBUN
9	Mandatori Bioethanol (E20)					
10	Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	5.000.000.000	ESDM

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
11	Elektrifikasi 10.000 Desa	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4.603.487.500	ESDM
12	Swasembada Air	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.425.800.000	PERKIM
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.574.200.000	PERKIM
13	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	550.000.000	DISDIK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	142.556.757	DISDIK
				Pengadaan Mebel Sekolah	1.727.790.048	DISDIK
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	22.040.200.000	DISDIK
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	1.030.000.000	DISDIK
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	834.600.000	DISDIK
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	20.000.000	DISDIK
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2.893.386.000	DISDIK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Fasilitas Parkir	127.440.000	DISDIK
				Pembangunan Ruang Laboratorium	600.000.000	DISDIK
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.605.689.600	DISDIK
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.162.191.749	DISDIK
				Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	15.215.144.252	DISDIK
				Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	700.000.000	DISDIK
				Pengadaan Mebel Sekolah	21.202.544.720	DISDIK
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	238.845.880.000	DISDIK
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	46.574.000	DISDIK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	159.008.428.133	DISDIK
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	42.584.400.000	DISDIK
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	50.000.000	DISDIK
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200.000.000	DISDIK
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.151.288.000	DISDIK
				Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.830.000.000	DISDIK
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	838.997.024	DISDIK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Kapasitas Bidang Pendidikan		
				Pembangunan Fasilitas Parkir	200.000.000	DISDIK
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.601.069.600	DISDIK
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	80.000.000	DISDIK
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	575.296.930	DISDIK
				Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	9.137.323.890	DISDIK
				Pengadaan Mebel Sekolah	8.384.176.728	DISDIK
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	96.968.300.000	DISDIK
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	77.740.858	DISDIK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	16.394.400.000	DISDIK
				Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	170.000.000	DISDIK
				Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	822.446.400	DISDIK
				Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	200.000.000	DISDIK
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	250.000.000	DISDIK
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	200.000.000	DISDIK
				Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	518.196.000	DISDIK
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	1.275.217.398	DISDIK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.000.000	DISDIK
			Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	85.000.000	DISDIK
14	Peningkatan Kesejahteraan Guru, Transfer Langsung Tunjangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG)	718.962.439.000	DISDIK
15	66 Rumah Sakit Upgrade	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	84.000.000.000	DINKES

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	492.007.000	DINKES
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.926.213.200	RSUZA
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.000.000.000	RSUZA
16	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	591.353.232.457	DINKES

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
17	Penuntasan Tuberkulosis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit Tuberkulosis	310.800.000	DINKES
18	Gerakan ASRI (Gentesisasi, Pengendalian Sampah, Penghijauan)	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Penetapan koridor hidupan liar	45.000.000	DLHK
				Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	4.800.000.000	DLHK
				Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	50.000.000	DLHK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	69.682.745	DLHK
				Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	402.702.431	DLHK
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	24.173.600	DLHK
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang	49.977.700	DLHK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	42.092.300	DLHK
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	250.000.000	DLHK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2.950.000.000	DLHK
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	122.078.000	DLHK
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	50.000.000	DLHK
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	67.500.000	DLHK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	805.583.000	DLHK
			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	805.583.000	DLHK
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	190.721.700	DLHK
				Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.200.000.000	DLHK
			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.817.555.925	DLHK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	650.000.000	DLHK
				Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	19.176.500	DLHK
			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	45.000.000	DLHK
			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan (PPKH)	45.000.000	DLHK
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.667.237.000	DLHK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	22.500.000	DLHK
			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	135.000.000	DLHK
				Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan	67.500.000	DLHK
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	15.750.000	DLHK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	40.500.000	DLHK
				Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	9.019.160.000	DLHK
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	3.439.340.000	DLHK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	32.679.000	DLHK
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	36.000.000	DLHK
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	41.957.200	DLHK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	52.560.000	DLHK
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	235.567.000	DLHK
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.034.195.000	DLHK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	92.863.400	DLHK
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	102.301.500	DLHK
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	43.739.800	DLHK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAMPERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	53.884.700	DLHK
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	101.494.700	DLHK
19	3 Juta Rumah: 1 Juta Rumah Baru & 2 Juta Renovasi Rumah	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	311.066.128.000	PERKIM
20	Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	549.800.000	DISHUB

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
21	Percepatan Pembangunan Daerah 3T	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan (Intensifikasi tanaman perkebunan di Kabupaten Simeulue)	489.304.000	TANBUN
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Pengadaan pupuk hayati cair untuk peningkatan produksi tanaman pangan/hortikulutura di Kabupaten Simeulue)	485.000.000	TANBUN
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Pemasangan Instalasi Listrik Rumah Sederhana di Kab. Simeulue)	584.687.500	ESDM

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur (Pengadaan Mesin Penggerak Perahu Nelayan 6,5 PK yang ada di Kecamatan Teluk Dalam, Simeulue Cut dan Simeulue Timur Kab. Simeulue)	500.000.000	DKP
				Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur (Pengadaan Mesin Robin 13 Hp Merk Honda untuk Nelayan Kabupaten Simeulue)	200.000.000	DKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan (Pembangunan Jembatan Lala pada Ruas Jalan Nasreuhe - Lewak - Sibigo)	19.220.000.000	PUPR

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi (Pengawasan Pembangunan Jembatan Lala pada Ruas Jalan Nasreuhe - Lewak - Sibigo)	780.000.000	PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Pemeliharaan Rutin Operasional Pelabuhan Penyeberangan Sinabang)	100.000.000	DISHUB

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman (Pembangunan Drainase Perkotaan Lingkungan Perumahan Warga Desa Sinabang Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue)	328.000.000	PERKIM
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman (Pembangunan Drainase Perkotaan Lingkungan Perumahan Warga Lorong Nangka Desa Sinabang Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue)	246.000.000	PERKIM

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman (Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Karya Bakti Desa Sigulai Kec. Simeulue Barat Kab. Simeulue)	328.000.000	PERKIM
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman (Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman Ulul Umang Desa Labuan Bakti Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue)	328.000.000	PERKIM
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman (Pembangunan Jalan Lingkungan Teluk Nanas Desa Meunafa Kec. Salang Kab. Simeulue)	328.000.000	PERKIM

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman (Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue)	246.000.000	PERKIM
22	PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	591.353.232.457	DINKES
23	PRO-KESRA 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	520.000.000	TANBUN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	6.800.000.000	DISNAK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1.400.000.000	DISNAK
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	605.000.000	DKP
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.205.000.000	DKP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000.000	DKP
				Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.700.000.000	DKP

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	5.500.000.000	DKP
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	6.000.000.000	DINSOS
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.350.000.000	DINSOS
				Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000	DINSOS
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan dan Fasilitasi Koperasi	2.984.787.500	KOP UKM

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Pembinaan dan Fasilitasi Pemulihan Usaha	29.945.617.992	KOP UKM
				Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	3.251.588.871	KOP UKM
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	200.000.000	KOP UKM

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
			dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Start-Up	495.000.000	KOP UKM
				Pembinaan dan Fasilitasi Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri	3.173.976.000	KOP UKM
				Pembinaan dan Fasilitasi Wirausaha Tematik	831.024.000	KOP UKM
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	250.000.000	DLHK

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		BIDANG KEHUTANAN				
				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2.950.000.000	DLHK
			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.817.555.925	DLHK
				Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	650.000.000	DLHK
24	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	750.000.000	BPBA

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai (Normalisasi Sungai Kr. Cunda Kota Lhokseumawe (Lanjutan)	9.527.284.720	PENGAIRAN
				Normalisasi/Restorasi Sungai (Normalisasi Sungai Kr. Langsa Kota Langsa)	5.750.000.000	PENGAIRAN
				Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai (Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Lhok Puuk Kec. Seuneuddon Kab. Aceh Utara (Lanjutan))	4.750.000.000	PENGAIRAN
				Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai (Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Meuraksa Kec.	14.401.814.720	PENGAIRAN

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Blang Mangat Kota Lhokseumawe)		
				Pembangunan Tanggul Sungai (Pembangunan Bangunan Pengaman Tebing Sungai Kr. Kluet Gp. Gunung Pudung Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan)	7.989.823.092	PENGAIRAN
				Pembangunan Tanggul Sungai (Pembangunan Bangunan Pengaman Tebing Sungai Kr. Layan Kec. Tangse Kab. Pidie)	5.720.000.000	PENGAIRAN
				Pembangunan Tanggul Sungai (Pembangunan Tanggul dan Bangunan Pengaman Tebing Sungai Kr. Keureuto Kec.	5.720.000.000	PENGAIRAN

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Lhoksukonn Kab. Aceh Utara)		
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendung Irigasi (Rehabilitasi Free Intake D.I. Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan)	4.671.067.698	PENGAIRAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan (Pembangunan Jalan Batas Aceh Selatan - Kuala Baru - Singkil - Telaga Bakti)	20.000.000.000	PUPR
				Pembangunan Jembatan (Pembangunan Jembatan Dua Suak Balok pada Ruas Jalan Pulo Paya - Trumon - Batas Aceh Singkil)	5.425.000.000	PUPR

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	DUKUNGAN DAERAH 2027			Pagu (Rp.)	SKPA
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
				Pemeliharaan Berkala Jalan (Pemeliharaan Berkala Jalan Lipat Kajang - Telaga Bakti)	3.641.275.000	PUPR
				Rekonstruksi Jalan (Peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan - Rundeng)	5.895.266.400	PUPR
				Rekonstruksi Jalan (Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar - Tibang)	3.530.000.000	PUPR

Lebih detail terkait rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2027 dapat dilihat pada Buku 2 (dua) RKPA Tahun 2027 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran ini.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian capaian strategis yang dituangkan dalam bentuk indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan dapat dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dalam mengukur kinerja pemerintah daerah maka indikator kinerja mempunyai peranan yang sangat penting. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran dan program/kegiatan. Dengan informasi pencapaian indikator kinerja, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui prestasinya secara objektif dalam periode tertentu, sehingga setiap program dan kegiatan harus mempunyai indikator kinerja yang terukur dan konkrit untuk mengatasi permasalahan, isu strategis dan pencapaian visi misi pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Agar sasaran program dan kegiatan berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi pemerintah daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi target capaian indikator kinerja yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada RPJMA Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan IKU sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMA Tahun 2025-2029. Target capaian IKU Pemerintah Aceh Tahun 2027 secara rinci terdapat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Aceh Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,1 – 4,5	BAPPEDA
2	Rasio Gini	Indeks	0,274 - 0,284	BAPPEDA
3	Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5	BAPPEDA
4	Tingkat Kemiskinan	%	12,22 – 13,60	BAPPEDA
5	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,590	BAPPEDA
6	Peringkat Inovasi Daerah	Peringkat	12,2	BAPPEDA
7	Indeks Williamson	Indeks	0,389	BAPPEDA
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,45 – 5,50	NAKER
9	Indeks Pembangunan Syariat	Indeks	81,25 - 88,00	DSI
10	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	77,70-77,75	KESBANGPOL
11	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	74,46 - 74,71	KESBANGPOL
12	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	178,41	BPBA
13	Indeks Transformasi Digital	Indeks	51,36	KOMINSA
14	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	%	66,54	DLHK
15	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	46,31	DLHK
16	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,54	PANGAN
17	Persentase kesesuain pembangunan dengan tata ruang	%	74	PUPR
18	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,533	PORA
19	Persentase kajian Wali Nanggroe terhadap implementasi MoU Helsinki dan UUPA	%	90	KKW
20	Inklusi Keuangan	%	95,56	SETDA/RO EKO
21	Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB (ADHB)	%	28,23	SETDA/RO EKO
22	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83	SETDA/RO Organ

Sumber:
RPJMA 2025-2029

Sementara itu, penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. IKD meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat merupakan semua indikator yang berhubungan dengan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. IKD yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari: laju inflasi, indeks ketimpangan Williamson, angka usia harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka partisipasi angkatan kerja, pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, persentase penduduk diatas garis kemiskinan, indeks gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka melek huruf, persentase prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, persentase balita gizi buruk, prevalensi balita gizi kurang, cakupan desa siaga aktif, tingkat pengangguran terbuka dan lain-lain.
2. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, seperti: distribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran per kapita, nilai tukar petani, rasio Ekspor + Impor terhadap PDB, rasio ketergantungan, produktivitas total daerah, dan lain lain.
3. Aspek Pelayanan Umum menjelaskan kondisi dan perkembangan tentang urusan layanan wajib dan layanan pilihan yang meliputi berbagai indikator seperti angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran, proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (>40 km/jam), pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan dan lain lain.

Penetapan IKD terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut ini.

Tabel 7. 2
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Aceh Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
I	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Indeks Pengawasan Kearsipan	Indeks	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Rasio arsip yang dimanfaatkan	Rasio	0,7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	85	Badan Kepegawaian Aceh
4	Indeks Wakaf Nasional Aceh	Indeks	0,74	Sekretariat Baitul Mal Aceh
5	Indeks Zakat Nasional Aceh	Indeks	0,68	Sekretariat Baitul Mal Aceh
6	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	%	75	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
7	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
8	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	0,06	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	61	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10	Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA)	Indeks	55	Dinas Pendidikan Dayah
11	Persentase dayah yang mandiri	%	50,38	Dinas Pendidikan Dayah
12	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Jalan	Indeks	77,16	Dinas Perhubungan
13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan	Indeks	79,83	Dinas Perhubungan
14	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprenhensif	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Persentase Desa yang sudah menggunakan pelayanan administrasi Pemerintahan secara digital melalui SIGAP	%	46	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
16	Persentase lembaga kemasyarakatan gampong, adat dan lembaga lainnya yang aktif	%	47,5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks	90,2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRA	%	95	Sekretariat DPR Aceh
19	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	%	98,28	Dinas Registrasi Kependudukan
20	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	Dinas Registrasi Kependudukan
21	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	Dinas Registrasi Kependudukan
22	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	Dinas Registrasi Kependudukan
23	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	68,89	Dinas Registrasi Kependudukan
24	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	28,02	Dinas Registrasi Kependudukan
25	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	60	Dinas Registrasi Kependudukan
26	Persentase fasilitasi pelaku usaha dalam izin perdagangan	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27	Indeks Integritas Nasional	Indeks	72	Inspektorat
28	Maturitas SPIP terintegrasi	Level	3	Inspektorat
29	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	76,1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30	Persentase potensi konflik yang tertangani	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	50	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
32	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	81,5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
33	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
34	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	2,25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
35	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
36	Jumlah kebijakan yang dihasilkan dibandingkan dengan target atau kebutuhan kebijakan.	Rasio	1,6	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
37	Persentase penerapan kurikulum pendidikan islami dan ke-Aceh-an di kabupaten/kota	%	52,17	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
38	Persentase fatwa dan tausiyah yang telah ditetapkan untuk diterapkan	%	27,32	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
39	Persentase Fatwa dan Tausyiah yang ditetapkan	%	97	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
40	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	Perusahaan	2044	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
41	Persentase lapangan kerja Menurut Status Formal dan Informal	%	45,8 : 54,2	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
42	Persentase Pemenuhan Layanan Air Minum SPAM Lintas Kab/Kota	%	20,5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
43	Persentase pemenuhan penyelenggaraan drainase perkotaan	%	20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
44	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	22,54	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
45	Persentase kepatuhan pembangunan terhadap rencana tataruang	%	74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
46	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	%	85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	%	78	Rumah Sakit Ibu dan Anak
48	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	N/A	N/A	Rumah Sakit Jiwa
49	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	N/A	N/A	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
50	Persentase Peningkatan Kualitas Penyeleggaraan pembangunan	%	88	Sekretariat Daerah/Biro Administrasi Pembangunan
51	Persentase perumusan bahan kebijakan umum perekonomian yang ditindaklanjuti	%	99	Sekretariat Daerah/Biro Ekonomi
52	Indeks penyelesaian fasilitas perundang-undangan	%	85	Sekretariat Daerah/Biro Hukum
53	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	73,5	Sekretariat Daerah/Biro Hukum
54	Persentase penyelesaian bantuan hukum	%	85	Sekretariat Daerah/Biro Hukum
55	Nilai SAKIP	Nilai	68,5	Sekretariat Daerah/Biro Organisasi
56	Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi	%	89	Sekretariat Daerah/Biro Organisasi
57	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	83,25	Sekretariat Daerah/Biro Pengadaan Barang dan Jasa
58	Nilai LPPD	Skor	2,955	Sekretariat Daerah/Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
59	Persentase kerjasama daerah	%	55	Sekretariat Daerah/Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
60	Persentase segmen batas daerah yang dievaluasi	%	50	Sekretariat Daerah/Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
61	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,53	Sekretariat Daerah/Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
62	Terintegrasinya sistem informasi pertanahan di kabupaten/kota se Aceh	%	13,04	Dinas Pertanahan
63	Tersusunnya Mapping/Pemetaan Sengketa dan konflik tanah dan terfasilitasinya sengketa dan konflik tanah	%	85	Dinas Pertanahan
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
64	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,52	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
65	Indeks Reintegrasi Aceh	Indeks	0,2	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
66	Indek Tutupan Lahan (IKL)	Indeks	87,08	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
67	Indeks Keanekaragaman Hayati	%	0,599	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
68	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	77,77	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
69	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	86,96	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
70	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	83,27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
71	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	93,43	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
72	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0,599	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
73	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
74	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	%	13,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
75	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	%	2,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
76	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Indeks	63,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
77	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
78	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	68,6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
79	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	8,7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
80	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	85,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
81	Persentase penataan wilayah Mukim dan Gampong yang difasilitasi	%	20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
82	Indeks kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan syariat islam	%	85	Dinas Syariat Islam Aceh
83	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	kWh	779	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
84	Persentase dimensi toleransi	%	66	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
85	Persentase pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga Wali Nanggroe	%	90	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
86	Indeks Adat Istiadat Aceh	Indeks	0,3	Sekretariat Majelis Adat Aceh

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
87	Persentase kawasan transmigrasi berstatus mandiri	%	28,57	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
88	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	%	40,63	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
89	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	%	100	Dinas Pangan
90	Persentase Daerah Rawan Pangan	%	9,68	Dinas Pangan
91	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	84,79	Dinas Pangan
92	Kapasitas Air Baku	m3/detik	1,11	Dinas Pengairan
93	Indeks Ketahanan Air Daerah	Indeks	3,65	Dinas Pengairan
94	Persentase Pemenuhan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Regional	%	9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
95	Indek Pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	55	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
96	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban	%	95	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
97	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	%	63,35	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
98	Persentase legalisasi aset dan penataan akses hasil reforma agraria	%	11	Dinas Pertanahan
99	Persentase Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	Dokumen	2	Dinas Pertanahan
100	Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri	%	75	Dinas Pertanahan
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
101	Tingkat Kegemaran Membaca	Indeks	73,2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
102	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	%	0,51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
103	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)*	%	20,86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
104	Persentase korban konflik yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	15,43	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
105	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	%	16,11	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
106	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	%	1,97	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
107	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	57,69 - 57,74	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
108	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	94,13	Dinas Kesehatan Aceh
109	Angka Kematian Balita (AKBa)	/1.000 LH	7	Dinas Kesehatan Aceh
110	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 LH	72	Dinas Kesehatan Aceh
111	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	43,6	Dinas Kesehatan Aceh
112	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	99,5	Dinas Kesehatan Aceh
113	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	74	Dinas Kesehatan Aceh
114	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	55	Dinas Kesehatan Aceh
115	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	13	Dinas Kesehatan Aceh
116	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Luar Biasa	%	100	Dinas Kesehatan Aceh

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
117	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	%	100	Dinas Kesehatan Aceh
118	Persentase RS Regional yang Fungsional	%	40	Dinas Kesehatan Aceh
119	Prevalensi Stunting	%	24	Dinas Kesehatan Aceh
120	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita	%	9,5	Dinas Kesehatan Aceh
121	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%	60	Dinas Kesehatan Aceh
122	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	%	31,92	Dinas Sosial
123	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	30,92	Dinas Sosial
124	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0,575	Dinas Sosial
125	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	%	60,29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
126	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	13,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
127	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	10,55 - 10,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
128	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,88 - 14,89	Dinas Pendidikan
129	Iklim Inklusivitas SMK	Nilai	58	Dinas Pendidikan
130	Indeks Distribusi Guru SDLB	Nilai	0,41	Dinas Pendidikan
131	Indeks Distribusi Guru SMA	Nilai	0,66	Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
132	Indeks Distribusi Guru SMALB	Nilai	0,41	Dinas Pendidikan
133	Indeks Distribusi Guru SMK	Nilai	0,68	Dinas Pendidikan
134	Indeks Distribusi Guru SMPLB	Nilai	0,41	Dinas Pendidikan
135	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB	Nilai	83	Dinas Pendidikan
136	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA	Nilai	74	Dinas Pendidikan
137	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB	Nilai	83	Dinas Pendidikan
138	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK	Nilai	74	Dinas Pendidikan
139	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB	Nilai	77	Dinas Pendidikan
140	Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	Indeks	80	Dinas Pendidikan
141	Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	Indeks	74	Dinas Pendidikan
142	Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	Indeks	76	Dinas Pendidikan
143	Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	Indeks	73	Dinas Pendidikan
144	Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	Indeks	78	Dinas Pendidikan
145	Indeks Inklusivitas SDLB	Nilai	79	Dinas Pendidikan
146	Indeks Inklusivitas SMA	Nilai	63	Dinas Pendidikan
147	Indeks Inklusivitas SMALB	Nilai	75	Dinas Pendidikan
148	Indeks Inklusivitas SMPLB	Nilai	91	Dinas Pendidikan
149	Indeks Literasi SDLB	%	94	Dinas Pendidikan
150	Indeks Literasi SMA	%	76	Dinas Pendidikan
151	Indeks Literasi SMALB	%	88	Dinas Pendidikan
152	Indeks Literasi SMK	%	63	Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
153	Indeks Literasi SMPLB	%	91	Dinas Pendidikan
154	Indeks Numerasi SDLB	%	86	Dinas Pendidikan
155	Indeks Numerasi SMA	%	81	Dinas Pendidikan
156	Indeks Numerasi SMALB	%	88	Dinas Pendidikan
157	Indeks Numerasi SMK	%	62	Dinas Pendidikan
158	Indeks Numerasi SMPLB	%	89	Dinas Pendidikan
159	Kepuasan Dunia Kerja terhadap Kompetensi Lulusan SMK	%	90	Dinas Pendidikan
160	Kualitas Pembelajaran SDLB	Nilai	74	Dinas Pendidikan
161	Kualitas Pembelajaran SMK	Nilai	67	Dinas Pendidikan
162	Kualitas Pendidikan (SPM)	%	75,67	Dinas Pendidikan
163	Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitias, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter.	Nilai	64,14	Dinas Pendidikan
164	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	10,50 - 15,00	Dinas Pendidikan
165	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	2,00 - 4,00	Dinas Pendidikan
166	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen	%	33,00 - 35,00	Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
	tingkat nasional untuk Literasi Membaca			
167	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	28,50 - 30,50	Dinas Pendidikan
168	Rasio Konektivitas	Rasio	0,71	Dinas Perhubungan
169	Indek Terima Peternak (ItPt)	Indeks	106,66	Dinas Peternakan
170	Pertumbuhan Produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas)	Ton	12.670	Dinas Peternakan
171	Pertumbuhan produksi telur (ayam, itik, puyuh)	Ton	564.655	Dinas Peternakan
172	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	92.500	Dinas Kelautan dan Perikanan
173	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	276.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
174	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	%	5,72	Dinas Kelautan dan Perikanan
175	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,43	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
176	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	67,15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
177	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	72,34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
178	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	76,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
179	Persentase kabupaten kota menuju layak anak (KLA)	%	86,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
180	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	%	24,06	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
181	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	66,7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
182	Indeks Harga Konsumen	%	109	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
183	Persentase penanganan potensi konflik sosial	%	82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
184	Persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan	%	40,63	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
185	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	46,75	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
186	Persentase gerakan kepramukaan yang aktif	%	96	Dinas Pemuda dan Olahraga
187	Persentase pembinaan olahraga	%	60,6	Dinas Pemuda dan Olahraga
188	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71	Rumah Sakit Ibu dan Anak
189	Persentase pemanfaatan lahan terlantar	%	17,32	Dinas Pertanahan
190	Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	KEP	60	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
191	Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Ton/Ha	5,57	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
192	Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	%	43	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
IV	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
193	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
195	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
197	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	Nilai	2.549.810	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
199	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	%	70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
201	Total Kredit/PDRB (%)	%	20,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
203	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	%	1,1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
205	Presentase Dana untuk Inovasi dari APBA	%	0,63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
207	Persentase kemandirian fiskal Aceh	%	27,8	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
209	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	1,14	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
211	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	Ribu Orang	13,3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
213	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ke museum	%	0,5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
215	Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan nusantara	%	21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
217	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	0,91	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
219	PDRB per kapita (Rp Juta)	Rp Juta	49,5 – 54,0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
221	Luas Kawasan Konservasi (Ha)	Ha	149.691	Dinas Kelautan dan Perikanan
223	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	108,34	Dinas Kelautan dan Perikanan
225	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	%	22,5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
227	Persentase Desa Mandiri	%	1,36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
229	Persentase pembinaan kerjasama gampong berbasis kawasan perdesaan	%	20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
231	Persentase Peningkatan BUMG Maju	%	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
233	Nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)	Rp Trilliun	10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
235	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	% PDRB	33,10 - 33,43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
237	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	SBM/Rp milyar	106	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
239	Persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	4,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
241	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	%	12,79	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
243	Rasio Elektrifikasi	%	99,72	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
245	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	% PDRB	65,43-66.09	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
247	Jumlah produk tersertifikasi halal	Produk	42703	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
249	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi	%	6,81	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
251	Nilai Ekspor bersih Aceh	USD	247.958.493	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
253	Persentase peningkatan ekspor	%	4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
255	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	%	0,62	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
257	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	5,05	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
259	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	3,87	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
261	Persentase Koperasi Sehat	%	40	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
263	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	%	1,15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
265	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	0,42	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
267	Rasio Kewirausahaan	Rasio	4,04	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
269	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	0,81	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
271	Proporsi UMKM terhadap jumlah angkatan kerja (%) (sebagai proxy proporsi PDRB ekonomi kreatif)	%	16,54	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
273	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%)	%	7,49	Dinas Pangan
275	Persentase irigasi modern	%	68,69	Dinas Pengairan
277	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	56,83	Dinas Pengairan
279	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	%	72,44	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
281	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	66	Dinas Pemuda dan Olahraga
283	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	81,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
285	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	2,29	Sekretariat Daerah/Biro Ekonomi
287	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	Indeks	121,81	Dinas Pertanian Dan Perkebunan

Sumber:
RPJMA 2025-2029

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK digunakan untuk menilai kinerja pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun dalam pelaksanaan masing-

masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. Target IKK Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 7.3 berikut.

Tabel 7. 3
Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1	Akreditasi Sekolah SLB	%	85	Dinas Pendidikan
2	Akreditasi Sekolah SMA	%	94	Dinas Pendidikan
3	Akreditasi Sekolah SMK	%	98	Dinas Pendidikan
4	Kualitas Pembelajaran SMA	Nilai	67	Dinas Pendidikan
5	Kualitas Pembelajaran SMALB	Nilai	75	Dinas Pendidikan
6	Kualitas Pembelajaran SMPLB	Nilai	71	Dinas Pendidikan
7	Penyerapan Lulusan SMK	%	91	Dinas Pendidikan
8	Proporsi PTK bersertifikat SDLB	%	51	Dinas Pendidikan
9	Proporsi PTK bersertifikat SMA	%	80	Dinas Pendidikan
10	Proporsi PTK bersertifikat SMALB	%	51	Dinas Pendidikan
11	Proporsi PTK bersertifikat SMK	%	74	Dinas Pendidikan
12	Proporsi PTK bersertifikat SMPLB	%	51	Dinas Pendidikan
1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
13	Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM kesehatan yang standar	%	34	Dinas Kesehatan Aceh
1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
14	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	3,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
15	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan Regional	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
16	Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	%	69,38	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
17	Persentase perumahan yang teridentifikasi di lokasi berpotensi relokasi dan di lokasi rawan bencana	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
18	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak	%	71,56	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	%	81,5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
20	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21	Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	Persentase penegakan peraturan daerah	%	39	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
24	Persentase penyelesaian pelanggaran qanun syariat islam dan kebijakan kepala daerah	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
25	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban	%	90	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
26	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	81	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
27	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (KTK)Dalam & Luar Negeri yang mendapatkan layanan pemulangan.	%	100	Dinas Sosial
28	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	%	100	Dinas Sosial
29	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	%	100	Dinas Sosial
30	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dan Kemiskinan	%	32,92	Dinas Sosial
31	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	Dinas Sosial
32	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100	Dinas Sosial
33	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	%	100	Dinas Sosial
34	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	68,7	Dinas Sosial
35	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	%	93,51	Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
36	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	%	68,7	Dinas Sosial
37	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	%	68,7	Dinas Sosial
38	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	%	68,7	Dinas Sosial
39	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	%	100	Dinas Sosial
40	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	%	100	Dinas Sosial
41	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	68,7	Dinas Sosial
42	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) yang terkelola dengan baik.	%	90,53	Dinas Sosial
2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
43	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	78,39	Dinas Tenaga Kerja dan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
				Mobilitas Penduduk
44	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	%	34,94	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
45	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Pemerintah	Perusahaan	329	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
46	Persentase Angkatan Kerja yang bekerja	%	94,78	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
47	Persentase tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi melalui pelatihan dan pemagangan yang ditempatkan	%	47,3	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
48	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	%	70,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
49	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
50	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA	%	11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
51	Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan kualitas keluarga	%	25,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
52	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	50,88 - 53,22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
53	Tingkat pemahaman data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	%	13,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
54	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	95	Dinas Pangan
2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
55	Meningkatnya Kertesediaan Kepemilikan Lahan Untuk Fasilitas Publik dan Tanah Masyarakat Miskin	Persil	400	Dinas Pertanahan
56	Persentase penyelesaian pemetaan pertanahan	%	11	Dinas Pertanahan
57	Persentase Sengketa dan konflik tanah ulayat lintas kab/kota yang diselesaikan	%	10,53	Dinas Pertanahan
2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
58	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	56,5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
59	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Ton	7860	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
60	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah	6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
61	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup	%	35	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
62	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
63	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensi	%	50	Dinas Lingkungan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
				Hidup dan Kehutanan
64	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	80	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
65	Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	% RT	31,75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
66	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	Dinas Registrasi Kependudukan
2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
67	Persentase Masyarakat Berkeselamatan di Daerah Perlintasan Sebidang Kereta Api dengan Jalan Provinsi	%	25	Dinas Perhubungan
2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
68	Jumlah Koperasi meningkat kapasitas produksinya	Koperasi	4	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
69	Jumlah Koperasi yang Meningkat Kapasitas SDM	Koperasi	250	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
70	Meningkatnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam Penyampaian LKPM	%	10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
71	Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi	Perusahaan	300	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
72	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dapat di akses	%	100	Dinas Penanaman Modal dan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
				Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
73	Persentase pemuda yang dibina	%	0,05	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
74	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	6,56	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
75	Persentase masyarakat penerima akses informasi sejarah	%	8,77	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
76	persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	62,89	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
77	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	75,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
78	Rasio Naskah Kuno	Rasio	0,07	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
79	Tingkat Digitalisasi Arsip	Indeks	95	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
80	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Kg/Kapita/Tahun	59,65	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
81	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	31,51	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
82	Persentase Keberhasilan Panen	%	95,4	Dinas Pertanian Dan Perkebunan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
83	Persentase Perusahaan Berizin yang dibina	%	95	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
84	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Bakteri yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak	%	0,1	Dinas Peternakan
85	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Parasit yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak	%	7,08	Dinas Peternakan
86	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Virus yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak	%	6,48	Dinas Peternakan
3.28. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
87	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
88	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
89	Persentase Peningkatan Kelompok Petani Hutan	%	10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
90	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	0,7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
91	Rehalibitasi lahan di sempadan sungai	Hektare	15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.29. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
92	Luas Wilayah Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Km2	7053	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
93	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik	%	21,38	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
94	Menjamin ketersediaan stok bapokting dan keterjangkauan harga	%	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
95	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
96	Persentase jumlah izin yang dikeluarkan	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
97	Persentase kepatuhan pelaporan informasi industri	%	90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
98	Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi Berizin	%	1,31	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
99	Proporsi penggunaan produk lokal dalam promosi yang difasilitasi (%)	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
100	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	%	40,63	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
4.01. SEKRETARIAT DAERAH				
101	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	75	Sekretariat Daerah/Biro Keistimewaan dan Kesejahteraaan Rakyat
5.01. PERENCANAAN				
102	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
	Infrastruktur dan Kewilayahan			
103	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
104	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Perekonomian dan SDA	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
105	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02. KEUANGAN				
106	Indeks kualitas pelayanan keuangan	Skor	3,5	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
107	Persentase Peningkatan kualitas laporan keuangan	%	90.82	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
5.03. KEPEGAWAIAN				
108	Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPA	%	98	Badan Kepegawaian Aceh
5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
109	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal	Orang	175	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
110	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	3,3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
111	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	%	40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
112	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.01. INSPEKTORAT DAERAH				
113	Aparatur yang memenuhi kompetensi	Level	3	Inspektorat
114	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	%	83,5	Inspektorat
8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
115	Jumlah LSM/ORMAS yang terdaftar	LSM/ORMAS	20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
116	Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	%	46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
117	Persentase masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka Pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	%	55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
118	Persentase Masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas pendidikan politik	%	23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.01. KEKHUSUSAN ACEH				
119	Indeks kompetensi kurikulum dayah	Indeks	73,03	Dinas Pendidikan Dayah
120	Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	Indeks	92	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
121	Persentase kelengkapan sarana belajar mengajar	%	68,69	Dinas Pendidikan Dayah

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
122	Persentase kompetensi tenaga pengajar/teungku dayah	%	71,66	Dinas Pendidikan Dayah
123	Persentase korban pelanggaran HAM yang direkomendasikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh	%	22,49	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
124	Persentase mesjid yang tertata manajemen dan kemakmurannya	%	85	Dinas Syariat Islam Aceh
125	Persentase Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya	%	91	Sekretariat Baitul Mal Aceh

Sumber: RPJMA Tahun 2025-2029

Pasal 258 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah menyatakan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Selanjutnya, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. Oleh karena itu, pencapaian target pembangunan nasional tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka target pembangunan nasional harus dibagi ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

Sinkronisasi dan harmonisasi untuk pencapaian target Pembangunan Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal diatas dilakukan melalui koordinasi teknis pembangunan antara Kementerian atau Lembaga pemerintahan nonkementerian dan daerah melalui Forum Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (RAKORTEKRENBANG). Pelaksanaan RAKORTEKRENBANG Nasional Tahun 2026 dilaksanakan dengan tujuan membahas dukungan RKPD/Renja OPD terhadap Astacita, Outcome Urusan Pemerintahan Daerah serta Program Strategis Nasional (ProSN) sebagai bagian integral dalam Pembangunan nasional serta sebagai forum diskusi pemetaan dan penyepakatan capaian dan target daerah yang menjadi bahan masukan terhadap skema prioritas pembiayaan didalam RKPD/Renja OPD dan RKP/Renja K/L. Berdasarkan hasil desk urusan pemerintahan pada Rakortekrenbangnas tahun 2026 diperoleh kesepakatan target indikator urusan pemerintahan tahun 2027 sebagaimana terdapat pada Tabel 7.4 berikut.

Tabel 7. 4
Target Indikator Outcome Prioritas Astacita dan ProSN Tahun 2027

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
III.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
3.1	**LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR**			
3.1.1.	**PENDIDIKAN**			
3.1.1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	n/a	DISDIK
3.1.1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	n/a	DISDIK
3.1.1.3	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.4	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	%	n/a	DISDIK
3.1.1.5	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.6	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.7	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.8	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.9	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.10	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.11	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.12	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	n/a	DISDIK

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
3.1.1.13	Rata-rata kompetensi NumerasiSMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.14	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	n/a	DISDIK
3.1.1.15	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	%	n/a	DISDIK
3.1.1.16	Iklim keamanan SMA	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.17	Iklim keamanan SMK	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.18	Iklim keamanan SDLB	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.19	Iklim keamanan SMPLB	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.20	Iklim keamanan SMALB	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.21	Iklim kebinekaan SMA	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.22	Iklim kebinekaan SMK	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.23	Iklim kebinekaan SDLB	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.24	Iklim kebinekaan SMPLB	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.25	Iklim kebinekaan SMALB	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.26	Iklim Inklusivitas SMA	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.27	Iklim Inklusivitas SMK	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.28	Iklim Inklusivitas SDLB	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.29	Iklim Inklusivitas SMPLB	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.1.30	Iklim Inklusivitas SMALB	Nilai	n/a	DISDIK
3.1.2.	**KESEHATAN**			
3.1.2.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	72	DINKES
3.1.2.2	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	n/a	DINKES
3.1.2.3	Penemuan Kasus TBC	%	n/a	DINKES
3.1.2.4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	n/a	DINKES
3.1.2.5	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	%	96	DINKES
3.1.2.6	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	%	n/a	DINKES
3.1.3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
3.1.3.1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	n/a	PERKIM

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
3.1.3.2	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	n/a	PERKIM
3.1.3.3	Persentase kondisi mantap jalan	%	n/a	PUPR
3.1.3.4	Jumlah Luas Kawasan yang terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha)	Ha	n/a	PENGAIRAN
3.1.5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
3.1.5.1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	n/a	BPBA
3.1.5.2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	n/a	BPBA
3.1.6	**SOSIAL**			
3.1.6.1	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	n/a	DINSOS
3.1.6.2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	n/a	DINSOS
3.1.6.3	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	n/a	DINSOS
3.1.6.4	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasidari Kemiskinan	%	n/a	DINSOS
3.1.6.5	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	n/a	DINSOS
3.1.6.6	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	n/a	DINSOS
3.2	**LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR**			
3.2.1	**TENAGA KERJA**			
3.2.1.1	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	20.000	NAKERMOBDUK

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
3.2.1.2	Jumlah lulusan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan kerja swasta dan /atau OPD	Orang	400	NAKERMOBDUK
3.2.1.3	Peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja	Orang	27.212	NAKERMOBDUK
3.2.2	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**			
3.2.2.1	Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "Sangat Baik	Daerah		DRKA
3.2.3	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
3.2.3.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	n/a	DP3A
3.2.3.2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	n/a	DP3A
3.2.4	**PANGAN**			
3.2.4.1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	indeks	72,5	PANGAN
3.2.4.2	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan ketentuan yang berlaku	%	50	PANGAN
3.2.5	**TANAH**			
3.2.5.1	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang tanah	12.500	TANAH
3.2.5.2	Jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria	Kepala keluarga	10.800	TANAH
3.2.6	**LINGKUNGAN HIDUP**			
3.2.6.1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi	%	n/a	DLHK
3.2.6.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	n/a	DLHK
3.2.8	**PERHUBUNGAN**			
3.2.8.1	Tingkat Keselamatan Transportasi di Daerah	%	65,74	DISHUB

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
3.2.8.2	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi di Daerah	Rasio	0,70	DISHUB
3.2.9	**KOMUNIKASI DAN INFORMASI**			
3.2.9.1	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Nilai	73	KOMINSA
3.2.9.2	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Nilai	1,8	KOMINSA
3.2.10	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**			
3.2.10.1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,44	KOP UKM
3.2.10.2	Rasio Kewirausahaan	%	4,20	KOP UKM
3.2.11	**PENANAMAN MODAL**			
3.2.11.1	Nilai realisasi penanaman modal	triliun rupiah	10	DPMPTSP
3.2.12	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			
3.2.12.1	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	66	PORA
3.2.12.2	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	Persentase	75	PORA
3.2.13	**STATISTIK**			
3.2.13.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,3	KOMINSA
3.2.14	**PERSANDIAN**			
3.2.14.1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	66,6	KOMINSA
3.2.15	**PERPUSTAKAAN**			
3.2.15.1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	n/a	ARPUS
3.2.15.2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	n/a	ARPUS
3.3	**LAYANAN URUSAN PILIHAN**			
3.3.1	**PARIWISATA**			
3.3.1.1	Rasio PDB Pariwisata	%	1,78	BUDPAR
3.3.1.2	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	0,54	BUDPAR
3.3.2	**PERTANIAN**			

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
3.3.2.1	Jumlah Produksi Padi	Ton	1.680.000	TANBUN
3.3.2.2	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	202.172,08	TANBUN
3.3.3	**KEHUTANAN**			
3.3.3.1	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Rp	7 Miliar	DLHK
3.3.3.2	Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis	Ha	800	DLHK
3.3.4	**ENERGI DAN SDM**			
3.3.4.1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	12,79	ESDM
3.3.4.2	Rasio Elektrifikasi	%	99,72	ESDM
3.3.5	**PERDAGANGAN**			
3.3.5.1	Nilai Ekspor Barang di Provinsi	SBM/Milyar Rupiah	19.187	INDAG
3.3.5.2	Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Provinsi	Rp. Juta Per Tahun	15,64	INDAG
3.3.6	**PERINDUSTRIAN**			
3.3.6.1	Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	4	INDAG
3.3.6.2	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Nonmigas	%	4	INDAG
3.3.7	**TRANSMIGRASI**			
3.3.7.1	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persentase	80	NAKERMOBDUK
3.3.8	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
3.3.8.1	Produksi Perikanan Budidaya	ton	92,500	DKP
3.3.8.2	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	71,05	DKP
3.3.8.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan	Miliar Rupiah	n/a	DKP
3.3.9	**KEARSIPAN**			
3.3.9.1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	n/a	ARPUS
3.3.10	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target 2027	SKPA
1	2	3	4	5
3.3.10.1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	84,90	KESBANGPOL
3.3.10.2	Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks	70,00	KESBANGPOL
3.3.11	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
3.3.11.1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	n/a	BPBA
3.3.11.2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	n/a	BPBA
3.3.12	**KEBUDAYAAN**			
3.3.12.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	n/a	DISBUDPAR
3.3.12.2	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	n/a	DISBUDPAR
3.3.14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
3.3.14.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	n/a	DP3A
3.3.14.2	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	n/a	DP3A

Sumber:
Berita Acara Kesepakatan (BAK) Hasil Desk Urusan Pemerintahan RAKORTEKRENBANGNAS Tahun 2026

Keterangan:
n/a : Kesepakatan target indikator outcome tidak tercantum dalam BAK Desk Urusan Rakortekrenbangnas Tahun 2027, sehingga target indikator outcome mengacu pada RPJMA Tahun 2025-2029.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah mengingat RKPD menjadi dokumen tahunan yang menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara operasional. Selain itu, RKPD juga memiliki peran penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar sektor pembangunan sehingga terciptanya harmonisasi kebijakan dan integrasi program yang berkelanjutan.

Berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh tahun 2027 sebagaimana yang terdapat dalam RPJMA Tahun 2025-2029 dan tema RKP Tahun 2027 serta Arah Kebijakan Pembangunan yang mengacu pada dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun 2026-2028 melalui prinsip *Build Back Better, Safer and Sustainable*, maka tema RKPA tahun 2027 adalah " Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan Yang Tangguh dan Berkelanjutan" dengan fokus utama meliputi (1) Pertumbuhan Ekonomi Yang Tangguh dan Berkelanjutan (2) Penurunan Kemiskinan (3) Penciptaan Lapangan Kerja (4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi, (5) Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah. Selain itu, RKPA Tahun 2027 juga difokuskan pada pemulihan wilayah pascabencana yang diarahkan pada pembangunan kembali wilayah yang terdampak bencana secara yang lebih aman dan tangguh serta berkelanjutan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, permukiman, sosial, ekonomi dan fasilitas publik serta perlindungan lingkungan hidup dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengacu pada dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh Tahun 2026-2028.

RKPA tahun 2027 merupakan pedoman bagi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2027; menjadi dokumen operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi seluruh SKPA tahun 2027; pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SKPA tahun 2027; pedoman penyelarasan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan Aceh dan kabupaten/kota pada RKPD Kabupaten/Kota tahun 2027; sebagai dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KUA-APBA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) tahun 2027; serta menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh tahun 2027. Untuk percepatan pencapaian target indikator kinerja RKPA tahun 2027 maka diperlukan sinergitas dan

peranserta seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya Aceh yang Islami, Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan.

8.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan untuk keberlanjutan pembangunan mengingat tahun 2027 merupakan tahun transisi menuju berakhirnya Dana Otonomi Aceh yang dampak terhadap kapasitas APBA Tahun 2028. Pedoman ini menjadi acuan agar pelaksanaan pembangunan tetap berkesinambungan dan mampu mengantisipasi perubahan kebijakan nasional maupun kondisi fiskal daerah. Adapun pedoman transisi dalam RKPA Tahun 2027 meliputi sebagai berikut:

a. Menjaga kesinambungan pembangunan, dimana RKPA Tahun 2027 menjadi jembatan antara capaian pembangunan periode sebelumnya dengan pelaksanaan RPJMA Tahun 2025-2029 sehingga seluruh SKPA wajib memastikan setiap program prioritas yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat tetap berlanjut, dengan tetap melakukan penyempurnaan sesuai arah kebijakan pembangunan terbaru;
b. RKPA Tahun 2027 harus selaras dengan arah kebijakan RKP Tahun 2027, RPJMA Tahun 2025-2029 dan Program Prioritas Nasional;
c. Mempertimbangkan semakin berkurangnya ketergantungan terhadap TKD, Pemerintah Aceh perlu melakukan transformasi fiskal melalui: (i) optimalisasi Pendapatan Asli Aceh; (ii) peningkatan kinerja BUMD; (iii) optimalisasi pengelolaan aset daerah; (iv) perluasan kerja sama pembiayaan pembangunan; dan (v) peningkatan efisiensi belanja daerah;
d. SKPA diarahkan untuk (i) memprioritaskan belanja yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat; (ii) mengurangi belanja yang kurang produktif; (iii) memperbesar proporsi belanja modal dan belanja yang mendukung pertumbuhan ekonomi; (iv) memastikan setiap program memiliki indikator kinerja yang terukur;
e. Pelaksanaan RKPA Tahun 2027 dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran pembangunan;
f. Pelaksanaan pembangunan harus mampu mengantisipasi risiko yang berasal dari (i) perlambatan ekonomi global; (ii) perubahan iklim; (iii) bencana hidrometeorologi; (iv) fluktuasi harga komoditas; dan (v) perubahan kebijakan fiskal nasional. Oleh karena itu, setiap SKPA perlu menerapkan manajemen risiko dalam penyusunan dan pelaksanaan program;
g. Pelaksanaan RKPA Tahun 2027 dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap (i) realisasi fisik dan keuangan; (ii) pencapaian indikator kinerja; (iii) efektivitas belanja; (iv) kualitas pelayanan publik; dan (iv) dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat;

Oleh karena itu, pelaksanaan RKPA Tahun 2027 harus diarahkan pada penguatan kapasitas fiskal, peningkatan kualitas belanja daerah, pengembangan sektor-sektor unggulan, percepatan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga pembangunan Aceh tetap berkelanjutan meskipun menghadapi perubahan struktur pendapatan daerah.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan RKPD disusun agar pelaksanaan pembangunan berlangsung efektif, efisien, akuntabel, dan selaras dengan sasaran pembangunan nasional maupun daerah. Adapun kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2027 adalah meliputi sebagai berikut:

a. Menjaga konsistensi pelaksanaan program prioritas RPJMA Tahun 2025-2029 dan RKPA Tahun 2027;
b. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebagai langkah transformasi fiskal menjelang berakhirnya Dana Otonomi Khusus;
c. Meningkatkan kualitas belanja agar lebih produktif dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan daya saing daerah;
d. Memperkuat sinergitas dan integrasi lintas sektor dan lintas kewenangan Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat;
e. Mengintegrasikan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan ke dalam seluruh sektor Pembangunan.

GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH
2026